LAPORAN TAHUNAN

2023

bank btpn

A MEMBER OF SMBC Group



IMPACTING MILLIONS OF LIVES

PT BANK BTPN Tbk

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Untuk penyajian Laporan Tahunan 2023 yang lebih baik, apabila dianggap perlu, kami akan mengunggah kembali Laporan Tahunan 2023, pada 7 Maret 2024.

IMPACTING MILLIONS OF LIVES

Tema laporan tahun 2023 ini keluar dari pola di laporan tahun-tahun sebelumnya (sejak 2018) yang menggambarkan perkembangan Bank BTPN, mulai dari merger sampai dengan perjuangan melewati krisis COVID-19.

Sebagai penyegaran, laporan tahun 2023 ini berangkat dari perspektif nasabah pengguna jasa Bank BTPN maupun komunitas/ masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yaitu dengan memberikan fokus pada aspirasi Bank BTPN untuk Menjadi Penyedia Kelas Atas dalam Layanan Lengkap Solusi Finansial di Indonesia, yang menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen ritel, mikro, UKM, dan korporat bisnis di Indonesia demi mewujudkan visi untuk menjadi bank pilihan utama di Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang.

DAFTAR ISI

4 Memperluas Basis Nasabah Ritel
5 Meningkatkan Kapabilitas Platform Jenius
6 Mempertahankan *Operation Excellence*
7 Menjaga Kualitas Portofolio Kredit

01 IKHTISAR UTAMA

12 Ikhtisar Keuangan
16 Ikhtisar Saham
17 Aksi Korporasi
17 Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham
18 Penerbitan Obligasi dan Sukuk
18 Ikhtisar Obligasi dan Sukuk
20 Peristiwa Penting 2023
25 Penghargaan & Sertifikasi

02 LAPORAN MANAJEMEN

33 Laporan Dewan Komisaris
38 Dewan Komisaris
41 Laporan Direksi
50 Direksi
52 *Board of Management*
54 Pejabat Eksekutif
56 Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT BANK BTPN Tbk

03 PROFIL PERUSAHAAN

60 Informasi Umum Perusahaan
61 Riwayat Singkat Perusahaan
62 Jejak Langkah
64 Bidang Usaha
65 Produk dan Layanan
66 Struktur Organisasi
68 Visi Misi
69 Nilai-Nilai Utama
70 Profil Dewan Komisaris
76 Profil Direksi
84 Profil Pejabat Eksekutif
88 Statistik Karyawan
90 Pemegang Saham Utama dan Pengendali
91 Entitas Induk Terakhir
92 Pemegang Saham Utama
95 Daftar Entitas Anak
96 Wilayah Operasional
99 Keanggotaan pada Asosiasi
99 Kronologi Pencatatan Saham
100 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
100 Kantor Akuntan Publik
101 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal
102 Informasi pada *Website* Perusahaan

04 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

106 Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan
106 Tinjauan Ekonomi
107 Tinjauan Industri Perbankan
108 Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha
108 Retail Banking
110 Jenius
112 Retail Lending Business
116 Wealth Management Business
117 Business Banking
118 Corporate Banking
119 Penghimpunan Dana
120 Pembiayaan
120 Trade Finance
121 Cash Management
121 Foreign Exchange
122 Treasury
123 Perbankan Syariah
126 Profitabilitas Per Segmen Usaha

128 Tinjauan Kinerja Keuangan
128 Neraca Keuangan
133 Kinerja Laba Rugi
134 Arus Kas
134 Kemampuan Membayar Utang
135 Suku Bunga Dasar Kredit
135 Struktur Modal
136 Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
137 Realisasi Investasi Barang Modal
137 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan
137 Target, Realisasi, dan Proyeksi
138 Prospek Usaha
139 Dividen
139 Kompensasi Jangka Panjang: Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen
139 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
140 Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
142 Informasi Material Transaksi Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal
142 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan
143 Perubahan Kebijakan Akuntansi
143 Ketaatan Sebagai Wajib Pajak
144 Aspek Pemasaran
144 Strategi Pemasaran
145 Pangsa Pasar

05 MANAJEMEN RISIKO

148 Kebijakan Manajemen Risiko
149 Tata Kelola Manajemen Risiko
149 Organisasi Manajemen Risiko
150 Uraian Penerapan Manajemen Risiko
152 Tinjauan/*Review* atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko
152 Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Manajemen Risiko
153 Sistem Pengendalian Internal
154 Pengungkapan Permodalan
171 Pengungkapan Eksposur Risiko

06 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

230 Pengembangan Sumber Daya Manusia
236 Teknologi Informasi dan Operasional

07 TATA KELOLA PERUSAHAAN

247 Prinsip Penerapan GCG
248 Dasar Hukum Pelaksanaan
249 Tujuan Penerapan GCG
250 Struktur GCG
251 Penerapan dan Komitmen GCG
259 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
272 Pemegang Saham Utama dan Pengendali
273 Dewan Komisaris
280 Direksi
288 Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi
302 Komite Di Bawah Dewan Komisaris
320 Komite Di Bawah Direksi
336 Sekretaris Perusahaan
342 Fungsi Kepatuhan
346 *Internal Fraud*
350 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik
350 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank
351 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Besar
352 Audit Eksternal
353 Satuan Kerja Audit Internal
359 Sistem Pengendalian Intern (SPI)
362 Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi
362 Sanksi Administrasi
363 Akses Informasi dan Data Perusahaan
364 Kode Etik
366 *Price Sensitive Information Personal Account Dealing*
366 Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
367 Sistem Pelaporan Pelanggaran
368 Kebijakan Antikorupsi dan Penyuapan
369 Keterbukaan dalam Praktik *Bad Governance*

08 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

372 Ikhtisar Keberlanjutan

374 **Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional**
381 **Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Tahun Buku 2023**

MEMPERLUAS BASIS NASABAH RITEL

Nasabah *Micro Business*

13.935 Nasabah

Pada tahun 2023, jumlah nasabah *micro business* mencapai 13.935 nasabah, lebih tinggi 16,64% dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 11.947 nasabah.

Penyaluran Pinjaman

75,77%

Penyaluran pinjaman di lini micro business sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1, triliun, naik 75,77% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp743,1 miliar.

Nasabah *Wealth Management Business*

137.248 Nasabah

Pada tahun 2023, nasabah *wealth management business* tumbuh 2,5%, sehingga menjadi 137.248 dari tahun sebelumnya yang 133.880 unit.

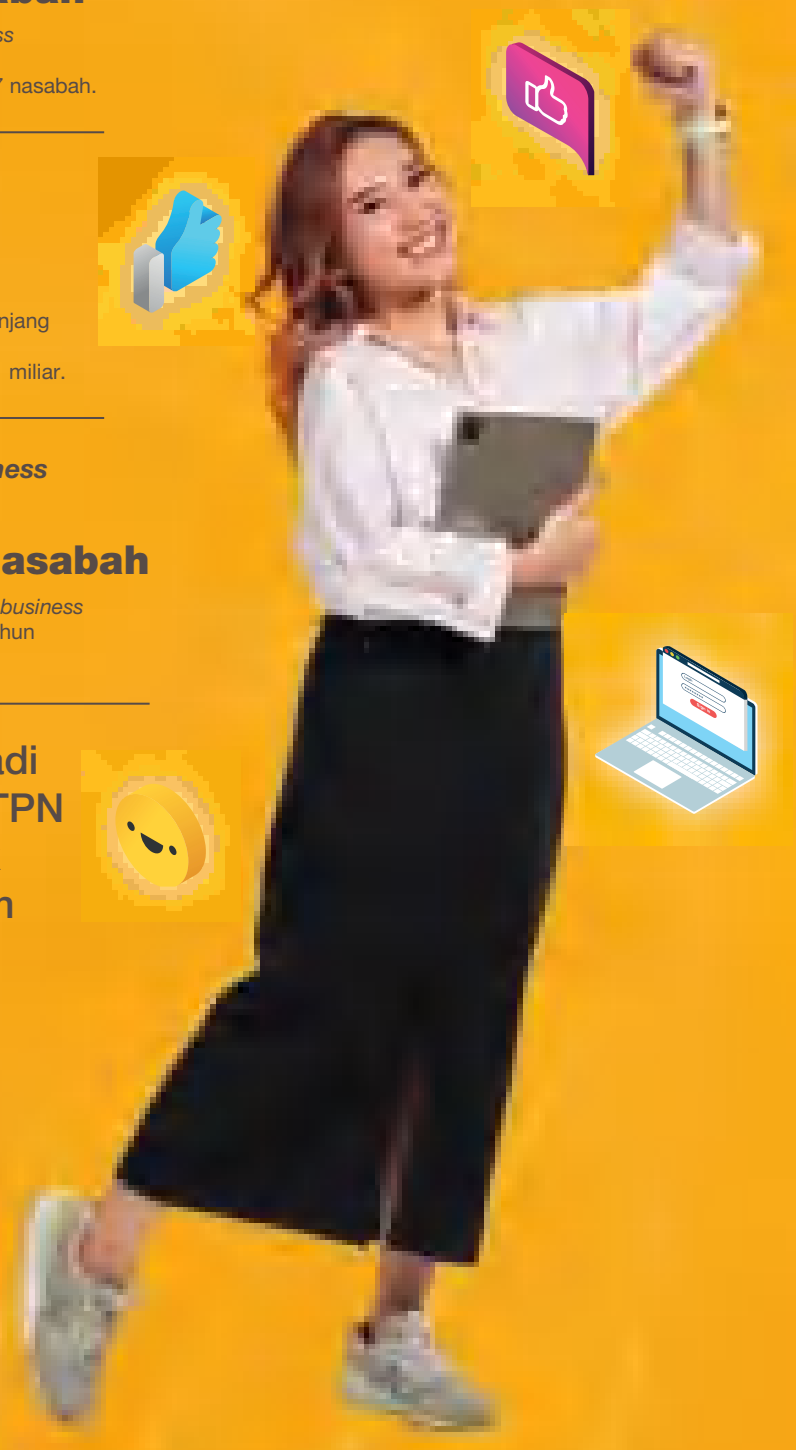

Memperluas basis nasabah menjadi salah satu strategi utama Bank BTPN dalam mewujudkan misinya untuk membuat perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang.

Nasabah Ritel

Peningkatan kapabilitas platform Jenius, optimasi saluran distribusi, dan kolaborasi lintas *Line-of-Business*

Nasabah Korporasi

- Perusahaan-perusahaan Indonesia segmen *Tier*-1 dan -2
- Pemasok/distributor dari nasabah korporasi *Tier*-1 dan -2

MENINGKATKAN KAPABILITAS PLATFORM JENIUS

Fitur-fitur Baru

- *Top up* dan kelola mandiri e-money
- dari e-Wallet Center
- Penukaran Yay Points
- Jenius Paylater
- Program #FlexiRasaMaxi 2

Jumlah Pengguna Terdaftar

4,8 Juta

+19%



5,2 Juta Nasabah

Pada tahun 2023, jumlah nasabah yang dilayani Jenius meningkat 19,20%, dari 4,4 juta nasabah di tahun 2022 menjadi 5,2 juta nasabah.



Rp25,5 Triliun

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola Jenius pada tahun 2023 mencapai Rp25,5 triliun, naik 7,6% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp23,7 triliun.



120,6%

Realisasi pendanaan dari Jenius meningkat 120,6% di tahun 2023, yaitu menjadi Rp2,2 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,0 triliun.

MEMPERTAHANKAN *OPERATION EXCELLENCE*

Bank BTPN terus mengembangkan *operational excellent*, yang direalisasikan melalui inovasi di bidang teknologi informasi, digitalisasi layanan, otomasi berbasis *robotic*, serta peningkatan kepatuhan melalui inisiatif sejumlah aplikasi yang mendukung pelaporan.

01 Revitalisasi dan integrasi *core banking system bank-wide*

02 Mengakselerasi proses digitalisasi

03 Memperkuat kapabilitas keamanan digital dan *cyber*

04 Memberdayakan SDM dengan kompetensi unggul

MENJAGA KUALITAS PORTOFOLIO KREDIT

Penyaluran Kredit

7,1%

Hingga tahun 2023, total kredit yang disalurkan Bank mencapai Rp156,6 triliun, lebih tinggi 7,1% dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar Rp146,1 triliun

---

Penyaluran Kredit Korporasi & Komersial

7,6%

Peningkatan penyaluran kredit terutama didorong oleh segmen Korporasi & Komersial yang meningkat sebesar 7,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

NPL (Bruto)

1,43% 2022

1,36% 2023

Bank senantiasa menjaga kualitas kredit yang tercermin dari rasio NPL sebesar 1,36% pada tahun 2023.

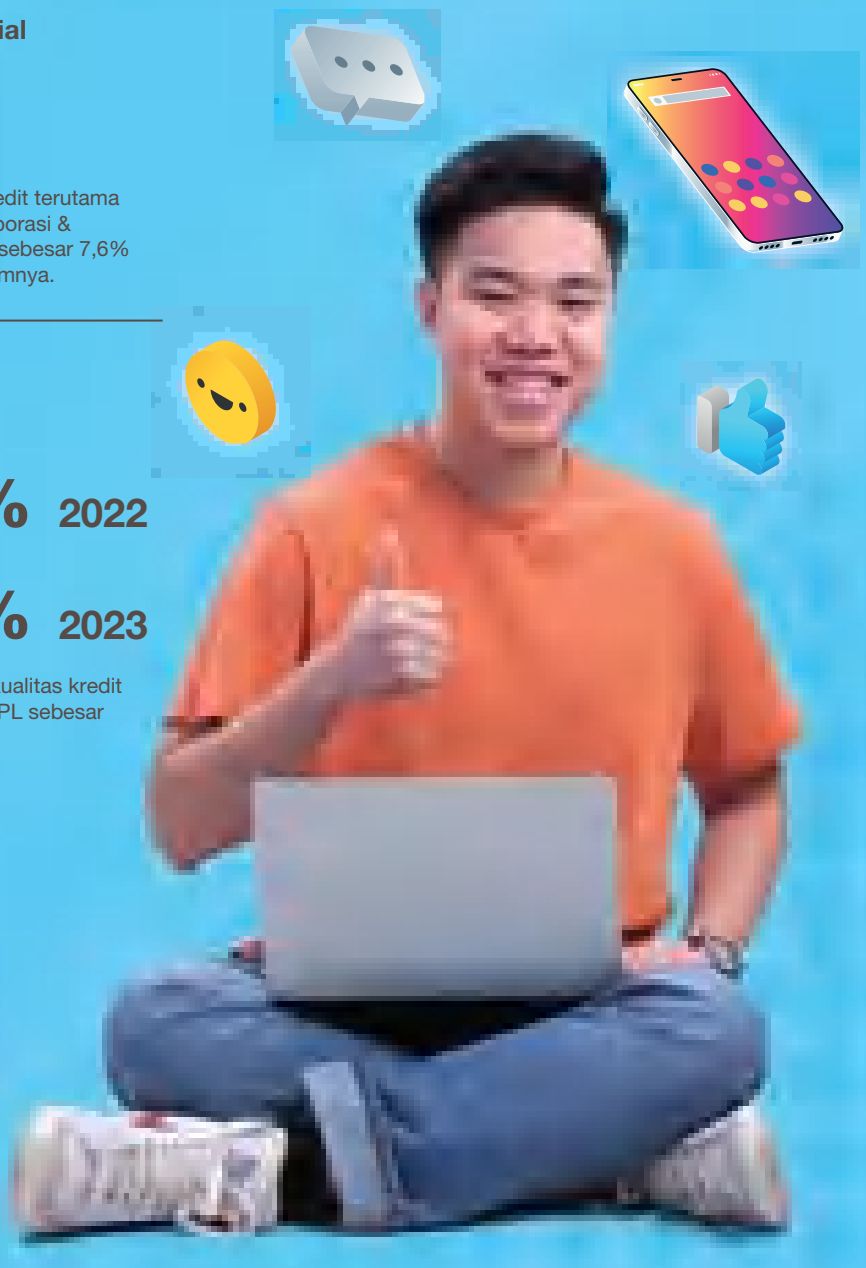



IKHTISAR UTAMA

12 Ikhtisar Keuangan
16 Ikhtisar Saham
17 Aksi Korporasi
17 Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham
18 Penerbitan Obligasi dan Sukuk
18 Ikhtisar Obligasi dan Sukuk
20 Peristiwa Penting 2023
25 Penghargaan & Sertifikasi

> Di tengah situasi yang penuh tantangan, Bank BTPN masih berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif, dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko.

KINERJA 2023

Pendapatan Bunga

Rp18,8 Triliun

Bank berhasil membukukan kenaikan Pendapatan Bunga sebesar 18,3% terutama didorong oleh pendapatan bunga dari penyaluran kredit.

KPMM

29,9 %

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 27,3%

LCR

199,7 %

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank per akhir tahun 2023 berada di tingkat yang sehat.

Pendapatan Operasional

Rp14,1 Triliun

Pendapatan operasional naik 3,1% dari Rp13,7 triliun di tahun 2022, dikontribusikan oleh kenaikan bunga bersih sebesar 3,1% dan kenaikan pendapatan operasional lainnya sebesar 3,0%.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Rp2,7 Triliun

Bank memutuskan untuk menambah pencadangan kredit pada tahun 2023 dan juga sebagai bentuk antisipasi berakhirnya POJK relaksasi kredit restrukturisasi pada 31 Maret 2024. Hal tersebut berdampak pada pencapaian laba bersih yang menurun sebesar 26,1% dibandingkan dengan tahun 2022.

Rasio CASA

40,8 %

Bank berhasil meningkatkan saldo CASA di tahun 2023 sebesar 10,0% sehingga rasio CASA juga meningkat menjadi 40,8% dari 35,0%.

Kantor Cabang
58 Kantor

ATM
214 Unit

Kantor Cabang Pembantu
197 Kantor

> Bank BTPN berupaya memberikan kemudahan layanan kepada para nasabah melalui ketersediaan jaringan kantor cabang maupun ATM.

Keterangan	Jumlah
Kantor Pusat Operasional	1
Kantor Wilayah Non Operasional	9
Kantor Cabang	**58**
Kantor Cabang Pembantu	**197**
Kantor Fungsional	
• Kantor Fungsional Operasional	1
• Kantor Fungsional Non Operasional	0
Total Jaringan Kantor	266
ATM	214
TCR	0
Payment Point	18
Total Jaringan Kantor & ATM	**498**

* data Jaringan Kantor BTPN Individual

IKHTISAR KEUANGAN

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2023	2022	2021	2020
Neraca Keuangan				
Jumlah Aset	201.448.392	209.169.704	191.917.794	183.165.978
Aktiva Produktif [1]	197.325.929	204.169.669	187.244.554	176.915.917
Pinjaman yang Diberikan [2]	156.561.297	146.123.516	135.598.774	136.212.619
Simpanan Nasabah [3]	108.198.576	114.866.548	109.380.130	100.788.906
Pinjaman yang Diterima	34.283.897	48.025.106	37.615.236	37.176.039
Efek-efek yang Diterbitkan	200.569	200.134	996.089	993.045
Penyertaan Saham	102.586	103.473	22.522	22.522
Jumlah Liabilitas [3]	160,165,288	169.756.680	155.838.867	150.201.225
Jumlah Ekuitas [4]	41.283.104	39.413.024	36.078.927	32.964.753
Jumlah Lembar Saham yang Disetor dan Dibayar Penuh (dalam satuan)	8.149.106.869	8.149.106.869	8.149.106.869	8.148.931.869
Informasi Hasil Usaha				
Pendapatan Bunga	18.815.673	15.899.646	14.748.604	16.403.483
Beban Bunga	(6.771.610)	(4.221.331)	(3.605.564)	(5.779.055)
Pendapatan Bunga Bersih	12.044.063	11.678.315	11.143.040	10.624.428
Pendapatan Operasional Lainnya	2.073.443	2.012.615	1.959.784	1.688.837
Beban Operasional Lainnya	(7.606.552)	(7.193.087)	(6.982.870)	(6.883.113)
Biaya CKPN	(3.049.919)	(1.840.167)	(2.111.776)	(2.799.638)
Pendapatan Operasional - Bersih	3.461.035	4.657.676	4.008.178	2.630.514
Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak	3.457.682	4.657.319	4.007.172	2.633.076
Laba Bersih Tahun Berjalan	2.682.484	3.629.564	3.104.215	2.005.677
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada				
• Pemilik Entitas Induk	2.358.334	3.095.701	2.664.714	1.749.293
• Kepentingan Non Pengendali	324.150	533.863	439.501	256.384
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak Penghasilan	18.348	(154.602)	78.604	24.198
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Setelah Pajak Penghasilan	2.700.832	3.474.962	3.182.819	2.029.875
Jumlah Laba Komprehensif Diatribusikan kepada				
• Pemilik Entitas Induk	2.376.847	2.939.728	2.742.035	1.776.256
• Kepentingan Non Pengendali	323.985	535.234	440.784	253.619
Laba Bersih per Saham (Nilai Penuh)	293	384	331	217

Catatan:
1. Termasuk pinjaman pembiayaan/piutang syariah yang diberikan, giro pada BI dan bank-bank lain, penempatan pada BI dan bank-bank lain, efek-efek, penyertaan saham, tagihan akseptasi, dan tagihan derivatif.
2. Termasuk pembiayaan/piutang Syariah
3. Termasuk dana *syirkah* temporer
4. Termasuk kepentingan non-pengendali

(dalam %)

Keterangan	2023	2022	2021	2020
Rasio Keuangan				
Permodalan				
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) [5]	29,9	27,3	26,2	25,6
Aset Produktif				
Aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif	0,7	0,7	0,8	0,6
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,7	0,7	1,3	1,0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,5	1,8	2,2	2,0
NPL-Bruto	1,4	1,4	1,7	1,2
NPL-Neto	0,4	0,4	0,4	0,5
Profitabilitas				
Imbal Hasil Aset (ROA) [6]	1,7	2,4	2,2	1,4
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	6,5	9,1	8,6	6,1
Margin Pendapatan Bunga Bersih (NIM)	6,5	6,3	6,6	6,1
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) [7]	83,7	75,1	76,0	85,5
Biaya Dana	4,4	2,7	2,5	3,8
Cost to Income Ratio (CIR) [7]	52,7	49,8	49,3	53,9
Laba (rugi) terhadap Pendapatan/Penjualan	16,6	26,0	24,0	14,6
Likuiditas				
Loan to Deposit Ratio (LDR) [8]	142,7	126,7	123,1	134,2
Rasio Lancar	33,7	45,3	44,8	39,5
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aktiva	79,5	81,2	81,2	82,0
Liabilitas terhadap Ekuitas	414,2	460,0	458,8	481,2
Kepatuhan				
Persentase Pelanggaran BMPK				
• Pihak Terkait	-	-	-	-
• Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPK				
• Pihak Terkait	-	-	-	-
• Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum Utama Rupiah (*Bank only*)	8,3	8,2	3,7	3,2
Giro Wajib Minimum Utama Valuta Asing (*Bank only*)	4,0	4,0	4,0	4,0
Posisi Devisa Neto (Bank only)	0,5	0,3	0,1	0,4
Lain-lain				
Jumlah Kantor Cabang [9]	333	358	477	536
Jumlah ATM dan TCR	228	221	224	227
Jumlah Karyawan [10]	20.933	19.740	19.334	19.370

Catatan:
5. Termasuk risiko kredit, operasional dan pasar
6. RoA sebelum pajak
7. BOPO dan CIR tahun 2019-2021 telah disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian rasio di tahun 2022 (sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional")
8. LDR (tidak termasuk Pinjaman kepada Bank)
9. Termasuk *Payment Points* & Kantor Fungsional
10. Termasuk BTPN Syariah

IKHTISAR KEUANGAN

01

Simpanan Nasabah
(termasuk dana *syirkah* temporer)

Rp108,2 Triliun



Total
Ekuitas

Rp41,3 Triliun



02

03



Rasio
KPMM

29,9%

Return on
Equity (RoE)

6,5%



04

05

Total
Aset

Rp201,4 Triliun



Pendapatan Bunga Bersih
(dalam triliun rupiah)

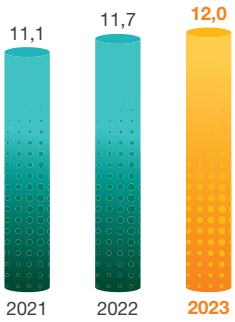

Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
(dalam triliun rupiah)

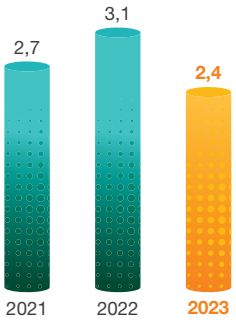

Pendapatan Operasional Lainnya
(dalam triliun rupiah)

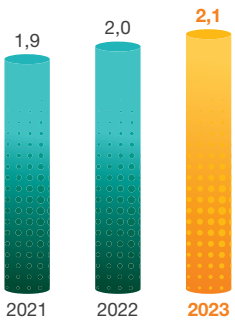

Beban Operasional Lainnya
(dalam triliun rupiah)



Pinjaman yang Diberikan
(dalam triliun rupiah)

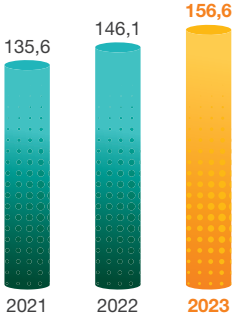

Dana Pihak Ketiga
(dalam triliun rupiah)

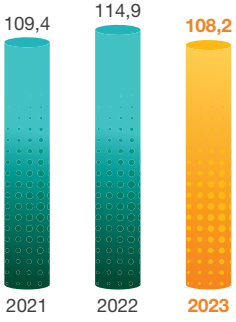

IKHTISAR SAHAM

PENAWARAN UMUM PERDANA

PT BANK BTPN Tbk ("Bank BTPN", "Bank") melakukan penawaran umum perdana (IPO) pada 8 Juni 2007. Pada aksi korporasi itu, jumlah saham yang ditawarkan kepada publik sebanyak 267.960.220 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Harga penawaran setiap saham sebesar Rp2.850 (nilai penuh). Saham-saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Maret 2008.

Periode	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)	Volume Perdagangan (Saham)	Jumlah Saham Tercatat (Lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp)
2023						
Kuartal I (Maret)	2.580	2.400	2.500	1.599.600	8.149.106.869	20.372.767.172.500
Kuartal II (Juni)	2.710	2.460	2.710	2.661.600	8.149.106.869	22.084.079.614.990
Kuartal III (September)	2.780	2.700	2.700	4.379.500	8.149.106.869	22.002.588.546.300
Kuartal IV (Desember)	2.700	2.520	2.620	2.008.000	8.149.106.869	21.350.659.996.780
2022						
Kuartal I (Maret)	2.680	2.570	2.670	1.608.600	8.149.106.869	21.758.115.340.230
Kuartal II (Juni)	2.620	2.490	2.500	2.216.100	8.149.106.869	20.372.767.172.500
Kuartal III (September)	2.530	2.380	2.460	3.772.700	8.149.106.869	20.046.802.897.740
Kuartal IV (Desember)	2.850	2.420	2.650	3.654.400	8.149.106.869	21.595.133.202.850

PERKEMBANGAN SAHAM BULANAN

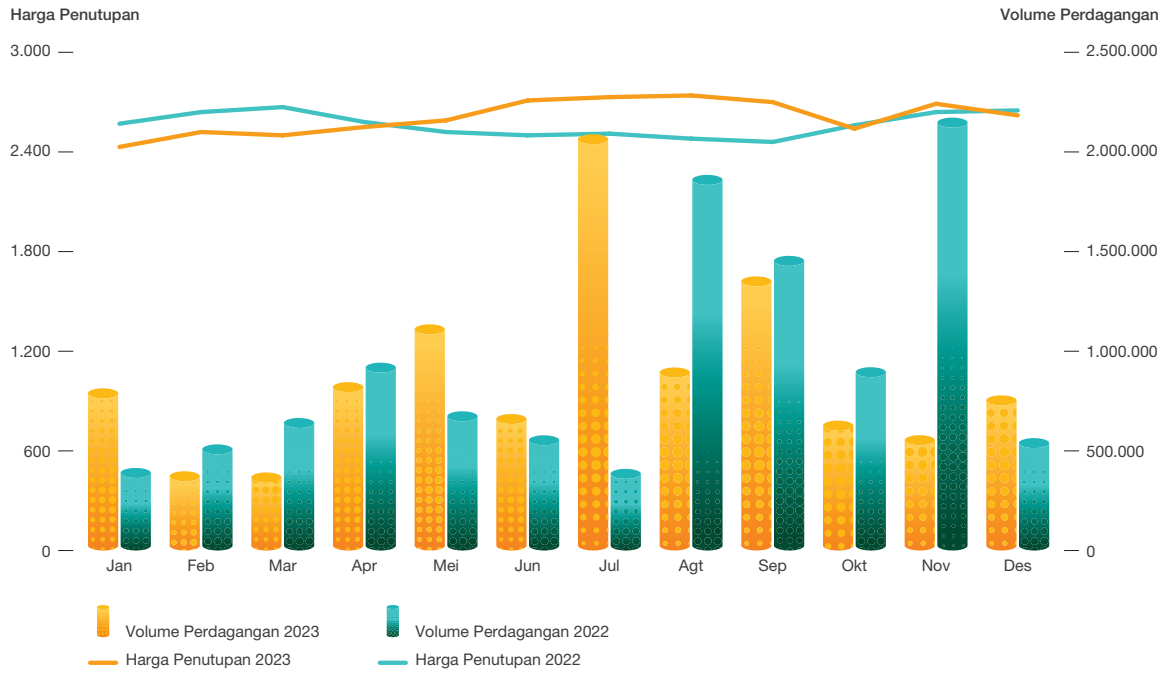

AKSI KORPORASI

Pada tanggal 7 Desember 2023, Bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda:

1. Persetujuan atas pelaksanaan penarikan saham hasil pembelian kembali.
2. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") atau *Right Issue II*.

Bank telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham untuk kedua agenda tersebut.

Berdasarkan pengumuman kepada kreditur pada tanggal 8 Desember 2023, penarikan *Treasury Stock* dilakukan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan (yang telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan), yang akan efektif dalam jangka waktu 60 hari jika tidak ada keberatan dari kreditur.

Selanjutnya berdasarkan keterbukaan informasi kepada pemegang saham dalam rangka PMHETD II pada tanggal 11 Desember 2023, Bank telah mengungkapkan bahwa rencana penggunaan dana PMHETD II adalah untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha melalui pengambilalihan Perusahaan-Perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha pembiayaan yaitu PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance, dari PT Summit Auto Group yang saat ini merupakan anak perusahaan dari Group Sumitomo Corporation dan SMBC

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM

Selama tahun 2023, tidak ada penghentian sementara perdagangan saham Bank.

PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK

Selama tahun 2023, Bank tidak menerbitkan Obligasi/Sukuk.

IKHTISAR OBLIGASI DAN SUKUK

Keterangan	Tanggal Pencatatan	Jumlah Obligasi (Rp)	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding (Rp)
Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019					
Seri B	27 November 2019	201.000.000.000	7,75	26 November 2024	201.000.000.000

PERINGKAT OBLIGASI BANK BTPN

Obligasi	Peringkat 2023	Peringkat 2022	Peringkat 2021
Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019	AAA (idn)	AAA (idn)	AAA (idn)

PEMBAYARAN BUNGA DAN POKOK TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Bank merealisasikan pembayaran bunga untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 seri B. Berikut adalah rinciannya:

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran - Bersih (Rp)
Bunga ke-13	27 Februari 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-14	26 Mei 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-15	28 Agustus 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-16	27 November 2023	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-17	26 Februari 2024	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-18	26 Mei 2024	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-19	26 Agustus 2024	Rp3.894.375.000,-
Bunga ke-20	26 November 2024	Rp204.894.375.000,-



PERISTIWA PENTING 2023

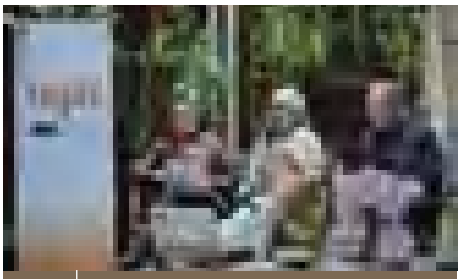

25 Januari

Bank BTPN menggelar acara Media Gathering pertama kali sejak Henoch Munandar ditetapkan sebagai Direktur Utama pada 29 September 2022. Acara tersebut dihadiri oleh 29 jurnalis dari 27 media. Dari Bank BTPN, turut hadir Direktur Kepatuhan Dini Herdini, Head of Wholesale & Commercial Banking Nathan Christianto, dan Communications & Daya Head Andrie Darusman.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenal media lebih dekat dan berkenalan secara langsung serta sebagai bentuk apresiasi Bank atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Pada kesempatan itu, Henoch Munandar dan Dini Herdini menyampaikan informasi terkini mengenai profil dan komitmen Bank BTPN, khususnya untuk selalu mendampingi para nasabah serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui unit bisnis, program maupun produk dari Bank BTPN.



5 Februari

Jenius dari Bank BTPN berkolaborasi dengan Pocari Sweat sebagai sponsor utama dalam acara konferensi pers POCARI SWEAT Run Indonesia 2023 yang dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Pocari Sweat yang ke-10. Hadir sebagai narasumber pada acara konferensi pers ini, Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, Puspita Winawati selaku Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, Daniel Mananta selaku Brand Ambassador Pocari Sweat, dan Anita Ekasari selaku Digital Banking Acquisition, Service, and Marketing Head, Bank BTPN.

Konferensi pers yang dipandu oleh Melanie Putria dimulai dengan lari pagi bersama narasumber dan beberapa publik figur. POCARI SWEAT Run Indonesia 2023 dilaksanakan secara *hybrid* dan *flag-off* utama akan di Gedung Sate, Bandung pada tanggal 30 Juli 2023. Kategori dalam kegiatan ini: *marathon, half marathon*, dan 10K untuk kategori *offline*. Sementara untuk *virtual run*, terdapat kategori *marathon, half marathon*, 10K, 5K, 3K, dan kids dash. Untuk menambah keseruan, Jenius dari Bank BTPN memberikan penawaran spesial untuk pembelian tiket *offline* dan virtual, kegiatan bersama komunitas, hingga pada saat penukaran *race pack* dan *race day*.



28 Februari

Bank BTPN melaksanakan Konferensi Pers Paparan Kinerja Keuangan 2022 secara offline di Menara BTPN lantai 27, Jakarta. Dalam kegiatan ini, Bank BTPN melaporkan performa solid sepanjang 2022 dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 16% di tengah ancaman resesi global dan masa transisi dari pandemi menuju endemi.

Konferensi Pers dihadiri oleh Henoch Munandar selaku Direktur Utama Bank BTPN, Hanna Tantani selaku Direktur Keuangan Bank BTPN, Dini Herdini selaku Direktur Kepatuhan Bank BTPN, dan Irwan Tisnabudi selaku Digital Banking Head Bank BTPN sebagai pembicara. Sebanyak 20 jurnalis dari 19 media hadir dalam kegiatan ini.



13 April

Bank BTPN melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang memutuskan adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta penggunaan laba bersih tahun buku 2022 untuk pembayaran dividen pertama kalinya sejak 2017. Bank BTPN menetapkan Atsushi Hino sebagai Direktur menggantikan Kan Funakoshi, dengan masa jabatan terhitung efektif sejak izin kerja dan izin tinggalnya diperoleh secara lengkap hingga RUPST 2025.

Selain itu, Bank BTPN juga turut menetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris dengan diterimanya pengunduran diri Irwan Mahjudin dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Onny Widjanarko yang masa jabatannya akan efektif setelah memperoleh persetujuan OJK hingga RUPST 2025.

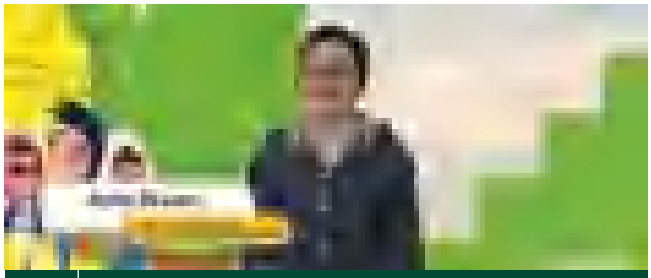

14 April

Jenius dari Bank BTPN mengadakan virtual Konferensi Pers Jenius Study: Perilaku Masyarakat *Digital Savvy* Menjelang Idulfitri 2023. Melalui survei ini, Jenius mengamati perilaku masyarakat *digital savvy* yang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan finansial baik dari masa pandemi pada momen Ramadan dan Idulfitri tahun ini.

Survei yang dilangsungkan pada Maret-April 2023 dengan melibatkan 127 responden berusia 18-40 tahun mengungkapkan bahwa 76% responden menerima THR pada Idulfitri kali ini. Terdapat tiga karakter *digital savvy* saat menerima THR, yaitu The Saver (41%), yang mengalokasikan THR mereka untuk menabung, The Spender (40%), yang mengalokasikan THR untuk langsung dibelanjakan, serta karakter The Investor (19%), yang mengalokasikan THR untuk berinvestasi.

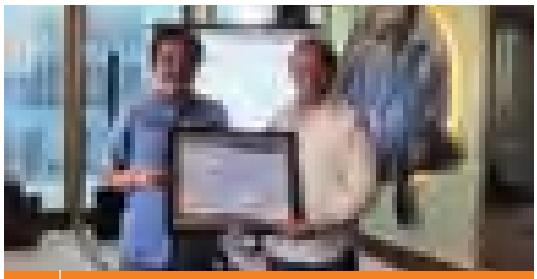

4 Mei

Bank BTPN bersama 4 (empat) kreditur lainnya, yaitu PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mayapada Internasional Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, dan Bank of China (Hong Kong) Ltd cabang Jakarta sepakat memberikan fasilitas pinjaman sindikasi senilai Rp1,111 triliun kepada PT Seino Indomobil Logistics (PT SIL) untuk pembiayaan belanja modal.

Para kreditur bersama PT SIL menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi tersebut pada Kamis, 4 Mei 2023 di Jakarta. Bank BTPN bertindak sebagai *Coordinator, Mandated Lead Arranger*, dan *Bookrunner* dalam perjanjian sindikasi bertenor lima tahun ini. Penyaluran pinjaman sindikasi ini akan mendorong kinerja Bank BTPN untuk terus tumbuh. Kerja sama ini ditandai secara simbolis dengan seremoni yang dihadiri oleh Presiden Direktur Indomobil Group Jusak Kertowidjojo dan Head of Wholesale Banking Bank BTPN Moses Ronald Supardi pada Jumat, 5 Mei 2023 di Jakarta.

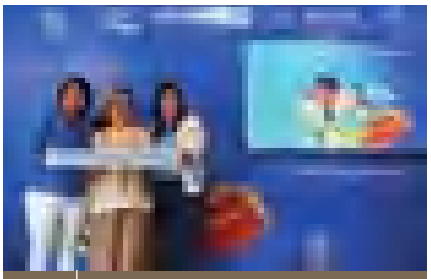

25 Mei

Jenius dari Bank BTPN mengadakan Media Gathering #LariBarengJenius di Surabaya dalam rangka Jenius sebagai *co-title sponsor* Pocari Sweat Run Indonesia ingin mengajak teman Jenius di Surabaya untuk berpartisipasi dalam acara maraton tahunan yang akan diselenggarakan di Gedung Sate, Bandung pada tanggal 30 Juli 2023 secara *hybrid*; serentak dilakukan secara *offline* di Bandung dan secara virtual di seluruh Indonesia.

Jenius memberikan penawaran spesial pada saat pembelian tiket, kegiatan bersama komunitas Jenius Co.Create dan komunitas lari yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, hingga keseruan saat penukaran *race pack* dan *race day* melalui program #LariBarengJenius.

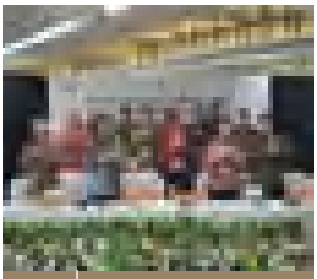

22 Juni

Bank BTPN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang memutuskan adanya perubahan susunan Direksi dan menetapkan Keishi Kobata sebagai Direktur menggantikan Hiromichi Kubo. Keishi Kobata efektif menjabat setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap sampai dengan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.



22 Juni

Bank BTPN dan International Finance Corporation (IFC) menjalin kerja sama dalam kesepakatan obligasi sosial dan hijau untuk memperkuat aksi iklim dan mendorong pembangunan inklusif di Indonesia. Dalam kerja sama ini, IFC akan menginvestasikan hingga US$500 juta di Bank BTPN, yang terdiri dari penerbitan obligasi sosial dan obligasi hijau. Penerbitan obligasi ini akan menjadi yang pertama bagi Bank BTPN dan memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya bisnis-bisnis yang dipimpin oleh perempuan serta aksi adaptasi terhadap perubahan iklim.

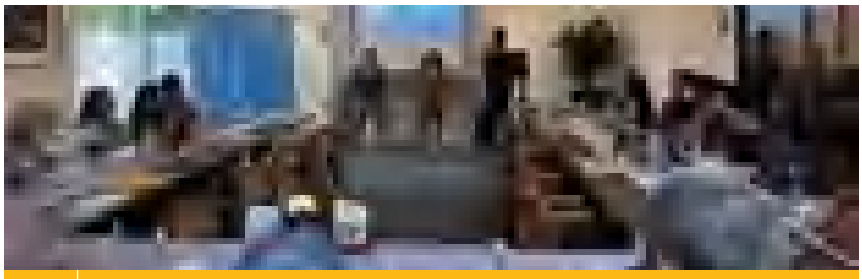

27 Juli

Jenius dari Bank BTPN, selaku *co-title sponsor* Pocari Sweat Run Indonesia menyelenggarakan *press briefing* dalam rangka mendukung penyelenggaraan ajang lari tahunan ini melalui rangkaian acara dalam program #laribarengjenius. Kolaborasi antara Jenius dengan Pocari Sweat Run Indonesia akan berlangsung selama tiga tahun ke depan hingga 2025. Program #laribarengjenius terdiri dari rangkaian acara dan penawaran promo menarik yang teman Jenius dapat nikmati, antara lain penawaran spesial untuk pembelian tiket Pocari Sweat Run Indonesia *offline* dan virtual dengan pembayaran menggunakan Jenius, promo menarik untuk belanja peralatan olahraga lari, *fun run* bersama komunitas lari di 13 kota, hingga keseruan di *booth* Jenius pada saat hari penukaran *race pack* (*race pack collection*) dan *race day*.

Sebagai rangkaian dari Road to Pocari Sweat Run Indonesia 2023, Jenius berkolaborasi dengan Pocari Sweat mengajak komunitas lari dalam aktivitas *fun run* #laribarengjenius di 34 kota, antara lain Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Surabaya, Bali, Magelang, Malang, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Pekanbaru, Semarang, dan beberapa kota lainnya. Dari kota-kota tersebut, Jenius Co.Create melakukan kegiatan kokreasi dan *community gathering* bersama para pelari di 15 kota dan diikuti oleh lebih dari 600 peserta.

PERISTIWA PENTING 2023

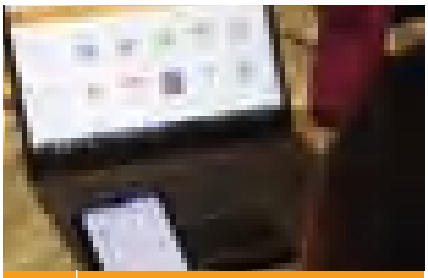

21 Agustus

Bank BTPN telah mengubah proses *Human Capital Management* (HCM) dengan bermitra dengan Darwinbox, penyedia teknologi sumber daya manusia global yang diakui. Dengan langkah strategis ini, Bank BTPN menegaskan kembali komitmennya untuk menyediakan peluang berharga yang memberikan dampak signifikan pada kehidupan jutaan orang, memperkuat posisinya sebagai inovator teknologi di industri keuangan dengan pendekatan yang benar-benar berpusat pada manusia.

Melalui platform ini, Bank BTPN memiliki visi untuk berinovasi dalam transformasi digital seluruh proses HR yang terintegrasi, dimulai dari integrasi karyawan baru, proses manajemen kinerja, hingga pendekatan pembelajaran berkelanjutan dan sistem survei yang mampu mengukur umpan balik karyawan. Ini mencakup seluruh aspek, dari akuisisi talenta, manajemen talenta, hingga pengembangan karyawan.

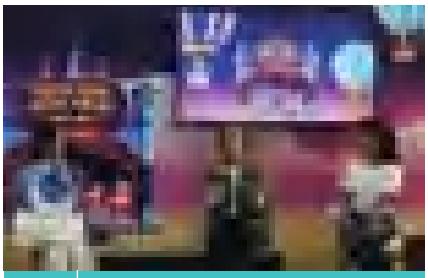

22 Agustus

Jenius dari Bank BTPN menyelenggarakan *press briefing* dalam rangka merayakan ulang tahun ketujuh tahun. Pada usia ketujuh tahun ini, Jenius terus berinovasi melalui proses kokreasi dan kolaborasi dengan masyarakat *digital savvy*. Pada momen perayaan ulang tahun yang ketujuh ini, Jenius juga melakukan sebuah survei bertajuk Jenius Study: Kebiasaan Finansial Digital Savvy 2023, serta menghadirkan program 7 hari 7 malam #jadilebihjenius dengan beragam penawaran spesial yang dapat dinikmati teman Jenius.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap teman Jenius, pada momen perayaan ulang tahun yang ketujuh kali ini, Jenius menghadirkan program 7 hari 7 malam #jadilebihjenius lewat beragam penawaran spesial ulang tahun. Penawaran spesial ini telah berlangsung selama 7 hari penuh mulai 11 hingga 17 Agustus yang terdiri dari 7 penawaran spesial di tempat makan dan minum pilihan, 7 penawaran spesial di merchant pilihan, 7 penawaran spesial dari fitur pilihan Jenius.



4 September

Pada Hari Pelanggan Nasional, jajaran direksi dan manajemen Bank BTPN ikut turun langsung untuk melayani nasabah dan mengambil peran dalam menjelaskan produk, dalam program pemberdayaan, dalam mendampingi nasabah pada saat akad kredit yang dilakukan di berbagai cabang Bank BTPN di Indonesia, membagikan tangkai mawar hidup dan cokelat kepada nasabah, hingga mengunjungi sejumlah nasabah Bank BTPN di Indonesia.

Bank BTPN melaksanakan beragam aktivitas pada Hari Pelanggan Nasional untuk nasabah dari berbagai unit bisnis, seperti Sinaya, Bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, Jenius, dan Purna Bakti. Aktivitas Bank BTPN pada Hari Pelanggan Nasional ini meliputi, layanan kesehatan bagi para nasabah, Pekan Purnabakti, pemberian beberapa penawaran menarik dari Jenius, dan program Daya, serta juga dihadiri pejabat dari mitra, yaitu PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

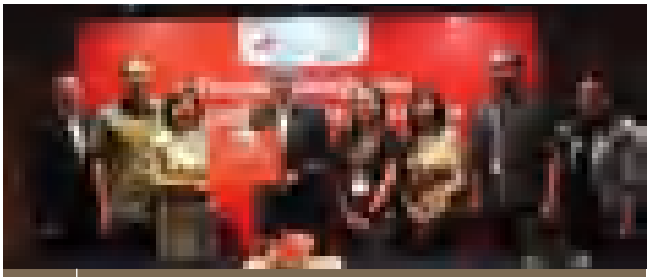

12 September

Bank BTPN bekerja sama dengan Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) dalam bidang distribusi *bancassurance*. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dihadiri oleh Jeffrey Tjoeng, Head of Business Banking Bank BPTN, dan Linggawati Tok sebagai Direktur Marketing mewakili GEGI.

Melalui kolaborasi ini, Bank BTPN ikut serta dalam program pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Sinergi Bank BTPN dan GEGI diawali dengan enam produk, yaitu asuransi semua risiko industri (industrial *all risk*), asuransi gempa bumi, asuransi *marine cargo*, asuransi kendaraan bermotor, asuransi semua risiko kontraktor (*contractor all risk*), dan asuransi *contractor's plants and machinery*. Produk-produk tersebut khusus bagi nasabah Bank BTPN yang membutuhkan perlindungan usaha dan asetnya.

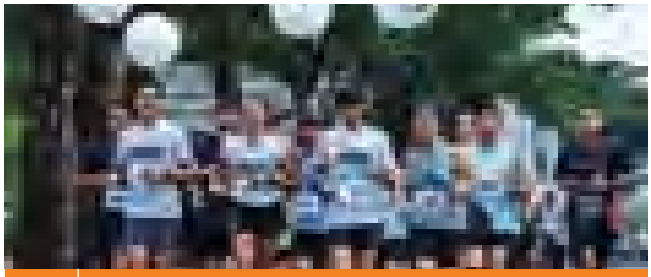

24 September

Jenius dari Bank BTPN memberikan dukungan pada Acara Garmin Run Asia Series 2023 di Uptown Park - Summarecon Mall Serpong, Tangerang. *Event* lari yang membawa tema "From Zero to Hero" ini diikuti oleh 5,000 peserta dari berbagai usia yang berpartisipasi di nomor lari 5K, 10K hingga 21K dan Kids Dash.

Pada acara ini, Jenius menghadirkan program #laribarengjenius berupa *fun run, workshop*, dan *talk show* tentang persiapan mengikuti lomba lari. Jenius juga menghadirkan penawaran spesial untuk pengguna Jenius seperti pembelian tiket Garmin Run Indonesia 2023 dan diskon khusus pembelian produk Garmin menggunakan Jenius untuk pembayaran. Untuk menambah keseruan, selama dua hari pengambilan *race pack* pada 22-23 September 2023, dan pada hari perlombaan Garmin Run 2023 Indonesia, Jenius menyelenggarakan Jenius Auction, Jenius Cheering Zone, Jenius Running Experience *Booth*, dan banyak lagi.

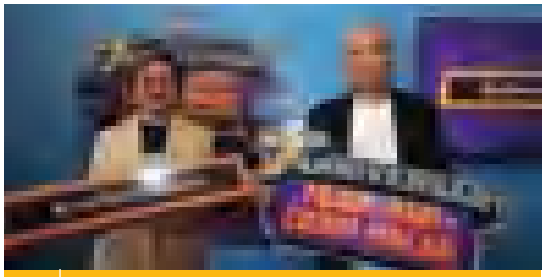

6 Oktober

Jenius dari Bank BTPN kembali menghadirkan program 7 Hari 7 Malam #jadilebihjenius dengan menghadirkan Jenius Online Travel Fair untuk pertama kali, mulai tanggal 11–17 Oktober 2023. Tersedia potongan hingga Rp7 juta yang dapat digunakan di Traveloka untuk beli tiket transportasi, akomodasi, hingga aktivitas selama berlibur. Jenius Online Travel Fair hadir mengusung konsep *travel fair* yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Teman Jenius bisa mengikuti *voucher war* untuk mendapatkan potongan harga Rp7 juta hanya dengan membeli *voucher* seharga Rp7.007 di Loket.com menggunakan Kartu Kredit dan Kartu Debit Jenius Visa. *voucher* tersebut dapat di-redeem di Traveloka untuk berbagai macam kebutuhan, seperti pemesanan hotel, transportasi, hingga hiburan. Total ada lebih dari 5.000 *voucher* akan dialokasikan untuk diperebutkan selama periode *voucher war* berlangsung. Selain potongan hingga Rp7 juta di Traveloka dengan pembelian menggunakan Kartu Kredit Jenius dan Kartu Debit Jenius Visa, teman Jenius juga bisa memanfaatkan penawaran spesial berupa ekstra *cashback* hingga Rp2,5 juta dari Flexi Cash.

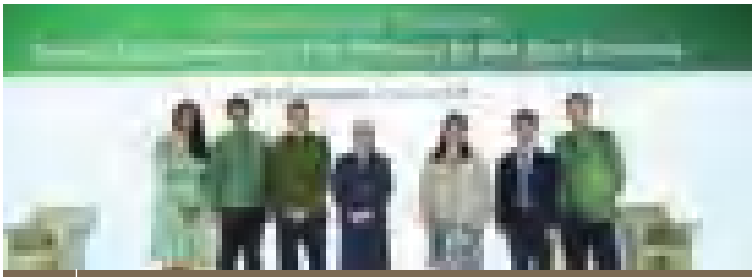

12 Oktober

Bank BTPN menyelenggarakan Sustainability Seminar 2023 "Addressing Climate Change through Decarbonization Initiatives across Wider Business Sectors" dengan tajuk "Beyond Energy Transition: Seizing Opportunities in The Pathway to Net Zero Economy". Seminar yang diikuti oleh sedikitnya 200 tamu undangan dari 60 perusahaan dan berlangsung di The Westin Hotel Jakarta pada 12 Oktober 2023 lalu, bertujuan untuk berbagi pengetahuan kepada nasabah korporasi terkait usaha-usaha dekarbonisasi yang juga bisa dilakukan oleh berbagai sektor bisnis. Tidak hanya nasabah, acara ini turut dihadiri oleh 18 jurnalis dari berbagai media, mulai dari Bisnis Indonesia, Infobank, Tempo, Sindonews.com, SWA, Gatra, dan lainnya.

Terdapat tiga pembicara kunci dalam seminar ini, yaitu Kepala Region I, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Abdul Malik Sadat Idris, Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Lufaldy Ernanda, dan Head of Business Development 2 Division Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny Wicaksono. Seminar ini menghadirkan empat sesi dengan topik yang berbeda dari berbagai pembicara sebagai berikut: Principal for Policy & Program Indonesia Business Council (IBC) Nanda Noor, Climate-specialized Associate Investment Officer International Finance Corporation (IFC) Sonali Gupta, Head of ESG Convene Katherine Pamintuan, Head of ESG Convene Katherine Pamintuan. Selain itu, hadir juga Head of Sustainability Solutions Group (APAC) Sumitomo Mitsui Banking Corporation Priya Bellino sebagai moderator.

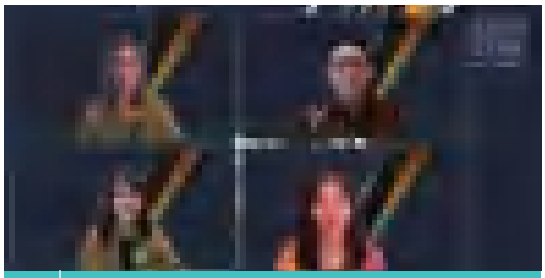

2 November

Bank BTPN mengumumkan kerja sama kemitraan dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI"), perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan (AUM) reksa dana sebesar Rp45,8 triliun (per akhir September 2023). Melalui kerja sama ini, Bank BTPN akan melengkapi bisnisnya dengan menghadirkan 7 (tujuh) reksa dana Manulife untuk memberikan solusi investasi bagi para nasabahnya.

Produk tersebut terdiri dari satu reksa dana pasar uang dalam denominasi rupiah, dua reksa dana pendapatan tetap dalam denominasi rupiah, satu reksa dana pendapatan tetap dalam denominasi dolar AS, dua reksa dana saham dalam denominasi rupiah, dan satu reksa dana saham *offshore* dalam denominasi dolar AS yang portofolionya terdiri dari saham-saham perusahaan Asia berskala global.



22 November

Bank BTPN menggelar Economic Outlook 2024 sekaligus peluncuran inovasi produk terbaru Bank BTPN yakni "ESG Deposit", di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Pada gelaran Economic Outlook tahun ini, Bank BTPN mengusung tajuk utama "Navigating through 2024: Strategies for Resilience and Growth" yang mencerminkan visi strategis Bank BTPN untuk berjalan bersama nasabah melewati tantangan tahun-tahun mendatang dengan ketahanan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Febrio Kacaribu hadir sebagai perwakilan pemerintah untuk memberikan pidato utama. Co-Founder Creco Research Institute Chatib Basri turut hadir untuk membahas materi mengenai prospek makroekonomi pada tahun Pemilu di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sementara, Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis memaparkan strategi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 mendatang. Sebagai penutup, Muhammad Qodari selaku Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Indo Barometer berbicara mengenai periode Pemilu di Indonesia yang akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

PERISTIWA PENTING 2023

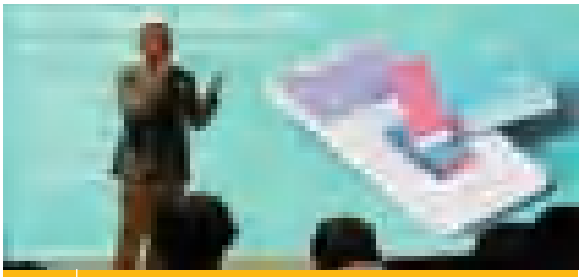

23 November

Jenius dari Bank BTPN mengadakan Konferensi Pers, menghadirkan penukaran Yay Points di Kartu Kredit Jenius Visa yang menjadi lengkap dengan hadirnya kategori *travel* untuk penukaran ke KrisFlyer Miles dan Traveloka Points. Hal ini merupakan pengembangan lebih lanjut setelah sebelumnya, pada Mei 2023 yang lalu, Yay Points dapat ditukar dengan saldo e-Wallet, yaitu GoPay dan OVO.

Untuk semakin memaksimalkan pengumpulan Yay Points karena di Jenius #SemuaAdaPoinnya, Jenius juga memiliki program Double Yay. Dengan adanya program Double Yay ini, untuk setiap transaksi domestik di kategori pilihan dan transaksi di luar negeri kelipatan Rp10.000 akan mendapatkan 2 Yay Points (1 Yay Points senilai Rp5.000). Tidak hanya itu, teman Jenius juga bisa mendapatkan bonus Triple Yay Points (3x Yay Points) dengan transaksi pakai Kartu Kredit Jenius Visa, dengan minimal akumulasi transaksi sebesar Rp20.000.000 per bulan.

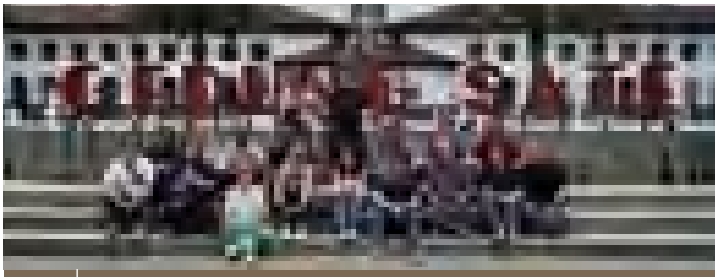

30 November-1 Desember

Bank BTPN mengadakan Year-end Media Gathering 2023 “Back to the Roots: Mengenal Kembali Bank BTPN” di Gedung De Driekleur, Bandung. Acara ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kepada media atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik, sekaligus untuk lebih mempererat hubungan antara Bank BTPN dengan media. Direktur Utama Bank BTPN Henoch Munandar, Direktur Kepatuhan Bank BTPN Dini Herdini, Head of Wholesale, Commercial, and Transaction Banking Bank BTPN Nathan Christianto, Digital Banking Business Stream Head Bank BTPN Anita Ekasari, dan Communications and Daya Head Bank BTPN Andrie Darusman hadir dalam acara ini.

Rangkaian kegiatan diawali dengan *sharing session* bersama narasumber Bank BTPN di hadapan 22 jurnalis dari 11 media nasional dan 11 media lokal Bandung. Selain itu, media juga berkesempatan untuk mengunjungi kantor cabang Bank BTPN Ahmad Yani untuk melihat secara langsung kegiatan layanan kesehatan dan pengambilan manfaat para nasabah pensiunan, serta *walking tour* kota Bandung bersama Ceritabandung.id untuk mengunjungi beberapa tempat kuliner khas Bandung.



7 Desember

Bank BTPN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Desember 2023. Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham resmi menyetujui: (1) rencana penarikan saham-saham Perseroan hasil pembelian kembali (”*Treasury Stock*”); dan (2) rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHETD II”) atau *Right Issue* II, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



11-12 Desember

Bank BTPN kembali menggelar ajang tahunan, yaitu “Daya Fest 2023”, pada 12-13 Desember 2023. Dengan mengusung tema “Sebuah Pemberdayaan untuk Kehidupan Berkelanjutan yang Lebih Berarti”, rangkaian acara Daya Fest 2023 menjadi salah satu wujud komitmen Bank BTPN dalam penerapan pembangunan berkelanjutan yang tak lepas dari peran serta pemangku kepentingan eksternal yang berbisnis atau berinteraksi dengan Bank BTPN, sekaligus melakukan edukasi untuk memperluas pemahaman topik keberlanjutan bagi masyarakat.

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

PENGHARGAAN



PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

No.	Penghargaan			Waktu	Tipe Penghargaan	Keterangan tambahan
	Nama Penghargaan	Kategori	Institusi Pemberi			
1	4th Anniversary Indonesia's Popular Digital Products Awards 2023	KBMI 3 Mobile Banking	The Iconomics	17 Februari 2023	N/A	Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada institusi yang telah berinovasi dalam ranah digital di Indonesia, sehingga mampu menghadapi peluang, tantangan, dan kompetisi dari gelombang disrupsi teknologi. Jenius dari Bank BTPN menerima penghargaan dalam kategori KBMI 3, yaitu bank dengan modal inti lebih dari Rp14-70 triliun untuk *mobile banking*.
2	Triple A Country Awards 2022	Sustainable Finance 2022: 1. "Best Green Loan" 2. "Best Local Currency Green Loan"	The Asset	23 Februari 2023	N/A	Bank BTPN menerima 2 (dua) penghargaan dalam kategori "Sustainable Finance 2022". Penghargaan pertama yaitu "Best Green Loan" melalui program pembiayaan hijau senilai total U$750 juta yang diberikan Bank BTPN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Desember 2022, dengan Bank BTPN dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) bersama-sama berperan sebagai *coordinating mandated lead arranger and bookrunner*, serta *green loan coordinator*. Masih dalam kategori yang sama, Bank BTPN menerima penghargaan "Best Local Currency Green Loan" melalui pemberian fasilitas pembiayaan hijau senilai Rp1,06 triliun kepada PT Kepland Investama sejak Oktober 2021. Dalam program ini, BTPN berperan sebagai *sole lender*.
3	Indonesia Public Relations Award (IPRA) 2023: Winning Economic Growth through Consistent Collaboration	Conventional Bank Best Public Relations in Company Management on Expanding Mass Market Product and Services	WartaEkonomi.co.id	24 Februari 2023	Piagam	Penghargaan diberikan kepada *public relations* perusahaan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat baik dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat dan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik. Bank BTPN menerima penghargaan "Best Public Relations in Company Management on Expanding Mass Market Product and Services" dalam kategori Conventional Bank.
4	PR INDONESIA AWARDS (PRIA) 2023	Terpopuler di Media Cetak dan *Online* 2022 Subkategori Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional Tbk	PR INDONESIA	17 Maret 2023	Piagam	Penghargaan diberikan kepada perusahaan yang berhasil memperoleh jumlah eksposur positif tertinggi di media cetak dan *online*. Bank BTPN menerima penghargaan dalam kategori "Terpopuler" di media cetak dan *online* 2022, subkategori Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional Tbk.
5	Top 100 Most Outstanding Women 2023	Hanna Tantani, Top 100 Most Outstanding Women	Infobank	05 April 2023	NA	Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan kepada para pemimpin wanita terbaik dalam kontribusinya melalui pengalaman dan prestasi mereka terhadap perkembangan lembaga/korporasi yang dipimpinnya. Hanna Tantani sebagai Direktur Keuangan Bank BTPN berada pada posisi 39 dalam 100 Most Outstanding Women.

No.	Penghargaan			Waktu	Tipe Penghargaan	Keterangan tambahan
	Nama Penghargaan	Kategori	Institusi Pemberi			
6	12th Infobank Digital Brand Awards 2023	1. The Best Bank with Digital Service (KBMI 3) - Jenius 2. The 3rd Best Deposito Bank Umum Konvensional - BTPN Deposito Berjangka 3. The 3rd Best Kartu Debit Bank Umum Konvensional - Kartu Debit BTPN (Jenius)	Infobank	12 April 2023	Piagam & Sertifikat	Penghargaan diberikan kepada institusi yang telah berhasil melakukan promosi *brand* perusahaan dan *brand* produk secara digital selama setahun terakhir (2022-2023) dan dinilai sebagai salah satu bank terbaik berdasarkan penilaian masyarakat dan *feedback* media sosial terhadap produk dan layanan perbankan berbasis digital yang dimiliki. Bank BTPN menerima tiga penghargaan yaitu The Best Bank with Digital Service (KBMI 3) - Jenius, The 3rd Best Deposito Bank Umum Konvensional - BTPN Deposito Berjangka, dan The 3rd Best Kartu Debit Bank Umum Konvensional - Kartu Debit BTPN (Jenius).
7	PPKM Award 2023	Piagam Penghargaan Penanganan COVID-19 Kategori: Swasta Dalam Negeri	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	8 Mei 2023	Piagam	Penghargaan diberikan atas kontribusinya terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Bank BTPN menjadi salah satu dari 153 penerima penghargaan dalam kategori swasta dalam negeri.
8	20th Infobank-MRI Banking Service Excellent 2023	1. Jenius - The Pioneer of Digital Banking In Indonesia (Special Rank) 2. The 2nd Best In Service Excellence 3. The 1st Best Bank With Digital - Jenius (BTPN) 4. The 1st Best Call Center 5. The 1st Best Email 6. The 2nd Best Mobile Banking 7. The 2nd Best Chatbot 8. The 2nd Best Live Chat	Infobank	20 Juni 2023	Piagam	Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada bank atas hasil pelayanan terbaik dan pengalaman nasabah pada tahun 2022, berdasarkan hasil kajian Biro Riset Infobank (BiRI) bersama Marketing Research Indonesia (MRI). Jenius dari Bank BTPN menerima delapan penghargaan sekaligus.
9	Best Companies to Work for in Asia 2023	Best Companies to Work for in Asia 2023 (Indonesia Region)	HR Asia	27 Juni 2023	Piagam & Sertifikat	Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Asia yang memiliki kinerja terbaik di bidang sumber daya manusia. Hal ini tercermin dari tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang unggul. Bank BTPN menjadi salah satu penerima penghargaan Best Companies to Work for in Asia TM 2023 (Indonesia Region).
10	Indonesia Most Powerful Women Awards 2023	Indonesia Most Powerful Women 2023 in Maximizing Digital Technology Utilization to Support National Economic Resilience (Hanna Tantani) Kategori: Conventional Bank	HerStory	27 Juli 2023	NA	Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin perempuan yang secara konsisten melakukan inovasi, adaptasi, dan perkembangan pada perusahaannya dari setiap sektor industri. Bank BTPN (Hanna Tantani) menerima penghargaan Indonesia Most Powerful Women 2023 in Maximizing Digital Technology Utilization to Support National Economic Resilience dalam kategori Conventional Bank.

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

No.	Penghargaan			Waktu	Tipe Penghargaan	Keterangan tambahan
	Nama Penghargaan	Kategori	Institusi Pemberi			
11	Indonesia Digital Customer Engagement Champion 2023	Kategori JASA KEUANGAN BANK Predikat VERY GOOD	Majalah SWA & Business Digest	27 Juli 2023	Sertifikat	Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil dalam mengelola keterlibatan digital melalui strategi, inovasi, dan implementasi program atau kinerja yang unggul untuk mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Jenius dari Bank BTPN mendapatkan predikat "Very Good" dalam kategori Jasa Keuangan Bank.
12	28th Infobank Award 2023	"DIAMOND TROPHY" EXCELLENT FINANCIAL PERFORMANCE BANK IN 20 CONSECUTIVE YEARS (2003-2023) & EXCELLENT FINANCIAL PERFORMANCE BANK IN 2022	Infobank	25 Agustus 2023	Piala, Piagam	Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada 62 bank di Indonesia yang dinilai berhasil meraih predikat kinerja "Sangat Bagus" pada "Rating 106 Bank Versi Infobank 2023". Majalah Infobank memberikan penghargaan khusus kepada 32 bank, yaitu 9 bank meraih Golden Trofi, 4 bank meraih Platinum Trofi, 3 bank meraih Titanium Trofi, 11 bank meraih Diamond Trofi, dan 5 bank meraih Crown Trofi. Bank BTPN menerima penghargaan dalam kategori Diamond Trofi atas kinerja keuangan bank yang dinilai sangat baik pada tahun 2022 dan selama 20 tahun berturut-turut (2003-2022). Bank BTPN merupakan salah satu dari 11 bank yang menerima Diamond Trofi.
13	Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023	Platinum Rank	National Center for Corporate Reporting (NCCR)	06 November 2023	Piala	Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam menjalankan operasional bisnisnya. Penilaian didasarkan pada tingkat kepatuhan dan kualitas laporan keberlanjutan terhadap standar Global Reporting Initiative (GRI). Terdapat empat peringkat penghargaan, yaitu Platinum, Gold, Silver, dan Bronze. Tahun ini merupakan tahun ke-3 Bank BTPN memperoleh rating Platinum secara berturut-turut dalam empat tahun kepesertaannya dalam ajang ini.
14	Top 20 Financial Institution Awards 2023	Predikat "Sangat Bagus" dalam kategori Bank beraset Rp100 triliun s.d. <Rp500 triliun Best CFO Category Bank untuk Hanna Tantani	The Finance	14 November 2023	Piagam	Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap bank, perusahaan asuransi jiwa dan umum, serta multifinance yang berhasil menjaga kinerja selama 3 periode keuangan tetap stabil dan tumbuh positif. Bank BTPN mendapatkan penghargaan dengan predikat "Sangat Bagus" dalam kategori Bank beraset Rp100 triliun s.d. <Rp500 triliun, dan Best CFO Category Bank untuk Hanna Tantani.

No.	Penghargaan			Waktu	Tipe Penghargaan	Keterangan tambahan
	Nama Penghargaan	Kategori	Institusi Pemberi			
15	Infobank Top 100 CEO & The Next 200 Leaders 2023	Top 100 CEO 2023	Infobank	4 Desember 2023	NA	Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin perusahaan dari industri perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, perusahaan pembiayaan (*multifinance*), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pendukung sektor keuangan yang dinilai telah memberikan hasil membanggakan bagi perusahaan yang dipimpinnya. Penghargaan diberikan kepada Direktur Utama Bank BTPN Henoch Munandar.
16	Indonesian Sustainable Development Goals Award 2023	Platinum Award	Corporate Forum for CSR Development	4 Desember 2023	Piagam	Penghargaan ini didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dinilai berhasil dalam menjalankan program-program yang secara signifikan mendukung 17 tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Bank BTPN mendapat penghargaan Platinum.
17	Detikcom Awards 2023	Bank Digital dengan Fitur Paling Inovatif	Detik.com	29 Desember 2023	Piala	Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai inovasi revolusioner yang diciptakan Jenius dari Bank BTPN sebagai solusi *life finance* bagi para pengguna *digital savvy*. Jenius dari Bank BTPN mendapat penghargaan Bank Digital dengan Fitur Paling Inovatif.

SERTIFIKASI

No	Nama Sertifikasi	Waktu Pemberian	Akhir Masa Berlaku	Pihak Pemberi
1	ISO 9001: 2015 Corporate Procurement & Vendor Governance	28 Oktober 2022	28 Oktober 2025	SGS
2	ISO/IEC 27001:2013 Retail Account Services	01 Juli 2023	31 Oktober 2025	BSI Group Indonesia
3	ISO 9001:2015 Retail Loan Processing	19 Januari 2023	06 Januari 2025	TUV Rheinland



LAPORAN MANAJEMEN

33 Laporan Dewan Komisaris
38 Dewan Komisaris
41 Laporan Direksi
50 Direksi
52 *Board of Management*
54 Pejabat Eksekutif
56 Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT BANK BTPN Tbk

> Kinerja usaha Bank BTPN tahun 2023 yang positif tak dapat dipisahkan dari kerja keras yang dilakukan oleh manajemen serta organisasi di bawahnya. Demikian juga peran para pemegang saham dan regulator, sehingga usaha Bank berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan praktik bisnis terbaik di tengah tantangan kegiatan usaha yang tidak mudah.



Dewan Komisaris memandang bahwa secara keseluruhan, Direksi telah berhasil membuat Bank BTPN mencapai kinerja yang baik. Bank mencatat kinerja solid sebagai hasil komitmen Bank BTPN untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis yang diambil.

Chow Ying Hoong
Komisaris Utama

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas dan fungsi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha semata-mata untuk tujuan Bank. Karena itu, laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sekaligus wujud transparansi dan keterbukaan informasi PT BANK BTPN Tbk ("Bank BTPN", "Bank").

Dalam pandangan Dewan Komisaris, kondisi eksternal yang harus dihadapi oleh manajemen pada tahun buku 2023 sangat dinamis sehingga membutuhkan respons cepat dan tepat agar kinerja Bank tidak terdampak negatif dari perkembangan eksternal yang terjadi, di antaranya terkait dengan situasi lingkungan suku bunga yang tinggi yang dihadapi perbankan maupun ketidakpastian pasar global yang berpotensi memengaruhi perekonomian domestik.

Kendati demikian, Direksi telah merespons situasi yang berkembang dengan baik, sehingga menghasilkan kinerja Bank BTPN yang positif. Bank berhasil membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2,36 triliun. Selain itu, rasio dana murah atau *Current Account & Saving Account* (CASA) juga membaik, seperti halnya dengan penyaluran kredit.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut, terutama karena menunjukkan daya tahan Bank yang sangat baik, serta kemampuan beradaptasi yang tinggi. Begitu pun dengan penerapan GCG yang terus meningkat, sehingga akan mendukung pencapaian kinerja usaha Bank yang berkelanjutan.

PERKEMBANGAN KONDISI PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Pada tahun 2023 yang menjadi rangkaian dalam proses pemulihan dari dampak pandemik COVID-19 di tingkat global, ternyata belum berjalan dengan baik. Apalagi, dalam proses perbaikan tersebut, kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina masih berlangsung maupun ketegangan Israel dan Palestina, menjadi tantangan peningkatan kinerja ekonomi global.

Ketegangan politik tersebut masih mempengaruhi kegiatan rantai pasok di tingkat global, sehingga masih banyak negara yang mempertahankan suku bunga tinggi demi meredam potensi inflasi. Selain cenderung lambat, proses pemulihan ekonomi global juga tidak merata antarnegara.

Pada kasus China misalnya, negara tersebut harus menghadapi tingkat permintaan dalam negeri yang rendah. Ditambah lagi dengan beban akibat krisis di sektor properti, sehingga memberikan beban tambahan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut, yang pada akhirnya ikut menahan laju pertumbuhan ekonomi global.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Di tengah kondisi global yang masih penuh dengan tantangan, perekonomian Indonesia telah menunjukkan daya tahan yang sangat kuat. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,05%, walaupun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31%.

Kinerja perekonomian yang tetap positif tersebut, antara lain didukung oleh kemampuan pemerintah meredam inflasi, sehingga mampu menopang daya beli masyarakat. Menurut data BPS, pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 mencapai 4,83%.

Di sektor moneter juga cenderung stabil, walaupun Bank Indonesia (BI) sempat menaikkan suku bunga acuan, yakni BI 7-Day Reverse Repo Rate (7DRRR) pada Oktober 2023 menjadi 6,00%, dari sebelumnya 5,75%. Fasilitas simpanan dan pinjaman juga mengalami kenaikan, masing-masing menjadi sebesar 5,25% dan 6,75%.

Kenaikan suku bunga tersebut merupakan bagian dari upaya stabilitas perekonomian nasional, dengan meredam inflasi serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah, mengingat negara-negara maju masih mempertahankan suku bunga yang tinggi. Hasilnya, inflasi Desember 2023 tetap rendah, yakni 2,61% (*year on year*/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51% (*year on year*/yoy).

Ketahanan perbankan juga tetap terjaga baik, seperti tercermin dari permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) tercatat pada level yang tinggi, yakni sebesar 27,65% pada Desember 2023. Sementara risiko kredit tetap terkendali, dengan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) 2,19% (bruto) dan 0,75% (neto) pada Desember 2023.

Hasil *stress-test* Bank Indonesia mengungkapkan, ketahanan perbankan di Indonesia tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. BI akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan juga terus meningkat. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 3,73% (yoy) per Desember 2023. Sedangkan penyaluran kredit perbankan naik 10,38%. Peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan tersebut didorong oleh perbaikan permintaan, sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi dan perekonomian rumah tangga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIAN

Respons Direksi terhadap kondisi eksternal yang masih sangat dinamis pada tahun 2023 termasuk menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melihat kinerja Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja Direksi yang mengacu pada Rencana Bisnis Bank dan revisinya yang telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disampaikan kepada otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mempertimbangkan semua hal itu, Dewan Komisaris memandang bahwa secara keseluruhan, Direksi telah berhasil membuat Bank BTPN mencapai kinerja yang baik. Bank mencatat kinerja solid sebagai hasil komitmen Bank BTPN untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis yang diambil.

Kinerja yang solid tersebut, antara lain ditunjukkan melalui pendapatan bunga meningkat sebesar 18,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year*/yoy), sementara pendapatan bunga bersih tumbuh 3,1%, yakni mencapai Rp12,0 triliun. Sedangkan pendapatan operasional (konsolidasi) meningkat sebesar 3,1% (yoy). Untuk *Pre-Provision Operating Profit* (PPOP) mencapai Rp6,5 triliun. dan *Net Interest Margin* (NIM) meningkat menjadi di 6,45%.

Sebagai bagian dari komitmen pengelolaan risiko, pada tahun 2023 Bank BTPN memutuskan untuk menambah pencadangan kredit yang juga sebagai bentuk antisipasi berakhirnya POJK relaksasi kredit restrukturisasi pada 31 Maret 2024.

Dengan adanya penambahan pencadangan ini, biaya kredit meningkat menjadi sebesar Rp1,20 triliun, sehingga mempengaruhi perolehan laba bersih setelah pajak Bank BTPN. Secara konsolidasi, laba bersih Bank yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp2,36 triliun pada akhir tahun 2023, lebih rendah 23,8% (yoy).

Pengawasan Dewan Komisaris atas Perumusan dan Implementasi Strategi

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya pengurusan Bank BTPN oleh Direksi, dilakukan sejak dari proses perumusan hingga implementasi strategi. Kegiatan tersebut dipantau melalui Indikator Realisasi Rencana Bisnis Bank.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat gabungan yang dilakukan secara berkala maupun *adhoc*. Dalam rapat gabungan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi yang untuk tahun 2023, yang seluruhnya telah ditindaklanjuti. Rapat gabungan yang diselenggarakan secara rutin tersebut, terutama membahas perkembangan indikator kinerja Bank.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, sepanjang tahun 2023, perumusan strategi serta penerapannya telah tepat dan dijalankan dengan baik oleh Direksi. Sebab pencapaian kinerja Bank yang baik pada tahun buku tersebut tidak dapat dilepaskan dari perumusan strategi serta realisasi penerapannya oleh Direksi. Karena itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi, bukan hanya pada hasil, tetapi juga pada upaya Direksi sejak perumusan serta implementasi strategi yang direalisasikan bersama organisasi di bawahnya.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat

Selain melakukan pengawasan, Dewan Komisaris secara terus-menerus memantau serta memberikan nasihat kepada Direksi. Hal itu dilakukan melalui pemberian rekomendasi, baik disampaikan secara langsung dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun melalui komite di bawah Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 6 (enam) kali. Rapat-rapat tersebut membahas ratusan agenda dan di dalamnya termasuk masukan dari Dewan Komisaris untuk dijalankan oleh Direksi.

Pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi juga dapat dilakukan di luar rapat. Dewan Komisaris mendapatkan masukan dari komite-komite yang merupakan organ pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan hasilnya berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penyusunan prospek usaha mempertimbangkan banyak hal yang berpotensi mempengaruhi kinerja Bank BTPN. Di antaranya, memperhitungkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, dan dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk dan teknologi; melakukan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, and threats*) terkait posisi daya saing, posisi bisnis Bank di industri perbankan, kinerja keuangan, struktur organisasi, infrastruktur, kemampuan manajerial serta ketersediaan sumber daya manusia.

Termasuk dalam pertimbangan itu, analisis seluruh alternatif strategi dengan mempertimbangkan tujuan strategis dan toleransi risiko maupun tujuan jangka panjang Bank. Dari proses itulah, prospek usaha Bank diidentifikasi, yang antara lain mencakup potensi pertumbuhan kredit, pendanaan dan peningkatan laba perusahaan, rencana aksi korporasi, dan target usaha.

Dewan Komisaris juga telah memberikan pertimbangan kepada Direksi bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang menantang, terutama karena ada hajatan politik berupa pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah.

Untuk itu, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar terus memantau perkembangan bisnis dan mengantisipasi potensi tantangan yang mungkin terjadi pada tahun 2024. Selanjutnya, Dewan Komisaris juga secara berkala memberikan masukan berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), manajemen anti-fraud dan *monitoring* atas realisasi kinerja Bank BTPN secara berkala.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan fundamental yang kokoh dalam menjaga kesinambungan usaha Bank BTPN. Perbankan merupakan bisnis di sektor jasa keuangan yang menjadikan kepercayaan para pemangku kepentingan sebagai landasan dalam bisnis.

Mengingat pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG, selain melakukan pemantauan secara berkala atas penerapannya, Dewan Komisaris juga menjadi bagian dari proses dan pelaksanaan tata kelola tersebut. Di lingkungan Bank BTPN, evaluasi secara menyeluruh terkait penerapan GCG dilakukan secara berkala, yaitu semesteran dan tahunan.

Pada tahun buku 2023, penilaian penerapan GCG Bank BTPN yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) mendapatkan penilaian "Peringkat 2", sama dengan tahun sebelumnya. Hasil penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Penerapan GCG Bank BTPN juga dilakukan oleh pihak independen yang mengacu pada standar internasional, yakni ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Pada tahun 2023, total nilai (*overall score*) praktik GCG yang diperoleh Bank BTPN untuk pelaksanaan tahun 2022 adalah sebesar 99,19 poin.

Secara *overall*, hasil *assessment* implementasi GCG Bank BTPN mendapatkan predikat "Very Good", atau Level 4 (90,00-100,00). Pencapaian penilaian ini bermakna implementasi prinsip-prinsip GCG di Bank BTPN telah mematuhi seluruh persyaratan internasional sesuai dengan standar yang ditetapkan ACGS.

Penerapan Whistleblowing System

Dewan Komisaris memberikan dukungan penuh terhadap penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan Bank BTPN. Bahkan Dewan Komisaris, antara lain dalam kapasitas sebagai Komite Audit, melakukan pemeriksaan langsung ke saluran pengaduan tersebut serta pengelolaannya yang dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selain itu, untuk laporan indikasi *fraud* yang melibatkan Dewan Komisaris/Direksi/*Board of Management* (BoM)/ Pejabat Eksekutif ataupun Laporan Keuangan Bank, maka laporan tersebut dapat diteruskan kepada Komite Audit ataupun kepada Komite Pemantau Risiko. Komite tersebut akan memutuskan dari hasil investigasi yang dilakukan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penilaian Dewan Komisaris, penerapan WBS di lingkungan Bank BTPN telah memadai dan berjalan cukup baik.

Penilaian Komite di Bawah Dewan Komisaris

Hingga akhir tahun buku 2023, secara individual Bank BTPN, Dewan Komisaris memiliki 4 (empat) komite di bawahnya: Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Perusahaan. Seluruh komite bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja masing-masing komite.

Setiap tahun, Dewan Komisaris memberikan penilaian terhadap kinerja komite-komite tersebut. Parameter atau kriteria yang digunakan dalam penilaian mandiri (*self-assessment*), antara lain mencakup kehadiran dalam rapat. Hal ini penting, karena rekomendasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Selain itu, penilaian terhadap komite juga dengan mempertimbangkan hasil rekomendasi. Hal ini menunjukkan kompetensi komite. Dalam pelaksanaan parameter penilaian tersebut di tahun 2023, komite juga telah melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan akuntabilitas dan tata kelola Bank BTPN.

Mengacu pada sejumlah parameter tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa komite-komite yang merupakan organ di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dengan baik. Komite-komite tersebut telah memberikan dukungan secara maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASANNYA

Pada tahun 2023 terjadi 1 (satu) kali perubahan komposisi Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada 13 April 2023 menerima pengunduran diri Irwan Mahjudin Habsjah dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, yang efektif sejak ditutupnya RUPS. Bank BTPN mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatannya.

Pada saat bersamaan, RUPS mengangkat Onny Widjanarko sebagai Komisaris Independen Bank BTPN. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris hingga akhir tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Chow Ying Hoong
Komisaris	Takeshi Kimoto
Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen	Onny Widjanarko
Komisaris Independen	Edmund Tondobala
Komisaris	Ongki Wanadjati Dana

APRESIASI

Kinerja usaha Bank BTPN tahun 2023 yang positif tak dapat dipisahkan dari kerja keras yang dilakukan oleh manajemen serta organisasi di bawahnya. Karena itu, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh karyawan yang telah mewujudkannya.

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham yang telah memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris menjadi bagian dari perjalanan kegiatan usaha Bank BTPN. Begitu juga dengan arahan dan bimbingan yang diberikan, sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sementara kepada regulator, Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan pengawasannya, sehingga usaha Bank berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan praktik bisnis terbaik di tengah tantangan kegiatan usaha yang tidak mudah.

Begitu pun dengan para pemangku kepentingan lain, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah berjalan selama ini. Dengan dukungan para pemangku kepentingan, manajemen mampu menyajikan kinerja usaha yang baik untuk Tahun Buku 2023.

Jakarta, Maret 2024
Atas nama Dewan Komisaris,



Chow Ying Hoong
Komisaris Utama

DEWAN KOMISARIS







1. **Chow Ying Hoong**
   Komisaris Utama
2. **Onny Widjanarko**
   Komisaris Independen
3. **Ongki Wanadjati Dana**
   Komisaris







4. **Edmund Tondobala**
   Komisaris Independen
5. **Ninik Herlani Masli Ridhwan**
   Komisaris Independen
6. **Takeshi Kimoto**
   Komisaris



Di tengah kondisi eksternal yang masih menantang pada tahun 2023, Bank BTPN mampu mencatatkan pencapaian yang cukup baik. Bank membukukan pertumbuhan kredit yang solid, menjaga likuiditas dan pendanaan yang sehat serta mencatat rasio kecukupan modal yang kuat.

Bank BTPN akan mengakselerasi pertumbuhan dan terus mempromosikan optimisme dalam perekonomian melalui solusi layanan keuangan berkelanjutan untuk semua segmen, didukung oleh teknologi digital terdepan, dan dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap langkah kami untuk terus memberikan perubahan positif kepada nasabah.

Henoch Munandar
Direktur Utama

LAPORAN DIREKSI

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan Laporan Tahunan PT BANK BTPN Tbk ("Bank BTPN", "Bank) untuk Tahun Buku 2023, sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di tengah masih banyaknya tantangan yang dihadapi pada tahun buku, Bank berhasil membukukan kinerja yang positif.

Dinamika eksternal yang dihadapi oleh Bank misalnya, kinerja perbaikan ekonomi global dari dampak pandemi COVID-19 yang berjalan tidak merata antarnegara. Selain itu, masih adanya peningkatan tensi geopolitik yang menyebabkan risiko tingkat suku bunga global yang bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (fenomena *higher for longer*) sehingga menyebabkan tingginya laju inflasi global.

Bank sentral global, terutama di negara maju, berupaya untuk mengendalikan inflasi dengan tetap mempertahankan kebijakan moneter ketat sepanjang tahun. Kondisi ini ikut menekan kinerja perekonomian.

Mirip dengan berbagai negara lainnya, Indonesia juga masih menghadapi situasi yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 serta upaya untuk mengendalikan kondisi tersebut. Di antaranya, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan untuk mengurangi tekanan inflasi serta kurs rupiah. Kebijakan moneter yang ketat ini tentu ikut membebani perekonomian.

Kendati demikian, kondisi perekonomian Indonesia terbukti memiliki daya tahan yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,05% pada tahun 2023, walaupun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang 5,31%.

Ketahanan perbankan nasional juga tetap terjaga dengan baik. Hal itu, terutama tercermin dari permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) bank umum pada tahun 2023 mencapai 27,65% per Desember 2023. Risiko kredit juga tetap terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) yang rendah, yakni 2,19% (bruto) dan 0,75% (neto) per Desember 2023.

Hasil uji ketahanan (*stress test*) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa daya tahan perbankan tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. Selain itu, BI juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Peningkatan intermediasi perbankan pun terus berlanjut. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 3,73% secara tahunan (*year on year*/yoy) per Desember 2023, sedangkan kredit perbankan lebih tinggi 10,38% yoy. Peningkatan kredit/pembiayaan ini didorong oleh peningkatan permintaan kredit, sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi dan rumah tangga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha.

LAPORAN DIREKSI

Di tengah kondisi eksternal yang masih menantang pada tahun 2023, Bank BTPN mampu mencatatkan pencapaian yang cukup baik. Bank membukukan pertumbuhan kredit yang solid di akhir tahun. Peningkatan terutama terjadi pada segmen korporasi yang tumbuh 7,6% secara tahunan (*year on year/* yoy) serta usaha kecil dan menengah (SME), Jenius, dan Joint Finance yang masing-masing naik 17,7%, 131,1%, dan 681,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, lini usaha *Growing Business* Bank BTPN meningkat sebesar 9,5% (yoy). Namun *Transforming Business* menurun 4,1%, sehingga total kredit konsolidasi yang disalurkan Bank BTPN per akhir Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,1%, sehingga mencapai Rp156,6 triliun dari Rp146,1 triliun per akhir Desember tahun lalu.

Dari sisi permodalan, pada triwulan IV-2023, Bank BTPN telah memulai proses Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II). Perolehan dana dari penawaran umum tersebut (setelah dikurangi dengan biaya emisi), rencananya digunakan untuk pembiayaan proyek Bank yang akan datang dalam rangka mendorong pertumbuhan usaha.

Termasuk dalam perencanaan pemanfaatan dana tersebut adalah untuk membiayai akuisisi atas 2 (dua) perusahaan pembiayaan, yaitu PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance. Rencana penyelesaian akuisisi tersebut diharapkan terealisasi pada triwulan I-2024.

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2023, Bank BTPN dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan strategi pengembangan bisnisnya. Di antaranya, ketidakpastian pasar global yang berpotensi memengaruhi perekonomian domestik pada tahun 2023-2025. Meskipun kasus pandemi COVID-19 telah menurun, namun kehadiran varian baru dapat menghambat proses pemulihan ekonomi melalui pembatasan aktivitas sosial masyarakat, seandainya terjadi kenaikan kasus.

Begitu pula dengan ketegangan politik global dan konflik antarnegara yang masih berlangsung, telah berpengaruh terhadap pasokan dan harga komoditas di tahun 2023. Perang antara Rusia dan Ukraina akan terus memberikan tekanan pada *supply chain* global, sehingga mengakibatkan tekanan tambahan pada harga komoditas dan energi.

Kondisi tersebut juga mendorong ketidakstabilan ekonomi lebih lanjut. Konflik Israel-Hamas berpotensi meningkat dan menambah tekanan pada kinerja perekonomian global, inflasi, serta harga energi.

Di pasar keuangan, kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, yakni Federal Reserve (The Fed), akan menambah tekanan terhadap stabilitas rupiah dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Begitu juga dengan meningkatnya inflasi akibat kenaikan harga komoditas dan energi, tentu menjadi beban pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kenaikan suku bunga acuan yang digunakan sebagai upaya untuk meredam inflasi, berpeluang menaikkan risiko krisis.

Dari sisi internal, Bank BTPN masih mengalami berlanjutnya tekanan dari *transforming business*. Bank perlu mengelola bisnis yang tergolong sebagai *mature* dengan baik.

Target Pasar, Strategi dan Kebijakan Strategis, serta Implementasinya

Pada tahun 2023, sasaran target pasar Bank BTPN adalah fokus melayani segmen ritel dan *mass market* yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas prasejahtera produktif; segmen *consuming class*; serta segmen korporasi. Fokus bisnis tersebut didukung oleh unit-unit bisnis Bank, yaitu BTPN Wealth Management Business –unit bisnis pendanaan dan *wealth management* yang fokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga dari segmen individu berpenghasilan menengah ke atas.

Unit bisnis lain yang memberikan dukungan terhadap pencapaian target pasar adalah BTPN Retail Lending, unit yang fokus melayani nasabah pensiunan, prapensiunan dan usaha mikro. Kemudian, BTPN Business Banking – yang fokus melayani pelaku usaha kecil dan menengah, Jenius untuk segmen *consuming class* melalui *platform digital*, serta unit bisnis korporasi yang fokus melayani perusahaan besar nasional, multinasional, komersial, dan Jepang.

Selain itu, Bank BTPN memiliki anak usaha, yaitu PT Bank BTPN Syariah Tbk yang fokus melayani nasabah dari komunitas prasejahtera produktif. Melalui program Daya, yakni pemberdayaan *mass market*

yang berkelanjutan dan terukur, Bank BTPN secara reguler memberikan pelatihan dan informasi untuk meningkatkan kapasitas nasabah, sehingga memiliki kesempatan tumbuh dan mendapatkan peluang untuk hidup yang lebih baik.

Secara umum, sejumlah strategi dan kebijakan strategis yang dijalankan oleh Bank pada tahun buku 2023, yakni:

1. Meningkatkan pinjaman dengan menetapkan *risk appetite* yang sejalan tujuan serta melalui mendorong penyalurannya melalui rantai nilai.
2. Meningkatkan basis pelanggan ritel dan pendapatan dengan meningkatkan kemampuan Jenius sebagai *platform* dan *wealth management*, mengoptimalkan saluran distribusi, kolaborasi lintas *line of business* (LOB), dan kemitraan strategis dengan ekosistem pasar.
3. Meningkatkan *Current Account and Saving Account* (CASA) dan pendapatan *fee base* serta *foreign exchange* dengan mengembangkan proposisi nilai pelanggan, kapabilitas, produk, dan layanan.
4. Berinvestasi pada talenta serta menanamkan budaya berbasis kepercayaan yang berkinerja tinggi.
5. Menerapkan keunggulan operasional secara *bank wide* dengan menerapkan digitalisasi dan *excellence process*.
6. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan *return on assets*.
7. Mengembangkan proposisi nilai dan kolaborasi yang dioptimalkan ke tingkat yang diperbolehkan oleh regulator dengan BTPN Syariah, anak perusahaan SMBC di Indonesia, dan jaringan global SMBC.
8. Membangun keunggulan operasional teknologi informasi dan terus membangun kapabilitas keamanan *digital* dan siber.
9. Terus memperkuat Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan GCG untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis serta Upaya Memastikan Implementasi Strategi

Saat Bank BTPN menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB), prosesnya antara lain dilakukan melalui rapat Direksi, yang melakukan kajian atas target bisnis dan anggaran maupun risiko. Begitu juga dengan kesesuaian strategi terhadap anggaran dan target bisnis serta kesesuaian strategi dengan *risk appetite* Bank. Kajian dilakukan untuk memberikan rekomendasi serta prioritas strategi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif.

Setelah perencanaan bisnis, anggaran dan strategi ditentukan serta disetujui, selanjutnya dilakukan perumusan KPI (*Key Performance Indicators*). Proses ini untuk membantu manajemen dalam memantau kinerja Bank melalui indikator-indikator (kualitatif dan kuantitatif) yang lebih praktis dan terukur.

Direksi melakukan *monitoring* KPI secara berkala untuk memastikan strategi dan kebijakan strategis berjalan dengan baik dalam rangka pencapaian target usaha. Perkembangan pencapaian KPI keuangan tercakup dalam materi *Board of Management* (BOM) *Meeting* yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali.

Kemudian, secara triwulanan, pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis. Dokumen tersebut mencakup tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi rencana bisnis.

Uraian proses tersebut menggambarkan bahwa Direksi Bank BTPN terlibat sejak dalam perumusan strategi untuk mencapai target Bank. Selain itu, pemantauan Direksi terhadap implementasi strategi dan kebijakan strategis juga terus dilakukan secara berkala, antara lain melalui rapat evaluasi pencapaian KPI.

Perbandingan antara Realisasi dan Target

Penerapan strategi dan kebijakan strategis tahun 2023 yang tepat yang diterapkan oleh Bank BTPN telah menghasilkan kinerja Bank yang baik. Seperti terlihat dari pendapatan bunga, pada tahun buku tersebut tumbuh 18,3% *year-on-year* (yoy) menjadi Rp18,8 triliun, sementara pendapatan bunga bersih mencapai Rp12,0 triliun, naik 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dibandingkan target, pencapaian pendapatan bunga bersih tersebut adalah 99,8%.

Untuk *Net Interest Margin* (NIM) tercatat sebesar 6,45%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 6,36%. Kenaikan pendapatan bunga bersih ini didorong oleh pertumbuhan kredit segmen korporasi yang mencapai 7,6% yoy, pembiayaan SME 17,7% yoy dan pembiayaan Jenius 131,1% yoy serta pembiayaan Joint Finance 681,7%.

Secara keseluruhan, total kredit yang disalurkan oleh Bank BTPN pada tahun 2023 mencapai Rp156,6 triliun, lebih tinggi 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dari sisi kualitas kredit, *Non Performing Loan* (NPL) Bank tercatat sebesar 1,36%, menurun dibandingkan tahun lalu yang sebesar 1,43%. Dibandingkan dengan target, pencapaian penyaluran kredit adalah 97,8%.

LAPORAN DIREKSI

Pendapatan operasional Bank secara tahunan juga tumbuh 3,1% yang, selain dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan bunga bersih, juga didukung oleh naiknya pendapatan operasional lainnya sebesar 3,0% (yoy). Sementara *Pre-Provision Operating Profit* (PPOP) mencapai Rp6,5 triliun.

Pada tahun 2023, Bank BTPN telah memutuskan untuk menambah pencadangan kredit yang juga sebagai bentuk antisipasi berakhirnya POJK relaksasi kredit restrukturisasi pada 31 Maret 2024.

Melalui penambahan pencadangan ini, biaya kredit meningkat sebesar Rp1,2 triliun. Kebijakan itu memengaruhi laba bersih setelah pajak Bank BTPN (konsolidasi) yang diatribusikan, kepada pemilik entitas induk, sehingga lebih rendah 23,8% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp2,36 triliun. Sedangkan dibandingkan target, pencapaian laba bersih tersebut adalah 97,3%.

Dari sisi penghimpunan dana, CASA Bank tercatat sebesar Rp44,2 triliun, tumbuh 10,0% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, rasio CASA pada tahun 2023 meningkat menjadi 40,8% dari 35,0% pada tahun 2022. Sementara jenis simpanan deposito berjangka mengalami penurunan 14,3% menjadi Rp64,0 triliun. Sehingga saldo dana pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 5,8% (yoy) menjadi Rp108,2 triliun.

Komitmen terhadap Pengembangan UMKM

Bank BTPN senantiasa mengalokasikan penyaluran kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai wujud komitmen Bank dalam menjaga inklusivitas layanan serta dukungan bagi usaha yang menjadi penopang perekonomian nasional tersebut. Karena itu, Bank telah menyusun rencana strategis untuk memenuhi RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudential) bagi pembiayaan UMKM berdasarkan 3 (tiga) pilar yang telah ditetapkan, yakni:

1. ***Direct Financing & Supply Chain Financing***
   a. *Scale up* bisnis UMKM dengan meningkatkan layanan dan penawaran produk yang ada serta mengoptimalkan jaringan cabang.
   b. Memberikan pinjaman kepada nasabah usaha kecil dan menengah (SME), komersial & korporasi yang menyalurkan pinjaman ke jaringan pemasok/pembeli UMKM.
   c. Pembiayaan melalui *supply chain financing*, melalui kerja sama internal dengan *Wholesale Banking* dan *Corporate Japanese*.
   d. Memberikan pinjaman kepada target pasar baru SME secara massal melalui saluran digital, yakni *platform* SME Digital.
   e. Melalui Portofolio Pensiun, memberikan pinjaman kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang memenuhi kriteria dalam perhitungan RPIM.

2. **Pembiayaan melalui Lembaga Keuangan**
   a. Pembiayaan melalui Bank Perekonomian Rakyat (BPR) - sebelumnya diistilahkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat - dengan skema “pelaksana” pinjaman untuk UMKM.
   b. Pembiayaan melalui perusahaan *multi-finance* dan *peer-to-peer* (P2P) melalui skema *loan channeling*.

3. **Pembiayaan melalui SBPI (Surat Berharga Pembiayaan Inklusif)**
   Inisiatif ini dilakukan melalui Departemen Treasury, yakni menjajaki penerbitan atau pembelian SBPI/ obligasi.

Melalui penerapan sejumlah inisiatif tersebut, hingga akhir Desember 2023, rasio RPIM tercatat sebesar 29,14%. Pencapaian tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 24,57%.

PROSPEK USAHA

Perekonomian global diproyeksikan tumbuh 3.0% pada 2024, ditopang oleh penguatan perekonomian Amerika Serikat dan India sejalan dengan konsumsi dan investasi yang diharapkan lebih tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di China dan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Inggris dan Jepang selama dua triwulan berturut-turut diekspektasikan berlanjut di 2024 dan dapat menurunkan propek pertumbuhan ekonomi global. Risiko tekanan inflasi global dapat bersumber dari eskalasi konflik geopolitik global yang dapat menyebabkan peningkatan harga komoditas energi. Selain itu, adanya gangguan cuaca turut berpotensi pada peningkatan risiko inflasi global dan domestik.

Tren penurunan tingkat suku bunga acuan di Amerika Serikat diekspektasikan akan dimulai pada semester kedua tahun 2024 dikarenakan tekanan inflasi Amerika Serikat masih relatif cukup tinggi. Adanya penguatan

indeks dollar membuat terjadinya pelemahan nilai tukar negara berkembang terhadap Amerika Serikat. Hal ini membuat Bank Indonesia berhati-hati dalam memutuskan kapan dimulainya siklus penurunan tingkat suku bunga acuan domestik, sehubungan adanya peningkatan risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yang masih relatif cukup tinggi, walaupun risiko inflasi domestik relatif terjaga di level 2.6% YoY pada 2023.

Inflasi 2024 dieskpektasikan akan berada pada kisaran 2.5% dengan deviasi 1%. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan berada pada kisaran 4.7%-5.5% YoY untuk 2024, didukung oleh permintaan domestik yang didukung dengan adanya penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan investasi khususnya bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan meningkat dalam kisaran 10-12% YoY.

Pada industri perbankan, Bank BTPN mengantisipasi adanya potensi peningkatan kompetisi dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berimbas pada penyesuaian suku bunga dana dan kredit secara bertahap. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bank tetap menjaga resiliensi dan mampu menyerap berbagai potensi risiko di tengah dinamika lingkungan ekonomi global.

Dalam rangka mendukung tujuan jangka panjang, Bank BTPN juga akan menciptakan pertumbuhan anorganik. Untuk mewujudkan upaya itu, pada tahun 2024 Bank menargetkan dapat merealisasikan rencana akuisisi 51% saham di PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF) dengan melakukan *right issue*, yang rencananya diselesaikan di Triwulan I 2024. Bank meyakini aksi korporasi ini akan melahirkan berbagai potensi sinergi di antara entitas dalam grup.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 17 tahun 2023 yang menghapus POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Kebijakan itu bertujuan memperkuat tata kelola serta mendorong perbankan meningkatkan penerapan tata kelola.

Agar selaras dengan peraturan yang berkembang, Bank BTPN terus melakukan pemutakhiran dan penyesuaian secara bertahap terhadap kebijakan, prosedur dan petunjuk pelaksana lainnya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di lingkungan Bank. Bagi Bank BTPN, penerapan GCG tidak hanya berlaku pada semua tingkat organisasi Bank, tetapi juga pada kelompok usaha yang dilakukan melalui koordinasi secara berkala di bidang audit, risiko, keuangan, maupun kepatuhan.

Sebagai wujud kepatuhan, Bank BTPN juga telah menerapkan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pendekatan "*comply or explain*" sesuai Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Dalam rangka memperkuat struktur tata kelola, pada tahun 2023 Bank BTPN berinisiatif membentuk 1 (satu) Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Tata Kelola. Komite ini memiliki peran untuk memantau dan mengevaluasi fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata kelola dalam satu kelompok keuangan Bank.

Selain itu, Bank membentuk 2 (dua) Komite Direksi, yaitu Komite *Fraud* yang memiliki tugas dan tanggung jawab menindaklanjuti laporan hasil investigasi terkait adanya kejadian *fraud*, menetapkan sanksi kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kejadian *fraud*, serta menentukan langkah hukum yang akan diambil. Selanjutnya, Komite Keberlanjutan. Komite ini bertugas untuk menyusun strategi, kebijakan, target serta melakukan pengawasan, evaluasi dan rekomendasi terkait dengan implementasi keuangan keberlanjutan di Bank BTPN.

Penerapan prinsip GCG juga terlihat di bidang prosedur pemilihan vendor, anti korupsi, *whistleblowing system*, serta pengendalian internal. Bank BTPN telah memiliki kebijakan di bidang-bidang tersebut, bahkan melakukan evaluasi secara berkala.

Untuk memastikan penerapan GCG Bank BTPN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan GCG di tahun 2023, dengan hasil "Peringkat 2" (2022: 2). Hasil penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

LAPORAN DIREKSI

Bank BTPN juga menunjuk pihak independen untuk melakukan penilaian penerapan GCG yang mengacu pada prinsip-prinsip ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Pada tahun 2023, total nilai (*overall score*) praktik GCG yang diperoleh Bank BTPN untuk pelaksanaan tahun 2022 adalah sebesar 99,19 poin.

Secara *overall*, hasil *assessment* implementasi GCG Bank BTPN mendapatkan predikat "Very Good", atau Level 4 (90,00-100,00). Pencapaian penilaian ini bermakna implementasi prinsip-prinsip GCG di Bank BTPN telah mematuhi seluruh persyaratan internasional sesuai dengan standar yang ditetapkan ACGS.

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diterapkan oleh Bank telah mengacu pada standar laporan keuangan berkelanjutan, seperti tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Laporan tersebut dibuat secara lengkap dan terpisah dari laporan tahunan ini.

Bank memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sambil turut mengelola dampak iklim melalui integrasi antara ekonomi hijau dengan kerangka model bisnis Bank. Dengan fokus ini, Bank BTPN ingin memastikan bahwa langkah yang diambil tidak hanya memberikan manfaat bagi perekonomian nasional secara keseluruhan, namun juga berdampak positif terhadap upaya keberlanjutan, pengelolaan perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari SMBC Group, Bank BTPN memperkuat komitmen keberlanjutannya untuk mendukung agenda kebijakan keberlanjutan SMBC Group dalam mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada 2030 untuk kegiatan operasional Bank dan 2050 untuk target NZE pada *loan* dan portofolio. Komitmen ini merupakan bentuk kontribusi SMBC Group untuk dunia yang berkelanjutan dan mengambil tindakan khusus dalam mengatasi perubahan iklim serta memajukan masyarakat yang lebih baik selaras dengan komitmen "Paris Agreement" mencapai emisi nol bersih.



Dalam rangka mencapai komitmen keberlanjutan, Bank BTPN mengembangkan strategi keberlanjutan sebagai berikut :

1. **Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Berkelanjutan**

   Sebagai penyedia jasa keuangan, Bank BTPN berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendorong dan mempromosikan sistem ekonomi yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu Bank BTPN terus mengembangkan inovasi produk keuangan berkelanjutan dengan berpedoman kepada kebijakan keberlanjutan (*sustainability policy*) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

   Melalui penerapan keuangan berkelanjutan, Bank bertekad tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang sukses, tetapi juga menjadi mitra membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh komunitas. Komitmen ini diwujudkan melalui dukungan Bank terhadap pemberian fasilitas pembiayaan ramah lingkungan kepada kegiatan atau proyek ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan proyek ekonomi yang berkelanjutan.

Realisasi pembiayaan berkelanjutan itu, seperti untuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin pertama di Indonesia berkapasitas 75MW yang berlokasi di Sidrap, Sulawesi Selatan. Selain itu, pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata, Jawa Barat yang merupakan proyek pembangkit tenaga surya skala besar pertama di Indonesia.

2. **Pengembangan Kapasitas Karyawan**
   Bank BTPN mengelola sumber daya manusia yang dimiliki berdasarkan prinsip keberlanjutan dalam rangka menciptakan nilai jangka panjang bagi organisasi, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui pendekatan yang memperhatikan aspek kesejahteraan, keberagaman dan inklusi, serta perlakuan yang adil dan transparan. Bank BTPN berupaya menghadirkan lingkungan kerja yang baik dan mampu mendorong karyawannya menciptakan dampak positif bagi masyarakat (#MoreThanAJourney).

3. **Implementasi Prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam Organisasi dan Tata Kelola**
   Bank BTPN mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dalam mengelola aktivitas usaha melalui penerapan operasional yang ramah lingkungan. Bank mendorong budaya keberlanjutan melalui upaya penghematan energi, pengurangan emisi karbon dan lain-lain untuk mencapai *net zero emission* (NZE) gas rumah kaca (GRK) pada cakupan 1 dan 2 pada tahun 2030.

   Upaya mendorong efisiensi energi dari pengelolaan operasional di internal yang direalisasikan pada tahun 2023, antara lain inisiatif pemasangan solar panel di kantor cabang Gunung Sahari. Bank BTPN memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) ini untuk memenuhi kebutuhan listrik cabang.

Selain itu, Bank BTPN menargetkan pencapaian *net zero emission* GRK cakupan 3 pada tahun 2050. Kebijakan ini mencerminkan tekad Bank untuk berkontribusi pada upaya memitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jejak karbonnya secara signifikan dalam operasional dan kegiatan bisnisnya.

Pada tahun ini Bank BTPN juga telah meluncurkan kanal khusus keberlanjutan pada situs resmi Bank, yakni: https://www.btpn.com/id/tentang-kami/keberlanjutan. Inisiatif untuk mendukung dan memperkuat transparansi informasi terkait kebijakan dan kinerja keberlanjutan yang diselenggarakan. Sedangkan yang secara berkala, sesuai ketentuan OJK, Bank menerbitkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disampaikan dalam buku terpisah dari Laporan Tahunan ini.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Fokus pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bank BTPN pada tahun 2023, terutama dilakukan pada pengembangan sumber daya talenta agar mampu mendukung pertumbuhan organisasi secara berkesinambungan. Untuk itu, melalui Direktorat Human Resources, Bank telah melaksanakan beberapa inisiatif penting dalam menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta (*to attract, develop and retain talents*). Di antaranya, yaitu:

1. **Pengembangan Organisasi**
   Meliputi peninjauan organisasi, yang termasuk peninjauan organisasi, program *engagement* karyawan, keragaman dan inklusi, serta melanjutkan implementasi dan *review* lokasi kerja fleksibel. Sehubungan dalam proses manajemen talenta, Bank telah melakukan *assessment* profil talenta, perencanaan suksesi termasuk perancangan program pengembangan bagi kandidat suksesor, yang meliputi pelatihan, *coaching* serta program pengembangan lainnya.

   Terkait dengan program *engagement* karyawan, pada tahun 2023 Bank kembali meluncurkan survei keterikatan karyawan (*engagement survey*) yang diikuti oleh seluruh karyawan. Sedangkan untuk implementasi lokasi kerja fleksibel, Bank melanjutkan proses implementasi kerangka kerja lokasi kerja fleksibel kepada populasi *batch* berikutnya.

2. **Pengembangan Talenta**
   Bank berkomitmen melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitasnya secara berkelanjutan, yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi kerja SDM, baik di bidang teknis, nonteknis dan kepemimpinan. Selain itu, Bank juga memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM.

LAPORAN DIREKSI

Untuk mendukung proses manajemen pembelajaran dan pelatihan pegawai secara keseluruhan, Bank menyediakan *learning management system* yang diakses dari *platform* HRIS Darwinbox. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pegawai Bank BTPN dalam mengakses *e-learning* Bank, yang saat ini materinya dapat diakses melalui *mobilephone* pengguna.

Selain itu, Bank memastikan bahwa karyawan memenuhi sertifikasi wajib perbankan dan profesi sesuai persyaratan kompetensi dalam penugasannya.

3. Sistem Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023, Bank menjalankan inisiatif otomasi dan proses transformasi digital dalam siklus proses dan pengelolaan sumber daya manusia bagi karyawan. Bank telah menerapkan teknologi baru yang meliputi Sistem Utama HR (*Human Resources Core System*), *Platform Mobile HR* (*HR Mobile Platform*), dan persiapan atas Dashboard HR.

4. Pengkajian Remunerasi dan Manfaat Karyawan

Sejalan dengan strategi menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta, Bank secara konsisten melanjutkan proses pengkajian terhadap remunerasi dan manfaat bagi karyawan. Upaya itu dilakukan agar Bank BTPN terus kompetitif di pasar talenta dan sejalan dengan perubahan pasar.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi (TI) Bank BTPN pada tahun 2023 merupakan bagian dari Mid Term Plan (2022-2025). Fokusnya pada pengembangan kapabilitas digital, ketahanan siber, penguatan tata kelola TI serta secara aktif membantu Bank dalam mencapai target-target dan arahan bisnis.

Beberapa capaian penting sepanjang tahun buku tersebut, antara lain mencakup:

1. Tercapainya stabilisasi sistem TI setelah Bank mengonsolidasikan *core banking* yang memudahkan pengelolaan sistem serta memungkinkan Bank menawarkan solusi digital, termasuk untuk segmen korporasi. Selain itu, *core banking* juga dapat menata transaksi dan proses *corporate banking* dengan lebih baik.
2. Penyempurnaan layanan sistem kartu kredit melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, penambahan fitur pada *core system* kartu kredit yang di integrasikan ke *digital platform* Jenius. Melalui inisiatif tersebut, Bank BTPN dapat memberikan layanan digital kartu kredit yang lebih lengkap
3. Menjaga ketersediaan talenta di bidang TI agar dapat mendukung kesinambungan produk digital BTPN serta digitalisasi proses di Bank BTPN.
4. Pengelolaan dan peningkatan kemampuan siber di BTPN, sehingga mampu secara efektif menjaga keamanan data dan transaksi nasabah.
5. Melakukan konsolidasi, peremajaan serta *sunset* atas aplikasi Bank, sehingga portofolio layanan TI menjadi lebih efektif dan lebih lincah mendukung bisnis Bank.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASANNYA

Sepanjang tahun 2023, telah terjadi 2 (dua) kali perubahan komposisi Direksi. Pertama, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada 13 April menerima pengunduran diri Kan Funakoshi dari jabatannya sebagai Direktur Bank. Pada kesempatan yang sama, RUPS mengangkat Atsushi Hino sebagai Direktur untuk masa jabatan hingga ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2025.

Kedua, RUPS Luar Biasa menerima pengunduran diri Hiromichi Kubo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. RUPS sekaligus mengangkat Keishi Kobata sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan hingga RUPS Tahunan Perseroan tahun 2025.

Kepada anggota Direksi yang tidak lagi menjabat, Bank BTPN mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatannya. Bank juga menyampaikan selamat bergabung kepada anggota Direksi baru untuk bersama-sama meningkatkan kinerja Bank. Selanjutnya, komposisi Direksi hingga akhir tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama	Darmadi Sutanto
Wakil Direktur Utama	Kaoru Furuya
Direktur	Dini Herdini
Direktur	Atsushi Hino
Direktur	Keishi Kobata
Direktur	Merisa Darwis
Direktur	Hanna Tantani

APRESIASI BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Di tengah kondisi eksternal yang masih dinamis serta memberikan tantangan, Bank BTPN berhasil membukukan kinerja tahun 2023 yang positif. Pencapaian tersebut tentunya berkat dukungan dari banyak pihak, baik di internal maupun eksternal Bank.

Direksi menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atas arahan dan kepercayaan yang diberikan dalam mengelola kegiatan usaha Bank. Begitu juga dengan regulator atas segala bimbingannya.

Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada para karyawan yang telah mencurahkan seluruh sumber daya untuk mendukung pencapaian Bank. Termasuk juga kepada para pemangku kepentingan lain, seperti nasabah, mitra usaha yang telah bekerja sama dengan baik selama ini, terima kasih atas dukungannya. Bank BTPN berharap tahun depan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal maupun eksternal, akan berkembang lebih baik.

Jakarta, 28 Februari 2024
Atas nama Direksi,



Henoch Munandar
Direktur Utama

DIREKSI



1. **Henoch Munandar**
   Direktur Utama
2. **Atsushi Hino**
   Direktur
3. **Keishi Kobata**
   Direktur
4. **Merisa Darwis**
   Direktur



5. **Darmadi Sutanto**
   Wakil Direktur Utama
6. **Hanna Tantani**
   Direktur
7. **Dini Herdini**
   Direktur Kepatuhan
8. **Kaoru Furuya**
   Wakil Direktur Utama

BOARD OF MANAGEMENT



1. **Helena**
   Head of Wealth Management Business and Network & Distribution
2. **Nathan Christianto**
   Head of Wholesale and Commercial Banking
3. **Sendiaty Sondy**
   Head of Wholesale and Commercial Banking
4. **Jeffrey C. Tjoeng**
   Head of Business Banking
5. **Purnomo B. Soetadi**
   Head of Retail Lending Business



6. **Jeny Mustopha**
   Head of Information Technology
7. **Nurhajati Soerjo Hadi**
   Head of Internal Audit
8. **Wiwig Santoso**
   Head of Treasury
9. **Mira Fitria**
   Head of Human Resources
10. **Irwan Sutjipto Tisnabudi**
    Head of Digital Banking

PEJABAT EKSEKUTIF





SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT BANK BTPN TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT BANK BTPN Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT BANK BTPN Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2024

DEWAN KOMISARIS



Chow Ying Hoong
Komisaris Utama

Takeshi Kimoto
Komisaris

Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen

Onny Widjanarko
Komisaris Independen

Edmund Tondobala
Komisaris Independen

Ongki Wanadjati Dana
Komisaris

DIREKSI



Henoch Munandar
Direktur Utama



Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama



Darmadi Sutanto
Wakil Direktur Utama

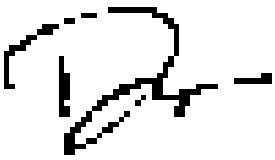

Dini Herdini
Direktur Kepatuhan



Atsushi Hino
Direktur

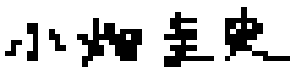

Keishi Kobata
Direktur



Merisa Darwis
Direktur



Hanna Tantani
Direktur



PROFIL PERUSAHAAN

60 Informasi Umum Perusahaan
61 Riwayat Singkat Perusahaan
62 Jejak Langkah
64 Bidang Usaha
65 Produk dan Layanan
66 Struktur Organisasi
68 Visi Misi
69 Nilai-Nilai Utama
70 Profil Dewan Komisaris
76 Profil Direksi
84 Profil Pejabat Eksekutif
88 Statistik Karyawan
90 Pemegang Saham Utama dan Pengendali
91 Entitas Induk Terakhir
92 Pemegang Saham Utama
95 Daftar Entitas Anak
96 Wilayah Operasional
99 Keanggotaan pada Asosiasi
99 Kronologi Pencatatan Saham
100 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
100 Kantor Akuntan Publik
101 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Penunjang Pasar Modal
102 Informasi pada *Website* Perusahaan

> **Misi utama Bank adalah untuk memberikan layanan yang optimal kepada nasabah dengan tujuan untuk membantu mereka mencapai tujuan dan aspirasi mereka, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.**

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

Nama Perusahaan
PT BANK BTPN Tbk

bank btpn SMBC A MEMBER OF SMBC Group

Informasi Perubahan Nama
1958 : Nama awal adalah Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil)
1985 : Bapemil berubah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
2019 : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berubah menjadi PT BANK BTPN Tbk

Bidang Usaha
Layanan Perbankan

Modal Dasar
Rp300.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Dibayar Penuh
Rp162.982.137.380

Nama Bursa Efek dan Tanggal Pencatatan
Bursa Efek Indonesia
12 Maret 2008

Kode Saham
BTPN

ISIN Code
101000118508

Tahun Pendirian
1958

Peringkat (Fitch)
- Peringkat oleh PT Fitch Ratings Indonesia AAA (idn), outlook stabil dan F1+ (idn)
- Peringkat oleh PEFINDO idAAA (Triple A, Stable Outlook)

Komposisi Pemegang Saham
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (89,98%)
- PT Bank Central Asia Tbk (1,02%)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (0,15%)
- Masyarakat (<5%) (7,72%)
- Saham Treasuri (1,13%)

Dasar Hukum Pendirian
PT BANK BTPN Tbk ("Bank BTPN; BTPN; Bank") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 dari Notaris Noezar S.H. Akta ini mengalami perubahan yang termuat pada Akta tanggal 31 Mei 1960 No. 203 dan akta tertanggal 7 November 1960 No. 53 Notaris Noezar S.H.,telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14 Februari 1961 No. 13, tambahan No. 5.

Alamat Kantor Pusat
Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Website dan E-mail
www.btpn.com
info@btpn.com
corporate.communication@btpn.com

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT BANK BTPN Tbk (“Bank BTPN”, “BTPN”, “Bank”) didirikan pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat, yang pada awalnya hanya menerima simpanan dan memberi pinjaman kepada anggota. Kemudian Bank bertransformasi menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 1985.

Bank BTPN resmi berdiri sebagai bank pada tahun 1993, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan tersebut terjadi sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998).

Pada usianya yang ke-50 pada tahun 2008, Bank BTPN melakukan *go public* dengan melepas saham melalui penawaran umum perdana (IPO) serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun 2008 juga merupakan salah satu tonggak sejarah bagi BTPN, setelah TPG Nusantara S.a.r.l mengakuisisi 71,61% saham BTPN. Fokus Bank pun bertambah ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bank BTPN melakukan transformasi lanjutan melalui melakukan merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) yang efektif sejak tanggal 1 Februari 2019.

Sejak tahun itu, Bank BTPN resmi beroperasi sebagai bank baru hasil penggabungan usaha. Dalam menjalankan bisnisnya, Bank menjadi bank universal dengan dukungan teknologi digital yang memiliki bisnis lebih lengkap untuk melayani nasabah lebih luas, mulai dari segmen ritel hingga korporasi.

Informasi Perubahan Nama

Nama yang digunakan pertama kali pada tahun 1958 adalah Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil). Bapemil bertransformasi menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang berlaku pada waktu itu.

Setelah resmi merger dengan SMBCI, nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berubah menjadi PT BANK BTPN Tbk. Perubahan nama ini resmi berlaku setelah keputusan sebagai berikut:

1. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 22 Januari 2019;
2. Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-9/PB.1/2019 tentang Penetapan Izin Usaha atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT BANK BTPN Tbk tanggal 28 Januari 2019.



JEJAK LANGKAH

1958-1986

- Bank didirikan di Bandung, Jawa Barat, dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil).
- Pada 1960, Bank memperoleh izin sebagai bank komersial.
- Pada 1986, Bank berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

2008

Pada 2008, TPG Nusantara S.à.r.l. mengakuisisi saham Bank sebesar 71,6% melalui pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Bank menjadi bank publik dengan nilai aset Rp13,7 triliun.

2012

- BTPN Syariah - Tunas Usaha Rakyat tumbuh pesat, sampai akhir tahun telah melayani 28.927 sentra komunitas di Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur serta memberdayakan 444.000 nasabah di sentra komunitas.
- Bank menyelesaikan program uji coba *mobile banking* baru yang diberi nama BTPN Wow!. Program ini kemudian diluncurkan pada 2015.

2014

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Jepang telah meningkatkan kepemilikan sahamnya di BTPN dan menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 40,0%. SMBC merupakan bank terbesar kedua di Jepang berdasarkan nilai pasar dengan aset sebesar US$1,3 triliun.

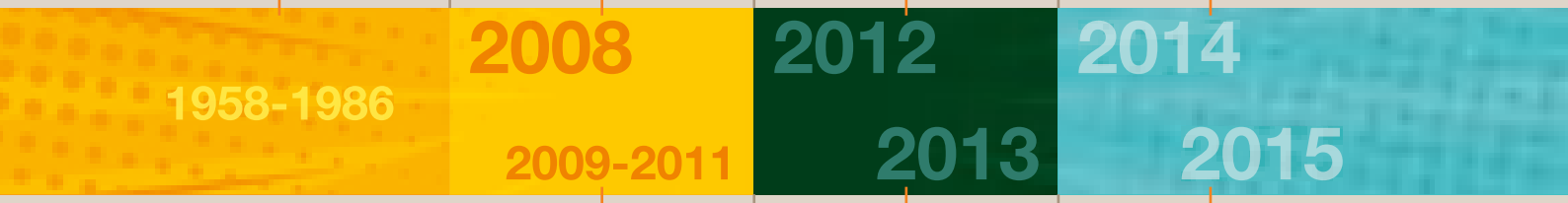

2009

- Bank meluncurkan bisnis usaha mikro dan kecil (UMK) dengan nama BTPN Mitra Usaha Rakyat dengan membuka 539 kantor cabang dan berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit yang mencapai Rp2,3 triliun.
- Bank menerbitkan obligasi rupiah jangka panjang yang pertama, dengan peringkat A+ (National Scale Rating) dari Fitch Ratings dan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dalam mata uang rupiah dari International Finance Corporation, anak perusahaan Bank Dunia.

2010

Nilai aset Bank tumbuh menjadi Rp34,5 triliun dibandingkan Rp13,7 triliun dua tahun sebelumnya. Menjadi bank ke-10 terbesar dalam kapitalisasi pasar, serta menduduki peringkat ke-5 dalam jumlah cabang dan peringkat ke-6 dalam jumlah karyawan.

2011

- Bank meluncurkan Daya, program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis Bank. Bisnis Pendanaan memperkenalkan *brand* Sinaya (Sinar yang memberdayakan), yang terhubung dengan inisiatif Daya.
- Menyelesaikan uji coba bisnis Perbankan Komunitas Syariah (BTPN Syariah – Tunas Usaha Rakyat).
- Bank memperluas jaringan layanan ATM dengan jaringan ATM Prima selain jaringan ATM Bersama yang sudah ada. Total jaringan yang terhubung mencapai lebih dari 57.331 ATM di seluruh Indonesia.

2013

- Pembiayaan BTPN Syariah – Tunas Usaha Rakyat tumbuh dua kali lipat mencapai sekitar Rp1,4 triliun dan menyumbang 3% dari total kredit BTPN. Jaringan Unit Usaha Syariah mencapai 69.500 sentra di seluruh nusantara, yang memberdayakan lebih dari 931.500 nasabah di daerah pedesaan.
- Bank mengakuisisi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang dikonversikan menjadi bank syariah sebelum Bank memisahkan unit syariah ke dalam entitas baru di 2014.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dari Jepang memiliki 24,3% saham Bank melalui transaksi pembelian saham yang sebelumnya dimiliki oleh TPG Nusantara S.à r.l. dan pemegang saham lainnya.

2015

Bank secara resmi meluncurkan BTPN Wow!, sebuah layanan perbankan bagi *mass market* yang memanfaatkan telepon seluler dan didukung jasa agen sebagai perpanjangan tangan Bank untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Transaksi yang dapat dilakukan yaitu simpanan, tarik tunai, transfer dana, pembayaran tagihan dan pengajuan permohonan kredit mikro serta pembelian produk asuransi mikro.

2016

- Februari 2016 Bank mulai beroperasi sebagai bank devisa setelah memperoleh izin pada bulan Desember 2015, yang memungkinkan Bank untuk melakukan transaksi dalam valuta asing dan lebih fleksibel untuk mulai menawarkan produk simpanan liabilitas dalam mata uang asing.
- Jenius, yang merupakan platform *mobile phone* kedua diluncurkan. Layanan telepon seluler Jenius menggunakan *smart phone* untuk menghubungkan rekening nasabah dengan Bank dan melakukan transaksi perbankan. Hingga Desember 2016, Jenius telah memiliki 70.000 pengikut di situs media sosial dan ditonton lebih dari 3 juta kali di YouTube.

2017

Bank telah memperluas fitur aplikasi *mobile banking* BTPN Wow! dan Jenius untuk mengembangkan basis nasabah dan meningkatkan transaksi perbankan. Fokus kepada *customer-centric* dari dua layanan mobile banking ini telah membawa perubahan yang signifikan pada pengalaman nasabah (*customer experience*) dan berdampak pada operasional Unit Pendukung. Transformasi yang disebut "Gemilang" meliputi struktur organisasi Bank, teknologi, sumber daya manusia dan pengendalian risiko. Jaringan cabang Bank telah mengalami transformasi yang cukup besar dimana seluruh cabang dapat menyediakan layanan perbankan kepada semua segmen nasabah.

2018

Bank berhasil menyelesaikan dua aksi korporasi penting. Pertama, pencatatan saham perdana (IPO) BTPN Syariah, anak usaha dengan kepemilikan saham mayoritas. Kedua, proses merger Bank BTPN dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Sebagai hasil proses merger tersebut, Bank kini menawarkan ragam layanan keuangan yang lebih luas ke seluruh spektrum nasabah, mulai dari nasabah individu hingga nasabah perusahaan, yang meliputi nasabah korporasi besar sampai usaha-usaha mikro dan masyarakat di daerah. Hasil dari proyek Gemilang yang dilakukan tahun lalu serta platform perbankan mobile BTPN Wow! dan Jenius mulai akan dapat dinikmati di tahun 2019.

2019

Bank resmi merger dengan SMBC menjadi Bank BTPN pada 1 Februari. Penggabungan usaha ini akan memperkuat kemampuan Bank dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih lengkap untuk basis nasabah yang lebih luas. Kami sekarang adalah universal bank.

2020

Bank BTPN meluncurkan SINAYA PRIORITAS dan bekerja sama dengan Jenius yang meluncurkan Sinaya Prioritas Apps.

2021

- Bank BTPN memberikan fasilitas pinjaman hijau senilai Rp1,06 triliun kepada PT Kepland Investama sebagai bentuk perwujudan komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan. Fasilitas pinjaman hijau dalam mata uang rupiah ini merupakan salah satu yang pertama di pasar Indonesia.
- Sepanjang tahun 2021, Bank BTPN meraih 19 penghargaan dari pihak eksternal, sebagai bukti dan pengakuan pemangku kepentingan terhadap kinerja Bank.

2022

- Bank BTPN mendapat predikat "The Best Contact Center Indonesia 2022" oleh Indonesia Contact Center Assosiation (ICCA), sekaligus mendapatkan pengakuan oleh organisasi internasional Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC). Bank menempati posisi 10 besar terbaik dengan memenangkan 14 penghargaan, yang meliputi tiga penghargaan Platinum, tiga penghargaan Gold, tiga penghargaan Silver, dan lima penghargaan Bronze.
- Bank BTPN meraih LPS Banking Awards 2022 dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank BTPN memperoleh penghargaan dalam kategori "Bank Terbaik dalam Menyampaikan Informasi Mengenai Program Penjaminan Simpanan" dari kelompok bank swasta.
- Penghargaan "Transparansi Penurunan dan Perhitungan Emisi Korporasi Terbaik 2022" oleh majalah Investor. Bank BTPN mendapatkan penghargaan untuk "Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Sektor Emiten Kategori Green" dan "Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor Emiten Kategori Platinum".
- Bank BTPN meraih penghargaan "*Indonesian Sustainable Development Awards* 2022" dari *Corporate Forum for* CSR Development (CFCD). Bank BTPN merupakan satu-satunya bank yang berpartisipasi dalam ajang penghargaan ini dan memperoleh *Gold Award,* karena dinilai berhasil dalam menjalankan program-program yang berkontribusi dalam akselerasi 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2023

- Bank BTPN dan International Finance Corporation (IFC) menjalin kerja sama dalam kesepakatan obligasi sosial dan hijau untuk memperkuat aksi iklim dan mendorong pembangunan inklusif di Indonesia. Penerbitan obligasi sejumlah US$500 juta ini akan menjadi yang pertama bagi Bank BTPN dan memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya bisnis-bisnis yang dipimpin oleh perempuan serta aksi adaptasi terhadap perubahan iklim.
- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTPN pada 7 Desember 2023, pemegang saham resmi menyetujui rencana penarikan saham-saham Perseroan hasil pembelian kembali ("Treasury Stock") dan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") atau *Right Issue* II.
- Bank BTPN kembali meraih peringkat Platinum dalam ajang "Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023". Ini merupakan tahun ketiga Bank BTPN menerima peringkat tertinggi tersebut secara berturut-turut dalam empat tahun kepesertaannya dalam ajang ini. Ajang penghargaan yang diikuti oleh 68 perusahaan dan organisasi ini diselenggarakan oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam menjalankan operasional bisnisnya.
- Bank BTPN berhasil meraih dua penghargaan dalam kategori Sustainable Finance 2022, yaitu "Best Green Loan" dan "Best Local Currency Green Loan", dalam ajang "Triple A Country Awards 2022" yang diselenggarakan oleh The Asset di Hong Kong. Bank BTPN meraih penghargaan "Best Green Loan" melalui program pembiayaan hijau senilai total US$750 juta kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Desember 2022 untuk mendukung aktivitas PLN dalam upaya transisi energi menuju energi terbarukan. Sementara, Bank BTPN menerima penghargaan "Best Local Currency Green Loan" melalui pemberian fasilitas pembiayaan hijau senilai Rp1,06 triliun kepada PT Kepland Investama sejak Oktober 2021.

BIDANG USAHA

Bidang Usaha Sesuai Anggaran Dasar

A. Kegiatan Usaha Utama:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
2. Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
2. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:
   a. Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
   b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
   c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
   d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
   e. Obligasi;
   f. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
   g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
3. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
4. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
7. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di Bursa Efek;
9. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
11. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
12. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
13. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
15. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
16. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Usaha Dijalankan pada Tahun Buku

Bidang usaha pada tahun buku sesuai dengan yang tercantum pada Anggaran Dasar terakhir.

PRODUK DAN LAYANAN

Corporate/Wholesale Banking

Produk Lindung Nilai
- IRS/CCS dan transaksi valas

Produk Pinjaman
- Bilateral dan Syndication Loans (IDR, USD, EUR dan, JPY)
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Investasi
- Project/Structured Finance
- ECA
- Green/SocialLoan
- Sustainability-Linked Loan
- Kredit Lainnya

Produk Pendanaan
- ESG Deposit
- Green Deposit

Jenius
- Aplikasi Jenius dengan verifikasi nasabah berbasis biometrik
- Tabungan (Flexi Saver, Dream Saver & Valuta Asing)
- Deposito (Maxi Saver)
- Pembayaran Tagihan
- ATM Card/Debit Jenius
- Transfer (BIFAST, RTOL, SKN, RTGS & Remittance)
- Top-up e-Wallet
- Pinjaman (Flexicash, Buy Now Pay Later & Credit Card)
- Jenius Pay
- Jenius QRIS
- Jenius for Business
- Bisniskit by Jenius
- Moneytory
- Sinaya Prioritas di Aplikasi Jenius
- Aplikasi Jenius untuk lini bisnis ritel BTPN (Jenius *as a Platform*)
- Reksa Dana

Treasury
- Foreign Exchange
- Derivatif
- Pasar Uang
- Fixed Income

Wealth Management Business
- Tabungan Sinaya (Rupiah, Valas, Bisnis)
- Giro (Rupiah, Valas)
- Deposito Berjangka (Rupiah, Valas, Fleksi, On Call)
- Reksa Dana
- Bancassurance
- Kartu ATM/Debit Sinaya
- Safe Deposit Box
- Sinaya Prioritas
- Obligasi Pemerintah

Micro Business
- Kredit Usaha Rakyat
- Tabungan Mitra Usaha
- Tabungan Setara Deposito
- Pinjaman Maxi Micro (secured loan):
  1. Pinjaman Rekening Koran
  2. Pinjaman Angsuran Berjangka
  3. Pinjaman Berjangka
- Pinjaman Digital Micro Flexicash (Unsecured loan):
  1. Pinjaman Angsuran berjangka

Joint Finance
- Joint Financing
  1. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
  2. Alat Kesehatan
  3. Durable Goods
  4. Multiguna
- Chanelling
  1. Short term loan (tenor max 1 bulan)
  2. Medium term loan (tenor max 12 bulan)
  3. Long term loan (tenor max 60 bulan)

Retail Lending Business
- Kredit Pensiun
- Kredit Pra Pensiun
- Kredit Pegawai Aktif
- Tabungan Citra Pensiun

Business Banking
- Produk Dasar/Generik
  1. PRK (Pinjaman Rekening Koran)
  2. PB (Pinjaman Berjangka)
  3. PAB (Pinjaman Angsuran Berjangka)
- ABF (Asset Based Financing)
- BPR Financing
- Giro Bisnis
- Giro Mitra
- Giro Karya
- Aplikasi TOUCHBIZ (mobile banking untuk bisnis): transfer bank, payroll, pembayaran tagihan, top-up e-Wallet, MaxCash, Deposito, info kurs valas

Transaction Banking & Supply Chain

Cash & Digital Solution
- Giro & Deposito Berjangka
- Pengiriman Uang (SKN/RTGS, Payroll, Overbooking, Telegraphic Transfer)
- Penerimaan Uang (SKN/RTGS, BI-FAST, Telegraphic Transfer, Cheque/Cash Deposit)
- e-Tax Payment (With/without ID Billing)
- Virtual Account (API SNAP, Offline)
- Internet Banking / Host to Host
- Manajemen Likuiditas (Domestic Cash Pooling, Auto TD Placement, Cross Border Pooling)
- Auto Debit

Trade
- Import & Export Letter of Credit & SKBDN
- Import & Export Bill Collection
- Import & Export Documentary Collection
- Bank Guarantee & SBLC & Counter Guarantee
- Trade Loan & TR
- Foreign Bills Bought & Forfaiting
- Account Receivable Purchase
- Import Avalization & LC Confirmation
- BL Endorsement & Shipping Guarantee

Supply Chain
- Supply Chain Financing (Distributor Financing/ Supplier Financing)
- Lending Program

STRUKTUR ORGANISASI

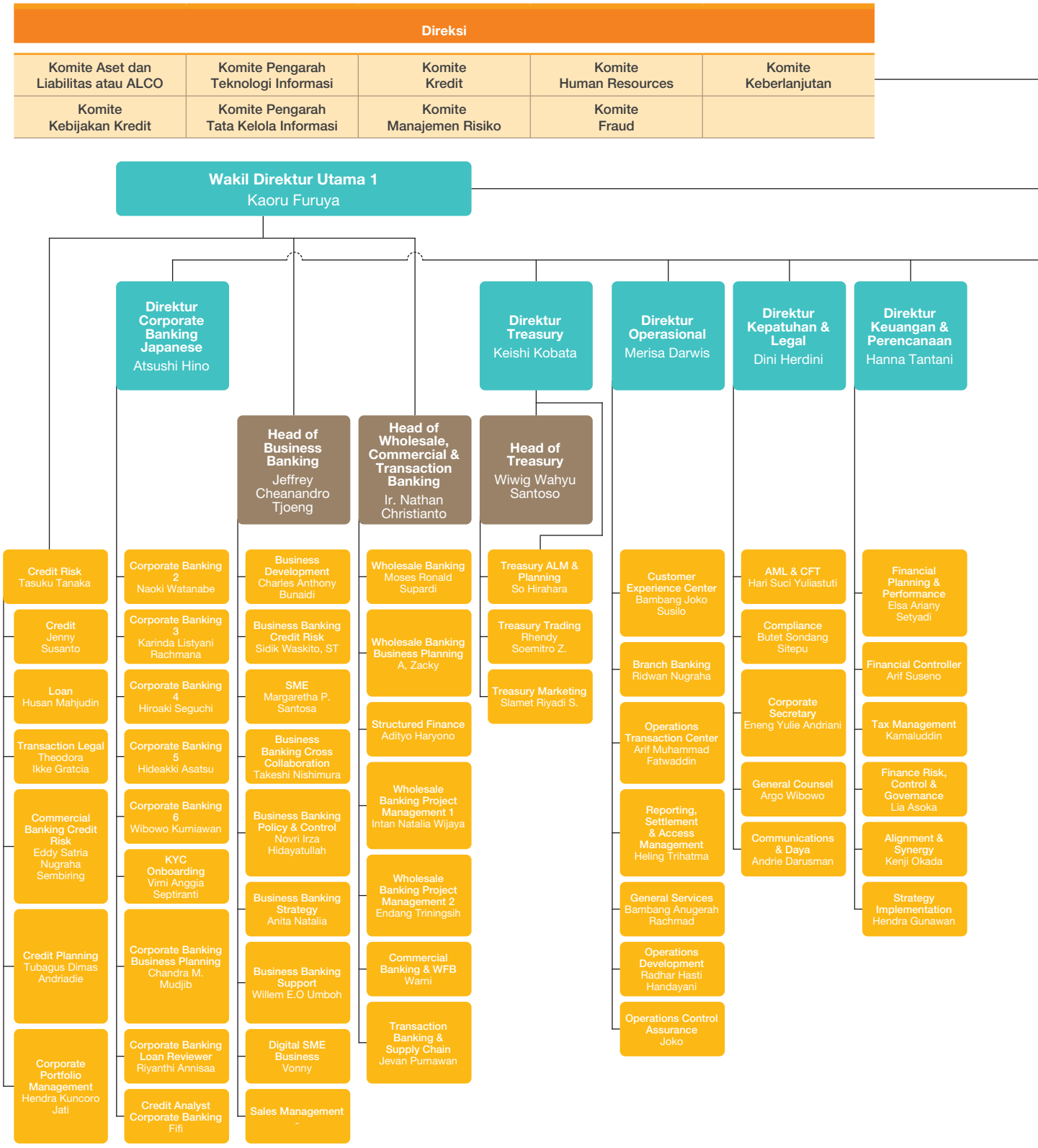

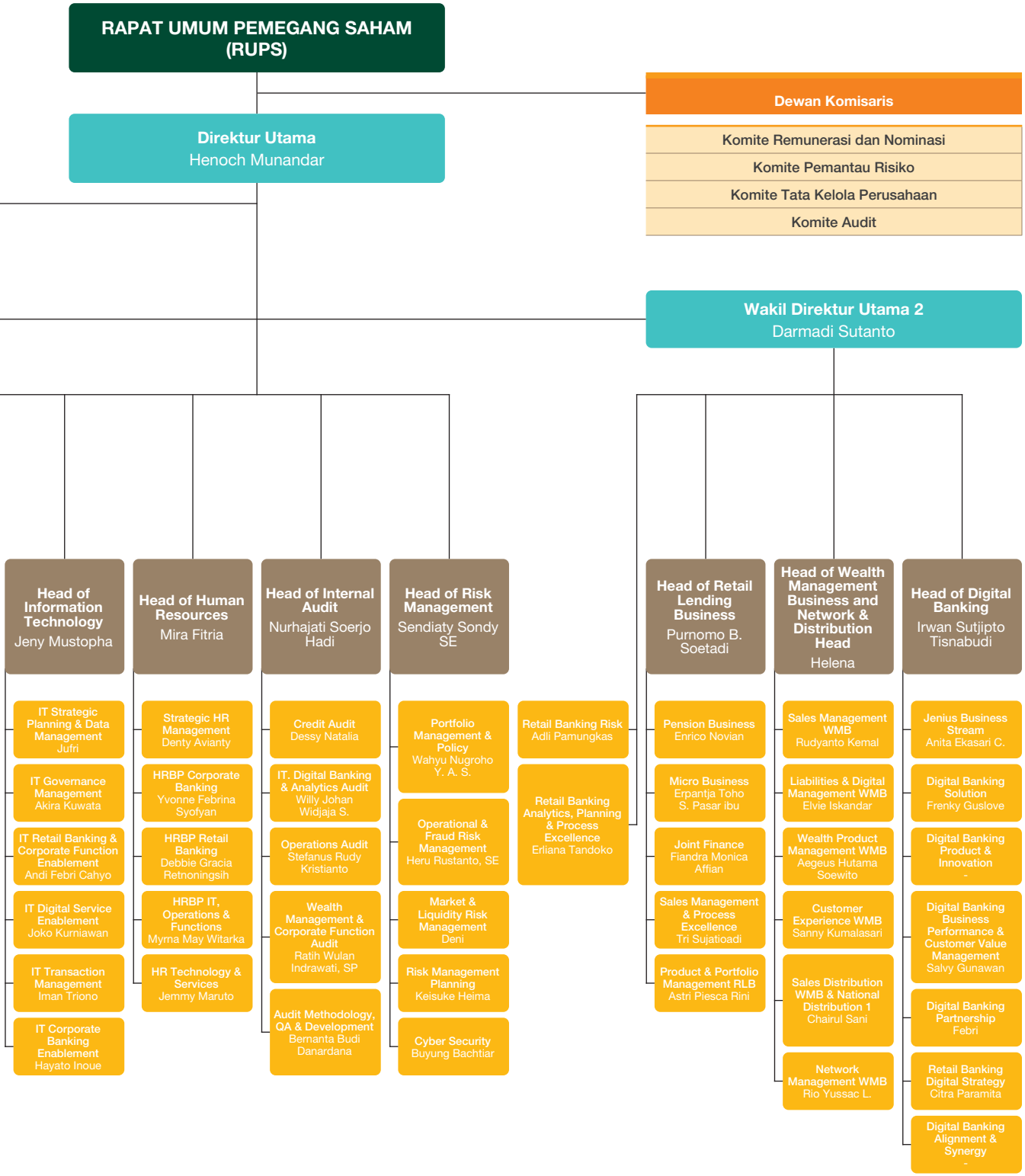

Direktur

Board of Management

Komite Dewan Komisaris & Komite Direksi

VISI

Menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital.

MISI

- Menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen ritel, mikro, UKM, dan korporat bisnis di Indonesia, serta Bangsa dan Negara Indonesia secara keseluruhan;
- Memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan Bank BTPN;
- Menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi *stakeholder* termasuk masyarakat Indonesia;
- Memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada nasabah dan mitra Bank BTPN.

Penjelasan Visi dan Misi

Landasan dasar dari integrasi Visi dan Misi Bank adalah untuk melayani nasabah SMBCI dan Bank BTPN dengan cara yang terbaik guna mencapai tujuan dan aspirasi mereka serta diharapkan juga memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Bank akan menjadi mitra yang dapat diandalkan dan dipercaya, bang mampu memahami dan memenuhi secara efektif kebutuhan finansial nasabah yang terus berkembang.

Visi dan Misi yang ditetapkan telah sesuai dengan rancangan penggabungan usaha sebagaimana tercermin pada ringkasan rencana penggabungan usaha. Visi dan Misi ini juga telah melalui *review* oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

NILAI-NILAI UTAMA

Nilai-nilai yang kami anut merupakan pedoman kami dalam menjalankan bisnis. Ada 5 (lima) nilai, seperti dijelaskan berikut ini:

01

Sebagai profesional selalu berlaku secara tulus dengan standar etika yang tinggi.

Integrity





Customer First

Selalu melihat dari perspektif nasabah untuk memberikan nilai lebih.

02

03

Berani bertindak dan berinovasi tanpa henti.

Proactive & Innovative





Speed & Quality

Menjadikan kecepatan dan kualitas dari pengambilan keputusan juga pemberian layanan sebagai faktor pembeda.

04

05

Kolaborasi sebagai satu tim.

Synergy



PROFIL DEWAN KOMISARIS



Chow Ying Hoong

Komisaris Utama

Warga Negara
Singapura

Domisili
Singapura

Usia
63 Tahun pada akhir Tahun Buku 2023

Riwayat Pendidikan
Business Administration bidang Finance dari National University of Singapore (1984)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 1, diterbitkan oleh LSPP dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2027.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BTPN sejak tanggal efektif penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019. Diangkat sebagai Komisaris Utama melalui RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020, dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan pada tanggal 21 April 2022.

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN.
- Senior Regional Advisor, Asia Pacific Division of Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Pengalaman Kerja
- General Manager of Planning Department Asia Pacific Division of SMBC (2011-2013).
- General Manager, Debt Capital Market Department and Joint General Manager of SMBC, Singapore (2005-2010).
- Head of Syndication S.E. Asia of Sumitomo Bank Singapore Branch (2000-2005).
- Branch Manager/Managing Director dari Societe Generale Bank, cabang Malaysia (1997-2000)
- Head of Syndication for Asia of ABN Amro Bank Asia HQ
- (1996-1997).
- Team Head of Offshore Corporates of ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch (1993-1996)
- Senior Manager of The Sanwa Bank Ltd, Singapore Branch (1989-1993)
- Account Manager of ABN Bank N.V., Singapore Branch (1987-1989)
- Bank Officer, United Overseas Bank (1984-1987).

Hubungan Afiliasi
Memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali.



Takeshi Kimoto
Komisaris

Warga Negara
Jepang

Domisili
Singapura

Usia
53 tahun pada akhir Tahun Buku 2023

Riwayat Pendidikan
Bachelor of Arts in Business and Commerce dari KEIO University (1989-1993)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 1, diterbitkan oleh LSPP dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2025.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Komisaris BTPN sejak tanggal efektif penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN.
- Executive Officer, Managing Director of Asia Growing Markets Department of Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Sumitomo Mitsui Financial Group.

Pengalaman Kerja
- Senior Vice President for Emerging Markets Business Division (“EMBD”) Singapore, Joint General Manager for EMBD Tokyo and Joint General Manager for Business Development Department at the International Banking Unit of SMBC (2013-2018).
- Vice President for Global Institutional Banking Department (“GIBD”) of SMBC, Vice President for GIBD Singapore, Group Head & Senior Vice President for Global Trade Finance Department Singapore (2002-2013).
- Vice President, International Finance Department, Sumitomo Bank Ltd (2000-2001).

Hubungan Afiliasi
Memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Ninik Herlani Masli Ridhwan

Komisaris Independen

Warga Negara
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
66 tahun pada akhir Tahun Buku 2023

Riwayat Pendidikan
- Magister bidang Keuangan dari Universitas Indonesia (2018)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1983)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan pemeliharaan SMR, diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2025

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Independen BTPN sejak tanggal efektif penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.

Rangkap Jabatan
- Ketua Komite Audit BTPN.
- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2013-2019).
- Bergabung pada PT Bank Central Asia Tbk dengan jabatan terakhir Kepala Pengembangan Audit dan Pengendalian Mutu (1985-2012).
- Senior Auditor di Kantor Akuntan Utomo (SGV - Utomo) (1981-1985).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Onny Widjanarko
Komisaris Independen

Warga Negara
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
59 tahun pada akhir tahun buku 2023

Riwayat Pendidikan
- Master in Management dari Asian Institue of Management (1999)
- Sarjana Manajemen Keuangan dari STIE Malangkucecwara (1989)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2027

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Independen BTPN secara efektif sejak 8 Mei 2023 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023

Rangkap Jabatan
- Ketua Komite Pemantau Risiko BTPN
- Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan BTPN

Pengalaman Kerja
- Komisaris Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis (September 2020 – April 2023)
- Bergabung dengan Bank Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jakarta (Januari 1992 – September 2022)
- Management Trainee dan Staf Keuangan Komatsu Indonesia (PT United Tractors) (Oktober 1989-Desember 1990)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Edmund Tondobala

Komisaris Independen

Warga Negara
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
58 tahun pada akhir tahun buku 2023

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen Internasional dari American Graduate School of Internasional Management, Thunderbird. Glendale, Arizona (1990)
- Sarjana Ekonomi dari Drake University, Moines, Iowa, Amerika Serikat (1987).

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 4, diterbitkan oleh LSPP dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2025.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Independen BTPN sejak keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Audit BTPN.
- Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN.

Pengalaman Kerja
- Kepala Divisi Perbankan Internasional di PT Bank Central Asia Tbk, Indonesia (2011-April 2020).
- Direktur BCA Finance Hongkong (2011-November 2011).
- Direktur di BCA Remittance Sdn Bhd Malaysia (2009-2011).

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.



Ongki Wanadjati Dana
Komisaris

Warga Negara
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
66 tahun pada akhir tahun buku 2023

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) (1981)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, diterbitkan oleh LSPP dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2025.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Komisaris BTPN sejak keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN
- Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan BTPN
- Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk

Pengalaman Kerja
- Direktur Utama PT BANK BTPN Tbk (2019-April 2022)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-Januari 2019).
- Direktur Perbankan Wholesale Bank Permata (2002-2008).
- Wakil Direktur Utama di Bank Universal (2000-2002).
- Direktur Utama Bank Subentra (1993-1998).
- Senior Advisor, Bank Universal (1999-2000).
- Credit Cycle Manager – Consumer Banking, Citibank, N.A (1987-1990).

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

PROFIL DIREKSI



Henoch Munandar

Direktur Utama

Warga Negara
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
57 tahun pada akhir tahun buku 2023

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta (1989)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, diterbitkan oleh LSPP dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2025.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Direktur sejak tanggal efektif penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022. Diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPS Luar Biasa tanggal 29 September 2022.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja
- Direktur PT BANK BTPN Tbk (2019- September 2022)
- Direktur PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-Januari 2019).
- Deputy Head of Credit/Credit Risk Management Head SMEC Bank DBS Indonesia (2010-2013).
- Deputy SMEC Risk + Remedial Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2006-2010).
- Co-Dept Head of Corporate Banking, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (2006-2006).
- Local Corporate Head-Senior Manager, Sanwa Bank Indonesia/Bank United Financial of Japan (UFJ) (1995-2006).
- Account Manager PT Bogor Multifinance (1995-1995).
- Account Manager Panin Bank (1993-1995).
- Sub-Branch Manager Bank Susila Bakti (1991-1993).

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali



Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama

Warga Negara
Jepang

Domisili
Jakarta

Usia
58 tahun pada akhir Tahun Buku 2023

Riwayat Pendidikan
Sarjana Hukum dari Hosei University, Tokyo, Jepang (1989)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, diterbitkan oleh LSPP dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2025.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum

Pertama kali menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTPN secara efektif sejak 4 Januari 2021 berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja
- Senior General Manager of Asia Growing Market Dept. (2020)
- General Manager of Corporate Banking Dept., Asia Pacific Division. Member of Risk Management, ALM and Compliance Committees for APAC, SMBC (2019-2020)
- General Manager of Singapore Branch. Member of Risk Management, ALM and Compliance Committees for APAC, SMBC (2018-2019).
- General Manager of Loan Capital Markets Department. Member of Risk Management, ALM and Compliance Commitees for EMEA of SMBC Europe Limited in London (2013-2018).
- Joint General Manager, Global Trade Finance Dept of SMBC Tokyo (2011-2013).
- Senior Vice President, Global Trade Finance Dept. SMBC New York (2004-2011).
- Assistant General Manager of Global Institutional Banking Dept. of SMBC Tokyo (2002-2004).

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

PROFIL DIREKSI



Darmadi Sutanto

Wakil Direktur Utama

Warga Negara
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
59 tahun pada akhir Tahun Buku 2023

Riwayat Pendidikan
- Magister Administrasi Bisnis dari University of Western Illinois, Macomb (1991)
- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta (1988).

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, diterbitkan oleh LSPP dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2025.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTPN secara efektif sejak 14 Mei 2020 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 April 2020 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja
- Komisaris PT Metro Retailmart (2015-2018).
- Komisaris PT Trans Ice (2015-2018).
- Komisaris PT Bank Mega Tbk (2015-2018).
- Group Director of PT CT Corpora Bank Mega (2015-2018).
- Consumer Banking Director of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015).
- Consumer Banking Director of ABN Amro/RBS (2007-2010).
- SVP Distribution of Bank Permata (2007).
- EVP Sales & Distribution of Standard Chartered Bank (2000-2006).
- National Sales Manager of Citibank (1991-2000).

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali



Dini Herdini
Direktur Kepatuhan

Warga Negara
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
58 tahun pada akhir Tahun Buku 2023

Riwayat Pendidikan
Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta (1987)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, diterbitkan oleh LSPP dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2025.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tanggal efektif penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja
- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-Januari 2019).
- General Counsel & Corporate Secretary PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2014).
- Partner/Konsultan Hukum di Firma Hukum Herdini & Partners (2000-2004).
- Kepala Divisi Hukum Bank Danamon (1999-2000)
- Kepala Divisi Legal PT Bank PDFCI Tbk (1996-1999).
- Legal Manager PT ING Bank (1993-1996).
- Legal Officer PT Bank Sumitomo Niaga (1989-1993).

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

PROFIL DIREKSI



Atsushi Hino

Direktur

Warga Negara
Jepang

Domisili
Jakarta

Usia
47 tahun pada akhir tahun buku 2023

Riwayat Pendidikan
Bachelor of Business and Commerce dari Keio University (1999)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, diterbitkan oleh LSPP dengan masa berlaku sampai 19 November 2024

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Direktur BTPN secara efektif sejak 15 Mei 2023 berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja
- Group Head/Joint General Manager of Asia Markets Growing Department, SMBC Singapura (September 2018-April 2023)
- Head of Corporate Banking Department, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (Oktober 2014-September 2018)
- Vice President/Senior Vice President, SMBC cabang Hongkong (April 2009-Agustus 2014)
- Vice President Tokyo Corporate Banking Department 4, SMBC (April 2006-April 2009)
- Vice President Tohoku Corporate Business Office, SMBC (Juli 2001-April 2006)
- Bergabung pertama kali dengan SMBC sebagai Junior Staf (April 1999-Juli 2001)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali



Keishi Kobata
Direktur

Warga Negara
Jepang

Domisili
Jakarta

Usia
50 tahun pada akhir tahun buku 2023

Riwayat Pendidikan
- Master of Information Engineering dari the University of Tokyo (1998)
- Bachelor of Architecture dari the University of Tokyo (1996)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, diterbitkan oleh LSPP dan pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 5 Juli 2024.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Direktur BTPN secara efektif sejak 25 Juli 2023 berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2023.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja
- Treasury ALM & Planning Head PT BANK BTPN Tbk (Maret 2022-Juni 2023)
- Technical Advisor of Treasury Directorate PT BANK BTPN Tbk (Oktober 2019-Februari 2022)
- Ditugaskan pada SMBC cabang Hongkong sebagai Head of Money Market & Fixed Income Group, International Treasury Department dan dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President (Mei 2016-Oktober 2019)
- Bergabung pertama kali dengan SMBC Tokyo dengan jabatan terakhir sebagai Head of Money Market & Fixed Income Group, International Department Treasury (Hongkong) (April 1998-Mei 2016)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

PROFIL DIREKSI



Merisa Darwis

Direktur

Warga Negara
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
56 tahun pada akhir Tahun Buku 2023

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) (1991)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, diterbitkan oleh LSPP dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2025.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Direktur sejak tanggal efektif penggabungan, yaitu 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja
- Head of Operation, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2017-Januari 2019).
- Kepala Satuan Kerja Audit Internal, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2011-2016).
- HR & Internal Control Director, Bank Barclays Indonesia (2010-2011).
- Citibank, N.A., Indonesia (1996-2009):
  - Operation - Control & Reporting Head, Transaction Services Head, Control & Support Head,
  - IT - Consumer IT Head & Country IT Financial Head,
  - QA - IT QA Head, Privacy Officer and BISO (Business Information Security Officer)
- Programmer/Analyst, USI/IBM Jakarta (1992-1993).

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali



Hanna Tantani
Direktur

Warga Negara
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
56 tahun pada akhir Tahun Buku 2023

Riwayat Pendidikan
- Master of Business Administration dari Australian Graduate School of Management, University of New South Wales, Australia (1993)
- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga (1990)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, diterbitkan oleh LSPP dan Pemeliharaan SMR diterbitkan oleh BSMR dengan masa berlaku sampai 26 Juli 2025.

Riwayat Jabatan dan Dasar Hukum
Pertama kali menjabat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 11 September 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan

Pengalaman Kerja
- Chief Financial Officer, PT BANK BTPN Tbk (2018-2019).
- Direktur Keuangan, PT Bank HSBC Indonesia (2014-2018).
- SVP MI Planning & Analysis, KCBA HSBC Indonesia (2009-2014).
- Financial Controller, Standard Chartered Bank (2008-2009).
- Market Controller, American Express Bank (2004-2008).
- Staff, Credit Operations & Trade Services, Management Accountant, Manager Treasury OperationS, AVP Treasury Services, VP Global Payment & Cash Management, VP Credit Operation VP Area Finance, HSBC (1990-2004).

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

No.	Nama	Pendidikan	Perguruan Tinggi	Awal Bergabung di BTPN	Jabatan
1	Naoki Watanabe	S1	University of Tsukuba	2021	Corporate Banking 2 Head
2	Karinda Listyani Rachmana	S1	Ritsumeikan Asia Pacific University	2019	Corporate Banking 3 Head
3	Hiroaki Seguchi	S1	Tokyo University of Science	2020	Corporate Banking 4 Head
4	Hideaki Asatsu	S1	Osaka University	2022	Corporate Banking 5 Head
5	Wibowo Kurniawan	S1	Universitas Bina Nusantara	2019	Corporate Banking 6 Head
6	Virni Anggia Septiranti	S1	Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta	2019	KYC Onboarding Head
7	Chandra Murprabowo Mudjib	S1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	2019	Corporate Banking Business Planning Head
8	Riyanthi Annisaa	S2	Macquarie University	2019	Corporate Banking Loan Reviewer Head
9	Fifi	S1	Tokyo International University	2019	Credit Analyst Corporate Banking Head
10	Ir Nathan Christianto	S2	University of Groningen, The Netherlands	2019	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking
11	Jevan Purnawan	S2	University of Manchester	2019	Transaction Banking & Supply Chain Head
12	Moses Ronald Supardi	S3	Leiden University	2019	Wholesale Banking Head
13	Warni	S1	Stiba Persada Bunda Pekanbaru	2019	Commercial Banking & WFB Head
14	Ahmad Zacky Hendarman	S1	Institut Teknologi Bandung	2019	Wholesale Banking Business Planning Head
15	Adityo Haryono	S1	Boston University	2020	Structured Finance Head
16	Intan Natalia Wijaya	S1	Sanata Dharma - Jogjakarta	2021	Wholesale Banking Project Management_1
17	Endang Triningsih	D3	ASMI	2023	Wholesale Banking Project Management_2
18	Wiwig Wahyu Santoso	S2	CSU Fullerton	2019	Head of Treasury
19	So Hirahara	S1	Kyushu University	2023	Treasury ALM & Planning Head
20	Adi Erianto	S2	Monash University, Australia	2019	Treasury Assets & Liabilities Management Head
21	Rhendy Soemitro Zoro	S2	Institut Teknologi Bandung	2023	Treasury Trading Head
22	Slamet Riyadi S.	S1	Perbanas Institute	2019	Treasury Marketing Head
23	Sutan Alamsaputra Ad	S1	Universitas Indonesia	2019	Treasury Planning Head
24	Jeffrey Cheanandro Tjoeng	S1	Oklahoma State University	2020	Head of Business Banking
25	Willem E.o Umboh	S1	Universitas Sam Ratulangi Manado	2015	Business Banking Support Head
26	Sidik Waskito,St	S1	Universitas Sebelas Maret	2012	Business Banking Credit Risk Head
27	Novri Irza Hidayattullah	S1	Universitas Gadjah Mada	2019	Business Banking Policy & Control Head
28	Margareth P. Santosa	S2	Universitas Indonesia	2019	SME Head

No.	Nama	Pendidikan	Perguruan Tinggi	Awal Bergabung di BTPN	Jabatan
29	Anita Natalia	S1	Universitas Trisakti	2013	Business Banking Strategy Head
30	Vonny	S2	Edith Cowan University	2015	Digital SME Business Head
31	Charles Anthony Bunaidi	S1	Pensicola Christian College	2022	Business Banking Business Development Head
32	Takeshi Nishimura	S1	Ritsumeikan University	2023	Business Banking Cross Collaboration Head
33	Kamaluddin	S1	Universitas Indonesia	2021	Tax Management Head
34	Arif Suseno	S1	Universitas Indonesia	2019	Financial Controller
35	Kenji Okada	S1	Kyoto University	2021	Alignment & Synergy Planning Head
36	Hendra Gunawan	S1	Universitas Tarumanagara	2021	Strategy Implementation Head
37	Lia Asoka	S1	Unika Atmajaya	2021	Finance Risk, Control & Governance Head
38	Elsa Ariany Setyadi	S1	Universitas Tarumanagara	2023	Financial Planning & Performance Head
39	Jeny Mustopha	S2	Emeritus Institute of Management	2020	Head of Information Technology
40	Jufri	D3	Alexander Collage - Perth, Western Australia	2013	IT Strategic Planning & Data Management Head
41	Andi Febri Cahyo	S2	Universitas Indonesia	2008	IT Retail Banking & Corporate Functions Enablement Head
42	Hayato Inoue	S2	Graduate School of Tsukuba	2021	IT Corporate Banking Enablement Head
43	Joko Kurniawan	S1	Binus Business School	2010	IT Digital Service Enablement Head
44	Akira Kuwata	S2	Keio University	2023	IT Governance Management Head
45	Iman Triono	S2	Gunma University	2019	IT Transaction Management Head
46	Sendiaty Sondy Se	S1	Universitas Trisakti	2012	Head of Risk Management
47	Wahyu Nugroho Y.a.s	S2	Perbanas	2021	Portfolio Management & Policy Head
48	Heru Rustanto, Se	S2	Universitas Tarumanagara	2014	Operational & Fraud Risk Management Head
49	Deni	S2	Universitas Indonesia	2019	Market & Liquidity Risk Management Head
50	Keisuke Heima	S2	Kyoto University	2022	Risk Management Planning
51	Buyung Bachtiar	S1	Universitas Bina Nusantara	2019	Cyber Security Risk Management Head
52	Tasuku Tanaka	S1	The University of Tokyo	2023	Credit Risk Head
53	Husan Mahjudin	S1	Universitas Trisakti	2019	Loan Head
54	Jenny Susanto	S1	Monash University, Australia	2019	Credit Head
55	Theodora Ikke Gratcia	S1	Universitas Indonesia	2021	Transaction Legal Head

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

No.	Nama	Pendidikan	Perguruan Tinggi	Awal Bergabung di BTPN	Jabatan
56	Eddy Satria Nugraha Sembiring	S2	Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya (Jakarta)	2019	Commercial Banking Credit Risk Head
57	Tubagus Dimas Andriadie	S2	Magister Management Agribisnis - Institut Pertanian Bogor	2019	Credit Planning Head
58	Hendra Kuncoro Jati	S2	University of Technology Sydney	2019	Corporate Portfolio Management Head
59	Hari Suci Yuliastuti	S1	Universitas Gadjah Mada	2019	Anti Money Laundering & CFT Head
60	Butet Sondang Sitepu	S2	Universitas Gadjah Mada	2009	Compliance Head
61	Eneng Yulie Andriani	S2	Universitas Indonesia	2019	Corporate Secretary Head
62	Argo Wibowo	S2	Universitas Indonesia	2011	General Counsel
63	Andrie Darusman	S1	Universitas Indonesia	2015	Communications & Daya Head
64	Arif Muhammad Fatwaddin	S1	Universitas Mataram	2013	Operations Transaction Center Head
65	Radhar Hasti Handayani	S1	Universitas Katolik Parahyangan	2008	Operations Development Head
66	Ridwan Nugraha	S2	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta	2011	Branch Banking Head
67	Bambang Joko Susilo	S1	Universitas Trisakti	2014	Customer Experience Center Head
68	Patritius Joko	S2	Institut Teknologi Bandung	2015	Operations Control Assurance Head
69	Heling Trihatma	S1	Universitas Pancasila Jakarta	2006	Reporting, Settlement & Access Management Head
70	Bambang Anugerah Rachmad	S1	Universitas Trisakti - Jakarta	2019	General Services Head
71	Mira Fitria	S2	London School of Economic and Political Science, Uk	2020	Head of Human Resources
72	Yvonne Febrina Syofyan	S2	Golden Gate University	2019	HRBP Head Corporate Banking
73	Denty Avianty	S2	Universitas Indonesia	2015	Strategic HR Management Head
74	Myrna May Witarka	S2	Strathclyde University Glasgow Uk	2022	HRBP Head IT, Operations & Functions
75	Jemmy Maruto	S1	Universitas Bina Nusantara	2020	HR Technology & Services Head
76	Debbie Gracia Retnoningsih	S2	Thunderbir, Graduate School of International Management	2015	HRBP Head Retail Banking
77	Nurhajati Soerjo Hadi	S1	Oregon State University, Or - Usa	2023	Head of Internal Audit
78	Willy Johan Widjaja S.	S2	Bina Nusantara	2016	IT, Digital Banking & Analytics Audit Head
79	Bernanta Budi Danardana	S1	Universitas Indonesia	2019	Audit Methodology, QA & Development Head
80	Dessy Natalia	S1	STIE Malangkucecwara	2012	Credit Audit Head
81	Stefanus Rudy Kristianto	S1	Institut Pertanian Bogor	2013	Operations Audit Head
82	Ratih Wulan Indrawati, Sp	S1	Institut Pertanian Bogor	2022	Wealth Management & Corporate Functions Audit Head
83	Purnomo B. Soetadi	S3	Universitas Padjadjaran	2023	Head of Retail Lending Business
84	Enrico Novian	S1	Universitas Indonesia	2023	Pension Business Head RLB

No.	Nama	Pendidikan	Perguruan Tinggi	Awal Bergabung di BTPN	Jabatan
85	Yose Parlinta,Sip.	S1	Universitas Gadjah Mada	2011	Sales Distribution Pension Business 1 & Business Excellence Head
86	Irradiatie Pierenika	S1	Universitas Gajah Mada	2023	Sales Distribution Pension Business 2 & National Distribution Head 2
87	Dewi Puspita Sari	S1	Perbanas	2017	Strategic Partnership & Relationship Management Head Pension Business
88	Tri Sujatioadi	S1	Institut Teknologi Bandung	2010	Sales Management & Process Excellence Head RLB
89	Fiandra Monica Affian	S1	Universitas Trisakti	2019	Joint Finance Head
90	Erpantja Toho S. Pasaribu	S1	Universitas Sumatera Utara	2019	Micro Business Head
91	Astri Piesca Rini	S1	Institut Teknologi Bandung	2023	Product & Portfolio Management Head RLB
92	Helena	S1	Institut Pertanian Bogor	2008	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution
93	Rudyanto Kemal	S1	Universitas Gajah Mada	2009	Sales Management Head WMB
94	Aegeus Hutama Soewito	S2	Universitas Indonesia	2020	Wealth Product Management Head WMB
95	Chairul Sani	S1	Universitas Islam Sumatera Utara	2023	Sales Distribution WMB & National Distribution Head 1
96	Elvie Iskandar	S1	Universitas Tarumanagara	2008	Liabilities & Digital Management Head WMB
97	Rio Yussac Lopa	S1	Purdue University	2021	Network Management Head
98	Sanny Kumalasari	S2	Unika Atma Jaya	2019	Customer Experience Head WMB
99	Frenky Guslove	S1	President University	2015	Digital Banking Solution Head
100	Irwan Sutjipto Tisnabudi	S1	The University of New South Wales	2016	Head of Digital Banking
101	Febri	S2	Prasetiya Mulya	2015	Digital Banking Partnership Head
102	Salvy Gunawan	S1	Curtin Uni of Technology	2021	Digital Banking Business Performance & Customer Value Management Head
103	Anita Ekasari. C	S1	Universitas Katolik Parahyangan	2016	Jenius Business Stream Head
104	Citra Paramita	S2	Prasetiya Mulya	2022	Retail Banking Digital Strategy Head
105	Kosuke Shimada	S2	Strathclyde Business School	2021	Digital Banking Alignment & Sinergy Head
106	Adil Pamungkas	S1	UPN Veteran Yogjakarta	2020	Retail Banking Risk Head
107	Erliana Tandoko	S1	Institut Pertanian Bogor	2015	Retail Banking Analytics, Planning & Process Excellence Head

STATISTIK KARYAWAN

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, jumlah karyawan BTPN mencapai 6.636 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2023	2022	2021
Tetap	6.346	6.584	6.686
Kontrak	290	388	443
Total	**6.636**	**6.972**	**7.129**

Jumlah Karyawan berdasarkan Gender

Gender	2023	2022	2021
Laki-laki	3.695	3.975	4.105
Perempuan	2.941	2.997	3.024
Total	**6.636**	**6.972**	**7.129**

Jumlah Karyawan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	2023	2022	2021
< D1-D3/Akademi	844	958	1.056
S1/Sarjana	5.467	5.692	5.783
S2-S3/Master	325	322	290
Total	**6.636**	**6.972**	**7.129**

Jumlah Karyawan berdasarkan Level Jabatan

Level Jabatan	2023	2022	2021
Grade 2-7 (*Clerical*)	1.224	1.556	1.807
Grade 8-9 (*Officer/Supervisor*)	1.590	1.596	1.616
Grade 10-13 (*Management*)	2.891	2.919	2.831
Grade 14-15 (*Senior Management*)	743	718	710
Grade 16-18 (*Top Management*)	178	173	156
Grade BOM (*Board Management*)	10	10	9
Total	**6.636**	**6.972**	**7.129**

Jumlah Karyawan berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	2023	2022	2021
0 - < 1 Tahun	1.222	1.377	1.109
> 1 - < 3 Tahun	758	1.081	1.322
> 3 - < 5 Tahun	933	504	665
> 5 - < 10 Tahun	1.758	2.177	2.341
> 10 - < 20 Tahun	1.763	1.590	1.428
> 20 Tahun	202	243	264
Total	**6.636**	**6.972**	**7.129**

Jumlah Karyawan berdasarkan Direktorat/Divisi

Direktorat/Divisi	2023	2022	2021
Business Banking	559	600	679
Corporate Banking - Japanese	115	101	98
Credit Risk	74	71	60
Digital Banking	461	420	332
Executive Secretary to Retail Banking Director	1	-	1
Human Resources	107	106	90
Internal Audit	59	50	56
Kepatuhan & Legal	119	116	112
Keuangan & Perencanaan	88	82	79
Manajemen Risiko	56	51	58
Micro Business	-	553	651
Operations	2.367	2.491	2.549
Retail Banking Analytics, Planning & Process Excellence	38	42	31
Retail Banking Risk	632	622	645
Retail Lending Business	935	640	681
Secretary to Deputy President Director	1	1	1
Teknologi Informasi	475	492	478
Treasury	40	35	34
Wealth Management Business and Network & Distribution	331	346	346
Wholesale Banking	178	153	148
Total	**6.636**	**6.972**	**7.129**

Jumlah Karyawan berdasarkan Usia

Usia	2023	2022	2021
< 25 tahun	228	274	250
25-29 tahun	1.000	1.079	1.154
30-34 tahun	1.443	1.621	1.757
35-39 tahun	1.655	1.756	1.866
40-44 tahun	1.272	1.204	1.122
45-49 tahun	601	606	570
50-54 tahun	417	413	388
55-59 tahun	19	19	22
> 60 tahun	1	0	0
Total	**6.636**	**6.972**	**7.129**

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

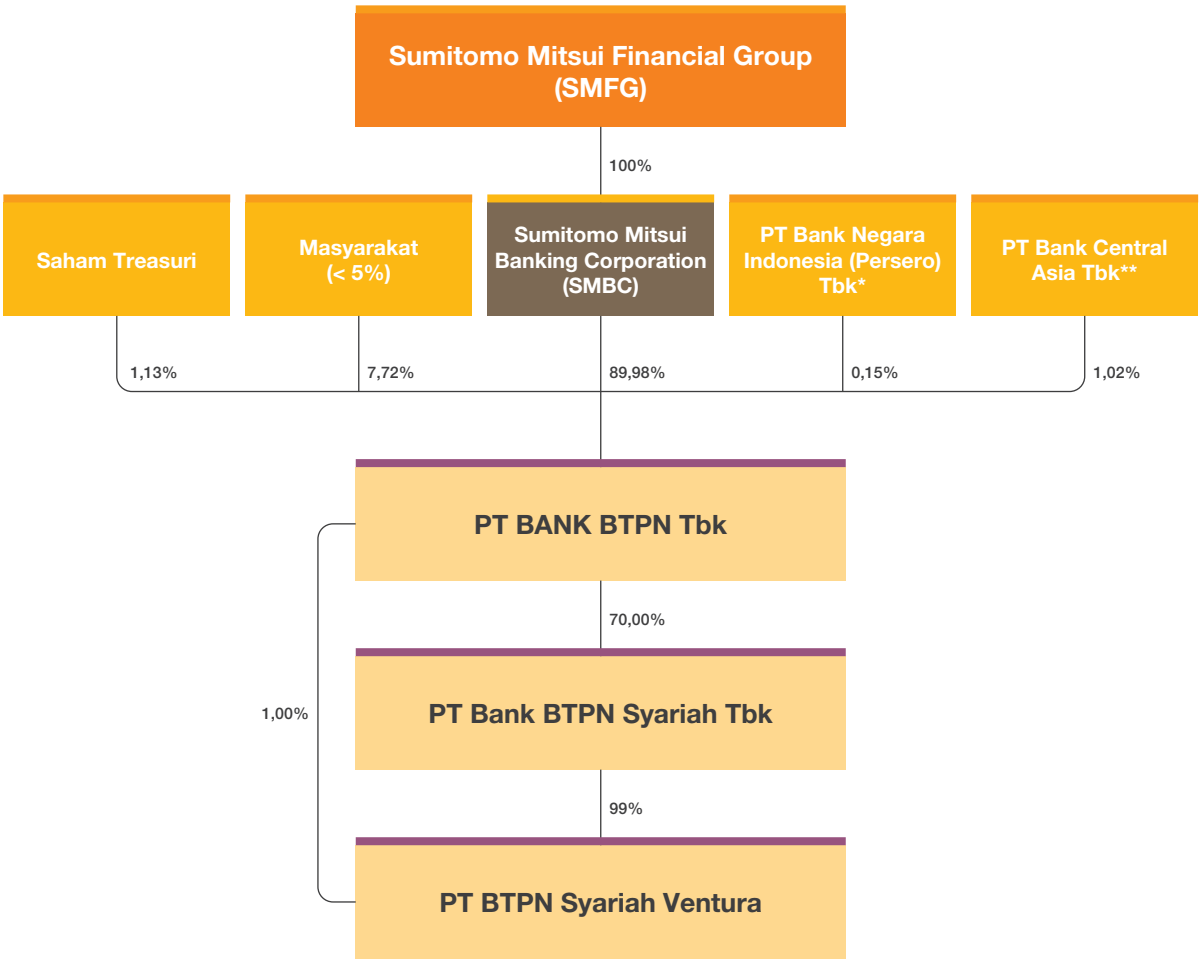

Posisi per 31 Desember 2023

Note:

Pemegang Saham Akhir

Pemegang Saham Pengendali

* Saham hasil konversi karena Penggabungan Usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

** Memenuhi ketentuan PP No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan merupakan saham hasil konversi karena Penggabungan Usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

ENTITAS INDUK TERAKHIR

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (“SMFG”) yang didirikan pada 2 Desember 2002 dan merupakan induk perusahaan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) adalah Pemegang Saham Pengendali BTPN. Saham SMFG terdaftar di Tokyo Stock Exchange (*First Section*) dan Nagoya Stock Exchange (*First Section*).

Misi Usaha SMFG adalah untuk tumbuh dan sejahtera bersama nasabah dengan menyediakan layanan yang memiliki nilai yang lebih besar bagi mereka; memaksimalkan nilai pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan; serta menciptakan lingkungan kerja yang mendorong dan menghargai karyawan yang tekun dan mempunyai motivasi yang tinggi.

Berkantor Pusat di Tokyo, Jepang, SMFG bergerak dalam bidang manajemen anak perusahaan perbankan dan perusahaan lain yang dapat diperlakukan sebagai anak perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang. Selain itu, melakukan fungsi-fungsi terkait (*ancillary functions*), serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan holding perbankan di bawah ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha SMFG terutama bergerak di bidang perbankan komersial melalui layanan keuangan berikut: *leasing*, sekuritas, pembiayaan konsumen, keuangan, pemrosesan data pengembangan sistem, dan manajemen asset.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smfg.co.jp.

PEMEGANG SAHAM UTAMA

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka: The Sakura Bank Limited dan The Sumitomo Bank Limited. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. didirikan pada bulan Desember 2002 sebagai perusahaan induk bank melalui transfer saham, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG. Pada Maret 2003, SMBC melakukan penggabungan usaha (*merger)* dengan The Wakashio Bank, Ltd.

Berkantor Pusat di Tokyo, Jepang, saat ini SMBC merupakan salah satu bank terbesar di Jepang dengan jaringan usaha yang telah menyebar ke beberapa wilayah di dunia, seperti Australia, Eropa, Kanada, Brasil, dan Indonesia. SMBC dan kelompok perusahaannya menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan. SMBC memiliki bisnis perbankan di 16 negara selain negara asalnya Jepang. Mereka juga bergerak dalam bidang usaha *leasing*, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi KPR, modal ventura, dan bisnis kredit terkait lainnya.

Di Indonesia, selain BTPN, SMBC juga memiliki penyertaan pada beberapa perusahaan lainnya yaitu PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia, PT Ina Sekuritas Indonesia (sebelumnya bernama PT Nikko Sekuritas Indonesia), dan PT SBCS Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smbc.co.jp.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2023

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7.332.311.297	89,98
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1,02
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	0,15
Saham Treasuri	92.292.198	1,13
Masyarakat (<5%)	629.443.829	7,72
Total	**8.149.106.869**	**100,00**

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation - EQ	7.332.311.297	89,98
2	UBS AG London Branch Equities House -214	400.000.000	4,91
3	Barclays Capital Securities Limited SBL/	200.000.000	2,45
4	PT Bank Central Asia TBK	83.052.408	1,02
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	0,15
6	Christian Santoso	2.341.800	0,03
7	Cayuga Pacific Group Limited	1.177.500	0,01
8	Engelbert Winoto	1.173.700	0,01
9	Kamajaya	922.500	0,01
10	Jany Candra	910.000	0,01
11	Henry Gunawan Cahyono Putro	877.800	0,01
12	Ir. Ongki Wanadjati Dana	860.804	0,01
13	PT Timur Nusa Niagajaya	820.600	0,01
14	Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore	806.400	0,01
15	Linda Sulistyaningsih, BCS	794.300	0,01
16	Djoko Susanto	542.500	0,01
17	Caceis Bank, Ireland Branch / Nichejungl	531.700	0,01
18	Andy Tanujaya	415.700	0,01
19	Hendry Sunito	364.100	0,00
20	Yansen Lokanata	364.100	0,00

JUMLAH PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE 5% ATAU LEBIH BERDASARKAN KLASIFIKASI

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
Perorangan Indonesia	24.385.815	0,30
Dana Pensiun	117.500	0,00
Bank	187.921.743	2,31
Perseroan Terbatas	1.335.034	0,02
Reksa Dana	25.100	0,00
Perorangan Asing	212.772	0,00
Badan Usaha Asing	7.935.108.905	97,37
Total	**8.149.106.869**	**100,00**

PEMEGANG SAHAM UTAMA

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Secara Langsung

Kepemilikan saham secara langsung oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari program *Material Risk Taker*.

Nama	Jumlah Saham	Persentase (%)	Status
Dewan Komisaris			
Chow Ying Hoong	0	0,000	Komisaris Utama
Takeshi Kimoto	0	0,000	Komisaris
Ninik Herlani Masli Ridhwan	0	0,000	Komisaris Independen
Onny Widjanarko	0	0,000	Komisaris Independen
Edmund Tondobala	0	0,000	Komisaris Independen
Ongki Wanadjati Dana*	860.804	0,011	Komisaris
Direksi			
Henoch Munandar	173.756	0,002	Direktur Utama
Kaoru Furuya	3.000	0,000	Wakil Direktur Utama
Darmadi Sutanto	89.120	0,001	Wakil Direktur Utama
Dini Herdini	118.572	0,001	Direktur Kepatuhan
Atsushi Hino	0	0,000	Direktur
Keishi Kobata	0	0,000	Direktur
Merisa Darwis	222.358	0,003	Direktur
Hanna Tantani	148.154	0,002	Direktur

* Kepemilikan saham berasal dari program *Material Risk Taker* saat menjabat sebagai anggota Direksi Bank.

Secara Tidak Langsung

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki saham BTPN melalui cara tidak langsung. Namun demikian, terdapat kepemilikan saham secara langsung seperti disampaikan di atas.

DAFTAR ENTITAS ANAK

Nama Perusahaan
PT Bank BTPN Syariah Tbk

Kepemilikan
70%

Bidang Usaha
Perbankan Syariah

Jenis Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)

Alamat Kantor Pusat
Menara BTPN, Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950

Total Aset 2023
Rp21.429.607 (dalam jutaan)

Status Operasi
Masih Beroperasi

Nama Perusahaan
PT BTPN Syariah Ventura

Kepemilikan
Kepemilikan Langsung: **1%** (berdasarkan akta No. 02, tertanggal 2 Juni 2022)
Kepemilikan Tidak Langsung melalui PT Bank BTPN Syariah Tbk: **69,3%**

Bidang Usaha
Modal Ventura

Jenis Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)

Alamat Kantor Pusat
Jl. Radio Dalam No. 100
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Total Aset 2023
Rp320.596 (dalam jutaan)

Status Operasi
Telah mendapatkan perijinan operasional dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Nomor KEP-23/D.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah kepada PT BTPN Syariah Ventura dan efektif menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 30 Mei 2022.

WILAYAH OPERASIONAL

JARINGAN KANTOR

Keterangan	Jumlah
Kantor Pusat Operasional	1
Kantor Wilayah Non Operasional	9
Kantor Cabang	**58**
Kantor Cabang Pembantu	**197**
Kantor Fungsional	
• Kantor Fungsional Operasional	1
• Kantor Fungsional Non Operasional	0
Total Jaringan Kantor	266
ATM	214
TCR	0
Payment Point	18
Total Jaringan Kantor & ATM	**498**

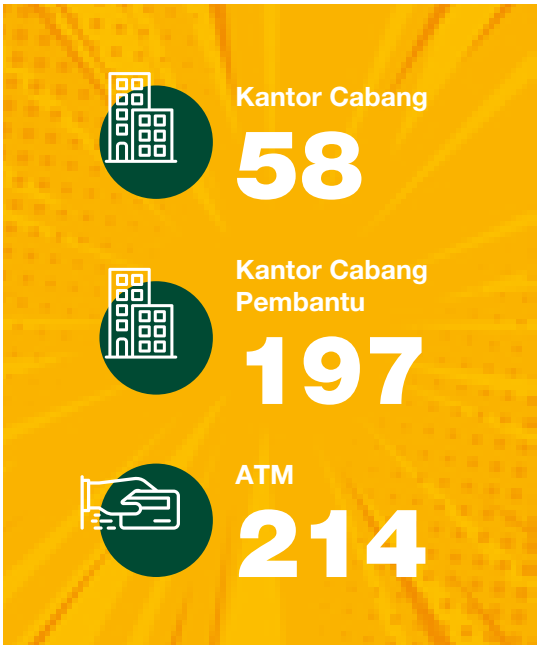

ALAMAT KANTOR CABANG

No.	Kantor Cabang	Alamat	Telepon	Faksimile
1	A. Yani	Jl. Jend.Achmad Yani 618 Bandung	(022) 7211693, 7278887	(022) 7278900, 7278901
2	Bandung	Jl. Lengkong Besar No. 38 Bandung	(022) 4205397, 4207582	(022) 4207583
3	Garut	Jl. Merdeka No. 84-A Garut	(0262) 232749, 231349, 232092	(0262) 235447
4	Tasikmalaya	Jl. KH.Z.Mustofa 289 Tasikmalaya	(0265) 336786	(0265) 332049
5	Sukabumi	Jl. R.E. Martadinata 51 Sukabumi	(0266) 221053	(0266) 221184
6	Cirebon	Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo 72 Cirebon	(0231) 208030, 208224, 205022	(0231) 209591
7	Jakarta (Gn.Sahari)	Jl.Gunung Sahari Raya 87 Jakarta	(021) 4211311	(021) 4204150
8	Pondok Labu	Jl. RS Fatmawati No. 1A, RT 002/RW 001 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jaksel	(021) 27811381	(021) 27814435
9	Bogor	Jl. Raya Pajajaran No.63 Bogor	(0251) 8373149, 8373150	(0251) 373151/2
10	Serang	Jl. KH. Tb. A. khatib 43 Serang	(0254) 203282 (hunting)	(0254) 208794
11	Kebayoran Baru	Jl. Petogogan II no. 6-8 Blok A Jakarta Selatan	(021) 2702782, 72795313	(021) 2702782, 72795313
12	Cililitan	Jl. Dewi Sartika No. 46, Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur	(021) 80875102-5	(021) 80875106
13	Pontianak	Jl. Gajah Mada No. 153-157 Kode Pos 78121 Pontianak	(0561) 748236	(0561) 761529, 760058

No.	Kantor Cabang	Alamat	Telepon	Faksimile
14	Depok	Jl. Margonda Raya No. 77 Depok	(021) 7777357	(021) 7777358
15	Banjarmasin	Jl.Jend A. Yani No. 240 Km 3,5 Banjarmasin	(0511) 3256912-5	(0511) 3256916
16	Samarinda	Jl. Pahlawan No. 88 - 89, RT 27, Kel. Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda	(0541) 201030	(0541) 200930
17	Palangkaraya	Jl. Cilik Riwut KM. 1 No. 30 Palangkaraya	(0536) 3242682	(0536) 3242492
18	Balikpapan	Jl. Ahmad Yani No. 10, RT 045, Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Balikpapan	(0542) 428100	(0542) 417676
19	Magelang	Jl. Diponegoro 18 Magelang	(0293) 362425	(0293) 363431
20	Semarang	Jl. MT. Haryono No. 715 Semarang	(024) 8454592-93-94	(024) 8454591, 8319135
21	Kudus	Jl. P. Sudirman 117 Kudus	(0291) 439286	(0291) 435002
22	Tegal	Jl. Dr. Soetomo 24 Tegal	(0283) 352520	(0283) 352522
23	Yogyakarta	Jl.Bintaran Tengah No.15 Yogyakarta	(0274) 377228	(0274) 370137
24	Surakarta	Jl.Brigjen Slamet Riyadi No. 526 Surakarta	(0271) 719203, 724581,724582	(0271) 724580, 715668, 722630
25	Purwokerto	Jl. Wiriaatmaja No. 16, Desa Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas	(0281) 632038	(0281) 632037
26	Surabaya	Jl. Indrapura No.1 EFG Surabaya	(031) 3533054, 3533058	(031) 3532035
27	Kertajaya	Jl. Kertajaya 30 Surabaya	(031) 5017537	(031) 5019484
28	Denpasar	Jl. Letda Tantular No. 1 Rukan Dewata Square No. A21-A23 Denpasar	(0361) 233344 (Hunting)	(0361) 233336
29	Mataram	Jl. Pejanggik No. 86 Mataram	(0370) 629844, 629845, 629848	(0370) 629847
30	Kupang	Jl. Irian Jaya, RT. 11/RW 03, Kel. Fatubesi, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	(0380) 832999	(0380) 833368
31	Malang	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 63 Malang	(0341) 362963	(0341) 340413
32	Madiun	Jl. Salak Raya 65 Madiun	(0351) 462974	(0351) 453311
33	Jember	Jl. Kalimantan 18-A Jember	(0331) 335237	(0331) 335701
34	Kediri	Jl. Brigjen Katamso 32 Kediri	(0354) 685990	(0354) 673553
35	Medan	Jl Putri Hijau No. 20 Medan	(061) 4151655	(061) 4151711, 4522566
36	Pematang Siantar	Jl. Sutomo No. 5/II Pematang Siantar	(0622) 21762	(0622) 431957
37	Sibolga	Jl. Putri Runduk No. 10, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga, Kota Sibolga	(0631) 21112	
38	Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 45, Kel. Belanti Barat, Kec. Padang Barat, Padang	(0751) 7050655	(0751) 446360
39	Bukittinggi	Jl. Profesor M. Yamin No. 9 A/B/C/D, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi	(0752) 8100567	(0752) 8100568
40	Batam Kota	Compound of Raflesia Business Centre Block G No. 1, Kel. Teluk Tering, Kec. Nongsa, City of Batam	0778 – 424893	(0778) 4173224, 4173225, 4173226
41	Pekanbaru	Jl. Jenderal Sudirman No.484 C-D, Pekanbaru	(0761) 839445	(0761) 839609
42	Jambi	Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 32-34, RT. 13/ RW.04, Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Jambi	(0741) 668849	(0741) 668596
43	Bandar Lampung	Jl. Wolter Mongonsidi No.15 Bandar Lampung	(0721) 267445	(0721) 267448
44	Palembang	Jl. Jend. Sudirman No. 16 Palembang	(0711) 360548, 360547	(0711) 360549

WILAYAH OPERASIONAL

No.	Kantor Cabang	Alamat	Telepon	Faksimile
45	Bengkulu	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 925, Kel. Jitra, Kec. Teluk Segara, Bengkulu	(0736) 28776	(0736) 28769
46	Makassar	Jl. G. Bawakaraeng 170-176 Makassar	(0411) 4585, 449073, 435911	
47	Parepare	Jl. Sultan Hasanuddin No. 12 dan 13, Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Parepare	(0421) 24582	(0421) 22943
48	Manado	Jl. Dr.Sam Ratulangi 100-102 Manado	(0431) 854102, 854104, 856346, 856347, 852339	(0431) 864401, 866615
49	Ternate	Jl. Hasan Esa No. 87, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara	(0921) 3110787	
50	Kendari	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 10, RT 001/RW 001, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	(0401) 3129111	(0401) 3129111
51	Palu	Jl Prof. M Yamin Nomor 114, Paluta Building Blok A1,A2,A3, Kel. Tatura Utara, Kedungdoro Kec. Palu Selatan, Palu	(0451) 454565	(0451) 454054
52	Ambon	Jl. Anthony Rhebok No. 41, Kel. Honipopu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	(0911) 345806	
53	Jayapura	Jl. Raya Abepura – Kotaraja No. 51A – 51B (Samping Kantor Askes/BPJS), Kecamatan Abepura, Kota Jayapura	(0967) 531324	(0967) 531323
54	Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 8 Bandung	(022) 4268100 - 01	(022) 4206749
55	Panglima Polim	Jl. Panglima Polim Raya No. 67 A-B, Kebayoran Baru, Jakarta	(021) 7234388	(021) 7234377
56	Zainul Arifin Medan	Jl. K.H. Zainul Arifin No. 25, Medan	(061) 4574034	(061) 4574022
57	Pandanaran	Jl. Pandanaran No. 23, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Semarang	(024) 86453203, 86453204	(024) 86453200
58	Diponegoro	Jl. Ciliwung No. 9, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya	(031) 5621172, 5621173, 5621205, 5664555	(031) 5621080,5621030

JARINGAN MITRA USAHA

Mitra Usaha	Jumlah
Individual	**32**
• Dalam Negeri	32
• Luar Negeri	0
Institusional	**589**
• Dalam Negeri	577
• Luar Negeri	12

KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

Asosiasi	Posisi
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota
Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)	Anggota
Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (PERBINA)	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan	Anggota
Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI)	Anggota
Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Kronologi pencatatan saham BTPN di Bursa Efek Indonesia diuraikan melalui tabel di bawah ini:

Tanggal Pencatatan	Aksi Korporasi	Nominal/Saham (Rp)	Harga Pelaksanaan	Tambahan Saham	Jumlah Saham
12 Maret 2008	Penawaran Perdana	100	2.850	267.960.220	943.936.190
10 Desember 2010	Penawaran Umum dengan *Right Issue* I	100	-	188.787.238	1.132.723.428
28 Maret 2011	*Stock Split*	20	-	-	5.663.617.140
14 Maret 2012	Penambahan Saham dari Konversi Utang IFC	20	-	176.670.117	5.840.287.257
23 Mei 2016	Pembelian Saham Kembali (*Buy Back*)	20	-	-	5.840.287.257
1 Februari 2019	Total Tambahan dari Pemegang Saham SMBCI	20	-		8.148.916.869
26 Agustus 2019	Pemenuhan Ketentuan Saham *Free Float*	20	3.600	400.000.000	8.148.928.869
31 Desember 2019	MESOP 2015:		-	-	
	Tahap I	20	-	-	
	Tahap II	20	-	-	
	Tahap III	20	-	-	
	Tahap IV	20	-	-	
	Tahap V	20	-	-	
	Tahap VI	20	-	-	
31 Desember 2021	MESOP 2016:				
	Tahap I	20	2.617	10.670.600	
	Tahap II	20	2.617	1.112.900	
	Tahap III	20	2.617	12.000	
	Tahap IV	20	2.617	3.000	8.148.931.869
	Tahap V	20	2.617	-	
	Tahap VI	20	2.617	175.000	8.149.106.869

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Nama Obligasi	Tanggal Penerbitan	Nilai Pokok	Bunga	Mata Uang	Jatuh Tempo	Peringkat		Periode Pemeringkatan
						2024	2023	
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019 Seri B	27 November 2019	201.000.000.000	7,75	IDR	26 November 2024	AAA (idn)	AAA (idn)	13 April 2023 – 13 April 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Nama	:	KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*a member firm of KPMG International Limited*)
Alamat	:	Lantai 33 Wisma GKBI 28, Jl. Jend.Sudirman Jakarta 10210
Tel	:	+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888
Periode Penugasan	:	2023
Jasa Audit yang Diberikan	:	Audit Laporan Keuangan Interim 30 September 2023
Biaya	:	Rp10.800.000.000 (tidak termasuk PPN)
Jasa Audit yang Diberikan	:	Audit Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2023
Biaya	:	Rp5.100.000.000 (tidak termasuk PPN)
Jasa Non Audit yang Diberikan	:	Jasa Surat Komforta
Biaya	:	Rp1.350.000.000 (tidak termasuk PPN)

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PENUNJANG PASAR MODAL

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120
Tel : +62 21 350 8077 (*Hunting*)
Fax : +62 21 350 8078

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower, Lt 24, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940
Tel : +62 21 2988 6800
Fax : +62 21 2988 6822

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Equity Tower Lantai 30
Sudirman Central Business Disctrict Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel : +62 21 509 684 69
Fax : +62 21 509 684 68

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Jl. Kapten P Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790 – Indonesia
Tel : +62 21 791 75000
Fax : +62 21 799 0720

Ashoya Ratam, SH, MKn
Notaris & PPAT
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Jl. Suryo No. 54 Jakarta 12180 – Indonesia
Telp : +62 21 2923 6060
Fax : +62 21 2923 6070

INFORMASI PADA *WEBSITE* PERUSAHAAN

Informasi yang termuat dalam *website* Bank BTPN telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs web www.btpn.com.

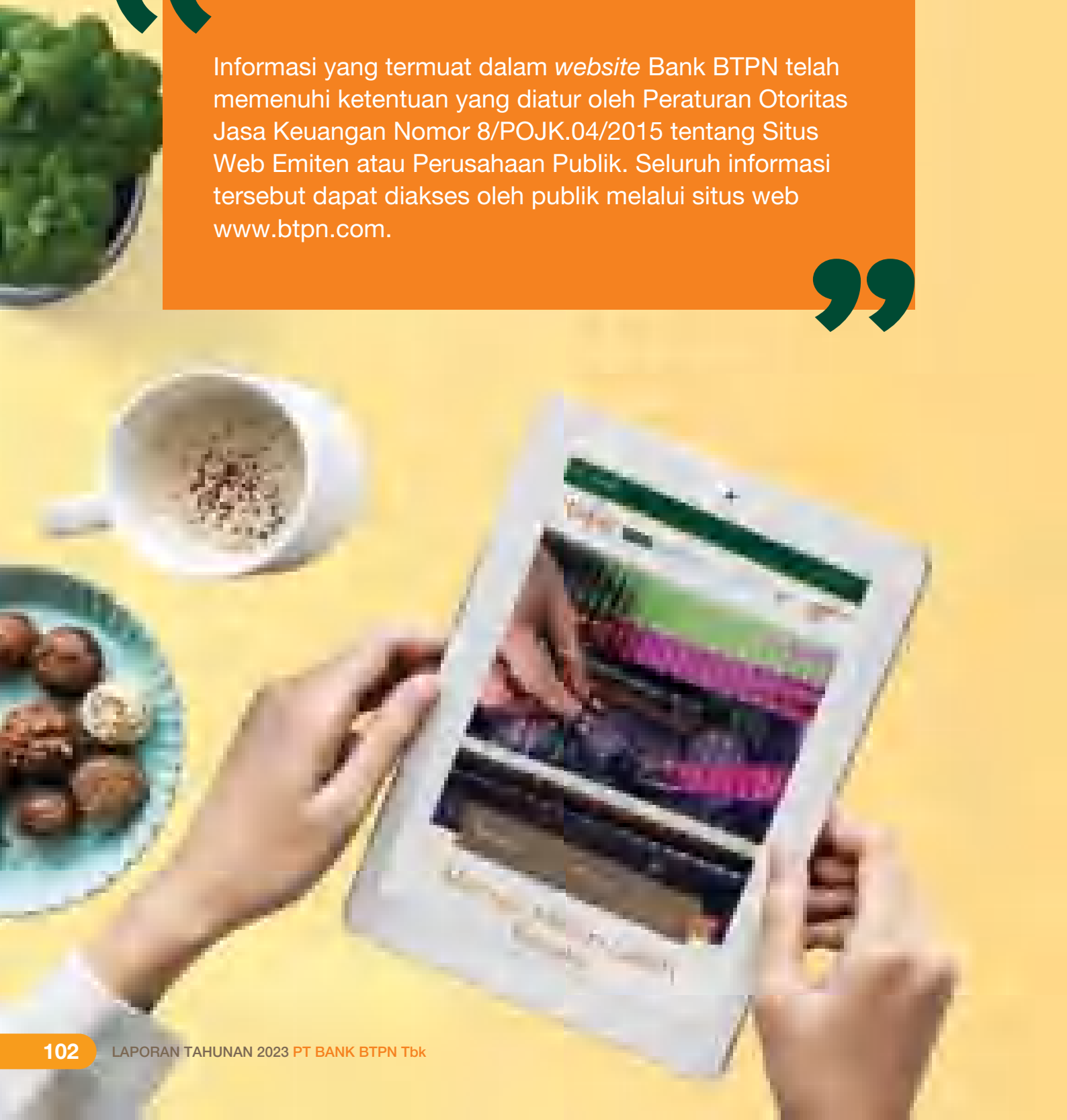

Informasi yang tersedia, antara lain:

Informasi	*Link*
Tentang Kami	
• Sekilas BTPN • Manajemen • Visi, Misi, dan Nilai-nilai • Hubungi Kami • Daya • Unit Bisnis	https://www.btpn.com/id/tentang-kami
Produk dan Layanan	
• Simpanan • Pinjaman • Transaksi Perbankan • Produk Investasi dan *Bancassurance* • *Treasury Solution*	https://www.btpn.com/id/produk-dan-pelayanan/simpanan
Berita dan Media	
• Siaran Pers • Peristiwa • Ulasan Khusus • Cerita Sukses Nasabah • Edukasi Keuangan	https://www.btpn.com/id/berita-media#!
Hubungan Investor	
• Publikasi Eksposur Risiko & Permodalan per Kategori • Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan • Laporan Keuangan • Ikhtisar Keuangan • *Leverage Ratio* & Pengungkapan Permodalan Sesuai Kerangka Basel • Info Investor & *Public Expose* • Komposisi Pemegang Saham dan Struktur Organisasi Grup • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) • Tata Kelola Perusahaan • Keterbukaan Informasi • Aksi Korporasi • Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal • Laporan NCR NSFR	https://www.btpn.com/id/hubungan-investor
Suku Bunga dan Kurs	
• Kurs • Suku Bunga Dasar Kredit	https://www.btpn.com/id/prime-lending-rate/kurs



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

106 Tinjauan Ekonomi dan Industri Perbankan
106 Tinjauan Ekonomi
107 Tinjauan Industri Perbankan
108 Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha
108 Retail Banking
110 Jenius
112 Retail Lending Business
116 Wealth Management Business
117 Business Banking
118 Corporate Banking
119 Penghimpunan Dana
120 Pembiayaan
120 Trade Finance
121 Cash Management
121 Foreign Exchange
122 Treasury
123 Perbankan Syariah
126 Profitabilitas Per Segmen Usaha
128 Tinjauan Kinerja Keuangan
128 Neraca Keuangan
133 Kinerja Laba Rugi
134 Arus Kas
134 Kemampuan Membayar Utang
135 Suku Bunga Dasar Kredit
135 Struktur Modal
136 Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
137 Realisasi Investasi Barang Modal
137 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan
137 Target, Realisasi, dan Proyeksi
138 Prospek Usaha
138 Dividen
139 Kompensasi Jangka Panjang: Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen
139 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
140 Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
142 Informasi Material Transaksi Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal
142 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan
143 Perubahan Kebijakan Akuntansi
143 Ketaatan Sebagai Wajib Pajak
144 Aspek Pemasaran
144 Strategi Pemasaran
145 Pangsa Pasar

Pada tahun 2023, tingkat permodalan perbankan nasional masih sangat kuat, likuiditas tetap memadai, kredit bermasalah pun terjaga walaupun penyaluran kredit tetap tumbuh.

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI PERBANKAN

> Ekonomi Indonesia menunjukkan daya tahannya yang baik, walaupun menghadapi perekonomian global yang belum stabil.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 YoY

5,05%

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%.

Pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan tahun 2023 YoY

3,73%

DPK perbankan tumbuh sebesar 3,73% didorong kenaikan giro yang tumbuh sebesar 4,57%.

TINJAUAN EKONOMI

Kinerja perekonomian global pada tahun 2023 melambat, yakni tumbuh 3,1% secara tahunan atau *year on year* (YoY), di bandingkan tahun 2022 yang mencapai 3,5%. Perlambatan tersebut akibat adanya kenaikan tingkat suku bunga global secara signifikan.

Pada tahun 2023, kondisi perekonomian Amerika Serikat tetap kuat, yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Sebaliknya, perekonomian Tiongkok melambat akibat lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai dampak adanya pelemahan kinerja sektor properti.

Penurunan inflasi di negara maju, baik di Amerika Serikat, Eropa, maupun Inggris terus berlanjut. Kondisi ini membuat siklus penurunan tingkat suku acuan diperkirakan mulai terjadi pada kuartal II- 2024 atau justru semester kedua.

Sementara untuk ekonomi Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, tumbuh 5,05% (YoY). Pencapaian ini berada di atas proyeksi Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) maupun Bank Dunia yang masing-masing memperkirakan 5% dan 4,9%.

Untuk inflasi, kondisi di Indonesia juga terus membaik. Jika di tahun 2022 mencapai 5,5%, pada tahun 2023 hanya 2,6%. Rendahnya tingkat inflasi di dalam negeri berpeluang mendukung penurunan tingkat suku bunga acuan di tahun 2024.

Kendati demikian, risiko peningkatan inflasi tetap ada, berkenaan dengan adanya risiko peningkatan harga bahan pangan dan makanan akibat musim kering yang berkepanjangan. Selain itu, ada kenaikan harga komoditas energi seiring dengan konflik geopolitik global yang sedang berlangsung saat ini.

Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi

Indikator	Satuan	2023	2022	2021
Pertumbuhan PDB Nasional	(%, (yoy))	5,05	5,31	3,70
PDB Per Kapita	(USD) – Nominal	4.919,7	4.798,1	4.362,7
Neraca Berjalan Eksternal	% dari PDB	(0,11)	0,97	0,30
Utang Pemerintah Pusat	% dari PDB	38,11	39,6	41,0
Cadangan Devisa-IRFCL	(USD Miliar)	146,4	137,2	144,9
Kemampuan Cadangan Devisa	(Jumlah bulan impor & utang eksternal)	6,5	5,9	8,6
Kebijakan suku bunga BI	(% akhir tahun)	6,0	5,5	3,5
Indeks Harga Konsumen	(% akhir tahun)	2,61	5,51	1,87
Neraca Fiskal	(% dari PDB; Tahun Fiskal)	(1,65)	(2,38)	(4,65)
Peringkat S&P – Valuta Asing	-	BBB	BBB	BBB

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) bank umum di Indonesia tercatat pada level yang tinggi, yakni sebesar 27,65% pada Desember 2023. Likuiditas perbankan tetap memadai, seperti tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Desember 2023 yang terjaga tinggi pada level 28,73%.

Likuiditas perbankan pun relatif terjaga, sejalan dengan tingginya penempatan perbankan pada surat berharga yang tergolong likuid dan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) oleh Bank Indonesia. Kapasitas likuiditas perbankan (*lending capacity*) juga didukung oleh penguatan strategi operasi moneter yang *pro-market* yang antara lain melalui perdagangan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di pasar sekunder, yang memberikan fleksibilitas bank dalam mengelola likuiditas.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah perbankan (*Non-Performing Loan*/NPL) tercatat rendah, yakni sebesar 2,19% (bruto) dan 0,71% (neto). Secara keseluruhan, ketahanan perbankan yang kuat tersebut didukung oleh kemampuan bayar korporasi dan rumah tangga yang tetap baik, sejalan dengan kinerja korporasi dan ekspektasi penghasilan rumah tangga yang terus membaik. Hasil *stress-test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko ketidakpastian ke depan.

Kinerja Bank Umum Konvensional

Indikator	Satuan	2023	2022	2021
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	%	27,7	25,7	25,7
Marjin Bunga Bersih (NIM)	%	4,8	4,7	4,6
Rasio Kredit terhadap Simpanan (LDR)	%	83,8	78,8	77,1
Kredit Bermasalah (NPL)	%	2,2	2,4	3,0
Special Mention (SM)	%	4,3	3,8	4,1
Pertumbuhan Kredit	%	10,4	11,4	5,2
Pertumbuhan Simpanan	%	3,7	9,0	12,2
Keuntungan Bersih Setelah pajak	Rp Triliun	243,3	201,8	140,2

Sumber: OJK

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA

> Kinerja Bank BTPN tetap terjaga dengan baik, terutama pada segmen ritel, selaras dengan strategi yang diterapkan oleh Bank.

Nasabah Jenius

19,20%

Pada tahun 2023, jumlah nasabah yang dilayani Jenius meningkat 19,20% menjadi 5,4 juta nasabah, dari 4,4 juta nasabah di tahun 2022.

Segmen Syariah

Rp1,1 triliun

Laba bersih yang berhasil dicapai segmen syariah secara konsolidasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Bank BTPN Tbk ("Bank BTPN", "BTPN", "Bank") membagi segmen operasinya menjadi segmen: *Retail Banking*, *Business Banking*, *Corporate Banking*, *Treasury* dan Perbankan Syariah.

Khusus untuk perbankan syariah, kegiatan usahanya dijalankan oleh entitas anak, yakni PT Bank BTPN Syariah. Dengan demikian, laporan kinerja bisnis per segmen usaha yang disajikan merupakan laporan konsolidasi.

RETAIL BANKING

Segmen usaha *Retail Banking* memiliki sejumlah unit bisnis utama, yaitu *digital banking* melalui Jenius, *wealth management business*, *retail lending business* yang mencakup *pension business*, *micro business* and *joint finance.* Unit-unit bisnis tersebut menyediakan beragam produk dan jasa, baik konvensional maupun digital.

BTPN senantiasa melakukan inovasi produk dan layanan agar dapat memberikan transaksi *life finance* yang lengkap, cepat, dan aman. Sebagai bisnis

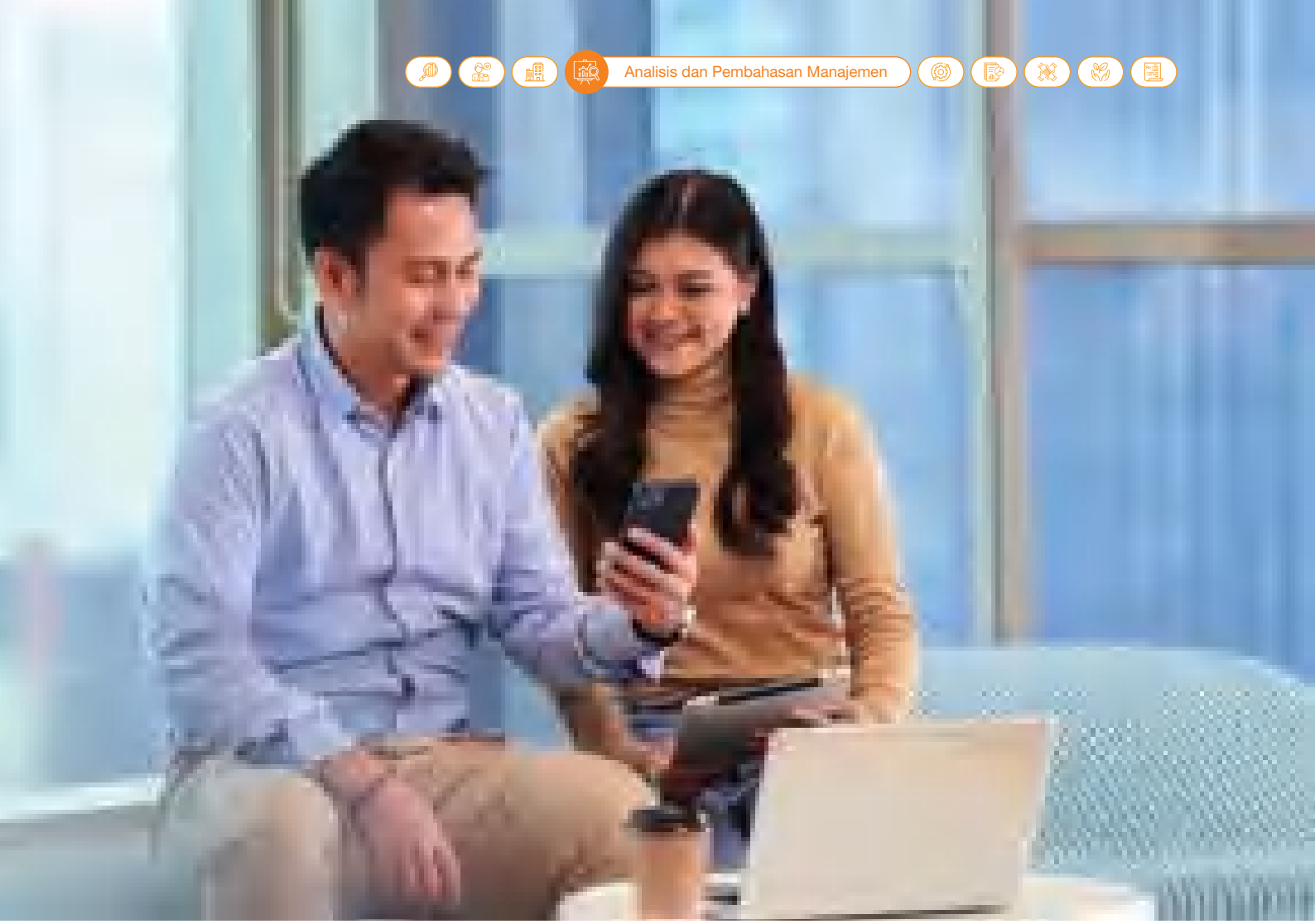

yang dinamis, *Retail Banking* selalu beradaptasi terhadap tantangan, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan portofolio *lending* dan *funding*. Upaya tersebut dilakukan dengan terus mengembangkan inovasi, serta perbaikan pada digitalisasi dan *branding*.

Bank juga berpartisipasi secara aktif dalam kerja sama di lingkungan ekosistem *online/offline*, menyediakan tambahan produk baru serta investasi, pertumbuhan jumlah nasabah. Begitu juga dengan jumlah transaksi dan peningkatan pendapatan non bunga (*fee-based income*).

Inisiatif dan Strategi Tahun 2023

Retail Banking terus menjadikan Jenius sebagai *platform* transaksi *digital* bagi semua produk *retail* untuk meningkatkan pertumbuhan tabungan dan deposito serta mengurangi biaya dana. Inisiatif lainnya adalah:

- Memperkuat model bisnis terutama untuk mendukung pertumbuhan portofolio pinjaman dan dana murah.
- Memperluas produk dan layanan dengan menambah produk pinjaman, pendanaan, *bancassurance*, investasi serta meningkatkan jaringan layanan.
- Membangun digitalisasi semua bisnis melalui platform Jenius.
- Mengembangkan fitur-fitur untuk mendapatkan nasabah baru, meningkatkan transaksi perbankan serta memperluas kerja sama dengan berbagai *online partner* (*e-commerce*).
- Meningkatkan *Retail Banking branding*, terutama pada Jenius & *customer experience.*

Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023, jumlah nasabah pada segmen usaha *Retail Banking* mencapai 5,4 juta. Dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 4,6 juta, terjadi kenaikan 17,8%.

Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), yang berhasil dibukukan mencapai Rp37,9 triliun, sementara tahun sebelumnya sebesar Rp37,2 triliun. Sedangkan untuk penyaluran pinjaman, realisasinya pada tahun 2023 mencapai Rp26,7 triliun, lebih tinggi 3,49% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp25,8 triliun

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA

Kinerja Operasional Retail Banking Tahun 2023

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Nasabah	Juta	5,4	4,6	3,9
Dana Pihak Ketiga	(Rp Triliun)	37,9	37,2	33,3
Pinjaman	(Rp Triliun)	26,7	25,8	28,2

Rencana Strategis Tahun 2024

Pada masa mendatang, Retail Banking akan meneruskan 3 (tiga) tahun strategi eksekusi (*execution strategy*) dengan beberapa rencana inisiatif, di antaranya adalah:

- Meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari berbagai bisnis, mempertahankan kualitas portofolio kredit serta mengembangkan bisnis yang memberikan *profit*.
- Memperkenalkan lebih banyak produk pinjaman, menjalankan *Banking as a Service* (BaaS), serta terus mengembangkan *service channel*.
- Meningkatkan kapabilitas Jenius sebagai platform digital bagi semua produk *retail* dan juga mengembangkan digitalisasi *end-to-end proses*.
- Memperkuat partisipasi dalam ekosistem baik secara *online* maupun *offline* dengan mendorong kerja sama dengan berbagai potensial partner serta mendukung pertumbuhan inorganik .
- Memperkuat kolaborasi antar lini bisnis baik itu di dalam *retail* maupun dengan *non-retail*.

JENIUS

Di antara unit bisnis dalam segmen usaha Retail Banking adalah Jenius. Unit ini memberikan layanan perbankan digital (*digital banking*). *Platform digital banking* Jenius dapat diakses melalui aplikasi yang diunduh melalui *smartphone*.

Jenius menawarkan pengalaman perbankan yang revolusioner bagi nasabah melalui fitur yang beragam dan dapat diakses di mana saja serta kapan saja. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat mengelola kehidupan keuangannya secara digital.

Jenius dilengkapi dengan kartu debit dan kredit Visa untuk mengatur *Life Finance* dengan lebih simpel, cerdas, dan aman di *smartphone* berbasis Android maupun iOS.

Inisiatif dan Strategi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, inisiatif strategis yang dijalankan oleh lini bisnis Jenius, antara lain:

1. Menambah jam operasional fitur mata uang asing menjadi pukul 09.00 hingga 21.00 WIB pada hari Senin-Jumat yang semula pukul 09.00-18.00 WIB. Jumlah mata uang asing di Jenius juga semakin lengkap dengan hadirnya 2 (dua) mata uang asing baru, yaitu Tiongkok Yuan (CNY) dan Thailand Baht (THB). Dengan demikian, Jenius kini memiliki 9 (sembilan) mata uang asing: USD, AUD, JPY, GBP, HKD, SGD, EUR, THB, CNY.
2. Penggunaan QRIS semakin meningkat untuk transaksi *cashless*. Melihat potensi tersebut, Jenius memperkenalkan *scan* Jenius QR jalur cepat. Dengan inovasi ini, pengguna dapat *scan* QRIS langsung pada halaman PIN untuk melakukan transaksi.
3. Untuk menyemarakkan ulang tahun Jenius ke-7, Jenius memperkenalkan program promo 7 Hari 7 Malam yang berlangsung tanggal 11-17 setiap bulan, mulai Agustus 2023 hingga Januari 2024. Program ini menawarkan promo menarik, mulai dari makan, minum, transportasi, *fashion*, hingga *gadget* sesuai pilihan.
4. Penukaran Yay Points Kartu Kredit Jenius semakin menarik. Sebelumnya, Yay Points Kartu Kredit Jenius bisa ditukarkan dengan saldo *e-wallet* (OVO & GoPay) dan kini dapat ditukarkan untuk kategori *travel*: Traveloka Points dan KrisFlyer Miles. Penukaran ini dapat dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui aplikasi.
5. Proses *onboarding* nasabah dibuat lebih simpel dan aman. Jenius menghadirkan *Liveness Biometric* melalui pengenalan wajah untuk proses verifikasi yang lebih *seamless* dan aman.

Jenius terus melakukan kegiatan kokreasi bersama masyarakat melek digital, baik pengguna maupun calon pengguna Jenius, dengan menampung dan menerapkan aspirasi mereka sebagai iterasi Jenius di masa

mendatang. Hingga di akhir tahun 2023, lebih dari 44.000 *digital savvy* telah menjadi bagian dari Jenius Co.Create yang tersebar di dalam dan luar negeri. Melalui *channel* tersebut, telah terlaksana lebih dari 1.000 *online survey* dan *focus group discussion* (FGD). Seluruh kegiatan Jenius Co.Create dilakukan secara *online* dan *offline* untuk menjangkau peserta yang lebih luas.

Pencapaian Kinerja 2023

Pada tahun 2023, jumlah nasabah yang dilayani Jenius meningkat sebanyak 19,20% dibandingkan dengan 2022. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Jenius pada tahun 2023 mencapai Rp25,5 triliun atau naik sebesar 7,57% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23,7 triliun.

Sedangkan untuk produk pendanaan kepada nasabah (Flexi Cash, Pay Later dan Kartu Kredit), jumlah pendanaan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023, yaitu tumbuh 120,57%. Pada tahun 2023 total pendanaan mencapai Rp2,2 triliun, meningkat dari Rp1,0 triliun di tahun 2022. Dari sisi kualitas portofolio tetap terjaga baik, yakni dengan tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) sekitar 2,48%.

Peningkatan *engagement* nasabah terhadap produk Jenius di tahun 2023 juga tercermin melalui transaksi QRIS, yang jumlah transaksinya naik 238,73% dibanding tahun sebelumnya. Transaksi mata uang asing di aplikasi Jenius ikut mengalami kenaikan 93,91% dibandingkan tahun 2022. Selain itu, volume *spending* Kartu Kredit Jenius juga mengalami peningkatan sebanyak 3997% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja Operasional Jenius Tahun 2023

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Nasabah	Orang	5.238.842	4.395.173	3.664.171
Dana Pihak Ketiga	(Rp Juta)	25.491.621	23.698.326	15.602.929
Pendanaan	(Rp Juta)	2.210.521	1.002.172	325.337

Rencana Strategis Tahun 2024

Pada tahun 2024, sebagai komitmen untuk terus menjadi solusi *life finance* yang lengkap dan relevan bagi pengguna, Jenius akan terus mengembangkan fitur-fitur yang dibutuhkan bagi para penggunanya. Di antaranya, memperkenalkan *brand direction* baru bertajuk “Think Unthinkable”, fitur mata uang asing, layanan digitalisasi Jenius di *platform* lain, dan memperluas kolaborasi bersama partner untuk transaksi maupun penukaran Yay Points, serta memperluas layanan transaksi QRIS menggunakan Jenius.

Membuka tahun 2024, Jenius juga telah meluncurkan pesan Think Unthinkable yang merupakan penekanan semangat Jenius sejak awal untuk menghadirkan inovasi dan fitur dengan cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Inovasi ini dilakukan untuk membantu kehidupan masyarakat *digital savvy.* Pesan tersebut juga hadir dengan promo Unthinkable Days bersama *merchant-merchant* favorit yang berlangsung setiap hari mulai 1 Februari hingga 30 April 2024.

Jam operasional fitur mata uang asing akan berlangsung pada Senin hingga Minggu selama 24 jam (24/7). Dengan demikian, pengguna Jenius dapat melakukan jual, beli, kirim, dan terima mata uang asing dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Jenius akan terus berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi di wilayah domestik dan internasional. Penambahan kolaborasi dengan mitra-mitra dalam dan luar negeri yang terhubung dengan Jenius Pay, ekosistem pembayaran menggunakan QRIS, dan penukaran Yay Points akan terus dilakukan untuk menciptakan ketertarikan masyarakat *digital savvy* terhadap Jenius.

Tak hanya itu, Jenius akan fokus untuk melakukan kolaborasi dengan partner untuk menambahkan layanan finansial dan perbankan melalui teknologi digital pada *platform* milik partner. Integrasi dan kolaborasi ini merupakan upaya Jenius untuk melayani pengguna *platform* partner dengan layanan perbankan digital yang dimiliki Jenius, sehingga pengguna bisa mendapatkan pengalaman layanan yang semakin maksimal menyeluruh dengan adanya “Banking as a Service” dari Jenius.

Di sisi lain, model aplikasi Jenius juga akan diimplementasikan untuk bisnis bank dengan segmentasi dan *target market* dengan literasi finansial dan digital tertentu. Sebelumnya strategi ini telah diterapkan dalam bisnis BTPN Sinaya yang melayani nasabah prioritas, di tahun 2024 inisiatif ini akan kembali hadir untuk melayani segmen nasabah dengan kebutuhan finansial yang berbeda dan lebih sederhana melalui Jenius as a Platform.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA

Edukasi terhadap keamanan data dan transaksi juga menjadi salah satu rencana aktivitas strategis bagi Jenius. Sama seperti tahun sebelumnya, edukasi akan dilakukan secara *online* maupun *offline* dengan melibatkan para kreator (kokreator – anggota komunitas Jenius Co.Create), media, ataupun aktivitas komunikasi yang Jenius lakukan melalui media sosial.

Akitivitas kemitraan dalam kreasi (kokreasi) yang selama ini telah dilakukan, akan terus dilanjutkan. Melalui proses tersebut, para kokreator dapat terus memberikan masukan dan bersama-sama mengembangkan fitur-fitur di dalam Jenius agar terus relevan dalam kehidupan sehari-hari.

RETAIL LENDING BUSINESS

Retail Lending Business (RLB) menyediakan layanan dan akses pendanaan tujuan konsumtif dan produktif untuk nasabah individu yang terdiri dari 3 (tiga) unit bisnis, yaitu:

Pension Business

Unit ini memberikan layanan pembayaran manfaat pensiun melalui rekening Tabungan Citra Pensiun dengan berbagai fitur dan kemudahan yang didesain khusus bagi para nasabah pensiunan. Layanan tersebut disajikan melalui berbagai kanal layanan BTPN, seperti jaringan cabang BTPN; jaringan ATM BTPN, Bersama dan PRIMA; serta jaringan Kantor Pos Indonesia.

Sedangkan untuk produk pinjaman, Pension Business menyediakan produk pinjaman multiguna yang dapat digunakan bagi segala macam kebutuhan konsumtif kepada pegawai aktif, pra pensiun dan pensiun yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tiap nasabah.

Selain itu, saat ini Pension Business juga sedang melakukan pengembangan produk kredit pemilikan rumah yang ditujukan bagi pada pegawai, profesional, dan pengusaha.

Micro Business

Unit usaha ini fokus pada jasa pelayanan dan pemberian kredit kepada para pelaku usaha ekonomi produktif sektor mikro dan kecil beserta komunitasnya di Indonesia. Unit bisnis tersebut menyediakan 2 (dua) produk layanan: Maxi Micro (pinjaman dengan agunan – *secured loan*) dan produk Digital Micro (pinjaman tanpa agunan berbasis digital – *unsecured loan*).

Joint Financing Business

Unit bisnis di RLB yang fokus pada jasa pelayanan dan pemberian kredit kepada debitur perorangan maupun badan usaha melalui kerja sama dengan perusahaan *multifinance* dan *fintech*.

Untuk kerja sama tersebut, unit bisnis menyediakan 2 (dua) bentuk layanan kerja sama berupa *joint financing* dan *channeling*. *Joint financing* merupakan bentuk penyaluran kredit bank kepada nasabah yang bekerja sama dengan perusahaan *multifinance* dengan syarat dan ketentuan tertentu serta porsi pembiayaan yang telah disepakati bersama.

Channeling merupakan bentuk penyaluran kredit bank kepada nasabah yang bekerja sama dengan perusahaan *multifinance* atau *fintech.* Syarat dan ketentuan tertentu dan seluruh dana pembiayaan berasal dari bank.

Inisiatif dan Strategi Tahun 2023

Inisiatif dan strategi Tahun 2023 dari masing-masing unit bisnis RLB dijabarkan sebagai berikut:

Pension Business

Dalam memberikan layanan pembayaran uang pensiunan, Pension Business merupakan mitra kerja PT Taspen (Persero) yang memiliki sejarah sangat lama, selain itu juga dengan PT Asabri (Persero) dan berbagai Dana Pensiun BUMN. Sebagai mitra terpercaya dalam memberikan pelayanan pembayaran uang pensiun, Pension Business akan selalu menjaga peran dan fungsinya, dengan memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan dan menjamin pembayaran kepada pensiunan yang berhak – tepat orang.
b. Pembayaran/pelayanan uang pensiun dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah.
c. Mengirimkan secara reguler laporan bulanan yang akurat dan dapat dipercaya kepada mitra – tepat administrasi.

Untuk memenuhi aspirasi anggota TNI/POLRI yang akan memasuki masa pensiun, Pension Business juga menawarkan layanan finansial sebagai berikut:

a. Salah satu aspirasi finansial anggota TNI/POLRI aktif saat mendekati masa pensiun menjelang pensiun adalah untuk menjadi wirausahawan.
b. Selain itu anggota TNI/POLRI aktif juga membutuhkan program perencanaan dan persiapan memasuki masa pensiun.

Pada produk pinjaman konsumtif beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan model akuisisi, penagihan, dan bentuk kerja sama baru dengan pihak ketiga, termasuk untuk melakukan penjualan dan pembelian portofolio kredit dan juga kerja sama penyaluran kredit dengan lembaga keuangan lainnya.
b. Memfokuskan bisnis pada segmen nasabah dari aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN, pegawai swasta dan lainnya yang sesuai kriteria, mulai dari yang masih aktif, pra pensiun sampai pensiun. Mempersiapkan calon pensiunan guna mendukung persiapan usaha dalam memasuki dan menjalani masa pensiun melalui program Daya.
c. Mengintegrasikan layanan perbankan ke dalam *platform* digital dengan menggunakan telepon genggam dan aplikasi.
d. Dilakukannya simplifikasi proses bisnis, salah satunya yaitu melalui sentralisasi proses guna memberikan layanan yang lebih cepat dan baik. Untuk beradaptasi dengan kondisi ”new normal”, maka dilakukan pengembangan proses bisnis untuk minimalisir aktivitas ”*face to face*”.
e. Menyelaraskan proses kerja, kebijakan, kebutuhan infrastruktur, produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan perubahan kebijakan yang diberlakukan oleh mitra kerja, termasuk melalui pengembangan teknologi yang dibutuhkan seperti biometrik, QR *code*, dan lain sebagainya.
f. Bekerja sama dengan Taspen untuk mengembangkan proses dan sistem layanan yang terintegrasi, khususnya peserta Taspen secara *online* dan *realtime* dengan SLA *one hour online service* (*Taspen One Hour Online Service* - TOOS).
g. Meningkatkan layanan dan daya saing Bank dengan lebih fokus pada peningkatan layanan melalui perluasan jaringan dan bentuk kerja sama baru dengan pihak ketiga untuk pembayaran manfaat pensiun, serta pemberian fasilitas kartu ATM berbasis *chip* sesuai standar NSICCS kepada seluruh nasabah Retail Lending – Pensiun serta menjadikan kantor cabang sebagai *one-stop-service* untuk hal-hal yang terkait dengan pensiunan.
h. Melakukan *review* dan pengembangan kerja sama baru dengan mitra asuransi untuk meningkatkan perlindungan terhadap portofolio kredit, termasuk melalui pengembangan sistem pengelolaan perhitungan premi asuransi yang dibutuhkan.
i. Selain itu, untuk mendukung pengembangan bisnis ritel dan memenuhi kebutuhan nasabah, BTPN akan mengembangkan dan menyalurkan produk-produk kredit konsumer baru sesuai dengan kebutuhan nasabah, termasuk melakukan *cross-selling* terhadap keluarga nasabah.
j. Membuat program-program yang utamanya ditujukan untuk mempertahankan portofolio kredit yang sudah ada.

Micro Business

Tahun 2023 inisiatif dan strategi yang dilakukan oleh Bank untuk menghadapi tantangan maka dilakukan beberapa penyesuaian untuk menjawab tantangan tersebut, sehingga dalam implementasinya fokus pada pertumbuhan bisnis dan menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik.

Strategi yang direalisasikan untuk menjawab tantangan tersebut antara lain:

a. Melanjutkan proses transformasi untuk terus meningkatkan pertumbuhan dan menjaga kualitas portofolio kredit yang telah disalurkan.
b. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital dan sistem internal melalui konversi model transformasi dengan melakukan kombinasi tenaga penjual dan proses digital dengan tujuan *engagement* nasabah yang lebih produktif.
c. Merealisasikan model distribusi atau jalur pelayanan *micro business* yang disesuaikan dengan model distribusi yang ada saat ini.
d. Merealisasikan dan terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang sesuai dengan model *micro business* digital.
e. Melanjutkan dan mengelola model bisnis KUR dengan model kemitraan dan avalis.

Joint Finance Business

Tahun 2023 *joint finance business* berinisiatif untuk fokus pada pertumbuhan bisnis pada perusahaan *multifinance* maupun *fintech* yang telah ada dan menambah rekan kerja sama *multifinance* maupun *fintech* baru yang dipilih secara selektif. Dengan demikian, kualitas kredit dapat terjaga dengan baik.

Strategi yang dijalankan adalah:

a. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan rekan kerja sama yang telah ada dengan menambah produk pembiayaan yang sebelumnya tidak dapat dilayani oleh unit bisnis.
b. Mendapatkan rekan kerja sama baru secara lebih selektif dengan kriteria yang ketat untuk dapat menjaga kualitas kredit.
c. Mengikuti dan mengamati kondisi pasar pembiayaan yang dilakukan oleh rekan kerja sama untuk dapat memonitor perkembangan usaha rekan kerja sama.
d. Membuat *media monitoring* secara periodik yang lebih komprehensif atas *performance* rekan kerja sama.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA

e. Mengembangkan kemampuan system aplikasi bank untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional rekan kerja sama.
f. Meningkatkan kemampuan system pengecekan SLIK nasabah sehingga hasil pengecekan SLIK dapat diperoleh dengan cepat agar proses operasional ke rekan kerja sama dapat sesuai dengan SLA yang telah disepakati.

Pencapaian Kinerja

Pension Business

Pada tahun 2023, total nasabah Pension Business mencapai 447.981 orang. Dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 474.373 orang, terjadi penurunan 5,56%. Lunas normal, pelunasan dipercepat, meninggal dunia dan pindah kantor bayar adalah penyebab terbesar terjadinya penurunan jumlah nasabah RLB.

Total portofolio kredit yang dikelola Pension Business mencapai Rp22,2 triliun, turun 7,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp24,1 triliun. Penyebab utamanya, karena portofolio RLB sudah memasuki tahap *mature.* Namun dibanding tahun-tahun sebelumnya, penurunan tersebut sudah melandai dan ditargetkan mengalami pertumbuhan kembali pada tahun depan.

Sedangkan portofolio tabungannya pada tahun 2023 mencapai Rp2,2 triliun, menurun 0,92% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp2,2 triliun. Penyebab penurunan ini masih berkaitan dengan hal-hal yang dijelaskan sebelumnya.

Pencapaian kinerja Pension Business yang cukup menonjol selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Portofolio kredit di beberapa cabang Pension Business telah mengalami pertumbuhan positif, pada tahun 2024 pertumbuhan positif ini ditargetkan terjadi pada keseluruhan Pension Business.
2. Kerja sama strategis dengan salah satu Mitra Kantor Bayar terbesar yaitu PT Pos Indonesia telah memasuki tahap selanjutnya dengan pemberian layanan perbankan kepada para pegawai PT Pos Indonesia.
3. Pada sisi teknologi telah mulai dikembangkan aplikasi perbankan digital yang akan dikhususkan untuk para nasabah pensiun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses perbankan bagi Nasabah golongan tersebut.

Kinerja Operasional Pension Business Tahun 2023

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Nasabah	Orang	447.981	474.373	531.567
Dana Pihak Ketiga	(Rp Miliar)	2.155	2.175	2.301
Pendanaan	(Rp Miliar)	22.222	24.058	27.472

Micro Business

Pada tahun 2023, jumlah nasabah Micro Business mencapai 13.935 nasabah, lebih tinggi 16,64% dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 11.947 nasabah. Sementara untuk penyaluran pinjaman, sepanjang tahun 2023 yang telah direalisasikan mencapai Rp1, triliun, naik 75,77% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp743,1 miliar.

Kenaikan jumlah nasabah Micro Business maupun total pinjaman yang disalurkan tersebut didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya, karena adanya peningkatan proses percepatan kredit dan penambahan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dalam melayani nasabah Micro Business.

Kinerja Operasional Micro Business Tahun 2023

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Nasabah	Orang	13.935	11.947	6.656
Pendanaan	(Rp Juta)	1.306.176	743.106	483.723

Joint Finance Business

Per 31 Desember 2023, *outstanding* pinjaman kerja sama dengan rekan kerja sama di unit bisnis Join Financing sebesar Rp1,1 triliun dengan jumlah akun (NOA) sebanyak 160.994. Penapaian ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022, yakni *outstanding* pinjaman Rp148,9 miliar dan NOA 33.677 akun.

Dari sisi kualitas kredit, *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2023 tercatat sebesar 0,9%. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2022 yang 1,8 %.

Rencana Strategis Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024, masing-masing unit bisnis di RLB memiliki rencana strategis sebagai berikut:

Pension Business

Selain melanjutkan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pada tahun 2023, untuk mencapai sasaran kerja yang ditetapkan, pada tahun 2024 beberapa hal strategis juga akan dilakukan Pension Business:

1. Penggunaan aplikasi perbankan berbasis digital untuk Nasabah pra-pensiun dan pensiun untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi.
2. Penetrasi ke segmen Nasabah Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Pegawai BUMN melalui layanan dan produk-produk pendanaan.
3. Mengimplementasikan penyederhanaan proses dan dokumen persyaratan untuk meningkatkan kecepatan proses mempermudah Nasabah.
4. Proses kredit dengan sesedikit mungkin terjadi tatap muka (*face to face*) juga akan mulai diimplementasikan.
5. Pengembangan produk Kredit Pemilikan Rumah juga akan diselesaikan yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru portofolio kredit.

Micro Business

Dengan tujuan terus meningkatkan pertumbuhan, Micro Business ditahun 2024 memiliki rencana strategis antara lain disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Strategi	Penjelasan
Pengelolaan Kinerja Bisnis	1. Penambahan sumber daya manusia dengan melakukan percepatan proses pemenuhan sumber daya manusia dengan model *outsourcing* sesuai dengan potensi pasar mikro. 2. Penambahan jumlah titik penjualan baru dengan memaksimalkan cabang Universal sesuai dengan potensi pasar mikro.
Program untuk nasabah	1. Program Pendampingan dan Pelatihan melalui BTPN Daya.id untuk mengembangkan usaha nasabah *micro business.* 2. Program webinar untuk nasabah *micro business* yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan peningkatan usaha nasabah melalui narasumber yang kompeten.
Optimalisasi Proses dan Jangkauan	1. Melanjutkan pembiayaan pelaku usaha ekonomi produktif beserta komunitasnya dengan menerapkan model *micro business* yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan modal bisnis nasabah serta menjaga kualitas portofolio dengan baik. 2. Menerapkan model *micro business* dengan pembiayaan kredit mikro berbasis digital.
Memperkuat Kemitraan Strategis dengan Mitra Bisnis	1. Menjalin kemitraan lokal dan komunitas UMKM untuk pengembangan usahanya dengan menggunakan platform digital perbankan. 2. Bekerja sama dengan beberapa unit bisnis yang memiliki potensi pembiayaan sektor mikro.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA

Joint Finance Business

Dengan tujuan terus meningkatkan pertumbuhan dan menjaga kualitas kredit unit bisnis JF di tahun 2024 memiliki rencana strategis antara lain disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Strategi	Penjelasan
Pengelolaan Kinerja Bisnis	1. Menambah rekan kerja sama secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian atas RAC nasabah yang dipilih dari rekan kerja sama untuk dapat diberikan pinjaman. 2. Mengelola rekan kerja sama yang sudah ada untuk meningkatkan volume pembiayaan dan menambah limit kerja sama sesuai kualitas pinjaman yang dikelola oleh rekan kerja sama. 3. Menggali bentuk kerja sama baru dengan rekan kerja sama lain dengan tetap memperhatikan ketentuan/ peraturan OJK yang ada. 4. Melakukan pertemuan periodik dengan rekan kerja sama untuk membahas performa portofolio yang dikelola oleh Bank maupun yang dikelola secara keseluruhan oleh rekan kerja sama untuk dapat dilakukan tindak lanjut bersama selain menaikkan volume juga menjaga kualitas kredit. 5. Meningkatkan komunikasi dengan asosiasi yang menaungi rekan kerja sama untuk dapat mengetahui kondisi pasar pembiayaan secara keseluruhan. 6. Penambahan sumber daya manusia sejalan dengan peningkatan target volume pembiayaan.
Program Pembiayaan	Tetap menggali program pembiayaan yang telah dilakukan rekan kerja sama untuk dapat juga dibiayai oleh BTPN dengan memperhatikan volume pembiayaan dan kualitas pembiayaan yang telah berjalan di rekan kerja sama.
Optimalisasi Sistem dan Proses	1. Melanjutkan pengembangan sistem untuk dapat memenuhi kebutuhan dan layanan operasional dari rekan kerja sama. 2. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan tim operasional Bank atas adanya proses operasional baru yang terjadi di rekan kerja sama.

WEALTH MANAGEMENT BUSINESS

Wealth Management Business (“WMB”) merupakan salah satu unit bisnis di *Retail Banking*. Unit ini disediakan untuk melayani nasabah individu segmen *affluent* dengan produk simpanan dan investasi serta layanan nasabah prima melalui layanan Sinaya Prioritas yang tersedia di 58 kantor cabang BTPN, tersebar di 38 kota. Layanan dapat diakses juga melalui *platform digital* (Jenius) yang memberikan keleluasaan nasabah dalam bertransaksi kapan saja dan di mana saja.

WMB fokus pada pengembangan produk investasi dan layanan nasabah prima yang tersedia melalui berbagai jaringan baik kantor cabang maupun aplikasi digital. Dengan demikian, dapat memberikan solusi pengelolaan *wealth management* yang terintegrasi.

Inisiatif dan Strategi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, sejalan dengan rencana bisnis Bank, unit WMB telah merealisasikan sejumlah inisiatif strategis, yaitu:

1. Pengembangan di aplikasi Jenius untuk memberikan informasi mengenai kondisi pasar dan tip investasi.
2. Penambahan produk Investasi yang dapat memberikan lebih banyak alternatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan investasi nasabah:
   - Penambahan produk 7 reksa dana dari mitra manajer investasi baru, Manulife.
   - Penambahan 2 (dua) reksa dana dalam mata uang IDR dan 1 (satu) reksa dana berdenominasi USD.
   - Penambahan 4 (empat) produk/seri obligasi pemerintah berdenominasi USD di pasar sekunder.
   - Penambahan produk Bancassurance dari Allianz, Guardia Legacy & Guardia Pintar.
3. Simplifikasi dan *rebranding* produk tabungan menjadi Tabungan Sinaya.

Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023, nasabah WMB tumbuh 2,5%, sehingga menjadi 137.248. Sedangkan dana pihak ketiga yang berhasil dibukukan tercatat Rp33,9 triliun (terdiri dari dana produk simpanan sebesar Rp27,3 triliun dan dana produk investasi sebesar Rp6,6 triliun), mengalami pertumbuhan sebesar 0,9%. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, biaya bunga juga mengalami kenaikan menjadi 4,39%.

Kinerja Produk Wealth Management*

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Jumlah Nasabah	Orang	137.248	133.880	125.070
Total Dana Pihak Ketiga	Rp Miliar	33.974	33.681	27.787
Dana Produk Simpanan	Rp Miliar	27.320	27.224	21.392
Dana Produk Investasi	Rp Miliar	6.653	6.437	6.395

Indikator Kinerja Wealth Management*

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Biaya Bunga	%	4,39	3,49	3,62
Pendapatan Bunga Bersih	Rp Miliar	440	299	198
Pendapatan Lainnya	Rp Miliar	175	174	160
Biaya Operasi	Rp Miliar	(169)	(174)	(240)

* Kinerja WMB sebagai bisnis unit termasuk hasil pemasaran produk melalui platform digital (Jenius)

Rencana Strategis Tahun 2024

Sejalan dengan strategi unit bisnis BTPN Sinaya untuk mengembangkan produk *Wealth Management* dan Layanan Nasabah Prima yang memanfaatkan teknologi digital sebagai *Unique Value proposition* (UVP), maka di tahun 2024, BTPN Sinaya akan melakukan rencana pengembangan layanan sebagai berikut:

1. Pengembangan lanjutan layanan digital untuk Nasabah Prima meliputi dan tidak terbatas pada:
   a. Pengembangan fitur dalam aplikasi Jenius berupa fitur transaksi dan edukasi produk investasi.
   b. Penambahan manfaat layanan Nasabah Prima berbasis digital.
   c. Pengembangan aplikasi untuk digunakan oleh staf yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses penjualan dan peningkatan kualitas layanan.

2. Pengembangan produk *Wealth Management*, termasuk namun tidak terbatas pada penambahan rekanan manajer investasi dan produk reksa dana, penambahan produk *bancasurrance* dan menjadi mitra distribusi penawaran perdana surat berharga negara untuk investor ritel.

BUSINESS BANKING

Unit bisnis dalam segmen usaha Business Banking, yakni BTPN Mitra Bisnis (SME), menyediakan beragam produk dan layanan yang lengkap, yakni mencakup kredit, pendanaan hingga layanan perbankan lain dan pelatihan. BTPN Mitra Bisnis telah mengembangkan *electronic channel* melalui Digital SME yang saat ini telah memiliki kemampuan digital (*digital capabilities*) pendanaan, pembayaran, transaksi, dan pengelolaan kas sederhana.

Kebutuhan utama dari bisnis Mitra Bisnis adalah ketepatan waktu dan ketersediaan modal kerja setiap saat dalam menjalankan perputaran usahanya, kebutuhan akses ke pasar, hubungan berkelanjutan dan jangka panjang dengan pemasok, serta kebutuhan peningkatan kompetensi dan informasi bisnis. BTPN Mitra Bisnis menjawab kebutuhan-kebutuhan ini dengan menyediakan paket keuangan "3 in 1" yang meliputi:

1. Pengembangan produk-produk dan transaksi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
2. Pengembangan produk *supply chain* untuk menjawab kebutuhan akses pasar yang didukung dengan sistem.
3. Program-program peningkatan kapasitas bagi nasabah.

Inisiatif dan Strategi 2023

Sejumlah inisiatif dan strategi yang dikembangkan sepanjang tahun buku guna meningkatkan kinerja BTPN Mitra Bisnis, antara lain:

1. Fokus untuk secara proaktif mengelola restrukturisasi kredit dan nasabah yang terdampak pandemi.
2. Melanjutkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam mendukung pertumbuhan penyaluran kredit.
3. Pembiayaan melalui skema rantai pasok, kolaborasi internal dengan bisnis *wholesale banking* dan *corporate Japanese*.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA

4. Melanjutkan pengembangan SME Digital dengan target segmen yang lebih *digital savvy* serta untuk membantu nasabah BTPN Mitra Bisnis dalam proses transformasi bisnis dan perubahan dalam perilaku transaksi bisnisnya.
5. Mengembangkan sistem operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Pencapaian Kinerja

Hingga akhir tahun 2023, total rekening nasabah yang dilayani oleh BTPN Mitra Bisnis mencapai 3.000 nasabah. Dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 2.500 nasabah, terjadi peningkatan 20,0%.

Terkait dengan penyaluran pembiayaan, realisasinya pada tahun 2023 mencapai Rp13,3 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi 20,9% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp11,0 triliun.

Rencana Strategis Tahun 2024

Sejumlah inisiatif strategis untuk menunjang pertumbuhan bisnis tahun 2024 yaitu:

1. Untuk memperluas pelayanan pada nasabah, akan dikembangkan skema *supply-chain financing*, termasuk kerja sama dengan bank lain dan institusi/bisnis lainnya. Selain itu, akan dilakukan kerja sama strategis guna membangun *ecosystem partnership* untuk mendapatkan nasabah potensial baik untuk simpanan maupun pinjaman.
2. Fokus pada kebutuhan nasabah dengan menyediakan solusi produk yang holistik dengan mengembangkan pelatihan yang berfokus pada *solution style selling.*
3. BTPN sebagai bank devisa, memungkinkan BTPN Mitra Bisnis menawarkan layanan dan produk dalam valuta asing baik berupa produk simpanan maupun pinjaman (termasuk pembiayaan *trade finance*) secara bertahap bagi nasabah yang memerlukan.
4. Pengembangan digital SME dalam bentuk *website platform* untuk melayani nasabah BTPN Mitra Bisnis saat ini. Hal ini guna melengkapi *mobile platform* yang saat ini telah dikembangkan untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi perbankan melalui berbagai kanal transaksi.
5. Fokus untuk membangun kerja sama dengan platform lain pada ekosistem digital, yang dapat memberikan manfaat bagi nasabah.

CORPORATE BANKING

Segmen usaha *Corporate Banking* (korporasi) terdiri dari lini bisnis korporasi Jepang dan korporasi non Jepang. Segmen korporasi non Jepang melayani nasabah perusahaan besar Indonesia dan multinasional (*Multi National Company*/MNC), institusi keuangan (*Financial Institution*/FI) dan perbankan komersial (*Commercial Banking*).

Secara umum, layanan yang disediakan oleh segmen ini, antara lain pembiayaan, penghimpunan dana, serta pengelolaan kas. Di bidang pembiayaan, BTPN tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja untuk jangka pendek, tetapi juga pembiayaan investasi yang berjangka menengah dan panjang dalam denominasi rupiah maupun valuta asing.

Segmen korporasi juga terus aktif berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi, khususnya: proyek infrastruktur; proyek energi baru terbarukan; pembiayaan terkait *Environment, Social, Governance* (ESG) termasuk *green financing*; dan industri pendukung termasuk industri pendukung ekspor, yang sejalan dengan program pembangunan pemerintah Indonesia. Layanan pendukung juga terus ditingkatkan bagi segmen ini seperti *trade finance* dan *foreign exchange*.

Di bidang penghimpunan dana, Bank menyediakan layanan *corporate account* dalam bentuk rekening giro, termasuk di dalamnya manajemen kas. Layanan rekening giro ini dapat diakses melalui teknologi digital, sehingga tidak membatasi ruang dan waktu nasabah.

Tahun 2023 merupakan tahun yang menantang bagi kondisi perekonomian nasional, berbagai aral mewarnai perekonomian global, yang juga berdampak pada ekonomi Indonesia. Permintaan yang mulai meningkat pasca pandemi Covid-19 dan supply shock yang terjadi mengakibatkan melonjaknya inflasi. Tidak hanya itu tensi geopolitik masih mewarnai dinamika perekonomian 2023, menyebabkan harga komoditas bergejolak yang selanjutnya memicu kenaikan inflasi.

Inflasi tinggi direspons oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga tersebut di satu sisi menurunkan inflasi seiring menurunnya permintaan agregat, di samping harga komoditas energi yang juga menurun. Peningkatan suku bunga acuan menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan dalam melakukan penyaluran kredit ke masyarakat.

Upaya menjaga kualitas portofolio terus dilakukan dengan cara mempercepat penyelesaian beberapa pengajuan restrukturisasi yang masih berjalan serta memastikan Bank telah mengalokasikan pencadangan dengan cukup. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan OJK dalam kebijakan restrukturisasi. Selain itu juga dilakukan identifikasi terhadap nasabah-nasabah yang memiliki potensi terdampak oleh krisis geopolitik.

Dalam aspek penghimpunan dana, kinerja rata-rata deposito dan CASA menunjukkan pencapaian yang positif, melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2023. Data mengindikasikan kestabilan dan kepercayaan terhadap layanan Bank.

Di akhir tahun 2023, segmen korporasi memperkenalkan "ESG Deposit", sebuah produk pengelolaan kas yang mendukung keberlanjutan finansial. Respon positif dari nasabah tercermin pada beberapa nama yang mempercayakan dana mereka untuk dikelola demi mendukung prinsip keberlanjutan. Pertumbuhan produk pengelolaan kas ini memberikan gambaran positif tentang Upaya diversifikasi sumber dana Bank.

Inisiatif dan Strategi Tahun 2023

Di tengah kondisi yang masih dinamis pada tahun 2023, Bank telah merealisasikan sejumlah inisiatif strategis untuk mendukung kinerja usaha. Di bidang penyaluran pinjaman misalnya, Bank berkonsentrasi untuk menyalurkan pinjaman dengan prinsip kehati -hatian untuk menghindari kredit bermasalah.

Sepanjang tahun 2023, segmen korporasi berkolaborasi secara aktif dengan unit Retail Banking dan Business Banking untuk meningkatkan aktivitas *cross sell* bagi BTPN. Misalnya, untuk layanan *payroll*, *payroll loan* dan *supply chain financing*.

Sejalan dengan rencana untuk meningkatkan kontribusi pada keuangan keberlanjutan. ESG Deposit diperkenalkan untuk mengakomodir penggeseran kepedulian nasabah serta mendukung pencapaian inisiatif global dan Pemerintah Indonesia menuju keberlanjutan.

Selama 2023 lini bisnis korporasi Jepang mengadopsi model bisnis yang efisien dan full service banking. Selain itu, kolaborasi tidak hanya terjadi di internal Bank BTPN, tetapi juga melibatkan grup Perusahaan SMBC, baik yang beroperasi di Indonesia maupun di luar negeri. Ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas operasional dan memperluas jangkauan layanan dengan sinergi Bersama grup Perusahaan.

Pada tahun 2023 segmen korporasi dalam proses melakukan pengembangan bisnis kustodian. Inisiatif pengembangan Kustodian telah dimulai sejak Kuartal I di tahun 2023 dengan focus dan prioritas pencapaiannya adalah:

1. Melakukan pengembangan sistem Kustodian yang dikembangkan oleh Perusahaan Pengembang Teknologi Informasi yang sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang di industry Pasar Modal
2. Mempersiapkan dokumen persyaratan untuk mengajukan perijinan bank umum sebagai Kustodian ke OJK, seperti Standar Prosedur Operasional (SOP), Kajian Program Produk dari aspek Hukum, Risiko dan Kepatuhan, pengadaan ruangan yang memiliki akses terbatas dan memiliki sistem pengamanan
3. Membangun tim SDM -Custody Support terpisah dari operasional bank umum yang memiliki ketrampilan spesialisasi tentang Kustodian dan Pasar Modal

Melanjutkan inisiatif tahun 2023, segmen korporasi juga tetap mengembangkan penyaluran *green & sustainability financing*, sejalan dengan *roadmap* keuangan berkelanjutan serta komitmen SMBC Group untuk mengurangi emisi GHG (*greenhouse gas*) menuju *net zero* pada tahun 2030. Pada tahun 2023 BTPN berkolaborasi dengan SMBC menyelenggarakan *sustainability seminar* bertajuk headline *"Beyond Energy Transition: Seizing Opportunities in The Pathway to Net Zero Economy"* dan meluncurkan produk *ESG Deposit* pada akhir tahun 2023. Segmen korporasi memanfaatkan keahlian/kemampuan dari SMBC Group pada sektor-sektor yang mendukung *green & sustainability financing*.

Pencapaian Kinerja

Uraian pencapaian segmen usaha *Corporate Banking* disampaikan berdasarkan layanan seperti di bawah ini:

PENGHIMPUNAN DANA

Pada tahun 2023, total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dibukukan segmen usaha *Corporate Banking* mencapai Rp57,4 triliun, turun 12% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp65 triliun.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA

Kinerja DPK Korporasi Tahun 2023

(Rp Miliar, kecuali dinyatakan lain)

Segmen	2023	2022	2021
Corporate Banking Japanese	34.630	37.639	33.705
Wholesale Banking	21.952	26.704	31.133
Commercial	835	703	415
Total	**57.416**	**65.046**	**64.622**

PEMBIAYAAN

Pada tahun 2023, total pembiayaan yang disalurkan segmen usaha *Corporate Banking* mencapai Rp104,9 triliun, naik 8% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp97,4 triliun.

Kinerja Pembiayaan Korporasi Tahun 2023

(Rp Miliar, kecuali dinyatakan lain)

Segmen	2023	2022	2021
Corporate Banking Japanese	38.873	43.381	33.797
Wholesale Banking	61.047	50.574	48.929
Commercial	4.624	3.496	3.210
Total	**104.904**	**97.450**	**85.936**

TRADE FINANCE

Pada tahun 2023, total realisasi *trade finance* mencapai Rp6,9 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp12,1 triliun, terjadi penurunan 42%.

Kinerja Trade Finance

(Rp Miliar, kecuali dinyatakan lain)

Segmen	2023	2022	2021
Corporate Banking Japanese	289	522	221
Wholesale Banking	3.967	9.559	8.443
Commercial	2.711	1.997	1.520
Total	**6.966**	**12.078**	**10.184**

CASH MANAGEMENT

Hingga 31 Desember 2023, pengelolaan *cash management* korporasi mencapai Rp57,4 triliun, lebih rendah 12% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp65,0 triliun.

Dari pengelolaan dana tersebut, pencapaian rasio CASA BTPN mencapai 45,6%. Dibandingkan tahun sebelumnya yang 35,9% terjadi kenaikan 9,7%.

Kinerja Cash Management Tahun 2023

(Rp Miliar, kecuali dinyatakan lain)

Segmen	2023	2022	2021
Corporate Banking Japanese	34.629	37.639	32.991
Wholesale Banking	21.951	26.704	30.662
Commercial	835	703	369
Total	57.416	65.046	64.022
Rasio CASA	45,6%	35,9%	39,3%

FOREIGN EXCHANGE

Hingga 31 Desember 2023, pengelolaan *foreign exchange* mencapai Rp556,8 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp590,5 triliun, terjadi penurunan 6%.

Kinerja Foreign Exchange Tahun 2023

(Rp Miliar, kecuali dinyatakan lain)

Segmen	2023	2022	2021
Corporate Banking Japanese	520.608	555.060	512.628
Wholesale Banking	34.846	34.272	35.696
Commercial	1.384	1.126	1.016
Total	556.838	590.458	549.340

Rencana Strategis Tahun 2024

Secara umum, rencana strategi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Segmen korporasi memproyeksikan perluasan target segmen, menambah produk baru, dan penguatan di sisi teknologi serta pengembangan sektor baru.

Dari sisi target segmen, segmen korporasi memperluas basis nasabah perusahaan-perusahaan Indonesia di segmen Tier 1 dan Tier 2. Selain itu, basis nasabah *Commercial Banking juga* diperluas dengan menargetkan pemasok atau distributor dari nasabah-nasabah Tier 1 dan Tier 2.

Bank juga terus meningkatkan transaksi *fee based.* Hal itu, antara lain dilakukan melalui transaksi *trade finance*, *structured finance* (*project finance* dan ECA), sindikasi & *agency services* serta peningkatan dari sisi *treasury* (sistem, produk, dan *trading capability*).

Terkait produk, segmen korporasi secara bertahap mengembangkan beberapa produk/layanan tambahan seperti: *green loan/sustainability linked loan dan corporate bond investment/bond trading*.

Berkenaan dengan teknologi perbankan, segmen korporasi melakukan pengembangan ekosistem dan konektivitas untuk pembiayaan secara *end to end*, *cash management* dan *forex.* Upaya itu dilakukan dengan cara meningkatkan kapabilitas sistem, termasuk di dalamnya interkoneksi antar-sistem, inisiasi *digital trade*, dan pengembangan produk yang terkait dengan LCS. Selain itu, BTPN akan mengimplementasikan *API based solutions* untuk integrasi layanan *cash management* dan juga layanan *trade finance*.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA

TREASURY

Segmen usaha Treasury melayani kebutuhan nasabah terhadap produk *treasury*, seperti valuta asing, surat berharga/obligasi dan produk derivatif. Bank terus mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, segmen ini melakukan sinergi dengan seluruh lini bisnis di BTPN. Hal ini dilakukan untuk menjaga komitmen Bank agar dapat memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Di antara layanan yang disediakan adalah transaksi mata uang asing maupun transaksi derivatif.

Bisnis treasury pada tahun 2023 sudah membaik pasca berakhirnya pandemi walau masih dibayangi ketidakpastian perekonomian global akibat dampak perang di Ukraina dan Palestina.

Pada tahun buku tersebut fokus Bank adalah berkomitmen untuk menyediakan layanan valuta asing yang terbaik kepada nasabah, baik melalui pengembangan produk maupun sinergi di antara line of business BTPN. Fokus lainnya, Bank akan terus mengembangkan dan memperluas jangkauan dan aktivitas layanan produk digital banking kepada nasabah dalam mengantisipasi persaingan Fintech yang terus meningkat. Bank juga akan terus mengembangkan kebutuhan sistem yang dapat menopang perkembangan bisnis dan kebutuhan nasabah dalam bertransaksi dengan mempertimbangan cost and benefit yang sesuai dengan rencana strategis bank.

Treasury terus melayani kebutuhan nasabah terhadap produk treasury dengan melakukan pengembangan produk-produk Treasury sekaligus beradaptasi dan berpartisipasi pada Bank Indonesia BPPU inisiatif. Pengembangan produk Treasury bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah baik untuk nasabah Retail maupun korporasi dalam rangka memperluas pangsa pasar. Pengembangan produk Treasury yang dimaksud terkait dengan transaksi FX dan Derivatif, Pendapatan Tetap, dan Structured Product.

Inisiatif dan Strategi Tahun 2023

Menghadapi situasi yang berkembang pada tahun 2023, Bank telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif strategis, yaitu:

1. Untuk menjaga tingkat likuiditas pada level yang aman, BTPN telah melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya:
   - Menjaga indikator-indikator likuiditas berada pada kondisi aman yaitu lebih tinggi dari ketentuan yang disyaratkan. Hingga 31 Desember 2023, Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 199,68% dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) 113,79%
   - Melakukan diversifikasi sumber pendanaan melalui pengembangan pendanaan dari sektor wholesale, retail funding dan public sector/ financial institutions.
   - Terus memantau perkembangan pasar pendanaan jangka panjang (long-term funding), seperti penerbitan obligasi rupiah, fasilitas pinjaman bilateral jangka panjang dalam rupiah maupun valuta asing dari bank lokal dan bank asing/institusi keuangan internasional, termasuk pendanaan dari Grup SMBC.

2. Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (ALMA) Bank relatif memadai dan selalu dilakukan pemutakhiran melalui indikator pendukung sebagai berikut:
   - Meningkatkan ALM Bank dengan pemantauan suku bunga yang lebih baik melalui Funding Lending Meeting dan pertemuan ALCO.
   - Memiliki kebijakan yang menyeluruh untuk menjaga ketersediaan likuiditas sesuai dengan struktur profil assets & liabilities Bank. Bank juga telah memiliki prosedur limit kewenangan pengelolaan likuiditas. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan Bank.
   - Telah memiliki program contingency plan dalam penyediaan back-up likuiditas.

3. Pengembangan produk dan layanan untuk mendukung sektor bisnis wholesale, retail dan public sector/financial institutions sebagai berikut:
   - Pengembangan layanan dan produk valuta asing yaitu dengan penambahan mata uang asing yang dapat ditransaksikan, diversifikasi produk terkait dengan transaksi FX dan derivatif seperti transaksi menggunakan skema Local Currency Settlement (LCS), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), Option dan Call Spead Option (CSO) dan Range Forward.

- Pengembangan layanan dan produk surat berharga yaitu dengan penambahan seri dari Obligasi yang dijual ke nasabah retail, termasuk series obligasi dalam USD (Global Bond).

Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023, total nasabah yang dilayani oleh segmen usaha Treasury mencapai 1.170 unit. Dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 1.369 unit, terjadi penurunan 14,5%. yang disebabkan oleh masih belum pulihnya kondisi nasabah paska berakhirnya pandemi dan ditambah dengan kondisi ekonomi global yang masih diselimuti dengan ketidakpastian.

Sementara nilai transaksi mata uang asing tercatat mencapai US$10,3 miliar, turun 1,5% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar US$10,5 miliar. sejalan dengan semakin ketatnya persaingan bisnis dari Bank lain.

Untuk transaksi derivatif, nilainya mencapai US$526 juta. Dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$468 juta, terjadi kenaikan 12.4%. Kenaikan ini disebabkan oleh nasabah yang melakukan hedging untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Kinerja Operasional Treasury Tahun 2023

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Jumlah Nasabah	Orang	1.170	1.369	1.110
Total FX Nasabah	US$ Juta	10.347	10.507	12.203
Total Derivatif Nasabah	US$ Juta	526	468	492

Rencana Strategis Tahun 2024

Di tahun 2024, fokus pengembangan terkait dengan Treasury meliputi:

1. Bank Indonesia policy mengenai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025
   - Bank akan mengkaji dan melakukan pengembangan sistem terkait dengan Central Clearing Counterparty (CCP) dan Trade Repository (TR). CCP dan TR merupakan mandatory requirement yang harus dipenuhi oleh Bank terkait dengan transaksi FX dan Derivative
   - Sejalan dengan inisiatif tersebut, maka Bank akan melakukan update sistem dan melakukan pengembangan produk FX option dan Call Spread Option serta mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan lanjutan atas produk Overnight Index Swap (OIS).
2. Pengembangan produk Obligasi baik IDR maupun USD. Pengembangan tersebut termasuk didalamnya transaksi perdagangan repo dan reverse repo dengan Bank lain dan obligasi dengan nasabah, baik nasabah retail maupun korporasi,
3. Pengembangan sistem pendukung Transaksi Treasury:
   - Dengan meningkatnya volume transaksi Treasury baik dari nasabah retail maupun korporasi maka kebutuhan sistem interface antar unit bisnis Bank untuk dapat terkoneksi dengan sistem Treasury menjadi salah satu inisiatif Bank untuk meningkatkan pelayanan Bank yang efesien dan efektif.
   - Bank juga melakukan kerjasama dengan penyedia Trading Platform guna mengakomodasi kebutuhan nasabah dalam memberikan harga yang kompetitif dan segera (*real time*).
   - Dalam rangka meminimalisasi maturity mismatch, Bank BTPN terus menjaga dan meningkatkan sumber pendanaan jangka-panjang. Di tahun 2024, Bank akan mengeksplorasi rencana untuk melakukan penerbitan Obligasi dalam mata uang Rupiah dengan jumlah dan waktu penerbitan mempertimbangkan pertumbuhan kredit, kondisi likuiditas dan kondisi pasar. Selain itu, Bank BTPN juga akan terus mengeksplorasi kerjasama bilateral untuk mendapatkan fasilitas pendanaan segar dari Lembaga Keuangan domestik maupun luar negeri, termasuk dengan Grup SMBC

PERBANKAN SYARIAH

Segmen usaha Perbankan Syariah Bank BTPN dikelola oleh entitas anak, yaitu PT Bank BTPN Syariah Tbk. Perusahaan ini telah menjadi perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA

Inisiatif dan Strategi Tahun 2023

Pada tahun 2023, BTPN Syariah telah berhasil melaksanakan key strategic initiatives nya, diantaranya adalah pengembangan *platform* pemberdayaan yang memberikan nasabah akses ke pengetahuan dan akses ke pasar yang lebih besar. *Platform digital* ini kami beri nama Bestee Tepat (Berdaya Bersama Sahabat Tepat Indonesia), yang memberikan kesempatan kepada karyawan dan *stakeholder* lain untuk dapat ikut serta dalam memberikan dukungan nyata dalam berbagai bentuk kepada nasabah inklusi.

Disamping itu BTPN Syariah juga telah berhasil mengembangkan fitur Deposit on Call, *treasury system* telah *live* pada bulan Oktober 2023 untuk meningkatkan proses kontrol, mendukung pengelolaan likuiditas Bank, meramaikan pasar sekunder surat berharga syariah di Indonesia, serta meningkatkan *return* dari portofolio treasury Bank melalui aktivitas perdagangan. Aktivitas Bank dalam perdagangan surat berharga *treasury* fokus pada instrumen pasar uang syariah dan pasar modal syariah.

BTPN Syariah sangat menjunjung tinggi perlindungan asset informasi yang dimiliki oleh perusahaan khusus nya data pribadi nasabah dan transaksi nya. Dengan melakukan perlindungan terhadap keamanan informasi di semua area baik dari proses, teknologi maupun sumber daya manusia. Sebagai bukti komitmen kami atas perlindungan keamanan informasi, maka Bank telah mengadopsi standar best practise internasional mengenai Keamanan Informasi dalam menjaga keamanan pengolahan asset informasi perusahaan dan pada akhir Q2 2023 Bank telah mendapatkan sertifikasi ISO27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi melalui proses pemeriksaan dan pengujian dari pihak independen.

BTPN Syariah juga melanjutkan program berbagi kepada nasabah pembiayaan. Antara lain, program Umroh Nasabah Inspiratif, program pendampingan bagi Nasabah Inspiratif dan Nasabah Sukses, program Bersemi (Berkah Seru Silaturahmi)

1. Program Pemberangkatan Umroh Nasabah Inspiratif
   Pada 2023, Bank telah memberangkatkan umroh 320 nasabah inspiratif yang didampingi oleh 60 karyawan BTPN Syariah. Seluruh jamaah umroh telah diberangkatkan pada 22 Februari 2023 dan kembali ke tanah air pada 2 Maret 2023.
2. Program Tumbuh Bersama Nasabahku (TBNku)
   Melanjutkan program pendampingan bagi Nasabah Inspiratif dan Nasabah Sukses tahun lalu, Bank menggabung kedua program tersebut menjadi satu program dinamai Tumbuh Bersama Nasabahku (TBNku). Program yang diperbarui pada tahun 2023 ini ditujukan untuk menjangkau lebih banyak nasabah untuk mendapatkan pendampingan. Berlangsung pada April-Desember 2023, program ini diikuti oleh hampir 10.000 Nasabah Sukses dan 400 Nasabah inspiratif.
3. BTPN Syariah melanjutkan program pendampingan nasabah melalui program Bestee Tepat (sebelumnya bernama Tepat Daya). Program ini didukung oleh Kementerian Pendidikan yang disebut Magang Merdeka. Program Bestee Tepat telah memasuki periode ke-3, dimana hingga Desember 2023, Bestee Tepat telah melaksanakan program magang merdeka dengan kurang lebih 1.821 fasilitator dan memfasilitasi lebih dari 49 ribu Nasabah.
4. Program BERSEMI (Berkah Seru Silaturahmi)
   Program BERSEMI merupakan program pemberian insentif bagi nasabah yang disiplin membayar tepat waktu. Program ini ditujukan untuk mendorong terbangunnya 4 karakter kunci pemberdayaan yaitu: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS). Program BERSEMI periode 2 berlangsung selama April 2022-April 2023, berhasil menjangkau lebih dari 235.000 nasabah dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp3,1 triliun. Insentif diberikan Bank sebesar 5% dari nilai plafon yang diberikan dan dibayarkan setiap 3 bulan selama maksimal empat periode pembayaran. Bank melanjutkan program BERSEMI periode 3 pada April 2023 hingga Maret 2024. Hingga 31 Desember 2023, outstanding pembiayaan nasabah peserta program BERSEMI periode 3 mencapai Rp3,3 triliun.

Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023, total aset BTPN Syariah mencapai Rp21,4 triliun, naik 1,0% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp21,2 triliun. Sementara total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp11,4 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp11,5 triliun, terjadi penurunan 1,2%.

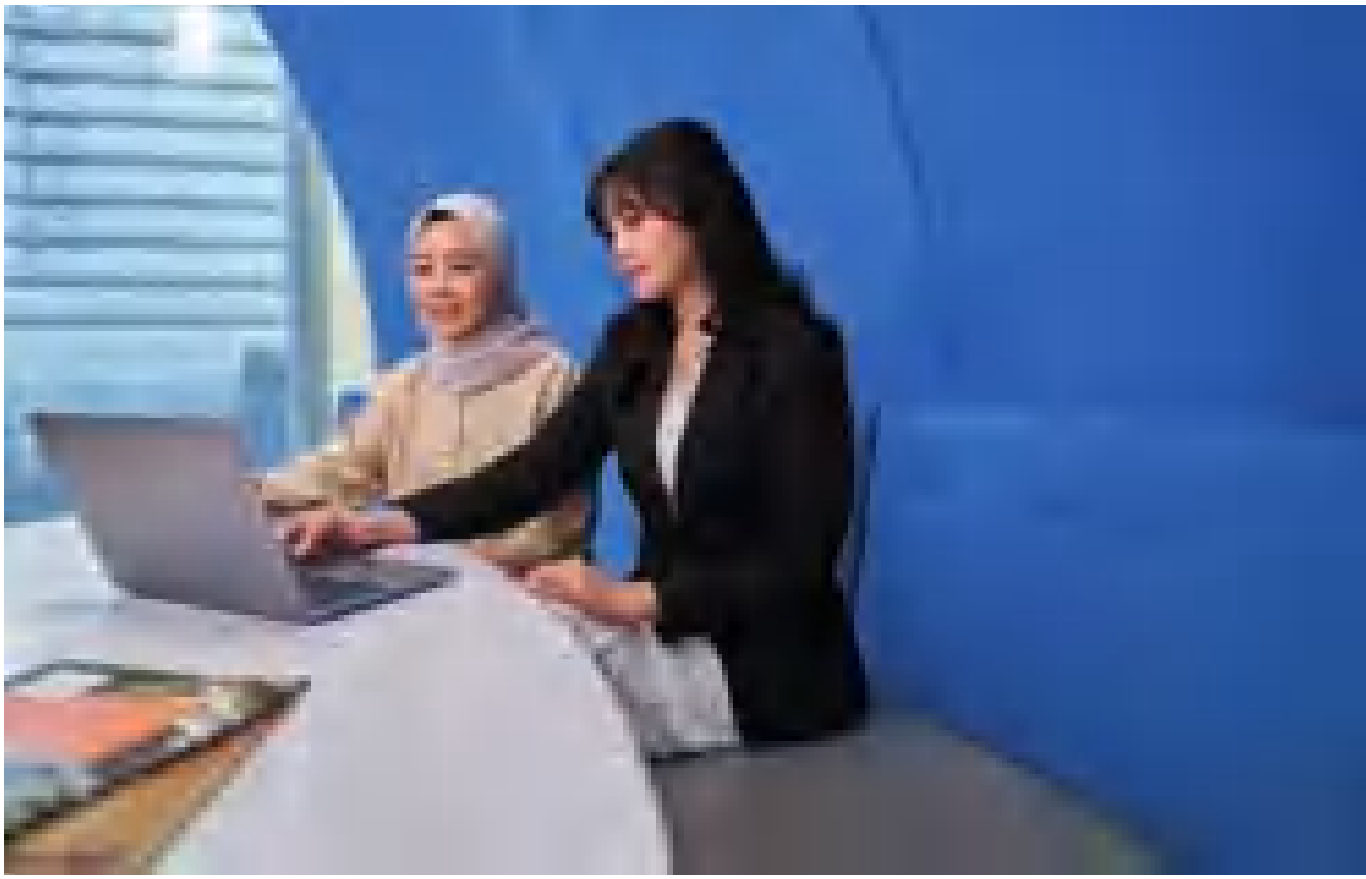

Penurunan jumlah nasabah dan pembiayaan Bank, sejalan dengan strategi Bank untuk fokus pada peningkatan kualitas. Pencairan diberikan lebih selektif kepada nasabah yang menunjukkan perilaku BDKS (Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, Solidaritas).

Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun segmen Perbankan Syariah mencapai Rp12,1, naik 0,8% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp12,0 triliun. Pendanaan yang tangguh dan didukung dengan modal yang kuat membuat likuiditas BTPN Syariah sangat memadai.

Kinerja Operasional Perbankan Syariah Tahun 2023

Uraian	Satuan	2023	2022	2021
Total Aset	(Rp Juta)	21.429.607	21.161.976	18.543.856
Dana Pihak Ketiga	(Rp Juta)	12.142.929	12.049.255	10.993.548
Pembiayaan	(Rp Juta)	11.387.861	11.527.463	10.443.469

Rencana Strategis 2024

Untuk tahun 2024, mempertimbangkan kondisi segmen masyarakat pra inklusi keuangan yang dilayani oleh Bank masih terdapat tantangan, Bank memilih untuk memastikan stabilisasi bisnis, menjalankan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan langkah-langkah strategis. Kendati demikian, BTPN Syariah tetap akan fokus pada segmen pra inklusi keuangan produktif serta konsisten meneruskan 4 (empat) pilar inisiatif besar pada tahun sebelumnya: memperkuat proses bisnis saat ini dengan perbaikan kualitas portofolio serta peningkatan layanan nasabah; mengeksplorasi peluang bisnis baru dan produk lanjutan; membangun *operational excellence*; serta memperkuat kapabilitas organisasi.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMEN USAHA

PROFITABILITAS PER SEGMEN USAHA

Kinerja profitabilitas per segmen usaha yang dibukukan Bank disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Retail Banking

(Rp Juta)

Indikator	2023	2022	2021
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	1.965.935	2.075.596	2.446.726
Pendapatan/(Beban)Operasional Bersih	(1.752.782)	(1.661.435)	(1.534.149)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	213.998	415.677	914.181
Laba/(Rugi) Bersih	174.473	335.096	719.872

Korporasi

(Rp Juta)

Indikator	2023	2022	2021
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	2.774.433	2.671.778	2.216.907
Pendapatan/(Beban)Operasional Bersih	(1.091.442)	(471.839)	(1.003.193)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.682.971	2.199.928	1.213.702
Laba/(Rugi) Bersih	1.372.131	1.773.463	955.731

UMKM

(Rp Juta)

Indikator	2023	2022	2021
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	538.814	647.051	741.354
Pendapatan/(Beban)Operasional Bersih	(504.029)	(931.940)	(1.018.370)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	36.527	(284.191)	(275.982)
Laba/(Rugi) Bersih	29.780	(229.099)	(217.322)

Penghimpunan Dana dan Treasury

(Rp Juta)

Indikator	2023	2022	2021
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	1.505.131	1.254.540	1.458.843
Pendapatan/(Beban) Operasional Bersih	(855.280)	(873.535)	(1.002.015)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	643.106	376.503	455.753
Laba/(Rugi) Bersih	524.326	303.516	358.884

Syariah (Individu)

(Rp Juta)

Indikator	2023	2022	2021
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	5.248.947	5.025.886	4.279.210
Pendapatan/(Beban) Operasional Bersih	(3.878.191)	(2.751.452)	(2.399.180)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.371.161	2.269.376	1.877.386
Laba/(Rugi) Bersih	1.071.723	1.768.665	1.464.918

Syariah (Konsolidasi)

(Rp Juta)

Indikator	2023	2022	2021
Penghasilan/(Beban) Bunga Bersih	5.259.750	5.029.350	4.279.210
Pendapatan/(Beban)Operasional Bersih	(3.880.680)	(2.748.898)	(2.399.180)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.379.895	2.282.394	1.877.473
Laba/(Rugi) Bersih	1.080.589	1.779.580	1.465.005

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

> Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, pada tahun 2023 Bank menambah pencadangan kredit.

Pendapatan Bunga Bersih

Rp12,0 triliun

Pada tahun 2023, pendapatan bunga bersih Bank mencapai Rp12,0 triliun, lebih tinggi 3,1% dari tahun 2022.

Penyaluran Kredit

Rp156,6 triliun

Penyaluran kredit tahun 2023 tumbuh 7,1% dibandingkan tahun 2022, sehingga menjadi Rp156,6 triliun.

Uraian kinerja keuangan PT BANK BTPN Tbk ("Bank BTPN", "BTPN", "Bank") disusun sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian yang telah mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan tersebut juga menjadi bagian dari Laporan Tahunan ini.

NERACA KEUANGAN

Aset

Pada tahun 2023, aset yang dibukukan Bank BTPN mencapai Rp201,4 triliun, lebih rendah 3,7% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp209,2 triliun. Penurunan aset tersebut terutama disebabkan oleh karena optimisasi dan diversifikasi pendanaan yang di jalankan oleh Bank ditengah meningkatnya suku bunga. Optimisasi ini dijalankan dengan tetap memperhitungkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan kredit.

Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan / piutang syariah mencapai Rp 156,6 triliun, tumbuh 7,1% dari tahun 2022 yang sebesar Rp 146.1 triliun. Jumlah penempatan pada Bank Indonesia turun sebesar Rp 12,9 triliun (59,1%), dimana ruang yang ada di penempatan pada Bank Indonesia digunakan untuk mendukung pertumbuhan kredit, serta menjaga rasio likuiditas dan pendanaan tetap sehat.



Perkembangan Aset

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Kas	1.428.683	1.747.461	1.884.858
Giro pada Bank Indonesia	9.276.598	10.215.350	5.602.993
Giro pada Bank-bank Lain	962.387	2.189.561	1.757.967
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank-bank Lain	8.961.654	21.885.214	20.655.248
Efek-efek	17.038.501	18.835.877	21.275.789
Pinjaman yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah	156.561.297	146.123.516	135.598.774
Aset Tetap – Net	2.047.812	2.118.505	2.243.790
Aset tak Berwujud – Net	1.089.384	1.076.738	1.036.681
Aset lain-lain	4.082.076	4.977.482	1.861.694
Total Aset	**201.448.392**	**209.169.704**	**191.917.794**

Aset Keuangan

Aset keuangan BTPN terdiri atas giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, tagihan akseptasi dan pinjaman yang disalurkan. Pada tahun buku 2023, total aset keuangan Bank mencapai Rp197,3 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp204,2 triliun, terjadi penurunan 3,4%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang menurun sebesar 59,1%.

Komponen terbesar dalam aset keuangan adalah pinjaman yang disalurkan. Pada tahun 2023, nilainya mencapai Rp156,6 triliun atau 80,6% dari total aset keuangan.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Penyaluran Kredit

Bank BTPN mengelompokkan nasabah di lini usaha kredit menjadi 2 (dua) segmen: pertama *growing business* yang mencakup korporasi dan komersial, pembiayaan syariah, UKM, Jenius dan *Joint finance*; dan kedua *transforming business* yang mencakup *retail lending* dan mikro.

Hingga tahun 2023, total kredit yang disalurkan Bank mencapai Rp156,6 triliun, lebih tinggi 7,1% dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar Rp146,1 triliun. Peningkatan kredit terutama didorong oleh peningkatan pada segmen korporasi dan komersial sebesar 7,6% dibandingkan posisi tahun 2022, diikuti oleh segmen UKM, Jenius, dan Joint Finance yang masing-masing naik 17,7%, 131,1%, dan 681,7% dibandingkan tahun sebelumnya. .

Dari sisi segmentasi, sebagian besar realisasi pendanaan diserap oleh segmen *growing business* yang mencapai Rp132,8 triliun atau 84,8% dari total kredit. Kredit kepada korporasi dan komersial merupakan komponen utama dalam segmen tersebut, yang pada tahun 2023 nilainya Rp104,9 triliun atau 79,0% dari total kredit di segmen *growing business*.

Penyaluran Kredit berdasarkan Segmen

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Growing Business			
Korporasi dan Komersial	104.904.359	97.450.293	85.936.309
Usaha Kecil dan Menengah	13.255.054	11.257.389	10.702.612
Joint Finance	1.138.955	145.699	201.529
Pembiayaan/Piutang Syariah	11.387.861	11.527.463	10.443.469
Jenius	2.049.171	886.694	325.337
Transforming Business			
Retail Lending	22.403.012	23.989.672	27.364.293
Mikro	1.306.173	743.076	489.268
Lain-Lain	116.712	123.300	135.957
Jumlah	**156.561.297**	**146.123.516**	**135.598.774**

Catatan: Terdapat penyesuaian klasifikasi segmen kredit pada tahun 2023 (*Growing Business*, Transforming Business dan Lain-Lain). Penyajian segmen kredit tahun 2022 dan 2021 telah disesuaikan mengikuti penyajian tahun 2023.

Dari sisi penggunaan, porsi terbesar penyaluran kredit terserap untuk modal kerja, yaitu senilai Rp92,8 triliun atau 59,3% terhadap total kredit. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi kredit modal kerja mengalami kenaikan 9,3%.

Penyaluran Kredit berdasarkan Penggunaan

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Modal Kerja	92.844.745	84.959.202	70.691.663
Investasi	37.934.030	35.926.108	36.879.740
Konsumsi	25.782.523	25.238.206	28.027.371
Jumlah	**156.561.297**	**146.123.516**	**135.598.774**

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, Bank senantiasa menjaga kualitas kredit. Pada tahun 2023, rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) kotor adalah 1,36%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang berada di level 1,43%. Sedangkan dibandingkan industri perbankan yang sebesar 2,19% per Desember 2023, kualitas kredit Bank lebih baik. Sementara untuk NPL bersih dari kredit Bank, ada di level 0,40%.

Penyaluran Kredit berdasarkan Kolektibilitas

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	2021
Lancar	147.614.238	138.614.738	125.749.548
Dalam Perhatian Khusus	6.850.490	5.433.369	7.565.947
Total Kredit Tidak Bermasalah	154.464.728	144.048.107	133.315.495
Kurang Lancar	477.678	567.953	747.898
Diragukan	118.169	116.370	145.208
Macet	1.500.722	1.391.086	1.390.173
NPL	2.096.569	2.075.409	2.283.279
Total Kredit	156.561.297	146.123.516	135.598.774
NPL-Kotor	1,4%	1,4%	1,7%
NPL-Bersih	0,4%	0,4%	0,4%
LLP/NPL	220,3%	172,5%	173,2%

Liabilitas

Total liabilitas BTPN pada tahun 2023 tercatat mencapai Rp160,2 triliun, mengalami penurunan 5,6% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp169,8 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diterima sebesar 30,5% serta penurunan pada simpanan nasabah sebesar 5,8%. Pada tahun 2023, Bank melakukan pembayaran pinjaman luar negeri dari SMBC dalam rangka optimalisasi biaya dana dan pendapatan bunga bersih dengan tetap menjaga likuiditas dan pendanaan yang kuat.

Perkembangan Liabilitas

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Simpanan Nasabah	98.277.756	105.023.287	100.474.227
Dana Syirkah Temporer	9.920.820	9.843.261	8.905.903
Simpanan dari Bank-bank Lain	10.814.638	166.131	3.877.851
Efek-efek yang diterbitkan	200.569	200.134	996.089
Pinjaman Diterima	31.204.497	44.911.606	34.764.736
Liabilitas lain-lain	9.747.008	9.612.261	6.820.061
Total Liabilitas	**160.165.288**	**169.756.680**	**155.838.867**

Simpanan Nasabah

Total simpanan nasabah (termasuk dana *syirkah* temporer) menurun 5,8%, dari Rp114,9 triliun di tahun 2022 menjadi Rp108,2 triliun pada tahun 2023. Penurunan disebabkan oleh penurunan saldo Deposito sebesar 14,3%. Sementara saldo CASA (*Current Account and Saving Account*) mengalami peningkatan sebesar 10,0%, terutama dari nasabah korporasi dan Jenius, sehingga pada akhir Desember 2023 rasio CASA mencapai 40,8%, meningkat dari 35,0% pada akhir Desember 2022.

Sebagian besar dana nasabah Bank dalam bentuk deposito, yang pada tahun 2023 nilainya mencapai Rp64,0 triliun atau 59,2% terhadap total simpanan. Sedangkan simpanan dalam bentuk giro 24,6% dan tabungan 16,2%.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Rincian Simpanan Nasabah (Termasuk Dana Syirkah Temporer)

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Giro	26.628.683	23.765.802	25.922.785
Tabungan	17.558.817	16.396.199	11.954.604
Deposito	64.011.076	74.704.547	71.502.741
Jumlah	**108.198.576**	**114.866.548**	**109.380.130**

Berdasarkan mata uang, jumlah simpanan dengan denominasi rupiah mencapai Rp85,4 triliun atau 78,9% dari total simpanan. Sementara pada tahun sebelumnya, simpanan dalam rupiah tercatat Rp92,4 triliun atau 80,4% dari total simpanan.

Rincian Simpanan Nasabah Berdasarkan Mata Uang (Termasuk Dana Syirkah Temporer)

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Rupiah	85.397.073	92.351.151	98.675.647
Valuta Asing	22.801.503	22.515.397	10.704.483
Jumlah	**108.198.576**	**114.866.548**	**109.380.130**

Pinjaman Diterima

Hingga akhir Desember 2023, pinjaman yang diterima Bank mencapai Rp31,2 triliun, lebih rendah 30,5% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp44,9 triliun. Penurunan terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman luar negeri dari SMBC dalam rangka optimalisasi biaya dana dan pendapatan bunga bersih dengan tetap menjaga likuiditas dan pendanaan yang kuat.

Ekuitas

Komponen ekuitas terdiri atas modal saham, tambahan modal disetor, cadangan revaluasi aset tetap, dan lain-lain. Hingga berakhirnya tahun buku 2023, total ekuitas Bank mencapai Rp41,3 triliun, naik 4,7% dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar Rp39,4 triliun.

Komponen ekuitas yang mengalami kenaikan, antara lain saldo laba dan kepentingan non-pengendali.

Perkembangan Ekuitas

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Modal Saham	162.982	162.982	162.982
Tambahan Modal Disetor	11.162.238	11.160.647	11.158.962
Cadangan Revaluasi Aset Tetap	954.224	874.452	874.452
Cadangan Pembayaran Berbasis Saham		-	-
Cadangan Nilai Wajar – Bersih	2.906	(7.704)	117.867
Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali	(24.267)	(24.267)	(24.267)
Saldo Laba (Dicadangkan & Tidak Dicadangkan)	26.402.237	24.734.912	21.669.613
Saham Treasuri	(254.695)	(255.147)	(255.147)
Kepentingan Non-Pengendali	2.616.678	2.506.348	2.113.664
Komponen Ekuitas Lainnya	260.801	260.801	260.801
Total Ekuitas	**41.283.104**	**39.413.024**	**36.078.927**

KINERJA LABA RUGI

Pada tahun 2023, Bank memutuskan untuk menambah pencadangan kredit yang juga sebagai bentuk antisipasi berakhirnya POJK relaksasi kredit restrukturisasi pada 31 Maret 2024. Dengan adanya penambahan pencadangan ini, biaya kredit meningkat sebesar Rp1,2 triliun, yang kemudian mempengaruhi Laba Bersih setelah Pajak Perseroan. Laba bersih setelah pajak Bank BTPN (konsolidasi) yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat di level Rp2,4 triliun pada akhir tahun 2023, lebih rendah 23,8% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp3,1 triliun.

Perkembangan Laba-Rugi

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Pendapatan bunga	18.815.673	15.899.646	14.748.604
Beban Bunga	(6.771.610)	(4.221.331)	(3.605.564)
Pendapatan Bunga Bersih	12.044.063	11.678.315	11.143.040
Pendapatan Operasional Lainnya	2.073.443	2.012.615	1.959.784
Beban Operasional	(10.656.471)	(9.033.254)	(9.094.646)
Laba Tahun Berjalan – Sebelum Pajak	3.457.682	4.657.319	4.007.172
Laba bersih tahun berjalan	2.682.484	3.629.564	3.104.215
Laba Bersih (*net profit after tax*/NPAT) yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**2.358.334**	**3.095.701**	**2.664.714**

Pendapatan Usaha

Total pendapatan usaha bersih Bank pada tahun 2023 mencapai Rp14,1 triliun, naik 3,1% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp13,7 triliun. Pendapatan bunga yang merupakan komponen dari pendapatan usaha mengalami kenaikan sesuai dengan pertumbuhan kredit terutama di segmen korporasi dan komersial, segmen SME dan pembiayaan syariah. Di sisi lain, beban bunga pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Kenaikan beban bunga tersebut disebabkan meningkatnya biaya dana sejalan dengan tren kenaikan suku bunga dan meningkatnya simpanan nasabah terutama deposito. Secara keseluruhan, pendapatan bunga bersih mencapai Rp12,0 triliun, mengalami kenaikan sebesar 3,1% yoy dibandingkan posisi tahun sebelumnya.

Beban Usaha

Total beban usaha yang direalisasikan oleh Bank pada tahun 2023 mencapai Rp10,7 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp9,0 triliun, terjadi kenaikan 18,0%. Bank membukukan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih tinggi, yaitu dari Rp1,8 triliun menjadi Rp3,0 triliun. Sementara biaya operasional lainnya (selain biaya CKPN) mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yakni sebesar 5,7% dan menjadi Rp7,6 triliun pada tahun 2023.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

ARUS KAS

BTPN membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun 2023 mencapai Rp23,5 triliun, lebih rendah 40,4% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp39,4 triliun.

Kinerja Arus Kas

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.397.197)	(4.416.068)	13.150.455
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi	394.010	3.151.992	(7.001.869)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(13.887.114)	9.056.776	223.345
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas	(14.462)	3.376	(17.885)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(15.890.301)	7.792.700	6.371.931
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	39.377.753	31.581.677	25.227.631
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	23.472.990	39.377.753	31.581.677

Arus Kas untuk Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2023 tercatat minus Rp2,4 triliun, lebih besar 45,7% dibandingkan tahun 2022 yang minus Rp4,4 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2023 mencapai Rp0,4 triliun, lebih rendah 87,5% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp3,2 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2023 tercatat minus Rp13,9 triliun, menurun 253,3% % dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp9,1 triliun.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Hingga akhir tahun buku 2023, tingkat likuiditas dan solvabilitas Bank sangat baik. Hal ini tercermin pada kemampuan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo secara tepat waktu, baik terhadap pembayaran pokok utang ataupun beban bunga.

Kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang juga sangat baik selaras dengan penilaian lembaga pemeringkat eksternal. PT Fitch Rating Indonesia memberikan peringkat AAA (idn), *outlook* stabil dan F1+ (idn). Sementara dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) idAAA (Triple A, outlook stabil).

Rasio Likuiditas

Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, antara lain ditunjukkan melalui rasio likuiditas yang tercermin pada *Loan to Deposit Rasio* (LDR), *Loan to Funding Ratio* (LFR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Pada tahun 2023, tingkat LDR Bank adalah 142,7%. Sementara pada tahun 2022 posisinya sebesar 126,7%. Sumber pendanaan Bank bukan hanya dari dana pihak ketiga, tetapi juga pinjaman yang sebagian besar dari perusahaan induk serta pinjaman dari bank lain dan surat berharga yang diterbitkan. Rasio LCR dan NSFR per 31 Desember 2023 adalah 199,7% dan 113,8%, berada diatas batas ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, yaitu sebesar 100%. Dengan demikian, secara keseluruhan tingkat likuiditas Bank sangat sehat.

Rasio Solvabilitas

Parameter lain terkait dengan kemampuan membayar utang adalah rasio permodalan yang diukur melalui rasio solvabilitas. Bank senantiasa menjaga permodalan yang sehat, antara lain dengan memenuhi rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan yang ditentukan oleh regulator. Rasio tersebut berguna untuk menutupi risiko-risiko kredit, pasar dan operasional.

Pada tahun 2023, rasio KPMM mencapai 29,9%, lebih tinggi 2,6% dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar 27,3%. Pencapaian tersebut jauh di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mencerminkan tersedianya ruang untuk pertumbuhan ke depan.

Kolektibilitas Kredit

Bank senantiasa menjaga kualitas aset produktif agar kinerja usaha yang berkualitas dapat berkesinambungan. Hal itu, antara lain ditunjukkan melalui tingkat kolektibilitas kredit, seperti diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Rincian Kolektibilitas Kredit

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	2021
Belum jatuh tempo	147.614.238	138.614.738	125.749.548
Tunggakan 1-90 hari	6.850.490	5.433.369	7.565.947
Tunggakan >90 hari	2.096.569	2.075.409	2.283.279
Jumlah kredit yang menunggak	8.947.059	7.508.778	9.849.226
Jumlah kredit yang diberikan – kotor	156.561.297	146.123.516	135.598.774
% Jumlah tunggakan terhadap jumlah kredit yang diberikan – kotor	5,71%	5,14%	7,26%

SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, seluruh bank umum wajib memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Publikasi ini, antara lain untuk memberikan kejelasan dan memudahkan nasabah dalam menimbang manfaat, biaya, dan risiko kredit yang ditawarkan.

Selain itu, SBDK juga merupakan upaya peningkatan tata kelola perusahaan yang baik serta mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan. Bank mengelompokkan SBDK berdasarkan segmentasi kredit menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu korporasi, ritel, mikro, dan konsumsi.

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah Berdasarkan Segmen Kredit

	(Periode 31 Desember 2023)				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	7,64%	10,22%	18,31%	0,00%	12,62%

STRUKTUR MODAL

Kebijakan Struktur Modal

Kebijakan menjaga kecukupan modal merupakan upaya agar Bank dapat mendukung pertumbuhan usaha sekaligus melindungi Bank dari gejolak pasar. Kebijakan ini diterapkan melalui keseimbangan antara efisiensi modal serta tingkat pengembalian investasi pemegang saham, dengan menjaga tersedianya modal tambahan yang mencukupi guna menutupi potensi risiko yang dihadapi.

Sejalan dengan implementasi modal Basel II, Bank telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang proses yang dilakukan untuk menetapkan kecukupan modal Bank (ICAAP), yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank juga terus memastikan tersedianya modal yang cukup sejalan dengan profil risikonya.

Bank menggunakan Pendekatan Standar dalam mengelola modal atas risiko kredit. Perhitungan ATMR secara umum dilakukan dengan mengacu pada bobot risiko sesuai dengan ketentuan OJK dan hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang telah ditetapkan oleh pihak regulator.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Bank menghitung kecukupan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Standar (SA). Berdasarkan metode tersebut, Bank mengalokasikan modal minimum untuk risiko operasional berdasarkan perkalian antara Komponen Indikator Bisnis (KIB) dengan Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI).

Dalam penghitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan metode standar sesuai dengan ketentuan OJK mengenai perhitungan ATMR Risiko Pasar.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang perubahan dari POJK No. 11/ POJK.03/2016 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/2022 tentang perubahan kedua dari POJK No. 11/ POJK.03/2016, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Penyediaan modal minimum Bank berdasarkan profil risiko yang berlaku saat ini adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Selain kebutuhan untuk memenuhi modal minimum berdasarkan profil risiko, Bank juga berkewajiban untuk menyediakan tambahan modal penyangga (*buffer*) dengan rincian: (1) *Capital Conservation Buffer*, (2) *Countercyclical Buffer*, dan (3) *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB).

Rincian Struktur Modal

Hingga akhir tahun buku 2023, total modal Bank mencapai Rp41,2 triliun, lebih tinggi 4,0% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp39,6 triliun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya saldo laba ditahan sehingga saldo modal inti meningkat.

Rincian struktur modal Bank diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Perkembangan Struktur Modal

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022	2021
Modal *Tier* 1	36.613.893	34.966.039	32.145.281
Modal *Tier* 2	4.543.487	4.626.967	4.202.230
Total Modal	41.157.380	39.593.006	36.347.511
Aset Tertimbang Menurut Risiko:			
• Risiko Kredit	125.294.554	121.057.375	115.006.000
• Risiko Kredit dan Operasional	135.795.396	144.374.143	138.149.885
• Risiko Kredit, Operasional, dan Pasar	137.651.897	145.091.415	138.893.556
Rasio Kecukupan Modal:			
• Risiko Kredit	32,8%	32,7%	31,6%
• Risiko Kredit dan Operasional	30,3%	27,4%	26,3%
• Risiko Kredit, Operasional, dan Pasar	29,9%	27,3%	26,2%

IKATAN MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL

Bank BTPN tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Realisasi Investasi Barang Modal Tahun 2023

(Rp Juta)

Nama Barang Modal	Tujuan Investasi	Nilai Investasi
Aset Tetap	Keperluan kantor	218.932
Aset Tak Berwujud	Pengembangan piranti lunak	436.590
Total		655.522

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan adalah sebagai berikut:

- Dengan lewatnya jangka waktu penyampaian keberatan dari Kreditur atas perubahan modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perubahan anggaran dasar sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 07 tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat nomor AHU 0082757.AH.01.02 tahun 2023 tanggal 7 Februari 2024.

- Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau Right Issue yang diputuskan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 7 Desember 2023, Bank telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-29/D.04/2024 tanggal 19 Februari 2024.

  Bank telah mengungkapkan rencana penggunaan dana Rights Issue tersebut adalah untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha melalui pengambilalihan perusahaan-perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha pembiayaan yaitu PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance, dari SMBC dan PT Summit Auto Group (yang saat ini merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Corporation).

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI

Setelah keluar dari pandemi COVID-19 dengan permasalahan dan kebijakan sosio-ekonomi yang dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya, perekonomian global masih terus menghadapi permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh upaya-upaya sebelumnya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan dampak dari konflik sosio-ekonomi.

Mirip dengan berbagai negara lainnya, Indonesia juga menghadapi situasi yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, dan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol hal tersebut. Hal ini mencakup kebutuhan untuk mengurangi tekanan inflasi dan kebijakan moneter yang ketat, dimana hal ini membebani perekonomian.

Di tahun 2023 Bank BTPN harus melakukan penyesuaian untuk mengantisipasi kondisi terkini, sehingga realisasi tumbuh dibawah target.

Realisasi pertumbuhan kredit Bank pada tahun 2023 yaitu sebesar 7,1% tumbuh dibawah target yang ditetapkan, yaitu mencapai 8-10%. Simpanan nasabah mengalami penurunan sebesar 5,8%, sementara target pertumbuhan berkisar 7-9%, hal ini terutama dikarenakan penurunan saldo deposito sebesar 14,3% sementara saldo CASA mengalami peningkatan sebesar 10,0% terkait dengan upaya Bank dalam rangka mengoptimalkan biaya dana.

Tingkat pengembalian aset (ROA) serta tingkat pengembalian ekuitas (ROE) lebih rendah dari target yang ditetapkan sehubungan dengan lebih rendahnya pencapaian Laba dikarenakan penambahan biaya pencadangan kredit. Namun, rasio kecukupan modal tercatat lebih tinggi dari target. NPL (gross) Bank tercatat sebesar 1,4% atau mencapai target yang ditetapkan, sekaligus menunjukkan kemampuan Bank menjaga kualitas kredit yang sangat baik.

Dari segi pendapatan Bank berhasil membukukan realisasi yang melebihi target, sementara pencapaian laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk lebih rendah dari target.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Perbandingan antara Target dan Realisasi

Uraian	Target 2023	Realisasi 2023
Struktur Modal (Rasio Kecukupan Modal)	>22%	29,9%
Pertumbuhan Kredit	8-10%	7,1%
Pertumbuhan Simpanan	7-9%	(5,8%)
ROA	>2%	1,7%
ROE	>7%	6,6%
NPL (*gross*)	<2%	1,4%

Proyeksi Tahun 2024

Untuk tahun depan, Bank telah menyiapkan proyeksi atau target usaha, yang dipengaruhi oleh pertimbangan adanya tingkat inflasi yang masih tinggi, potensi suku bunga acuan yang masih tinggi, serta adanya ketidakpastian yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, di antaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi China, gangguan pasokan komoditas global, serta eskalasi tensi geopolitik yang dapat mempengaruhi perekonomian global di tahun 2024.

Bank mentargetkan pertumbuhan kredit sesuai dengan proyeksi pertumbuhan industri oleh Bank Indonesia di kisaran 10-12% dengan terus menjaga kualitas kredit, dan didukung dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang sehat, untuk menghasilkan profitabilitas yang sustainable, dengan menjaga NIM yang sehat dan dengan terus menjaga tingkat permodalan CAR yang kuat di atas 22%.

Indikator	Target
NIM	5-6%
Struktur Modal (Rasio Kecukupan Modal)	>22%
ROA	>1,5%
ROE	>6%
NPL (gross)	<2%

PROSPEK USAHA

Menurut Asian Development Bank, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,0% pada tahun 2023 dan tetap berada di 5,0% pada tahun 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan karena Indonesia terlihat memiliki kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta menjaga sektor keuangan yang stabil, serta posisi eksternal yang kuat.

Pada tahun 2024, kredit industri diperkirakan akan tumbuh sebesar 7% - 8%. Bank mengantisipasi akan adanya peningkatan kompetisi dalam DPK industri yang berimbas pada penyesuaian suku bunga dana dan kredit secara bertahap. Meskipun secara global, suku bunga telah meningkat, Bank Indonesia telah mempertahankan suku bunga kebijakan pada angka 5,75% untuk sebagian besar tahun 2023, walaupun mereka juga telah memutuskan untuk menaikan suku bunga acuan ke 6% di bulan Oktober 2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dan memberi sinyal untuk melakukan pengetatan lebih lanjut jika diperlukan. Meskipun demikian, inflasi telah ditekan dengan tetap terjaganya stabilitas perekonomian. Dalam kondisi ini, risiko-risiko negatif terhadap Indonesia sebagian besar berasal dari faktor eksternal, dengan dampak dari peristiwa-peristiwa seperti kenaikan suku bunga Amerika dan lemahnya permintaan dari perekonomian China yang mungkin membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal, meskipun peluang dan risiko yang ditimbulkan oleh pemilihan presiden mendatang pada tahun 2024 juga ada. Walaupun demikian, strategi diversifikasi Indonesia yang fokus pada kegiatan hilir komoditas mentah seperti nikel, dan permintaan domestik Indonesia yang kuat terus menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di Indonesia.

Dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan kredit industri perbankan, BTPN akan fokus untuk menumbuhkan kredit dengan menetapkan *risk appetite* sejalan dengan tujuan yang diperlukan dan melalui *value chain*, menumbuhkan basis pelanggan ritel dengan mengoptimalkan saluran distribusi, kolaborasi lintas Lini Bisnis dan kemitraan strategis dengan ekosistem pasar. Perseroan juga terus melanjutkan strategi pertumbuhan CASA serta peningkatan *fee based income* antara lain melalui *foreign exchange* solusi digital dan *wealth management* melalui Jenius untuk nasabah ritel, *trade,* dan *cash management* untuk nasabah korporasi serta transaksi *fee based* lainnya.

DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Penetapan pembagian dividen Bank ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan tersebut mempertimbangkan kecukupan saldo laba ditahan, peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti persyaratan modal jangka panjang dan jangka pendek, serta ekspektasi pertumbuhan Bank dan kondisi pasar.

Secara prosedur, usulan pembagian dividen diajukan oleh Direksi kepada Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, usulan tersebut dibawa ke dalam RUPS Tahunan untuk disetujui oleh Pemegang Saham.

Realisasi Dividen

Selaras dengan fundamental Perseroan yang solid sepanjang tahun 2022 paska merger, RUPST Bank BTPN menyetujui untuk melakukan pembagian dividen untuk pertama kalinya sejak RUPST tahun 2018 seiring komitmen Perseroan untuk senantiasa memberikan nilai tambah berkesinambungan kepada segenap pemegang saham sekaligus apresiasi kepada pemegang saham yang selama ini mendukung serta menjaga hubungan baik dengan Bank BTPN. Pembayaran dividen secara lengkap dipenuhi pada bulan Mei 2023.

Berikut informasi rincian realisasi pembayaran dividen:

Tahun Buku	Tahun Dividen	Tanggal Pembayaran	Dividen yang Dibagikan (Rp juta)	Dividen per Lembar Saham (Rp)	Rasio Dividen terhadap Laba Bersih (%)
2022	2023	11 Mei 2023	619.140	76,85	20

KOMPENSASI JANGKA PANJANG: PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN MANAJEMEN

Bank menjalankan program kepemilikan saham bagi karyawan pada tahun 2016. Program ini merupakan salah satu bentuk kompensasi jangka panjang. Seluruh rangkaian program telah direalisasikan secara bertahap dan berakhir pada tahun 2021. Bank memberikan bonus variabel kepada Direksi dalam bentuk saham sebagaimana diatur dalam POJK No. 45/POJK.03/2015.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Rencana dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Bank tidak ada yang mengalami perubahan dibandingkan saat penerbitan. Rincian penerbitan hasil penawaran umum Bank serta realisasi pemanfaatan dananya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Penerbitan Obligasi Tahun Buku

Nama Obligasi	Nominal (Rp)	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Seri A	799.000.000.000	27 November 2019	26 November 2022
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Seri B	201.000.000.000	27 November 2019	26 November 2024

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

(Rp Juta)

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana	
1	Obligasi Berkelanjutan IV 2019 Bank BTPN Tahap I Tahun 2019	27 November 2019	1.000.000 Seri A: 799.000 Seri B: 201.000	10.219,6	989.780,4	989.780,4	989.780,4	0

Rincian Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realisasi Pemberian Kredit	Kegiatan Usaha	Nilai Nominal
A	Transportasi	Rp289.780.375.000
B	Properti	Rp700.000.000.000

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023, tidak terdapat Transaksi Material antara BTPN dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Pencatatan transaksi pihak berelasi BTPN telah sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Penjelasan tentang rincian transaksi tersebut hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Realisasi Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	Pemegang saham pengendali	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif; liabilitas akseptasi
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; liabilitas akseptasi; pinjaman yang diterima; pinjaman subordinasi; transaksi derivatif
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Hong Kong	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank International plc, London	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Dusseldorf	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi	Simpanan dari bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Seoul	Perusahaan afiliasi	Efek-efek
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New Delhi	Perusahaan afiliasi	Giro pada bank lain
PT SMFL Leasing Indonesia	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif
PT Oto Multiartha	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif
PT Summit Oto Finance	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif
PT INA Sekuritas Indonesia	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah
PT SBCS Indonesia	Perusahaan afiliasi	Simpanan nasabah
Personil manajemen kunci	Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif	Pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah, pembayaran kompensasi dan remunerasi, imbalan pascakerja

Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan terutama untuk kepentingan dan keberlanjutan bisnis Bank BTPN yang berkaitan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan usaha, menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Nilai Transaksi Pihak Berelasi

Rincian saldo transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan pada Catatan 36 Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2023 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Penelaahan dan Persetujuan Transaksi

Bank BTPN telah memiliki kebijakan di bidang penelaahan dan persetujuan transaksi dengan pihak berelasi/afiliasi, yang antara lain merujuk pada Peraturan OJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum serta perubahannya, yakni POJK Nomor 38/OJK.03/2019.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan: (1) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana. (2) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank. (3) Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari pihak terkait.

Uraian di bawah ini juga menjadi bagian dalam proses penelaahan dan pemberian persetujuan terhadap transaksi berelasi/afiliasi.

Kewajaran, Mekanisme *Review* dan Pemenuhan Peraturan Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Bank BTPN telah memiliki kebijakan untuk memberikan persetujuan sebagai mekanisme *review* terhadap transaksi dengan pihak yang berelasi. Transaksi tersebut dilakukan secara adil dan wajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Transaksi dengan pihak berelasi juga memiliki persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga.

Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Pernyataan Direksi bahwa Transaksi telah Memenuhi Prosedur Memadai dan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum

Direksi Perseroan dalam hal ini telah memberikan pernyataan bahwa Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha dan dijalankan setelah berlakunya POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tersebut dilakukan dengan memenuhi prosedur yang berlaku termasuk Pengelolaan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Transaksi Afiliasi.

TINJAUAN
KINERJA KEUANGAN

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk Memastikan Transaksi Dilakukan sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku umum, yang antara lain Dilakukan dengan Memenuhi Prinsip Transaksi yang wajar (*Arms-Length Principle*)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Komite Audit selalu melakukan *review* terhadap kegiatan usaha Bank, terutama di bidang keuangan termasuk transaksi dengan pihak afiliasi/berelasi. Dewan Komisaris mendapatkan laporan sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris menilai bahwa transaksi yang dilakukan oleh Bank sepanjang tahun 2022 telah memenuhi unsur kepatuhan terhadap regulasi, antara lain Surat Edaran OJK Nomor 42/POJK.04/2020, sehingga memenuhi prinsip kewajaran.

Rujukan dalam Laporan Keuangan

Informasi terkait dengan transaksi afiliasi ini diuraikan lebih rinci pada laporan keuangan yang telah diaudit, pada Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian yang juga terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

INFORMASI MATERIAL TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada tahun 2023, Bank BTPN tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan tidak disajikan oleh Bank BPTN.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Pada tahun 2023, terdapat beberapa peraturan baru yang telah terbit dan dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha Bank BTPN dan entitas anak, di antaranya:

No.	Peraturan	Pokok Peraturan	Dampak terhadap Laporan Keuangan
1.	SEOJK No. 29/ SEOJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum	Ketentuan pelaksanaan dari penerbitan POJK Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Umum yang khusus mengatur mengenai ketahanan dan keamanan siber antara lain: • Kewajiban dan proses yang dilakukan untuk menjaga ketahanan siber • Penilaian tingkat maturitas keamanan siber • Pengujian keamanan siber • Pembentukan unit atau fungsi khusus yang bertugas menangani ketahanan dan keamanan siber Bank • Pelaporan notifikasi awal dan laporan insiden Teknologi Informasi berupa insiden siber.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya
2.	POJK No. 27 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 11/ POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum	Penyesuaian dengan standar Basel 3 Reforms sehingga terdapat perubahan tata cara perhitungan ATMR dan ketentuan payung atas pengembangan pasar keuangan.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya
3.	POJK No. 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan	Penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya

No.	Peraturan	Pokok Peraturan	Dampak terhadap Laporan Keuangan
4.	POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Penguatan penerapan Tata Kelola untuk: • Menjadi pedoman bagi setiap pihak pada Bank untuk peningkatan kualitas pengelolaan Bank yang sehat • Mendukung penegakan *market discipline*, penguatan, daya saing dan resiliensi Bank serta penegakan integritas sistem keuangan	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya
5.	POJK No. 21 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum	• Penguatan prinsip pelindungan konsumen dan prinsip pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan Layanan Digital • Pemanfaatan Teknologi Informasi • Mekanisme dan dokumen perizinan Layanan Digital serta Layanan Digital terkait Sistem Pembayaran • Harmonisasi pengaturan mengenai identifikasi dan verifikasi dengan POJK Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan • Redefinisi Layanan Perbankan Digital dan Layanan Perbankan Elektronik menjadi Layanan Perbankan Digital • Rekategorisasi Layanan Digital yaitu dibagi menjadi 2 antara lain Layanan Digital yang diselenggarakan oleh Bank dan Layanan Digital yang diselenggarakan oleh Bank dengan mitra • Penyesuaian persyaratan penyelenggaraan Layanan Digital yang berfokus pada kesiapan TI Bank	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya
6.	POJK No. 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK ini memuat penyesuaian pengaturan antara lain: • Penambahan prinsip Pelindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu penegakan kepatuhan dan persaingan yang sehat; • Penyesuaian cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menjadi kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan; • Penambahan dan penegasan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan serta hak, kewajiban dan larangan bagi PUJK; • Penegasan pelindungan data Konsumen dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber; serta • Tata cara pengenaan dan batas pemenuhan sanksi.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang material untuk tahun buku 31 Desember 2023.

KETAATAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Kebijakan Pengelolaan dan Pembayaran Pajak

Kebijakan pengelolaan dan kepatuhan perpajakan, termasuk pembayaran pajak, telah tertuang dalam prosedur standar operasi perpajakan Bank. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sebagai wajib pajak merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, Bank selalu memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Pada tahun 2023, total Pajak Penghasilan Badan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan penambahan koreksi fiskal positif yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan. Sedangkan Pajak Penghasilan Karyawan meningkat, karena meningkatnya biaya pegawai yang menjadi obyek PPh Karyawan.

Realisasi Pembayaran Pajak

(Rp Juta)

Uraian	2023	2022	2021
Pajak Penghasilan Badan	515.697	503.801	567.482
Pajak Penghasilan Karyawan	345.134	309.729	293.535

ASPEK PEMASARAN

Aktivitas pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan operasional Bank, demi mencapai tujuan usaha. Apalagi, tingkat persaingan di industri keuangan, khususnya perbankan semakin ketat dari tahun ke tahun, yang antara lain didorong oleh ekspektasi nasabah yang terus berkembang.

Kondisi tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Bank BTPN agar senantiasa dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi. Karena itu, Bank secara terus-menerus meningkatkan mutu pelayanan dan strategi pemasaran yang efektif menghadapi pertumbuhan kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi.

Bagi Bank BTPN, mempertahankan sekaligus meningkatkan pangsa pasar menjadi sangat penting demi menjaga pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.

STRATEGI PEMASARAN

Pada tahun 2023, Bank BTPN telah menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja produk dan layanan. Hal ini dilakukan bukan sekadar untuk meningkatkan kinerja usaha Perseroan, tetapi juga memberikan kepuasan maksimum terhadap nasabah.

Terkait layanan Korporasi, Bank terus memperluas jaringan layanan bagi Nasabah Korporasi di berbagai kota besar di Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kantor BTPN yang luas, baik di daerah industri dan daerah strategis lainnya untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan di lokasi tersebut.

Dari segi sistem, Bank memiliki beberapa *electronic Banking* (*e-Banking*) *platform* antara lain SMAR&TS, Jenius dan Akses Bisnis. Bank BTPN bertujuan untuk terus menciptakan platform inovatif untuk meningkatkan layanan kami, menjajaki peluang bisnis baru, dan memulai perhitungan emisi *Green House Gases* (Efek Gas Rumah Kaca) di seluruh rantai pasok nasabah korporasi kami, yang sejalan dengan protokol *Green House Gases*.

Guna melayani nasabah SME, BTPN Mitra Bisnis akan fokus pada pengembangan layanan yang ada melalui optimalisasi jaringan kantor beserta infrastrukturnya. Selain itu, BTPN Mitra Bisnis telah mengembangkan electronic channel melalui Digital SME yang saat ini telah memiliki kemampuan digital (*digital capabilities*) pembayaran, transaksi dan pengelolaan kas sederhana.

BTPN Mitra Bisnis juga melakukan kerjasama dengan beberapa mitra strategis untuk meningkatkan akuisisi nasabah. Kerjasama yang dilakukan juga mencakup edukasi pelatihan pengembangan bisnis pada nasabah dan atau calon nasabah bank.

Bank juga terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lini bisnis, seperti segmen Korporasi, Retail Banking dan Business Banking untuk meningkatkan aktivitas *cross sell* bagi BTPN.

Di segmen Retail Lending, untuk melayani para pensiunan yang berada di lokasi terpencil, Bank BTPN terus mengembangkan jaringan payment point bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, dan juga dengan para pihak ketiga, seperti penyedia perangkat pembayaran melalui media elektronik dan pihak lain yang telah memiliki jaringan layanan/*outlet* yang luas.

Selain itu, pengembangan disektor mikro tetap berfokus pada pembiayaan berupa pinjaman akses modal dan layanan perbankan kepada para pelaku usaha ekonomi produktif (UMKM) beserta komunitasnya. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berupa pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha nasabah untuk meningkatkan kapasitas usaha nasabah tersebut. Nasabah mikro diberikan pilihan produk yang disesuaikan juga dengan siklus usaha, tujuan pinjaman dan saat ini, pengembangan potensi produk mikro selain penawaran langsung ke pelaku usaha UMKM tetapi juga dikembangkan bisnis model kerjasama dengan para mitra BTPN (*community partnership*). Nasabah mikro diberikan program peningkatan kapasitas mengelola usaha melalui program BTPN Daya.id secara *online* sehingga nasabah tersebut akan tumbuh skala usahanya.

Bank BTPN juga terus meningkatkan kerjasama baru dengan pihak ketiga dalam memberikan pembiayaan kepada debitur perorangan maupun badan usaha baik dalam skema *joint financing* maupun *chanelling*.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi pada industri keuangan termasuk perbankan, Bank juga telah menerapkan strategi pemasaran berbasis *online* kepada nasabah, seperti dalam bentuk *web meeting* untuk menangkap setiap kebutuhan finansial yang nasabah perlukan secara cepat dan tepat. Selain itu, Bank juga memberikan layanan edukasi kepada nasabah secara berkala mengenai beberapa hal di luar produk perbankan, seperti: seminar, pelatihan, program Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR).

Terkait Jenius, untuk meningkatkan dan menghadirkan layanan yang semakin relevan kepada nasabah, Bank terus mengembangkan fitur-fitur revolusioner pada aplikasi Jenius. Proses pengembangan fitur ini, baik meningkatkan fitur yang ada dan menghadirkan fitur baru, Jenius lakukan melalui proses kokreasi yaitu dengan mendengarkan ide dan masukan pengguna dan calon pengguna.

Jenius juga berkolaborasi dengan mitra untuk menghadirkan layanan yang semakin lengkap seperti untuk kategori penukaran Yay Points Kartu Kredit Jenius kategori *e-wallet* dan travel yang dapat ditukarkan secara real-time langsung dari aplikasi. Selain itu, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, Jenius juga berkolaborasi dengan beberapa ajang lari di Indonesia sebagai *co-title sponsor* dan *official banking partner* serta mengadakan beragam aktivitas dengan komunitas di kota-kota di Indonesia.

Jenius juga bekerja sama dengan mitra strategis, di antaranya kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi untuk memperkenalkan Jenius kepada nasabah perusahaan telekomunikasi atau penawaran layanan pembayaran *payroll* melalui Jenius.

Selain itu, dalam rangka pemenuhan kewajiban Bank atas peraturan OJK nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, BTPN berkerjasama dengan SMBC dan agensi lainnya dalam menyelenggarakan *workshop*/sosialisasi terkait *Environment, Social, Governance* (ESG) kepada nasabah korporasi, sehingga dapat membantu nasabah untuk menambah pengetahuan/kesadaran terkait ESG, yang kemudian akan membantu nasabah dalam bertransisi menuju *net zero emission*. BTPN juga terpilih menjadi salah satu bank dalam pelaksanaan *pilot project* pelaporan Taksonomi Hijau Indonesia (THI). Hal ini membuka peluang pembiayaan dan peluang lainnya terkait ESG/sustainability (termasuk pengembangan fasilitas pembiayaan terkait ESG - *green, social and sustainaibility linked loan*) kepada nasabah korporasi. Sebagai bagian dari Grup SMBC, BTPN akan mengenali dan mengendalikan emisi yang dibiayai di seluruh portofolio pinjamannya, terutama untuk sektor-sektor yang telah ditetapkan target pengurangannya oleh SMBC.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran nasabah korporasi terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, terjadi kecenderungan yang semakin kuat di kalangan nasabah korporasi untuk mencari produk keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Ini mencakup tidak hanya pembiayaan, tetapi juga pendanaan melalui produk deposito. Melalui *ESG Deposit*, Bank BTPN mengajak nasabah korporasi untuk berpartisipasi dalam menciptakan keberlanjutan di sektor keuangan. *ESG Deposit* ini mencerminkan komitmen terhadap tata Kelola perusahaan yang baik, dengan menekankan integritas dan etika dalam pengelolaan dana. Pendekatan ini didukung dengan transparasi, dimana sektor-sektor yang dapat didukung oleh kerangka kerja *ESG Deposit* dapat diungguh melalui *website* resmi Bank BTPN.

Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang diferensiasi di tengah persaingan dengan menawarkan produk pendanaan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif secara nyata, dengan memfokuskan pada prinsip-prinsip ESG, Bank BTPN dapat meningkatkan reputasi sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat, meningkatkan loyalitas nasabah, dan menarik perhatian calon nasabah yang berbagi nilai-nilai tersebut.

Untuk mendukung layanan yang maksimal kepada nasabah, Bank senantiasa mengukur *Service Level Agreement* (SLA). Bank menangani keluhan nasabah dengan baik, terutama agar dapat direspons dengan cepat dan tepat.

PANGSA PASAR

Penjelasan tentang pangsa pasar Bank BTPN pada tahun 2023 disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Pangsa Pasar Bank BTPN

(Rp Miliar, kecuali dinyatakan lain)

Kriteria	Keterangan	2023	2022
Aset	Bank Umum	11.765.838	11.113.321
	Bank BTPN	201.448	209.170
	Pangsa Pasar	**1,7%**	**1,9%**
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Bank Umum	8.457.929	8.153.590
	Bank BTPN	108.199	114.867
	Pangsa Pasar	**1,3%**	**1,4%**
Jumlah Kredit yang Diberikan	Bank Umum	7.090.243	6.423.564
	Bank BTPN	156.561	146.124
	Pangsa Pasar	**2,2%**	**2,3%**



MANAJEMEN RISIKO

148 Kebijakan Manajemen Risiko
149 Tata Kelola Manajemen Risiko
149 Organisasi Manajemen Risiko
150 Uraian Penerapan Manajemen Risiko
152 Tinjauan/*Review* atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko
152 Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Manajemen Risiko
153 Sistem Pengendalian Internal
154 Pengungkapan Permodalan
171 Pengungkapan Eksposur Risiko

Bank BTPN terus meningkatkan budaya risiko di lingkungan Bank, karena penting bagi seluruh karyawan untuk mengetahui dan mengerti risiko-risiko yang dihadapi dalam berbagai aktivitas Bank.

Penerapan dan pengembangan manajemen risiko di lingkungan PT Bank BTPN Tbk ("Bank BTPN", "BTPN", "Bank") dan Entitas Anak bertujuan agar kegiatan usaha Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi *risk appetite* yang sudah ditentukan atau bahkan mengganggu kelangsungan usaha Bank. Karena itu, Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Proses manajemen risiko dirancang agar mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi BTPN dan Entitas Anak. Landasan pelaksanaannya berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur penerapan manajemen risiko bagi bank umum serta regulasi Basel yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). Penerapan manajemen risiko dilakukan, baik secara individual maupun konsolidasi.

Kerangka manajemen risiko diimplementasikan melalui kecukupan kebijakan, prosedur, perangkat manajemen risiko, penetapan limit, dan kewenangan. Bank dan Entitas Anak melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sejalan dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan perkembangan organisasi, strategi, dan manajemen sistem informasi.

Penerapan manajemen risiko di lingkungan BTPN mencakup:
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Pengendalian intern yang menyeluruh.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Implementasi kebijakan manajemen risiko dilakukan secara konsisten sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategis Bank. Kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa eksposur risiko Bank sejalan dengan kebijakan dan prosedur internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan manajemen risiko adalah sebagai berikut:
1. Jenis usaha dan produk yang dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank.
2. Identifikasi dan mitigasi risiko secara jelas dan terkontrol, khususnya terkait dengan produk dan transaksi Bank.
3. Garis tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang jelas dalam mengelola masing-masing jenis risiko.
4. Metodologi dan sistem informasi manajemen yang digunakan dapat mengukur risiko dan mendukung bisnis.
5. Penerapan kewenangan dan besaran limit menggambarkan maksimum risiko kerugian yang dapat diterima selaras dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.
6. Pengelolaan rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Management*)
7. Pengelolaan risiko keamanan informasi.
8. Kebijakan yang mengatur produk dan aktivitas baru.
9. Kebijakan kredit yang merupakan pedoman kredit yang mengatur pemberian kredit yang sehat, analisa, persetujuan dan batas wewenang memutus kredit, pencatatan, penetapan limit, dan laporan.
10. Pengukuran dan penetapan peringkat risiko Bank disajikan dalam bentuk profil risiko.
11. Kebijakan *treasury* yang mencakup pengelolaan risiko likuiditas dan kebijakan ALMA.

Acuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan manajemen risiko Bank, antara lain
1. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
4. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
5. Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
7. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
8. Peraturan OJK Nomor 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
9. Surat Edaran OJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
10. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
11. Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

12. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
13. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
14. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
15. *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).
16. Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
17. Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum

Bank juga telah memiliki sejumlah ketentuan internal terkait dengan penerapan manajemen risiko, yang di antaranya adalah:

1. Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Kebijakan Kepatuhan.
3. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
4. Kebijakan Internal Audit dan Internal Audit *Charter*.
5. Kebijakan Perkreditan
6. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
7. Kebijakan Manajemen Risiko Kemanan Siber
8. Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha.
9. Kebijakan Manajemen Asuransi.
10. Kebijakan Strategi *Anti-Fraud*.
11. Kebijakan Manajemen Risiko Pihak Ketiga.
12. Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi.

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola risiko merupakan bagian yang melekat dalam pelaksanaan manajemen risiko di Bank BTPN. Dalam penerapannya, Bank mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan OJK No. 17/2023 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Bank menyampaikan laporan profil risiko setiap triwulan, baik secara individu maupun secara terkonsolidasi.

Tata kelola risiko di BTPN dikelola oleh Direktorat Manajemen Risiko yang independen dari unit bisnis. Pada tingkat Direksi, Bank juga mengadakan rapat bulanan Komite Manajemen Risiko untuk mendiskusikan potensi risiko yang dihadapi Bank dan berpotensi memiliki dampak yang signifikan.

Komite Manajemen Risiko memiliki pertemuan rutin secara berkala dengan Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan manajemen Bank. Direktorat Manajemen Risiko secara berkala mengkaji ulang kebijakan dan prosedur, termasuk sosialisasi terhadap risiko-risiko yang ada dan dihadapi BTPN.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Organisasi manajemen risiko Bank dan Entitas Anak melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank dan Entitas Anak juga telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat Komisaris dan Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko. Komite menjadi unit kontrol yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank dan Entitas Anak.

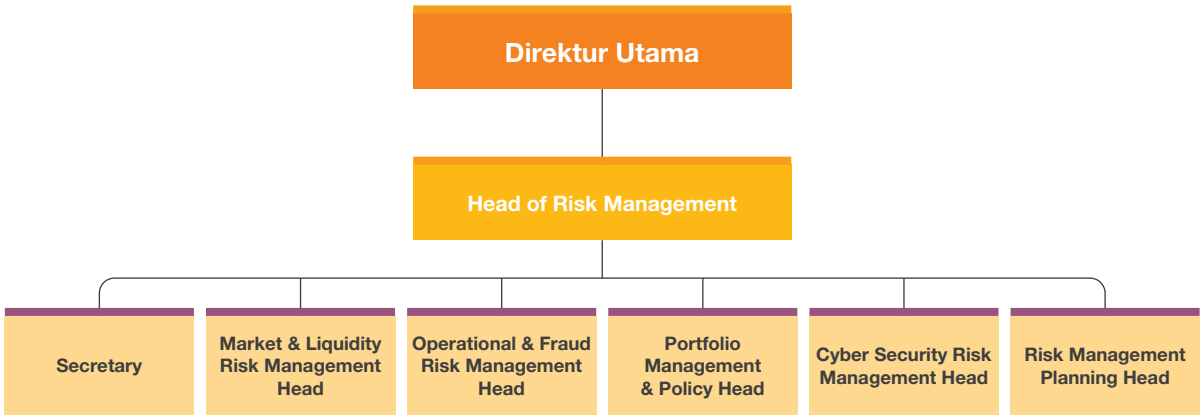

Dalam menjalankan tugasnya berkenaan dengan penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa satuan kerja, yaitu:

1. Komite Pemantau Risiko
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite *Fraud*
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko
5. *Asset and Liabilities Committee* (ALCO)
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi
7. *Internal Audit*
8. *Risk Taking Unit*

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) merupakan unit independen terhadap *Risk Taking Unit* dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama atau Head of Risk Management yang ditugaskan secara khusus untuk membawahkan fungsi manajemen risiko.

SKMR berfungsi membantu Direksi dalam:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko terkait dengan aktivitas bisnis Bank.
3. Memantau pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko.
4. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, serta melakukan *stress testing*.
5. Melakukan kajian ulang terhadap proses manajemen risiko.
6. Melakukan kajian risiko terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru, termasuk pengembangan atau perubahannya.
7. Memberikan rekomendasi kepada *Risk Taking Unit* dan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan kewenangannya
8. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko bank kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko minimal triwulanan serta melaporkan ke OJK secara berkala sesuai ketentuan.
9. Menetapkan pelaksanaan penerapan perangkat manajemen risiko serta mengevaluasi akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi Bank.
10. Mengoordinir fungsi pengendalian internal (*quality assurance*) Bank untuk memastikan keselarasan aktivitas yang dilakukan semua fungsi *quality assurance* di lini bisnis dan fungsi pendukung.

URAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank BTPN telah memiliki proses penerapan manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank. Rangkaian proses tersebut disampaikan melalui tabel di bawah ini.

No.	Proses	Uraian
1	Identifikasi Risiko	Seluruh jenis risiko yang melekat (inheren) pada setiap aktivitas produk dan kegiatan usaha harus diidentifikasi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui potensi risiko dan dampak yang diakibatkan agar Bank dapat menyiapkan mekanisme kontrol. Identifikasi wajib dilakukan oleh setiap *Risk Taking Unit* sebagai lapis pertahanan pertama dan diperkuat dengan identifikasi risiko oleh unit Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Legal, Finance dan Human Resources sebagai lini pertahanan kedua, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. b. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank. c. Proses identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko tersebut telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenankan atau dijalankan.
2	Pengukuran Risiko	Seluruh risiko yang telah diidentifikasi harus diukur sebagai salah satu bahan evaluasi hasil pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan dasar penentuan langkah perbaikan. Salah satu cara untuk mengukur eksposur risiko adalah dengan menentukan parameter risiko. Parameter ini harus disesuaikan jika terjadi perubahan yang material dari produk, proses, atau faktor risiko.
3	Pemantauan dan Limit Risiko	*Risk Taking Unit* dan Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko dan limit risiko, serta melaporkannya kepada Manajemen dan/atau Komite Manajemen Risiko secara berkala.
4	Pengendalian Risiko	Pengendalian risiko wajib dilakukan terhadap produk dan aktivitas Bank. Pengendalian tersebut mengacu pada prinsip *three lines of defense*, yaitu *Risk Taking Unit* dan *Business Risk/ICR* sebagai lini pengendalian pertama, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Legal, Finance dan Human Resources sebagai lini pengendalian kedua, dan Internal Audit (SKAI) sebagai lini pengendalian terakhir.
5	Sistem Informasi Manajemen Risiko	Sistem Informasi Manajemen Risiko dapat mengakomodasi strategi mitigasi risiko, akurat, informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja fungsional dan eksposur risiko, terkini, aman, konsisten, dan tersedia tepat waktu serta memiliki jejak audit.

No.	Proses	Uraian
6	Penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi	Pemantauan manajemen risiko secara konsolidasi dilakukan terbatas pada anak perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK yang mencakup: a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko. d. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh.

Budaya Manajemen Risiko

Bank BTPN memandang penting bagi seluruh karyawan untuk mengetahui dan mengerti risiko-risiko yang dihadapi dalam berbagai aktivitas Bank. Budaya manajemen risiko diimplementasikan dengan membangun suatu kepercayaan, pelaksanaan dan pengawasan manajemen yang akan memastikan bahwa aktivitas Bank telah berjalan dengan menganut prinsip kehati-hatian.

Budaya risiko ditetapkan melalui:
1. Pengarahan dan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi
2. Pengenalan manajemen risiko sebagai bagian yang utuh dari pelaksanaan bisnis.
3. Kepatuhan terhadap semua kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.

Kesadaran dan budaya risiko dibangun pada semua tingkatan organisasi, melalui:
1. Pengelolaan risiko oleh Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui proses pengarahan dan pengawasan pada rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
2. Komunikasi tingkat profil risiko yang diharapkan, dilakukan melalui penetapan berbagai batasan risiko dan pengelolaan portofolio.
3. Pemberian kewenangan kepada karyawan untuk menangani risiko secara hati-hati dalam pelaksanaan kegiatan bisnis bank. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko dilakukan antara lain dengan metode *self-assessment* dan sistem pengawasan internal.
4. Pelaksanaan pelatihan dan/atau kampanye kesadaran risiko yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
5. Kepatuhan terhadap semua kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Pemantauan terhadap efektivitas manajemen risiko di seluruh area.

Fokus Tahun 2023

Dalam rangka pemulihan ekonomi dari pasca pandemi Bank mulai fokus pada pertumbuhan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan prinsip ke hati-hatian serta tetap menjaga kualitas portfolio kredit yang dibukukan.

Rencana Tahun 2024

Pengembangan atas penerapan manajemen risiko akan terus dilakukan untuk menunjang pertumbuhan bisnis, meningkatkan mekanisme untuk mengevaluasi kualitas portfolio dan mendukung pengembangan sistem serta infrastruktur sejalan dengan inisiatif Bisnis dalam menjalankan digitalisasi serta mempersiapkan penerapan manajemen risiko berwawasan lingkungan. Inisiatif kunci yang akan dilaksanakan terdiri dari:
1. Mempersiapkan kerangka kerja serta skema *stress testing* sehubungan dengan *Climate Risk* pada area Risiko Kredit serta mempersiapkan laporan *piloting Bottom up* CRST sesuai dengan arahan regulator.
2. Bank melanjutkan pengembangan konsep dan kerangka kerja serta otomasi untuk laporan yang bersifat *predefined* melalui *Enterprise Risk Datamart* yang mencakup kredit, *market & liquidity* dan *monitoring fraud*.
3. Melakukan pengembangan aplikasi perhitungan analisa tertimbang menurut risiko (ATMR) risiko pasar sesuai dengan ketentuan regulator yang terbaru, dan menyampaikan laporan perhitungan ATMR Risiko Pasar tersebut ke OJK mulai posisi akhir bulan Januari 2024.
4. Stabilisasi kerangka kerja *Financial Risk Analytics Framework* serta melakukan pengembangan aplikasi untuk kebutuhan otomasi untuk mengakomodasi pelaksanaan simulasi dampak finansial yang bersifat *regulatory, forecasting* pada tingkatan *bankwide* dan unit bisnis.
5. Melanjutkan inisiatif untuk meningkatkan keamanan siber (termasuk di dalamnya pengelolaan keamanan informasi).
6. Melakukan persiapan pengembangan sistem penunjang laporan terkait risiko likuiditas untuk kebutuhan pengembangan proyeksi, simulasi dan *stress test* serta untuk mengantisipasi adanya Revisi Kebijakan Pilar 2 – *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)* dari OJK.
7. Mempersiapkan implementasi regulasi terkait perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dan *Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).*
8. Meningkatkan proses pemantauan terhadap anak Perusahaan oleh Bank BTPN sebagai perusahan induk dalam pengelolaan manajemen risiko.

TINJAUAN/*REVIEW* ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Bank BTPN melakukan tinjauan atau *review* atas efektivitas sistem manajemen risiko yang digunakan setidaknya satu tahun sekali. Untuk tahun buku 2023, hasil *review* tersebut adalah:

1. Sejalan dengan arahan OJK dalam menyikapi *Climate Change*, Bank mulai mempersiapan kerangka kerja sehubungan dengan *Climate Risk* menyesuaikan dengan arahan regulator.
2. Bank secara berkelanjutan telah melaksanakan validasi model PSAK 71 dan melakukan *update* data serta faktor makroekonomi tahunan pada triwulan 3 tahun 2023 sebagai bagian dari kerangka *review* berkelanjutan dengan terus melakukan *monitoring* penerapan regulasi relaksasi POJK dalam pandemi dengan tetap berkoordinasi bersama unit bisnis
3. Bank melanjutkan pengembangan konsep dan kerangka kerja serta otomasi untuk laporan yang bersifat *predefined* melalui *Enterprise Risk Datamart*.
4. Bank melanjutkan pembuatan kerangka konsep yang akan dipergunakan *pada project Financial Risk Analytics Framework* pada tahap finalisasi model dan dokumentasi.
5. Bank telah melakukan pelaporan ATMR Risiko Operasional dan Risiko Kredit dengan pendekatan *Standardized Approach (SA)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah melakukan uji coba perhitungan pelaporan ATMR Risiko Pasar dengan pendekatan *Standardized Approach (SA)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari posisi Juni 2023 serta telah disampaikan ke OJK sebagaimana ketentuan yang berlaku.
6. Bank secara berkala dan berkesinambungan melakukan *stress testing* risiko pasar maupun risiko likuiditas untuk mengukur dan memantau dampaknya terhadap kondisi keuangan maupun ketahanan likuiditas Bank, serta untuk mengantisipasi adanya perubahan kondisi ekonomi dan eksternal. Bank juga mengukur risiko suku bunga di *Banking Book* untuk memantau potensi penurunan nilai permodalan (*Economic Value of Equity/EVE*) dan rentabilitas (*Net Interest Income/ NII*).
7. Bank telah, sedang dan secara berkesinambungan menerapkan inisiatif untuk meningkatkan keamanan informasi melalui pelaksanaan kampanye *user awareness,* dan pelatihan keamanan siber termasuk program simulasi *phishing* secara berkala dan *ad hoc* dengan menggunakan materi terkini dan menerapkan uji tuntas serta peninjauan berkala penerapan standar keamanan siber oleh pihak ketiga.
8. Bank telah membentuk fungsi manajemen risiko keamanan siber yang independen dari fungsi pengelolaan TI sesuai dengan PBI No. 23/7/ PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran dan POJK No. 11/ POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta SEOJK No. 29/ SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.
9. Bank sedang melakukan pengembangan laporan terkait risiko likuiditas termasuk pelaporan Basel III.
10. Bank mempersiapkan kebijakan dan prosedur terkait perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dan *Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).*

Dalam masa peralihan dari masa pandemi COVID-19 ke endemi dan sesuai dengan penetapan KDK 34/ KDK.03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, sektor tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah seta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah Yang Memerlukan Perlakuan Khusus, Bank telah melakukan penyesuaian ketentuan, prosedur, dan metode pelaksanaan relaksasi dan restrukturisasi sesuai dengan regulasi tersebut serta tetap melakukan monitoring dan pengawasan atas kualitas dan kecukupan CKPN atas debitur-debitur yang direstrukturisasi.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam organisasi manajemen risiko, penerapan pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Sedangkan Direksi langsung memimpin penerapan manajemen risiko di lingkungan Bank.

Untuk pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi memandang bahwa kecukupan manajemen risiko Bank telah memadai. Penerapannya juga telah diselaraskan dengan perkembangan kondisi perekonomian dan bisnis Bank.

Kebijakan internal Bank terkait dengan manajemen risiko telah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga memiliki mekanisme *review* yang dilakukan secara berkala terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pendekatan Sistem Pengendalian Internal yang digunakan BTPN adalah pertahanan 3 (tiga) lini (*Three Lines of Defense*). Masing-masing tahapan tersebut bekerja secara independen, yang rinciannya diuraikan sebagai berikut:

- **Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defense*)**
  Merupakan *Risk Taking Unit* (RTU) yang dibantu oleh *Business Risk*/ICR terkait untuk menegakkan praktik manajemen risiko sehari-hari secara disiplin.

- **Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defense*)**
  Direktorat Manajemen Risiko bersama dengan Unit Kepatuhan, Finance dan Human Resources, yaitu mendefinisikan, menyempurnakan dan memastikan terlaksananya pengelolaan risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang memadai disertai kebijakan dan prosedur yang tepat serta mengoordinasikan/ memfasilitasi kegiatan pengelolaan risiko secara keseluruhan.

- **Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defense*)**
  Internal Audit secara independen melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata kelola dan efektivitas penerapan manajemen risiko.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Manajemen Risiko yang merupakan lini pertahanan kedua, berkoordinasi dengan *Business Risk*/ICR di lini pertahanan pertama untuk memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai lini pertahanan ketiga dalam Sistem Pengendalian Internal, Internal Audit memiliki fungsi pengawasan untuk mengevaluasi manajemen risiko, efektivitas pengendalian intern dan tata kelola semua aspek kegiatan Bank dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Dengan demikian, fungsi pengawasan dilakukan terhadap lini pertahanan pertama (*Risk Taking Unit* dan *Business Risk*/ICR) dan lini pertahanan kedua (Direktorat Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan & Legal, Direktorat Finance & Planning dan Direktorat Human Resources).

Evaluasi yang dilakukan oleh Internal Audit terhadap efektivitas pengendalian intern turut memperhatikan sejumlah aspek. Di antaranya, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan nasabah, infrastruktur bank maupun kualitas pelaksanaan proses-proses utama yang memiliki risiko bagi Bank.

Internal Audit melakukan pemantauan status perbaikan pada setiap temuan secara berkala dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Direksi maupun Komite Audit. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Internal Audit dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan International Practices of Professional Framework (IPPF) yang ditetapkan oleh Intitute of Internal Auditors (IIA). Setiap 3 (tiga) tahun Bank melakukan audit terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan Internal Audit oleh pihak yang independen untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang berlaku.

Skema Pendekatan Tiga Lapis Pertahanan dan Alur Pengendalian Intern

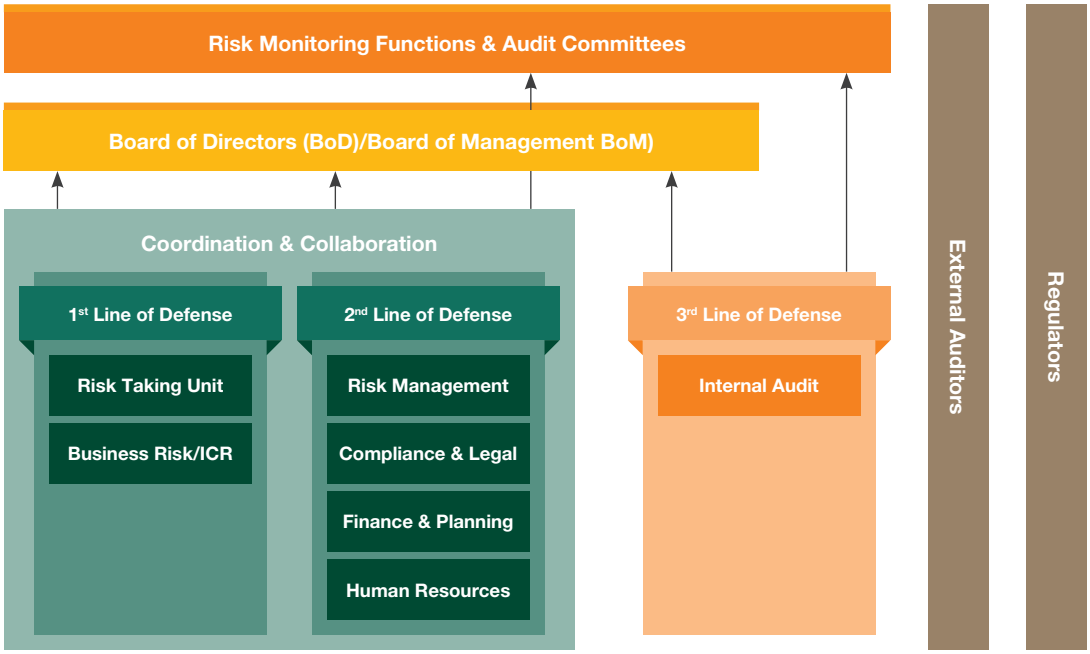

PENGUNGKAPAN PERMODALAN

Struktur Permodalan

Kompleksitas produk dan kegiatan usaha Bank terus berkembang. Begitu pun metode dan teknik pengukuran risiko pada industri perbankan. Sebagai respons, Bank harus selalu menjaga kecukupan modal agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi Bank.

Bank juga harus melakukan pengelolaan modal untuk memastikan bahwa modal yang dimiliki saat ini berada di atas tingkat minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permodalan juga harus memadai guna mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi serta mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank di masa yang akan datang.

Posisi permodalan Bank per tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Laporan Key Metrics Secara Konsolidasi per 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Deskripsi	T	T–1	T–2	T–3	T–4
Modal yang Tersedia (nilai)						
1	Modal Inti Utama (CET1)	36.613.893	36.474.300	35.760.429	35.868.931	34.966.039
2	Modal Inti (*Tier* 1)	36.613.893	36.474.300	35.760.429	35.868.931	34.966.039
3	Total Modal	41.157.380	41.127.938	40.293.218	40.424.788	39.593.006
Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)						
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	137.651.897	138.089.212	135.352.977	138.022.391	145.091.415
Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR						
5	Rasio CET1 (%)	26,60%	26,41%	26,42%	25,99%	24,10%
6	Rasio *Tier* 1 (%)	26,60%	26,41%	26,42%	25,99%	24,10%
7	Rasio Total Modal (%)	29,90%	29,78%	29,77%	29,29%	27,29%
Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR						
8	*Capital conservation buffer* (2.5% dari ATMR) (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
9	*Countercyclical Buffer* (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	*Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik (1% - 2,5%) (%)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
11	Total CET1 sebagai *buffer* (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
12	Komponen CET1 untuk *buffer*	20,60%	20,41%	20,42%	19,99%	18,06%
Rasio pengungkit sesuai Basel III						
13	Total Eksposur	223.139.453	218.986.945	215.444.235	226.232.080	230.965.581
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	16,41%	16,66%	16,60%	15,85%	15,14%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	16,41%	16,66%	16,60%	15,85%	15,14%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset *Securities Financing Transaction* (SFT) secara *gross*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Deskripsi	T	T–1	T–2	T–3	T–4
Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)						
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	32.183.361	31.684.242	34.499.559	46.028.620	45.597.893
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (*net cash outflow*)	17.466.631	17.448.147	16.032.996	18.001.881	17.159.157
17	LCR (%)	184,26%	181,59%	215,18%	255,69%	265,74%
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)						
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	131.606.862	134.881.606	136.367.337	138.526.016	147.189.919
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	115.658.692	112.109.071	109.981.774	109.376.687	110.075.079
20	NSFR (%)	113,79%	120,31%	123,99%	126,65%	133,72%

ANALISIS KUALITATIF

- Modal inti Bank per posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp36,6 triliun, meningkat dibandingkan dengan Modal inti pada periode sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan cadangan tambahan modal lainnya dari laba ditahan.
- Total Modal Bank per posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp41,2 triliun, sedikit meningkat dibandingkan dengan Total Modal pada periode sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada modal inti.
- Total ATMR mengalami penurunan di bulan Desember 2023 menjadi Rp137,7 triliun disebabkan oleh penurunan ATMR risiko pasar. Penurunan ATMR untuk risiko pasar posisi Desember 2023 dibandingkan posisi September 2023 disebabkan karena adanya penurunan eksposur transaksi derivatif untuk melindungi eksposur yang timbul dari eksposur kredit yang dilakukan pada bulan November 2023.

Catatan:
T adalah periode triwulanan, T-1 adalah periode 1 triwulan sebelumnya

Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan *Mapping* pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (LI1)

(dalam jutaan Rupiah)

	Carrying values sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	*Carrying values* berdasarkan prinsip kehati-hatian	Carrying values of items				
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka *counterparty credit risk*	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
ASET							
Kas	1.428.683	1.428.683	-	-	-	-	1.428.683
Penempatan pada Bank Indonesia	18.000.252	18.000.252	-	-	-	18.000.252	18.000.252
Penempatan pada bank lain	1.200.387	1.200.387	-	-	-	1.200.387	1.200.387
Tagihan *spot* dan derivatif/ *forward*	1.133.149	1.133.149	-	1.133.149	-	1.133.149	1.133.149
Surat berharga yang dimiliki	17.038.501	17.038.501	-	-	-	17.038.501	17.038.501
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	3.289.757	3.289.757	-	-	-	3.289.757	3.289.757
Kredit yang diberikan	145.173.436	145.173.436	145.173.436	-	-	145.173.436	145.173.436
Pembiayaan syariah	11.387.861	11.387.861	11.387.861	-	-	11.387.861	11.387.861
Penyertaan modal	102.586	102.586	-	-	-	102.586	102.586
Aset keuangan lainnya	1.361.853	1.361.853	-	-	-	1.361.853	1.361.853
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(4.627.641)	(4.627.641)	-	-	-	-	(4.627.641)
a. Surat berharga yang dimiliki	(799)	(799)	-	-	-	(799)	(799)

(dalam jutaan Rupiah)

	Carrying values sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	*Carrying values* berdasarkan prinsip kehati-hatian	Carrying values of items				
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka *counterparty credit risk*	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(4.618.047)	(4.618.047)	(4.618.047)	-	-	(4.618.047)	(4.618.047)
c. Lainnya	(8.795)	(8.795)	-	-	-	(8.795)	(8.795)
Aset tidak berwujud	3.541.155	3.541.155	-	-	-	-	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(2.451.771)	(2.451.771)	-	-	-	-	-
Aset tetap dan inventaris	5.040.250	5.040.250	-	-	-	-	5.040.250
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2.992.438)	(2.992.438)	-	-	-	-	(2.992.438)
Aset non produktif	79.120	79.120	-	-	-	-	79.120
a. Properti terbengkalai	21.099	21.099	-	-	-	-	21.099
b. Agunan yang diambil alih	58.021	58.021	58.021	-	-	-	58.021
c. Rekening tunda	-	-	-	-	-	-	-
d. Aset antarkantor	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	2.743.252	2.743.252	-	-	-	-	2.028.100
TOTAL ASET	**201.448.392**	**201.448.392**	**152.001.271**	**1.133.149**	**-**	**194.060.141**	**199.643.856**
LIABILITAS							
Giro	26.628.683	26.628.683	-	-	-	26.628.683	26.628.683
Tabungan	17.558.817	17.558.817	-	-	-	17.558.817	17.558.817
Deposito	64.011.076	64.011.076	-	-	-	64.011.076	64.011.076
Uang Elektronik	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	10.814.638	10.814.638	-	-	-	10.814.638	10.814.638
Liabilitas *spot* dan derivatif/ *forward*	1.072.104	1.072.104	-	1.072.104	-	1.072.104	1.072.104
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	2.323.633	2.323.633	-	-	-	-	2.323.633
Surat berharga yang diterbitkan	200.569	200.569	-	-	-	200.569	200.569
Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	34.283.897	34.283.897	-	-	-	34.283.897	31.307.144
Setoran jaminan	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas antarkantor	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	3.271.871	3.271.871	-	-	-	3.271.871	3.271.871
Kepentingan minoritas (*minority interest*)	2.616.678	2.616.678	-	-	-	2.616.678	2.616.678
TOTAL LIABILITAS	**162.781.966**	**162.781.966**	**-**	**1.072.104**	**-**	**160.458.333**	**159.805.213**

(dalam jutaan Rupiah)

	Carrying values sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	*Carrying values* berdasarkan prinsip kehati-hatian	Carrying values of items				
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka *counterparty credit risk*	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
EKUITAS							
Modal disetor	161.136	161.136	-	-	-	-	-
a. Modal dasar	300.000	300.000	-	-	-	-	
b. Modal yang belum disetor -/-	(137.018)	(137.018)	-	-	-	-	
c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	(1.846)	(1.846)	-	-	-	-	
Tambahan modal disetor	11.145.923	11.145.923	-	-	-	-	236.534
a. Agio	10.909.389	10.909.389	-	-	-	-	-
b. Disagio -/-	-	-	-	-	-	-	-
c. Dana setoran modal	-	-	-	-	-	-	-
d. Lainnya	236.534	236.534	-	-	-	-	236.534
Penghasilan komprehensif lain	886.452	886.452	-	-	-	-	(70.678)
a. Keuntungan	979.525	979.525	-	-	-	-	22.395
b. Kerugian -/-	(93.073)	(93.073)	-	-	-	-	(93.073)
Cadangan	32.596	32.596	-	-	-	-	-
a. Cadangan umum	32.596	32.596	-	-	-	-	-
b. Cadangan tujuan	-	-	-	-	-	-	-
Laba/rugi	26.440.319	26.440.319	-	-	-	-	-
a. Tahun-tahun lalu	24.701.125	24.701.125	-	-	-	-	619.140
b. Tahun berjalan	2.358.334	2.358.334	-	-	-	-	-
c. Dividen yang dibayarkan -/-	(619.140)	(619.140)	-	-	-	-	(619.140)
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	**38.666.426**	**38.666.426**	**-**	**-**	**-**	**-**	**165.856**
TOTAL EKUITAS	**38.666.426**	**38.666.426**	**-**	**-**	**-**	**-**	**165.856**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	201.448.392	201.448.392	-	1.072.104	-	160.458.333	159.971.069

ANALISA KUALITATIF
Pada jenis aset keuangan, pemberian kredit dan pembiayaan syariah merupakan aset dengan ekposur terbesar yang memiliki risiko kredit dan risiko pasar. Terkait dengan risiko kredit, atas ekposur tersebut telah diperhitungkan pencadangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sementara terkait dengan risiko pasar, Bank telah menetapkan metode pengukuran risiko dan melakukan pemantauan risiko suku bunga di Banking Book yang dilaporkan secara berkala di rapat komite ALCO.

Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Nilai Eksposur sesuai dengan Ketentuan OJK (LI2)

(dalam jutaan rupiah)

	Total	Item sesuai:			
		Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka *Counterparty credit risk*	Kerangka risiko pasar
Nilai *asset carrying value* sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)	201.448.392	152.001.271	-	1.133.149	194.060.141
Nilai *liabilities carrying value* sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)	201.448.392	-	-	1.072.104	160.458.333
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	152.001.271	-	61.045	33.601.808
Nilai rekening administratif	121.956.264	121.956.264	-	-	-
Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-
Perbedaan antara *netting rules*, selain dari yang termasuk pada baris 2.	-	-	-	-	-
Perbedaan provisi	-	-	-	-	-
Perbedaan *prudential filters*	-	-	-	-	-
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-

Format Standar Pengungkapan Perhitungan Basel III (CC1) 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	Bank	Konsolidasi
Modal Inti Utama (*Common Equity Tier* I) /CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor			
1	Saham biasa (termasuk *stock surplus*)	11.076.002	11.070.525
2	Laba ditahan	21.501.133	26.440.319
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	985.957	989.726
4	Modal yang yang termasuk *phase out* dari CET1	N/A	N/A
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-
6	CET1 sebelum *regulatory adjustment*	33.563.092	38.500.570
CET 1: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)			
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*	-	-
8	*Goodwill*	-	(61.116)
9	Aset tidak berwujud lain (selain *Mortgage-Servicing Rights*)	(817.524)	(1.028.268)
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari *future profitability*	N/A	N/A
11	*Cash-flow hedge reserve*	N/A	N/A
12	*Shortfall on provisions to expected losses*	N/A	N/A
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	-
14	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas liabilitas keuangan (DVA)	-	-
15	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	N/A
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di *net* dalam modal di neraca)	N/A	N/A
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	-
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan, di mana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	Bank	Konsolidasi
20	*Mortgage servicing rights*	-	-
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak)	N/A	N/A
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	N/A	N/A
23	investasi signifikan pada saham biasa *financials*	N/A	N/A
24	*mortgage servicing right*	N/A	N/A
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	N/A
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	(1.729.598)	(797.293)
26.a	Selisih PPKA dan CKPN	-	-
26.b	PPA atas aset non produktif	(2.077)	(2.077)
26.c	Aset Pajak Tangguhan	(441.560)	(715.152)
26.d	Penyertaan	(1.285.961)	(80.064)
26.e	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
26.f	Eksposur sekuritisasi	-	-
26.g	Lainnya	-	-
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan *Tier* 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	-
28	Jumlah pengurang (regulatory adjustment) terhadap CET 1	(2.547.122)	(1.886.677)
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	31.015.970	36.613.893
Modal Inti Tambahan (AT 1) : Instrumen			
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk *stock surplus*)	-	-
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	-
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	-
33	Modal yang yang termasuk phase out dari AT1	N/A	N/A
34	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	-
35	Instrumen yang diterbitkan entitas anak yang termasuk *phase out*	N/A	N/A
36	Jumlah AT 1 sebelum *regulatory adjustment*	-	-
Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)			
37	Investasi pada instrumen AT1 sendiri	N/A	N/A
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT1 pada entitas lain	-	-
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
40	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	-
41.a	Penempatan dana pada instrumen AT1 pada bank lain	-	-
42	Penyesuaian pada AT1 akibat *Tier* 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	-
43	Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap AT1	-	-
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-	-
45	Jumlah Modal Inti (*Tier* 1) = (CET1 + AT 1)	31.015.970	36.613.893

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	Bank	Konsolidasi
Modal Pelengkap (Tier 2): Instumen dan cadangan			
46	Instrumen *Tier* 2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*)	-	-
47	Modal yang yang termasuk phase out dari *Tier* 2	N/A	N/A
48	Instrumen *Tier* 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	2.976.753	2.976.753
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*	N/A	N/A
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	1.459.691	1.566.734
51	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang	4.436.444	4.543.487
Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)			
52	Investasi pada instrumen *Tier* 2 sendiri	N/A	N/A
53	Kepemilikan silang pada instrumen *Tier* 2 pada entitas lain	-	-
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan *threshold* 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk Bank Sistemik)	N/A	N/A
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (*net* posisi *short* yang diperkenankan)	N/A	N/A
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	-
56.a	*Sinking fund*	-	-
56.b	Penempatan dana pada instrumen *Tier* 2 pada Bank lain	-	-
57	Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) Modal Pelengkap	-	-
58	Jumlah Modal Pelengkap (*Tier* 2) setelah *regulatory adjustment*	4.436.444	4.543.487
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	35.452.414	41.157.380
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	128.810.828	137.651.897
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (*Capital Buffer*)			
61	Rasio CET1 – persentase terhadap ATMR	24,08%	26,60%
62	Rasio Modal Inti (*Tier* 1) – persentase terhadap ATMR	24,08%	26,60%
63	Rasio Total Modal – persentase terhadap ATMR	27,52%	29,90%
64	Tambahan modal (*buffer*) – persentase terhadap AMTR	8,00%	8,00%
65	*Capital Conservation Buffer*	2,50%	2,50%
66	*Countercyclical Buffer*	0,00%	0,00%
67	*Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik	1,00%	1,00%
68	CET 1 yang tersedia untuk memenuhi *Buffer* – persentase terhadap ATMR	18,08%	20,60%
National minimal (jika berbeda dengan Basel 3)			
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	N/A
70	Rasio terendah *Tier* 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	N/A
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	N/A
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)			
72	Investasi non-signifikan pada modal entitas keuangan lain	N/A	N/A
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	N/A
74	*Mortgage servicing rights* (*net* dari kewajiban pajak)	N/A	N/A
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	N/A

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	Bank	Konsolidasi
Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2			
76	Provisi yang dapat diakui sebagai *Tier* 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan *cap*)	N/A	N/A
77	*Cap* atas provisi yang diakui sebagai *Tier* 2 berdasarkan pendekatan standar	N/A	N/A
78	Provisi yang dapat diakui sebagai *Tier* 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan *cap*)	N/A	N/A
79	*Cap* atas provisi yang diakui sebagai *Tier* 2 berdasarkan pendekatan IRB	N/A	N/A
Instrumen Modal yang termasuk *phase out* (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)			
80	*Cap* pada CET 1 yang temasuk *phase out*	N/A	N/A
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET1 karena adanya *cap* (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan maturities)	N/A	N/A
82	*Cap* pada AT1 yang temasuk *phase out*	N/A	N/A
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya *cap* (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan maturities)	N/A	N/A
84	*Cap* pada *Tier* 2 yang temasuk *phase out*	N/A	N/A
85	Jumlah yang dikecualikan dari *Tier* 2 karena adanya *cap* (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan maturities)	N/A	N/A

Rekonsiliasi Permodalan (CC2)

(dalam jutaan rupiah)

No	POS POS	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		31 Desember 2023	31 Desember 2023
ASET			
1.	Kas	931.530	1.428.683
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	17.236.809	18.000.252
3.	Penempatan pada bank lain	958.732	1.200.387
4.	Tagihan *spot* dan derivatif	1.133.149	1.133.149
5.	Surat berharga	8.547.321	17.038.501
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*Repo*)	-	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*)	-	-
8.	Tagihan akseptasi	3.289.757	3.289.757
9.	Kredit	145.173.436	145.173.436
10.	Pembiayaan syariah	-	11.387.861
11.	Penyertaan	1.308.484	102.586
12.	Aset keuangan lainnya	1.121.451	1.361.853
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(3.413.725)	(4.627.641)
	a. Surat berharga	(799)	(799)
	b. Kredit	(3.404.131)	(4.618.047)
	c. Lainnya	(8.795)	(8.795)

(dalam jutaan rupiah)

No	POS POS	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		31 Desember 2023	31 Desember 2023
14.	Aset tidak berwujud	3.096.432	3.541.155
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(2.278.908)	(2.451.771)
15.	Aset tetap dan inventaris	3.958.107	5.040.250
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2.286.537)	(2.992.438)
16.	Aset non produktif	79.120	79.120
	a. Properti terbengkalai	21.099	21.099
	b. Aset yang diambil alih	58.021	58.021
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antar kantor	-	-
17.	Aset lainnya	2.386.178	2.743.252
	TOTAL ASET	**181.241.336**	**201.448.392**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	26.604.674	26.628.683
2.	Tabungan	14.470.875	17.558.817
3.	Simpanan berjangka	54.980.210	64.011.076
4.	Dana investasi *revenue sharing*	-	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-
6.	Pinjaman dari bank lain	10.818.444	10.814.638
7.	Liabilitas *spot* dan derivatif	1.072.104	1.072.104
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*Repo*)	-	-
9.	Utang akseptasi	2.323.633	2.323.633
10.	Surat berharga yang diterbitkan	200.569	200.569
11.	Pinjaman yang diterima	34.283.897	34.283.897
12.	Setoran jaminan	-	-
13.	Liabilitas antar kantor	-	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	2.756.110	3.271.871
15.	Liabilitas lainnya	-	2.616.678
	TOTAL LIABILITAS	**147.510.516**	**162.781.966**

(dalam jutaan rupiah)

No	POS POS	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		31 Desember 2023	31 Desember 2023
EKUITAS			
16.	Modal disetor	161.136	161.136
	a. Modal dasar	300.000	300.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(137.018)	(137.018)
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	(1.846)	(1.846)
17.	Tambahan modal disetor	11.175.667	11.145.923
	a. Agio	10.914.866	10.909.389
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Dana setoran modal	-	-
	d. Lainnya	260.801	236.534
18.	Penghasilan komprehensif lain	860.288	886.452
	a. Keuntungan	953.361	979.525
	b. Kerugian -/-	(93.073)	(93.073)
19.	Cadangan	32.596	32.596
	a. Cadangan umum	32.596	32.596
	b. Cadangan tujuan	-	-
20.	Laba/rugi	21.501.133	26.440.319
	a. Tahun-tahun lalu	20.019.562	24.701.125
	b. Tahun berjalan	2.100.711	2.358.334
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(619.140)	(619.140)
	Total Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik	33.730.820	38.666.426
	TOTAL EKUITAS	**33.730.820**	**38.666.426**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**181.241.336**	**201.448.392**

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan (CCA)
31 Desember 2023

No	Pertanyaan	Bank	
		Modal Disetor	Pinjaman Subordinasi
1	Penerbit	PT Bank BTPN, Tbk.	SMBC
2	Nomor identifikasi	ISIN : 101000118508	N/A
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrumen TLAC sah lainnya diatur oleh hukum asing)		
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		
4	Pada saat masa transisi	N/A	N/A
5	Setelah masa transisi	CET1	T2
6	Apakah instrumen *eligible* untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Individu	Individu
7	Jenis instrumen	Saham Biasa	Pinjaman Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	11.076.002	2.976.753
9	Nilai *Par* dari instrumen	162.982	-
10	Klasifikasi sesuai Standar Akuntansi Keuangan	Ekuitas	Liabilitas – Amortised Cost
11	Tanggal penerbitan	-	26 Sep 2018 dan diperbaharui pada tanggal 27 Sep 2021 (USD 100 juta), & 23 Nov 2018 dan diperbaharui pada tanggal 22 Nov 2021 (USD 100 juta)
12	Tidak ada jatuh tempo (perpertual) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal Jatuh tempo	-	26 Sep 2028 & 21 Nov 2028
14	Eksekusi *call option* atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak	Tidak
15	Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan *call option* lainnya (bila ada)	-	N/A
16	*Subsequent call option* Kupon/deviden	-	N/A
17	Dividen/Kupon dengan bunga tetap atau *floating*	-	N/A
18	Tingkat dari coupon rate atau indeks lain yang menjadi acuan	-	N/A
19	Ada atau tidaknya *dividend stopper*	-	N/A
20	*Fully discretionary; partial or mandatory*	-	N/A
21	Apakah terdapat fitur step up atau insentif lain	-	N/A
22	Non kumulatif atau kumulatif	-	N/A
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi	Dalam Pinjaman Subordinasi, terdapat pilihan untuk melakukan Konversi/Write Down, yang akan diusulkan kepada Kreditur melalui suatu Rencana Aksi pada saat trigger event terjadi dan akan disampaikan kepada OJK
24	Jika dikonversi, sebutkan *trigger point*-nya.	-	Rasio CET1 lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari ATMR
25	Jika dikonversi, apakah seluruh atau sebagaian	-	N/A
26	Jika dikonversi, bagaimana *rate* konversinya	-	N/A
27	Jika dikonversi; apakah *mandatory* atau *optional*	-	N/A
28	Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	-	N/A
29	Jika dikonversi, sebutkan *issuer of instrument it converts into*	-	N/A
30	Fitur *Write-down*	Tidak	Dalam Pinjaman Subordinasi, terdapat pilihan untuk melakukan Konversi/Write Down, yang akan diusulkan kepada Kreditur melalui suatu Rencana Aksi pada saat trigger event terjadi dan akan disampaikan kepada OJK
31	Jika terjadi *write-down*, sebutkan *trigger*-nya	-	Rasio CET1 lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari ATMR
32	Jika terjadi *write down*, apakah penuh atau sebagian	-	N/A
33	Jika terjadi *write down*; *permanent* atau *temporer*	-	N/A
34	Jika terjadi *write down temporer*, jelaskan *mechanisme write-up*	-	N/A
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	-	Setelah hutang kepada kreditur dilunasi
36	Apakah terdapat fitur yang *non-compliant*	Tidak	N/A
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang *non-compliant*	-	N/A

	Konsolidasi	
	Modal Disetor	**Pinjaman Subordinasi**
	PT Bank BTPN, Tbk.	SMBC
	ISIN : 101000118508	N/A
	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia
	N/A	N/A
	CET1	T2
	Individu	Individu
	Saham Biasa	Pinjaman Subordinasi
	11.070.525	2.976.753
	162.982	-
	Ekuitas	*Liabilitas – Amortised Cost*
	-	26 Sep 2018 dan diperbaharui pada tanggal 27 Sep 2021 (USD 100 juta), & 23 Nov 2018 dan diperbaharui pada tanggal 22 Nov 2021 (USD 100 juta)
	Perpetual	Dengan Jatuh Tempo
	-	26 Sep 2028 & 21 Nov 2028
	Tidak	Tidak
	-	N/A
	-	N/A
	-	N/A
	-	N/A
	-	N/A
	-	N/A
	-	N/A
	Tidak dapat dikonversi	Dalam Pinjaman Subordinasi, terdapat pilihan untuk melakukan Konversi/Write Down, yang akan diusulkan kepada Kreditur melalui suatu Rencana Aksi pada saat trigger event terjadi dan akan disampaikan kepada OJK
	-	Rasio CET1 lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari ATMR
	-	N/A
	-	N/A
	-	N/A
	-	N/A
	-	N/A
	Tidak	Dalam Pinjaman Subordinasi, terdapat pilihan untuk melakukan Konversi/Write Down, yang akan diusulkan kepada Kreditur melalui suatu Rencana Aksi pada saat trigger event terjadi dan akan disampaikan kepada OJK
	-	Rasio CET1 lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari ATMR
	-	N/A
	-	N/A
	-	N/A
	-	Setelah hutang kepada kreditur dilunasi
	Tidak	N/A
	-	N/A

Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Triwulanan Bank Umum Konvensional

(dalam jutaan rupiah)

	Komponen Modal	31 Desember 2023 Diaudit		31 Desember 2022 Diaudit	
		Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian
I	Modal Inti (Tier 1)	31.015.970	36.613.893	29.178.186	34.966.039
1	CET 1	31.015.970	36.613.893	29.178.186	34.966.039
1.1	Modal Disetor (setelah dikurangi *Treasury Stock*)	161.136	161.136	161.133	161.133
1.2	Cadangan Tambahan Modal	33.399.879	38.337.357	31.532.432	36.507.624
1.2.1	Faktor Penambah	33.401.956	38.339.434	31.837.340	36.515.523
1.2.1.1	Pendapatan komprehensif lainnya	953.361	957.130	870.786	874.453
1.2.1.1.1	Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-
1.2.1.1.2	Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.804	2.906	-	-
1.2.1.1.3	Saldo surplus revaluasi aset tetap	950.557	954.224	870.786	874.453
1.2.1.2	Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)	32.448.595	37.382.304	30.966.554	35.641.070
1.2.1.2.1	Agio	10.914.866	10.909.389	10.914.396	10.907.349
1.2.1.2.2	Cadangan umum	32.596	32.596	32.596	32.596
1.2.1.2.3	Laba tahun-tahun lalu	19.400.422	24.081.985	17.836.586	21.605.424
1.2.1.2.4	Laba tahun berjalan	2.100.711	2.358.334	2.182.976	3.095.701
1.2.1.2.5	Dana setoran modal	-	-	-	-
1.2.1.2.6	Lainnya	-	-	-	-
1.2.2	Faktor Pengurang	(2.077)	(2.077)	(304.908)	(7.899)
1.2.2.1	Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	(7.750)	(7.705)
1.2.2.1.1	Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-
1.2.2.1.2	Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	(7.750)	(7.705)
1.2.2.2	Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)	(2.077)	(2.077)	(297.158)	(194)
1.2.2.2.1	Disagio	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Rugi tahun-tahun lalu	-	-	-	-
1.2.2.2.3	Rugi tahun berjalan	-	-	-	-
1.2.2.2.4	Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	-	-	(296.964)	-
1.2.2.2.5	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *Trading Book*	-	-	-	-
1.2.2.2.6	PPKA non-produktif	(2.077)	(2.077)	(194)	(194)
1.2.2.2.7	Lainnya	-	-	-	-
1.3	Kepentingan Non-Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-	-	-
1.4	Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(2.545.045)	(1.884.600)	(2.515.379)	(1.702.718)
1.4.1	Pajak tangguhan	(441.560)	(715.152)	(384.408)	(545.029)

(dalam jutaan rupiah)

Komponen Modal			31 Desember 2023 Diaudit		31 Desember 2022 Diaudit	
			Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian
	1.4.2	*Goodwill*	-	(61.116)	-	(61.116)
	1.4.3	Aset tidak berwujud	(817.524)	(1.028.268)	(845.010)	(1.015.622)
	1.4.4	Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	(1.285.961)	(80.064)	(1.285.961)	(80.951)
	1.4.5	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-	-	-
	1.4.6	Eksposur sekuritisasi	-	-	-	-
	1.4.7	Faktor pengurang modal inti utama lainnya	-	-	-	-
		1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau *Tier* 2 pada bank lain	-	-	-	-
		1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-	-	-
		1.4.7.3 Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (*settlement risk*) - *Non Delivery Versus* Payment	-	-	-	-
		1.4.7.4 Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada)	-	-	-	-
2	Modal Inti Tambahan/Additional *Tier* 1 (AT 1)		-	-	-	-
	2.1	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1	-	-	-	-
	2.2	Agio/Disagio	-	-	-	-
	2.3	Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	-	-	-	-
		2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau *Tier* 2 pada bank lain	-	-	-	-
		2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-	-	-
II	Modal Pelengkap (Tier 2)		4.436.444	4.543.487	4.527.153	4.626.967
1	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan *Tier* 2		2.976.753	2.976.753	3.113.500	3.113.500
	1.1	Saham preferen (*perpetual* kumulatif, *non perpetual*), setelah dikurangi pembelian kembali	-	-	-	-
	1.2	Surat berharga subordinasi (*perpetual* kumulatif, *non perpetual*), setelah dikurangi pembelian kembali	-	-	-	-
	1.3	Pinjaman subordinasi (*perpetual* kumulatif, *non perpetual*), setelah dikurangi pembelian kembali	3.079.400	3.079.400	3.113.500	3.113.500
	1.4	*Mandatory convertible bond*	-	-	-	-
	1.5	Penerbitan tier 2 oleh perusahaan anak berupa bank dan non bank yang dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)	-	-	-	-
	1.6	Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa (-)	102.647	102.647	-	-
2	Agio/Disagio		-	-	-	-
3	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)		1.459.691	1.566.734	1.413.653	1.513.467
4	Faktor Pengurang Modal Pelengkap		-	-	-	-
	4.1	*Sinking Fund*	-	-	-	-
	4.2	Penempatan dana pada instrumen *Tier* 2 pada bank lain	-	-	-	-
	4.3	Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-	-	-
TOTAL MODAL			35.452.414	41.157.380	33.705.339	39.593.006

	31 Desember 2023 Diaudit		31 Desember 2022 Diaudit	
	Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian
Aset Tertimbang Menurut Risiko				
ATMR Risiko Kredit	116.728.894	125.294.554	113.060.445	121.057.375
ATMR Risiko Pasar	1.856.501	1.856.501	717.272	717.272
ATMR Risiko Operasional	10.225.433	10.500.842	16.171.334	23.316.768
Total ATMR	128.810.828	137.651.897	129.949.051	145.091.415
Rasio KPMM Sesuai Profil Risiko (%)	9,21%	9,21%	9,23%	9,23%
Alokasi Pemenuhan KPMM Sesuai Profil Risiko				
Dari CET 1 (%)	6,00%	6,00%	6,00%	6,04%
Dari AT 1 (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dari *Tier* 2 (%)	3,21%	3,21%	3,23%	3,19%
Rasio KPMM				
Rasio CET 1 (%)	24,08%	26,60%	22,45%	24,10%
Rasio *Tier* 1 (%)	24,08%	26,60%	22,45%	24,10%
Rasio *Tier* 2 (%)	3,44%	3,30%	3,48%	3,19%
Rasio KPMM (%)	27,52%	29,90%	25,94%	27,29%
CET 1 Untuk Buffer (%)	18,08%	20,60%	16,45%	18,06%
Persentase Buffer yang Wajib Dipenuhi oleh Bank (%)				
Capital Conservation Buffer (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Countercyclical Buffer (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah	
		Individu	Konsolidasi
1	Total aset di neraca pada laporan keuangan publikasi. (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN)	184.655.061	206.076.033
	Penyesuaian:		
2	Penyesuaian untuk nilai investasi pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi dan/ atau entitas lain berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan OJK mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada neraca maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	-	-
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).		
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen neraca berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio *Leverage*.		
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi *cash pooling* yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	2.382.128	2.382.128
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT) sebagai contoh transaksi Reverse Repo.	-	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK).	20.500.903	20.500.903
11	*Prudent valuation adjustments* berupa faktor pengurang modal dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).	(5.539.733)	(5.819.611)
12	Penyesuaian lainnya	-	-
13	**Total eksposur dalam perhitungan Rasio *Leverage* (Penjumlahan baris 1 + baris 2 s.d baris 12)**	**201.998.359**	**223.139.453**

Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Individu		Konsolidasi	
		T	T - 1	T	T - 1
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan					
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT. (Nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN)	183.521.912	176.662.173	204.942.884	198.355.474
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan.	-	-	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)	(3.413.725)	(3.124.889)	(4.627.641)	(4.073.173)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	(2.126.008)	(2.116.993)	(1.191.970)	(1.177.764)
7	**Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6**	**177.982.179**	**171.420.291**	**199.123.273**	**193.104.537**
Eksposur Transaksi Derivatif					
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	1.584.073	2.181.719	1.584.073	2.181.719
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	1.931.204	1.629.109	1.931.204	1.629.109
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui *central counterparty* (CCP))	-	-	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional yang efektif dari derivatif kredit	-	-	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan *add-on* untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	-	-	-	-
13	**Total Eksposur Transaksi Derivatif Penjumlahan dari baris 8 sampai dengan baris 12**	**3.515.277**	**3.810.828**	**3.515.277**	**3.810.828**
Eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT)					
14	Nilai tercatat aset SFT secara *gross*	-	-	-	-
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan *current exposure* sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	-	-	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-	-	-
18	**Total Eksposur SFT Penjumlahan dari baris 14 sampai dengan baris 17**	**-**	**-**	**-**	**-**
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)					
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi	121.956.264	125.513.631	121.956.264	125.519.879
	Nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN				
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(101.400.334)	(103.384.258)	(101.400.334)	(103.389.882)
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	(55.027)	(58.417)	(55.027)	(58.417)
22	**Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21**	**20.500.903**	**22.070.956**	**20.500.903**	**22.071.580**
Modal dan Total Eksposur					
23	Modal Inti	31.015.970	30.582.124	36.613.893	36.474.300
24	**Total Eksposur (7+ 13+ 18 +22)**	**201.998.359**	**197.302.075**	**223.139.453**	**218.986.945**
Rasio Pengungkit					
25	Nilai Rasio pengungkit termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	15,35%	15,50%	16,41%	16,66%
25a	Nilai Rasio Pengungkit tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualisan sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi kentetnuan giro wajib minumum (jika ada)	15,35%	15,50%	16,41%	16,66%
26	Nilai Mininum Rasio Pengungkit	3%	3%	3%	3%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A	N/A	N/A

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Individu		Konsolidasi	
		T	T - 1	T	T - 1
	PENGUNGKAPAN NILAI RATA - RATA				
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT				
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara *gross*, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT				
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28				
30a	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28				
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28				
31a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28				

Secara umum, komponen permodalan didominasi oleh modal yang bersifat permanen. Modal inti merupakan unsur terbesar dari modal Bank. Pada Desember 2023, posisi rasio modal inti terhadap ATMR adalah sebesar 26,6% (konsolidasi). Rasio tersebut jauh di atas ketentuan KPMM minimum dari Otoritas Jasa Keuangan. Bank juga akan berupaya terus untuk mempertahankan KPMM pada tingkat yang sehat.

Struktur permodalan Bank secara konsolidasi didominasi oleh modal inti (89,0% dari total modal Bank BTPN secara konsolidasi). Permodalan tersebut terdiri dari modal disetor dan cadangan modal tambahan di antaranya agio dan laba ditahan.

Sumber-sumber permodalan yang diharapkan dapat ditempuh oleh Bank untuk merealisasikan rencana permodalan ataupun memenuhi kebutuhan permodalan Bank adalah berasal dari Laba Ditahan dan tambahan modal dari pemegang saham, baik melalui *rights issue* ataupun penawaran umum. Akumulasi Laba Ditahan dipengaruhi oleh besarnya dividen yang dibayarkan Bank kepada para pemegang saham yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam menentukan pembayaran dividen, Bank selalu mempertimbangkan kecukupan modal baik dari segi pemenuhan KPMM maupun pemenuhan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai dengan rencana pertumbuhan kredit di masa depan. Modal Bank diproyeksikan meningkat sejalan dengan akumulasi laba.

Total modal Bank per 31 Desember 2023 sebesar Rp41,2 Triliun, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022 yang sebesar Rp39,6 triliun, yang terutama dikontribusikan oleh peningkatan saldo laba.

Kecukupan Modal

BTPN menggunakan standar rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal sesuai dengan standar industri. Pendekatan OJK untuk mengukur modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia dan Bank secara berkesinambungan menerapkan Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP) sesuai peraturan yang berlaku.

Hal itu berkenaan dengan penetapan kecukupan modal sesuai dengan ketentuan profil risiko Bank. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Bank dalam penerapan manajemen risiko.

Bank menggunakan Pendekatan Standar dalam mengelola modal atas risiko kredit. Perhitungan ATMR secara umum dilakukan dengan mengacu pada bobot risiko sesuai dengan ketentuan OJK dan hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang telah ditetapkan oleh pihak regulator.

Bank menghitung kecukupan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Standar (SA). Berdasarkan metode tersebut, Bank mengalokasikan modal minimum untuk risiko operasional berdasarkan perkalian antara Komponen Indikator Bisnis (KIB) dengan Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI).

Dalam penghitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan metode standar sesuai dengan ketentuan OJK mengenai perhitungan ATMR Risiko Pasar. Manajemen Bank memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola permodalan. Bank memandang perencanaan permodalan sebagai elemen penting untuk mewujudkan tujuan strategis.

Bank dengan melakukan analisis atas kecukupan modal Bank untuk saat ini dan masa yang akan datang melalui proses perencanaan strategis. Hal ini ditunjukkan dengan mempertahankan kinerja Bank dan perusahaan induknya melalui pengawasan yang berkesinambungan terhadap kualitas manajemen risiko, audit berkala oleh Satuan Kerja Internal Audit, kebijakan yang memadai tentang pembagian dividen, serta komitmen manajemen terhadap strategi dan target Bank sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Rasio permodalan Bank termasuk sangat baik, yaitu di atas persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tren pertumbuhan modal berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) juga menunjukkan kemampuan untuk mendukung ekspansi usaha Bank ke depan.

Demikian pula jika dikaitkan dengan insentif untuk kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Nilai KPMM Bank telah memenuhi ketentuan minimum yang dipersyaratkan OJK, yakni 8,0%-14,0%. Sesuai dengan hasil penilaian mandiri atas profil risiko Bank, posisi KPMM berdasarkan profil risiko per Desember 2023 adalah 9,2%.

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

A. Risiko Kredit

Risiko kredit pada Bank BTPN merupakan prinsip kehati-hatian untuk mencegah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit



Strategi Manajemen Risiko Kredit

Bank menerapkan strategi manajemen risiko sejalan dengan strategi bisnis secara keseluruhan, dengan memerhatikan *credit risk appetite framework* serta melakukan *monitorin*g secara berkala sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur kredit Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan kredit, prosedur internal, peraturan dan perundang-undangan, serta ketentuan lain yang berlaku.

Strategi manajemen risiko kredit yang terstruktur disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum berikut:
1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi.
2. Komprehensif untuk dapat mengendalikan dan mengelola risiko beserta mitigasinya.

Strategi manajemen risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
1. Perkembangan ekonomi dan bisnis serta dampak yang mungkin terjadi akibat risiko yang dihadapi oleh Bank.
2. Struktur organisasi Bank termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung dalam menjalankan bisnis bank dan kemampuan Bank untuk mengelola risiko.
3. Komposisi serta diversifikasi portofolio Bank.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit

Dalam mengelola risiko konsentrasi kredit, yang dipantau secara ketat oleh Bank, antara lain eksposur sektor industri, jenis kredit tertentu serta eksposur perorangan dan grup usaha. Hasil pemantauan selalu dievaluasi sebagai bagian dari deteksi dini.

Kerangka Manajemen Risiko Kredit

Pengukuran risiko kredit dilakukan berdasarkan portofolio dan transaksional. Pengukuran tersebut dapat menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif sesuai ketentuan standar dari Bank Indonesia, OJK dan/atau *best practise* yang diadopsi atau model internal yang dikembangkan oleh Bank. Pengukuran risiko kredit, antara lain dilakukan melalui dua hal yaitu peringkat risiko dan *stress test*.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Kebijakan perkreditan merupakan pedoman dalam pelaksanaan proses kredit yang dilakukan oleh Bank. Kebijakan perkreditan BTPN mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum.

Bank senantiasa melakukan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur di bidang kredit secara berkala, terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan manajemen risiko kredit yang sesuai dengan standar global sebagai Bank yang aktif secara internasional dan menjalankan kredit secara wajar dan terorganisir demi budaya kredit Bank yang lebih baik.

Bank dikategorikan sebagai salah satu bank sistemik di Indonesia. Oleh karena itu, BTPN telah menyusun Laporan Rencana Pemulihan (*Recovery Plan Document*), termasuk aspek kualitas aset. Rencana pemulihan tersebut mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk memulihkan kekuatan dan kelayakan finansial jika Bank menghadapi tekanan yang berat, terutama dalam hal kualitas asset serta telah membuat dokumen rencana resolusi.

Bank secara aktif terus mengelola dan mengawasi penerapan manajemen risiko dan secara efektif melakukan penyempurnaan kebijakan, prosedur dan pengembangan sistem manajemen risiko.

Selain menetapkan kebijakan dan prosedur, Bank juga menetapkan batasan (limit) untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan *risk appetite* Bank. Limit tersebut, antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambil keputusan dan tingkat risikonya serta memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam proses kredit yang diberikan kepada nasabah.

Sementara penetapan BMPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK yaitu POJK No. 32/ POJK.03/2018 berikut perubahannya pada POJK No. 38/POJK/.03/2019 dengan memperhatikan peraturan terkini.

Bank mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit di mana pun risiko tersebut teridentifikasi. Khususnya, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Kerangka kerja pengelolaan risiko kredit BTPN diimplementasikan melalui proses terintegrasi yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian/mitigasi risiko. Proses identifikasi, antara lain mulai dari penentuan sektor industri atau segmen nasabah yang akan dibiayai, analisis atas pengajuan kredit nasabah serta analisis atas produk dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko kredit dengan melakukan kajian risiko terhadap Program Produk Kredit serta potensi kenaikan eksposur risiko kreditnya.

Berdasarkan proses identifikasi tersebut, Bank mengukur risiko kredit dengan indikator utama yang menunjukkan kualitas kredit debitur, seperti rasio kredit bermasalah atau NPL. Bank secara berkala mengukur

kualitas aset berkualitas rendah serta melakukan pengawasan terhadap debitur yang termasuk dalam *watchlist account*. Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit, *stress testing* diterapkan untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi ekstrem.

Sistem pengukuran risiko kredit harus mempertimbangkan karakteristik produk, jangka waktu, aspek jaminan, potensi gagal bayar (*default*) dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan. Bank juga melakukan proses kuantifikasi, antara lain atas komposisi portofolio aset meliputi jenis, fitur eksposur, pertumbuhan kredit, kecukupan pencadangan, tingkat konsentrasi dan kualitas penyediaan dana, termasuk tingkat aset bermasalah dan aset yang telah diambil alih.

Bank memantau eksposur risiko kredit aktual dibandingkan limit risiko kredit. Selain itu, memantau juga pengelolaan kredit yang bermasalah serta memantau kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko kredit.

Pengembangan sistem informasi manajemen dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat menyajikan informasi risiko kredit secara berkala. Sistem Informasi Manajemen yang tersedia mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu untuk memperbaiki kualitas kredit yang menurun atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

BTPN secara seksama memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit. Hal itu dilakukan melalui deteksi dini terhadap permasalahan dan melakukan pemantauan yang ketat.

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Kredit

Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengelola risiko yang membahayakan kelangsungan usaha Bank. Contohnya adalah penerapan prosedur penanganan kredit bermasalah yang efektif, yaitu dengan memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dari fungsi pemutus kredit.

Hasil dari penanganan kredit yang bermasalah harus didokumentasikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyalurkan atau merestrukturisasi kredit. Risiko kredit juga dapat dikendalikan melalui mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portofolio secara aktif dan penetapan target batasan risiko konsentrasi.

Definisi Aset *Non-Performing*

Penggolongan aset harus dilaksanakan untuk aktiva produktif dan aktiva nonproduktif. Pada prinsipnya ketentuan mengenai kualitas aktiva mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penetapan kualitas kredit untuk kredit segmen ritel dan SME dibawah 5 Miliar berdasarkan ketepatan pembayaran. Sedangkan untuk segmen SME diatas 5 Miliar, komersial, dan korporasi berdasarkan faktor penilaian 3 pilar.

Definisi Tagihan yang Melewati Jatuh Tempo

Tagihan yang telah melewati jatuh tempo adalah seluruh tagihan yang telah tertunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga.

Definisi Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai

Bank melakukan evaluasi aset keuangan/kelompok aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal neraca. Tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment* ditentukan berdasarkan aset keuangan/ kelompok aset keuangan yang terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan). Peristiwa yang merugikan itu berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara akurat.

Pendekatan untuk Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Bank telah menerapkan PSAK 71 untuk mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan. Ketentuan itu mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (ECL 12 bulan) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (ECL *lifetime*).

ECL *lifetime* adalah ekspektasi kerugian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasi suatu instrument keuangan. Sedangkan ECL 12 bulan merupakan porsi dari ekspektasi kerugian kredit yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian ialah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas merupakan selisih antara arus kas yang diperkirakan akan diterima entitas. Mengingat kerugian kredit ekspektasian

mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian kredit tetap timbul meskipun entitas mengharapkan untuk dibayar penuh namun setelah jatuh tempo.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Loss* (ECL) diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect* atau *hold to collect and sell* serta memiliki arus kas SPPI. ECL tidak diakui untuk instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL dan instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko bersifat kompleks dan membutuhkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi terkait dengan perubahan kondisi pasar, arus kas yang diharapkan dan berjalannya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, dari rasio kerugian yang terkait dan korelasi gagal bayar antar pihak. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD), *Loss Given Default* (LGD) dan variabel makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Sesuai PSAK 71, Bank menerapkan model "Tiga-Tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti dirangkum di bawah ini:

1. Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai kredit sejak pengakuan awal diklasifikasikan dalam "Tahap 1".
2. Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit ("SICR") sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum dianggap mengalami penurunan nilai kredit.
3. Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai kredit, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3" PSAK 71 tidak berlaku terhadap Entitas Anak yang merupakan suatu entitas berbasis syariah.

Pendekatan Standar yang Digunakan untuk Risiko Kredit

Dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Melalui pendekatan tersebut, Aset Tertimbang Menurut Risiko kredit dihitung berdasarkan jenis kategori portfolio dan bobot risiko. Bobot risiko ditetapkan antara lain berdasarkan hasil peringkat debitur atau pihak lawan yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan, serta berdasarkan persentase tertentu untuk kategori portofolio tertentu.

Portofolio kelompok tagihan dibagi dalam kategori tagihan antara lain kepada pemerintah, tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional, tagihan berupa *covered bond*, kredit beragun rumah tinggal, kredit beragun properti komersial, tagihan kepada entitas sektor publik, tagihan kepada bank, tagihan kepada pegawai dan pensiun, tagihan kepada usaha mikro, kecil dan portofolio ritel, tagihan kepada korporasi dan tagihan yang telah jatuh tempo, tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain; tagihan berupa surat berharga/piutang subordinasi, ekuitas, dan instrumen modal lainnya.

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit

Bank mengadopsi serangkaian kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Dalam menghitung ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar, keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dapat diakui sebagai teknik mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan regulator.

Kriteria Agunan yang Diterima

Jenis-jenis agunan yang diterima antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan/atau bangunan
2. Kendaraan
3. Peralatan (termasuk mesin dan alat berat)
4. *Cash collateral*
5. SBLC
6. Piutang
7. Persediaan

Pengelolaan Agunan oleh BTPN

Bagi Bank agunan merupakan *second way out* untuk mengurangi risiko kerugian. Bank hanya menerima agunan yang dapat dinilai dan dijual, dengan biaya yang wajar dan bebas dari segala bentuk perikatan lainnya dan bebas dari sengketa. Penilaian agunan wajib dilakukan sebelum persetujuan dan perpanjangan fasilitas atau dalam rangka upaya penyelamatan kredit.

Selama jangka waktu kredit berlangsung harus dilakukan penilaian dan peninjauan kembali agunan yang frekuensi dan kriterianya ditetapkan dalam aturan perkreditan. Pengikatan perjanjian agunan adalah suatu prasyarat bagi peralihan hukum dari sebuah agunan dan wajib dilakukan sebelum pencairan kredit.

Kebijakan dalam Penggunaan Peringkat

Credit Scoring & *Grading* merupakan model yang digunakan untuk memprediksi kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya dan analisa debitur dengan mempergunakan data historis atau referensi data yang diperoleh dari sumber data yang lain. *Credit scoring* dan *grading* merujuk kepada perangkat yang sama. Terminologi *scoring* secara internal digunakan untuk kredit mikro ke bawah dan *grading* digunakan untuk kredit SME, komersial dan korporasi.

Pembuatan dan penggunaan *scoring model/grading* sudah dituangkan dalam SOP masing-masing bisnis. Manajemen Risiko sebagai unit yang independen melakukan *monitoring* dan *review* atas pengembangan & pelaksanaan *credit scoring/grading* yang dilakukan oleh unit bisnis.

Kebijakan Penggunaan Lembaga Pemeringkat

Terhadap beberapa transaksi yang dilakukan Bank, terutama terkait surat berharga dan penempatan, Bank wajib telah menetapkan limit yang mempertimbangkan peringkat atau *rating* oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia/OJK.

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1) - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b	c	d	e	f	g
1	Kredit	1.762.053	143.411.384	3.404.131	2.772.649	631.482		141.769.306
2	Surat Berharga	-	8.547.320	799	96	703		8.546.521
3	Transaksi Rekening Administratif	-	121.956.266	52.991	23.545	29.446		121.903.275
	Total	**1.762.053**	**273.914.970**	**3.457.921**	**2.796.290**	**661.631**		**272.219.102**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b	c	d	e	f	g
1	Kredit	2.096.569	154.629.619	4.618.047	2.772.649	1.845.398		152.108.141
2	Surat Berharga	-	17.194.076	799	96	703		17.193.277
3	Transaksi Rekening Administratif	-	121.956.266	52.991	23.545	29.446		121.903.275
	Total	**2.096.569**	**293.779.961**	**4.671.837**	**2.796.290**	**1.875.547**		**291.204.693**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2) - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	1.693.475
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	326.933
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	38.958
4	Nilai hapus buku	3.648.768
5	Perubahan lain	3.429.371
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)	**1.762.053**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	2.057.724
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	654.745
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	48.100
4	Nilai hapus buku	3.995.103
5	Perubahan lain	3.427.303
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)	**2.096.569**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK (CR3) - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/ atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	126.204.150	14.981.181	14.974.194	6.987	
2	Surat Berharga	8.546.521	-	-	-	
3	**Total**	**134.750.671**	**14.981.181**	**14.974.194**	**6.987**	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	579.524	4.451	4.451	-	

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK (CR3) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/ atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	136.318.516	14.981.181	15.013.475	192.175	
2	Surat Berharga	17.193.277	-	-	-	
3	**Total**	**153.511.793**	**14.981.181**	**15.013.475**	**192.175**	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	612.288	4.451	4.451	-	

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK (CR4) Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-rata Bobot Risiko e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	24.851.253	-	24.851.253	-	-	0.00%
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	13.188.428	6.901.498	13.188.428	740.885	9.634.880	69,17%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0.00%
4	Tagihan kepada Bank	3.981.135	74.196	3.981.135	7.420	1.434.195	35,96%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain [1]	23.817.231	20.018.328	23.817.231	2.811.572	10.059.728	37,78%
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	0.00%
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposure Korporasi Umum [2]	68.002.877	85.725.915	68.002.877	13.837.573	67.733.947	82.76%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain [3]	-	-	-	-	-	0.00%
	Eksposure Pembiayaan Khusus [4]	2.001.243	1.039.128	2.001.243	415.651	1.156.861	47,87%
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	22.522	-	22.522	-	56.305	250.00%
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	5.825.046	4.805.826	5.825.046	528.554	4.809.697	75.70%
9	Kredit Pegawai atau Pensiunan	21.019.557	-	21.019.557	-	10.509.779	50.00%
10	Kredit Beragun Properti	10.277.427	3.367.830	10.277.427	336.783	5.502.684	51.84%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	3.744.135	1.002.414	3.744.135	100.241	1.436.947	37,38%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0.00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	6.533.292	2.365.416	6.533.292	236.542	4.065.737	60,06%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0.00%
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	0.00%
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	584.001	-	584.001	-	584.439	100.07%
12	Aset Lainnya	4.626.837	-	4.626.837	-	3.724.318	80,49%
13	**Total**	**178.197.557**	**121.932.721**	**178.197.557**	**18.678.438**	**115.206.833**	**58,52%**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK (CR4)
Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-rata Bobot Risiko e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	33.147.215	-	33.147.215	-	-	0,00%
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	13.644.431	6.901.498	13.644.431	740.885	9.862.882	68,56%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0,00%
4	Tagihan kepada Bank	4.804.423	74.196	4.804.423	7.420	1.598.853	33,23%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain [1]	23.817.231	20.018.328	23.817.231	2.811.572	10.059.728	37,78%
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	0,00%
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposure Korporasi Umum [2]	68.102.750	85.725.915	68.102.750	13.837.573	67.814.010	82,76%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain [3]	19.472	-	19.472	-	-	0,00%
	Eksposure Pembiayaan Khusus [4]	2.001.243	1.039.128	2.001.243	415.651	1.156.861	47,87%
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	22.522	-	22.522	-	56.305	250,00%
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	16.091.837	4.805.826	16.091.837	528.554	12.407.936	74,65%
9	Kredit Pegawai atau Pensiunan	21.019.557	-	21.019.557	-	10.509.779	50,00%
10	Kredit Beragun Properti	10.277.427	3.367.830	10.277.427	336.783	5.502.684	51,84%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	3.744.135	1.002.414	3.744.135	100.241	1.436.947	37,38%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	6.533.292	2.365.416	6.533.292	236.542	4.065.737	60,06%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	0,00%
11	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	616.765	-	616.765	-	617.203	100,07%
12	Aset Lainnya	5.583.714	-	5.583.714	-	4.184.042	74,93%
13	**Total**	**199.148.587**	**121.932.721**	**199.148.587**	**18.678.438**	**123.770.283**	**56,82%**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5) - Bank Secara Individu

	Kategori Portofolio	0%	20%	50%
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24.851.253	-	-

	Kategori Portofolio	20%	50%
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	10.991.166

	Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%
4	Tagihan Kepada Bank	2.615.648	-	-	470.857
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	14.332.301	2.905.190	-	692.135

	Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	50%	65%	75%	80%
6	Tagihan Kepada Korporasi Umum[2)]	4.926.644	1.403.822	-	7.130.861	-
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain[3)]	-	-	-	-	
	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]	-	-		-	186.947

	Kategori Portofolio	100%	150%	250%
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	22.522

	Kategori Portofolio	45%	75%
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	48.759	5.905.275

	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%
9	Kredit Beragun Properti	-	1.195.880	-	791.759	-	391.082	-	2.362.758	3.370.816
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	1.195.880	-	791.759		391.082		379.039	
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5)]	-	-	-	-		-		-	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5)]		1.195.880							
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5)]	-	-		791.759		391.082		379.039	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				-	-				-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-		-		-		1.983.719	3.370.816
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5)]	-	-		-		-		-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5)]									3.370.816
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5)]	-	-		-		-		1.983.719	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti									
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi[5)]									

	Kategori Portofolio	50%	100%
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	102.154	374.367

	Kategori Portofolio	0%	20%	100%
11	Aset Lainnya	931.530	-	3.637.286

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

(dalam jutaan rupiah)

100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	-	24.851.253

100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
150.959	2.787.189	-	13.929.313

100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	-	-

75%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
902.050	-	-	-	3.988.555
8.699.177	-	-	-	26.628.803

35%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	-	-	-

85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
1.274.430	66.884.036	-	220.657	-	81.840.450
-	-		-	-	-
	1.051.884	1.178.063	-	-	2.416.894

400%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	22.522

85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	399.566	-	6.353.600

65%	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	1.381.029	1.521	-	-	-	-	-	1.119.365	10.614.210
-	-	12.468	-		-			-	1.074.148	3.844.376
-	-	12.468	-		-			-	-	12.468
									1.074.148	2.270.029
-		-	-		-			-	-	1.561.880
		-				-		-	-	-
-		1.368.561	1.521		-			-	45.217	6.769.834
									45.217	45.217
									-	3.370.816
-		1.368.561	1.521		-			-	-	3.353.801
	-			-			-	-	-	-
					-			-	-	-

150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
107.480	-	584.001

150%	1250%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
58.021	-	-	4.626.837

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	50.209.978	19.224.708	76.15%	52.873.188
2	40% - 70%	40.094.151	12.032.803	79.81%	41.604.271
3	75%	22.223.056	13.219.276	67,90%	24.063.608
4	80%	186.947	-	100.00%	186.947
5	85%	1.211.923	578.680	71,26%	1.275.951
6	90% - 100%	60.031.677	75.699.755	53,41%	72.498.098
7	105% - 130%	1.178.063	-	100.00%	1.178.063
8	150%	3.039.240	1.177.499	75,26%	3.173.347
9	250%	22.522	-	100.00%	22.522
10	400%	-	-	0.00%	-
11	1250%	-	-	0.00%	-
	Total Tagihan Bersih	**178.197.557**	**121.932.721**	**65.60%**	**196.875.995**

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

	Kategori Portofolio	0%	20%	50%
1	Tagihan Kepada Pemerintah	33.147.215	-	-

	Kategori Portofolio	20%	50%
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	11.447.169

	Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%
4	Tagihan Kepada Bank	3.438.936	-	-	470.857
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	14.332.301	2.905.190	-	692.135

	Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	50%	65%	75%	80%
6	Tagihan Kepada Korporasi Umum[2)]	4.926.644	1.403.822	-	7.130.861	-
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain[3)]	-	19.472	-	-	
	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]	-	-		-	186.947

	Kategori Portofolio	100%	150%	250%
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	22.522

	Kategori Portofolio	45%	75%
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	48.759	16.172.066

(dalam jutaan rupiah)

	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	-	33.147.215

100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
150.959	2.787.189	-	14.385.316

100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	-	-

75%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
902.050	-	-	-	4.811.843
8.699.177	-	-	-	26.628.803

35%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	-	-	-

85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
1.274.430	66.983.909	-	220.657	-	81.940.323
-	-		-	-	19.472
	1.051.884	1.178.063	-	-	2.416.894

400%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	-	22.522

85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-	399.566	-	16.620.391

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

	Kategori Portofolio	0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%
9	Kredit Beragun Properti	-	1.195.880	-	791.759	-	391.082	-	2.362.758	3.370.816
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	1.195.880	-	791.759		391.082		379.039	
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5)]	-	-	-	-		-		-	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5)]		1.195.880							
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5)]	-	-		791.759		391.082		379.039	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				-	-		-		-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-		-		-		1.983.719	3.370.816
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5)]	-	-		-		-		-	-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5)]									3.370.816
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5)]	-	-		-		-		1.983.719	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti									
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi[5)]									

	Kategori Portofolio	50%	100%
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	102.154	407.131

	Kategori Portofolio	0%	20%	100%
11	Aset Lainnya	1.428.683	-	4.097.010

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	59.826.381	19.224.708	79,05%	62.489.591
2	40% - 70%	40.569.626	12.032.803	80,00%	42.079.746
3	75%	32.489.847	13.219.276	75,11%	34.330.399
4	80%	186.947	-	100,00%	186.947
5	85%	1.211.923	578.680	71,26%	1.275.951
6	90% - 100%	60.624.038	75.699.755	53,62%	73.090.459
7	105% - 130%	1.178.063	-	100,00%	1.178.063
8	150%	3.039.240	1.177.499	75,26%	3.173.347
9	250%	22.522	-	100,00%	22.522
10	400%	-	-	0,00%	-
11	1250%	-	-	0,00%	-
	Total Tagihan Bersih	**199.148.587**	**121.932.721**	**67,84%**	**217.827.025**

(dalam jutaan rupiah)

	65%	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	1.381.029	1.521	-	-	-	-	-	1.119.365	10.614.210
	-	-	12.468	-		-			-	1.074.148	3.844.376
	-	-	12.468	-		-			-	-	12.468
										1.074.148	2.270.029
	-		-	-		-			-	-	1.561.880
			-				-		-	-	-
	-		1.368.561	1.521		-			-	45.217	6.769.834
										45.217	45.217
									-	-	3.370.816
	-		1.368.561	1.521		-			-	-	3.353.801
		-			-			-	-	-	-
						-			-	-	-

	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	107.480	-	616.765

	150%	1250%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	58.021	-	-	5.583.714

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah					
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	24.863.282	-	-	-	-	24.863.282
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	12.796.683	-	1.132.630	-	-	13.929.313
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	5.023.097	2.596	24.359	1.630	1.612.714	6.664.396
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	26.992.439	-	223.161	-	-	27.215.600
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	22.522	-	-	-	-	22.522
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.841.679	61.068	656.306	285.323	-	3.844.376
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.742.278	119.536	1.157.521	750.499	-	6.769.834
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	10.116.020	1.503.681	4.349.395	5.050.461	-	21.019.557
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.766.800	254.730	1.259.539	915.232	157.299	6.353.600
13	Tagihan kepada Korporasi	72.561.719	80.619	6.603.517	4.678.425	573.674	84.497.954
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	416.791	10.152	100.801	55.566	691	584.001
15	Aset Lainnya	4.626.837	-	-	-	-	4.626.837
	Total	**168.770.147**	**2.032.382**	**15.507.229**	**11.737.136**	**2.344.378**	**200.391.272**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah					
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	33.159.244	-	-	-	-	33.159.244
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	13.252.686	-	1.132.630	-	-	14.385.316
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	5.846.385	2.596	24.359	1.630	1.612.714	7.487.684
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	26.992.439	-	223.161	-	-	27.215.600
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	22.522	-	-	-	-	22.522
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.841.679	61.068	656.306	285.323	-	3.844.376
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.742.278	119.536	1.157.521	750.499	-	6.769.834
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	10.116.020	1.503.681	4.349.395	5.050.461	-	21.019.557
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	10.163.491	708.631	4.088.332	1.502.638	157.299	16.620.391
13	Tagihan kepada Korporasi	72.681.064	80.619	6.603.517	4.678.425	573.674	84.617.299
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	444.005	10.939	104.373	56.757	691	616.765
15	Aset Lainnya	5.282.254	33.081	203.644	64.735	-	5.583.714
	Total	**185.544.067**	**2.520.151**	**18.543.238**	**12.390.468**	**2.344.378**	**221.342.302**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Bank Secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolioa	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka waktu					
		<1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	>5 Tahun	Tanpa Kontrak	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	13.584.183	2.588.274	3.590	74.080	8.613.155	24.863.282
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.472.603	4.105.828	7.199.923	150.959	-	13.929.313
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.852.012	1.907.451	430.682	515.519	958.732	6.664.396
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	5.115.960	5.323.646	14.605.120	2.170.874	-	27.215.600
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	22.522	22.522
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	3.022.677	211.642	482.624	127.433	-	3.844.376
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5.475.166	500.420	359.115	435.133	-	6.769.834
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	284.154	1.957.541	3.650.717	15.127.145	-	21.019.557
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.868.407	1.853.780	441.659	2.189.754	-	6.353.600
13	Tagihan kepada Korporasi	33.397.330	31.309.677	11.920.250	7.870.697	-	84.497.954
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	395.877	92.328	27.725	68.071	-	584.001
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	4.626.837	4.626.837
	Total	**68.468.369**	**49.850.587**	**39.121.405**	**28.729.665**	**14.221.246**	**200.391.272**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolioa	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka waktu					
		<1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	>5 Tahun	Tanpa Kontrak	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	18.429.498	4.476.208	555.442	421.498	9.276.598	33.159.244
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.777.786	4.206.558	7.250.013	150.959	-	14.385.316
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.658.181	1.917.451	430.682	515.519	965.851	7.487.684
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	5.115.960	5.323.646	14.605.120	2.170.874	-	27.215.600
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	22.522	22.522
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	3.022.677	211.642	482.624	127.433	-	3.844.376
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5.475.166	500.420	359.115	435.133	-	6.769.834
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	284.154	1.957.541	3.650.717	15.127.145	-	21.019.557
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	9.533.532	4.452.322	444.758	2.189.779	-	16.620.391
13	Tagihan kepada Korporasi	33.432.155	31.314.133	11.920.250	7.870.697	80.064	84.617.299
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	426.829	94.107	27.758	68.071	-	616.765
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	5.583.714	5.583.714
	Total	**82.155.938**	**54.454.028**	**39.726.479**	**29.077.108**	**15.928.749**	**221.342.302**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
Desember 2023							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.354.139,00	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	455.123,00	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	4.480.612,00	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	2.787.189,00	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	2.717.118,00	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	15.753,00	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	24.863.282,00	119.379,00	-	6.664.396,00	-	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	
20	ktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	-	-	-	-	-	
	Total	**24.863.282**	**13.929.313**	**-**	**6.664.396**	**-**	

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

(dalam jutaan Rupiah)

Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
-	-	46.445	130.429	-	-	43.494	3.988.906	2.450	-
-	-	12.928	19.460	-	-	6.197	4.038.231	2.725	-
-	-	965.447	2.276.185	-	-	157.178	34.223.398	190.171	-
-	-	12.833	5.111	-	-	1.701	913.252	269	-
-	-	22.953	41.855	-	-	8.627	342.520	-	-
-	-	357.548	329.286	-	-	85.534	2.069.002	31.620	-
78.432	-	2.059.249	3.472.720	-	-	769.373	15.592.102	219.584	-
-	-	126.068	184.524	-	-	16.165	2.213.674	5.646	-
-	-	64.843	30.087	-	-	12.808	52.759	13.943	-
-	-	14.944	70.188	-	-	193	8.195.651	-	-
27.122.168	22.514	-	-	-	-	-	58.526	-	-
-	-	-	8.140	-	-	1.688	1.191.266	-	-
-	-	8.522	11.105	-	-	-	2.468.554	-	-
-	-	64.688	137.892	-	-	10.555	3.898.370	6.954	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
-	-	11.778	10.582	-	-	3.544	-	-	-
-	-	749	3.791	-	-	-	225.434	-	-
-	-	63.395	14.322	-	-	117.292	41.107	1.914	-
-	-	336	-	-	-	6.404	-	281	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11.650	24.157	-	21.019.557	5.090.893	6.555	108.444	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.000	8	-	-	-	-	21.950	4.978.647	-	4.626.837
27.215.600	**22.522**	**3.844.376**	**6.769.834**	**-**	**21.019.557**	**6.353.600**	**84.497.954**	**584.001**	**4.626.837**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Desember 2023						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.354.139	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	455.123	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	4.480.612	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	2.787.189	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	2.717.118	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	15.753	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	24.863.282	119.379	-	6.664.396	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-
20	ktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-
24	Lainnya	8.295.962	456.003	-	823.288	-
	Total	**33.159.244**	**14.385.316**	**-**	**7.487.684**	**-**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

(dalam jutaan Rupiah)

Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
-	-	46.445	130.429	-	-	2.042.167	3.988.906	6.312	-
-	-	12.928	19.460	-	-	6.202	4.038.231	2.725	-
-	-	965.447	2.276.185	-	-	1.034.844	34.223.398	192.808	-
-	-	12.833	5.111	-	-	1.701	913.252	269	-
-	-	22.953	41.855	-	-	8.627	342.520	-	-
-	-	357.548	329.286	-	-	85.534	2.069.002	31.620	-
78.432	-	2.059.249	3.472.720	-	-	7.611.579	15.611.911	244.152	-
-	-	126.068	184.524	-	-	16.197	2.213.674	5.648	-
-	-	64.843	30.087	-	-	13.353	52.759	13.956	-
-	-	14.944	70.188	-	-	193	8.195.651	-	-
27.122.168	22.514	-	-	-	-	63	77.998	126	-
-	-	-	8.140	-	-	1.688	1.191.266	-	-
-	-	8.522	11.105	-	-	2	2.468.554	-	-
-	-	64.688	137.892	-	-	10.576	3.898.370	6.954	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
-	-	11.778	10.582	-	-	3.559	-	-	-
-	-	749	3.791	-	-	-	225.434	-	-
-	-	63.395	14.322	-	-	117.461	41.107	1.917	-
-	-	336	-	-	-	553.564	-	1.833	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11.650	24.157	-	21.019.557	5.090.963	6.555	108.445	-
-	-	-	-	-	-	164	-	-	-
15.000	8	-	-	-	-	21.950	5.058.711	-	5.583.714
27.215.600	**22.522**	**3.844.376**	**6.769.834**	**-**	**21.019.557**	**16.620.391**	**84.617.299**	**616.765**	**5.583.714**

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2023					
		Wilayah					
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Tagihan	264.465.892	2.508.522	17.971.670	16.415.429	1.571.620	302.933.133
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan 3)						
	a. Belum jatuh tempo	14.339.290	39.641	594.423	88.902	188.790	15.251.046
	b. Telah jatuh tempo	1.313.395	21.413	205.492	135.950	1.119	1.677.369
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 1	456.040	15.643	107.251	84.864	64	663.862
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 2	139.219	5.315	30.036	24.583	-	199.153
5	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 3	2.405.498	7.061	108.234	82.909	-	2.603.702
6	Tagihan yang dihapus buku	2.261.653	104.238	831.429	451.448	-	3.648.768

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2023					
		Wilayah					
		Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Luar Negeri	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1	Tagihan	281.989.522	3.014.026	21.089.108	17.099.287	1.571.620	324.763.563
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan 3)				-	-	
	a. Belum jatuh tempo	14.339.290	39.641	594.423	88.902	188.790	15.251.046
	b. Telah jatuh tempo	1.594.107	29.533	238.888	148.238	1.119	2.011.885
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 1	1.486.461	41.499	222.076	127.678	64	1.877.778
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 2	139.219	5.315	30.036	24.583	-	199.153
5	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 3	2.405.498	7.061	108.234	82.909	-	2.603.702
6	Tagihan yang dihapus buku	5.553.260	275.819	1.354.538	669.656	-	7.853.273

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sector Ekonomi Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Desember 2023						
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Stage 1	CKPN - Stage 2	CKPN - Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.218.774	1.868	8.882	4.445	525	6.440	-
2	Pertambangan dan Penggalian	14.092.333	-	4.659	3.458	-	1.934	-
3	Industri pengolahan	79.007.056	1.843.021	225.816	114.926	26.228	255.452	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	6.905.274	112	492	834	33	224	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.111.759	-	-	1.377	-	-	-
6	Konstruksi	9.041.263	4.097.462	68.542	17.746	3.831	42.476	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	45.548.701	901.233	836.490	184.862	47.884	401.693	2
8	Pengangkutan dan Pergudangan	6.782.070	366.780	9.756	15.831	2.615	4.767	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	204.064	1.203	26.158	4.158	284	12.271	-
10	Informasi dan Komunikasi	9.735.188	7.128	-	3.551	2.816	39	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	65.556.903	5.211.337	245.655	6.329	1.563	-	-
12	Real Estat	1.553.271	565.227	-	166	-	-	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2.920.037	13.013	-	544	899	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	5.027.317	1.378.650	11.890	11.292	8.159	5.438	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	4	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	27.053	575	-	825	91	111	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	229.974	-	-	121	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	260.061	8.081	3.331	5.433	1.004	2.028	4
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	8.122	-	515	84	-	234	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	30.451.724	231.148	235.183	186.510	62.031	123.963	12.305
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
24	Lainnya	18.252.185	624.208	-	101.370	41.190	1.746.632	3.636.457
	Total	**302.933.133**	**15.251.046**	**1.677.369**	**663.862**	**199.153**	**2.603.702**	**3.648.768**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sector Ekonomi Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Desember 2023						
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Stage 1	CKPN - Stage 2	CKPN - Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.295.583	1.868	45.925	115.763	525	6.440	185.352
2	Pertambangan dan Penggalian	14.092.375	-	4.659	3.496	-	1.934	336
3	Industri pengolahan	79.935.207	1.843.021	251.869	188.827	26.228	255.452	156.727
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	6.905.274	112	492	834	33	224	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.111.759	-	-	1.377	-	-	1
6	Konstruksi	9.041.263	4.097.462	68.542	17.746	3.831	42.476	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	53.146.642	901.233	1.091.829	1.151.558	47.884	401.693	3.552.528
8	Pengangkutan dan Pergudangan	6.782.386	366.780	9.788	16.144	2.615	4.767	3.128
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	207.258	1.203	26.313	6.950	284	12.271	61.468
10	Informasi dan Komunikasi	9.735.197	7.128	-	3.560	2.816	39	746
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	65.576.637	5.211.337	245.957	6.703	1.563	-	245
12	Real Estat	1.553.295	565.227	-	190	-	-	123
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2.920.074	13.013	-	579	899	-	526
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	5.027.494	1.378.650	11.895	11.453	8.159	5.438	1.968
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	4	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	27.105	575	2	865	91	111	731
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	229.974	-	-	121	-	-	9.505
19	Aktivitas Jasa Lainnya	261.432	8.081	3.419	6.720	1.004	2.028	1.641
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	598.203	-	16.006	56.943	-	234	227.938
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	30.451.858	231.148	235.189	186.579	62.031	123.963	13.799
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	164	-	-	-	-	-	54
24	Lainnya	28.864.379	624.208	-	101.370	41.190	1.746.632	3.636.457
	Total	**324.763.563**	**15.251.046**	**2.011.885**	**1.877.778**	**199.153**	**2.603.702**	**7.853.273**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Upaya mengatasi Tunggakan dan Penurunan Nilai

Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap debitur yang mengalami tunggakan dan penurunan nilai dilakukan secara rutin. Pemantauan direalisasikan pada setiap kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small and Medium Enterprise* atau SME, *Micro Business* dan *Retail Lending*, termasuk *Digital Lending*) serta sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Eksposure	31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	205.042	100.610	1.456.401	1.762.053
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total	**205.042**	**100.610**	**1.456.401**	**1.762.053**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Eksposure	31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	357.251	259.112	1.480.206	2.096.569
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total	**357.251**	**259.112**	**1.480.206**	**2.096.569**

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing* - Bank Secara Individual

No		*Performing* (Kualitas L dan DPK)		Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
a	b	c	d	e	f
1	Surat Berharga	8.547.320	799	-	-
2	Kredit	143.411.383	2.226.053	1.677.370	1.178.052
	a. Korporasi	100.160.698	1.423.786	530.748	487.176
	b. Ritel	43.250.685	802.267	1.146.622	690.876
3	Transaksi Rekening Administratif	121.956.266	52.990	-	-

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing* - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No		*Performing* (Kualitas L dan DPK)		Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
a	b	c	d	e	f
1	Surat Berharga	17.194.076	799	-	-
2	Kredit	154.629.618	3.138.216	1.677.370	1.178.052
	a. Korporasi	100.200.376	1.424.183	530.748	487.176
	b. Ritel	54.429.242	1.714.033	1.146.622	690.876
3	Transaksi Rekening Administratif	121.956.266	52.990	-	-

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

(dalam jutaan Rupiah)

Non Perfoming (Kualitas KL, D, M)				
	Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
	Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 hari	
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	g	h	i	j
	-	-	-	-
	84.684	26	-	-
	84.684	26	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

Non Perfoming (Kualitas KL, D, M)				
	Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
	Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 hari	
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	g	h	i	j
	-	-	-	-
	407.122	293.577	12.078	8.202
	84.684	26	-	-
	322.438	293.551	12.078	8.202
	-	-	-	-

Definisi Aset yang Direstrukturisasi

Dalam rangka meminimalkan kerugian kredit, Bank mempertimbangkan restrukturisasi atas kredit untuk peminjam yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya namun masih dapat bekerja sama, sepanjang hal ini memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Bank hanya diperbolehkan melakukan restrukturisasi kredit untuk peminjam yang memiliki kriteria sebagai berikut:
i. Debitur mengalami penurunan kemampuan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
ii. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi

Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non Performing* - Bank Secara Individual

No		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Perfoming (Kualitas KL, D, M)	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
a	b	c	d	e	f
1	Surat Berharga	-	-	-	-
2	Kredit	3.713.223	1.035.516	1.150.326	897.173
	a. Korporasi	2.693.931	817.854	507.652	486.877
	b. Ritel	1.019.292	217.661	642.673	410.296
3	Transaksi Rekening Administratif	150.009	94	-	-

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non Performing* - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Perfoming (Kualitas KL, D, M)	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
a	b	c	d	e	f
1	Surat Berharga	-	-	-	-
2	Kredit	3.916.565	1.151.048	1.181.024	927.280
	a. Korporasi	2.693.931	817.854	507.652	486.877
	b. Ritel	1.222.634	333.193	673.371	440.403
3	Transaksi Rekening Administratif	150.009	94	-	-

Mulai tahun 2023 BTPN menggunakan format sesuai SEOJK 24/2021. Dengan demikian informasi tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena adanya perbedaan format disclosure

Pengungkapan Risiko Kredit *Counterparty*

Risiko kredit *counterparty* bagi Bank adalah risiko yang timbul dari kegagalan pembayaran *counterparty* atas suatu kontrak dengan pihak Bank yang menyebabkan potensi kerugian bagi Bank untuk menggantikan kontrak tersebut.

Counterparty credit risk pada umumnya timbul dari FX *swap* dan transaksi repo/*reverse repo*. Mitigasi *counterparty credit risk* dilakukan sesuai SE OJK 24/SEOJK.03/2021, yaitu dengan pengakuan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dan dilengkapi dengan kebijakan Bank untuk mengelola risiko kredit dari *counterparty*.

(dalam jutaan Rupiah)

	Stage 1		Stage 2		Stage 3	
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	g	h	i	j	k	l
	-	-	-	-	-	-
	645.410	86.396	381.862	64.421	3.836.277	1.781.872
	-	-	167.867	196	3.033.716	1.304.535
	645.410	86.396	213.995	64.225	802.561	477.338
	11.871	94	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

	Stage 1		Stage 2		Stage 3	
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	g	h	i	j	k	l
	-	-	-	-	-	-
	645.410	86.396	381.862	64.421	3.836.277	1.781.872
	-	-	167.867	196	3.033.716	1.304.535
	645.410	86.396	213.995	64.225	802.561	477.338
	11.871	94	-	-	-	-

Tabel CCR1: Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk

No		*Replacement Cost* (RC)	*Potential Future Exposure* (PFE)	EEPE	Alpha Digunakan untuk Perhitungan *Regulatory EAD*	Tagihan Bersih	ATMR
a	b	c	d	e	f	g	h
1	SA-CCR (untuk derivatif)	1.131.480.848.890	1.379.431.913.419		1,4	3.515.277.867.233	
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
5	VaR untuk SFT					N/A	N/A
	Total						

Tabel CCR2: Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment (CVA)

No		Tagihan Bersih	ATMR
	Total porfolios berdasarkan *Advanced CVA capital charge*	N/A	N/A
1	(i) komponen VaR (termasuk 3× *multiplier*)		N/A
2	(ii) komponen *Stressed* VaR (termasuk 3× *multiplier*)		N/A
3	Semua Portofolio sesuai *Standardized CVA Capital Charge*	1.190.788.790.928	
4	**Total sesuai CVA *Capital Charge***	**1.190.788.790.928**	

Tabel CCR3: Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko

Kategori Portofolio	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	12.029.467.415								12.029.467.415
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik									
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional									
Tagihan kepada Bank Lain			458.652.657.594	2.217.189.696.279		-			2.675.842.353.874
Tagihan kepada perusahaan sekuritas									
Tagihan kepada Korporasi			525.838.540.952	14.218.494.778		287.349.010.215			827.406.045.945
Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel									
Aset lainnya									
Total	12.029.467.415		984.491.198.546	2.231.408.191.057		287.349.010.215			3.515.277.867.233

Tabel CCR6: Tagihan bersih Derivatif Kredit

	Proteksi yang Dibeli	Proteksi yang Dljual
Nilai *Notional*	NULL	
Single-name credit default swaps		
Index credit default swaps		
Total return swaps		
Credit options		
Derivatif kredit lainnya		
Total Nilai *Notional*	NULL	NULL
Nilai wajar	NULL	NULL
Nilai wajar positif (aset)		
Nilai wajar negatif (kewajiban)		

B. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar. Perubahan kondisi pasar dimaksud mencakup pergerakan nilai tukar, suku bunga, harga opsi, termasuk didalamnya perubahan dari *credit spread* dan potensi gagal bayar. Risiko pasar terdapat pada posisi *trading book* dan *banking book* yang berasal dari eksposur valuta asing, surat berharga, derivatif, dan instrumen keuangan/pasar uang.

Risiko suku bunga pada *banking book* dapat timbul dari perbedaan eksposur aktiva dan pasiva Bank dan pergerakan suku bunga yang akan mempengaruhi pendapatan dan nilai ekonomis modal Bank.

Kerangka Manajemen Risiko Pasar

Bank menggunakan kerangka kerja pengendalian sebagai pedoman yang jelas dan tegas mengenai batasan dalam pengambilan risiko. Tiga komponen kunci dalam kerangka pengendalian risiko tersebut adalah:

1. **Kebijakan dan Prosedur**
   Menetapkan aturan dan standar yang jelas atas semua aktivitas bisnis, pengendalian, strategi operasional dan organisasi di Bank terkait manajemen risiko pasar.

2. **Limit Eksposur**
   Memberikan batasan yang jelas terkait dengan risiko pasar. Limit/Toleransi risiko pasar disesuaikan dengan regulasi terkait, kebijakan global dan kebijakan lokal di Bank.

3. **Pendelegasian Wewenang Risiko**
   Memastikan bahwa pengambilan keputusan atas risiko utama hanya boleh dilakukan oleh individu atau unit kerja tertentu yang telah mendapat persetujuan dari komite manajemen di Bank.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank secara berkala melakukan peninjauan terhadap kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam mengelola risiko pasar, sehingga selaras dengan peraturan eksternal seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03.2016 dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko. Selain itu, kebijakan ini juga disusun sejalan dengan kebijakan global risiko pasar dan risiko likuiditas dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) karena BTPN merupakan grup SMBC.

Kebijakan dan prosedur risiko pasar Bank menetapkan aturan dan standar yang jelas atas semua aktivitas bisnis, pengendalian, strategi operasional dan organisasi di Bank terkait risiko pasar. Bank memiliki metodologi berikut langkah-langkah yang terukur dan jelas untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko pasar.

Untuk memastikan pengendalian risiko berjalan dengan baik, Bank juga *check* dan *balances* serta melakukan pemisahan *front office, middle office* dan *back office*, serta penerapan kerangka kerja Three Lines of Defense, yaitu:

1. Pimpinan Unit Kerja (PUK) (*first line of defense*)
2. Market and Liquidity Risk Management Departement dan Unit Kepatuhan (*second line of defense*)
3. Satuan Kerja Internal Audit/SKAI (*third line of defense*)

Penetapan limit risiko pasar ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaian dengan perkembangan bisnis serta kondisi ekonomi dan pasar terbaru berdasarkan faktor- faktor risiko nilai tukar dan suku bunga.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko pasar senantiasa dilakukan melalui analisis setiap produk, transaksi atau layanan yang ditawarkan oleh Bank melalui program hingga produk, transaksi atau layanan tersebut menjadi eksposur risiko pasar yang diukur, dipantau, dan dikontrol secara harian.

Untuk setiap pengembangan fitur dan pertumbuhan yang signifikan, risiko pasar senantiasa diidentifikasi kembali secara terus menerus dan didiskusikan bersama antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dalam hal ini adalah unit kerja Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, dengan unit-unit bisnis terkait.

Saat ini portofolio Surat berharga yang dimiliki Bank dikategorikan sebagai *trading book* dan *banking book*. Surat berharga *trading book* terutama digunakan untuk memenuhi permintaan dari nasabah. Sedangkan surat berharga *banking book* dikelola untuk tujuan sebagai cadangan likuiditas dan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal sesuai dengan rencana bisnis dan tingkat risiko tertentu yang diterima oleh Manajemen.

Eksposur valuta asing Bank sebagian besar berasal dari transaksi FX yang dilakukan untuk kepentingan nasabah dan swap atas sumber dana yang diperoleh dalam mata uang asing. Pengukuran eksposur risiko nilai tukar dilakukan atas posisi devisa neto Bank. Posisi devisa neto Bank di bawah 1,0% dari modal, atau jauh di bawah ketentuan ambang batas maksimum Bank Indonesia, yaitu 20,0% dari modal.

Bank melakukan proses revaluasi (*mark to market*) berdasarkan harga pasar setiap akhir hari. Bank juga mengamati eksposur risiko pasar secara harian sebagai bagian dari mitigasi risiko serta memastikan eksposur tersebut tidak melebihi limit yang telah ditetapkan oleh *asset liabilities committee* (ALCO).

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar dan kebutuhan modal atas eksposur risiko pasar dilakukan berdasarkan pendekatan standar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
		Individual		Konsolidasian		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	38.383	479.787	38.383	479.787	48.575	607.187	48.575	607.187
2	Risiko Nilai Tukar	14.874	185.925	14.874	185.925	8.807	110.085	8.807	110.085
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-			-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-			-	-
5	Risiko *Option*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	53.257	665.712	53.257	665.712	57.382	717.272	57.382	717.272

Pengelolaan risiko pasar dilakukan dengan melaporkan hasil pengukuran dan pemantauan limit risiko pasar yang telah ditetapkan ALCO secara harian. Bank juga secara rutin melakukan perhitungan PV01 dan simulasi proyeksi perubahan *Net Interest Income* (NII) dan *Economic Value of Equity* (EVE) yang dilaporkan dalam rapat yang diselenggarakan oleh komite ALCO dan Komite Manajemen Risiko (KMR).

Setiap tahun, atau bila ada penambahan fitur atau produk, Bank melakukan validasi atas hasil pengukuran dari sistem yang digunakan. Sistem informasi yang ada saat ini telah dapat memfasilitasi proses revaluasi (*mark to market*), memberikan informasi terkini atas eksposur risiko pasar Bank, serta memonitor pergerakan faktor risiko pasar Bank.

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Pasar

Pemantauan terhadap Risiko Pasar dilakukan melalui Asset Liabilities Committee (ALCO) dan Komite Manajemen Risiko. Sistem Pengendalian Internal telah efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar. Internal Audit melakukan audit secara berkala terhadap kecukupan kebijakan, prosedur, limit, serta toleransi dan kepatuhan dari setiap pihak yang terkait dengan penerapan manajemen risiko pasar sesuai dengan rencana audit Bank yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Tata Kelola Risiko Pasar

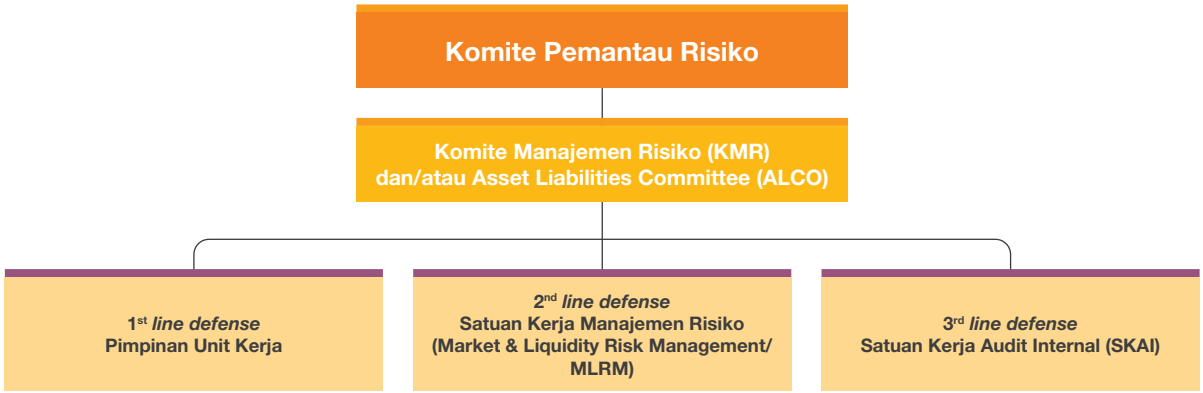

Pengungkapan Risiko Suku Bunga dalam Banking Book

Eksposur *banking book* atas aset dan liabilitas Bank diukur menggunakan analisis sensitivitas berdasarkan profil kesenjangan *repricing* suku bunga untuk menghitung dampak perubahan suku bunga terhadap laba bersih Bank dengan menggunakan pendekatan *Net Interest Income* (NII), dan dampak perubahan suku bunga terhadap modal Bank, atau dengan menggunakan pendekatan *Economic Value of Equity* (EVE).

Risiko suku bunga dalam Banking Book
Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk (individu)
Posisi Laporan : Desember 2023

Analisis Kualitatif

Pengukuran IRRBB dilakukan menggunakan metode standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan pengelolaan IRRBB, Bank telah menetapkan *risk appetite* yang diwujudkan dalam bentuk internal buffer atas maksimum perubahan EVE yang harus dijaga. Apabila tingkat IRRBB telah mendekati atau melampaui angka *buffer* tersebut, ALCO akan memutuskan strategi bisnis maupun strategi lindung nilai yang harus dilakukan untuk mengembalikan angka IRRBB ke tingkatan yang diinginkan.

Market and Liquidity Risk Management bertanggung jawab melakukan pengukuran dan pemantauan IRRBB secara berkala untuk dilaporkan kepada Direksi dan ALCO/KMR. Sedangkan unit bisnis dan treasury yang bertanggung jawab untuk melakukan strategi bisnis dan lindung nilai yang telah dirumuskan tersebut.

Analisis kuantitatif dari hasil pengukuran IRRBB untuk posisi Desember 2023 dapat dilihat bahwa perubahan EVE tertinggi Bank terjadi pada skenario *Parallel Shock Up*, yaitu sebesar Rp1,89 triliun atau 6,11% dari CET1. Sementara dari perspektif perubahan NII, pada skenario *Parallel Shock Down*, NII Bank diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp0,13 triliun atau 4,45% dari proyeksi NII Bank pada kondisi *baseline*.

Laporan Perhitungan IRRBB
Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk (individu)
Posisi Laporan : Desember 2023
Mata Uang : Total dalam Rupiah

Tabel Laporan Perhitungan IRRBB

(dalam jutaan Rupiah)

	Δ EVE		Δ NII	
	Desember 2023	Desember 2022	Desember 2023	Desember 2022
Parallel up	(1.892.060,17)	(1.840.272,22)	77.558,71	(120.707,86)
Parallel down	1.840.476,02	1.745.706,33	(132.556,17)	74.096,31
Steepener	558.565,46	689.867,33		
Flattener	(984.681,32)	(1.100.938,05)		
Short rate up	(1.269.211,06)	(1.279.731,65)		
Short rate down	1.273.759,07	1.277.028,64		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	1.892.060,17	1.840.272,22	132.556,17	120.707,86
Modal *Tier* 1 (untuk Δ EVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	30.989.831,98	29.437.312,07	2.981.729,07	3.988.377,52
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk Δ EVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	6,11%	6,25%	4.45%	3,03%

C. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dengan menggunakan arus kasnya dan/atau aset likuidnya yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko likuiditas juga berkaitan dengan optimalisasi struktur neraca dan risiko struktural terhadap ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Pengelolaan risiko likuiditas Bank berupaya agar dapat mengelola risiko likuiditas dalam perspektif jangka pendek maupun struktural.

Dalam perspektif jangka pendek, Bank memastikan kecukupan likuiditas yang dimonitor berdasarkan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *early warning indicators* lainnya. Dalam perspektif jangka panjang, risiko likuiditas dikelola dan dimonitor melalui *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas

Bank menggunakan kerangka kerja pengendalian sebagai pedoman yang jelas dan tegas mengenai batasan dalam pengambilan risiko. Tiga komponen kunci dalam kerangka pengendalian risiko tersebut adalah:

1. **Kebijakan dan Prosedur**
   Menetapkan aturan dan standar yang jelas atas semua aktivitas bisnis, pengendalian, strategi operasional dan organisasi di Bank terkait manajemen risiko likuiditas.

2. **Limit Eksposur**
   Memberikan batasan yang jelas terkait dengan risiko likuiditas. Limit/Toleransi risiko likuiditas disesuaikan dengan regulasi terkait, kebijakan global dan kebijakan lokal di Bank.

3. **Pendelegasian Wewenang Risiko**
   Memastikan bahwa pengambilan keputusan atas risiko utama hanya boleh dilakukan oleh individu atau unit kerja tertentu yang telah mendapat persetujuan dari komite manajemen di Bank.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank secara berkala menelaah kecukupan kebijakan, prosedur dan batasan risiko likuiditas dan kesesuaiannya dengan *risk appetite.* Selain itu, sejalan juga dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bisnis, kompleksitas transaksi, serta kondisi ekonomi serta kondisi pasar.

Untuk menerapkan kebijakan, prosedur dan menetapkan batasan-batasan pada risiko likuiditas secara efektif, Bank juga telah secara jelas menetapkan pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas antara unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas yaitu unit kerja yang kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap risiko likuiditas. Direktorat Manajemen Risiko memberikan masukan dan analisis yang independen dan objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas.

Kebijakan dan prosedur yang saat ini diterapkan juga telah mengatur pengelolaan risiko likuiditas dimasa krisis dimulai dengan aktifasi rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*/CFP), dan implementasinya hingga kembali ke kondisi normal (*business as usual*/BAU).

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko likuiditas dilakukan terhadap seluruh sumber, baik dari sisi produk dan aktivitas perbankan yang baru, maupun sisi pertumbuhan yang signifikan dari sumber dan hasil pendanaan tertentu, baik berupa posisi aset, kewajiban maupun rekening administratif. Identifikasi juga dilakukan setiap munculnya potensi peningkatan risiko, baik risiko suku bunga, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko karena adanya peraturan baru dari Bank Indonesia.

Bank mengukur dan memantau indikator risiko likuiditas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan likuiditas melalui Indikator Peringatan Dini (*Early Warning Indicators*/EWI) yang memonitor tingkat *roll-over*, konsentrasi pendanaan, peringkat publik Bank, tingkat likuiditas pasar uang, dan pemenuhan kewajiban *ratio regulatory*. Bank juga secara struktural mengukur risiko likuiditas dengan menggunakan rasio seperti rasio kecukupan alat likuid, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) serta perhitungan dana keluar dan melakukan stress testing.

Kebijakan internal menetapkan agar Bank selalu patuh terhadap peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan, seperti Giro Wajib Minimum dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Bank juga telah menerapkan regulasi *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Laporan LCR per 31 Desember 2023:

Tabel Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*)

No	Komponen	Individual			
		Posisi Tanggal Laporan (Desember 2023)		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Desember 2022)	
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		63 Hari		65 Hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)					
2	*Total High Quality Liquid Asset* (HQLA)		25.472.562		34.326.448
ARUS KAS KELUAR (*CASH OUTFLOW*)					
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	28.324.260	2.418.719	27.692.595	2.243.874
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	8.274.145	413.707	10.507.708	525.385
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	20.050.115	2.005.011	17.184.887	1.718.489
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	62.042.640	28.499.722	59.760.435	26.295.907
	a. Simpanan operasional	-	-	-	-
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	62.042.640	28.499.722	59.760.435	26.295.907
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank	-	-	-	-
5	Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)		-		-
6	Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*), terdiri dari:	132.744.281	5.464.957	128.430.924	5.137.937
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	1.632.859	1.632.859	1.209.567	1.209.567
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	16.965.852	2.939.105	16.683.441	3.315.491
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya	113.553.396	300.819	110.233.754	308.717
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	592.173	592.173	304.162	304.162
7	**TOTAL ARUS KAS KELUAR (*CASH OUTFLOW*)**		**36.383.398**		**33.677.717**
ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOW*)					
8	Pinjaman dengan agunan *Secured lending*	-	-	-	-
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (*counterparty*)	34.230.590	19.951.378	29.223.176	16.613.390
10	Arus kas masuk lainnya	2.536.599	2.087.164	1.775.479	1.500.641
11	**TOTAL ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOW*)**	**36.767.189**	**22.038.542**	**30.998.655**	**18.114.032**
			TOTAL ADJUSTED *VALUE*1		**TOTAL ADJUSTED *VALUE*1**
12	**TOTAL HQLA**		**25.472.562**		**34.326.448**
13	**TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (*NET CASH OUTFLOWS*)**		**14.344.856**		**15.563.686**
14	**LCR (%)**		**177,57%**		**220,55%**

Keterangan :
Adjusted value[1] dihitung setelah pengenaan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen hQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Konsolidasian				
Posisi Tanggal Laporan (Desember 2023)		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Desember 2022)		
Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).
	63 Hari		65 Hari
	34.015.087		42.333.207
34.596.917	2.862.204	33.635.825	2.660.316
11.949.750	597.487	14.065.329	703.266
22.647.167	2.264.717	19.570.496	1.957.050
66.000.909	31.071.902	63.817.803	29.003.141
-	-	-	-
66.000.909	31.071.902	63.817.803	29.003.141
-	-	-	-
	-		-
132.744.281	5.464.957	128.430.924	5.137.937
1.632.859	1.632.859	1.209.567	1.209.567
-	-	-	-
-	-	-	-
16.965.852	2.939.105	16.683.441	3.315.491
-	-	-	-
113.553.396	300.819	110.233.754	308.717
592.173	592.173	304.162	304.162
	39.399.063		**36.801.394**
-	-	-	-
34.586.956	20.277.037	29.478.127	16.838.631
2.536.599	2.087.164	1.775.479	1.500.641
37.123.555	**22.364.200**	**31.253.606**	**18.339.272**
	TOTAL ADJUSTED *VALUE*1		TOTAL ADJUSTED *VALUE*1
	34.015.087		**42.333.207**
	17.034.863		**18.462.122**
	199,68%		**229,30%**

Analisis Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*)

Analisis secara Individu

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Bank secara individu per akhir triwulan IV/2023 sebesar 177,57%, turun sebesar 42,98% dibanding per akhir triwulan IV/2022 sebesar 220,55%. Penurunan LCR disebabkan oleh penurunan nilai rata-rata *high quality liquid assets* (HQLA) sebesar Rp8,85 triliun, jauh lebih besar dibanding penurunan nilai rata-rata *net cash outflows* sebesar Rp1,22 triliun.

Nilai rata-rata *cash outflows* naik sebesar Rp2,71 triliun, sementara nilai rata-rata *cash inflows* masuk sebesar Rp3,92 triliun. Kenaikan proyeksi *cash outflows* terutama berasal dari nasabah korporasi dan arus kas keluar lainnya, sedangkan penurunan proyeksi *cash inflows* terutama berasal dari tagihan kepada pihak lawan (*counterparty*), transaksi derivative dan tagihan kontraktual lainnya.

Seluruh HQLA Bank merupakan HQLA Level 1 berupa kas dan setara kas, penempatan pada Bank Indonesia, dan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.

Analisis secara Konsolidasi

LCR Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak per akhir triwulan IV/2023 sebesar 199,68%, turun sebesar 29,62% dibanding per akhir triwulan IV/2022 sebesar 229,30%. Penurunan LCR disebabkan oleh penurunan nilai rata-rata HQLA sebesar Rp8,32 triliun, jauh lebih besar dibanding penurunan nilai rata-rata *net cash outflows* sebesar Rp1,43 triliun.

Nilai rata-rata *cash outflows* secara konsolidasi naik sebesar Rp2,6 triliun, sementara nilai rata-rata *cash inflows* secara konsolidasi naik sebesar Rp4,02 triliun. Kenaikan proyeksi *cash outflows* terutama berasal dari nasabah korporasi, sedangkan kenaikan proyeksi *cash inflows* terutama berasal tagihan kepada pihak lawan (*counterparty*).

Baik Bank maupun perusahaan anak senantiasa memenuhi ketentuan LCR untuk memastikan ketahanan likuiditas.

Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk (Individual)
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tabel Pengungkapan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Individual

No	Komponen	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2023)				
		Nilai Tercatat berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
		Tanpa Jangka Waktu[1]	<6 Bulan	≥6 Bulan-<1 Tahun	≥1 Tahun	Total Nilai Tertimbang
Komponen ASF						
1	**Modal :**	**35.038.871**	**-**	**-**	**2.976.753**	**38.015.624**
2	Modal sesuai POJK KPMM	35.038.871	-	-	2.976.753	38.015.624
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	**Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:**	**14.863.949**	**18.788.246**	**1.197.150**	**22.292**	**32.173.250**
5	Simpanan dan pendanaan stabil	11.546.222	4.072.652	112.043	10.134	14.954.505
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	3.317.728	14.715.594	1.085.108	12.158	17.218.745
7	**Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:**	**26.211.600**	**45.977.465**	**5.167.282**	**26.051.285**	**44.493.415**
8	Simpanan operasional	-	-	-	-	-
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	26.211.600	45.977.465	5.167.282	26.051.285	44.493.415
10	**Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11	**Liabilitas dan ekuitas lainnya :**	**3.950.401**	**3.385.827**	**5.019**	**-**	**-**
12	NSFR liabilitas derivatif		-	-	-	
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	3.950.401	3.385.827	5.019	-	-
14	**Total ASF**					**114.682.289**
Komponen RSF						
15	**Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR**					**373.074**
16	**Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional**	**986.169**	**-**	**-**	**-**	**493.085**
17	**Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*)**	**-**	**59.077.657**	**12.801.728**	**69.205.665**	**92.946.676**
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	8.605.850	2.614.163	10.478.776	13.076.735
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah *retail* dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	46.800.963	10.187.565	56.838.889	76.807.320
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	2.585.000	-	1.888.000	2.519.700
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	-	-	-	-
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (*performing*) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	1.085.844	-	-	542.922
25	**Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26	**Aset lainnya:**	**6.464.444**	**2.488.787**	**51.572**	**5.826.453**	**12.768.896**
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai *initial margin* untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)		-	-	-	-
29	NSFR aset derivatif		61.045	-	-	61.045
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin		214.421	-	-	214.421
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	6.464.444	2.213.321	51.572	5.826.453	12.493.430
32	**Rekening Administratif**		**14.976.909**	**47.728.850**	**59.250.506**	**837.928**
33	**Total RSF**					**107.419.659**
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**106,76%**

[1] Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain: instrumen modal yang bersifat permanen (*perpetual*), *short positions, open maturity positions*, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas.

	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2022)				
	Nilai Tercatat berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
	Tanpa Jangka Waktu[1]	<6 Bulan	≥6 Bulan-<1 Tahun	≥1 Tahun	Total Nilai Tertimbang
	33.386.507	**-**	**-**	**3.113.500**	**36.500.007**
	33.386.507	-	-	3.113.500	36.500.007
	-	-	-	-	-
	14.251.120	**22.017.863**	**410.418**	**8.294**	**33.638.758**
	11.120.265	1.215.657	44.131	2.752	11.763.802
	3.130.855	20.802.206	366.287	5.543	21.874.956
	23.116.175	**46.380.145**	**2.306.108**	**39.515.864**	**60.836.693**
	-	-	-	-	-
	23.116.175	46.380.145	2.306.108	39.515.864	60.836.693
	-	-	-	-	-
	3.332.671	**2.181.039**	**42.139**	**-**	**-**
		-	-	-	
	3.332.671	2.181.039	42.139	-	-
					130.975.459
					461.375
	2.192.886	**-**	**-**	**-**	**1.096.443**
	-	**54.699.891**	**14.648.025**	**63.293.890**	**86.510.090**
	-	-	-	-	-
	-	8.811.906	3.206.981	9.468.536	12.393.813
	-	42.928.571	11.441.044	52.326.413	71.662.258
	-	875.000	-	1.498.941	1.411.812
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	2.084.414	-	-	1.042.207
	-	-	-	-	-
	5.749.886	**2.608.192**	**115.270**	**5.838.815**	**12.384.368**
	-				-
		-	-	-	-
		299.088	299.088	299.088	299.088
		289.547	289.547	289.547	289.547
	5.749.886	2.019.557	115.270	5.838.815	11.795.733
		118.081.135	**118.081.135**	**118.081.135**	**975.017**
					101.427.293
					129,13%

Analisis NSFR Individu

Analisis secara Individu (Audited)
Net Stable Funding Ratio (NSFR) Bank secara individu per akhir triwulan IV/2023 sebesar 106,76%, turun sebesar 22,37% dibanding per akhir triwulan IV/2022 sebesar 129,13%. Penurunan NSFR disebabkan oleh penurunan *Available Stable Funds* (ASF) sebesar Rp16,29 triliun, dan kenaikan *Required Stable Funds* (RSF) sebesar Rp5,99 triliun.

Porsi terbesar ASF berupa pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebesar 38,80%, modal sebesar 33,15% dan simpanan yang berasal dari nasabah perorangan sebesar 28,05% dari total ASF. Sedangkan komposisi ASF berdasarkan sisa jangka waktu terbesar berasal dari pendanaan tanpa jangka waktu sebesar 42,72%, tenor < 6 bulan sebesar 28,75% dan tenor ≥ 1 tahun sebesar 25,33% dari total ASF.

Porsi terbesar RSF adalah berupa pinjaman dengan kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) sebesar 86,53%dan aset lainnya sebesar 11,89% dari total RSF. Sedangkan komposisi RSF berdasarkan sisa jangka waktu terbesar berupa aset dengan tenor ≥ 1 tahun sebesar 61,92% dan aset dengan tenor < 6 bulan sebesar 25,44% dari total RSF.

Bank senantiasa memantau dan menjaga pemenuhan NSFR dan memasukkan aspek sumber dan tenor pendanaan dalam penetapan strategi pendanaan Bank.

Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk (Konsolidasi)
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tabel Pengungkapan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Konsolidasi

No	Komponen	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2023)				
		Nilai Tercatat berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
		Tanpa Jangka Waktu[1]	<6 Bulan	≥6 Bulan-<1 Tahun	≥1 Tahun	Total Nilai Tertimbang
Komponen ASF						
1	**Modal :**	**43.866.014**	**-**	**-**	**2.976.753**	**46.842.767**
2	Modal sesuai POJK KPMM	43.866.014	-	-	2.976.753	46.842.767
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	**Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:**	**17.592.085**	**23.491.113**	**1.202.637**	**22.292**	**39.114.023**
5	Simpanan dan pendanaan stabil	14.110.421	6.461.630	117.529	10.134	19.665.235
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	3.481.663	17.029.484	1.085.108	12.158	19.448.788
7	**Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:**	**26.594.842**	**50.299.978**	**5.167.282**	**26.051.285**	**45.650.072**
8	Simpanan operasional	-	-	-	-	-
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	26.594.842	50.299.978	5.167.282	26.051.285	45.650.072
10	**Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11	**Liabilitas dan ekuitas lainnya :**	**4.302.310**	**3.385.827**	**5.019**	**-**	**-**
12	NSFR liabilitas derivatif		-	-	-	
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	4.302.310	-	-	-	-
14	**Total ASF**					**131.606.862**
Komponen RSF						
15	**Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR**					**546.690**
16	**Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional**	**993.288**	**-**	**-**	**-**	**496.644**
17	**Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*)**	**-**	**65.146.726**	**19.255.635**	**72.637.899**	**100.302.427**
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	8.854.220	2.618.823	10.483.218	13.120.762
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah *retail* dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	51.766.480	16.618.812	60.026.447	83.466.243
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	2.585.000	-	1.888.000	2.519.700
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	-	-	-	-
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (*performing*) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	1.941.027	18.000	240.234	1.195.722
25	**Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26	**Aset lainnya:**	**6.464.444**	**2.488.787**	**51.572**	**6.532.559**	**13.475.003**
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai *initial margin* untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)		-	-	-	-
29	NSFR aset derivatif		61.045	-	-	299.088
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin		214.421	-	-	289.547
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	6.464.444	2.213.321	51.572	6.532.559	13.199.537
32	**Rekening Administratif**		**14.976.909**	**47.728.850**	**59.250.506**	**837.928**
33	**Total RSF**					**115.658.692**
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**113,79%**

[1] Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain: instrumen modal yang bersifat permanen (*perpetual*), *short positions, open maturity positions*, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas.

	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2022)				
	Nilai Tercatat berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
	Tanpa Jangka Waktu[1]	<6 Bulan	≥6 Bulan-<1 Tahun	≥1 Tahun	Total Nilai Tertimbang
	41.846.055	**-**	**-**	**3.113.500**	**44.959.555**
	41.846.055	-	-	3.113.500	44.959.555
	-	-	-	-	-
	16.770.121	**26.584.991**	**416.815**	**8.317**	**40.262.737**
	13.569.949	3.573.253	50.528	2.774	16.336.817
	3.200.172	23.011.738	366.287	5.543	23.925.920
	23.566.102	**50.986.193**	**2.306.108**	**39.515.864**	**61.967.627**
	-	-	-	-	-
	23.566.102	50.986.193	2.306.108	39.515.864	61.967.627
	-	-	-	-	-
	4.067.749	**2.181.039**	**42.139**	**-**	**-**
		-	-	-	
	4.067.749	-	-	-	-
					147.189.919
					619.097
	2.204.223	**-**	**-**	**-**	**1.102.112**
	-	**60.606.767**	**20.892.291**	**66.769.828**	**93.824.523**
	-	-	-	-	-
	-	9.042.406	3.224.756	9.510.467	12.479.206
	-	48.071.866	17.436.990	55.656.469	78.408.985
	-	875.000	-	1.498.941	1.411.812
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	2.617.495	230.545	103.951	1.524.521
	-	-	-	-	-
	5.749.886	**2.608.192**	**115.270**	**7.008.777**	**13.554.330**
	-				-
		-	-	-	-
		299.088	299.088	299.088	299.088
		289.547	289.547	289.547	289.547
	5.749.886	2.019.557	115.270	7.008.777	12.965.695
		118.101.167	**118.101.167**	**118.101.167**	**975.017**
					110.075.079
					133,72%

Analisis NSFR Konsolidasi

Analisis secara Konsolidasi (Audited)
NSFR Bank secara konsolidasi per akhir triwulan IV/2023 sebesar 113,79%, turun sebesar 19,93% dibanding per akhir triwulan IV/2022 sebesar 133,72%. Penurunan NSFR disebabkan oleh penurunan ASF sebesar Rp15,58 triliun, sementara RFS naik Rp5,58 triliun.

Porsi terbesar ASF berasal dari modal sebesar 35,59%, pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebesar 34,69%, dan simpanan yang berasal dari nasabah perorangan sebesar 29,72%. Sedangkan komposisi ASF berdasarkan sisa jangka waktu terbesar berasal dari pendanaan tanpa jangka waktu sebesar 45,90%, tenor < 6 bulan sebesar 29,24% dan tenor ≥ 1 tahun sebesar 22,07% dari total ASF.

Porsi terbesar RSF berupa pinjaman dengan kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) sebesar 86,72% dan aset lainnya sebesar 11,65% dari total RSF. Sedangkan komposisi RSF berdasarkan sisa jangka waktu terbesar berupa aset dengan tenor ≥ 1 tahun sebesar 60,75% dan tenor < 6 bulan sebesar 24,88% dari total RSF.

Baik Bank maupun anak perusahaan senantiasa memantau dan menjaga pemenuhan NSFR dan memasukkan aspek sumber dan tenor pendanaan dalam penetapan strategi pendanaan Bank.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan melaporkan hasil pemantauan atas *Early Warning Indicators* dan Batasan Risiko Likuiditas secara harian. Bank juga secara berkala melaporkan kondisi dan perkembangan *liquidity key risk indicators* dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko (KMR).

Direktorat Manajemen Risiko melalui Unit Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, melakukan pemantauan terhadap indikator risiko likuiditas, sumber dan hasil pendanaan dan posisi likuiditas. Hal itu meliputi strategi penetapan suku bunga, perubahan perilaku nasabah, termasuk perubahan struktur dan volatilitas sumber pendanaan.

Untuk setiap pelampauan atau kejadian risiko (*risk event*) tertentu, SKMR melakukan komunikasi dan meminta tindak lanjut dari unit bisnis terkait, termasuk meneruskan masalah tersebut ke manajemen yang lebih tinggi. Sistem informasi yang digunakan saat ini dapat menyajikan informasi tentang kondisi likuiditas secara harian untuk kebutuhan proses pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas.

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Likuiditas

Pemantauan terhadap risiko likuiditas dilakukan oleh ALCO dan Komite Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko likuiditas juga dilakukan dengan menyiapkan *contingency funding plan* sebagai antisipasi jika terjadi kondisi likuiditas yang buruk.

Sistem Pengendalian Internal telah secara efektif mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas. Internal Audit juga telah melakukan audit secara berkala atas kecukupan kebijakan, prosedur, limit transaksi dan toleransi yang berlaku serta kepatuhan dari setiap pihak terkait sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana audit Bank.

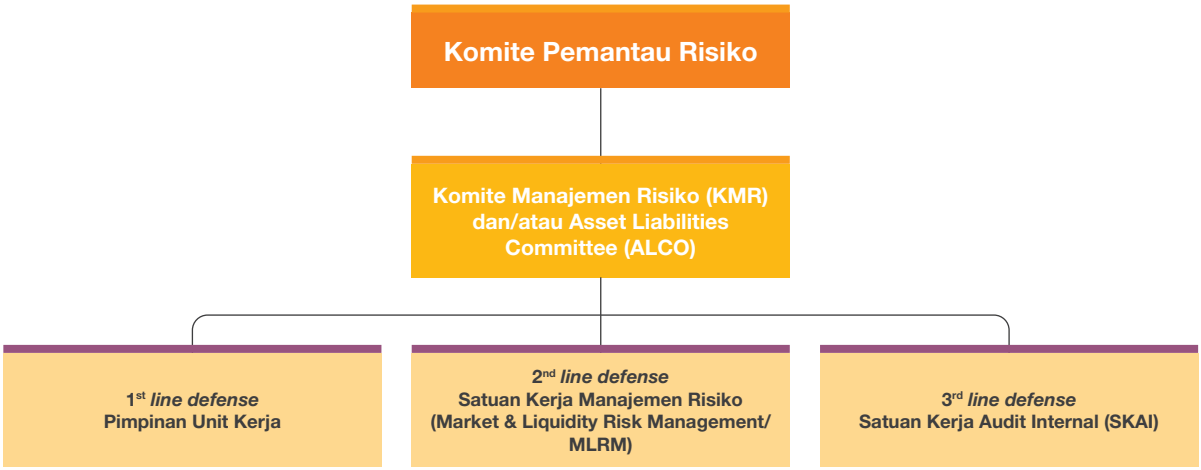

Kebijakan di Bidang Strategi Pendanaan

Dalam mengantisipasi adanya potensi tekanan likuiditas yang mungkin terjadi, Bank dan Entitas Anak telah mempersiapkan strategi pendanaan dan cadangan likuiditas yang memadai. Kebijakan itu disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan profil likuiditas agar selalu memenuhi regulasi terkait.

Profil Maturitas Kontraktual Rupiah dan Valas BTPN

Profil jatuh tempo diproyeksikan atas jangka waktu yang tersisa berdasarkan tanggal kontraktual aset dan liabilitas tertentu. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo yang dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan tingkat kepercayaan terhadap Bank dan Entitas Anak. Untuk mengelola risiko likuiditas atas kondisi tersebut, maka Bank dan Entitas Anak menetapkan strategi yang sesuai dan jumlah kas dan aset likuid yang perlu dimiliki, yang dapat dicairkan atau dijadikan jaminan jika ada kebutuhan likuiditas yang mendesak.

Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas dan Stress Testing

Bank mengukur dan memantau indikator risiko likuiditas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan likuiditas melalui Indikator Peringatan Dini (*Early Warning Indicators*/EWI) yang memonitor tingkat *roll-over*, konsentrasi pendanaan, peringkat publik Bank, tingkat likuiditas pasar uang, dan pemenuhan kewajiban *ratio regulatory*. Bank juga secara struktural mengukur risiko likuiditas dengan menggunakan rasio kecukupan AL, RIM serta perhitungan dana keluar dan melakukan *stress testing*.

D. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional Bank.

Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif terhadap manajemen risiko operasional melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko. Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai *terms of reference* masing-masing untuk membahas risiko operasional

Satuan Kerja Operational & Fraud Risk Management (OFRM) setingkat Divisi yang ada di dalam Direktorat Manajemen Risiko, bertanggung jawab di dalam penerapan Manajemen Risiko Operasional di Bank dengan Kepala Divisi memiliki pelaporan secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Satuan kerja OFRM bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengembangan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional, BCM *(Business Continuity Management),* Fungsi ICR *(Internal Control & Risk)* dan *fraud* yang kemudian akan dikaji ulang secara berkala, dengan mempertimbangkan setiap perubahan signifikan, baik secara internal maupun eksternal. Setiap unit kerja wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari-hari.

Bank juga telah memiliki sistem dan penetapan limit atau ambang batas untuk mendukung pengendalian umum dan khusus, seperti pemisahan tugas, cuti wajib tahunan, rekonsiliasi, dan lainnya.

Kecukupan Proses Manajemen Risiko Operasional

Proses manajemen risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko berjalan secara terstruktur dan konsisten. Proses Manajemen Risiko Operasional di Bank diterapkan berdasarkan praktik terbaik yang efektif.

Tahapan proses manajemen risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional adalah sebagai berikut:

1. Risiko operasional dilakukan atas seluruh proses, produk, layanan, sistem, inisiatif dan struktur organisasi baru ataupun perubahannya. Identifikasi risiko operasional juga dilakukan melalui perangkat manajemen risiko operasional di antaranya *Risk Grading Matrix* (RGM), *Process Risk Control* (PRC), *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Risk Acceptance* (RA).
2. Proses pengukuran risiko operasional meliputi kegiatan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara berkala melalui *Key Control Self Assessment* (KCSA), analisa kejadian dan kerugian risiko operasional, pelaksanaan aktivitas pemeriksaan oleh Fungsi *Internal Control & Risk* (ICR), pengukuran KRI dan *Operational Risk Appetite* (ORA) yang dilaporkan secara berkala dalam rapat Komite Manajemen Risiko (KMR).
3. Pemantauan risiko operasional dilakukan melalui pelaporan kepada manajemen senior dan regulator, baik secara rutin ataupun *ad-hoc*, termasuk pelaporan kejadian dengan kategori signifikan melalui SINP (*Significant Incident Notification Protocol*). Hal ini diterapkan agar setiap permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti.
4. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan menerapkan mekanisme kontrol pencegahan, deteksi dan koreksi yang efektif dan/ atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan dampak kerugian operasional bagi Bank. Sebagai salah satu tindakan pengendalian, Bank telah memiliki pedoman bagi Manajemen Kelangsungan Bisnis (BCM) yang komprehensif.

Penyediaan aplikasi *Internal Control & Risk System (*ICRS) adalah sebagai *database* di dalam penerapan manajemen risiko operasional dan *fraud* dan sekaligus diharapkan agar dapat menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk risiko operasional yang dilakukan oleh Bank menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*) dan sesuai dengan ketentuan regulator.

Bank dan Entitas Anak telah memiliki pedoman pengelolaan kelangsungan usaha yang komprehensif dan mengacu kepada standar industri ISO 22301, dengan tujuan untuk mengantisipasi potensi risiko operasional yang dapat terjadi dari situasi ekstrem/ kritikal baik yang disebabkan oleh faktor bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus maupun faktor lainnya seperti demonstrasi, kebakaran, ganggunan sistem pasokan listrik, pandemi serta situasi bisnis yang kurang menguntungkan. Hal ini untuk memastikan keberlangsungan layanan kepada nasabah.

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Operasional

Pengendalian internal atas risiko operasional dilakukan melalui penerapan model 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*). Pada lini pertahanan pertama, *Risk Taking Unit* (RTU) dibantu oleh *Business Risk* (Fungsi ICR) dalam melaksanakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lini pertahanan kedua, satuan kerja OFRM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pada lini pertahanan ketiga, Internal Audit secara independen melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata kelola dan efektivitas manajemen risiko operasional. Penyelarasan kerja antara pihak-pihak bertanggungjawab atas praktik pengendalian intern Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui ICR *maturity self-assessment* yang terstandardisasi dan forum-forum yang diselenggarakan oleh satuan kerja OFRM untuk memfasilitasi fungsi *Internal Control & Risk*.

Manajemen Risiko Fraud

Bank menerapkan *zero tolerance* terhadap setiap kejadian *fraud*. Bank senantiasa menindaklanjuti setiap kejadian *fraud* termasuk memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan maupun yang terlibat dalam kejadian *fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib (bila diperlukan).

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur strategi *anti-fraud* yang memadai dan senantiasa disempurnakan secara berkesinambungan. Manajemen risiko *fraud* dilakukan secara sistematis melalui sejumlah proses dan strategi.

Terkait dengan proses pencegahan risiko *fraud,* Bank telah menjalankan program *anti-fraud awareness* untuk seluruh karyawan dan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan Bank. Penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan strategi *anti-fraud* dilakukan secara berkala sehingga tetap sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu dilakukan kajian risiko *fraud* atas setiap produk, layanan, proses, sistem, dan inisiatif baik baru maupun pengembangannya.

Sosialisasi *anti-fraud awareness* dilakukan melalui beberapa media, yaitu melalui *e-newsletter broadcast, email broadcast, wallpaper desktop* PC/laptop, BTPN Info, penayangan video animasi *antifraud, mandatory e-learning anti fraud*, *in-class* maupun *virtual training* kepada karyawan. Selain itu, ada layanan *whistleblowing* di Bank yang dapat digunakan untuk melaporkan kejadian berindikasi *fraud*.

Bank juga memberikan berbagai sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran *fraud* kepada pihak ketiga baik nasabah maupun vendor yang bekerjasama dengan Bank, termasuk melakukan pelatihan secara *virtual* perihal *anti-fraud* maupun *Entertainment & Gift* kepada vendor secara berkala untuk turut serta membantu Bank dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Sejalan dengan strategi *anti-fraud* yang berlaku, Bank juga secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi pelaporan *fraud* melalui *whistleblowing channel* sebagai salah satu media pendeteksian kejadian *fraud*, yang secara berkala dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media internal Bank. Karyawan dapat mengungkap dan melaporkan setiap Tindakan pelanggaran (*misconduct*) melalui saluran *e-mail* (Ayo Lapor), Whatsapps, telepon, surat maupun pertemuan tatap muka.

Bank telah memiliki kebijakan yang memadai terkait proses investigasi dan pelaporan kejadian *fraud*. Untuk setiap kasus *fraud* yang terbukti, proses pemberian sanksi diputuskan oleh Komite *Fraud* dan melibatkan unit kerja terkait, *Business Risk/ICR (Internal Control Risk)* terkait, unit kerja Sumber Daya Manusia dan OFRM *(Operational and Fraud Risk Management)*. Implementasi keputusan Komite *Fraud* dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menentukan upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Komponen Indikator Bisnis (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar				8.624.711	1.293.707	16.171.334
2	Pendekatan Standar	818.034	818.034	10.225.432			
	Total	**818.034**	**818.034**	**10.225.432**	**8.624.711**	**1.293.707**	**16.171.334**

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Komponen Indikator Bisnis (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar				12.435.609	1.865.341	23.316.768
2	Pendekatan Standar	840.067	840.067	10.500.841			
	Total	840.067	840.067	10.500.841	12.435.609	1.865.341	23.316.768

Laporan Data Kerugian Historis - Bank Secara Individual

No	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	T	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	Rata-rata 10 Tahun
Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (loss event) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih												
1	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)	0,00	8.204,00	5.591,00	18.623,00	17.250,00	3.000,00	14.075,00	6.230,00	22.621,00	6.616,00	10.221,00
2	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional	0,00	9,00	7,00	13,00	4,00	7,00	9,00	5,00	17,00	10,00	8,10
3	Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0,00	8.204,00	5.591,00	18.623,00	17.250,00	3.000,00	14.075,00	6.230,00	22.621,00	6.616,00	10.221,00
Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (loss event) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau lebih												
6	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)											
7	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional											
8	Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan											
9	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan											
10	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan											

No	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	T	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	Rata-rata 10 Tahun
Rincian perhitungan modal untuk risiko operasional												
11	Apakah kerugian digunakan dalam perhitungan FPKI? (Ya/ Tidak)	Y										
12	Dalam hal baris 11 diisi "Tidak", apakah tidak digunakannya data kerugian intern tersebut disebabkan ketidaksesuaian standar minimum untuk data kerugian? (Ya/ Tidak)											
13	Threshold yg digunakan dalam perhitungan modal untuk risiko operasional (dalam satuan rupiah penuh)	300.000.000,00										
14	Keterangan Tambahan (jika ada)											

Laporan Data Kerugian Historis - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	T	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	Rata-rata 10 Tahun
Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (loss event) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih												
1	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)	0,00	8.204,00	6.408,00	22.066,00	17.879,00	3.000,00	14.075,00	6.451,00	22.621,00	6.616,00	10.732,00
2	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional	0,00	9,00	9,00	17,00	5,00	7,00	9,00	6,00	17,00	10,00	8,90
3	Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0,00	8.204,00	6.408,00	22.066,00	17.879,00	3.000,00	14.075,00	6.451,00	22.621,00	6.616,00	10.732,00
Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (loss event) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau lebih												
6	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)											
7	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional											
8	Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan											
9	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan											

No	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	T	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	Rata-rata 10 Tahun
10	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan											
Rincian perhitungan modal untuk risiko operasional												
11	Apakah kerugian digunakan dalam perhitungan FPKI? (Ya/ Tidak)	Y										
12	Dalam hal baris 11 diisi "Tidak", apakah tidak digunakannya data kerugian intern tersebut disebabkan ketidaksesuaian standar minimum untuk data kerugian? (Ya/ Tidak)											
13	Threshold yg digunakan dalam perhitungan modal untuk risiko operasional (dalam satuan rupiah penuh)	300.000.000,00										
14	Keterangan Tambahan (jika ada)											

Laporan Rincian Indikator Bisnis - Bank Secara Individual

No	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	T	T-1	T-2
1	Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	4.312.213,26		
2	Pendapatan Bunga	15.927.827,25	16.267.158,42	19.738.939,09
3	Beban Bunga	10.116.921,64	10.232.246,31	13.484.908,83
4	Aset Produktif	192.461.754,90	178.257.181,26	170.748.504,35
5	Pendapatan Dividen	332.993,33	177.957,77	242.671,27
6	Komponen Jasa (KJ)	1.733.884,79		
7	Pendapatan Jasa dan Komisi	801.571,39	797.385,36	630.183,52
8	Beban Jasa dan Komisi	59.689,33	44.592,61	89.402,95
9	Pendapatan operasional lainnya	897.094,94	1.200.424,96	874.994,19
10	Beban operasional lainnya	306.305,13	378.744,77	373.812,36
11	Komponen Keuangan (KK)	770.856,99		
12	Laba Rugi Bersih Trading Book	218.426,42	66.288,86	29.925,12
13	Laba Rugi Bersih Banking Book	598.865,24	700.038,92	699.026,42
14	IB	6.816.955,04		
15	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	818.034,60		
16	Pengungkapan IB			
17	IB total termasuk aktivitas yang didivestasi	6.816.955,04		
18	Pengurangan IB dikarenakan pengecualian atas aktivitas yang didivestasi	0,00		
19	Keterangan Tambahan			

Laporan Rincian Indikator Bisnis - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	T	T-1	T-2
1	Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	4.458.825,09		
2	Pendapatan Bunga	21.305.383,61	16.640.341,11	23.782.766,10
3	Beban Bunga	10.643.253,81	6.489.976,78	14.151.568,78
4	Aset Produktif	212.910.543,69	195.796.975,12	185.802.141,61
5	Pendapatan Dividen	0,90	2,30	4,72
6	Komponen Jasa (KJ)	1.769.602,97		
7	Pendapatan Jasa dan Komisi	802.922,56	797.996,36	633.443,92
8	Beban Jasa dan Komisi	59.692,84	44.592,61	89.402,95
9	Pendapatan operasional lainnya	957.952,08	1.222.491,18	894.002,81
10	Beban operasional lainnya	372.568,33	409.102,52	415.775,52
11	Komponen Keuangan (KK)	772.132,99		
12	Laba Rugi Bersih Trading Book	218.426,42	66.288,86	29.925,12
13	Laba Rugi Bersih Banking Book	602.693,24	700.038,92	699.026,42
14	IB	7.000.561,05		
15	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	840.067,33		
16	Pengungkapan IB			
17	IB total termasuk aktivitas yang didivestasi	7.000.561,05		
18	Pengurangan IB dikarenakan pengecualian atas aktivitas yang didivestasi	0,00		
19	Keterangan Tambahan			

Laporan Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar Bank Secara Individual

No	Rincian	Validasi Kolom T
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	818.034,60
2	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI)	1
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	818.034,60
4	ATMR untuk Risiko Operasional	10.225.432,50

Laporan Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Rincian	Validasi Kolom T
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	840.067,33
2	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI)	1
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	840.067,33
4	ATMR untuk Risiko Operasional	10.500.841,63

Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dapat dilihat pada halaman xx sesuai dengan SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Risiko Teknologi Informasi dan Keamanan Siber

Risiko penggunaan Teknologi Informasi (TI) dan risiko terkait Keamanan Siber mungkin terjadi sebagai akibat dari kegagalan TI maupun serangan siber.

Proses manajemen risiko penggunaan TI dan risiko Keamanan Siber (termasuk manajemen risiko Keamanan Informasi) Bank dikoordinasikan dan dikelola oleh satuan *Cyber Security Risk Management (CSRM)* yang memiliki garis pelaporan secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko. Di samping itu, terdapat pelaksanaan pengawasan aktif terhadap risiko penggunaan TI dan keamanan siber yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap tahapan penggunaan dan pengelolaan sumber daya TI dan Informasi Sensitif Bank, yang prosesnya dilakukan melalui update dan pelaporan berkala yang disampaikan tim CSRM terkait dengan kondisi terkini risiko penggunaan TI dan keamanan siber Bank. Pada saat ini Bank juga telah memiliki Kebijakan Penggunaan TI dan telah merilis Kebijakan Manajemen Risiko Keamanan Siber pada tahun 2023 yang isinya memuat kerangka kerja dan standar penerapan keamanan siber Bank. Di samping itu, Bank juga telah merumuskan dan menetapkan profil dan tingkat risiko terkait pengelolaan TI, serta sedang dalam tahap melakukan tinjauan dan pembaruan terhadap profil dan Tingkat risiko keamanan siber Bank. Adapun pemantauan profil dan tingkat risiko tersebut dilakukan melalui perangkat manajemen risiko seperti *Risk Appetite* dan KRI.

Satuan kerja CSRM bertanggung jawab dalam pembuatan, pengembangan dan pelaksanaan tinjauan dan pembaruan kebijakan dan prosedur manajemen risiko keamanan siber yang pelaksanaannya dilakukan melalui kajian ulang berkala, sehingga setiap perubahan yang diperlukan dapat dicantumkan di dalam kebijakan tersebut. Di samping itu satuan kerja CSRM juga melakukan tinjauan terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur terkait TI untuk memastikan kesesuaian ketentuan yang tertuang kebijakan dan prosedur tersebut dengan proses penerapan manajemen risiko yang berlaku di Bank.

Setiap unit kerja wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur terkait keamanan siber serta kebijakan dan prosedur terkait TI dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari-hari.

Proses manajemen risiko TI dan Keamanan Siber mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang berjalan secara terstruktur dan konsisten. Tahapan proses manajemen risiko TI mencakup pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko TI, antara lain:

1. Identifikasi Risiko Operasional TI yang dilakukan terhadap proses/produk/layanan TI melalui penerapan proses penentuan Tingkat risiko operasional TI, registrasi risiko, pelaksanaan Kajian Risiko dan lain sebagainya. Proses identifikasi risiko ini juga dilengkapi dengan penerapan perangkat manajemen risiko seperti aset register, *Risk Grading Matrix (RGM)*, *Process Risk Control (PRC)*, *Key Risk indicator (KRI)*, Kajian Risiko Operasional (KRO) dan *Risk Acceptance.*
2. Pengukuran Risiko Operasional TI meliputi pelaksanaan pengukuran risiko Operasional TI dengan memperhatikan peringkat risiko, pengukuran kinerja dan perencanaan kapasitas system dan infrastruktur, pengukuran risiko pengamanan informasi dengan menggunakan kriteria dan peringkat yang telah ditetapkan maupun pelaksanaan pengukuran terhadap setiap kerugian yang terjadi *(loss event)*. Pelaksanaan proses pengukuran Risiko Operasional TI ini dilakukan dengan memanfaatkan perangkat manajemen risiko seperti *Key Control Self-Assessment (KCSA),* pemeriksaan oleh *Internal Control & Risk* (ICR), pengukuran KRI dan *Operational Risk Appetite* (ORA) yang dilaporkan ke Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR).
3. Pemantauan Risiko Operasional TI dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan rencana tindak lanjut perbaikan, kejelasan akuntabilitas dan tanggung jawab, serta pelaporan berkala yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat kerja seperti sistem manajemen risiko (*Internal Control & Risk System (ICRS)*) maupun melalui pelaporan kejadian dengan kategori signifikan melalui *SINP (Significant Incident Notification Protocol)*.
4. Pengendalian Risiko TI, meliputi pelaksanaan evaluasi dan pengujian atas *DRP (Disaster Recovery Plan)*, penerapan fungsi Internal Audit TI oleh Internal Audit dan auditor eksternal sesuai kebutuhan, pelaksanaan proses *quality assurance* dan *self- assessment* secara berkesinambungan serta penyampaian kewajiban pelaporan tepat waktu dan akurat kepada OJK dengan berpedoman kepada ketentuan terkini.

Sedangkan tahapan proses manajemen risiko Keamanan Siber meliputi pelaksanaan proses Identifikasi, Proteksi, Deteksi, Respon dan Pelaporan serta Pemulihan yang implementasinya dapat dilakukan melalui penetapan dan implementasi serta peninjauan ulang secara berkala terhadap kerangka kerja, kebijakan dan strategi manajemen risiko keamanan siber Bank yang disesuaikan dengan regulasi yang

berlaku dan kebutuhan bisnis Bank, pelaksanaan proses pengukuran dan penilaian terhadap tingkat risiko inherent terkait keamanan siber. Di samping itu Bank juga menerapkan penilaian kematangan keamanan siber dan juga tingkat risiko bank terkait keamanan siber secara berkala maupun pelaporan hasil penerapan manajemen risiko keamanan siber dan insiden keamanan siber yang terjadi kepada pihak berkepentingan seperti regulator, grup dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank juga telah menerapkan dan memperoleh standar sertifikasi keamanan informasi ISO 27001 dengan cakupan sistem pembayaran utama Bank untuk meningkatkan standar keamanan Bank serta di dalam rangka untuk meminimalkan risiko terkait keamanan informasi yang mungkin terjadi di Bank.

Pengendalian intern atas risik TI dan keamanan Siber dilakukan melalui penerapan model 3 (tiga) lini pertahanan *(three lines of defense)*. Pada lini pertahanan pertama, *Risk Taking Unit* (RTU) dibantu oleh *Business Risk* (Fungsi ICR) dalam melaksanakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lini pertahanan kedua, satuan kerja CSRM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pada lini pertahanan ketiga, Internal Audit secara independen bertanggung jawab memastikan bahwa risiko yang tersisa *(residual risks)* masih berada dalam batasan yang dapat ditoleransi oleh Bank.

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak bertanggungjawab atas praktik pengendalian intern Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui *ICR maturity self-assessment* yang terstandardisasi dan forum-forum yang diselenggarakan oleh satuan kerja CSRM untuk memfasilitasi fungsi *Internal Control & Risk* serta melalui pelaksanaan penilaian risiko *inherent* Bank dan juga tingkat kematangan risiko keamanan siber terkait manajemen risiko keamanan siber Bank

E. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Pengelolaannya bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko hukum dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan serta proses litigasi.

Kerangka Manajemen Risiko Hukum

Divisi Legal dan Litigasi berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan, sebagai Direktur yang independen, sehingga tidak membawahi unit bisnis & operasional, *treasury*, keuangan, Internal Audit serta lainnya. Karena itu, Divisi Legal dan Litigasi memberikan pendapat hukum secara independen dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa dipengaruhi satuan kerja lainnya.

Divisi Legal dan Litigasi juga memberikan jasa hukum, baik secara tertulis dan/atau lisan berupa pendapat hukum, pemeriksaan dokumen hukum, pembuatan *draft* dokumen hukum, penelitian informasi hukum, pendampingan hukum. Selain itu, memberikan bantuan hukum secara litigasi dan/atau penyelesaian sengketa hukum dengan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Hukum

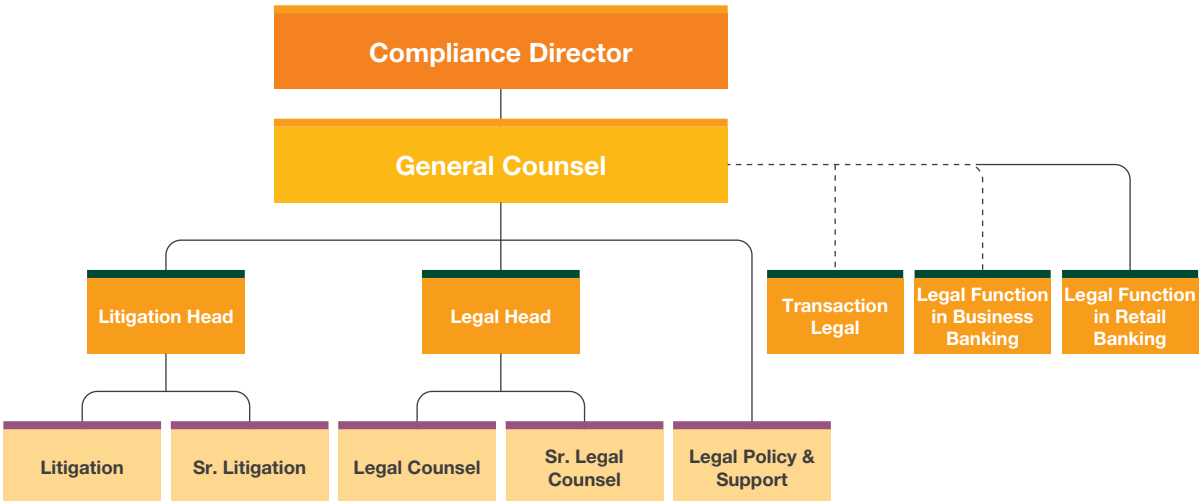

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Divisi Legal dan Litigasi telah memiliki kebijakan, prosedur dan batasan kewenangan atas fungsi kerjanya, sehingga dalam melaksanakan tugas telah terarah dan sesuai peraturan yang berlaku. Terhadap pemberian kajian risiko hukum, dilakukan oleh Divisi Legal & Litigasi bagi transaksi yang sifatnya materiil, sehingga risiko hukum yang mungkin terjadi telah dapat dimitigasi di awal transaksi. Misalnya, terkait penggunaan draf perjanjian standar.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko guna menghindari kemungkinan litigasi atau gugatan hukum. Proses tersebut dilakukan oleh organisasi hukum, yaitu berupa tindakan untuk mencegah dan/atau meminimalkan kemungkinan timbulnya risiko hukum dikemudian hari.

Proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan dan/atau sebelum pelaksanaan suatu transaksi/perikatan sampai dengan penyelesaian masalah hukum yang terjadi.
2. Melakukan *review* dari aspek hukum atas suatu produk dan/atau atas pelaksanaan suatu transaksi maupun layanan bank.
3. Proses penanganan hukum secara profesional dengan mempertimbangkan potensi kerugian.

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Hukum

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada proses manajemen risiko dilakukan melalui pengawasan aktif dari Direksi dan Komisaris terhadap perkara-perkara di Bank melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan Perkara Mingguan kepada Direktur Kepatuhan;
2. Laporan Sosialisasi Peraturan Bulanan kepada Direktur Kepatuhan;
3. Laporan Perkara Bulanan kepada *General Counsel*, Direktur Kepatuhan dan Komisaris;
4. Laporan Perkara Triwulanan kepada Komisaris;
5. Laporan *Ad-Hoc* kepada Komisaris (jika ada).

Walaupun terdapat laporan reguler, namun *General Counsel* setiap saat dapat memberikan laporan atau pendapat secara lisan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya darurat. Pendapat atau laporan tersebut harus dikoordinasikan terlebih dulu Direktur Kepatuhan.

F. Risiko Strategis

Risiko strategis merupakan risiko akibat tidak tepatnya pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, ketidakmampuan untuk melaksanakan suatu keputusan stratejik, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Risiko ini juga mencakup Kemampuan Bank dalam menciptakan keunggulan kompetitif di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat. Ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan bisnis tersebut, yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kerangka Manajemen Risiko Strategis

Unit Kerja Risiko Strategis berperan dalam pengelolaan risiko strategis dan berada di bawah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kelompok kerja risiko strategis mencakup keseluruhan lini bisnis dan unit-unit pendukung yang bekerja sama dengan Divisi Investor Relations dari Direktorat Keuangan dalam menganalisis dan memonitor risiko strategis.

Pertumbuhan bisnis Bank di masa depan erat kaitannya dengan pengambilan keputusan stratejik yang dilakukan Bank. Oleh karena itu, Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko strategis, sehingga risiko yang muncul dari ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dapat diminimalkan atau dihindari.

Bank senantiasa melakukan *review* atas isu strategi yang timbul yang berdampak negatif pada kondisi usaha atau keuangan Bank dengan mempertimbangkan keunggulan kompetitif, faktor daya saing, kondisi pasar, regulasi dan lingkungan bisnis. Seluruh implementasi strategi dikembangkan secara berkala setelah melakukan evaluasi dan penyesuaian.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan Rencana Bisnis Bank yang termasuk kajian mengenai arahan strategi dan aktivitas kunci untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan. Kebijakan Manajemen Risiko Strategis mencakup:

1. Kebijakan terkait risiko strategis sebagai pedoman bagi fungsi pengendalian strategis.
2. Pengelolaan risiko strategis mencakup mitigasi kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
3. Kebijakan umum audit sebagai pedoman Audit Internal Bank.

Sedangkan prosedur risiko strategis terkait dengan penetapan prosedur dan limit dengan berpedoman pada kebijakan yang diterapkan. Limit risiko strategis yang ditetapkan dapat meliputi risiko akibat *variance* dari rencana strategis karena adanya deviasi anggaran dan target waktu penyelesaian.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi terhadap risiko strategis merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko tersebut. Dalam proses identifikasi, Bank senantiasa mencatat dan menata usaha setiap data risiko strategis dan potensi dari kerugian akibat tidak terealisasi atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha atau rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan Bank. Sistem informasi manajemen risiko strategis Bank mencakup kegiatan:

1. Menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini.
2. Mendukung fungsi manajemen untuk memudahkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
3. Memenuhi ketersediaan data sesuai rencana bisnis Bank.
4. Mendukung pelaksanaan jejak audit atas data-data kejadian risiko strategis dalam hal pengelolaan dan pelaporannya, serta mendokumentasikan setiap kejadian risiko strategis untuk proyeksi potensi kerugian periode tertentu.

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Strategis

Bank telah memiliki Sistem Pengendalian Internal untuk manajemen risiko strategis dengan melakukan pemantauan secara berkala dengan membandingkan kinerja Bank dan hasil yang diharapkan atas strategi yang telah ditetapkan baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Bank BTPN senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko strategis, sehingga risiko yang muncul dapat diminimalkan atau dihindari.

G. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul jika Bank tidak patuh dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat menjalankan kegiatan usaha.

Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan di Bank adalah sebagai berikut:

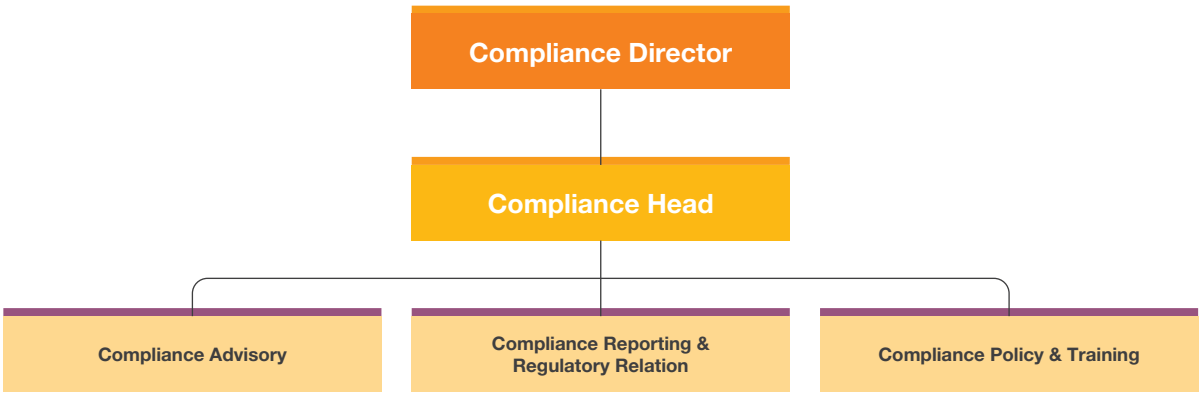

Bank memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan kepatuhan Bank dilakukan secara berkelanjutan antara lain sejalan dengan terbitnya ketentuan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maupun ketentuan perundangan lainnya serta ketentuan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank. Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang antara lain dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan (bulanan)
2. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan)
3. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (semesteran)

4. Laporan hasil pemantauan terhadap Risiko Kepatuhan kepada Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada rapat Komite Audit secara berkala.

Direksi dan Dewan Komisaris juga telah menyetujui Kebijakan Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan melalui pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, termasuk memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Pemantauan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah sesuai ketentuan OJK terkait Sinergi Perbankan.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kebijakan itu menjadi pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank. Secara berkelanjutan dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur dimaksud guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, antara lain sejalan dengan terbitnya ketentuan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maupun ketentuan perundangan lainnya serta ketentuan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko sesuai dengan penerapan manajemen risiko, guna memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Proses identifikasi risiko kepatuhan, antara lain dilakukan melalui uji kepatuhan terhadap kebijakan, produk program, aksi perusahaan yang akan dilaksanakan, termasuk terhadap transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit.
2. Proses pengukuran risiko kepatuhan dilakukan melalui penilaian mandiri atas risiko kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan profil risiko Bank. Kegiatan itu dilakukan secara berkala menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*). Disamping itu dilakukan *Compliance Self Assessment* yang dilakukan setiap semester bertujuan untuk memastikan agar kebijakan, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI, LPS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai *subsidiary* dari SMBC Group, proses pengukuran risiko dilakukan melalui pelaksanaan *Compliance Risk Assesment* (CRA) berdasarkan ketentuan SMBC sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Pemegang Saham Pengendali Bank serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Proses pemantauan risiko kepatuhan dilakukan, antara lain melalui *review* terhadap kesesuaian kebijakan Bank dengan ketentuan yang berlaku, pemenuhan parameter kehati-hatian, penyampaian laporan kepada OJK, BI, LPS, dan otoritas lainnya yang berwenang, tindak lanjut temuan OJK dan/atau BI.
4. Proses pengendalian risiko kepatuhan dilakukan melalui antara lain kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan, melakukan tindak lanjut hasil audit eksternal maupun internal.
5. Secara berkala dan berkelanjutan, pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Selain itu, disampaikan juga dalam forum rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada rapat Komite Audit secara berkala.

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Kepatuhan

Bank memiliki Sistem Pengendalian Internal yang memadai guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI, dan LPS maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sistem Pengendalian Internal Bank menggunakan model pertahanan 3 (tiga) lapis (*three lines of defense*), yaitu terdiri dari unit kerja Bisnis dan fungsi pendukung sebagai *Risk Taking Unit* dan dibantu oleh *Business Risk/Internal Control & Risk* (ICR) sebagai koordinator dalam pengelolaan risiko kepatuhan di lapis pertahanan pertama.

Sebagai lapis pertahanan kedua adalah Direktorat Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan dan Legal, Divisi Finance dan Divisi Human Resources. Divisi Kepatuhan sebagai bagian dari lapis pertahanan kedua berperan dalam pengembangan kerangka kerja

dan kebijakan terkait kepatuhan, dan Internal Audit (IA) sebagai lapis pertahanan ketiga bekerja secara independen dalam menilai efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan.

Internal Audit melakukan pemeriksaan secara berkala atas kecukupan proses pengelolaan risiko kepatuhan serta kepatuhan dari setiap pihak yang terkait sesuai dengan Rencana Audit yang telah ditetapkan.

Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023

Selama tahun 2023 Bank dapat memelihara pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI serta peraturan perundangan yang berlaku dengan pencapaian, antara lain:

1. Tingkat kesehatan Bank berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*/RBBR) per Desember 2023 berada pada peringkat 2 (Sehat).
2. Pemenuhan terhadap *regulatory parameter* antara lain:
    a. Rasio KPMM, termasuk Rasio Penyediaan Modal Inti (*Leverage Ratio*) di atas ketentuan yang berlaku.
    b. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK.
    c. Net NPL yang berada di bawah level 1%.
    d. Pemenuhan GWM baik Rupiah maupun Valas di atas ketentuan yang berlaku.
    e. Pemenuhan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan yang berlaku.
    f. Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*).
    g. Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) di atas ketentuan yang berlaku.
    h. Menetapkan target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudential (RPIM) dan melaksanakan monitoring berkelanjutan dalam mencapai target tersebut.
3. Pemenuhan pembentukan *capital surcharge* sesuai ketentuan OJK sejalan dengan penetapan BTPN sebagai Bank Sistemik.
4. Pemenuhan terhadap komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dapat dipenuhi sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

H. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholders* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Kerangka Manajemen Risiko Reputasi

Reputasi Bank BTPN merupakan aset yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis. Oleh karena itu setiap kegiatan penyampaian pesan kepada pihak eksternal, baik yang melibatkan media massa maupun tidak, yang dinilai dapat memengaruhi reputasi perusahaan perlu dikoordinasikan kepada Corporate Communications yang berada di dalam Divisi Communications & Daya.

Corporate Communications merupakan unit di bawah Direktorat Compliance, Legal & Corporate Secretary yang memiliki fungsi utama mengelola reputasi Bank. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan aktivitas komunikasi (penyampaian informasi) kepada pihak internal dan eksternal yang efektif dan efisien sesuai dengan strategi, visi, misi dan nilai-nilai Bank.

Terkait dengan fungsi pokok untuk mengelola reputasi Bank, Corporate Communications bertanggung jawab dan berperan sebagai pintu utama dalam penyampaian informasi internal dan eksternal. Corporate Communications juga melaksanakan fungsi pengawasan (kontrol & *monitoring*) pada seluruh aktivitas komunikasi Bank secara umum dan secara khusus yang dilaksanakan oleh setiap unit bisnis dan unit pendukung.

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam mengendalikan risiko reputasi, Bank memiliki kebijakan, prosedur, dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penanganan keluhan dari pemangku kepentingan (nasabah, dan *stakeholder* lainnya) yang dilakukan secara melekat.

Bank menyiapkan ketentuan langkah-langkah yang tertuang di prosedur sebagai persiapan dan antisipasi untuk merespons apabila ada pertanyaan dari media massa atau nasabah terkait peristiwa yang mengganggu reputasi Bank.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi risiko reputasi dilakukan melalui pembuatan Kajian Risiko Reputasi terhadap produk atau aktivitas baru maupun pengembangannya, serta aksi korporasi yang akan dilaksanakan, termasuk terhadap transaksi material Bank. Proses pengukuran risiko reputasi dilakukan melalui penilaian mandiri atas risiko reputasi sebagai bagian dari penyusunan profil risiko Bank yang dilakukan secara berkala.

Proses pemantauan risiko reputasi dilakukan melalui pemantauan media terkait dengan pemberitaan negatif dan pengaduan nasabah di media massa.

Terdapat 2 (dua) parameter utama dalam pengukuran risiko reputasi, yaitu (1) pemberitaan negatif dan (2) frekuensi serta waktu penyelesaian pengaduan nasabah. Pemantauan terhadap 2 (dua) parameter tersebut dilakukan secara berkesinambungan agar respons atas pemberitaan negatif maupun keluhan nasabah dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga tidak berdampak pada reputasi Bank. Proses pengendalian risiko reputasi dilakukan antara lain melalui laporan hasil pemeriksaan Internal Audit sebagai bahan masukan untuk perbaikan proses operasional secara berkelanjutan.

Pemantauan atas Risiko Reputasi dilakukan antara lain melalui Komite Manajemen Risiko. Internal Audit melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pengelolaan risiko reputasi dari setiap pihak yang terkait sesuai dengan Rencana Audit yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan audit yang dilakukan atas pemberitaan negatif dan pengelolaan penanganan keluhan nasabah meliputi pencatatan, tindak lanjut, dan pelaporan untuk memitigasi risiko reputasi telah dikaji pada saat pelaksanaan audit.

Sistem Pengendalian Risiko Reputasi

Bank telah memiliki Sistem Pengendalian Internal untuk manajemen risiko reputasi, mencakup pengawasan secara berkala atas keluhan nasabah atau pemberitaan negatif yang material berdampak pada reputasi Bank dan budaya pengendalian risiko reputasi yang melibatkan seluruh lini bisnis.

Pengendalian Risiko Reputasi dan Manajemen Risiko Reputasi di Kala Krisis

Mengacu pada *Crisis Communication Manual*, Divisi Communications & Daya merupakan penanggung jawab komunikasi krisis reputasi di pusat dan menunjuk penanggung jawab komunikasi krisis reputasi di daerah (regional). Divisi ini memberikan dukungan untuk semua aspek komunikasi eksternal dan internal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitor dan evaluasi proses komunikasi di saat krisis reputasi.

Tugas utama dalam situasi krisis reputasi, antara lain:

1. Menyusun strategi komunikasi dan taktik mengomunikasikannya;
2. Merancang dan menyusun pesan-pesan pokok;
3. Mempertimbangkan saluran (*channel*) komunikasi yang digunakan;
4. Menentukan juru bicara dan penanggung jawab komunikasi;
5. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab komunikasi dan juru bicara yang ditunjuk;
6. Melaksanakan fungsi komunikasi secara intensif kepada pihak eksternal dan internal;
7. Mengatur permintaan informasi atau wawancara dengan media; dan
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi.



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

230 Pengembangan Sumber Daya Manusia
236 Teknologi Informasi dan Operasional

> Bank BTPN terus memperkuat pendukung bisnis, baik di bidang SDM, TI, maupun operasional untuk mendukung kinerja berkelanjutan Bank.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

> Bank menerapkan sejumlah inisiatif penting dalam menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta.

PT Bank BTPN Tbk ("Bank BTPN", "BTPN", "Bank") memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja usaha Bank secara berkesinambungan. Karena itulah, Bank BTPN selalu menyiapkan rencana strategis dalam pengembangan SDM agar sejalan dengan strategi Bank.

Kebijakan ini juga selaras dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Dalam regulasi tersebut ditegaskan, Bank wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan.

FOKUS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

Sepanjang tahun 2023, Fungsi *Human Resources* Bank BTPN telah merealisasikan beragam inisiatif utama. Insiatif tersebut sejalan dengan fokus dalam rangka menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta (*to attract, develop and retain talents*), yang fokus pada 4 (empat) pilar berikut:

1. Pengembangan organisasi.
   a. Inisiatif dalam membangun organisasi.
   b. Program *engagement* karyawan.
   c. Program keragaman dan inklusi (*diversity and inclusion*).
   d. Pengembangan lokasi kerja fleksibel.

2. Pengembangan talenta, pembelajaran dan pengembangan talenta.
   a. Program untuk menjaga *key talents* bertahan dan berkembang di Bank.
   b. Mempersiapkan mereka untuk suksesi serta pengembangan karier lainnya dengan melakukan beberapa inisiatif melalui program peningkatan kapabilitas.
   c. Program pengembangan dengan bekerja sama dengan SMBC Group.
   d. Program perencanaan suksesi talenta.
   e. Program akselerasi.



3. Pengembangan sistem sumber daya manusia.
   a. Sistem Utama HR (*Human Resources Core System*).
   b. Aplikasi *Mobile* HR (*HR Mobile Platform*).
   c. *Dashboard* HR.

4. Pengkajian remunerasi dan manfaat karyawan. Sejalan dengan strategi menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta, Bank secara konsisten melakukan pengkajian dalam hal remunerasi dan manfaat agar dapat terus kompetitif di pasar talenta dan sejalan dengan perubahan pasar.

INISIATIF DAN PENCAPAIAN KINERJA 2023

Sehubungan dengan penjelasan atas fokus dari direktorat *Human Resources* Bank dalam hal pengembangan sumber daya talenta dan secara terus menerus dapat mampu mendukung pertumbuhan organisasi di masa depan, pada tahun 2023 Direktorat Human Resources telah melaksanakan beberapa inisiatif utama, sehingga sejalan dengan fokus strategi dalam menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta (*to attract, develop and retain talents*):

1. Pengembangan Organisasi. Pada tahun 2023 Bank menjalankan beberapa inisiatif kunci, termasuk program engagement karyawan, program keragaman dan inklusi (*diversity and inclusion*), serta melanjutkan implementasi dan review atas lokasi kerja fleksibel. Sehubungan dalam proses manajemen talenta Bank, Bank telah melakukan proses assessment profil talenta Bank, perencanaan suksesi termasuk perancangan program pengembangan bagi kandidat suksesor yang meliputi pelatihan, coaching serta program pengembangan lainnya.

   Bank melanjutkan pengembangan talenta dengan seminar-seminar praktis melalui leadership series yang dilakukan secara rutin serta pelatihan lainnya yang dilakukan melalui program pelatihan kepemimpinan dan eksekutif.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Terkait dengan program engagement karyawan, pada tahun 2023 Bank kembali meluncurkan survei keterikatan karyawan (*engagement survey*) yang diikuti oleh seluruh karyawan Bank.

Untuk implementasi lokasi kerja fleksibel Bank, pada Tahun 2023 Bank melanjutkan proses implementasi kerangka lokasi kerja fleksibel kepada populasi batch berikutnya. Dengan demikian diakhir tahun 2023, keseluruhan direktorat telah menerapkan kerangka lokasi kerja fleksibel sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan yang diatur dalam prosedur lokasi kerja fleksibel.

2. Pengembangan Talenta, Pembelajaran dan Pengembangan pegawai.
   Bank berkomitmen melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas serta kapabilitas SDM-nya secara berkelanjutan. Pengembangan dan Pembelajaran yang Bank lakukan adalah melalui peningkatan kompetensi kerja SDM baik di bidang teknis, nonteknis dan kepemimpinan, termasuk didalamnya sertifikasi wajib perbankan maupun sertifikasi wajib kompetensi sesuai dengan penugasan karyawan. Selanjutnya, Bank juga melakukan pengembangan kualitas SDM melalui program akselerasi yang diperuntukan talenta fresh graduates.

   Peningkatan kompetensi lainnya pun dilakukan Bank melalui melalui sistem e-learning Bank, akses kepada pembelajaran daring melalui MOOC (*Massive Open Online Course*). Secara keseluruhan, Bank memberikan fasilitas belajar dan kesempatan pengembangan kompetensi dan kapabilitas melalui berbagai pendekatan belajar dan pelatihan yang dilakukan baik secara tatap muka maupun daring. Sebagai upaya meningkatkan minat belajar dan mengembangkan diri bagi karyawan, Bank BTPN menyelenggarakan *Hybrid learning festival.*

   Tema yang diangkat tahun 2023 adalah “Broadening Horizon, Bringing Impact” Dimana karyawan diajak untuk meluaskan wawasannya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan sehingga dalam pekerjaannya menjadi lebih mumpuni dan memberikan dampak lebih berarti. Program ini juga berfokus pada topik transformasi, pertumbuhan dan kualitas, dan melanjutkan kerjasama dengan grup SMBC dalam proses pengembangan pegawai yang dilakukan melalui beberapa inisiatif program lainnya.Untuk mendukung proses manajemen pembelajaran dan pelatihan pegawai Bank secara keseluruhan, Bank menyediakan *learning management system* yang saat ini diakses dari *platform* HRIS Darwinbox. Melalui implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pegawai Bank BTPN dalam mengakses *e-learning* Bank dimana saat ini materi *e-learning* Bank dapat diakses melalui *mobile phone* pengguna.

3. Sistem Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2023 Bank menjalankan inisiatif otomasi dan proses transformasi digital dalam siklus perjalanan karyawan. Pada tahun 2023 Bank telah melakukan implementasi atas teknologi HR baru yang meliputi Sistem Utama HR (*Human Resources Core System*), *Platform Mobile* HR (*HR Mobile Platform*), dan persiapan atas *Dashboard* HR.

4. Pengkajian Remunerasi dan Manfaat Karyawan.
   Sejalan dengan strategi menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta, Bank secara konsisten melanjutkan proses pengkajian dalam hal remunerasi dan manfaat agar dapat terus kompetitif di pasar talenta dan sejalan dengan perubahan pasar.

KEBIJAKAN REKRUTMEN

Bank BTPN senantiasa berupaya menciptakan inklusivitas dalam program rekrutmen karyawan Bank. Karena itu, BTPN menggunakan beragam saluran komunikasi dan informasi untuk mengumumkan lowongan kerja tersebut, agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses informasinya.

Saluran untuk menyampaikan informasi lowongan kerja yang dimanfaatkan, antara lain *website* karier BTPN dan situs pencarian kerja. Selain itu, Bank juga bekerja sama dengan beberapa universitas untuk mendapatkan talenta terbaik.

Namun demikian, pengisian jabatan tertentu ditujukan untuk pegawai internal, dengan maksud memberikan kesempatan pengembangan pegawai BTPN. Sepanjang tahun 2023, Bank telah merekrut 609 pegawai baru.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Penerapan strategi dalam pengembangan kompetensi di tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Bank melanjutkan pengembangan kualitas SDM atas pengembangan kompetensi di bidang teknis, di bidang nonteknis, dan di bidang kepemimpinan diantaranya melalui:

a. Melanjutkan proses sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan diantaranya melalui sertifikasi Manajemen Risiko, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, WAPERD (Wakil agen penjual reksadana), WPPE-P (Wakil perantara Perdagangan efek pemasaran) dan *Treasury* bagi pegawai yang dipersyaratkan untuk memegang sertifikasi yang disebutkan diatas.
b. Melanjutkan proses sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan diantaranya sertifikasi Manajemen SDM, Kepatuhan, Informasi Teknologi, Internal audit, Keuangan.
c. Program Akselerasi Bank yang diperuntukan talenta fresh graduates
d. Melanjutkan proses peningkatan kompetensi lainnya melalui pelatihan yang disediakan Bank diantaranya melalui sistem e-learning Bank, akses MOOC (*Massive Open Online Course*) yang diberikan kepada pegawai Bank, serta melalui berbagai pelatihan yang dilakukan baik *online* maupun *offline*.
e. Mengadakan 2 hari BTPN *Hybrid learning festival* yang berfokus pada topik transformasi, pertumbuhan dan kualitas. Dalam learning festival tahun ini serangkaian program yang dijalankan diantaranya adalah seminar dari para ahli, *sharing session* dari pimpinan Bank BTPN, program penghargaan pegawai, area pembelajaran / studio, serta sesi pelatihan praktis.
f. Melanjutkan kerjasama dengan grup SMBC dalam proses pengembangan pegawai yang dilakukan melalui beberapa program.
g. Bank menyediakan *learning management system* yang saat ini diakses dari platform HRIS Darwinbox. Melalui implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pegawai Bank BTPN dalam mengakses e-learning Bank dimana saat ini materi e-learning Bank dapat diakses melalui *mobile phone* pengguna.

Ringkasan Pelaksanaan Pelatihan

Uraian	2023	2022
Jumlah Program Pelatihan	753	420
Jumlah Peserta	6.544	101.012
Total Man-Days	40.356	33.723
Jumlah Investasi Pelatihan (Rp Juta)	65.031	72.672
Rata-rata Investasi Pelatihan per Karyawan (Rp Juta)	9,8	10,3
Total Jam Pelatihan	322.849	269.756

Pelatihan Berdasarkan Level Jabatan

Level Jabatan	Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Penyelenggara
Top Management	187	In house & Public	Pengembangan Diri	Internal & Eksternal
Senior Management	740	In house & Public	Pengembangan Diri	Internal & Eksternal
Management	2.830	In house & Public	Pengembangan Diri	Internal & Eksternal
Office/Supervisor	1.564	In house & Public	Pengembangan Diri	Internal & Eksternal
Clerical	1.223	In house & Public	Pengembangan Diri	Internal & Eksternal

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

REMUNERASI

Bank BTPN menerapkan kebijakan remunerasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan ketentuan tentang upah minimum provinsi (UMP) yang kebijakan induknya ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, Bank menganut prinsip meritokrasi dalam penerapan remunerasi. Prinsip ini mengutamakan penilaian objektif dari kinerja dan dampak yang dihasilkan bagi Bank dalam mengatur dan menentukan remunerasi. Dengan demikian, faktor-faktor dasar yang digunakan untuk melakukan penyesuaian remunerasi karyawan mengacu pada kinerja Bank, kinerja unit, kerja dan kinerja individu, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan Bank. Penyesuaian remunerasi karyawan dan pemberian bonus kinerja (*performance bonus*) dilakukan pada awal tahun berdasarkan kinerja tahun sebelumnya.

Bank melakukan penelaahan setiap tahun terhadap penerapan benefit bagi karyawan, seperti perlindungan kesehatan yang saat ini diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan untuk karyawan dan keluarga. Dalam penelaahan itu, Bank mempertimbangkan rasio penggunaan fasilitas kesehatan dan rasio kecukupannya. Selain itu, Bank juga membandingkan fasilitas yang diberikan oleh Bank yang setara, yang datanya diperoleh melalui survei remunerasi yang dilakukan oleh konsultan.

Kajian remunerasi untuk karyawan tersebut, antara lain dilaksanakan oleh Komite Human Resources yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota Direksi ditambah 1 (satu) orang pejabat Human Resources.Komite ini melakukan rapat minimal 4 (empat) kali setahun sesuai ruang lingkup pedoman kerja Komite Human Resources.

PENGHARGAAN MASA KERJA

Bank BTPN memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan yang telah mendedikasikan waktu produktifnya kepada Bank. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai dengan masa kerja 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun di Bank sebagai apresiasi atas loyalitas yang diberikan kepada perusahaan.

Pada tahun 2023, Bank memberikan penghargaan masa kerja kepada 382 pegawai, dengan kategori sebagai berikut: penghargaan masa kerja 30 tahun sebanyak 26 pegawai, 20 tahun sebanyak 13 pegawai, dan 10 tahun sebanyak 343 pegawai.

TINGKAT TURN OVER KARYAWAN

Tingkat *turn over total* karyawan Bank pada tahun 2023 adalah sebesar 12,4%. Terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 13,6%. Untuk Tingkat *turn over voluntary* pada tahun 2023 adalah sebesar 6,92%, juga terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 10,1%.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024

Untuk mendukung fokus direktorat HR dalam proses pengembangan SDM Bank serta mendukung perkembangan bisnis Bank, khususnya dalam menarik, mengembangkan dan mempertahankan talenta *(to attract, develop and retain talents*). Bank menilai strategi sumber daya manusia Bank yang berfokus pada pilar pengembangan organisasi, pengambangan Talenta, Pembelajaran dan Pengembangan, implementasi sistem Sumber Daya Manusia dan pengkajian Remunerasi dan Manfaat Karyawan masih relevan untuk dapat mendukung perkembangan bisnis Bank. Pada tahun 2024, Bank juga akan berfokus pada keterikatan pegawai dan hubungan industrial.

Dalam penjabaran teknis, fokus strategis ini dibagi menjadi 5 (lima) pilar utama (core pillars) yang terdiri dari:

1. Pengembangan Organisasi. Pengembangan organisasi Bank bertujuan untuk memastikan Bank memiliki sumber daya manusia yang memadai dan berkapabilitas untuk menjalankan strategi Bank dimana pada tahun 2024 fokus strategi Bank untuk pengembangan organisasi ini meliputi pengembangan talenta dan rencana suksesi internal Bank, program keberagaman dan inklusi (*Diversity & Inclusion*) dimana bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selain itu upaya meningkatkan daya saing untuk merekrut talenta terbaik, dilakukan dengan meningkatkan *Employer Branding* and *Employee Value Proposition* bank melalui beberapa inisiatif dan kerjasama dengan organisasi yang memiliki reputasi yang baik. Kunci inisiatif terakhir

dalam pilar pengembangan organisasi adalah dengan melakukan kajian dan modifikasi atas program pengembangan akselerasi Bank BTPN, yang bertujuan untuk membangun program pengembangan yang relevan dan sesuai dengan strategi bisnis Bank.

2. Learning & Development. Untuk mengembangkan talenta pegawai Bank BTPN, Bank secara berkelanjutan berkomitmen melakukan pengelolaan,dan pengembangan kualitas serta kapabilitas SDM-nya melalui peningkatan kompetensi kerja SDM baik di bidang teknis, non-teknis dan kepemimpinan, termasuk didalamnya sertifikasi wajib perbankan maupun sertifikasi wajib kompetensi sesuai dengan penugasan karyawan dengan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM untuk mengembangkan kompetensi pegawai. Pada tahun 2024 Bank akan berfokus pada inisiatif utama diantaranya melalui pengembangan secara berkelanjutan dan penggunaan e-learning Bank yang saat ini diakses melalui HRIS Darwinbox, program pelatihan digital dan *analytics* untuk pegawai Bank, serta melakukan kolaborasi dengan SMBC Grup. Bank juga terus melanjutkan pemenuhan sertifikasi pegawai diantaranya Manajemen Risiko, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, WAPERD (Wakil agen penjual reksadana), WPPE-P (Wakil perantara Perdagangan efek pemasaran) dan *Treasury* bagi pegawai yang dipersyaratkan untuk memegang sertifikasi yang disebutkan diatas, serta sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan diantaranya sertifikasi Manajemen SDM, Kepatuhan, Informasi Teknologi, Internal audit, Keuangan.

3. Implementasi Teknologi HR, setelah melakukan implementasi atas HRIS Baru & *platform mobile* Bank yang terintegrasi pada tahun 2023. Pada tahun 2024 Bank akan melanjutkan proses transformasi digital HR diantaranya dengan melakukan kajian dan pengembangan berkelanjutan atas sistem HRIS Bank serta melakukan pengembangan dan implementasi atas HR *Dashboard*. HR *Dasboard* ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Bank dalam mengelola, memproses dan menyajikan informasi terkait sumber daya manusia Bank sehingga dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan secara lebih cepat dan terukur

4. Bank akan melanjutkan upaya meningkatkan keterikatan pegawai (*employee engagement*) yang berdampak pada motivasi dan kinerja karyawan Bank. Untuk itu maka tahun 2024 Bank kembali menjalankan *survey* keterikatan pegawai (*engagement survey*), memberikan pelatihan bagi pimpinan unit kerja agar memahami pentingnya meningkatkan keterikatan tim kerja dan mendorong para pimpinan unit kerja untuk berkomitmen melakukan peningkatan dan atau perbaikan dimana perlu sebagai tindak lanjut sesuai hasil survei sebelumnya.

5. Tahun 2024 Bank dan Serikat Pekerja akan bekerja sama untuk persiapan, proses negosiasi dan finalisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank.

6. *Rewards & Performance Management,* Bank secara berkelanjutan akan melakukan peninjauan atas remunerasi dan manfaat pegawai dengan market saat ini, sehingga Bank dapat merumuskan formula remunerasi dan pegawai yang kompetitif dan sesuai dengan strategi Bank.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASIONAL

> BTPN Jenius stelah mendapatkan sertifikasi ISO 27001, yang merupakan bagian dari inisiatif untuk menjamin standar keamanan siber.

TEKNOLOGI INFORMASI

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan PT Bank BTPN Tbk ("Bank BTPN", "BTPN", "Bank"), antara lain untuk mendukung layanan kepada nasabah serta kegiatan operasional Bank. Kebijakan ini selaras dengan Peraturan OJK Nomor 11 /POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Sebagai layanan kepada nasabah, fokus utama Bank dilakukan pada sektor bisnis retail dan korporasi. BTPN juga menyadari bahwa TI memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Bank. Karena itu, Bank terus mengembangkan perbankan digital yang menjadi keunggulan utama Bank secara berkesinambungan.

Kebijakan penerapan TI di Bank menitikberatkan pada optimasi dan efektivitas sumber daya TI, memperkuat tata kelola TI, dan juga memperkuat keamanan siber. Karena itu, Bank selalu mengelola investasi TI secara tepat sasaran.

Fokus Pengembangan Tahun 2023

Tahun 2023, sejalan dengan Rencana Bisnis Bank, Bank BTPN berencana untuk:

1. Mengimplementasikan kapabilitas IT yang bersifat strategis, untuk mendukung bisnis digital dan ekosistem, dalam peningkatan pengalaman dan perjalanan bagi nasabah dan partner.
2. Secara berkesinambungan menjalankan operational excellence dengan melakukan konsolidasi aplikasi, re-engineer, dan menstandarisasi teknologi untuk mengurangi kompleksitas operasional
3. Menerapkan model operasi TI yang selaras dengan pelanggan untuk memungkinkan cara kerja dan pemikiran desain yang gesit
4. Menerapkan tata kelola yang kuat, standar keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan untuk memitigasi risiko dan memungkinkan pertumbuhan dan kelincahan yang berkelanjutan, serta meningkatkan sinergi antara IT BTPN, IT BTPN Syariah, dan IT SMBC.
5. Meningkatkan aspek keamanan siber dengan menerapkan roadmap keamanan siber untuk memitigasi risiko bisnis
6. Meningkatkan aspek tata kelola dan operasional terkait penggunaan data, untuk mendukung bisnis serta pemenuhan kesesuaian terhadap regulator



Visi dan Misi Direktorat Teknologi Informasi

VISI

Menjadi penyedia solusi inovatif terbaik, menghadirkan pengalaman berbeda.

MISI

Membuat hidup para pemangku kepentingan lebih mudah melalui kreasi layanan yang bernilai.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASIONAL

Organisasi Pengelolaan TI

Pelaksanaan kegiatan teknologi informasi di lingkungan Bank BTPN dikelola oleh Head of Information Technology yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berikut adalah struktur organisasi yang berlaku pada tahun 2023.

Organisasi Pengelola TI

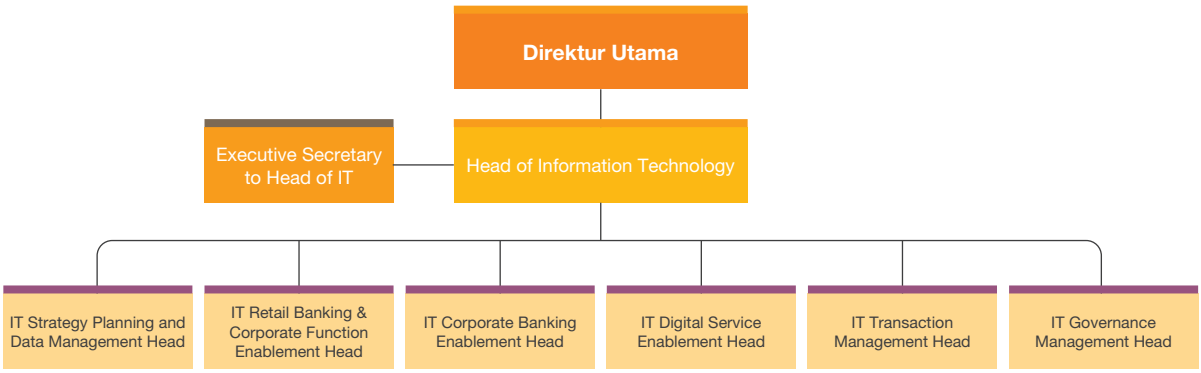

Sumber Daya Manusia

Bank BTPN berpandangan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal sangat penting untuk mendukung pengembangan TI di lingkungan Bank. Apalagi, BTPN merupakan Bank pertama yang memiliki kemampuan digital (*digital capabilities*) serta memberikan solusi digital banking, Karena itulah, Bank terus mengembangkan SDM secara berkelanjutan agar mampu memberikan dukungan bagi pengembangan TI yang direncanakan.

Hingga akhir Desember 2023, jumlah SDM di Direktorat Teknologi Informasi sebanyak 475 orang, yang terbagi dalam 6 (enam) organisasi.

Sumber Daya Manusia TI

No.	Organisasi	Tanggung Jawab	Jumlah (Orang)
1	IT Strategic Planning and Data Management Head	Memastikan fungsi manajemen dan organisasi TI untuk berjalan dengan efisien dan efektif, yang termasuk didalamnya adalah fungsi perencanaan strategis TI, pengelolaan anggaran TI, pengelolaan pengadaan TI dan Vendor Management TI, Manajemen Proyek TI, dan pelaksanaan pusat inovasi yang sejalan dengan rencana dan arah strategis Bank. Serta menjaga dan meningkatkan kemampuan Digital Capabilities, kesiapan keamanan siber, kualitas data Bank secara keseluruhan, tata kelola data,dan pengambilan keputusan berbasis data.	82
2	IT Retail Banking & Corporate Function Enablement Head	Membangun relationship dan kolaborasi dengan bisnis Retail Banking & Corporate Functions untuk mendukung solusi bisnis, operasional, dan teknis dengan pendekatan Customer Centric.	46
3	IT Corporate Banking Enablement Head	Membangun relationship dan kolaborasi dengan bisnis Corporate Banking untuk mendukung solusi bisnis, operasional, dan teknis dengan pendekatan Customer Centric.	23
4	IT Digital Service Enablement Head	Melakukan pengembangan dan maintenance secara terus menerus untuk core system, payment system yang ada untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan bisnis bank serta mendukung kebutuhan proyek Bank dalam hal integrasi sistem.	157
5	IT Transaction Management Head	Memastikan tersedianya layanan infrastruktur untuk mendukung operasional Bank, perkembangan bisnis dan Key Strategic Initiatives. Termasuk Memastikan ketersedian dan kesiapan Disaster Recovery Procedure yang memenuhi SLA.	149

No.	Organisasi	Tanggung Jawab	Jumlah (Orang)
6	IT Governance Management Head	Memimpin, merencanakan, menetapkan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan tata kelola TI, memastikan tata kelola dilaksanakan sesuai oleh organisasi TI, dan untuk memastikan dan melakukan pengawasan untuk pengelolaan risiko TI di Bank.	16

Untuk mendukung kemampuan SDM di bidang TI, Bank telah merealisasikan sejumlah pelatihan, di beberapa area antara lain:
1. Project Management
2. Tata Kelola mengacu pada COBIT 2019, dan
3. Secure Code Practice dari aspek keamanan siber.

Sertifikasi yang Dimiliki

Pada tahun 2023, BTPN Jenius sebagai salah satu sistem pembayaran dari BTPN, telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001. Sertifikasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif untuk menjamin standar keamanan siber di lingkungan Bank khususnya Jenius.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Kebijakan Bank BTPN terkait dengan penerapan tata kelola TI lingkungan Bank, yakni harus sejalan dengan rencana Bank dan induk usaha (SMBC Group). Selain itu, tentu saja memperhatikan kesesuaian dengan aturan yang ada, baik dari regulator di bidang keuangan maupun pemerintah.

Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan standar operasi, petunjuk pelaksanaan di beberapa aspek seperti perencanaan TI, anggaran TI, implementasi TI, dan operasional TI. Bank terus melakukan peningkatan dengan cara mengadopsi common practice framework terkait tata kelola yaitu COBIT 5.0.

Evaluasi terhadap analisa kesenjangan dilakukan pada proses yang menjadi prioritas di tahun 2023. Kegiatan tersebut akan terus berjalan sebagai bagian dari pengembangan berkelanjutan untuk tata kelola TI di Bank.

Implementasi kebijakan tata kelola dituangkan dalam IT Strategic Planning (ITSP - IT Road Map) yang disusun setelah mempertimbangkan:
1. Visi dan Misi BTPN.
2. Tujuan Strategis Bank BTPN.
3. Aspirasi dan strategi saat merger.
4. Tren Industri dan Informasi Teknologi, misalnya Open Source, Cloud, Open API, dan lainnya.
5. Key pain point serta tantangan utama.
6. Turut juga mempertimbangkan IT Strategic Initiative yang dilakukan pada periode sebelumnya.

Mekanisme Identifikasi terhadap Disrupsi

Bank BTPN senantiasa memperhatikan disrupsi bisnis dan teknologi. Untuk memahami disrupsi teknologi, Bank melakukan evaluasi terhadap teknologi baru yang bisa diterapkan untuk mendukung bisnis Bank, melalui:
1. Memiliki organisasi yang berfungsi untuk melakukan riset dan pengembangan untuk teknologi baru
2. Kolaborasi dengan SMBC untuk melakukan review terhadap teknologi baru
3. Melakukan evaluasi berdasarkan informasi/ study case terhadap penggunaan teknologi, yang dilakukan dari pihak ketiga

Strategi Keamanan Sistem Siber (*Cyber Security*)

Sebagai Bank yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan layanan digital bagi nasabah, Bank BTPN senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerapan standar manajemen risiko keamanan siber. Apalagi, Bank juga memperhatikan ancaman keamanan siber semakin meningkat.

Penerapan manajemen risiko keamanan siber Bank diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, standar penerapan manajemen risiko keamanan siber induk usaha (Grup SMBC) serta best practice yang tersedia. Oleh karena itu, pada tahun 2023, Bank BTPN merilis dan menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko Keamanan Siber yang memuat: kerangka kerja, strategi dan standar pengelolaan, dan penerapan manajemen risiko keamanan siber Bank.

Adapun Kebijakan Manajemen Risiko Keamanan Siber ini secara umum memuat hal-hal berikut:
1. Standar penerapan Tata Kelola risiko keamanan siber yang dirumuskan untuk memastikan kecukupan tata kelola risiko keamanan siber Bank. Proses Tata Kelola ini meliputi pengawasan aktif

TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASIONAL

oleh dewan komisaris dan direksi, perumusan risk appetite dan toleransi risiko serta penyelenggaraan kampanye kesadaran risiko keamanan siber secara berkala berkelanjutan.
2. Kerangka kerja manajemen risiko keamanan siber yang mencakup kecukupan ketersediaan strategi keamanan siber, kecukupan sumber daya dan perangkat Bank serta ketersediaan dan kecukupan ketentuan internal yang mengatur standar penerapan manajemen risiko keamanan siber Bank.
3. Pengelolaan sumber daya yang diperlukan di dalam penerapan manajemen risiko keamanan siber baik yang berupa Sumber Daya Manusia (SDM), kecukupan sistem manajemen informasi keamanan siber maupun berbagai bentuk sumber daya lainnya yang dibutuhkan Bank di dalam mengelola risiko keamanan siber.
4. Pengendalian risiko keamanan siber melalui penerapan mekanisme kontrol maupun penerapan Teknologi Informasi yang diperlukan di dalam rangka untuk mengendalikan risiko keamanan siber yang mungkin terjadi di Bank.

Strategi/Proses Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*)

BTPN telah mengantisipasi seandainya mengalami bencana yang mengganggu kegiatan operasional Bank. Upaya mitigasi sebagai strategi pemulihan bencana yang dilakukan oleh Bank, mencakup:

1. Memiliki prosedur untuk Rencana Kelanjutan Bisnis TI.
2. Memiliki pusat data untuk pemulihan data.
3. Melakukan secara rutin(tahunan) yaitu kegiatan untuk simulasi perpindahan pusat data.

Sistem/Mekanisme Pelaporan kepada Direksi

Selaras dengan Peraturan OJK Nomor 11 / POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank melakukan pelaporan setiap semester kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Pelaporan mencakup rencana strategis TI, anggaran rencana strategis TI, dan pelaksanaan/implementasi daripada inisiatif rencana strategis TI.

Selain itu, Bank juga melaporkan: implementasi inisiatif rencana strategis TI, anggaran TI, dan kinerja TI untuk periode triwulan dalam forum Komite Pengarah TI.

Sistem Evaluasi

Pengukuran Kinerja TI pada tahun 2023, mencakup beberapa aspek, yaitu delivery project, tata kelola, kepuasan kantor cabang, kepuasan pelanggan, dan operational excellence. Secara keseluruhan, Divisi TI berhasil mencapai hasil yang sangat baik sepanjang tahun 2023, dengan pencapaian di atas ukuran atau target yang telah ditentukan.

Roadmap Pengembangan TI

Roadmap Pengembangan TI pada tahun 2023 sejalan dengan pelaksanaan Rencana Strategis TI 2022-2026, yaitu dengan mengutamakan optimalisasi penggunaan teknologi digital, cyber security, dan efektivitas sumber daya TI, serta Tata Kelola TI. Selain itu, Bank juga melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya dan tata kelola melalui sinergi dengan SMBC

Pengembangan Tahun 2023

Pengembangan TI pada tahun 2023 dilakukan di beberapa area, yang antara lain mencakup:

1. ***Operating and Delivery Model***
   a. Bank telah mengimplementasikan TI *Agile* dan saat ini sudah berjalan dengan baik untuk merespons kebutuhan bisnis.
   b. Bank mulai menerapkan tata kelola TI.
   c. Menjaga ketersediaan talenta TI untuk mendukung kesinambungan product digital BTPN serta digitalisasi proses di Bank BTPN.

2. **Aplikasi dan Infrastruktur.**
   a. Bank selalu mendaya-gunakan digital platform pada berbagai produk dan channel, seperti pengembangan kartu kredit yang di integrasikan ke digital platform Jenius, sehingga dapat memberikan layanan digital Kartu Kredit pertama di Indonesia.
   b. Bank sedang melakukan perluasan kemudahan integrasi dengan pihak ketiga mengacu pada standar layanan pembayaran Bank Indonesia.
   c. Dari aspek infrastruktur, Bank mengadopsi penggunaan teknologi awan untuk mendukung bisnis Bank.
   d. Melakukan konsolidasi, peremajaan serta dekomisi atas aplikasi Bank sehingga portofolio layanan TI menjadi lebih efektif dan lebih lincah mendukung bisnis bank.

3. ***Core Banking***
   a. Bank telah berhasil menjalankan konsolidasi *Core Banking* pasca-merger (perbankan ritel dan korporasi),
   b. Tercapainya stabilisasi setelah dilakukannya implementasi konsolidasi *Core Banking* yang memudahkan Bank dalam pengelolaan sistem serta memungkinkan Bank menawarkan solusi digital juga untuk segmen korporasi. Selain hal tersebut, *Core Banking* juga dapat menata-usahakan transaksi dan proses *Corporate Banking* dengan lebih baik.

4. **Manajemen Data**
   BTPN telah meningkatkan kapabilitas *Data Warehouse*, dan *Big Data*, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional dan layanan nasabah, sejalan dengan kebijakan dan tata kelola Bank.

5. **Keamanan Siber**
   Selalu menjaga dan meningkatkan kemampuan siber di BTPN agar dapat secara efektif menjaga keamanan data dan transaksi nasabah

Keunggulan TI BTPN

Sebagai upaya menjaga kesinambungan dan peningkatan kapabilitas di bidang TI, Bank telah memiliki sejumlah keunggulan, yang antara lain terkait dengan:

1. Tujuan dan Fokus yang jelas. Organisasi Teknologi Informasi, Proyek Spesial Teknologi Informasi, Perencanaan Strategis Teknologi Informasi 2020-2023 akan memastikan stabilisasi, dan kesinambungan terhadap aspirasi digital.
2. Kemampuan digital dengan mengoptimalkan dan mendapatkan nilai bisnis dari infrastruktur digital, budaya dan pola pikir (model operasi), arsitektur, dan pengembangan aplikasi secara modern, manajemen data, dan program keamanan siber.

Investasi Teknologi

Pada tahun 2023, total belanja modal (*capital expenditure/capex*) TI sesuai dengan Rencana Bisnis Bank adalah sebesar Rp400 Miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk, namun tidak terbatas pada implementasi sistem pengelolaan pinjaman, sistem pengelolaan sumber daya manusia (HRIS), dan sistem *Trade Finance*, dan pengembangan Digital lainnya.

Rencana Strategis 2024

Untuk tahun 2024, sejalan dengan Rencana Bisnis Bank, Bank BTPN berencana untuk:

1. Bank berencana untuk mengimplementasikan kapabilitas TI yang bersifat strategis, untuk mendukung bisnis digital dan ekosistem, dalam peningkatan pengalaman dan perjalanan bagi nasabah dan partner, dan juga untuk mendukung rencana pengembangan bisnis Bank baik yang bersifat organik dan in-organik.
2. Bank berencana untuk secara berkesinambungan menjalankan *IT Operational excellence* dengan melakukan konsolidasi aplikasi, *re-engineer*, dan menstandarisasi teknologi untuk mengurangi kompleksitas operasional.
3. Bank berencana untuk secara berkesinambungan menerapkan model operasi TI yang selaras dengan pelanggan untuk memungkinkan cara kerja dan pemikiran desain yang gesit.
4. Bank berencana untuk secara berkesinambungan menerapkan tata kelola yang kuat, standar keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan untuk memitigasi risiko dan memungkinkan pertumbuhan dan kelincahan yang berkelanjutan, serta meningkatkan sinergi antara TI BTPN, TI BTPN Syariah, dan TI SMBC.
5. Bank berencana untuk memastikan implementasi dari keamanan siber adalah selaras dengan kerangka keamanan siber yang di tentukan oleh Chief Information Security Officer (CISO).
6. Bank berencana untuk meningkatkan aspek tata kelola dan operasional terkait penggunaan data, untuk mendukung bisnis serta pemenuhan kesesuaian terhadap regulator.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN OPERASIONAL

OPERASIONAL

Bidang Operasional Bank BTPN telah memiliki kebijakan dan visi, yakni: Menjadi mitra yang kompeten serta senantiasa mendukung kinerja dan percepatan pengembangan usaha Bank melalui layanan operasional yang terbaik.

Pada intinya, kehadiran Bidang Operasional bertujuan untuk mendukung pencapaian bisnis Bank. Pada tahun 2023, secara konsisten dan berkesinambungan mengimplementasikan 3 (tiga) pilar strategi yang mengedepankan kualitas layanan, peningkatan pengendalian internal dan kepatuhan serta pencapaian keunggulan lini operasional.

Inisiatif dan Strategi Operasional

Lini operasional BTPN menerapkan rencana strategis 5 (lima) tahun (2022-2026) yang berfokus pada pilar yang mengedepankan kualitas layanan, peningkatan pengendalian internal dan kepatuhan serta pencapaian keunggulan lini operasional melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. BTPN menjalankan pengembangan pada kualitas layanan nasabah yang berfokus pada digitalisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kemampuan layanan yang menjamin kelancaran dan pengalaman nasabah yang konsisten dengan tingkat ketersediaan layanan yang tinggi.
2. Peningkatan pengendalian internal dan kepatuhan pada lini operasional melalui perbaikan terhadap akurasi dan keandalan dalam proses pelaporan regulator, transformasi yang berfokus pada pengawasan yang berkesinambungan dan pencapaian mekanisme pencegahan serta otomatisasi proses rekonsiliasi dan penyelesaian transaksi.
3. Pencapaian keunggulan lini operasional melalui digitalisasi atas proses kerja, perluasan inisiatif integrasi dan penerapan otomatisasi yang akan meningkatkan derajat kelancaran proses (*straight through processing*) serta perbaikan terhadap akurasi dan kualitas data.

Pencapaian Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Lini Operasional telah menjalankan berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan ketiga pilar strategis yaitu kualitas layanan, peningkatan pengendalian internal dan kepatuhan serta pencapaian keunggulan operasional, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan kepada nasabah yang telah dijalankan melalui penerapan teknologi dan upaya peningkatan, termasuk implementasi layanan digital:
   a. Penerapan *chatbot* pada aplikasi Jenius untuk layanan kontak nasabah
   b. *e-Advice* untuk produk deposito dan pinjaman bagi nasabah korporasi
   c. Digitalisasi pencairan pinjaman bagi nasabah pensiun
   d. Integrasi cabang *corporate* dan cabang *retail* di Menara BTPN
   e. Penerapan konsep *One Branch* untuk layanan beragam bisnis di cabang
   f. Peningkatan aplikasi antrian dan aplikasi pemrosesan transaksi di cabang
   g. Peningkatan kultur sumber daya manusia yang berfokus pada layanan

2. Guna meningkatkan akurasi, pengendalian internal dan kehandalan proses, termasuk kepatuhan pada regulator serta proses pelaporan kepada regulator, secara berkelanjutan Bank telah menjalankan inisiatif dan pengembangan sebagai berikut:
   a. Peningkatan untuk pelaporan kepada regulator dijalankan melalui pengembangan sejumlah aplikasi pendukung pelaporan seperti Antasena, SCV, LLL, LLD, OBOX, SLIK, APOLO, Transfer Dana, LCS, QRIS dan laporan lainnya
   b. Secara berkelanjutan meningkatkan kualitas data dengan menjalankan aktivitas perbaikan data nasabah terutama untuk data nihil
   c. Pengimplementasian sistem e-Meterai sejalan dengan peraturan perpajakan
   d. Sertifikasi kualitas ISO pada beberapa unit kerja *back-office*

3. Berfokus pada pencapaian keunggulan lini operasional melalui inisiatif dan upaya otomatisasi, peningkatan proses dan pengembangan sistem seperti:
   a. Perluasan implementasi otomasi berbasiskan *robotic* pada pemrosesan pinjaman, *trade finance* dan aktivitas kerja lainnya
   b. Pengembangan aplikasi untuk otomasi rekonsiliasi dan monitoring terhadap seluruh *general ledger* (GL), dengan jumlah GL yang saat ini telah diotomasi berkisar sejumlah 700
   c. Peningkatan proses transaksi melalui aktivitas pengembangan pada sistem dan pemrosesan transaksi domestik dan internasional
   d. Pengembangan aplikasi yang mendukung peningkatan dan pengendalian pada beberapa proses *back-office* terkait pinjaman

Rencana Strategis 2024

Sejalan dengan rencana strategis 5 (lima) tahun periode 2022 - 2026, Lini Operasional BTPN tetap berkomitmen melanjutkan implementasi yang berfokus pada ketiga pillar strategis yang mengedepankan kualitas layanan, peningkatan pengendalian internal dan kepatuhan serta pencapaian keunggulan lini operasional melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bank akan menjalankan pengembangan pada kualitas layanan nasabah yang berfokus pada digitalisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kemampuan layanan yang menjamin kelancaran dan pengalaman nasabah yang konsisten dengan tingkat ketersediaan layanan yang tinggi.
2. Peningkatan pengendalian internal dan kepatuhan pada lini operasional melalui perbaikan terhadap akurasi dan keandalan dalam proses pelaporan regulator, transformasi yang berfokus pada pengawasan yang berkesinambungan dan pencapaian mekanisme pencegahan serta otomatisasi proses rekonsiliasi dan penyelesaian transaksi.
3. Pencapaian keunggulan lini operasional melalui digitalisasi atas proses kerja secara berkelanjutan, dengan memperhatikan pula dampak lingkungan seperti *less paper transaction*, perluasan inisiatif integrasi dan penerapan otomatisasi yang akan meningkatkan derajat kelancaran proses (*straight through processing*) serta perbaikan terhadap akurasi dan kualitas data.

Selain ketiga pilar tersebut, untuk meningkatkan layanan bagi nasabah, Bank akan melanjutkan pengembangan transaksi dengan menggunakan sistem layanan BI-FAST sesuai dengan strategi Bisnis dan sejalan dengan rencana pengembangan dari Bank Indonesia.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

247 Prinsip Penerapan GCG
248 Dasar Hukum Pelaksanaan
249 Tujuan Penerapan GCG
250 Struktur GCG
251 Penerapan dan Komitmen GCG
259 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
272 Pemegang Saham Utama dan Pengendali
273 Dewan Komisaris
280 Direksi
288 Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi
302 Komite Di Bawah Dewan Komisaris
320 Komite Di Bawah Direksi
336 Sekretaris Perusahaan
342 Fungsi Kepatuhan
346 *Internal Fraud*
350 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik
350 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank
351 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Besar
352 Audit Eksternal
353 Satuan Kerja Audit Internal
359 Sistem Pengendalian Intern (SPI)
362 Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi
362 Sanksi Administrasi
363 Akses Informasi dan Data Perusahaan
364 Kode Etik
366 *Price Sensitive Information Personal Account Dealing*
366 Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
367 Sistem Pelaporan Pelanggaran
368 Kebijakan Antikorupsi dan Penyuapan
369 Keterbukaan dalam Praktik *Bad Governance*

> **Bank BTPN senantiasa meningkatkan penerapan prinsip GCG sebagai inisiatif dalam mendukung kinerja Bank.**

GCG atau Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) yang mengacu pada sistem aturan, praktik, dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan. Tujuan utama dari GCG adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sebuah perusahaan, dengan demikian melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

PRINSIP PENERAPAN GCG

Prinsip GCG sesuai dengan Peraturan OJK adalah keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, sementara sesuai dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi, maka terdapat 4 pilar GCG yang mencakup perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, yang selanjutnya dibagi dalam 8 penjabaran yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Uraian Prinsip	Penerapan di Bank BTPN
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.	Bank telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris.	Dalam penetapan Dewan Komisaris dan Direksi, Bank telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.	Dalam penerapan di Bank, selain mempertimbangkan kondisi dan kinerja, Bank juga mempertimbangkan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Pemberian Remunerasi Bank Umum.
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	
Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.	Seluruh organ dalam Bank menghindari terjadinya dominasi oleh pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
Prinsip 4: Perilaku Etis	
Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.	Bank telah memiliki Kode Etik yang belaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, serta Pihak independen. Kode Etik ini juga mengatur penciptaan lingkungan kerja yang kondusif sebagai implementasi penegakan nilai-nilai dan budaya Bank.
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan	
Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.	Setiap tahun, Bank melakukan kajian berkala terkait dengan kecukupan kebijakan manajemen risiko serta sistem pengendalian internal agar selalu relevan dengan perkembangan industri. Bank tidak hanya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan praktik bisnis terbaik di lingkungan industri.
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi	
Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.	Bank melakukan keterbukaan informasi baik secara berkala maupun insidentil yang mengungkapkan secara akurat informasi mengenai Bank termasuk penjelasan kinerja Bank melalui situs web: http://www.btpn.com ataupun situs web milik IDX dalam waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan & perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham	
Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.	Bank telah memiliki acuan dan secara jelas menuangkan hak-hak pemegang saham dalam pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG *Manual*) yang dikaji secara berkala dan diunggah ke situs web Bank.
Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan	
Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.	Pengakuan hak-hak para pemangku kepentingan dibuktikan dengan menuangkan hal tersebut dalam GCG Manual dan Kode Etik Bank. GCG Manual menempati posisi tertinggi dalam hierarki kebijakan sehingga sudah selayaknya menjadi dasar setiap kebijakan dan prosedur Bank. Sedangkan kode etik menjadi panduan bagi setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan Karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Bank BTPN selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan prinsip-prinsip. Di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menggantikan POJK Nomor 55/POJK.03/2016
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
5. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. POJK lainnya termasuk yang mengatur mengenai Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris dan Direksi, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Internal Audit, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.
7. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.
8. Anggaran Dasar Bank.
9. Kebijakan dan Prosedur Bank.

Selanjutnya, kebijakan dan prosedur Bank dikelompokkan dalam suatu hierarki kebijakan yang terdiri dari:

- **Kebijakan Utama Bank**
  Kebijakan Utama Bank adalah kebijakan utama atau induk atas seluruh kebijakan Bank, merupakan kebijakan yang menyangkut tata kelola, maupun hal strategis lainnya yang mempengaruhi jalannya pengelolaan Bank secara baik, dan yang merupakan prinsip dasar serta pedoman pokok bagi semua ketentuan yang ada dan berlaku di Bank BTPN.

  Kebijakan Utama Bank adalah Pedoman Tata Kelola.

- **Kebijakan Operasional Bank**
  Kebijakan Operasional Bank adalah kebijakan yang mengatur setiap aktivitas di Bank yang mencerminkan strategi manajemen risiko Bank termasuk di antaranya menjelaskan secara umum *risk appetite* Bank atas aktivitas tersebut.

  Pedoman dan Tata Tertib kerja Direksi, Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris, dan Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite serta Ketentuan yang berlaku secara bankwide atau suatu ketentuan yang disyaratkan oleh suatu ketentuan perundang-undangan untuk diperlakukan sebagai kebijakan operasional.

- **Standard Operational Procedures**
  Standard Operational Procedures (SOP) adalah panduan yang mengatur secara detail atas suatu proses dan menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang wajib dilakukan, mencakup: siapa, bagaimana, di mana, kapan dilakukan dan mekanisme kontrolnya. Pengaturan ini wajib menerapkan fungsi *four eyes principl*e secara tegas, fungsi internal kontrol yang memadai serta mengacu pada kebijakan.

- **User Manual/Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksana/dokumen lain yang dipersamakan**
  User Manual atau Petunjuk Teknis, disebut juga Petunjuk Pelaksana adalah:
  1. Tahapan/cara penggunaan suatu sistem/aplikasi yang menjelaskan secara rinci cara input/pengisian data pada setiap *screen* dan *field*, atau
  2. Pedoman yang lebih rinci dari SOP bagi *user*, baik operator maupun supervisor, atau
  3. Pengaturan mengenai suatu standar parameter yang ada di sistem, atau
  4. Suatu panduan ringkas yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai produk dan layanan, dan
  5. Dibuat dengan mengacu pada SOP terkait.

Persetujuan atas penerbitan kebijakan dan prosedur dan/atau perubahannya dilakukan dengan memperhatikan hierarki masing-masing. Kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan Bank dilakukan secara berkala, setiap satu tahun sekali atau lebih cepat apabila diperlukan.

RUJUKAN ASEAN

Sebagai komitmen yang kuat terhadap penerapan GCG, BANK BTPN mengacu kepada GCG yang berlaku di regional ASEAN dengan menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang merupakan alat yang dikembangkan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) untuk menilai praktik tata kelola perusahaan dari perusahaan terbuka di negara-negara anggota ASEAN. ACGS mengevaluasi perusahaan berdasarkan serangkaian indikator yang sejalan dengan praktik terbaik internasional dalam tata kelola perusahaan. Skor tinggi pada ACGS menunjukkan bahwa sebuah perusahaan memiliki praktik tata kelola yang kuat, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan pasar modal di wilayah tersebut.

Untuk menilai ACGS, BANK BTPN telah menunjuk konsultan independen yang akan membagi hasil penilaiannya kepada anggota Dewan Komisaris serta beberapa anggota Direksi terkait dalam forum khusus untuk tujuan perbaikan berkelanjutan.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Bagi BANK BTPN, pentingnya penerapan GCG sangat signifikan. Tidak hanya untuk keperluan BANK BTPN dalam memenuhi ketentuan, namun juga dipercaya memiliki kontribusi terhadap beberapa aspek kunci:

1. Peningkatan Transparansi: GCG mempromosikan transparansi dengan menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan mengenai kinerja keuangan, kebijakan perusahaan, dan proses pengambilan keputusan. Transparansi ini membangun kepercayaan di antara investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Peningkatan Akuntabilitas: GCG membentuk mekanisme pertanggungjawaban para pimpinan perusahaan atas tindakan dan keputusannya. Akuntabilitas ini memastikan bahwa manajemen bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham dan pemangku kepentingan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau agenda tertentu.
3. Perlindungan Hak Pemegang Saham: Kerangka kerja GCG sering kali mencakup ketentuan untuk melindungi hak-hak pemegang saham, seperti perlakuan yang adil dan akses terhadap informasi. Perlindungan ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan di dalam perusahaan.
4. Manajemen Risiko: Praktik GCG mendorong implementasi proses manajemen risiko yang efektif, memastikan bahwa perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko secara tepat. Ini membantu menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan kelangsungan hidup jangka panjangnya.
5. Peningkatan Reputasi Perusahaan: Perusahaan dengan praktik GCG yang kuat cenderung memiliki reputasi positif di pasar. Reputasi ini dapat menarik investor, pelanggan, dan mitra bisnis, menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi.

Di Indonesia, pentingnya GCG ditekankan oleh berbagai undang-undang dan regulasi yang bertujuan untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perusahaan terdaftar untuk mematuhi prinsip-prinsip GCG dan mengungkapkan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menetapkan pedoman GCG bagi perusahaan terdaftar untuk diikuti.

Secara keseluruhan, GCG memainkan peran penting dalam menjamin keberlanjutan jangka panjang dan kesuksesan perusahaan dengan membentuk budaya integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan. Keterkaitannya dengan ASEAN GCG scorecard dan hukum Indonesia memperkuat signifikansinya dalam lingkungan bisnis regional dan domestik.

STRUKTUR GCG

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, struktur GCG yang berlaku di Bank BTPN adalah sebagai berikut:

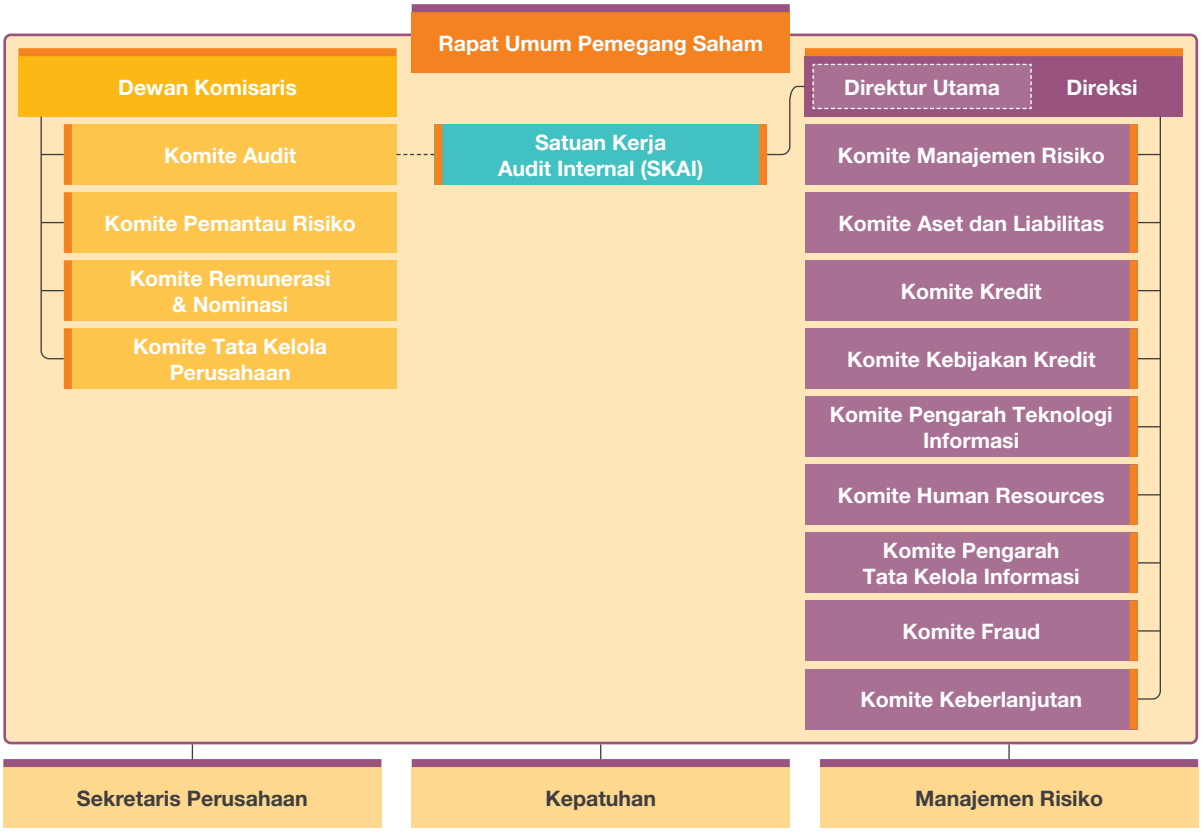

PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

Evaluasi penerapan GCG di Bank BTPN, terutama dilakukan melalui penilaian secara mandiri (*self-assessment*) maupun dengan menunjuk konsultan independen. Dari hasil penilaian sendiri yang merujuk pada ketentuan OJK, pada tahun 2023 Bank berhasil memperoleh peringkat 2 (skala 1 sampai 3).

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2023

Pelaksanaan penilaian merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 sebagai pengganti POJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Hasil dari penilaian mandiri (*self-assessment*) atas penerapan GCG Bank tahun 2023 yang dijabarkan lebih lanjut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola ini.

Pelaksanaan Penilaian

Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG dilaksanakan oleh Divisi Corporate Secretary. Dalam pelaksanaannya, unit kerja ini berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, serta Divisi Perencanaan dan Keuangan.

Kriteria Penilaian

Mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah:

1. *Governance Structure*
2. *Governance Process*
3. *Governance Outcome*

Pelaksanaan 3 (tiga) indikator tersebut dinilai pada aspek: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite; Penanganan Benturan Kepentingan; Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank; Penerapan Fungsi Audit Intern; Penerapan Fungsi Audit Ekstern; Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern; Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar; Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan; Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal; Rencana Strategis Bank; Penanganan Benturan kepentingan; Pemberian Remunerasi, Pemegang Saham; Penerapan Strategi Anti Fraud; serta Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Hasil Penilaian

Hasil Penilaian sendiri untuk tahun 2023 adalah "2" dengan kategori "Baik", yang berlaku bagi individual Bank maupun konsolidasi.

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	2	Baik

Analisis
Peringkat komposit 2 (dua) mencerminkan bahwa Manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen.

Sebagai bentuk keseriusan terhadap penerapan GCG, Bank telah menunjuk konsultan terkait untuk melakukan penilaian atau kajian atas penerapan GCG dengan pedoman pembanding yang berlaku di kawasan Asia Tenggara. Hasil penilaian (*overall score*) penerapan GCG tahun 2022 yang diperoleh Bank (ASEAN CG *Scorecard* 2023) adalah 99,19 poin dengan predikat "*Very Good*" atau berada pada Level 4 (90-99,99).

Penilaian tersebut bermakna implementasi tata kelola korporasi Bank sudah mematuhi penuh standar internasional sebagaimana disyaratkan oleh ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

TINJAUAN PELAKSANAAN GCG TAHUN 2023

Melalui RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2023, BANK BTPN melakukan penyesuaian anggaran dasar terkait dengan perubahan korum Rapat Dewan Komisaris menjadi 2/3 dan perbaikan teks disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya yang terkait dengan remunerasi Dewan Komisaris.

Untuk memenuhi ketentuan OJK mengenai GCG untuk institusi keuangan dan perusahaan terbuka, maka:

1. Dewan Komisaris dan Direksi: BANK BTPN menjaga komposisi, peran, tanggung jawab, dan kualifikasi dewan komisaris dan direksi sesuai dengan ketentuan OJK, yang memastikan bahwa anggota dewan memiliki keahlian, pengalaman, dan integritas yang diperlukan untuk mengawasi dan mengelola secara efektif urusan dan kepentingan perusahaan.
2. Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko: BANK BTPN telah membentuk sistem pengendalian internal yang kuat dan kerangka manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko secara efektif. Ini termasuk menerapkan kontrol untuk melindungi aset, mencegah penipuan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.
3. Transparansi dan Pengungkapan: BANK BTPN telah menjaga transparansi dalam operasinya dan memberikan pengungkapan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada pemangku kepentingan. Ini termasuk laporan keuangan, laporan tata kelola perusahaan, transaksi dengan pihak terkait, dan pengungkapan lain yang diperlukan oleh otoritas pengatur.
4. Hak Pemegang Saham dan Keterlibatan Pihak Terkait: BANK BTPN menghormati dan melindungi hak-hak pemegang saham, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menerima dividen. Selain itu, BANK BTPN melakukan interaksi dengan para pemangku kepentingan lain, seperti karyawan, nasabah, pemasok, dan masyarakat, untuk dapat mudah menyampaikan kepentingan dan perhatian mereka melalui berbagai saluran.
5. Standar Etika dan Integritas: BANK BTPN menjalankan mandat OJK dalam menekankan pentingnya perilaku etis dan integritas dalam tata kelola perusahaan. Untuk hal tersebut, BANK BTPN telah membentuk kode etik dan kebijakan etika untuk memandu perilaku direktur, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini termasuk langkah-langkah untuk mencegah benturan kepentingan, tindak suap, korupsi, dan praktik tidak etis lainnya.
6. Sistem Remunerasi dan Insentif: BANK BTPN telah mengadopsi sistem remunerasi dan insentif yang adil, transparan, dan sejalan dengan kepentingan jangka panjang dan kinerja perusahaan. BANK BTPN dalam hal ini merujuk pada Peraturan OJK yang memberikan pedoman untuk menentukan kompensasi eksekutif, termasuk penggunaan insentif berbasis kinerja dan ketentuan clawback.
7. Kepatuhan dan Penegakan Hukum: BANK BTPN memiliki mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan GCG dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan. Hal ini termasuk melakukan audit, inspeksi, dan investigasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi dan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang tidak patuh.

Secara keseluruhan, peraturan OJK tentang GCG bertujuan untuk mempromosikan praktik tata kelola perusahaan yang baik yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem keuangan Indonesia. Dengan mematuhi regulasi ini, BANK BTPN dapat memperkuat kepercayaan investor, meningkatkan manajemen risiko, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, seiring dengan dikeluarkannya ketentuan GCG baru pada bulan September tahun 2023, BANK BTPN telah melakukan penyesuaian manual dan *charter* serta struktur GCG yang berlaku lainnya, penyesuaian mana yang terus berlangsung dengan estimasi rampung secara keseluruhan pada tengah tahun 2024.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA BANK PERUSAHAAN TERBUKA

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pendekatan "*comply or explain*" oleh Bank:

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	*Comply*	Prosedur teknis pemungutan suara diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta pedoman setiap kali Bank berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua dokumen tersebut dipublikasikan di situs web Bank dan di KSEI platform e-proxy.
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	*Comply*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan 13 April 2023 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat, baik secara fisik maupun virtual
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun.	*Comply*	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia di situs web Bank BTPN.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	*Comply*	Bank BTPN telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang di dalamnya mencakup: 1. Strategi 2. Program 3. Waktu pelaksanaan komunikasi
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.	*Comply*	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham telah diungkapkan dalam situs web Bank. Kebijakan komunikasi tersebut diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	*Comply*	Penetapan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	*Comply*	Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	*Comply*	Bank BTPN telah memiliki kebijakan *self-assessment* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	4.2 Kebijakan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	*Comply*	Kebijakan *self-assessment* diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023 ini pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	*Comply*	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	*Comply*	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
Prinsip 5	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	*Comply*	Penetapan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	*Comply*	Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.

PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

Prinsip	Rekomendasi		Pemenuhan	Implementasi
	5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	*Comply*	Direktur Keuangan Bank BTPN memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. Rinciannya diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023 ini pada bagian "Profil Direksi".
Prinsip 6	6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	*Comply*	Bank BTPN telah memiliki kebijakan *self-assessment u*ntuk menilai kinerja Direksi, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria Penilaian yang digunakan Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	6.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	*Comply*	Kebijakan *self-assessment* telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023 ini pada bagian Penilaian Kinerja Direksi.
	6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	*Comply*	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	*Comply*	Ketentuan mengenai pencegahan insider trading diatur dalam Prosedur Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi, dan Kepemilikan Pribadi.
	7.2	Ketentuan mengenai pencegahan *insider trading* diatur dalam Prosedur Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi.	*Comply*	Bank BTPN memiliki prosedur mengenai Informasi Orang Dalam dan Transaksi & Investasi Pribadi yang juga mengatur pencegahan *insider trading*, Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi.
	7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	*Comply*	Kebijakan tersebut meliputi antara lain: 1. Kriteria dalam pemilihan vendor 2. Upaya peningkatan kemampuan vendor 3. Pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan vendor Ketentuan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	*Comply*	Kebijakan mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditur. Kebijakan tersebut telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.	*Comply*	Kebijakan sistem whistleblowing mencakup: 1. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*. 2. Cara pengaduan. 3. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor. 4. Penanganan pengaduan 5. Pihak yang mengelola aduan. 6. Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. Ketentuan tersebut telah diungkapkan dalam situs web Bank.
	7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.	*Comply*	Kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan diatur dalam SOP MESOP.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	*Comply*	Bank BTPN memiliki akun resmi sosial media: **Facebook:** @BankBTPNOfficial https://facebook.com/BankBTPNofficial **Twitter:** @sahabatBTPN https://twitter.com/sahabatbtpn **Instagram:** @lifeatbtpn https://www.instagram.com/lifeatbtpn/ **Youtube:** Bank BTPN https://www.youtube.com/user/BTPNBank
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	*Comply*	Laporan Tahunan Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%. Informasi tersebut juga diungkapkan di dalam situs web Bank.

A. *Governance Structure*

1. Faktor - faktor positif aspek governance structure Bank adalah:

- Struktur keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sesuai dengan RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2023, 1 orang Direktur telah mengundurkan diri dan digantikan oleh calon yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dari OJK dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Juli 2023.
- Seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk selalu menjaga integritas, reputasi keuangan dan kompetensinya.
- Susunan keanggotaan dari setiap Komite Dewan Komisaris telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab setiap Komite Dewan Komisaris telah dimuat secara jelas dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dikaji secara berkala, termasuk disesuaikan dengan Peraturan OJK terbaru No. 17 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Bank telah memiliki ketentuan berupa kebijakan dan prosedur mengenai benturan kepentingan, yang dikaji secara berkala
- Satuan Kerja Kepatuhan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya, selain itu penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Fungsi Audit intern didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya. Struktur Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Panduan Kerja SKAI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Struktur organisasi untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern telah memadai didukung dengan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.
- Penugasan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana fungsi audit ekstern telah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi OJK dengan KAP dimaksud dengan baik. Penugasan ini sesuai dengan rekomendasi Komite Audit yang disetujui oleh RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023.
- Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Perkreditan, Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Prosedur Operasional Bisnis termasuk pemantauan serta prosedur penanganan kredit bermasalah untuk semua penyediaan dana termasuk pihak terkait.

PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan.
- Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku, terakhir untuk tahun buku 2022 dan telah dipublikasikan pada tanggal 21 Maret 2023. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola untuk tahun buku 2023 sedang dalam proses penyusunan dan akan dipublikasikan melalui media pelaporan secara tepat waktu.
- Pelaporan internal telah dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan dukungan sumber daya dan prosedur yang memadai.
- Bank didukung dengan sistem informasi yang andal, yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi (*security system*) yang memadai.
- Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank, dan didukung oleh Pemilik Bank.
- Berdasarkan surat OJK No. SR-133/PB.32/2021 tanggal 15 November 2021 mengenai Status Konglomerasi Keuangan SMBC Group di Indonesia, status Bank berubah menjadi Kelompok Usaha Bank yang semula adalah Konglomerasi Keuangan. Dengan demikian telah menghapus keberadaan Komite Tata Kelola Terintegrasi di tingkat Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi di tingkat Direksi dihapus, namun demikian, sebagai tindak lanjut dari permintaan OJK agar Bank menjadi Entitas Koordinator dari Grup Keuangan, maka Bank membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan di tingkat Dewan Komisaris.

2. Faktor - faktor negatif aspek governance structure Bank adalah:

Tidak terdapat faktor Negatif.

B. *Governance Process*

1. Faktor - faktor positif aspek governance process Bank adalah:

- Pengelolaan Bank oleh Direksi serta Pengawasan terhadap tindakan Direksi Bank oleh Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pedoman Tata Tertib masing-masing, Kebijakan dan Prosedur Bank, serta Anggaran Dasar Bank, yang secara berkala dikaji oleh Bank.
- Penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh telah dilakukan oleh Direksi dan dipastikan oleh Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Bank tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan Direksi dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Terkait dengan hal ini, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur khusus serta melakukan kajian secara berkala terkait Alur Komunikasi antara Bank dengan pemegang saham mayoritas Bank, yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"). Sebaliknya, Bank juga mengatur alur komunikasi dengan anak perusahaan yang secara berkala dikaji oleh divisi terkait.
- Komite-komite Dewan Komisaris telah masing-masing menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite. Didalam upaya meningkatkan kinerjanya, masing-masing Komite telah melakukan penilaian sendiri terhadap kinerja komite yang disampaikan ke Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dibahas dalam rangka perbaikan kinerja komite. Penilaian juga dilakukan terhadap pihak independen komite secara individual, untuk menilai kapasitas dan independensi dari setiap pihak independen.
- Direksi dan Dewan Komisaris tidak ikut mengambil keputusan dalam hal suatu hal yang akan diputuskan mengandung Benturan Kepentingan. Di dalam melakukan pengelolaan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka setiap pihak wajib melakukan pemeriksaan atas transaksi yang akan

dimasuki oleh Bank dengan pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Karenanya, Daftar Pihak Terkait Bank dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.

- Fungsi Direktur Kepatuhan dan satuan kerja Kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kaitan dengan pengendalian intern telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Temuan audit telah ditindaklanjuti dengan arahan Dewan Komisaris, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja Internal Audit. Kaji ulang atas efektivitas pelaksanaan kerja Internal Audit telah dilakukan pada tahun 2022 atau 3 tahun sejak kaji ulang terakhir di tahun 2019. Kaji ulang dilakukan oleh PT RSM Indonesia yang merupakan independent assessor. Hasil dari kaji ulang tersebut adalah "Generally Conform" tanpa temuan maupun rekomendasi, dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Agustus 2022. Kaji ulang berikutnya akan dilakukan pada tahun 2025.
- AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Selain itu, laporan hasil audit dan Management Letter telah disampaikan oleh AP kepada OJK.
- Tugas Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko dinyatakan dengan jelas dalam prosedur internal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dijalankan secara prudent.
- Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga telah memastikan proses yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (large exposure) agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta pengambilan keputusan terkait hal tersebut dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dannon-keuangan kepada para Pemangku Kepentingan, menyampaikan laporan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu.
- Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025 serta perubahannya dan Rencana Bisnis Bank tahun 2024-2026 telah disusun dengan asumsi yang realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta memiliki fleksibilitas yang cukup sehingga responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

2. Faktor - faktor negatif aspek governance process Bank adalah:
Tidak terdapat faktor-faktor negatif dari aspek ini.

c. *Governance Outcome*

1. Faktor - faktor positif aspek governance outcome Bank adalah:

- Untuk tahun buku 2022, Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham, yang telah diterima dan memperoleh *acquit et de charge* melalui RUPS Tahunan pada tanggal 13 April 2023. Pertanggungjawaban untuk tahun buku 2023 akan dilaksanakan melalui RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.
- Berita acara Rapat Direksi atau Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik, selain itu keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat tersebut telah dan dalam proses tindak lanjut.
- Kinerja Komite Dewan Komisaris mengalami peningkatan dari sisi pembahasan yang variatif, frekuensi Rapat yang meningkat dengan materi Rapat yang relevan, sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan masukan yang tepat guna .
- Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemegang saham / pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

- Budaya kepatuhan terus menerus digaungkan dan pendekatan dilakukan secara aktif.
- Sejalan dengan komitmen dalam Kebijakan Tata Kelola terkait kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundangan, setiap pengambilan keputusan dan kegiatan operasional Bank senantiasa merujuk kepada ketentuan yang berlaku
- Internal Audit selalu menjaga obyektivitas atau independensi dalam menjalankan fungsinya. Seluruh cakupan dan temuan audit dikaji dalam rapat Komite Audit secara berkala.
- Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif. Tingkat kesehatan Bank baik secara individu maupun konsolidasi berada pada level 2 selama beberapa periode yang terdiri atas penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko (dengan profil risiko level 2).
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan telah dilaporkan secara tepat waktu kepada OJK.
- Kewajiban penyusunan laporan dan penyampaian laporan kepada OJK telah dilakukan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Revisi RBB untuk tahun 2024-2026 dan Perubahan Kedua atas Rencana Korporasi tahun 2022-2026, telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada OJK pada tanggal 15 November 2023.

2. **Faktor - faktor negatif aspek governance outcome Bank BTPN adalah:**
   Masih terdapat sanksi denda yang dikenakan regulator terhadap keterlambatan dan/atau kesalahan penyampaian laporan. Bank dalam hal ini terus menerus melakukan sosialisasi atas komitmen Bank akan “Zero Penalties” dan penerapan budaya kepatuhan yang lebih aktif. Bank juga menerapkan penyusunan Root Cause Analysis atas setiap denda yang dikenakan dan melakukan tindak lanjut serta langkah perbaikan dan pencegahan agar kesalahan serupa tidak terulang atau dapat dihindari semaksimal mungkin.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

DASAR HUKUM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui RUPS, Pemegang Saham menggunakan haknya dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, RUPS Bank terbagi menjadi 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa. Adapun dasar hukum penyelenggaraan RUPS mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar BTPN.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Bank BTPN memberikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti POJK Nomor 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Kebijakan tersebut tercermin melalui uraian hak dan tanggung jawab Pemegang Saham, yang antara lain mencakup:

1. Pemegang saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
2. Pemegang saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Perseroan sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan, sehingga pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS.
3. Pemegang saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
4. Setiap pemegang saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemegang saham pengendali wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemegang saham lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
7. Mengungkapkan daftar pihak terkait, apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada Bank.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN BUKU 2023

Sepanjang tahun 2023, Bank BTPN telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS, yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 13 April 2023 dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2023 dan 7 Desember 2023 yang dihadiri baik secara fisik maupun virtual oleh para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan serta perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs web Bank, situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Seluruh informasi tersebut telah disampaikan kepada Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan hanya diberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Mekanisme pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka, dilakukan dengan cara Ketua Rapat meminta kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan agar mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan penghitungan, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dimohon mencantumkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam kartu suara yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek.

Petugas dari Notaris akan mengumpulkan kartu suara yang telah diisi, untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat. Pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ini, Bank juga telah menerapkan pelaksanaan pemberian kuasa secara elektronik atau *E-Proxy*. Pemegang Saham dapat memberikan suara atas usulan mata acara yang diusulkan oleh Bank tanpa kedatangan secara fisik ke tempat pelaksanaan RUPS. Kesempatan memberikan suara diberikan kepada pemegang saham dari sejak tanggal panggilan sampai dengan pelaksanaan RUPS dan dijumlahkan dengan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik atau datang ke tempat pelaksanaan RUPS.

Keterlibatan Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

Pada Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara, yaitu Ashoya Ratam, SH, Mkn selaku Notaris Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

RUPS Tahunan 13 April 2023

Tahapan Penyelenggaraan

Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Pengumuman	Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Pemanggilan	Pelaksanaan	Penyampaian hasil
23 Februari 2023 dan 13 Maret 2023	6 Maret 2023	20 Maret 2023	21 Maret 2023	13 April 2023	14 April 2023

Peserta RUPS Tahunan

Peserta yang menghadiri rapat secara fisik adalah:

Direksi	Dewan Komisaris
Henoch Munandar	Chow Ying Hoong
Kaoru Furuya	Takeshi Kimoto
Darmadi Sutanto	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Dini Herdini	Irwan Mahjudin Habsjah
Hiromichi Kubo	Edmund Tondobala
Merisa Darwis	Ongki Wanadjati Dana
Hanna Tantani	
Kan Funakoshi	

Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Tahunan

Mata Acara	Keputusan
Mata Acara 1	
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2022, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG); 2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022; 3. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2022.	1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022; 2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2022; 3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022; 4. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini wajar, dalam laporannya No. 00025/2.1005/AU.1/07/1212-1/1/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023; dan 5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.611.745 saham atau 99,9998689% Suara Tidak setuju : 10.000 saham atau 0,0001311% Suara Abstain : 0 saham atau 0,0000000% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 2	
Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berjumlah Rp3.095.699.654.784,00 (tiga triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sebagai berikut: 1. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp619.139.930.957,00 (enam ratus sembilan belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp76,8 (tujuh puluh enam koma delapan rupiah) per lembar saham (*gross*). Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi. 3. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 setelah dikurangi penyisihan Dividen dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.611.745 saham atau 99,9998689% Suara Tidak setuju : 10.000 saham atau 0,0001311% Suara Abstain : 0 saham atau 0,0000000% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 3	
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.	**Bagian Pertama:** Menerima pengunduran diri Kan Funakoshi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau. **Bagian Kedua:** 1. Mengangkat Atsushi Hino sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-1/D.03/2023 tanggal 8 Maret 2023, efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

<table>
<tr><th>Mata Acara</th><th>Keputusan</th></tr>
<tr><td></td><td>Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Jabatan</th><th>Nama</th></tr>
<tr><td>Direktur Utama</td><td>Henoch Munandar</td></tr>
<tr><td>Wakil Direktur Utama</td><td>Kaoru Furuya</td></tr>
<tr><td>Wakil Direktur Utama</td><td>Darmadi Sutanto</td></tr>
<tr><td>Direktur Kepatuhan</td><td>Dini Herdini</td></tr>
<tr><td>Direktur</td><td>Atsushi Hino*</td></tr>
<tr><td>Direktur</td><td>Hiromichi Kubo</td></tr>
<tr><td>Direktur</td><td>Merisa Darwis</td></tr>
<tr><td>Direktur</td><td>Hanna Tantani</td></tr>
</table>
*) Atsushi Hino akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Bapak Atsushi Hino sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Ketiga Rapat ke dalam akta Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.</td></tr>
<tr><td>Pengambilan suara</td><td>• Bagian Pertama:
Suara Setuju : 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%
Suara Tidak setuju : 10.000 saham atau 0,0001311%
Suara Abstain : 0 saham atau 0,0000000%

Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak

• Bagian Kedua:
Suara Setuju : 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%
Suara Tidak setuju : 10.000 saham atau 0,0001311%
Suara Abstain : 0 saham atau 0,0000000%

Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</td></tr>
<tr><td>Realisasi/Tindak Lanjut</td><td>Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mata Acara 4</td></tr>
<tr><td>Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</td><td>Bagian Pertama:
Menerima pengunduran diri Irwan Mahjudin Habsjah dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.

Bagian Kedua:
1. Mengangkat Onny Widjanarko sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Mata Acara</th><th>Keputusan</th></tr>
<tr><td></td><td>Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

<table>
<tr><th>Jabatan</th><th>Nama</th></tr>
<tr><td>Komisaris Utama</td><td>Chow Ying Hoong</td></tr>
<tr><td>Komisaris</td><td>Takeshi Kimoto</td></tr>
<tr><td>Komisaris Independen</td><td>Ninik Herlani Masli Ridhwan</td></tr>
<tr><td>Komisaris Independen</td><td>Onny Widjanarko*</td></tr>
<tr><td>Komisaris Independen</td><td>Edmund Tondobala</td></tr>
<tr><td>Komisaris</td><td>Ongki Wanadjati Dana</td></tr>
</table>
*) Onny Widjanarko akan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah memperoleh persetujuan OJK. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka keputusan mengenai pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diputuskan melalui RUPS lainnya.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Onny Widjanarko sehubungan dengan persetujuan OJK yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Keempat Rapat ke dalam akta Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.</td></tr>
<tr><td>Pengambilan suara</td><td>• Bagian Pertama:
Suara Setuju : 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%
Suara Tidak setuju : 10.000 saham atau 0,0001311%
Suara Abstain : 0 saham atau 0,0000000%

Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak

• Bagian Kedua:
Suara Setuju : 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%
Suara Tidak setuju : 10.000 saham atau 0,0001311%
Suara Abstain : 0 saham atau 0,0000000%

Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</td></tr>
<tr><td>Realisasi/Tindak Lanjut</td><td>Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mata Acara 5</td></tr>
<tr><td>Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.</td><td>1. Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun 2023 seluruhnya tidak melebihi Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
2. Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun 2023 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang akan dibayarkan dalam tahun 2023, seluruhnya tidak melebihi Rp138.000.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2023 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan tersebut dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dibayarkan pada tahun 2023. Kewenangan tersebut dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</td></tr>
<tr><td>Pengambilan suara</td><td>Suara Setuju : 7.627.611.745 saham atau 99,9998689%
Suara Tidak setuju : 10.000 saham atau 0,0001311%
Suara Abstain : 0 saham atau 0,0000000%

Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</td></tr>
<tr><td>Realisasi/Tindak Lanjut</td><td>Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.</td></tr>
</table>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Mata Acara	Keputusan
Mata Acara 6	
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.	1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan SUSANTO akan menggantikan NOVIE sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal: • Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut. • Terdapat perubahan ketentuan mengenai masa penugasan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.611.745 saham atau 99,9998689% Suara Tidak setuju : 10.000 saham atau 0,0001311% Suara Abstain : 0 saham atau 0,0000000% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 7	
Persetujuan Rencana Resolusi Perseroan.	1. Menyetujui Rencana Resolusi Perseroan; dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sebagaimana tersebut pada angka 1.
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.611.745 saham atau 99,9998689% Suara Tidak setuju : 10.000 saham atau 0,0001311% Suara Abstain : 0 saham atau 0,0000000% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 8	
Laporan-Laporan Perseroan: a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.	Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu : 1. Rencana Bisnis Bank; 2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; 3. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan
Pengambilan suara	Mata Acara ini merupakan Laporan sehingga tidak dilakukan perhitungan suara

RUPS Luar Biasa 22 Juni 2023

Tahapan Penyelenggaraan

Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Pengumuman	Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Pemanggilan	Pelaksanaan	Penyampaian hasil
9 Mei 2023	16 Mei 2023	30 Mei 2023	31 Mei 2023	22 Juni 2023	23 Juni 2023

Peserta RUPS Luar Biasa

Peserta yang menghadiri rapat secara fisik adalah:

Direksi	Dewan Komisaris
Henoch Munandar	Chow Ying Hoong
Kaoru Furuya	Takeshi Kimoto
Darmadi Sutanto	Ninik Herlani Masli Ridhwan*
Dini Herdini	Onny Widjanarko
Atsushi Hino	Edmund Tondobala
Hiromichi Kubo	Ongki Wanadjati Dana
Hanna Tantani	

*) Hadir melalui fasilitas video telekonferensi.

Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Keputusan
Mata Acara 1	
Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan.	1. Menerima pengunduran diri Hiromichi Kubo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.436.042 saham atau 99,9999869% Suara Tidak setuju : 0 saham atau 0,0000000% Suara Abstain : 1.000 saham atau 0,0000131% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 2	
Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.	1. Mengangkat Keishi Kobata sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-12/D.03/2023 tanggal 5 April 2023, efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama	Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan	Dini Herdini
Direktur	Atsushi Hino
Direktur	Keishi Kobata **
Direktur	Merisa Darwis
Direktur	Hanna Tantani

**) Keishi Kobata akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Mata Acara	Keputusan
	2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Bapak Keishi Kobata sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.436.042 saham atau 99,9999869% Suara Tidak setuju : 0 saham atau 0,0000000% Suara Abstain : 1.000 saham atau 0,0000131% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 3	
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana pokok-pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat. 2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.436.042 saham atau 99,9999869% Suara Tidak setuju : 0 saham atau 0,0000000% Suara Abstain : 1.000 saham atau 0,0000131% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.

RUPS Luar Biasa 7 Desember 2023

Tahapan Penyelenggaraan

Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Pengumuman	Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Pemanggilan	Pelaksanaan	Penyampaian hasil
24 Oktober 2023	31 Oktober 2023	14 November 2023	15 November 2023	7 Desember 2023	8 Desember 2023

Peserta RUPS Luar Biasa

Peserta yang menghadiri rapat secara fisik adalah:

Direksi	Dewan Komisaris
Henoch Munandar	Chow Ying Hoong*
Darmadi Sutanto	Takeshi Kimoto*
Dini Herdini	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Atsushi Hino	Onny Widjanarko
Keishi Kobata	Edmund Tondobala
Merisa Darwis	Ongki Wanadjati Dana
Hanna Tantani	

*) Hadir melalui fasilitas video telekonferensi.

Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Keputusan
Mata Acara 1	
Persetujuan atas pelaksanaan penarikan saham hasil pembelian kembali.	1. Menyetujui penarikan 92.292.198 (sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan) lembar saham hasil pembelian kembali saham oleh Perseroan 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai hasil pelaksanaan penarikan saham butir 1 diatas, sesuai dengan table sebagaimana ditayangkan dalam Rapat. 3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala Tindakan berkaitan dengan penarikan saham hasil pembelian kembali saham dimaksud, selanjutnya membuat serta menandatangani akta dan dokumen yang diperlukan serta mengajukan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repunlik Indonesia termasuk kepada OJK (jika diperlukan) dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga guna memperoleh persetujuan tersebut.
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.419.742 saham atau 99,9996132% Suara Tidak setuju : 0 saham atau 0,0000000% Suara Abstain : 29.500 saham atau 0,0003868% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 2	
Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) atau *Right Issue* II.	1. Menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) dengan total saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHETD II sebanyak-banyaknya sebesar 3.095.000.000 (tiga miliar sembilan puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHETD II. 3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan PMHETD II; b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan PMHETD II. Untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang, memberikan atau meminta keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen serta melakukan segala hal yang disyaratkan guna tercapainya pelaksanaan PMHETD II.
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.436.042 saham atau 99,9998269% Suara Tidak setuju : 13.200 saham atau 0,0001731% Suara Abstain : 0 saham atau 0,0000000% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS Tahun Sebelumnya

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 21 April 2022

Mata Acara	Keputusan
Mata Acara 1	
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2021, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG); 2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021; 3. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2021.	1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021; 2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2021; 3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021; 4. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dengan opini wajar, dalam laporannya No.00022/2.1005/AU.1/07/0851-3/1/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022; dan 5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.615.419.105 saham atau 99,9999081% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2.000 saham atau 0,0000263% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 2	
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berjumlah Rp2.664.713.200.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai berikut: a. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Dana Cadangan Wajib Perseroan yang semula sebesar Rp32.595.727.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) akan meningkat menjadi sebesar Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2021; b. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 setelah dikurangi penyisihan Dana Cadangan Wajib yaitu sebesar Rp2.664.712.500.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 7.615.419.105 saham atau 99,9999081% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2.000 saham atau 0,0000263% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.

Mata Acara	Keputusan
Mata Acara 3	
a. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan; b. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	**Bagian Pertama:** 1. Menerima pernyataan Ongki Wanadjati Dana untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau; 2. Pengangkatan Adrianus Dani Prabawa yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022, untuk menduduki jabatan Direktur Utama tidak dapat ditindaklanjuti mempertimbangkan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022, dengan demikian jabatan Direktur Utama akan lowong untuk sementara waktu; 3. Menyetujui untuk mengangkat Direktur Utama yang akan menduduki posisi lowong secepat-cepatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2022 ("RUPS Luar Biasa 2022") atau selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023 ("RUPS Tahunan 2023"); 4. Menerima pengangkatan Kaoru Furuya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk sementara menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama dengan sebutan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan efektifnya pengangkatan Direktur Utama Perseroan yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa tahun 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan tahun 2023; dan 5. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi selain Ongki Wanadjati Dana untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 ("RUPS Tahunan 2025"). Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Lowong
Wakil Direktur Utama	Kaoru Furuya*
Wakil Direktur Utama	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan	Dini Herdini
Direktur	Kan Funakoshi
Direktur	Henoch Munandar
Direktur	Hiromichi Kubo
Direktur	Merisa Darwis
Direktur	Hanna Tantani

*) Kaoru Furuya akan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan efektifnya pengangkatan Direktur Utama yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan 2023.

Bagian Kedua:
1. Mengangkat Ongki Wanadjati Dana yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022 untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan; dan
2. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan Rapat sampai dengan RUPS Tahunan 2025.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Chow Ying Hoong
Komisaris	Takeshi Kimoto
Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen	Edmund Tondobala
Komisaris	Ongki Wanadjati Dana

3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Ketiga Rapat ke dalam akta Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Mata Acara	Keputusan
Pengambilan suara	• **Bagian Pertama** Suara Setuju : 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2.200 saham atau 0,0000289% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak** • **Bagian Kedua** Suara Setuju : 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2.200 saham atau 0,0000289% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 4	
Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.	1. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022 seluruhnya tidak melebihi Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan. 2. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2022 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang akan dibayarkan dalam tahun 2022, seluruhnya tidak melebihi Rp184.000.000.000,- (seratus delapan puluh empat miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan. 3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2022 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang dibayarkan pada tahun 2022. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 7.615.418.005 saham atau 99,9998936% Suara Tidak Setuju : 6.100 saham atau 0,0000801% Suara Abstain : 2.000 saham atau 0,0000263% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 5	
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.	1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie akan menggantikan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022; 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan; dan 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2.200 saham atau 0,0000289% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.

Mata Acara	Keputusan
Mata Acara 6	
Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	1. Menyetujui atas penyesuaian kegiatan usaha Perseroan karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan 2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali Perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2.200 saham atau 0,0000289% Pengambilan Keputusan : **Suara Terbanyak**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Mata Acara 7	
Laporan Perseroan: a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.	Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu: a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
Pengambilan suara	Mata Acara ini merupakan Laporan sehingga tidak dilakukan perhitungan suara.
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa 29 September 2022

Mata Acara	Keputusan
Perubahan Susunan anggota Direksi Perseroan.	1. Menyetujui untuk Mengangkat Henoch Munandar yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan 2025. 2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.424.542 saham atau 100% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0% Suara Abstain : 0 saham atau 0% Pengambilan Keputusan : **Suara Bulat**
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama	Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan	Dini Herdini
Direktur	Kan Funakoshi
Direktur	Hiromichi Kubo
Direktur	Merisa Darwis
Direktur	Hanna Tantani

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

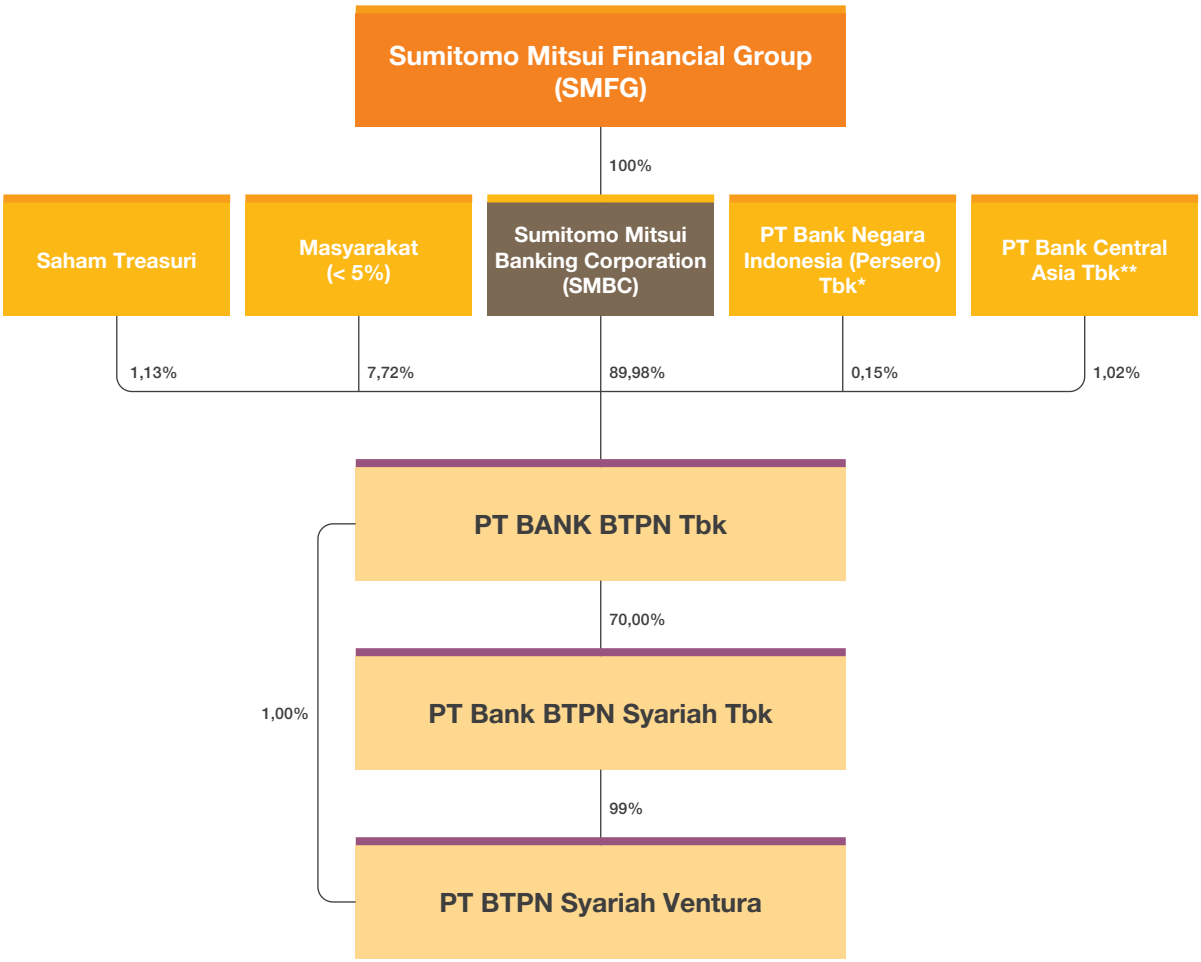

Posisi per 31 Desember 2023

Note:

Pemegang Saham Akhir

Pemegang Saham Pengendali

* Saham hasil konversi karena Penggabungan Usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

** Memenuhi ketentuan PP No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan merupakan saham hasil konversi karena Penggabungan Usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab di bidang pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemberlakuannya sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional serta latar belakang.

DASAR HUKUM

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Bank BTPN juga menyusun kode etik serta Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris (BOC Manual) sebagai acuan bagi anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Seluruh ketentuan tersebut mengharuskan perusahaan yang bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris. Adapun tugasnya adalah mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan sekaligus mengawasi dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris wajib menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Per 31 Desember 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus uji kemampuan dan kepatutan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Terkait dengan independensi Dewan Komisaris, Bank BTPN telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang antar lain mencakup:

1. Anggota Dewan Komisaris Bank BTPN telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 6 orang yang 3 (tiga) orang atau 50% di antaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan regulasi, yang antara lain diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa jumlah minimal Komisaris Independen sebanyak 50% dari total anggota Dewan Komisaris.
3. Penggantian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
5. Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam Peraturan OJK.

Anggota Dewan Komisaris Bank menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kepatutan. Pernyataan ini selalu diperbaharui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2023.

DEWAN KOMISARIS

PEDOMAN DAN TATA TERTIB (BOARD MANUAL) DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris. Pedoman tersebut secara berkala dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris telah dilakukan kajian terakhir pada 12 Desember 2022.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, isi dari Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah:
1. Organisasi
2. Independensi
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Pembentukan Komite-komite
5. Fungsi Komisaris Utama
6. Nilai-nilai Etika Anggota Dewan Komisaris
7. Rapat
8. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 6 (enam) orang dan tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang sebanyak 8 (delapan) orang. Sebanyak 3 (tiga) dari 6 (enam) orang atau 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Mayoritas anggota dari Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	2019-2022 2022-2025	• Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019. • Diangkat sebagai Komisaris Utama melalui RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.
Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022 2022-2025	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	2019-2022 2022-2025	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.
Onny Widjanarko	Komisaris Independen	2023-2025	Diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 8 Mei 2023.
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	2020-2022 2022-2025	Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	2022-2025	Diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.

ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Bank BTPN memastikan setiap anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris tersebut.

Bank BTPN memiliki program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru dengan tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Bank BTPN ke depan, pedoman kerja serta hal lainnya yang menjadi bagian dari tanggung jawab Dewan Komisaris. Melalui program orientasi tersebut, anggota Dewan Komisaris baru diharapkan dapat bekerja selaras dengan organ Tata Kelola Bank yang lain. Selanjutanya, program orientasi ini berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh unit kerja Sekretaris Perusahaan, antara lain meliputi:
1. Visi dan Misi Bank
2. Kode Etik Bank
3. Struktur Organisasi Bank

4. Anggaran Dasar Bank
5. Kebijakan dan Prosedur Bank
6. Pedoman Kerja Dewan Komisaris (BOC Manual) dan Piagam Komite Dewan Komisaris
7. Laporan Tahunan Bank
8. Rencana Bisnis Bank

Pada tahun 2023, terdapat anggota Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Onny Widjanarko yang diangkat sebagai Komisaris Independen Bank BTPN melalui RUPST 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak 8 Mei 2023.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Secara umum, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank.
c. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
d. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lainnya.
e. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin b, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
    1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
    2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
f. *Duty of care*
    Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta secara profesional. Dalam hal ini Dewan Komisaris wajib antara lain:
    - Senantiasa bertindak secara jujur dan dengan itikad baik
    - Senantiasa menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan Keputusan
    - Tidak menyebabkan Bank melanggar ketentuan yang berlaku
    - Menghadiri dan terlibat secara aktif dalam Rapat Dewan Komisaris
    - Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efisien dan efektif
g. *Duty of loyalty*
    Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan wajib dilakukan hanya untuk kepentingan Bank, dalam hal ini wajib mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan diatas kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:
    - Memiliki transaksi dengan Bank secara langsung maupun tidak langsung, tanpa terlebih dahulu menyampaikan keterbukaan keterkaitannya serta mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS
    - Memanfaatkan Bank termasuk tapi tidak terbatas pada menggunakan aset dan fasilitas Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
    - Menyampaikan informasi yang bukan merupakan informasi publik kepada pihak ketiga
    - Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
    - Menggunakan informasi internal untuk keuntungan pribadi
h. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis Teknologi Informasi (TI).
i. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata Kelola TI
j. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite Dewan Komisaris sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
k. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.

DEWAN KOMISARIS

Secara khusus, masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memiliki tugas. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Tugas
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Takeshi Kimoto	Komisaris	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Audit b. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Onny Widjanarko	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Pemantau Risiko b. Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Anggota Komite Audit b. Anggota Komite Pemantau Risiko
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Anggota Komite Pemantau Risiko b. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan

KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

- Menyetujui Rencana Bisnis Termasuk:
  - Menyetujui pembukaan atau penutupan suatu kantor cabang atau kantor perwakilan BTPN.
  - Untuk menyetujui pendirian atau pembubaran departemen dari struktur organisasi BTPN.
- Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
  - Kepada pihak terkait/terafiliasi dengan BTPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum; atau
  - Dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- Mengikat BTPN sebagai penjamin atau penanggung hutang (borgtocht) atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:
  - yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum; atau
  - dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang.
- Meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam huruf B2) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- Menghapus bukukan atau mengeluarkan piutang BTPN dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris
- Mengalihkan atau melepaskan hak BTPN untuk menagih piutang BTPN yang telah dihapus bukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris
- Membeli, menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan BTPN baik dalam satu -transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar BTPN)

- Menyetujui kebijakan utama BTPN dan kebijakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan BTPN, sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
- Menyetujui laporan berkala yang disyaratkan oleh otoritas setempat (Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Dewan Komisaris mengenai Evaluasi Kinerja Komite, Laporan Dewan Komisaris mengenai Evaluasi fungsi kepatuhan, laporan tahunan pelaksanaan GCG, dll)
- Menyampaikan laporan dan menyetujui hal lain terkait Konglomerasi Keuangan/KUB
- Pembayaran atau Investasi yang Sangat Besar dan Luar biasa. Kategori Pembayaran atau Investasi yang sangat besar dan luar biasa ditentukan oleh Dewan Komisaris dari Waktu ke waktu
- Rencana pemulihan dan rencana resolusi

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, Dewan Komisaris memiliki 4 (empat) komite di bawah Dewan Komisaris: Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Perusahaan.

Dewan Komisaris menilai, secara umum seluruh komite telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Seluruh komite, terutama menjalankan tugas pengawasan untuk kemudian memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Prosedur Penilaian

Pelaksanaan penilaian terhadap komite di bawah Dewan Komisaris dilaksanakan melalui 2 (dua) metode: penilaian kinerja komite secara keseluruhan dan penilaian anggota komite secara individual.

Penilaian komite secara kolegial dilakukan melalui prosedur penilaian secara mandiri atau *self-assessment*. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing komite dengan memperhatikan pemenuhan item atau parameter penilaian yang telah disusun.

Adapun penilaian secara individual dilakukan oleh ketua komite yang bersangkutan atas seperangkat parameter penilaian yang telah ditetapkan terkait kinerja anggota komite yang bersangkutan. Hasil penilaian diserahkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menjadi bahan pertimbangan penyusunan rekomendasi nominasi bagi Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian

Parameter atau kriteria yang digunakan dalam penilaian, antara lain mencakup pelaksanaan tugas komite sesuai Panduan Tugas dan Tanggung Jawab komite terkait. Selain itu, penilaian terhadap komite juga mencakup parameter independensi dari anggota komite terkait agar dapat memberikan masukan yang profesional dan independen bagi Bank.

Terkait dengan hal ini, Bank menetapkan batas waktu penugasan anggota komite (selain Komite Audit). Tujuannya adalah dalam rangka menjaga independensi anggota komite yang bersangkutan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, jumlah Komisaris Independen sedikitnya berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2023, jumlah Komisaris Independen Bank BTPN sebanyak 3 (tiga) orang dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan OJK tersebut.

Kriteria Komisaris Independen

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, peran Komisaris Independen sangat penting. Terutama berkenaan dengan upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan serta meningkatkan independensi dan objektivitas.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
3. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

DEWAN KOMISARIS

Independensi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Bank melakukan pencatatan dan kontrol atas masa jabatan komisaris independen agar tidak melebihi 9 (sembilan) tahun. Uraian tentang independensi Komisaris Independen disampaikan melalui tabel di bawah.

Aspek Independensi	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Onny Widjanarko	Edmund Tondobala
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	√	√	√
Tidak memilik rangkap jabatan sebagai: Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan pengawasan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	√	√	√

RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KERJA 2023

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional Bank BTPN serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi. Pelaksanaan pengawasan tersebut untuk memastikan pelaksanaan tata kelola pada seluruh aktivitas Bank BTPN.

Pengawasan difokuskan kepada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank, antara lain:

1. Kajian atas kinerja keuangan Bank BTPN dan Perusahaan Anak.
2. Melalui Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris juga melakukan kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Internal Audit, SMBC Audit dan Audit Eksternal dan rekomendasi dari Internal Audit melalui Komite Audit.
4. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Persetujuan atas revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2023-2025.
6. Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Korporasi untuk tahun 2022-2026.
7. Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
8. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank - RBBR, penerapan APU PPT dan penerapan manajemen risiko
9. Melakukan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan melalui Komite Tata Kelola Perusahaan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Kebijakan

Sebagaimana diatur juga di dalam Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris, program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dilakukan diantaranya untuk mendukung pelaksanaan tugas serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengelolaan Bank yang efektif. Bank BTPN memfasilitasi dilakukannya pengembangan kompetensi anggota melalui program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris, sejalan dengan industri dan Tata Kelola yang terus berkembang.

Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris juga dilakukan melalui program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris, sebagai wujud komitmen Bank BTPN untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komitmen tersebut juga tercermin dari pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel realisasi dibawah ini.

Realisasi

No	Nama	Pelatihan	Waktu
1	**Chow Ying Hoong** Komisaris Utama	1. Economic Outlook Update by Raden Pardede 2. Executive Risk Management Certification Refresher 3. Leadership Series: Influence for Impact 4. Political Update by Philips J. Vermonte	1. 6 Juni 2023 2. 26 Juli 2023 3. 5 Desember 2023 4. 8 Desember 2023
2	**Takeshi Kimoto** Komisaris	1. Economic Outlook Update by Raden Pardede 2. Executive Risk Management Certification Refresher 3. Leadership Series: Influence for Impact 4. Political Update by Philips J. Vermonte	1. 6 Juni 2023 2. 26 Juli 2023 3. 5 Desember 2023 4. 8 Desember 2023
3	**Ninik Herlani Masli Ridhwan** Komisaris Independen	1. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 2. Economic Outlook Update by Raden Pardede 3. Executive Risk Management Certification Refresher 4. Leadership Series: Influence for Impact 5. Political Update by Philips J. Vermonte	1. 4 Maret 2023 2. 6 Juni 2023 3. 26 Juli 2023 4. 5 Desember 2023 5. 8 Desember 2023
4	**Onny Widjanarko** Komisaris Independen	1. Training Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 2. Induction 2022: BTPN Overview 3. Economic Outlook Update by Raden Pardede 4. Induction 2022 : Compliance 5. Leadership Series: Influence for Impact 6. Political Update by Philips J. Vermonte	1. 12 Januari 2023 2. 5 Juni 2023 3. 6 Juni 2023 4. 17 Juni 2023 5. 5 Desember 2023 6. 8 Desember 2023
5	**Edmund Tondobala** Komisaris Independen	1. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 2. Economic Outlook Update by Raden Pardede 3. Executive Risk Management Certification Refresher 4. Leadership Series: Influence for Impact 5. Political Update by Philips J. Vermonte	1. 4 Maret 2023 2. 6 Juni 2023 3. 26 Juli 2023 4. 5 Desember 2023 5. 8 Desember 2023
6	**Ongki Wanadjati Dana** Komisaris	1. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 2. Economic Outlook Update by Raden Pardede 3. Leadership Series : Managing Global Business Risk 4. Executive Risk Management Certification Refresher 5. Leadership Series: Influence for Impact 6. Political Update by Philips J. Vermonte	1. 4 Maret 2023 2. 6 Juni 2023 3. 14 Juni 2023 4. 26 Juli 2023 5. 5 Desember 2023 6. 8 Desember 2023

DIREKSI

Direksi merupakan organ penting dalam tata kelola perusahaan, yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Wewenang tersebut digunakan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Bank. Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh regulasi bahwa Direksi dapat mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Di antara regulasi yang mengatur tentang Direksi adalah: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tujuannya adalah demi mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi Bank BTPN senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank.

DASAR HUKUM

Ketentuan mengenai Direksi antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, Bank juga mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menetapkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Oleh karenanya, Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Bank juga menyusun kode etik serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (BOD Manual) sebagai acuan anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

KRITERIA DIREKSI

Merujuk pada Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, setiap anggota Direksi wajib memenuhi kriteria dan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugasnya. Penetapan kriteria Direksi, antara lain bersandar pada Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Saat diangkat, Direksi minimal harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank. Selanjutnya, Bank wajib meneliti dan mendokumentasikannya.

INDEPENDENSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan kepemilikan, keuangan dan kepengurusan dengan pemegang saham pengendali Bank, sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

BTPN juga telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan independensi Direksi, seperti mencakup:

1. Anggota Direksi Bank BTPN telah memenuhi kriteria dan independensi sesuai ketentuan regulator.
2. Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan OJK.

Anggota Direksi Bank menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kepatutan. Pernyataan ini selalu diperbarui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2023.

KOMPOSISI DIREKSI

Penetapan komposisi Direksi dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama. Anggota Direksi Bank berjumlah 8 (delapan) orang, yang 3 (tiga) di antaranya adalah perempuan.

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Henoch Munandar	Direktur Utama	2019-2022 2022-2025	• Menjabat sebagai Direktur sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022. • Diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPS Luar Biasa Tanggal 29 September 2022.
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	2021-2022 2022-2025	• Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 dan efektif menjabat sejak 4 Januari 2021. • Diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	2020-2022 2022-2025	• Diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 23 April 2020, dan efektif menjabat sejak 14 Mei 2020. • Diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2019-2022 2022-2025	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.
Atsushi Hino	Direktur	2023-2025	Diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2023.
Keishi Kobata	Direktur	2023-2025	Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Juli 2023.
Merisa Darwis	Direktur	2019-2022 2022-2025	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.
Hanna Tantani	Direktur	2019-2022 2022-2025	Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 11 September 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2022.

ORIENTASI DIREKSI BARU

Direktur Utama memastikan anggota Direksi yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sekretaris Perusahaan dalam hal ini mengundang fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan keuangan untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Direksi tersebut.

DIREKSI

Bank BTPN memiliki dan menjalankan program orientasi bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Bank ke depan, pedoman kerja serta hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Melalui program orientasi ini, diharapkan anggota Direksi baru dapat bekerja selaras dengan organ Tata Kelola Bank yang lain. Materi program orientasi tersebut berupa dokumen-dokumen yang disiapkan unit kerja Sekretaris Perusahaan, antara lain meliputi:

1. Visi dan Misi Bank
2. Kode Etik Bank
3. Struktur Organisasi Bank
4. Anggaran Dasar Bank
5. Kebijakan dan Prosedur Perusahaan
6. Pedoman Kerja Direksi (BOD Manual) dan Piagam Komite Direksi
7. Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku
8. Laporan Tahunan Bank
9. Rencana Bisnis Bank

Pada tahun 2023, terdapat 2 anggota Direksi baru yaitu Bapak Atsushi Hino yang diangkat melalui RUPST 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Mei 2023. Selanjutnya adalah Bapak Keishi Kobata yang diangkat melalui RUPSLB 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sejak 25 Juli 2023.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Secara umum, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank serta berwenang mewakili Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;
2) Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisi dan inovasi teknologi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3) Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
4) Dalam menerapkan tata Kelola yang baik pada Perseroan, Direksi wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan serta satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan OJK;
5) Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
7) Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:
   - memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris; dan
   - melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Memastikan transparansi atas informasi material terkait dengan keadaan usaha Perseroan;
9) *Duty of care*
   Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta secara profesional. Dalam hal ini Direksi wajib antara lain:
   - Senantiasa bertindak secara jujur dan dengan itikad baik
   - Senantiasa menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan
   - Tidak menyebabkan Bank melanggar ketentuan yang berlaku
   - Menghadiri dan terlibat secara aktif dalam Rapat Direksi
   - Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efisien dan efektif
10) *Duty of loyalty*
    Direksi dalam pengambilan keputusan wajib dilakukan hanya untuk kepentingan Bank, dalam hal ini wajib mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan diatas kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Direksi tidak diperkenankan untuk:
    - Memiliki transaksi dengan Bank secara langsung maupun tidak langsung, tanpa terlebih dahulu menyampaikan keterbukaan keterkaitannya serta mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS

- Memanfaatkan Bank termasuk tapi tidak terbatas pada menggunakan aset dan fasilitas Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
- Menyampaikan informasi yang bukan merupakan informasi publik kepada pihak ketiga
- Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
- Menggunakan informasi internal untuk keuntungan pribadi

11) Menetapkan rencana strategis TI;
12) Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan pengunaan TI yang memadai dan mengkomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI;
13) Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Bank dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI;
14) Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

Pembidangan Tugas Masing-masing Direksi

Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
Direktur Utama	Mengoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi, yang membawahi termasuk namun tidak terbatas pada: a. Corporate Banking (Japanese) b. Wholesale Banking c. Retail Banking d. Treasury e. Operasional f. Kepatuhan & Legal g. Keuangan h. Human Resources*) i. Internal Audit*) j. Information Technology*) k. Manajemen Risiko*)
Wakil Direktur Utama	Mengoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab: a. Corporate Banking (Japanese) b. Treasury Secara khusus membawahi: a. Credit Risk Division: • Credit • Loan • Transaction Legal • Commercial Banking Credit Risk • Credit Planning • Corporate Portfolio Management b. Wholesale, Commercial & Transaction Banking*) • Wholesale Banking • Wholesale Banking Business Planning • Structured Finance • Wholesale Banking Project Management 1 • Wholesale Banking Project Management 2 • Commercial Banking & WFB • Transaction Banking and Supply Chain c. Business Banking*) • Business Development • Business Banking Credit Risk • SME • Business Banking Cross Collaboration • Business Banking Academy • Business Banking Policy & Control • Business Banking Strategy • Business Banking Support • Digital SME Business • Sales Management Bertindak sebagai Chief Strategic Officer (CSO) berdasarkan delegasi Direktur Utama, dengan tugas sebagai berikut: 1. Menetapkan strategi bisnis dalam rangka kolaborasi dalam grup Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) 2. Memastikan alignment strategi bisnis anak perusahaan dengan Perseroan sebagai entitas utama 3. Memastikan alignment bisnis anak perusahaan dan Perseroan sebagai entitas utama dan pemegang saham pengendali.

DIREKSI

Pembidangan Tugas Masing-masing Direksi

Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
Wakil Direktur Utama	Secara khusus membawahi: a. Retail Lending Business • Pension Business RLB • Personal Loan RLB • Micro Business RLB • Joint Finance RLB • Sales Management & Process Excellence • Product & Portfolio Management b. Wealth Management Business and Network & Distribution*) • Sales Management WMB • Liabilities & Digital Management WMB • Wealth Product Management WMB • Customer Experience WMB • Sales Distribution WMB & National Distribution 1 • Network Management WMB c. Digital Banking*) • Digital Banking Acquisition, Service & Marketing JENIUS • Digital Banking Solution • Digital Banking Product • Digital Banking Business Performance & Customer Value Management • Digital Banking Partnership • Retail Banking Digital Strategy d. Retail Banking Risk e. Retail Banking Analytics, Planning & Process Excellence
Direktur Kepatuhan	Secara khusus membawahi: a. AML&CFT b. Compliance c. Corporate Secretary d. General Counsel e. Communications & DAYA
Direktur Corporate Banking (Japanese)	Secara khusus membawahi: a. Corporate Banking 2 b. Corporate Banking 3 c. Corporate Banking 4 d. Corporate Banking 5 e. Corporate Banking 6 f. KYC Onboarding g. Corporate Banking Business Planning h. Corporate Banking Loan Reviewer i. Credit Analyst Corporate Banking
Direktur Operasional	Secara khusus membawahi: a. Customer Experience Center b. Branch Banking c. Operations Transaction Center d. Reporting, Settlement & Access Management e. General Services f. Operations Development g. Operations Control Assurance
Direktur Treasury	Secara khusus membawahi: Treasury*): a. Treasury ALM & Planning b. Treasury Trading c. Treasury Marketing
Direktur Keuangan & Perencanaan	Secara khusus membawahi: a. Financial Planning and Performance b. Financial Controller c. Tax Management d. Finance Risk, Control & Governance e. Alignment & Synergy f. Strategy Implementation

*) Tugas dan tanggung jawab terkait dibawahi oleh seorang anggota Board of Management (BOM).

SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi difasilitasi oleh organisasi *Human Resources* di lingkungan Bank, yang dilakukan melalui proses *talent management & succession planning*. Terkait dengan hal itu, *Human Resource* melakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota Direksi dan potensi pengembangannya di masa depan.

Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disahkan melalui RUPS.

RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KERJA 2023

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis serta memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi.

Selama tahun 2023, rapat Direksi telah melakukan pembahasan beragam agenda, antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan kinerja keuangan Bank dan Perusahaan Anak.
2. Evaluasi kinerja unit-unit bisnis atas target yang telah ditetapkan.
3. Pengkinian atas inisiatif dan aktifitas strategis yang dilakukan oleh direktorat keuangan, termasuk atas proyek strategis yang dilakukan.
4. Kajian terhadap penerapan Teknologi Informasi (TI) dan operasional Bank serta inisiatif di bidang TI dan operasional.
5. Persetujuan rencana strategis pada Unit Bisnis dan Unit Pendukung.
6. Persetujuan atas revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2023-2025
7. Persetujuan kajian kompensasi karyawan untuk tahun 2022
8. Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap Bank.
9. Pemantauan tindak lanjut atas temuan audit dari Internal Audit, SMBC Audit dan Eksternal Audit serta hasil pengawasan OJK dan otoritas lainnya.
10. Kajian terhadap internal fraud, whistleblowing system, dan upaya tindak lanjut.
11. Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Korporasi untuk tahun 2022-2026.
12. Pengkinian terkait Keuangan dan Perencanaan Bank.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan

Sebagaimana diatur juga di dalam Pedoman Kerja dan Tata Tertib Direksi, program pengembangan kompetensi Direksi dilakukan diantaranya untuk mendukung pelaksanaan tugas serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengelolaan Bank yang efektif. Bank BTPN memfasilitasi dilakukannya pengembangan kompetensi anggota melalui program pelatihan bagi Direksi, sejalan dengan industri dan Tata Kelola yang terus berkembang.

Pengembangan kompetensi Direksi juga dilakukan melalui program pelatihan bagi anggota Direksi. Program ini merupakan komitmen Bank BTPN untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sehari-hari. Pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

DIREKSI

Realisasi

No	Nama	Pelatihan	Waktu
1	Henoch Munandar **Direktur Utama**	1. Thriving in the age of Analytics with Digital Mindset 2. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 3. Media Training 4. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 5. Sustainable Finance Offline Seminar 6. Seminar Nasional "Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial 7. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 8. CEO Networking 2023 9. Bank BTPN Economic Outlook 2024 10. Dialog Akhir Tahun Anggota Dewan Komisioner OJK dan Industri Jasa Keuangan 11. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 12. Political Update by Philip J. Vermonte	1. 18 Januari 2023 2. 14 Maret 2023 3. 6 Juli 2023 4. 26 Juli 2023 5. 11 Agustus 2023 6. 13 September 2023 7. 12 Oktober 2023 8. 7 November 2023 9. 22 November 2023 10. 1 Desember 2023 11. 5 Desember 2023 12. 8 Desember 2023
2	**Kaoru Furuya** Wakil Direktur Utama	1. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 2. BTPN Leaders' Onboarding Program: Indonesia Professional Etiquette and HR Practices 3. Economic Outlook Update by Raden Pardede 4. X-Talk Leadership Series : "Managing Global Business Risks: A Proactive Approach" by Tantowi Yahya 5. BTPN Supply Chain Approach Workshop 6. Media Training 7. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 8. Sustainable Finance Offline Seminar 9. Bloomberg CEO Forum @ASEAN 10. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 11. Bank BTPN Economic Outlook 2024 12. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 13. Political Update by Philip J. Vermonte	1. 14 Maret 2023 2. 26 Mei 2023 3. 6 Juni 2023 4. 14 Juni 2023 5. 25 Juni 2023 6. 6 Juli 2023 7. 26 Juli 2023 8. 11 Agustus 2023 9. 6 September 2023 10. 12 Oktober 2023 11. 22 November 2023 12. 5 Desember 2023 13. 8 Desember 2023
3	**Darmadi Sutanto** Wakil Direktur Utama	1. Leading in Digital Era 2. Economic Outlook Update by Raden Pardede 3. Media Training 4. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 5. Sustainable Finance Offline Seminar 6. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 7. Bank BTPN Economic Outlook 2024 8. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 9. Political Update by Philip J. Vermonte	1. 16-21 April 2023 2. 6 Juni 2023 3. 6 Juli 2023 4. 26 Juli 2023 5. 11 Agustus 2023 6. 12 Oktober 2023 7. 22 November 2023 8. 5 Desember 2023 9. 8 Desember 2023
4	**Dini Herdini** Direktur Kepatuhan	1. Thriving in the age of Analytics with Digital Mindset 2. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 3. Seminar HKHPM "Undang-Undang Perkembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Implikasi Pada Sektor Pasar Modal" 4. Webinar ICSA-OJK : Pendalaman POJK No.14/POJK.04/2019 - Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dgn memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu 5. Media Training 6. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 7. Sustainable Finance Offline Seminar 8. Deloitte Southeast Asia Financial Crime Symposium | The Emerging Issue of Financial Crime 9. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 10. IMD's Orchestrating Winning Performance, Singapore Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 11. Political Update by Philip J. Vermonte	1. 18 Januari 2023 2. 14 Maret 2023 3. 20 Maret 2023 4. 8 Juni 2023 5. 6 Juli 2023 6. 26 Juli 2023 7. 11 Agustus 2023 8. 3 Oktober 2023 9. 12 Oktober 2023 10. 20-24 November 2023 11. 8 Desember 2023
5	**Atsushi Hino** Direktur	1. Economic Outlook Update by Raden Pardede 2. Media Training 3. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 4. Talent Insight Discovery Training 5. Bank BTPN Economic Outlook 2024 6. Political Update by Philip J. Vermonte	1. 6 Juni 2023 2. 6 Juli 2023 3. 12 Oktober 2023 4. 16 Oktober 2023 5. 22 November 2023 6. 8 Desember 2023

No	Nama	Pelatihan	Waktu
6	**Keishi Kobata** Direktur	1. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 2. Sustainable Finance Offline Seminar 3. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 4. Bank BTPN Economic Outlook 2024 5. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 6. Political Update by Philip J. Vermonte	1. 26 Juli 2023 2. 11 Agustus 2023 3. 12 Oktober 2023 4. 22 November 2023 5. 5 Desember 2023 6. 8 Desember 2023
7	**Merisa Darwis** Direktur	1. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 2. Economic Outlook Update by Raden Pardede 3. IMD - Individual Learning Development – Orchestrating Winning Performance 4. Media Training 5. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 6. Sustainable Finance Offline Seminar 7. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 8. Bank BTPN Economic Outlook 2024 9. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 7. Political Update by Philip J. Vermonte	1. 14 Maret 2023 2. 6 Juni 2023 3. 26-30 Juni 2023 4. 6 Juli 2023 5. 26 Juli 2023 6. 11 Agustus 2023 7. 12 Oktober 2023 8. 22 November 2023 9. 5 Desember 2023 10. 8 Desember 2023
8	**Hanna Tantani** Direktur	1. OJK Webinar - Tren Perbankan di Tahun 2023 2. Thriving in the age of Analytics with Digital Mindset 3. OJK Webinar - Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan 4. OJK Webinar - The Role of GRC in Supporting Financial Sector Performance 5. Webinar - PwC Indonesia Economic Update Q1 – 2023 6. Harvard yang Driving Digital Strategy 7. Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap 8. McKinsey session with BTPN on “AI-enabled customer service” 9. BCG and AC Ventures’ report launch: Shaping the Future of Fintech in Indonesia 10. Economic Outlook Update by Raden Pardede 11. Empowering Women <IDX> 12. Media Training 13. Executive Risk Management Certification Refresher - 2023 14. PwC WEBINAR: Tax Breakfast Briefing - Discussion on the new rules of Benefits In-Kinds 15. Sustainable Finance Offline Seminar 16. Bank BTPN Sustainability Seminar 2023 17. Bank BTPN Economic Outlook 2024 18. Leadership Series: Influence for Impact with Najwa Shihab 19. Political Update by Philip J. Vermonte	1. 17 Januari 2023 2. 18 Januari 2023 3. 2 Februari 2023 4. 23 Februari 2023 5. 9 Maret 2023 6. 12-17 Maret 2023 7. 14 Maret 2023 8. 16 Maret 2023 9. 29 Maret 2023 10. 6 Juni 2023 11. 8 Juni 2023 12. 6 Juli 2023 13. 26 Juli 2023 14. 2 Agustus 2023 15. 11 Agustus 2023 16. 12 Oktober 2023 17. 22 November 2023 18. 5 Desember 2023 19. 8 Desember 2023

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Kriteria dan Prosedur Penilaian

Dalam memberikan penilaian terhadap komite di bawah Direksi, yang dijadikan pertimbangan, antara lain kehadiran dalam rapat serta pelaksanaan tugas. Terutama, memastikan bahwa seluruh strategi dan inisiatif utama telah ditindaklanjuti.

Hasil Penilaian

Atas dasar pertimbangan dalam memberikan penilaian tersebut, Direksi memandang bahwa pada tahun 2023, seluruh komite telah menjalankan tugas dengan baik. Dengan demikian, komite-komite dalam pengawasan Direksi telah terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Selaras dengan regulasi tersebut, pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertimbangkan dan memenuhi faktor keberagaman.

Keberagaman pada Dewan Komisaris tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Bank. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan, baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Bank. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Bank.

Dengan adanya pertimbangan kombinasi karakteristik pada Dewan Komisaris, akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. Begitu pun halnya dengan Dewan Komisaris.

Aspek Keberagaman	Dewan Komisaris	Direksi
Kewarganegaraan	• Warga Negara Indonesia • Warga Negara Singapura • Warga Negara Jepang	• Warga Negara Indonesia • Warga Negara Jepang
Pendidikan	• Bidang Ilmu Ekonomi • Bidang Manajemen Keuangan • Bidang Moneter	• Bidang Ilmu Ekonomi • Bidang Manajemen Keuangan • Bidang Hukum
Pengalaman Kerja	• Praktisi Perbankan • Auditor	• Perbankan Internasional • Manajemen Risiko • Eksekutif Keuangan
Jenis Kelamin	• 1 Perempuan • 5 Laki-laki	• 3 Perempuan • 5 Laki-laki

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Ketentuan yang mengatur mengenai rapat Dewan Komisaris telah tercantum dalam Pedoman dan Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk di dalam rapat tersebut.
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

8. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
10. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah RUPS	Jumlah Kehadiran	%
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	7	7	100	6	6	100	3	3	100
Takeshi Kimoto	Komisaris	7	6	86	6	6	100	3	3	100
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	7	7	100	6	6	100	3	3	100
Onny Widjanarko[1)]	Komisaris Independen	5	5	100	4	4	100	2	2	100
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	7	7	100	6	6	100	3	3	100
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	7	7	100	6	6	100	3	3	100
Irwan Mahjudin Habsjah [2)]	Komisaris Independen	1	1	100	1	1	100	1	1	100

[1)] Onny Widjanarko diangkat sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya RUPST tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 8 Mei 2023.
[2)] Irwan Mahjudin Habsjah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya RUPST tanggal 13 April 2023.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
1	MOM.0001/BOC/I/2022	26 Januari 2023	1. Laporan Komite Audit Kuartal 4/2022 2. Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 4/2022 3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 4/ 2022 4. Laporan Komite Tata Kelola Perusahaan Kuartal 4/2022
2	MOM.0002/BOC/IV/2023	17 April 2023	1. Laporan Komite Audit Kuartal 1/2023 2. Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 1/2023 3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 1/2023 4. Laporan Komite Tata Kelola Perusahaan Kuartal 1/2023
3	MOM.0003/BOC/VI/2022	22 Junl 2023	1. Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Audit 2. Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Pemantau Risiko 3. Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi 4. Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Tata Kelola 5. Laporan Kunjungan Kerja Komite
4	MOM.0004/BOC/VII/2023	26 Jull 2023	1. Laporan Komite Audit Kuartal 2/2023 2. Laporan Komite Pemantau Risiko Kuartal 2/2023 3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 2/2023 4. Laporan Komite Tata Kelola Perusahaan Kuartal 2/2023
5	MOM.0005/BOC/IX/2023	5 September 2023	1. Persetujuan Dewan Komisaris atas Proyek Utopia 2. Persetujuan Dewan Komisaris atas Saham Treasuri
6	MOM.0006/BOC/X/2023	25 Oktober 2023	1. Laporan Komite Audit Kuartal 3/2023 2. Laporan Komite Pemantau Risiko Kuartal 3/2023 3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 3/2023 4. Laporan Komite Tata Kelola Perusahaan Kuartal 3/2023
7	MOM.0007/BOC/IX/2023	23 November 2023	1. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Komite Audit untuk tahun 2024 2. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2024

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Ketentuan yang mengatur mengenai rapat Direksi telah tercantum dalam Pedoman dan Tertib Kerja Direksi, yaitu antara lain mencakup:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1⁄2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk dalam rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ke-3.
10. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika diambil degan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.
13. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Tingkat kehadiran Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah RUPS	Jumlah Kehadiran	%
Henoch Munandar	Direktur Utama	47	40	85	6	6	100	3	3	100
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	47	41	87	6	6	100	3	3	100
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	47	43	91	6	6	100	3	3	100
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	47	45	96	6	6	100	3	3	100
Keishi Kobata (1)	Direktur	25	21	84	3	3	100	1	1	100
Atsushi Hino (2)	Direktur	31	27	87	4	4	100	2	2	100
Merisa Darwis	Direktur	47	46	98	6	6	100	3	3	100
Hanna Tantani	Direktur	47	45	96	6	6	100	3	3	100
Kan Funakoshi (3)	Direktur	13	13	100	1	1	100	1	1	100
Hiromichi Kubo (4)	Direktur	20	20	100	3	3	100	2	2	100

[1] Keishi Kobata diangkat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB tanggal 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Juli 2023.
[2] Atsushi Hino diangkat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2023.
[3] Kan Funakoshi tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST tanggal 13 April 2023.
[4] Hiromichi Kubo tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB tanggal 22 Juni 2023.

Agenda Rapat Direksi

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
1	MOM.0001/BOD/I/2023	10 Januari 2023	1. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Desember 2022 2. Persiapan Rapat Pembahasan RBB dengan OJK 3. Pengkinian Tata Kelola
2	MOM.0002/BOD/I/2023	19 Januari 2023	1. Pengkinian Business Banking Q4-2022 2. Pengkinian Bisnis Retail Lending Q4-2022 3. Pengkinian Bisnis Wealth Management Q4-2022
3	MOM.0003/BOD/I/2023	24 Januari 2023	1. Pengkinian Operasional Q4-2021 2. Pengkinian Bisnis Grup Wholesale Banking Q4-2022 3. Pengkinian Kepatuhan dan APU-PPT Q4-2022 4. Pengkinian Tresuri
4	MOM.0004/BOD/I/2023	31Januari 2023	1. Pengkinian Bisnis Digital Banking Q4-2022 2. Pengkinian Operasional Tahun 2022 3. SOX PLC tahun 2022 - Hasil Efektifitas Operasional 4. Pengkinian dari Proyek Utara
5	MOM.0005/BOD/II/2023	14 Februari 2023	Pengkinian dari HR - Kajian Pembayaran
6	MOM.0006/BOD/II/2023	14 Februari 2023	1. Pengkinian dari HR 2. Pengkinian Audit Laporan Keuangan untuk tahun 2022 & Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Januari 2023 3. Pengkinian Audit Internal 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Pengkinian Kontrol GL dan Tata Kelola 6. Surat Mandat untuk Fasilitas dari IFC
7	MOM.0007/BOD/II/2023	21 Februari 2023	1. Pengkinian Tresuri 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Pengkinian dari SOX 4. Pengkinian terkait Jenius sebagai platform
8	MOM.0008/BOD/III/2023	14 Maret 2023	Pengkinian Direksi
9	MOM.0009/BOD/III/2023	14 Maret 2023	1. Pengkinian Kinerja Keuangan BTPN Syariah FY2022 2. Pengkinan dari Keuangan: Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Februari 2023 dan Pengkinian Pajak 3. Pengkinian Tata Kelola 4. Proyek Kerjasama Eksklusif Bancassurance
10	MOM.0010/BOD/III/2023	21 Maret 2023	1. Pengkinian Tresuri 2. Pengkinian Tata Kelola - Update dari DAYA 3. Pengkinian dari SOX 4. End-to-End Inisiatif Operasional Ritel
11	MOM.0011/BOD/III/2023	28 Maret 2023	Pengkinan Proyek Utopia
12	MOM.0012/BOD/IV/2023	4 April 2023	1. Pengkinian dari Audit Internal 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Pengkinian dari Keuangan 4. Sosialisasi dari Privy (Tanta Tangan Digital)
13	MOM.0013/BOD/IV/2023	11 April 2023	1. Pengkinian dari Proyek Utopia 2. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Maret 2023 3. Pengkinian Tresuri 4. Pengkinian Tata Kelola
14	MOM.0014/BOD/IV/2022	18 April 2023	1. Pengkinian Bisnis Digital Banking Q1-2023 2. Pengkinian Bisnis Retail Lending Q1-2023 3. Pengkinian Bisnis Wealth Management dan Network & Distribution 4. Pengkinian Business Banking Q1-2023 5. Pengkinian Bisnis Corporate Banking Japanese Q1-2023 6. Pengkinian Bisnis Wholesale & Commercial Q1-2023 7. Penkinian Operasional Q1-2023 8. Pengkinian Kepatuhan dan APU-PPT Q1-2023
15	MOM.0015/BOD/V/2023	2 Mei 2023	1. Proposal KPI Individu Direksi dan BOM 2023 2. Implementasi Strategi Transformasi Digital
16	MOM.0016/BOD/V/2023	9 Mei 2023	1. Pengkinian Kinerja BTPN Syariah Q1-2023 2. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD April 2023 3. Proyek Utama Operasional 4. Pengkinian KPI SMBC 5. Pengkinian Tata Kelola

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
17	MOM.0017/BOD/V/2023	23 Mei 2023	1. Pengkinian Rencana Bisnis Bank 2. Pengkinian Human Resource 3. Pengkinian Tresuri 4. Pengkinian SOX & GL 5. Pengkinian dari IT 6. Presentasi dari SBCS Indonesia
18	MOM.0018/BOD/VI/2023	13 Juni 2023	1. Pengkinian dari Keuangan: - Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Mei 2022 - Proyeksi - Proposal Panduan Monthly Letter 2. Pengkinian Audit Internal 3. Pengkinian Tata Kelola
19	MOM.0019/BOD/VI/2023	20 Juni 2023	1. Pengkinian Rencana Bisnis Bank dari BTPN Syariah 2. Revisi Rencana Bisnis Bank untuk persetujuan Direksi
20	MOM.0020/BOD/VI/2023	20 Juni 2023	1. Pengkinian Tresuri 2. Pengkinian terkait Perlindungan Konsumen (Perlinkos) 3. Pengkinian terkait Acara Pocari Sweat Run
21	MOM.0021/BOD/VII/2023	11 Juli 2023	1. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Juni 2023 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Reorganisasi Proyek IT 4. Sosialisasi Proyek Transformasi Branding 5. Pengkinian dari Komite Investasi IT 6. Pengkinian terkait Asuransi D&O
22	MOM.0022/BOD/VII/2023	18 Juli 2023	1. Pengkinian Business Banking Q2-2023 2. Pengkinian Bisnis Retail Lending Q2-2023 3. Pengkinian Bisnis Wealth Management Q2-2023 4. Pengkinian Tata Kelola
23	MOM.0023/BOD/VII/2023	25 Juli 2023	1. Pengkinian Kepatuhan & APU-PPT Q2-2023 2. Pengkinian Tresuri 3. Pengkinian Bisnis Korporasi Jepang Q2-2023 4. Pengkinian Bisnis Wholesale Banking Q2-2023 5. Pengkinian Operasional Q2-2023 6. Penawaran Penjualan untuk Properti yang tidak digunakan
24	MOM.0024/BOD/VIII/2023	1 Agustus 2023	1. Hasil Kinerja BTPN Syariah Q2-2023 2. Pengkinian Bisnis Digital Banking Q2-2023
25	MOM.0025/BOD/VIII/2023	8 Agustus 2023	1. Pengkinian Pajak 2. Pengkinian Komparasi Kompetitor Bank 3. Pengkinian Rencana Bisnis Bank
26	MOM.0026/BOD/VIII/2023	15 Agustus 2023	Pengkinian dari Leads Property
27	MOM.0027/BOD/VIII/2023	15 Agustus 2023	1. Pengkinian terkait Proyek NEO 2. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Juli 2023 3. Pengkinian Audit Internal 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Pengkinian terkait SOX & GL Governance 6. Pengkinian Proyek NEO HRIS
28	MOM.0028/BOD/VIII/2023	22 Agustus 2023	1. Pengkinian Tresuri 2. Pengkinian Human Resource 3. Pengkinian Tata Kelola 4. Pengkinian terkait Proses Pengadaan Terbaru
29	MOM.0029/BOD/IX/2023	5 September 2023	1. Proyeksi 2023 dan Rencana Bisnis Bank 2024 2. Persetujuan Direksi terkait Proyek Utopia 3. Persetujuan Direksi terkait *Treasury Stock*
30	MOM.0030/BOD/IX/2023	12 September 2023	1. Pengkinian terkait Proyek Transformasi Branding 2. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Agustus 2023 3. Pengkinian Tata Kelola 4. Pengkinian terkait Kerjasama Bancassurance
31	MOM.0031/BOD/IX/2023	13 September 2023	Persetujuan Direksi atas *Treasury Stock*
32	MOM.0032/BOD/IX/2023	19 September 2023	1. Pengkinian Tresuri 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Pengkinian terkait SOX IT CLC dan ITGC 4. Kickoff Gugus Tugas - Proyek Utopia aktifitas pasca CSPA

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
33	MOM.0033/BOD/X/2023	10 Oktober 2023	Penjualan Properti
34	MOM.0034/BOD/X/2023	10 Oktober 2023	1. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD September 2023 2. Pengkinian Business Banking Q3-2023 3. Pengkinian Audit Internal 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Transformasi Brand - Vendor
35	MOM.0035/BOD/X/2023	17 Oktober 2023	1. Pengkinian Bisnis Korporasi Perbankan Jepang Q3-2023 2. Pengkinian Bisnis Wholesale Banking Group Q3-2023 3. Pengkinian Bisnis Retail Lending Q3-2023 4. Pengkinian Bisnis Wealth Management dan Pengkinian Jaringan & Distribusi 5. Pengkinian Tata Kelola
36	MOM.0036/BOD/X/2023	24 Oktober 2023	Penjualan Properti
37	MOM.0037/BOD/X/2023	24 Oktober 2023	1. Pengkinian Bisnis Digital Banking Q3-2023 2. Pengkinian Hasil Kinerja BTPN Syariah Q3-2023 3. Pengkinian Operasional Q3-2023 4. Pengkinian Tresuri 5. Pengkinian Kepatuhan dan APU-PPT Q3-2023
38	MOM.0038/BOD/X/2022	24 Oktober 2023	Pengkinian terkait Proyek NEO
39	MOM.0039/BOD/XI/2023	31 Oktober 2023	Pengkinian terkait Proyek NEO
40	MOM.0040/BOD/XI/2023	7 November 2023	Persetujuan Direksi atas Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2024-2026
41	MOM.0041/BOD/XI/2023	14 November 2023	1. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Oktober 2023 2. Tinjauan Pengunduran Diri Karyawan 3. Pengkinian Human Resource 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Hasil Survei Keterlibatan Karyawan (VIBES 3.0)
42	MOM.0042/BOD/XI/2023	21 November 2023	1. Pengkinian Tresuri 2. Pengkinian Komite Perlindungan Konsumen 3. Pengkinian dari K euangan: - SOX PLC - GL Governance Update
43	MOM.0043/BOD/XI/2023	28 November 2023	Konsultan untuk Jaringan & Distribusi BTPN
44	MOM.0044/BOD/XII/2023	5 Desember 2023	Persetujuan Direksi atas Penjualan Properti dan Pelepasan Properti
45	MOM.0045/BOD/XII/2023	05 Desember 2023	1. Persetujuan Direksi atas Konsultan untuk BTPN Network & Distribution 2. Rencana Investasi 2024
46	MOM.0046/BOD/XII/2023	12 Desember 2023	1. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD November 2023 2. Pengkinian Internal Audit 3. Pengkinian Tresuri 4. Pengkinian Tata Kelola
47	MOM.0047/BOD/XII/2023	13 Desember 2023	Pengkinian terkait Penjualan Properti

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan secara reguler bersamaan dengan jadwal Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Direksi selama setahun penuh. Bahan rapat serta risalah rapat telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang efektif terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasi, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko, dan tata kelola.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2023, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan sebanyak 6 kali.

Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Selama tahun 2023, tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan.

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
1	MOM.0001/BOC-BOD/I/2023	26 Januari 2023	1. Penjelasan terkait Surat Teguran dari OJK 2. Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Perusahaan Tahun 2022 3. Laporan Kinerja Keuangan untuk tahun 2022 (belum diaudit) 4. Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal 4 Tahun 2022 5. Pemantauan Rekomendasi dari Komite Dewan Komisaris
2	MOM.0002/BOC-BOD/V/2023	4 Mei 2023	1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi kuartal 1 tahun 2023 2. Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal 1 Tahun 2023
3	MOM.0003/BOC-BOD/VI/2023	22 Juni 2023	1. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Revisi Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2023-2025. 2. Pengkinian terkait Keberlanjutan
4	MOM.0004/BOC-BOD/VII/2023	26 Juli 2023	1. Laporan Penilaian Mandiri Tata Kelola untuk posisi Juni 2023 2. Laporan Kinerja Keuangan Untuk Posisi Bulan Kuartal 2 Tahun 2023 3. Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal 2 Tahun 2023 4. Pemantauan Rekomendasi Dewan Komisaris untuk posisi Juni 2023
5	MOM.0005/BOC-BOD/X/2023	25 Oktober 2023	1. Pengkinian terkait Proyek NEO 2. Laporan Kinerja Keuangan Untuk Posisi Kuartal 3 tahun 2023 3. Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal 3 Tahun 2023
6	MOM.0006/BOC-BOD/XI/2023	8 November 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2024-2026

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Chow Ying Hoong	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Takeshi Kimoto	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Ninik Herlani Masli Ridhwan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Onny Widjanarko	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Edmund Tondobala	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ongki Wanadjati Dana	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Direksi

Nama	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Henoch Munandar	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Kaoru Furuya	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Darmadi Sutanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dini Herdini	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Keishi Kobata	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Atsushi Hino	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Merisa Darwis	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hanna Tantani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

KEBIJAKAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rujukan Ketentuan

Bank telah memiliki kebijakan mengenai kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan pengungkapan kepada Bank terkait kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham wajib diungkapkan dalam waktu 3 hari kerja setelah transaksi.

Prosedur tersebut mengacu pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Pengungkapan Kepemilikan Saham dan Perubahannya oleh Dewan Komisaris

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terkait laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, selama tahun 2023 terdapat kepemilikan saham Bank BTPN oleh Dewan Komisaris dan telah dilakukan pengungkapan laporan kepemilikan saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut ini tabel kepemilikan saham Dewan Komisaris dan perubahannya per Desember 2023:

Nama	Jabatan	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	0	0,000%	0	0,000%
Takeshi Kimoto	Komisaris	0	0,000%	0	0,000%
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	0	0,000%	0	0,000%
Onny Widjanarko	Komisaris Independen			0	0,000%
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	0	0,000%	0	0,000%
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	860.804	0,011%	860.804	0,011%

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam rangka menjaga independensi untuk memberikan pertimbangan yang obyektif bagi kepentingan perusahaan serta terlepas dari potensi benturan kepentingan, tidak ada Komisaris Independen yang memiliki saham Bank maupun anak perusahaan Bank, ataupun memperoleh insentif atau bonus berupa saham dari Bank.

Satu Komisaris non-independen Bank memiliki saham Bank yang berasal dari program MRT yang beliau peroleh pada saat menjabat sebagai anggota Direksi.

Pengungkapan Kepemilikan Saham dan Perubahannya oleh Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terkait laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Saham Direksi, selama tahun 2023 terdapat kepemilikan saham BTPN oleh Direksi dan telah dilakukan pengungkapan laporan kepemilikan saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut ini tabel kepemilikan saham Direksi dan perubahannya per Desember 2023:

Nama	Jabatan	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Henoch Munandar	Direktur Utama	172.256	0,002%	173.756	0,002
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	1.500	0,000%	3.000	0,000
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	311.120	0,004%	89.120	0,001
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	117.072	0,001%	118.572	0,001
Atsushi Hino	Direktur			0	0,000
Keishi Kobata	Direktur			0	0,000
Merisa Darwis	Direktur	220.858	0,003%	222.358	0,003
Hanna Tantani	Direktur	146.654	0,002%	148.154	0,002

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membeda-bedakan ras, etnis, jenis kelamin, dan agama.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sebelumnya, Dewan Komisaris telah lulus dalam menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per Desember 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

Alur Proses Nominasi Dewan Komisaris

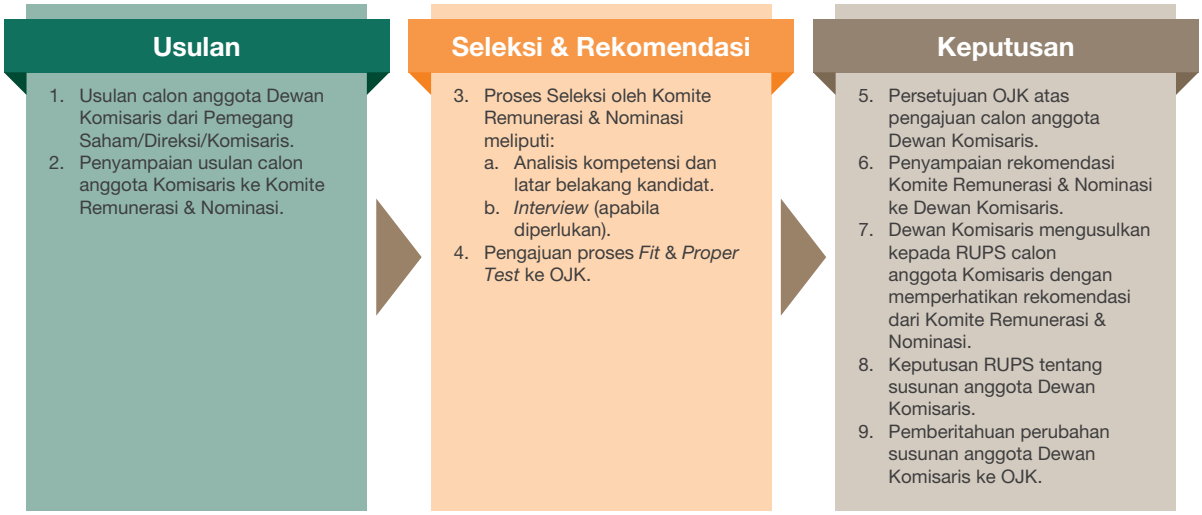

Direksi

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan nominasi anggota Direksi dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kompetensi, dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membeda-bedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sebelumnya, Direksi telah lulus dalam menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test)* sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per Desember 2023, seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

Alur Proses Nominasi Direksi

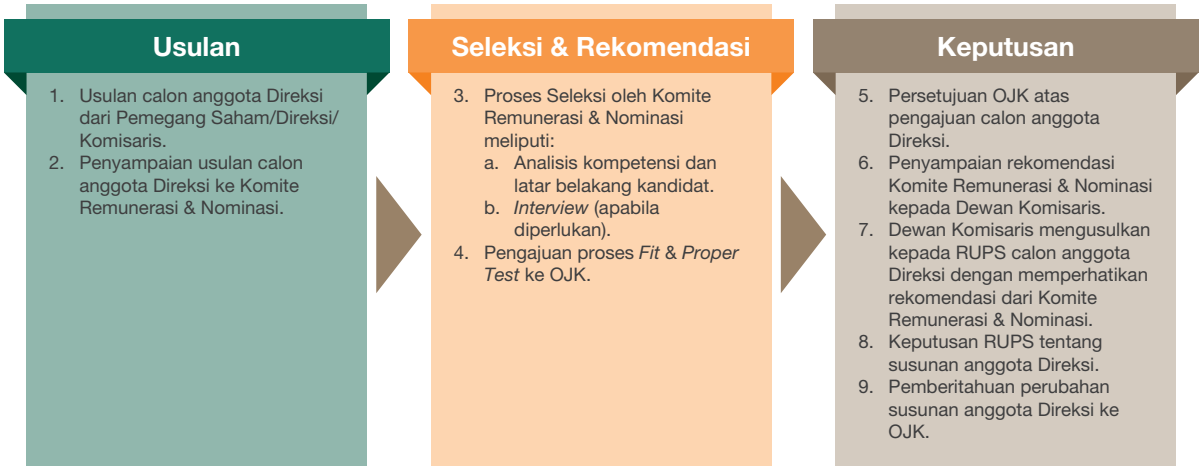

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja atas Dewan Komisaris dan Direksi melalui metode penilaian mandiri (*self-assessment*). Penilaian kinerja dilaksanakan setiap tahun secara kolegial.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Dewan Komisaris mencakup:

1. Tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Tata Kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal
3. Struktur, ukuran dan komposisi Dewan Komisaris
4. Rapat Dewan Komisaris
5. Komite di bawah Dewan Komisaris

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Direksi mencakup:

1. Tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Tata Kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal
3. Struktur, jumlah, dan komposisi Direksi
4. Efektivitas rapat Direksi
5. Unit kerja dan komite penunjang Direksi

Pelaksana Penilaian

Penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolegial. Dewan Komisaris secara bersama-sama melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja terhadap Direksi juga dilakukan secara kolegial. Direksi secara bersama-sama melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian

Pada tahun 2023, rata-rata hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial adalah “Sangat Baik”. Sementara rata-rata hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial adalah “Baik”.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan Pemegang Saham yang ditetapkan melalui RUPS. Penetapan tersebut memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, Bank mempertimbangkan kinerja secara umum, evaluasi kinerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan, serta kemampuan Bank. Kinerja Bank yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain digambarkan pada harga saham perusahaan di bursa.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Bank, dijelaskan dalam alur di bawah ini:

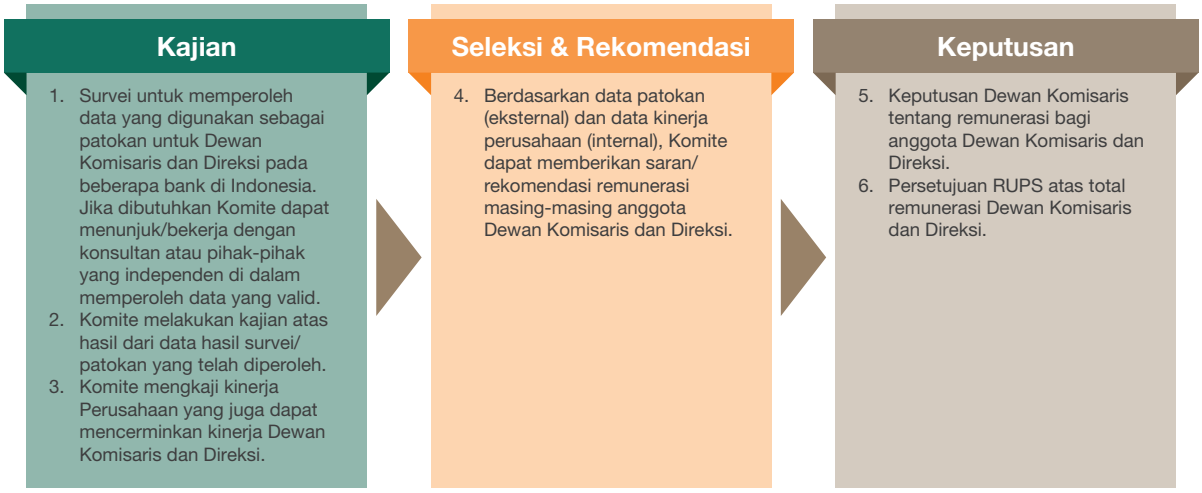

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Jumlah Penerima Per 31 Desember 2023	Rp Juta
Honorarium dan/atau Tunjangan.[1)]	6	15.697
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya, yang:		
• Dapat dimiliki	6	911
• Tidak dapat dimiliki	6	35
Total	**6**	**16.642**

[1)] Termasuk remunerasi anggota Komisaris yang bekerja sampai dengan 13 April 2023.

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 Miliar	4
Di atas Rp1 Miliar – Rp2 Miliar	1
Di atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	0
Di bawah Rp500 juta	0

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Penerima Remunerasi Bersifat Tetap dan Variabel selama 1 (satu) tahun dan Total Nominalnya.

Kategori Tetap

(Rp Juta)

Detail	2023	2022
Direksi	57.429	67.139
Dewan Komisaris	15.725	11.283
Karyawan	1.428.752	1.355.027

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kategori Variabel

(Rp Juta)

Detail	2023		2022	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	9	28.136	16	41.504
Dewan Komisaris	-	-	-	-
Bonus Karyawan	-	219.805	-	207.383
Insentif Karyawan	-	20.480	-	17.968

Shares Option Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Bank BTPN saat ini tidak memiliki program *shares option*.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Detail	2023
Karyawan Tertinggi - Karyawan Terendah	121,36
Direktur Tertinggi - Direktur Terendah	5,21
Komisaris Tertinggi - Komisaris Terendah	2,73
Direktur Tertinggi - Karyawan Tertinggi	1,83

Total Remunerasi Bersifat Variabel Ditangguhkan

(Rp Juta)

Detail	2023		2022	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Bonus yang ditangguhkan (Gross)	17	10.674	9	7.334

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Keterkaitan antara kinerja dengan remunerasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank menganut prinsip meritokrasi dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan pegawai, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Kaji ulang remunerasi individu dilakukan setiap tahun dan penyesuaian remunerasi berdasarkan kinerja individu.
2. Dalam Manajemen Kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan pegawai memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/direktoratnya, diturunkan dari target bank, dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu pegawai pada lapisan paling bawah.
3. Dalam penilaian Kinerja unit maupun individu, berdasarkan realisasi dari target unit kerja maupun individu. Kinerja unit dalam kategori - Melampaui Target, Mencapai target atau Tidak Mencapai Target. Kinerja unit juga mempengaruhi kinerja pimpinan unit kerja tersebut.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target individu, dan dinilai dalam kategori: Istimewa (*Outstanding*); Sangat baik (*Very Good*); Baik (*Good*); Perlu perbaikan (*Need Improvement*); Kurang (*Poor*).

Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu. Manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun variabel sesuai dengan kinerja individunya.

Bank juga mengatur panduan pemberian remunerasi variabel yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko (*Material Risk Taker*) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 80% dari *Variable Income* diberikan dalam bentuk cash.
b. 20% dari *Variable Income* ditangguhkan (*Deferred Variable Income*) dengan distribusi sebagai berikut:
   1. Direksi
      - 1/3 diberikan dalam bentuk *cash*/tunai dan 500 lembar saham.
      - 1/3 diberikan dalam bentuk *cash*/tunai dan 500 lembar saham.
      - 1/3 diberikan dalam bentuk *cash*/tunai dan 500 lembar saham.
   2. *Board of Management*
      - 1/3 diberikan dalam bentuk *cash*/tunai dan 400 lembar saham.
      - 1/3 diberikan dalam bentuk *cash*/tunai dan 400 lembar saham.
      - 1/3 diberikan dalam bentuk *cash*/tunai dan 400 lembar saham.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers*

Jabatan yang termasuk dalam kategori *material risk takers* adalah Direksi sejumlah 8 (delapan) orang. Jumlah tersebut merupakan *Material Risk Taker* (MRT) selama tahun 2023.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Jumlah Penerima Per 31 Desember 2023	Rp Juta
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura.[1)]	8	81.892
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya, yang:	8	
• Dapat dimiliki	8	5.924
• Tidak dapat dimiliki	8	67
Total	8	87.882

[1)] Termasuk remunerasi anggota Direksi yang bekerja sampai dengan 25 Maret 2022, 13 April 2023 dan 22 Juni 2023.

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Miliar	8
Di atas Rp1 Miliar – Rp2 Miliar	2
Di atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	1
Di bawah Rp500 juta	0

Remunerasi Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel di lingkungan Bank terdiri dari: Insentif dan Bonus Kinerja. Insentif tersebut diberikan berdasarkan kinerja individu pegawai dengan jabatan penjual (*sales*), *service* dan *Collection*. Insentif diberikan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja terkait dan kinerja individu. Pembayarannya direalisasikan pada tahun berikutnya. Bonus kinerja merupakan diskresi manajemen dan diberikan sesuai dengan kinerja dan kondisi keuangan Bank. Bonus kinerja diberikan tahunan kepada pegawai yang tidak menerima insentif dan Direksi.

Program Pinjaman

Bank tidak memiliki program khusus pemberian pinjaman bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan pinjaman dari produk komersial Bank yang ada dengan suku bunga yang wajar, serta syarat dan kondisi yang berlaku umum.

Selanjutnya transaksi ini akan dilaporkan oleh Bank sebagai bagian dari Transaksi Pihak Terkait.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Hingga berakhir tahun buku 2023, Dewan Komisaris memiliki 4 (empat) komite, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Perusahaan. Setiap komite bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing komite.

KOMITE AUDIT

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan internal dan eksternal serta pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit di Bank didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017tanggal 7 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) Bank BTPN.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Board Charter*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang isinya mengatur sejumlah hal, termasuk: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan, serta masa tugas.

Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir telah disetujui oleh anggota Komite Audit pada 24 November 2023

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”). Penyusunan rekomendasi ini didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
b. Ruang lingkup audit;
c. Imbalan jasa audit;
d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
f. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau;

h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

Independensi

Komite Audit Bank BTPN bekerja dan mengambil keputusan secara independen, yang ditunjukkan antara lain melalui keanggotaan dalam komite, yakni:

a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:
   1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
   2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
   3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
   4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

b. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komposisi dan Masa Jabatan

No.	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode Jabatan
1	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ketua (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.003/DIR/CCS/ IV/2022	• 1 Februari 2019- 21 April 2022 • 21 April 2022-RUPST 2025
2	Edmund Tondobala	Anggota (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.003/DIR/CCS/ IV/2022	• 18 November 2020- 21 April 2022 • 21 April 2022-RUPST 2025
3	Aria Kanaka	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.003/DIR/CCS/ IV/2022	21 April 2022-RUPST 2025
4	Ivan Purnama Sanoesi	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.003/DIR/CCS/ IV/2022	• 1 Februari 2019- 21 April 2022 • 21 April 2022- RUPST 2025

Profil Anggota Komite Audit

Ninik Herlani Masli Ridhwan

Ketua Komite Audit (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "**Profil Dewan Komisaris**" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Edmund Tondobala

Anggota Komite Audit (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "**Profil Dewan Komisaris**" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS



Aria Kanaka

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	49 tahun pada akhir Tahun Buku 2023
Riwayat Pendidikan	• Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia (2010) • Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (1997)
Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan	Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Audit (Pihak Independen) sejak 21 April 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/DIR/CCS/IV/2022.
Rangkap Jabatan	• Partner pada KAP Aria Kanaka & Rekan (member firm Mazars SCRL). • Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia • Anggota Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia • Anggota Komite Audit dan Komisaris Independen di beberapa perusahaan publik non-bank
Pengalaman Kerja	• Partner pada KAP Aria Kanaka & Rekan (member firm Mazars SCRL) 2013-sekarang • Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2000-sekarang • Partner pada beberapa KAP 2003-2013 • Auditor pada KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (member firm Ernst & Young) – 2002 • Auditor pada KAP Prasetio Utomo & Co (member firm AndersenWorldwide) 1997-2002
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



Ivan Purnama Sanoesi

Anggota Komite Audit
(Pihak Independen)

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	62 tahun pada akhir Tahun Buku 2023
Riwayat Pendidikan	• Master Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi PPM (2004) • Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanegara (1988)
Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan	Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Audit (Pihak Independen) sejak 1 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/006/II/2019 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/DIR/CCS/II/2019, diangkat kembali tanggal 21 April 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/DIR/CCS/IV/2022.
Rangkap Jabatan	• Anggota Komite Audit PT Bank Mega Tbk. • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Ina Perdana Tbk. • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Hibank Indonesia • Anggota Komite Pemantau Risiko PT BCA Digital • Anggota Komite Pemantau Risiko PT BANK BTPN Tbk
Pengalaman Kerja	• Anggota Komite Audit PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (Juli 2018-Februari 2019). • Advisor PT Central Santosa Finance (September 2016-Agustus 2018). • Wakil Kepala Divisi Divisi Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1999-Mei 2016). • Kepala Biro Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1992-1999). • Kepala Bagian/Urusan Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1989-1992). • Staf Divisi Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1986–1989).
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Sertifikasi Profesi

No.	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1	Qualified Internal Auditor (QIA)	1
2	Asesor Kompetensi Internal Audit dari Badan Nasional	1
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV	1
4	Sertifikasi Profesi (BNSP)	1
5	Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan	1
6	Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE)	1
7	Register Negara untuk Akuntan dari Departemen Keuangan REpublik Indonesia No. D-20.826	1
8	Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia	1

Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat

Ketentuan yang mengatur mengenai rapat yang telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Komite Audit adalah:

1. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas *video conference*. Rapat-rapat Komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri baik fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota Komite.
3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

6. Perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
7. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.
8. Pertemuan antara Komite dan Internal Audit tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
9. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.
10. Pertemuan antara Komite dan unit kerja Kepatuhan tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2023, Komite Audit mengadakan 25 (dua puluh lima) kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ninik Herlani Masli Ridhwan	25	25	100%
Edmund Tondobala	25	23	92%
Aria Kanaka	25	25	100%
Ivan Purnama Sanoesi	25	25	100%

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memastikan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank dinilai sudah berjalan efektif dan memadai mencakup pengendalian keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Kegiatan tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan
   1. Mengkaji laporan keuangan Bank 2023
   2. Mengkaji kinerja keuangan secara berkala, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.

b. Audit Eksternal
   1. Memberikan rekomendasi penunjukan Auditor Eksternal
   2. Membahas rencana audit eksternal
   3. Meninjau hasil audit eksternal dan tindak lanjut Manajemen
   4. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal dengan standar audit.
   5. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
   6. Pembahasan terkait penerapan IESBA (International Ethics Standard Board of Accountants) Code of Ethics dan analisa jasa non-*assurance* berdasarkan aturan independensi yang berlaku dan bebas dari benturan kepentingan

c. Internal Audit
   1. Memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit intern selama tahun 2022 dan 2023
   2. Mengkaji laporan audit dan tindak lanjut atas temuan audit intern termasuk temuan yang terkait dengan Teknologi Informasi.
   3. Memantau dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
   4. Melakukan kajian dan memberikan persetujuan atas Rencana Audit
   5. Memastikan Bank memiliki pedoman audit intern yang juga mencakup audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi

d. Kepatuhan, Legal & Litigasi
   1. Melakukan penelaahan atas penerapan Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
   2. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
   3. Memantau tuntutan yang timbul dan menelaah masalah-masalah hukum yang dapat berdampak signifikan terhadap Bank atau berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan/memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

e. *Anti-Fraud Management & Whistleblowing*
   1. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap penerapan dan efektifitas Strategi *Anti-Fraud Management*
   2. Memantau pengaduan yang masuk melalui saluran *Whistleblowing*

f. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Komite Audit tahun 2024
g. Mengkaji Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Pengembangan kompetensi yang disajikan hanya untuk anggota independen, karena untuk anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris telah disajikan pada bab "Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggaraan
Ivan Purnama Sanoesi	1. Internal Audit Roles and Competency in Consumer Data Protection & Stay Relevant by Implementing The Internal Audit Competency Framework	April 2023	Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
	2. Disruption Technology, Are We Ready? & ChatGPT, How Useful for Internal Audit?	April 2023	IIA Indonesia
	3. How to Manage Team and Boss & Effective Communication Make Your Value More Impactful	April 2023	IIA Indonesia
	4. Internal Audit and it's Roles in Governance	Juni 2023	IIA Indonesia
	5. Waspada Modus Penipuan Gaya Baru	Agustus 2023	OJK Institute
	6. Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending di Era UU P2SK	September 2023	OJK Institute
	7. Enhancing ESG Through Best Practices in Accounting	Desember 2023	OJK Institute
Aria Kanaka	1. Peran IT Audit untuk Menunjang Pekerjaan Auditor Dalam Audit Laporan Keuangan	8 Maret 2023	IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia
	2. Short *Online* Learning PSAK Series – Isu Dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian	8 Mei 2023	IAPI
	3. OJK Pasar Modal Pertimbangan Akuntansi dan Audit serta Regulasi Pasar Modal dalam Proses Penerbitan Saham Baru (IPO)	8 Juni 2023	IAPI
	4. PPL Khusus OJK - IAPI Tahun 2023 bagi Akuntan Publik Terdaftar di OJK Sektor Perbankan - Batch 3	14 Juni 2023	IAPI
	5. Sharing Temuan-temuan Hasil Pemeriksaan KAP oleh PPPK dan Mitigasi Risikonya - Batch 3	11 Juli 2023	IAPI
	6. PPL Wajib Akuntan Publik PPPK 2023 - Batch 2	14 Juli 2023	IAPI
	7. In House Training PSAK Update	22-23 Agustus 2023	IAPI
	8. PPL IKPI : Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Subjek Pajak Orang Pribadi	5 Oktober 2023	IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) PUSAT
	9. Konferensi Nasional 2023 "Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengwasan dan Pengendalian Risiko	19 Oktober 2023	IKAI
	10. PPL OJK IKNB Aspek Akuntansi dan Audit terkait Laporan Keuangan Fintech serta Regulasinya	30 Oktober 2023	IAPI
	11. Seminar Perpajakan dan Rapat Anggota : Masa Depan Pengadilan Pajak Pasca Pengalihan Kewenangan Kemenkeu Kepada MA; Natura/Kenikmatan sesuai PMK 66 Tahun 2023; Penyusutan/Amortisasi sesuai PMK 72 Tahun 2023.	07 November 2023	IKPI Cabang Jakarta Selatan

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggaraan
	12. Seminar Perpajakan dan Rapat Anggota : Masa Depan Pengadilan Pajak Pasca Pengalihan Kewenangan Kemenkeu Kepada MA; Natura/Kenikmatan sesuai PMK 66 Tahun 2023; Penyusutan/Amortisasi sesuai PMK 72 Tahun 2023.	07 November 2023	IKPI Cabang Jakarta Selatan
	13. PPL IKPI : "Aspek Perpajakan & Strategi Pemilihan Kegiatan Usaha Dalam Penentuan Kebijakan Tax Planning"	16 November 2023	IKPI PUSAT
	14. PPL NTS IKPI : Seri Pengembangan Kantor Konsultan Pajak : Gnothi Seauton: What Separates Great Leaders from ALMOST Great Leaders	17 November 2023	IKPI PUSAT
	15. PPL IKPI : "Perencanaan Perpajakan : Strategi Dan Teknik Pengelolaan Perpajakan Pasca Implementasi Core Tax System"	28 Desember 2023	IKPI PUSAT

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*) Bank BTPN.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite adalah:

Terkait Kebijakan Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Kebijakan remunerasi, struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
   - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
   - Prestasi kerja individual.
   - Kewajaran dengan *peer group* di dalam dan di luar Bank.
   - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Terkait Kebijakan Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Khususnya untuk calon anggota Direksi, Human Resources membantu memfasilitasi melalui proses *talent management* & *succession planning,* dengan dilakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota, dan potensi pengembangannya di masa depan. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite.
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.
7. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja pihak independen dengan cara:
   - Komite menentukan faktor-faktor penilaian kinerja perorangan.
   - Komite menerima hasil penilaian terhadap anggota komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang diperoleh dari Ketua Komite terkait.
   - Komite Menyusun rekomendasi atas dasar penilaian tersebut, untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk keperluan pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite.

Independensi

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan OJK. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris Independen, dua orang Komisaris dan satu orang Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan sistem remunerasi dan nominasi serta *sucession plan*. Komposisi anggota komite yang telah berjalan di Bank dalam rangka mendukung prinsip independensi dalam melaksanakan tugas.

Komposisi dan Masa Jabatan

No.	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode Jabatan
1	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ketua (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006/DIR/CCS/ IV/2022	• 1 Maret 2020- 21 April 2022 • 21 April 2022-RUPST 2025
2	Chow Ying Hoong	Anggota (Komisaris Utama)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006/DIR/CCS/ IV/2022	• 1 Februari 2019- 21 April 2022 • 21 April 2022-RUPST 2025
3	Mira Fitria	Anggota (Pejabat Eksekutif HR)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006/DIR/CCS/ IV/2022	• 1 Juli 2020-21 April 2022 • 21 April 2022-RUPST 2025

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ninik Herlani Masli Ridhwan

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "**Profil Dewan Komisaris**" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Chow Ying Hoong

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Komisaris Utama)

Profil disampaikan pada bagian "**Profil Dewan Komisaris**" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS



Mira Fitria Soetjipto

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Pejabat Eksekutif HR)

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	46 tahun pada akhir Tahun Buku 2023
Riwayat Pendidikan	• Post Graduate Research dari The London School of Economics and Political Science (LSE) (2006) • Master of Arts (MA) dari Lancaster University (2001) • Bachelor of Arts (BA) dari Universitas Indonesia (2000)
Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan	Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 1 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/031/VII/2020 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 002/DIR/CCS/VII/2020, diangkat kembali tanggal 21 April 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 006/DIR/CCS/IV/2022
Rangkap Jabatan	Head of Human Resources BTPN
Pengalaman Kerja	• VP of Human Resources Danone Waters Indonesia (2019-2020). • CHRO - Corporate Affairs & Sustainability, Human Resources, Technology, and Strategy Management The Body Shop Indonesia (2017-2019). • Human Resources Director Microsoft Indonesia (2014-2016). • Senior HR Business Partner Microsoft Indonesia (2013-2014). • HR Generalist for Retail Bank, Consumer Finance, Risk Management and Financial Control CITI Indonesia (2008-2013). • Leadership, Talent and Performance Management Head CITI Indonesia (2006-2008). • Regional Management Associate: Consumer Bank Training & Development Manager Citibank Asia Pacific Consumer Bank, Singapore (2003-2004). • Investment, Treasury and Insurance Compliance Manager Citibank Indonesia (2002-2003). • Management Associate Citibank Indonesia (2001-2002).
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Sertifikasi Profesi

No.	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1	Sertifikasi Manajemen Resiko Level 1	2
2	Sertifikasi Manajemen Resiko Level 5	1
3	Sertifikasi General Manager Msdm	1

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Kebijakan Rapat

Ketentuan terkait dengan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 4 kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ninik Herlani Masli Ridhwan	4	4	100%
Chow Ying Hoong	4	4	100%
Mira Fitria	4	4	100%

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

Tanggal	Agenda
25 Januari 2023	1. Wawancara Kandidat Komisaris Independen PT. Bank BTPN Tbk 2. Penetapan Rekomendasi Penunjukan Komisaris Independen
2 Maret 2023	1. Evaluasi Kinerja Anggota Direksi dan Penilaian Kolegial BOC, BOD & Anggota Komite 2. Usulan Remunerasi BOC, BOD & Anggota Komite 3. Usulan Fasilitas Kesehatan untuk usia pertanggungan Anak 4. Skema MRT baru untuk mengikutsertakan anggota BOM
10 Maret 2023	Proposal Remunerasi untuk BOD
23 Oktober 2023	1. Update dari Operations sehubungan dengan kasus *fraud* yang terjadi baru-baru ini di Operations 2. Update dari HR mengenai Percepatan Penyelesaian Fraud

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengembangan kompetensi yang disajikan hanya untuk anggota independen, karena untuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris telah disajikan pada bab “Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggaraan
Mira Fitria	1. HR Townhall	24 Februari 20 23 & E-Learning	BTPN
	2. Leadership Series: Creating Strategies to Connect Generation Gap	14 Maret 2023 & BTPN	BTPN
	3. Anti Trust, Fair Competition, and Firewall Regulations 2023	27 Maret 2023 & E-Learning	BTPN
	4. Ethics Integrity & Conduct Risk 2023	27 Maret 2023 & E-Learning	BTPN
	5. Leaders' Onboarding Program	26 Mei 2023 & E-Learning	BTPN
	6. Leadership Series: Managing Global Business Risk	14 Junl 2023 & BTPN	BTPN
	7. Refreshment 2023: APU PPT	6 Jull 2023 & E-Learning	BTPN
	8. REFRESHER SMR LEVEL 1	26 Juli 2023 & BTPN	RDS
	9. Anti Fraud Awareness 2023	11 Septemner 2023 & E-Learning	BTPN
	10. Pernyataan Mengenai Anti-Fraud & Pakta Integritas dan Kode Etik PT Bank BTPN Tbk 2023	16 Oktober 2023 & E-Learning	BTPN
	11. Information Security Awareness 2023	20 Oktober 2023 & E-Learning	BTPN
	12. Manajemen Risiko Operasional 2023	25 Oktober 2023 & E-Learning	BTPN
	13. Refreshment 2023: Entertainment & Gift	25 Oktober 2023 & E-Learning	BTPN
	14. Penanganan Pengaduan & Pelindungan Konsumen 2023	21 November 2023 & E-Learning	BTPN
	15. Refreshment 2023: Compliance	21 November 2023 & E-Learning	BTPN
	16. Leadership series: Influence for Impact	5 Desember 2023 & BTPN	BTPN
	17. Intro to Facilitation for HR-Desember-2023	18 Desember 2023 & E-Learning	BTPN

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melakukan pengawasan yang aktif atas manajemen risiko Bank.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*).

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan, serta masa tugas.

Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan kerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 20 November 2023.

Tugas dan Tanggung Jawab

Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite bertugas untuk memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan diajukan kepada untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite dapat melakukan investigasi terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite, serta dengan konsultan, akuntan publik atau pihak eksternal lainya yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka memperoleh informasi sebagai dasar rekomendasi bagi Dewan Komisaris.
6. Apabila diminta oleh Dewan Komisaris, Komite dapat menjalankan tugas-tugas selain yang disebutkan dalam *charter* Komite, yang sesuai dengan fungsi dan peran serta tugas Komite sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
7. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Perseroan.

Independensi

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris, dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan bidang keuangan.

Penjelasan tentang Komisaris Independen dan Pihak Independen dimaksud adalah:

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komposisi dan Masa Jabatan

No.	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode Jabatan
1	Onny Widjanarko	Ketua (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/026/V/2023 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.008/DIR/CCS/ V/2023	8 Mei 2023 - RUPST 2025
2	Takeshi Kimoto	Anggota (Komisaris)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.004/DIR/CCS/ IV/2022	• 1 Februari 2019 - 21 April 2022 • 21 April 2022 - RUPST 2025
3	Edmund Tondobala	Anggota (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.004/DIR/CCS/ IV/2022	21 April 2022 - RUPST 2025
4	Ongki Wanadjati Dana	Anggota (Komisaris)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.004/DIR/CCS/ IV/2022	21 April 2022 - RUPST 2025
5	Sofyan Rambey	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.004/DIR/CCS/ IV/2022	• 1 Februari 2019 - 21 April 2022 • 21 April 2022 - RUPST 2025
6	Ivan Purnama Sanoesi	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/048/IX/2023 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.009/DIR/CCS/ X/2023	13 September 2023 - RUPST 2025

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Onny Widjanarko

Ketua Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "**Profil Dewan Komisaris**" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Takeshi Kimoto

Anggota Komite Pemantau Risiko (Komisaris)

Profil disampaikan pada bagian "**Profil Dewan Komisaris**" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Edmund Tondobala

Anggota Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "**Profil Dewan Komisaris**" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Ongki Wanadjati Dana

Anggota Komite Pemantau Risiko (Komisaris)

Profil disampaikan pada bagian "**Profil Dewan Komisaris**" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS



Sofyan Rambey

Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	65 tahun pada akhir Tahun Buku 2023
Riwayat Pendidikan	• MBA di bidang Finance dari John. M. Olin School of Business, Washington University, St. Louis, USA (1993) • Gelar profesi Financial Risk Manager (FRM®) dari Global Association of Risk Professional (“GARP”)
Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan	Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) sejak 1 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/006/II/2019 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/DIR/CCS/II/2019, diangkat kembali tanggal 21 April 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 004/DIR/CCS/IV/2022
Rangkap Jabatan	• Director GReenZONES Society • CEO & Presiden Director The Risk Forum
Pengalaman Kerja	• Direktur Regional GARP (2005) • EVP PT Mandiri Sekuritas (2003-2005) • Group Head PT Bank Mandiri (2001-2003) • Komisaris PT Exim Securities (1998-2001) • Kepala Biro PT Bank Exim (1998-2000) • Kepala Bagian PT Bank Exim (1994-1998) • Kepala Seksi PT Bank Exim (1988-1991) • Account Officer PT Bank Exim (1984-1987)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Ivan Purnama Sanoesi

Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)

Profil disampaikan pada bagian “Profil Komite Audit” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Sertifikasi Profesi

No.	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I s/d III	2
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV	1
3	Financial Risk Manager (FRM)	1
4	Trainer untuk pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I-V	1
5	Wakil Manajer Investasi (WMI)	1
6	Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)	1
7	Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE)	2
8	Wakil Pialang Berjangka (WPB)	1

No.	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
9	Beberapa sertifikasi di bidang kesehatan (Wellness and Longevity) a/l FINEM (Fellowship in Nutritional and Environmental Medicine) dari India, 2018 dan Master in Advanced Nutritional Medicine dari Malaysia, 2021.	1
10	Qualified Internal Auditor (QIA)	1
11	Asesor Kompetensi Internal Audit dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	1
12	Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan	1
13	Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE)	1

Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat

Ketentuan terkait dengan rapat Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

1. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat-rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas *video conference*. Rapat komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebutt.
7. Komite Pemantau Risiko dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandantangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko mengadakan 17 (tujuh belas) kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Onny Widjanarko[1)]	14	12	85,7%
Takeshi Kimoto	17	14	82%
Edmund Tondobala	17	15	88%
Ongki Wanadjati Dana	17	17	100%
Sofyan Rambey	17	17	100%
Ivan Purnama Sanoesi	7	7	100%
Irwan Mahjudin Habsjah[2)]	2	2	100%

Catatan:
[1)] Onny Widjanarko diangkat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko efektif sejak 8 Mei 2023
[2)] Irwan Mahjudin Habsjah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sejak ditutupnya RUPST 13 April 2023.

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Memantau dan melakukan evaluasi atas penerapan manajemen risiko Bank, pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya melalui pembahasan mengenai:
   a. Aspek-aspek risiko antara lain:
      - Risiko kredit dan kondisi portofolio kredit
      - Risiko Pasar dan Likuiditas
      - Hasil pemantauan indikator Rencana Aksi
      - Yield pinjaman per *Line of Business*
      - Risiko Operasional
      - Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis
      - Penerapan Strategi *Anti Fraud* termasuk pengaduan yang masuk melalui saluran Whistleblowing
      - Risiko Keamanan *Cyber*
   b. Laporan kepada Regulator antara lain Laporan Profil Risiko Bank, ICAAP & RBBR.
   c. Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko.
   d. Kebijakan Manajemen Risiko.
   e. Keberlanjutan (ESG-Taxonomy Hijau (THI)).

   Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, Komite Pemantau Risiko juga membahas:
   a. Tata Kelola fungsi CISO (*Chief Information Security Officer*).
   b. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
   c. Tindak lanjut atas hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terkait manajemen risiko.
2. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Komite Pemantau Risiko tahun 2024.
3. Mengkaji Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Pengembangan kompetensi yang disajikan hanya untuk anggota independen, karena untuk anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris telah disajikan pada bab "Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggaraan
Sofyan Rambey	1. The Revolution of Regenerative Medicine).	16-17 Februari 2023 di Centara Grand, Centara World, Bangkok, Thailand	The American Academy of Anti Aging Medicine (A-4M)
	2. The Essentials Of Functional Medicine Physician	14-16 Juli 2023 di Avante Hotel, Kuala Lumpur	Society for the Advancement of Hormone and Healthy Aging Medicine, Malaysia (SAHAMM)
	3. BEYOND ORDINARY 2023" - Pioneering Medical Advancement	19-20 Juli 2023 di Putrajaya, Malaysia	Malaysia Medical Association (MMA)
	4. Futuristic Aging-Aesthetic and Functional Medicine Summit 2023,	11-13 Agustus 2023 di Sheraton Imperial, Kuala Lumpur	Society for Anti-Aging Aesthetic, Regenerative Medicine Malaysia (SAAaRMM)
	5. Proactive Anti-aging: Anticipate Health Risks To Prolong Healthspan	17-20 Agustus 2023 di The Athenee Hotel, Bangkok	HEAT International
	6. The Better Way - MAAFIM 3rd International Conference	14-17 September 2023 di Palace of The Golden Horses, Seri Kembangan, Malaysia)	Malaysian Association for Advancement of Functional & Interdisciplinary Medicine (MAAFIM)
	7. THE Longevity Summit 2023: THE FUTURE OF MEDICINE - ELIMINATING DISEASE OF AGING	5-6 Desember 2023 di Novato, CA, U.S	Buck Institute
	8. "Leveling Up Healthcare" - Longevity Festival	14-16, 2023, Las Vegas, NV, U.S.	American Academy of Anti Aging Medicine (A-4M).

KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di dalam membantu Dewan Komisaris antara lain untuk memantau dan mengevaluasi fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola dalam satu Kelompok Keuangan Perseroan.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) Bank BTPN.

Pedoman kerja tersebut pertama kali disusun pada tanggal 25 Juli 2022 yang telah disetujui oleh anggota Komite Tata Kelola Perusahaan dan telah dikaji ulang secara berkala, terakhir pada tanggal 18 Desember 2023.

Tugas dan Tanggung Jawab

Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite memiliki tugas dan tanggung jawab utama terkait dengan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola dalam satu Kelompok Keuangan Perseroan, yang secara terperinci antara lain meliputi:

1. Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

2. Komite menerima laporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola pada Perseroan dan Kelompok Keuangan Perseroan.
3. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (jika diperlukan) atas laporan yang diterima sesuai huruf b tersebut di atas.
4. Komite memberikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai aktivitas yang dilakukan secara berkala.
5. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.

Independensi

Mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan, anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris non Independen dan 1 orang Pihak Independen:

a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang: 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya; 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank; 3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham
b. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dalam hal Komisaris Independen atau Pihak Independen memperoleh saham Perseroan akibat peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

Komposisi dan Masa Jabatan

No.	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode Jabatan
1	Onny Widjanarko	Ketua (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/026/V/2023 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.007/DIR/CCS/ V/2023	8 Mei 2023-RUPST 2025
2	Ongki Wanadjati Dana	Anggota (Komisaris)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/022/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.005/DIR/CCS/ IV/2022	21 April 2022-RUPST 2025
3	Sofyan Rambey	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/022/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.005/DIR/CCS/ IV/2022	• 1 Februari 2019- 21 April 2022 • 21 April 2022-RUPST 2025

Profil Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan

Onny Widjanarko

Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Ongki Wanadjati Dana

Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan (Komisaris)

Profil disampaikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Sofyan Rambey

Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan (Pihak Independen)

Profil disampaikan pada bagian "**Profil Komite Pemantau Risiko**" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan

Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan (Pihak Independen) sejak 21 April 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/022/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 005/DIR/CCS/IV/2022

Sertifikasi Profesi

No.	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I s/d III	1
2	Financial Risk Managemer (FRM)	1
3	Trainer untuk pelatihan Sertifikasi Manajeme Risiko Tingkat I-V	1
4	Wakil Manajer Investasi (WMI)	1
5	Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)	
6	Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE)	1
7	Wakil Pialang Berjangka (WPB)	1
8	Beberapa sertifikasi di bidang kesehatan (Wellness and Longevity) a/l FINEM (Fellowship in Nutritional and Environmental Medicine) dari India, 2018 dan Master in Advanced Nutritional Medicine dari Malaysia, 2021	1

Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan Rapat

Ketentuan terkait pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Perusahaan telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Komite Tata Kelola Perusahaan:

1. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Komite secara tetap mengundang Komisaris Independen dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari anak perusahaan untuk dapat hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam Rapat Komite.
3. Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan agenda Rapat.
4. Anggota Dewan Komisaris yang bukan anggota Komite dapat menghadiri Rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan Rapat.
5. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas *video conference*. Rapat-rapat Komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri baik fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota Komite.
6. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
8. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
10. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola Perusahaan mengadakan 2 (dua) kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Irwan Mahjudin Habsjah[1)]	1	1	100%
Onny Widjanarko[2)]	1	1	100%
Ongki Wanadjati Dana	2	2	100%
Sofyan Rambey	2	2	100%

Catatan:
[1)] Irwan Mahjudin Habsjah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite sejak ditutupnya RUPS Tahunan 13 April 2023.
[2)] Onny Widjanarko efektif diangkat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan sejak tanggal 8 Mei 2023.

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Memantau dan mengevaluasi fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola dalam satu Kelompok Keuangan Perseroan melalui pembahasan :
   a. *Anti-Fraud Management Update* BTPN
   b. *Anti-Fraud Management Update* BTPNS
   c. Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan
   d. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dalam Grup Keuangan
2. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Komite Tata Kelola Perusahaan tahun 2024
3. Mengkaji Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan

Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang disajikan hanya untuk anggota independen, karena untuk anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang berasal dari Dewan Komisaris telah disajikan pada bab “Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Bank BTPN membentuk komite-komite yang bertanggung jawab kepada Direksi guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Sesuai dengan ketentuan, Bank diwajibkan memiliki minimal 3 (tiga) komite yang membantu tugas Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas serta Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Namun, melihat kompleksitas usaha yang dijalankan Bank BTPN, membutuhkan pengelolaan serta peningkatan kualitas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. Untuk itu, Bank membentuk 9 (sembilan) komite sebagai berikut:

1. Komite Aset dan Liabilitas
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Kebijakan Kredit
5. Komite Kredit
6. Komite Pengarah Tata Kelola Informasi
7. Komite Human Resource
8. Komite Fraud
9. Komite Keberlanjutan

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Aset dan Liabilitas ("ALCO") per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua: Direktur Treasury

Anggota:

1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama 1
3. Wakil Direktur Utama 2
4. Head of Risk Management
5. Direktur Keuangan dan Perencanaan

Sekretaris: Head of Treasury

Pedoman Kerja

Pedoman Kerja Komite ALCO disusun sebagai panduan atau rujukan bagi anggota ALCO antara lain untuk:

1. Memantau dan mengelola aset dan liabilitas.
2. Memantau perkembangan pasar dan faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi keadaan pendanaan dan likuiditas Bank.
3. Memantau eksposur risiko Bank seperti risiko suku bunga dan nilai tukar.
4. Memutuskan dan memberikan arahan dalam pengelolaan suku bunga baik suku bunga *funding* maupun *lending.*
5. Dan hal-hal terkait lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Aset dan Liabilitas memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain mencakup:

1. Mengkaji ulang, mengawasi dan menyetujui strategi neraca secara keseluruhan, atas likuiditas, harga, dan manajemen permodalan.
2. Memberikan gambaran keadaan perekonomian domestik dan dunia, serta analisis implikasi dari kebijakan moneter dan fiskal yang telah dan atau akan diambil oleh pemerintah.

Pelaksanaan Tugas 2023

Pelaksanaan kegiatan dan atau keputusan yang telah diambil dan direalisasikan sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Menyetujui menerapkan limit maksimum antara FTP dan Jibor pada Tactical FTP. (Mar-23)
2. Menyutujui penggunaan FTP Loan Tenor 2 Minggu untuk produk BNPL (*Buy Now Pay Later*) Jenius. (Mar-23)
3. Menyetujui untuk tidak mengubah batasan *off market* pada transaksi FX, kas, CCS, IRS, dan menyetujui skenario FX *stress test*. (Jun-23)
4. Menyetujui special FTP untuk produk *back-to-back* and *cash collateral loan* oleh *Business Banking*. (Jun-23)
5. Menyutujui penggunaan Market Based FTP dimulai dari tahun 2024. (Sep-23)
6. Menyetujui proposal untuk RBB dan IRRBB 2024-2026. (Sep-23)
7. Menyetujui perhitungan *core casa balance* untuk tahun 2024. (Sep-23)
8. Menyetujui implementasi alokasi *income of capital* ke LOB (line of business) berdasarkan total RWA dan menyetujui beban SLR ditanggung LOB 100% mulai dari tahun 2024 (Sep-23)
9. Menyetujui kuota tambahan untuk SLR sampai dengan akhir 2023. (Okt-23)
10. Menyetujui rencana penerbitan obligasi di tahun 2024-2025 melalui *circular* ALCO Desember (Dec-23)

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2023, Komite ALCO mengadakan 12 kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hiromichi Kubo/Keishi Kobata	Ketua	12	11	92%
Henoch Munandar	Anggota	12	10	83%
Kaoru Furuya	Anggota	12	12	100%
Darmadi Sutanto	Anggota	12	8	67%
Sendiaty Sondy	Anggota	12	10	83%
Hanna Tantani	Anggota	12	11	92%
Wiwig Santoso	Sekretaris	12	9	75%

Catatan:
* Keishi Kobata menggantikan Hiromichi Kubo sebagai direktur treasury sejak ALCO Jun-23.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keanggotaan komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) yang terdiri dari:

Ketua: Head of Risk Management

Anggota:

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
  1. Direktur Utama
  2. Wakil Direktur Utama 1
  3. Wakil Direktur Utama 2
  4. Direktur Kepatuhan & Legal
  5. Direktur Corporate Banking Japanese
  6. Direktur Treasury
  7. Direktur Operasional
  8. Direktur Keuangan & Perencanaan
  9. Head of Business Banking
  10. Head of Information Technology
  11. Head of Retail Lending Business
  12. Head of Wealth Management Business and Network & Distribution Head
  13. Head of Digital Banking
  14. Head of Human Resources
  15. Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking
  16. Head of Treasury

- Anggota Tetap Tanpa Hak Suara:
  1. Head of Internal Audit
  2. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

Prosedur Rapat

Pedoman pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam setahun sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).
2. Rapat dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
3. Bilamana dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain selain Anggota Komite untuk hadir dalam rapat, termasuk namun tidak terbatas pada Perusahaan Anak.
4. Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*);
5. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Members*) tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara.
7. Keputusan rapat Komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan perusahaan (*Corporate Policy*).

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Head of Risk Management memiliki wewenang untuk menyampaikan eskalasi terkait dengan perbedaan pendapat di dalam Komite kepada Komite Pemantau Risiko untuk mendapatkan rekomendasi.
10. Laporan/materi Komite Manajemen Risiko disiapkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit terkait diwajibkan menyampaikan materi/ data setiap bulan kepada pihak yang ditunjuk (PIC) Satuan Kerja Manajemen Risiko selambat-lambatnya 8 hari kerja setelah akhir bulan.
11. Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat meminta informasi/data tambahan dari unit lain di Bank untuk dicantumkan kedalam laporan/materi Komite Manajemen Risiko.
12. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
13. Keputusan rapat berupa risalah rapat di-*review* oleh Operational & Fraud Risk Management Head, Market & Liquidity Risk Management Head, Risk Management Planning Head, Cyber Security Risk Head dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.
14. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler Komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan telah disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap (*Permanent Voting Members)*.

Tugas dan Wewenang

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan wewenang, antara lain:

1. Menyusun kebijakan dan kerangka manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaan.
2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

Pelaksanaan Tugas 2023

Selama tahun 2023 Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 11 kali pertemuan dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pengelolaan risiko kredit mencakup Baki debet, *Special Mention* (SM), NPL, Biaya Kredit (CoC) dan pemantauan implementasi *Credit Risk Appetite Framework* (CRAF).
2. Pengawasan dan pengelolaan restrukturisasi COVID-19, PMK 71, PMK 85 dan PMK 98/132.
3. Pemantauan implementasi *Risk Acceptance* & *Risk Tolerance* per *Product Program*.
4. Penyampaian informasi mengenai aturan baru terkait ATMR yang akan diimplementasikan di Januari 2023.
5. Penyampaian informasi terkait dengan hasil *stress test*:
   a. *Stress Test* POJK 48 untuk mengetahui ketahanan Bank terhadap potensi portofolio restrukturisasi COVID-19.
   b. *Bottom Up Stress Test* 2023 untuk menilai kecukupan tingkat ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas Bank dalam menghadapi perubahan dan *shock* pada kondisi makro ekonomi dengan skenario dan pedoman dari Otoritas (OJK dan BI).
   c. *Stress test Risk Profile* & ICAAP untuk memenuhi kebutuhan regulasi.
6. Penyampaian informasi terkait dengan hasil penilaian *review* model tahunan PSAK 71/IFRS 9.
7. Penyampaian informasi terkait *Collect Equalization* dan *Back-Testing* CKPN.
8. Penyampaian informasi terkait *Sustainability.*
9. Penyampaian informasi terkait *Top & Emerging risk (Financial Risk).*
10. Penyampaian informasi terkait *Write-off dan Recovery.*
11. Penyampaian informasi terkait *Enterprise Risk Datamart.*
12. Hasil pemantauan atas *Risk Appetite Measure* untuk risiko pasar dan likuiditas dan pemantauan rasio aset likuid.
13. Penyampaian simulasi perhitungan ATMR Risiko Pasar yang akan diimplementasikan mulai Januari 2024.
14. Pemantauan dan pelaporan bulanan Indikator Rencana Aksi.
15. Penyampaian informasi terkait *New Framework for Commitment Line.*
16. Pelaporan dan penentuan langkah tindak lanjut penanggulangan dan solusi pemulihan jika terjadi situasi yang tidak wajar.

17. Pengelolaan risiko lainnya, yaitu Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, dan Risiko Hukum.
18. Pada tahun fiskal 2023, Manajemen Risiko Keamanan Siber memberikan laporan mengenai pelaksanaan Simulasi *Phishing* dan peninjauan SLIK secara triwulanan.
19. CSRM juga memberikan hasil Penilaian Kesiapan Ransomware, Penilaian Tingkat Kematangan dan Penilaian FFIEC-CAT beserta rencana remediasinya serta informasi terkait penyelesaian project ISO27001, Kerangka Keamanan *Cyber*, Pelatihan Kemanan Siber dan pembentukan Fungsi CISO.
20. Dalam hal pengambilan keputusan, Komite Manajemen Risiko memberikan persetujuan terhadap definisi Kebocoran Informasi.
21. CSRM juga membagikan beberapa informasi insiden *Cyber* secara internal dan eksternal termasuk pembelajaran dan tindakan pencegahan yang diambil.
22. *Bank operational risk appetite*.
23. Jumlah dan ikhtisar kejadian risiko operasional.
24. Nominal kerugian risiko operasional, pemulihan, keuntungan dan ikhtisar utama.
25. Indikator risiko operasional utama.
26. Ikhtisar pengaduan nasabah.
27. Inisiatif utama Divisi OFRM (Operational & Fraud Risk Management).
28. Manajemen kontinuitas bisnis.
29. Hasil penilaian OFRM atas *key control self-assessment*.
30. BTPN *Top & Emerging Risk* (Risiko Non Finansial).
31. *Risk Acceptance*.
32. Ringkasan kebijakan dan prosedur (termasuk pengkiniannya) ORM Fungsi ICR dan BCM.
33. Status dari produk program dan layanan.
34. Materi rapat *Risk & Control* dari setiap lini bisnis/ pendukung termasuk hasil pemeriksaan QA/ICR.
35. Hasil penilaian ICR *Maturity Self Assessment* (MSA)
36. Pemantauan pelaksanaan Mandatory OFRM *E-learning*.
37. Kejadian *fraud* dan *staff misconduct*: jumlah kejadian, jumlah kerugian dan pemulihan.
38. Status investigasi kasus *fraud* dan kasus *staff misconduct*
39. Kampanye, pelatihan & sosialisasi *Anti-Fraud*.
40. Pelaporan kejadian indikasi *fraud* melalui *whistleblowing*, unit kerja dan lainnya.
41. Ikhtisar atas inisiatif utama manajemen *Anti-Fraud*.
42. Ringkasan kebijakan dan prosedur Manajemen *Anti-Fraud* (termasuk pengkiniannya).
43. Pengelolaan risiko fraud lainnya: Proses mengenal karyawan secara berkelanjutan (KYE), penerimaan tips, dan penegasan komite *fraud* melalui SK Direksi.
44. Penyesuaian Pakta Kode Etik dan Integritas 2023
45. Persetujuan klasifikasi *fraud event* dan *staff misconduct*
46. Pengakuan terhadap *whistle blower*
47. Peristiwa *Fraud* Signifikan yang Dilaporkan ke OJK
48. Pemantauan GL Sementara Pemulihan
49. Update Kasus yang Dilaporkan ke Polisi
50. Pemantauan Rekomendasi
51. Pendelegasian Wewenang Investigasi: *Fraud* Retail Banking, Operational Fraud Investigator dan Business Banking

Dalam rangka pemantauan risiko dengan anak perusahaan setiap kuartal disampaikan konsolidasi Bank dengan anak perusahaan serta pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan BI/OJK.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko mengadakan 11 kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ketua				
Sendiaty Sondy	Head of Risk Management	11	10	91%
Anggota Tetap dengan Hak Suara				
Henoch Munandar	Direktur Utama	11	10	91%
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama 1	11	10	91%
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama 2	11	8	73%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	11	9	82%
Hiromichi Kubo[1)]	Direktur Treasury	5	4	80%
Keishi Kobata[2)]	Direktur Treasury	6	6	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional	11	10	91%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan & Perencanaan	11	10	91%
Kan Funakoshi[3)]	Direktur Corporate Banking (Japanese)	3	2	67%

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Atsushi Hino[4)]	Direktur Corporate Banking (Japanese)	7	6	86%
Jeffrey Cheanandro Tjoeng	Head of Business Banking	11	11	100%
Jeny Mustopha	Head of Information Technology	11	11	100%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	11	8	73%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution Head	11	7	64%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	11	8	73%
Mira Fitria	Head of Human Resources	11	8	73%
Ir Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking	11	9	82%
Wiwig Wahyu Santoso	Head of Treasury	11	7	64%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara				
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	11	10	91%
Wahyu Nugroho	Head of Portfolio Management & Policy	11	11	100%

Catatan:
1) Hiromichi Kubo tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB 22 Juni 2023.
2) Keishi Kobata diangkat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sejak 25 Juli 2023.
3) Kan Funakoshi tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST 13 April 2023.
4) Atsushi Hino diangkat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Mei 2023.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan

Ketua: Deputy President Director 2

Anggota

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
  1. Direktur Utama
  2. Wakil Direktur Utama 1 dan 2
  3. Head of Risk Management
  4. Direktur Operasional
  5. Direktur Corporate Banking Japanese
  6. Direktur Treasury
  7. Direktur Keuangan
  8. Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking
  9. Head of Business Banking
  10. Head of Retail Lending Business
  11. Head of Wealth Management Business
  12. Head of Digital Banking

- Anggota Tetap tanpa Hak Suara:
  1. Head of Internal Audit
  2. Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi (Sekretaris)

Pedoman Kerja

Pedoman Kerja yang telah disusun oleh Bank adalah:

1. Rapat Komite Pengarah TI dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat Komite Pengarah TI dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*);
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat;
3. Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat;
4. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah Ketua Komite dan/atau Direktur Utama;
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah yang

dikeluarkan dalam rapat bersangkutan termasuk Ketua Komite dan/atau Direktur Utama.

6. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan Perusahaan (*Corporate Policy*);
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion)* yang terdapat dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
8. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik;
9. Lebih dari 50% rapat Komite dihadiri oleh lebih dari 70% anggota komite secara fisik atau secara virtual dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, yang memungkinkan para peserta Rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berkomunikasi satu sama lain. Kehadiran peserta Rapat secara virtual dianggap dan dihitung sebagai kehadiran langsung dalam Rapat;
10. Bilamana dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat;
11. Keputusan rapat berupa Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. Risalah Rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota Komite.
12. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler Komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap.

Tugas dan Tanggung Jawab

Ketua bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab Komite, berupa agenda utama yang didasarkan pada laporan bulanan yang disusun oleh Sekretaris Komite sesuai dengan kerangka kerja dan agenda khusus yang berdasarkan permasalahan yang penting dan sangat mendesak, atas permintaan seorang atau lebih Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*) komite;
2. Menentukan undangan rapat Komite;
3. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan;

Sekretaris bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat undangan rapat dan mendistribusikan undangan;
2. Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan rapat;
3. Mencatat, merumuskan dan menyajikan hasil rapat;
4. Mendistribusikan hasil rapat kepada seluruh anggota Komite, Direksi, dan Corporate Secretary.

Pelaksanaan Tugas 2023

Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi mengadakan 4 (empat) kali pertemuan, dengan rincian tanggal penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Tanggal 21 Maret 2023
2. Tanggal 27 Juni 2023
3. Tanggal 19 September 2023
4. Tanggal 12 Desember 2023

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi mengadakan 4 (empat) kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henoch Munandar	Direktur Utama	4	1	25%
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	4	3	75%
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Atsushi Hino[1)]	Direktur	3	3	100%
Hiromichi Kubo[2)]	Direktur	1	1	100%
Merisa Darwis	Direktur	4	3	75%
Hanna Tantani	Direktur	4	4	100%
Kan Funakoshi[3)]	Direktur	1	1	100%
Keishi Kobata[4)]	Direktur	3	3	100%
Irwan S. Tisnabudi	Head of Digital Banking	4	4	100%
Wiwig Santoso	Head of Treasury	4	1	25%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution	4	2	50%
Ir. Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking	4	3	75%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	4	3	75%

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	4	4	100%
Jeny Mustopha	Head of Information Technology	4	4	100%

Catatan:
1) Atsushi Hino diangkat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Mei 2023.
2) Hiromichi Kubo tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB 22 Juni 2023.
3) Kan Funakoshi tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST 13 April 2023.
4) Keishi Kobata diangkat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sejak 25 Juli 2023.

KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kebijakan Kredit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua: Direktur Utama

Anggota:

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
  1. Para Wakil Direktur Utama
  2. Direktur Corporate Banking (Japanese)
  3. Direktur Tresuri
  4. Head of Wholesale,Commercial and Transaction Banking
  5. Head of Retail Lending Banking
  6. Head of Digital Banking
  7. Head of Business Banking
  8. Head of Treasury
  9. Head of Risk Management
  10. Direktur Kepatuhan

- Anggota tetap tanpa Hak Suara:
  1. Kepala Divisi Portfolio Management & Policy
  2. Credit Risk Corporate Head
  3. Retail Banking Risk Head
  4. Business Banking Credit Risk
  5. Kepala Divisi Audit Internal*)
  6. Kepala Divisi Kepatuhan
  7. Kepala Divisi Hukum dan Litigasi (General Counsel)

*) pengamat

Pedoman Kerja

Komite Kebijakan Kredit telah memiliki pedoman kerja (*charter*) yang telah disahkan Direksi, berisi antara lain:

1. Rapat

- Rapat Komite Kebijakan Perkreditan diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Tetap dengan Hak Suara dan ditunjuk dalam rapat

2. Kuorum

- Rapat Komite Kebijakan Perkreditan hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% anggota tetap dengan hak suara termasuk ketua komite
- Apabila anggota komite berhalangan hadir, maka kehadiran yang bersangkutan dapat digantikan oleh perwakilannya.

3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju lebih dari 50% jumlah Anggota Tetap dengan Hak Suara yang hadir dalam Rapat, termasuk suara setuju Ketua Komite.

4. Pengambilan Keputusan Tanpa Mengadakan Rapat Formal

Komite Kebijakan Perkreditan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat komite secara formal (Keputusan Sirkuler Komite), dengan ketentuan semua Anggota Tetap dengan Hak Suara menyetujui keputusan tersebut secara tertulis.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat untuk menentukan arah kredit bank dan memantau implementasi dari kebijakan kredit
2. Memberikan masukan kepada Direksi Bank dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank serta melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank
3. Mengawasi penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
4. Melakukan evaluasi dan analisa kualitas portofolio perkreditan terkait kebijakan perkreditan
5. Memberikan laporan berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, yang sekurang-kurangnya mencakup:
   a. Rangkuman dari hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
   b. Hasil pemantauan/tinjauan dan evaluasi mengenai kualitas dan kondisi portofolio kredit.
   c. Saran-saran untuk perbaikan kebijakan (jika diperlukan).
6. Melakukan *review*/penelaahan terhadap kebijakan kredit agar tetap sejalan dengan kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas 2023

Komite Kebijakan Kredit telah melakukan rapat pada semester I (satu) pada tanggal 13 Juni 2023 dan melalui sirkuler pada semester II (dua) pada tanggal 18 Desember 2023. Rincian pelaksanaan tugas yang dijalankan antara lain adalah:

- Pembahasan mengenai hirarki kebijakan dan prosedur terkait dengan kredit baik kebijakan dan prosedur pada tingkat *bankwide* maupun tingkat segmen. Untuk Kebijakan Perkreditan telah dilakukan pengkinian dan mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris
- Melakukan evaluasi atas perubahan pada Kebijakan Perkreditan dengan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pada level global serta kebijakan keuangan berkelanjutan baik yang berlaku di Bank maupun berlaku secara global termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan industri yang dihindari.
- Evaluasi dan analisa kualitas portofolio perkreditan terkait kebijakan perkreditan juga dilaksanakan pada rapat-rapat lainnya seperti pada rapat Komite Manajemen Risiko yang juga dilaporkan kepada Komite Pemantau Risiko.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam tahun 2023 yaitu pada tanggal 13 Juni 2023 dan 18 Desember 2023 melalui mekanisme sirkuler dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henoch Munandar	Direktur Utama	2	2	100%
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	2	2	100%
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	2	1	50%
Hiromichi Kubo[1)]	Direktur	1	1	100%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2	2	100%
Atsushi Hino[2)]	Direktur	2	2	100%
Keishi Kobata[3)]	Direktur	1	1	100%
Ir Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking	2	2	100%
Irwan Sutjipto Trisnabudi	Head of Digital Banking	2	1	50%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	2	2	100%
Sendiaty Sondy	Head of Risk Management	2	2	100%
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	2	2	100%
Tasuku Tanaka	Credit Risk Head	2	2	100%
Sidik Waskito	Business Banking Credit Risk Head	2	2	100%
Adil Pamungkas	Retail Banking Risk Head	2	2	100%
Argo Wibowo	General Counsel	2	2	100%
Butet Sondang Sitepu	Compliance Head	2	2	100%
Wahyu Nugroho	Portfolio Management & Policy Head	2	2	100%

Catatan:
1) Hiromichi Kubo tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB 22 Juni 2023.
2) Atsushi Hino ditunjuk sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Mei 2023.
3) Keishi Kobata ditunjuk sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sejak 25 Juli 2023.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE PENGARAH TATA KELOLA INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) yang terdiri dari:

Ketua: Head of Risk Management

Anggota:

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
  1. Direktur Kepatuhan
  2. Direktur Operasional
  3. Direktur Keuangan & Perencanaan
  4. Head of Information Technology

- Anggota Tetap tanpa Hak Suara:
  1. Head of Internal Audit
  2. Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi Manajemen Data (Sekretaris)

Undangan Tetap (*Standing Invitee*)

1. Direktur Corporate Banking (Japanese)
2. Direktur Treasury
3. Head of Treasury
4. Head of Business Banking
5. Head of Wholesale, Commercial and Transaction Banking
6. Head of Retail Lending Business
7. Head of Wealth Management Business and Network & Distribution
8. Head of Digital Banking
9. Pejabat Eksekutif Bidang Retail Banking Analytics, Business Planning & Credit Policy

Tugas dan Wewenang

Memberikan rekomendasi kepada Direksi paling kurang mencakup, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi yang utama seperti kebijakan kualitas data dan dan manajemen risiko terkait data dan informasi Bank, mencakup standar yang hendak dicapai (*target-state*).
2. Perencanaan dan menetapkan skala prioritas proyek-proyek yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta mencapai standar yang telah ditetapkan.
3. Kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan rencana tata kelola informasi, kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi, serta standar yang hendak dicapai.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek tata kelola data dan informasi serta data analytics dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati.
5. Kesesuaian tata kelola informasi dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) guna mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
6. Pemantauan atas kondisi tata kelola data dan informasi Bank serta upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi permasalahan kualitas data dan mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan aset data dan informasi.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait data dan informasi, yang tidak dapat diselesaikan dan dieskalasikan oleh forum tata kelola data dan informasi.
8. Membangun kultur organisasi yang bekerja berbasis data dan informasi (*data driven organization*).

Prosedur Rapat

Terkait dengan rapat, prosedut yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Rapat Komite Pengarah Tata Kelola Informasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat Komite dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*);
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat;
3. Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat.
4. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1⁄2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah Ketua Komite dan/atau Direktur Kepatuhan.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1⁄2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk Ketua Komite dan/atau Direktur Kepatuhan;

6. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan Perusahaan (*Corporate Policy*).
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terdapat dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
9. Bilamana dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat.
10. Keputusan rapat berupa risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. Risalah rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota Komite.
11. Komite dapat mengambil keputusan yang yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler Komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap *(Permanent Voting Members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).

Ketua bertanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab Komite, berupa agenda utama yang didasarkan pada laporan bulanan yang disusun oleh Sekretaris Komite sesuai dengan kerangka kerja dan agenda khusus yang berdasarkan permasalahan yang penting dan sangat mendesak, atas permintaan seorang atau lebih Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*) komite;
2. Menentukan undangan rapat komite;
3. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Sekretaris bertanggung jawab sebagai berikut:
1. Membuat undangan rapat dan mendistribusikan undangan;
2. Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan rapat;
3. Mencatat, merumuskan dan menyajikan hasil rapat;
4. Mendistribusikan hasil rapat kepada seluruh anggota Komite, Direksi, dan Corporate Secretary.

Pelaksanaan Tugas 2023

Pada tahun 2023, Komite Pengarah Tata Kelola Informasi mengadakan 4 (empat) kali rapat, dengan rincian penyelenggaraan sebagai berikut:

Rapat	Tanggal	Waktu Penyelenggaraan
1	21 Maret 2023	13:00 – 14:00
2	27 Juni 2023	11:30 – 12:20
3	19 September 2023	13:00 – 13:50
4	5 Desember 2023	10:45 – 11:30

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2023, Komite Pengarah Tata Kelola Informasi mengadakan 4 kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sendiaty Sondy	Head of Risk Management	4	4	100 %
Jeny Mustopha	Head of Information Technology	4	4	100 %
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	4	2	100 %
Hanna Tantani	Direktur Keuangan dan Perencanaan	4	4	100 %
Merisa Darwis	Direktur Operasional	4	4	100%
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	4	4	100%
Jufri Fan	Sekretaris	4	4	100%
Erliana	Undangan Tetap (*Standing Invitee*)	4	3	75%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution	4	2	50%
Hiromichi Kubo[1)]	Direktur Tresuri	1	1	100%
Atsushi Hino[2)]	Direktur Corporate Banking (Japanese)	3	3	100%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	4	3	75%
Jeffrey Tjoeng	Head of Business Banking	4	4	100%
Kan Funakoshi[3)]	Direktur Corporate Banking (Japanese)	1	1	100%
Keishi Kobata[4)]	Direktur Tresuri	2	2	100%

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial and Transaction Banking	4	4	50%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	4	1	25%
Wiwig Santoso	Head of Treasury	4	3	75%

Catatan:
1) Hiromichi Kubo tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB 22 Juni 2023.
2) Atsushi Hino diangkat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Mei 2023.
3) Kan Funakoshi tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPST 13 April 2023.
4) Keishi Kobata diangkat sebagai Direktur sejak ditutupnya RUPSLB 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sejak 25 Juli 2023.

KOMITE KREDIT

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kredit Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut

Ketua: Direktur Utama

Anggota:
1. Wakil Direktur Utama
2. Direktur Bisnis/Kepala Bisnis
3. Kepala Risiko Kredit
4. Kepala Loan
5. Kepala Risiko Kredit Bisnis
6. Kepala Grup atau Departemen Bisnis
7. Kepala Manajemen Risiko (Pengamat)

Pedoman Kerja

Komite Kredit telah memiliki pedoman kerja (*charter*) yang telah disahkan Direksi, berisi antara lain:

1. Rapat
- Komite Kredit menyelenggarakan Rapat pada saat kapan pun sesuai dengan kebutuhan Komite.
- Rapat Komite Kredit diselenggarakan untuk menghasilkan suatu rekomendasi atau opini kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama yang akan memberikan keputusan akhir untuk menyetujui kredit, termasuk kondisi dan instruksi yang berkaitan dengan Persetujuan Kredit.
- Pada rekomendasi atau opini Komite Kredit, Direktur bisnis/Kepala Bisnis terkait akan turut menandatangani lembar rekomendasi/ opini bersama-sama dengan anggota komite lainnya.

2. Kuorum
- Rapat Komite Kredit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari peserta rapat yang wajib hadir dengan minimum 1 (satu) perwakilan dari *Credit Risk Corporate*, khusus untuk segmen *Corporate*. Kehadiran pengamat tidak akan dihitung dalam kuorum rapat.
- Anggota komite yang bukan merupakan peserta rapat yang wajib hadir, dapat hadir akan tetapi kehadirannya tidak dihitung sebagai kuorum rapat dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.

3. Pengambilan Keputusan
- Pengambilan Keputusan pada Rapat Komite Kredit dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah total anggota yang hadir dalam rapat sudah termasuk suara Direktur Utama.
- Suara Kepala Manajemen Risiko sebagai pengamat tidak akan dihitung dalam pengambilan keputusan Rapat Komite, namun setiap keputusan Rapat Komite harus diketahui oleh Kepala Manajemen Risiko.
- Dalam hal pengambilan keputusan dalam Rapat Komite menghasilkan perhitungan jumlah suara setuju yang sama dengan jumlah suara tidak setuju, maka Ketua Komite dapat menentukan keputusan akhir yang akan diambil oleh Komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan kredit, Komite Kredit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menganalisis secara independen dan menyetujui pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan (keputusan yang diambil harus bersifat objektif, dilakukan dengan analisa yang hati-hati dan terhindar dari kepentingan pribadi).

2. Memastikan bahwa bisnis yang dilakukan sesuai dengan kebijakan, standar dan praktik manajemen risiko bank.

Pelaksanaan Tugas 2023

Sepanjang tahun 2023, keputusan kredit Business Banking dilakukan secara sirkuler, sedangkan Komite Kredit Wholesale Banking, Corporate Banking, dan Commercial Banking telah mengadakan rapat sebanyak 24 kali, yang rincian kehadirannya adalah sebagai berikut:

Agenda	Peserta yang Wajib Hadir
1. Kredit terkait segmen Wholesale Banking, Corporate Banking Japanese dan Commercial Banking	1. Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama 1 2. Direktur Wholesale, Corporate dan Commercial Banking terkait 3. Kepala Risiko Kredit 4. Kepala Loan 5. Kepala Grup atau Departemen Wholesale, Corporate dan Commercial Banking terkait 6. Kepala Manajemen Risiko (Pengamat) Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir maka Wakil Direktur Utama 1 bertindak selaku Ketua Komite.
2. Kredit terkait segmen Business Banking	1. Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama 1 2. Kepala Business Banking 3. Kepala Risiko Kredit Business Banking 4. Kepala Risiko Kredit 5. Kepala Manajemen Resiko (Pengamat) Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir maka Wakil Direktur Utama 1 bertindak selaku Ketua Komite.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2023, Komite Kredit mengadakan 24 kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

1. Kredit terkait segmen Wholesale Banking, Corporate Banking Japanese, dan Commercial Banking

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henoch Munandar	Direktur Utama	24	10	42%
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	24	21	88%
Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking	24	10	42%
Kan Funakoshi	Direktur Corporate Banking (Japanese)	24	3	13%
Atsushi Hino[1)]	Direktur Corporate Banking (Japanese)	24	7	29%
Takane Shiomi	Kepala Risiko Kredit	24	5	21%
Tasuku Tanaka[2)]	Kepala Risiko Kredit	24	18	75%
Moses Supardi	Kepala Wholesale Banking	24	13	54%
Warni Chai	Kepala Commercial Banking	24	1	4%
Naoki Watanabe	Kepala Corporate Banking Japanese 2	24	6	25%
Karinda Rachmana	Kepala Corporate Banking Japanese 3	24	0	0%
Hiroaki Seguchi	Kepala Corporate Banking Japanese 4	24	0	0%
Hideaki Asatsu	Kepala Corporate Banking Japanese 5	24	5	21%
Wibowo Kurniawan[3)]	Kepala Corporate Banking Japanese 6	24	0	0%
Husan Mahjudin	Kepala Loan Department	24	23	96%
Sendiaty Sondy	Kepala Manajemen Risiko	24	9	38%

Catatan:
[1)] Menggantikan Direktur Corporate Banking (Japanese) efektif tanggal 15 Mei 2023.
[2)] Menggantikan Kepala Risiko Kredit efektif tanggal 2 Mei 2023.
[3)] Efektif per tanggal 1 Januari 2023 menjabat sebagai Kepala Corporate Banking Japanese 6.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

2. Kredit terkait segmen Business Banking

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henoch Munandar)/Kaoru Furuya	Direktur Utama/Wakil Direktur Utama	Selama tahun 2023 Keputusan kredit dilakukan secara Sirkuler		
Nathan Christianto/Jeffrey C. Tjoeng	Direktur/Kepala Business Banking			
Takane Shiomi/Tasuku Tanaka[1)]	Kepala Risiko Kredit			
Sidik Waskito	Kepala Risiko Kredit Business Banking			
Sendiaty Sondy	Direktur/Kepala Manajemen Risiko			

Catatan:
[1)] Menggantikan Kepala Risiko Kredit efektif tanggal 2 Mei 2023.

KOMITE HUMAN RESOURCE

Struktur dan Keanggotaan

Ketua: Direktur Utama

Anggota:
1. Wakil Direktur Utama
2. Direktur Keuangan & Perencanaan
3. Direktur Operasional

Sekretaris: Head of Human Resources

Pedoman Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite berpedoman pada ketentuan:

1. Keputusan Rapat Komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 51% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat, termasuk Direktur Utama.
2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur lebih lanjut dalam kebijakan atau prosedur Perseroan.
3. Dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Tugas dan Wewenang

Rincian tugas dan wewenang Komite adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Human Resource dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk ditetapkan sebagai kebijakan yang dimaksud khususnya adalah kebijakan yang sifatnya strategis.
2. Mengevaluasi pelaksanaan program remunerasi Human Resources dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk disetujui.
3. Menyetujui penyimpangan dari Prosedur atau peraturan Perseroan yang berlaku di bidang Human Resources yang melebihi kewenangan Kepala Divisi dan/atau Direktur yang membawahi dan atau dengan bidang tugas Human Resources, dengan memperhatikan hierarki kebijakan Perseroan.
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penunjukan dan penempatan (nominasi) anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan pada Perusahaan Anak (termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Anak yang menjalankan bisnis Syariah).

Pelaksanaan Tugas

Tanggal	Agenda
27 Januari 2023	Usulan MRT
10 Februari 2023	• Nominasi Promosi Eksekutif 2023 • Kajian Kompensasi 2022/2023
13 Februari20 23	Distribusi Anggaran Bonus 2022
8 Maret 2023	• Hasil Distribusi Kajian Kompensasi 2022/2023 • Hasil Promosi Eksekutif 2023
25 Juli 2023	Nominasi Promosi Eksekutif Mid-Year 2023
15 Agustus 2023	• Mid Cycle 2023 • Promosi Eksekutif Mid Cycle 2023
22 September 2023	Natura atau Kenikmatan Dalam Bentuk Barang
15 November 2023	BAP Revamp: LEAD 2024 BTPN Acceleration Program

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2023, Komite Human Resources mengadakan 8 (delapan) kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henoch Munandar	Direktur Utama	8	8	100%
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	8	6	75%
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	8	7	88%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan dan Perencanaan	8	7	88%
Merisa Darwis	Direktur Operasional	8	7	88%
Mira Fitria	Head of Human Resources	8	8	100%

KOMITE FRAUD

Struktur dan Keanggotaan

Ketua: Direksi atau Board of Management yang terkait atau delegasinya.

Anggota:

1. Operational & Fraud Risk Management Head
2. Human Resources Employee & Industrial Relations Head/Strategic Human Resources Management Head

Sekretaris: Operational & Fraud Risk Management (OFRM) atau unit kerja lain yang diberikan kewenangan melakukan Investigasi oleh OFRM.

Apabila pelaku *Fraud* dan/atau pihak terkaitnya adalah Direktur, atau Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif, maka pelaksanaan Komite Fraud wajib dipimpin oleh 2 (dua) anggota Direksi/Board of Management (Wakil Direktur Utama atau Kepala Manajemen Risiko atau Direktur Kepatuhan), atau pihak lain yang tidak memiliki benturan kepentingan, seperti anggota Komite Audit.

Pedoman Kerja

Pedoman pelaksanaan rapat Komite Fraud adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan dapat dilakukan melalui tatap muka atau sirkulasi memo.
2. Wajib dihadiri oleh Ketua Komite dan seluruh Anggota Komite Fraud. Dalam hal Ketua Komite, dan/atau Anggota Komite Fraud berhalangan hadir (yang ketidakhadirannya tidak diperlukan adanya pembuktian apa pun), maka untuk Ketua Komite Fraud yang berhak & berwenang mewakilinya adalah pihak yang ditunjuk oleh Ketua Komite sebagai delegasinya, dan minimal adalah kepala divisi terkait, dan untuk Anggota Komite Fraud, sebagai delegasinya minimal adalah karyawan satu tingkat di bawahnya.
3. Dalam hal tertentu, rapat Komite Fraud dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Komite Fraud atau lebih dari satu Anggota Komite Fraud atau atas permintaan dari seorang Direksi/*Board of Management*.
4. Komite Fraud dapat mengundang Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang bersangkutan dan/atau pihak lainnya yang bukan anggota komite untuk hadir dalam rapat, namun PUK dan/atau pihak lainnya tersebut dalam rapat komite tidak memiliki *voting rights* (hak suara) karena hanya berfungsi untuk memberikan saran, pertimbangan dan masukan.
5. Rapat Komite Fraud sah dan berhak mengambil keputusan apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah Anggota Komite (termasuk Ketua Komite) yang memiliki hak suara. Rapat Komite Fraud dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan/mendengar serta berpartisipasi langsung dalam rapat sesuai kesepakatan anggota Komite Fraud.
6. Keputusan rapat komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak ada kesepakatan mengenai sanksi, maka akan dieskalasikan kepada Head of Risk Management dan Compliance Director. Apabila setelah dilakukan eskalasi tetap tidak ada kesepakatan mengenai sanksi/belum memperoleh keputusan, maka akan dieskalasikan kepada Direksi melalui *Risk Management Committee* (RMC). Pada tingkat terakhir, apabila tetap tidak ada kesepakatan mengenai sanksi/belum memperoleh keputusan, maka akan dieskalasikan kepada Dewan Komisaris melalui *Risk Monitoring Committee* (RMONC).

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

7. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam rapat bersifat kolektif kolegial. Apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion)* wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah rapat komite berikut alasannya.
8. Rapat Komite Fraud atas kasus *fraud* yang pelaku nya telah berpindah/mutasi ke *Line of Business* (LoB)/*Support Functio*n (SF) lain maka Komite Fraud diselenggarakan bersama antara *Line of Business* (LoB)/ *Support Function* (SF) dimana pelaku fraud menjabat saat ini dan *Line of Business* (LoB)/ *Support Functio*n (SF) saat terjadinya *fraud*. Dalam hal ini Ketua Komite Fraud adalah BoD/BoM yang bertanggung jawab atas Direktorat dari pelaku karyawan bekerja.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Fraud:

Menindaklanjuti laporan hasil investigasi yang terkait dengan adanya suatu kejadian Fraud di masing-masing unit bersangkutan, menetapkan sanksi kepada (para) karyawan (termasuk karyawan vendor) yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kejadian Fraud, dan memutuskan kejadian *fraud* untuk menentukan langkah hukum yang akan dilakukan kemudian.

Wewenang Komite Fraud:

1. Memanggil, meminta klarifikasi, meminta laporan-laporan kepada berbagai pihak (karyawan dan/atau unit-unit kerja lainnya) yang menurut pertimbangan Komite Fraud dianggap secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan *fraud*.
2. Menetapkan pengenaan jenis sanksi kepada (para) karyawan (termasuk karyawan vendor) yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kejadian *fraud*.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit-unit kerja lainnya, serta dalam rangka perbaikan dan upaya preventif maka komite *fraud* berhak memberikan rekomendasi konstruktif bagi unit-unit kerja tersebut.

Pelaksanaan Tugas

Selama tahun 2023, Bank telah melakukan 51 sesi Komite Fraud (baik yang dilakukan secara rapat virtual ataupun sirkular *e-mail*) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Berikut adalah rincian kehadiran peserta Komite Fraud yang telah dilakukan sebanyak 51 sesi (20 sesi melalui rapat virtual dan selebihnya melalui sirkulasi e-mail) selama tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	7	7	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional	18	18	100%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	1	1	100%
Kan Funakoshi/Atsushi Hino	Direktur Corporate Banking (Japanese)	2	2	100%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	3	3	100%
Enrico Novian	Pension Business Head RLB	10	10	100%
Toho Pasaribu	Micro Business Head	3	3	100%
Adil Pamungkas	Retail Banking Risk Head	19	19	100%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	2	2	100%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	3	3	100%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution	1	1	100%
Jeny Mustopha	Head of Information Technology	1	1	100%
Heru Rustanto	Operational & Fraud Risk Management Head	51	51	100%
Denty Avianty	Strategic HR Management	2	2	100%
Landy Kurniawan	Employee & Industrial Relations Head	48	48	100%
Patritius Joko	Operations Control Assurance Head	8	8	100%
Charlos Santana Putra	ORM, Fraud & QA Head Retail Banking	7	7	100%

KOMITE KEBERLANJUTAN

Struktur dan Keanggotaan

Ketua: Direktur Kepatuhan & Legal

Anggota:
1. Direktur Keuangan & Perencanaan
2. Direktur Operasional
3. Direktur Corporate Banking Japanese
4. Direktur Tresuri
5. Head of Risk Management
6. Head of Business Banking
7. Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking
8. Head of Retail Lending Business
9. Head of Wealth Management Business
10. Head of Digital Banking
11. Head of Treasury
12. Head of Human Resources
13. Micro Business Head

Sekretaris: Communications & Daya Head

Pedoman Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komite Keberlanjutan wajib senantiasa menjalankan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau peraturan/ketentuan internal Bank BTPN. Sedangkan Mekanisme dan Tata Cara Kerja Komite Keberlanjutan sebagaimana dijabarkan pada Pedoman Kerja Komite Keberlanjutan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Keberlanjutan adalah sebagai berikut:
1. Menyusun strategi, kebijakan, target terkait dengan keuangan berkelanjutan di Bank BTPN
2. Melakukan pemantauan, evaluasi dan rekomendasi terkait dengan implementasi keuangan berkelanjutan di Bank BTPN

Pelaksanaan Tugas Selama 2023

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2023, Komite Keberlanjutan telah memberikan rekomendasi dan arahan terkait target dan inisiatif keuangan berkelanjutan di Bank BTPN.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2023, Komite Keberlanjutan mengadakan 2 (dua) kali rapat, dengan rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan dan Legal	2	2	100%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan	2	2	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional	2	2	100%
Atsushi Hino	Direktur Corporate Banking Japanese	2	2	100%
Keishi Kobata	Direktur Treasuri	2	2	100%
Sendiaty Sondy	Head of Risk Management	2	2	100%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	2	2	100%
Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking	2	2	100%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	2	2	100%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution	2	1	50%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	2	1	50%
Wiwig Santoso	Head of Treasury	2	1	50%
Mira Fitria	Head of Human Resources	2	1	50%
Toho Pasaribu	Micro Business Head	2	1	50%
Andrie Darusman	Communications & Daya Head	2	2	100%

SEKRETARIS PERUSAHAAN

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	49 tahun pada tahun buku 2023
Riwayat Pendidikan	• Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2012) • Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan Hukum mengenai Kegiatan Ekonomi dari Universitas Indonesia (1997)
Dasar Penunjukan	Keputusan sirkuler Direksi Nomor PS/BOD/001/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020
Rangkap Jabatan	Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
Pengalaman Kerja	• Head of Corporate Legal Department PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-2019) • Corporate Action & Stakeholder Management Head of Corporate Secretariat Division PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1997-2014)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali

MASA JABATAN

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak 10 Januari 2020.

DASAR HUKUM

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu Eneng Yulie Andriani terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020, yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor PS/BOD/001/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Rincian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

1. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Bertanggung jawab untuk memberikan informasi penting yang perlu diketahui publik mengenai kondisi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
4. Melakukan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
5. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Membuat risalah rapat Direksi serta menyimpan risalah rapat tersebut.
9. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

RANGKAP JABATAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh pejabat eksekutif yang mengepalai Divisi Corporate Secretary. Jabatan ini berada di bawah pengawasan/koordinasi Direktur Kepatuhan, dan tidak dirangkap dengan jabatan lain.

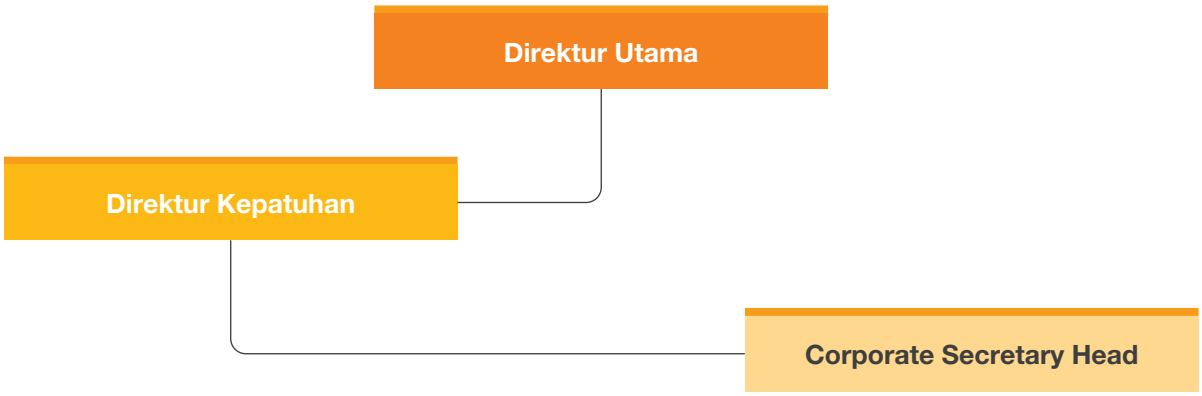

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* Head membawahi dan menangani fungsi *Corporate Governance*, *Corporate Action* & *Stakeholder Management*, serta pengelolaan kantor Dewan Komisaris dan Direksi.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Selama tahun 2023, aktivitas Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan tetap menyesuaikan protokol kesehatan. Dengan segala keterbatasan tersebut, Sekretaris Perusahaan telah berhasil menyelesaikan dan melaksanakan tugas atau aktivitas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat-rapat serta membuat notula dari rapat Direksi, Dewan Komisaris, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta semua komite di bawah Dewan Komisaris kecuali Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Menyelenggarakan rapat bulanan bagi pejabat eksekutif (*monthly managers meeting*).
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan atau seminar untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan pengurusan dan pemenuhan persyaratan untuk uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal dan perbankan.
7. Menyiapkan dan menyampaikan keterbukaan informasi.
8. Menyusun kebijakan dan prosedur baru serta melakukan kajian berkala atas kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tata kelola perusahaan termasuk Panduan Tata Kelola baik untuk individual maupun terintegrasi, Panduan dan Tata Tertib Kerja (*charter*), serta perubahan Anggaran Dasar Bank.
9. Melakukan kajian dari sisi undang-undang tentang perseroan terbatas, ketentuan pasar modal dan anggaran dasar terhadap suatu rencana Bank sekaligus menyiapkan persetujuan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, jika diperlukan
10. Memperkuat wawasan dan pemberian pembekalan dengan menghadiri *training* dan *workshop*, baik yang diselenggarakan oleh regulator maupun asosiasi profesi.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepatuhan Bank sebagai perusahaan terbuka, berikut ini adalah daftar keterbukaan informasi yang disampaikan sepanjang tahun 2023.

Tanggal	Nomor Dokumen	Perihal
6 Februari 2023	S.010/CCS/II/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Tahun Ke 10, Pocari Sweat Run Indonesia 2023 Targetkan 30.000 Pelari Dari Penjuru Nusantara
20 Februari 2023	S.013/CCS/II/2023	Keterbukaan Informasi mengenai adanya Insiden Kebakaran Kantor Cabang BANK BTPN di Yogyakarta
28 Februari 2023	S.017/CCS/II/2023	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 31 Desember 2022 (Diaudit) PT BANK BTPN Tbk (“Perseroan”)
28 Februari 2023	S.019/CCS/II/2023	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan PT BANK BTPN Tbk
28 Februari 2023	S.020/CCS/II/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Dukung Resiliensi Ekonomi Nasional, Laba Bersih Bank BTPN Tumbuh 16%
28 Februari 2023	S.021/CCS/II/2023	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
17 Maret 2023	S.135/DIR/CCS/III/2023	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik – Penegasan Perpanjangan Jangka Waktu Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali
21 Maret 2023	S.031/CCS/III/2023	Keterbukaan Informasi - Pengunduran Diri Direktur Perseroan
21 Maret 2023	S.032/CCS/III/2023	Keterbukaan Informasi - Pengunduran Diri Komisaris Perseroan
17 April 2023	S.045/CCS/IV/2023	Keterbukaan Informasi Hasil Pemeringkatan Tahunan
17 April 2023	S.047/CCS/IV/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Hadirkan Jenius Study, Jenius Amati Perilaku Digital Savvy Jelang Idulfitri 2023
17 April 2023	S.050/CCS/IV/2023	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk
04 Mei 2023	S.053/CCS/V/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Bank BTPN Bukukan Laba Bersih 7% pada Triwulan I-2023
12 Mei 2023	S.059/CCS/V/2023	Keterbukaan Informasi mengenai Tanggal Efektif Pengangkatan Komisaris Independen PT BANK BTPN Tbk
16 Mei 2023	S.062/CCS/V/2023	Keterbukaan Informasi - Pengunduran Diri Direktur Perseroan
19 Mei 2023	S.065/CCS/V/2023	Keterbukaan Informasi mengenai Tanggal Efektif Pengangkatan Komisaris Independen PT BANK BTPN Tbk
25 Mei 2023	S.066/CCS/V/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Bank BTPN Beri Pinjaman Sindikasi senilai Rp1,111 Triliun kepada PT Seino Indomobil Logistics
25 Mei 2023	S.067/CCS/V/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Jenius Ajak Digital Savvy Sehat Tubuh dan Finansial lewat Kolaborasi Pocari Sweat Run Indonesia
26 Mei 2023	S.068/CCS/V/2023	Keterbukaan Informasi mengenai Pembayaran Bunga Obligasi PUB IV Tahap 1 2019 seri B ke 14
13 Juni 2023	S.076/CCS/VI/2023	Keterbukaan Informasi - Pemeringkatan Tahunan PEFINDO
22 Juni 2023	S.077/CCS/VI/2023	Keterbukaan Informasi - Penandatanganan Kerjasama dengan IFC perihal Perjanjian Pemesanan Obligasi Hijau dan Sosial
3 Juli 2023	S.080/CCS/VII/2023	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi PT BANK BTPN Tbk
4 Juli 2023	S.083/CCS/VII/2023	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan AD
31 Juli 2023	S.091/CCS/VII/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Dukung Pocari Sweat Run Indonesia 2023 Melalui Rangkaian Acara #laribarengjenius

Tanggal	Nomor Dokumen	Perihal
1 Agustus 2023	S.092/CCS/VIII/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Bank BTPN Catat Pertumbuhan Positif Semester I-2023
21 Agustus 2023	S.097/CCS/VIII/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Bank BTPN Terapkan Transformasi Digital dengan Teknologi SDM yang Berorientasi Karyawan, Bermitra dengan Darwinbox
24 Agustus 2023	S.098/CCS/VIII/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Jenius Rayakan Ulang Tahun Ketujuh dengan #jadilebihjenius
28 Agustus 2023	S.099/CCS/VIII/2023	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
5 September 2023	S.100/CCS/IX/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Sambut Hari Pelanggan Nasional, Jajaran Direksi Bank BTPN Layani Nasabah
12 September 2023	S.103/CCS/IX/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Great Eastern General Insurance Indonesia Perluas Pasar Ritel Bekerja Sama dengan Bank BTPN
25 September 2023	S.106/CCS/IX/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Garmin Run Asia Series 2023 Indonesia Diselenggarakan di Uptown Park Summarecon Mall Serpong, Rayakan Passion Berlari dengan *Running Science*
9 Oktober 2023	S.109/CCS/X/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Jenius Hadirkan Jenius *Online* Travel Fair, Buat 7 Hari 7 Malam Jadi Makin Seru
13 Oktober 2023	S.116/CCS/X/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Bank BTPN Ajak Nasabah Lihat Peluang Usaha Dekarbonisasi lewat *Sustainability Seminar* 2023
31 Oktober 2023	S.120/CCS/X/2023	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik – Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam Rangka Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II.
3 November 2023	S.121/CCS/XI/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Bank BTPN Jalin Kerja Sama dengan Manulife Aset Manajemen Indonesia
22 November 2023	S.127/CCS/XI/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Hadapi Tantangan, Lirik Peluang, Bank BTPN Gelar Economic Outlook 2024
27 November 2023	S.129/CCS/XI/2023	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
4 Desember 2023	S.130/CCS/XII/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Komitmen Bank BTPN Dalam Realisasi Inisiatif Berkelanjutan di Indonesia
5 Desember 2023	S.131/CCS/XII/2023	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik – Revisi atas Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam Rangka Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II.
8 Desember 2023	S.137/CCS/XII/2023	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik – Penarikan Saham Treasui yang merupakan hasil pembelian kembali dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
8 Desember 2023	S.138/CCS/XII/2023	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik – Penghentian Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Melalui Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia.
11 Desember 2023	S.139/CCS/XII/2023	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik – Rencaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II").
11 Desember 2023	S.140/CCS/XII/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Bank BTPN Catat Pertumbuhan Positif Sepanjang Januari – September 2023
13 Desember 2023	S.141/CCS/XII/2023	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers yang Berjudul: Daya Fest 2023, Wujud Komitmen Bank BTPN dalam Pemberdayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan
22 Desember 2023	S.145/CCS/XII/2023	Keterbukaan Informasi Pemeringkatan Sehubungan dengan adanya Aksi Korporasi PT BANK BTPN Tbk

SEKRETARIS PERUSAHAAN

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Penyelenggara
31 Januari 2023	Sosialisasi atas SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum	BTPN Compliance
2 Februari 2023	Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute
3 Februari 2023	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan	BTPN Legal & Litigasi
16 Februari 2023	Business Risk Forum / Pelatihan dan Pengembangan Effective Collaboration to achioeve Common goal oleh Hingdranata Nikolay	BTPN Risk
22 Februari 2023	Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dan Penyelenggaraan Annual Report Award 2023	Komite Nasional Kebijakan Governansi
28 Februari 2023	Effective Communication Training by Wahyu Wiwoho (Talk Inc)	BTPN Corporate Secretary dan BTPN Learning
2 Maret 2023	CLCS Workshop (BTPN Culture Initiative) Communication Seminar & Gathering	BTPN CLCS Directorate
6 Maret 2023	Senior Leaders' Briefing Q1 2023	BTPN Corporate Communications
14 Maret 2023	Leadership Series 1 Creating Strategy to Connect The Generation Gap feat Yoris Sebastian (co founder Inspigo)	BTPN Human Resources
20 Maret 2023	Webinar UU Perkembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Implikasi Pada Sektor Pasar Modal	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
11 April 2023	Seminar "UU P2SK sebagai Penguatan Sektor Keuangan bagi Konsumen dan Industri Keuangan"	ICSA & Hukumonline
18 Mei 2023	LDA - Cultural Intelligence Workshop	SMBC Learning Development Asia
22 Mei 2023	Senior Leaders' Briefing Q2 2023	BTPN Corporate Communications
25 Mei 2023	Understanding the Key Elements of Green, Social, and Sustainability Bonds	IDX-UNDP
6 Juni 2023	Economic Outlook Update by Creco (Bapak Raden Pardede)	BTPN Corporate Secretary
8 Juni 2023	Pendalaman POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	ICSA
8 Juni 2023	Digital Knowledge Sharing (LCAPD-AGMD-BTPN) of Year 2023	LCAPD-AGMD-BTPN
13 Juni 2023	AEI Gathering - Diskusi Strategi dan Penerapan UU P2SK Bagi Perusahaan Terbuka	AEI
14 Juni 2023	Leadership Series on Learning Festival (Offline): "Managing Global Business Risks : A Proactive ft Tantowi Yahya	BTPN Learning
21 Juni 2023	Sosialisasi PLPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan	BTPN Compliance
26 Juni 2023	Sosialisasi Peraturan Nomor I-L tentang Suspensi Efek, Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus, dan Peraturan Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan	IDX
27 Juni 2023	Webinar Non Regulatory "Strengthening the Board's Succession: A Framework for Board Performance & Evaluation"	ICSA

Tanggal	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Penyelenggara
6 Juli 2023	Media Training	BTPN Learning
12 Juli 2023	Sosialisasi ketentuan OJK mengenai APU dan PPT	BTPN Compliance dan BTPN AML CFT
1 Agustus 2023	Sosialisasi POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	BTPN Compliance
2 Agustus 2023	Strategi Ketahanan Perlindungan Data pada Perusahaan	ICSA
11 Agustus 2023	Sosialisasi Refreshment Ketentuan OJK BMPK	BTPN Compliance
16 Agustus 2023	Senior Leaders' Briefing Q3 2023	BTPN Corporate Communications
22 Agustus 2023	Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik	IDX
24 Agustus 2023	Pendalaman SEOJK No. 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum	ICSA
7 September 2023	Sosialisasi Pelaksanaan Registrasi Informasi Sensitif Bank	BTPN Cyber Security Risk
14 September 2023	Musyawarah AEI dan Seminar Optimalisasi Penerapan UU Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Pengembangan Pasar Modal Indonesia- IDX Dinamika Ekonomi Global & Implikasinya Terhadap Perekonomian Nasional" by menko Dinamika Ekonomi Politik & Implikasinya Terhadap Dunia Bisnis"	AEI
20-22 September 2023	CLCS Workshop dan Gathering	BTPN CLCS Directorate
6 Oktober 2023	Seminar Free Float dan Penggunaan Form E009 pada Sistem Pelaporan SPE	BEI dan AEI
7 November 2023	Sustainability Town Hall	BTPN Corporate Communications dan SMBC
9 November 2023	ASEAN Corporate Governance Scorecard Revised October 2023	ICSA
10 November 2023	Corporate Secretary Workshop dan Gathering	BTPN Corporate Secretary
27 November 2023	Undangan Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	ICSA
30 November 2023	Risk and Governance Summit 2023	OJK

FUNGSI KEPATUHAN

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank BTPN, terutama merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi kepatuhan Bank Umum, Fungsi Kepatuhan. Regulasi tersebut menguraikan bahwa Fungsi Kepatuhan merupakan langkah preventif (*ex-ante*) Bank agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan OJK serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Fungsi Kepatuhan juga memastikan terciptanya kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK maupun otoritas lainnya. Penerapan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, Bank Indonesia maupun peraturan perundangan yang berlaku telah menjadi komitmen BTPN, sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*) Bank dan Kebijakan Kepatuhan.

Pentingnya penerapan kepatuhan tersebut juga sebagai respons atas kesadaran bahwa perbankan merupakan industri yang diwajibkan menerapkan kepatuhan lebih ketat (*highly regulated*) dibandingkan industri lainnya. Tingkat kepatuhan yang ketat itu, terutama berkenaan dengan misi publik dan tanggung jawab terhadap dana masyarakat.

Selain itu, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang begitu pesat dapat menimbulkan potensi risiko kepatuhan bagi Bank. Karena itulah, upaya mitigasi potensi risiko kepatuhan menjadi sangat penting.

Hal tersebut dapat terwujud melalui peningkatan peran dan tanggung jawab kepatuhan pada setiap jenjang organisasi serta efektivitas peran fungsi Satuan Kerja Kepatuhan yang ada pada Bank. Dengan demikian, segala potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Pemenuhan kepatuhan Bank dilakukan secara komprehensif dan terstruktur. Tujuannya, terutama sebagai upaya pencegahan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Bank telah sejalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam organisasi BTPN dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang disebut dengan Divisi Compliance yang independen sebagaimana peraturan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Sesuai ketentuan regulasi, Bank juga telah memiliki Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Berikut disampaikan struktur organisasi Divisi Kepatuhan:

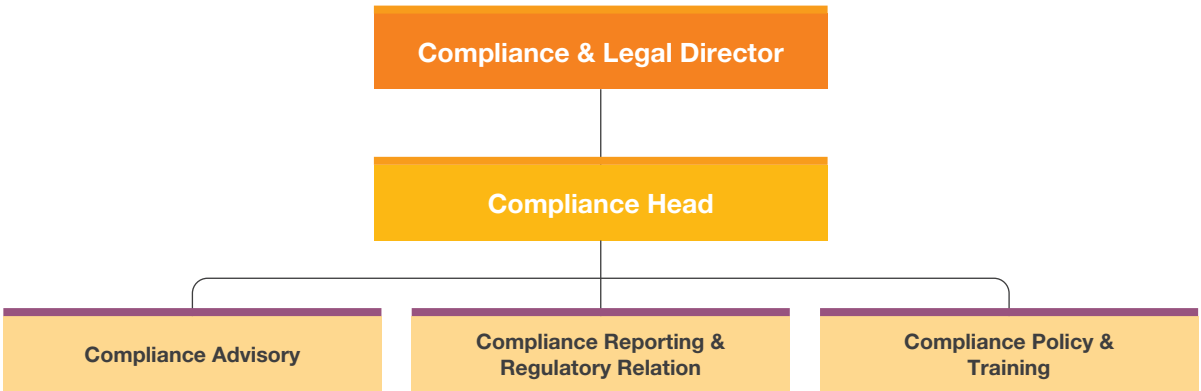

DASAR HUKUM

Pedoman utama Bank dalam menjalankan fungsi kepatuhan adalah peraturan Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Selain itu, Bank memperhatikan:

1. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan akan menyebabkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank;
2. Upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*);
3. Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank;

FUNGSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Bidang Kepatuhan di BTPN adalah mendukung penerapan Fungsi Kepatuhan sesuai Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Agar penerapan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan efektif, Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen sebagaimana ketentuan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tugas dan tanggung jawab organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kepatuhan

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pemutakhiran dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Merujuk pada kewajiban pemenuhan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan hal tersebut, guna memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan, Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang antara lain dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan (bulanan).
2. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan).
3. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (semesteran).
4. Laporan hasil pemantauan terhadap risiko kepatuhan kepada Dewan Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada Komite Audit secara berkala.

Direksi dan Dewan Komisaris juga telah menyetujui kebijakan kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan melalui pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, termasuk memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

FOKUS FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, fokus penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain meliputi:

1. Kaji ulang atas kebijakan utama Bank berupa *Corporate Governance Manual* dengan pengembangan penerapan dalam Grup Keuangan.
2. Kaji ulang atas seluruh kebijakan operasional Bank, termasuk kaji ulang terhadap kebijakan kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.
3. Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, produk program, aksi perusahaan maupun transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit serta pelaksanaan Kajian Kepatuhan terhadap inisiatif selain kebijakan, produk program, tindakan korporasi, keputusan transaksional (kredit) dengan kewenangan limit Komite Kredit guna memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga dilakukan Kajian Risiko Kepatuhan terhadap inisiatif produk dan/atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Regulator (OJK/BI) yang merupakan hasil analisis aspek kepatuhan atas produk dan/atau aktivitas dimaksud.
4. Sosialisasi peraturan baru OJK, BI dan LPS kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait melalui email maupun secara virtual, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Terhadap peraturan baru yang memerlukan tindak lanjut dilakukan pemantauan guna memastikan pemenuhan tindak lanjut peraturan baru telah dilaksanakan oleh Bank. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ulang terhadap peraturan lama yang berdampak kepada produk dan aktivitas Bank kepada unit terkait.
5. Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku dalam setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas serta kebijakan; baik baru, pengembangan maupun kaji ulang tahunan melalui rapat koordinasi, media elektronik dan lain-lain.
6. Pelaksanaan *self-assessment* Risiko Kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara triwulan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan Bank.
7. Pelaksanaan *Compliance Self Assessment* (CSA) guna memastikan penerapan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan perundangan yang berlaku maupun peraturan SMBC (sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank yang juga merupakan *Global Systemically Important Bank* (G-SIB)).
8. Pelaksanaan pemeriksaan mandiri (*Compliance Self Review*) sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan Budaya Kepatuhan seluruh karyawan terhadap penerapan ketentuan OJK dan BI serta ketentuan peraturan perundangan

maupun ketentuan SMBC, termasuk pelaksanaan survey kepada seluruh karyawan guna memastikan pemahaman karyawan terhadap Risiko Kepatuhan. Pelaksanaan CSR merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban Bank BTPN sebagai subsidiary dari SMBC Group.

9. Pelaksanaan *Compliance On-site Review* (*Branch Review*) oleh AML Compliance Champion (ACC) yang merupakan bagian dari aktivitas Divisi Kepatuhan dan Divisi Anti Money Laundering & CFT dalam melakukan proses pemantauan penerapan kepatuhan cabang dan juga untuk menjaga konsistensi kepatuhan cabang terhadap peraturan yang berlaku serta untuk menghindari kesenjangan dalam penerapan kepatuhan di kantor pusat dan di kantor-kantor cabang.
10. Pelaksanaan evaluasi terhadap kajian yang dilakukan oleh unit terkait atas penyebab timbulnya serta tindak lanjut atas sanksi denda dari Regulator (OJK dan/atau BI) guna memitigasi timbulnya sanksi denda berulang dan dalam rangka peningkatan *internal control* Bank, termasuk pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut atau langkah perbaikan yang dilakukan sesuai hasil kajian.
11. Pemantauan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah sesuai ketentuan OJK terkait Sinergi Perbankan.
12. Penyempurnaan *compliance process* antara lain melalui penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit Kepatuhan berupa sistem *monitoring* terhadap pemenuhan tindak lanjut peraturan OJK dan/atau BI, pemenuhan temuan pemeriksaan Regulator dan lain-lain.
13. Penyelenggaraan pelatihan guna memperkuat Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank kepada seluruh karyawan, antara lain pelatihan *Refreshment Compliance Awareness* termasuk *Compliance Declaration*, *Refreshment* APU & PPT serta Hiburan & Hadiah (*Entertainment & Gift*) yang dilaksanakan melalui *e-learning*. Selain itu juga dilakukan sosialisasi topik-topik yang berkaitan dengan *Anti-Bribery & Corruption* (ABC) kepada seluruh karyawan melalui media internal Bank.
14. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pada Direktorat Kepatuhan & Legal dalam rangka pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta kompetensi lainnya mengikuti perkembangan di industri perbankan lainnya.

STRATEGI PENERAPAN KEPATUHAN

Bank telah memiliki strategi untuk menciptakan kepatuhan secara berkesinambungan di lingkungan organisasi Bank. Rincian strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendampingan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan kepatuhan pada semua lini bisnis/*support*. Dalam hal ini terutama pada area unit bisnis yang akan menyelenggarakan produk/inisiatif baru, unit yang terkait dengan *regulatory reporting*, serta unit yang terkait dengan pemenuhan *prudential ratio* seperti rasio KPMM, GWM, PDN, NPL, BMPK, NSFR, LCR, Leverage Ratio, dan RPIM.
2. Meningkatkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank melalui antara lain :
   a. Peningkatan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank melalui sosialisasi ketentuan OJK, BI dan LPS.
   b. Pemberian pelatihan kepada semua staff dan peningkatan *awareness* akan *compliance culture,* baik di kantor pusat ataupun di cabang.
   c. Menyelenggarakan mandatory e-learning untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan.
3. Meningkatkan pengawasan dan awareness atas risiko kepatuhan dengan menyelenggarakan *Compliance Self Assessment*, *Compliance Self Review*, *Thematic Review*, *Compliance on-site Review* (*Branch Review*) dan juga diskusi internal dalam rangka memberikan masukan kepada unit terkait.

Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan (OJK, BI dan LPS) dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan dengan mengevaluasi pedoman internal, tindakan korporasi maupun keputusan transaksional (kredit) yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit dan fungsi *advisory*.

SOSIALISASI BIDANG KEPATUHAN

Sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan sosialisasi ketentuan baru OJK, BI dan LPS melalui media email maupun virtual kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ketentuan lama yang berdampak kepada produk dan aktivitas Bank kepada unit terkait.

FUNGSI KEPATUHAN

Guna meningkatkan pemahaman karyawan cabang dilaksanakan pula sosialisasi ketentuan OJK, BI, LPS serta peraturan SMBC yang dilaksanakan secara daring maupun luring oleh AML Compliance Champion (ACC) yang merupakan bagian dari aktivitas Divisi Kepatuhan dalam meningkatkan *awareness* dan pemantauan penerapan kepatuhan cabang.

INSIATIF KEPATUHAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Bank telah merealisasikan sejumlah inisiatif terkait dengan kepatuhan, di antaranya:

1. Pelaksanaan evaluasi terhadap kajian yang dilakukan oleh unit terkait atas penyebab timbulnya serta tindak lanjut atas sanksi denda dari Regulator (OJK dan/atau BI) guna memitigasi timbulnya sanksi denda berulang dan dalam rangka peningkatan *internal control* Bank, termasuk pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut atau langkah perbaikan yang dilakukan sesuai hasil kajian.
2. Penyempurnaan *compliance process* antara lain melalui penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit Kepatuhan berupa sistem *monitoring* terhadap pemenuhan tindak lanjut peraturan OJK dan/atau BI, pemenuhan temuan pemeriksaan Regulator dan lain-lain.
3. Pelaksanaan Project Regulatory Reporting Governance & Process Review (Project RRG&PR) yang bertujuan untuk meningkatkan *time efficiency* dari sumber daya yang ada, meningkatkan *critical process maturity* dalam pengelolaan kepatuhan pelaporan, dan mengurangi eksposur risiko kepatuhan dalam hal ini potensi denda yang mungkin timbul.

INTERNAL FRAUD

DASAR PENCEGAHAN TINDAKAN KECURANGAN (*FRAUD*)

Bank BTPN menerapkan *zero tolerance* terhadap setiap kejadian *fraud*. Karena itu, Bank senantiasa menindaklanjuti setiap kejadian *fraud* yang terjadi, termasuk memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan serta yang terlibat dalam kejadian *fraud*, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib (bilamana diperlukan).

Selain itu, Bank berkomitmen untuk melakukan pencegahan terhadap segala bentuk kejadian *fraud* dan segera menindaklanjutinya untuk mengurangi dampak kerugian bagi nasabah, dan/atau Bank, termasuk mengelola reputasi Bank atas adanya publikasi negatif yang dapat berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Bank.

Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi untuk ikut berperan secara aktif melindungi, menjaga aset, dana nasabah dan kepentingan *stakeholders* dengan mematuhi seluruh ketentuan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD

Dalam mengelola risiko *fraud*, Bank melakukan penerapan strategi anti-*fraud* yang dikoordinir oleh Divisi OFRM. Divisi OFRM bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pengendalian risiko *fraud* di BTPN dilakukan secara sistematis melalui penerapan strategi *anti-Fraud* yang diwujudkan dalam 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. **Pencegahan.**
   Program pencegahan *anti-fraud* dalam rangka mengurangi potensi adanya kejadian *fraud*, yang sekurang-kurangnya meliputi penandatanganan

Pakta Integritas *Anti-Fraud* dan Kode Etik, pelatihan (*offline* , *online*/virtual maupun dalam bentuk *e-learning*) kepada seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris, melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan strategi *anti-fraud* secara berkala, melakukan kajian risiko fraud atas setiap produk, proses, sistem dan inisiatif baik baru maupun pengembangannya, serta melakukan pelatihan kesadaran *anti-fraud*, menambahkan klausul disetiap perjanjian kerjasama serta mengirimkan surat pemberitahuan kepada vendor dan mitra yang bekerjasama dengan Bank secara berkala, agar melaporkan melalui saluran *whistleblowing* apabila menemukan indikasi/ kejadian *fraud*.Hal ini dilakukan agar vendor dan mitra yang bekerjasama dengan Bank dapat turut serta membantu Bank dalam menjaga tata kelola perusahaan terutama dalam aspek penerapan manajemen risiko *fraud* dengan baik.

2. **Deteksi**
   Program dan perangkat dalam rangka mendeteksi kejadian *fraud* yang paling kurang meliputi mekanisme *whistleblowing, surprise audit*, dan *surveillance system*.

3. **Investigasi**
   Proses investigasi, pelaporan dan sanksi atas kejadian fraud yang paling kurang meliputi standar investigasi, mekanisme pelaporan dan mekanisme pengenaan sanksi.

4. **Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut**
   Memantau, mengevaluasi dan memonitor penyelesaian tindak lanjut atas kejadian *fraud* oleh Divisi OFRM bekerja sama dengan seluruh satuan kerja terkait lainnya.

Divisi OFRM melakukan pelaporan atas penerapan strategi *anti-fraud* di Bank kepada Direktur Utama melalui rapat Komite Manajemen Risiko setiap bulannya dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko setiap 3 (tiga) bulan. Selain itu, Divisi OFRM juga melakukan pelaporan atas penerapan strategi anti-*fraud* kepada Regulator (BI/ OJK/LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN DI BANK

Berikut ini jumlah dari kejadian Internal Fraud yang memiliki dampak signifikan dan telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan kriteria yang diatur di dalam ketentuan Bank BTPN.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Telah diselesaikan	-	-	4	1	-	1
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaikannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	4	1	-	1
Total *Fraud*	**-**	**-**	**4**	**1***	**-**	**1***

*) 1 Kejadian yang dilakukan secara bersama.

ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT DAN PPPSPM)

Bank BTPN menyusun program APU PPT PPPSPM sebagai upaya pencegahan risiko menjadi sarana tindak pidana Pencucian Uang (TPPU), Pendanaan Teroris (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Penerapan program APU PPT PPPSPM tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, serta *best practice* yang berlaku pada grup SMBC global.

INTERNAL FRAUD

Unit Kerja Khusus APU, PPT, dan PPPSPM

Divisi *Anti Money Laundering/Combating Financing of Terrorism* (AML CFT) ditunjuk sebagai Unit Kerja Khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Divisi AML independen dan secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).

Divisi AML melakukan pemantauan secara berkesinambungan dan melakukan pengujian terhadap pemenuhan seluruh program APU, PPT, dan PPPSPM oleh Bank, serta melakukan pelaporan untuk menginformasikan manajemen atas kualitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Divisi AML CFT juga mendapatkan dukungan dari perwakilan staf AML (AML *Compliance Champion/ACC*) yang ditempatkan di 6 region untuk memudahkan supervisi atas pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM yang dilakukan di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia.

Struktur organisasi Divisi AML CFT

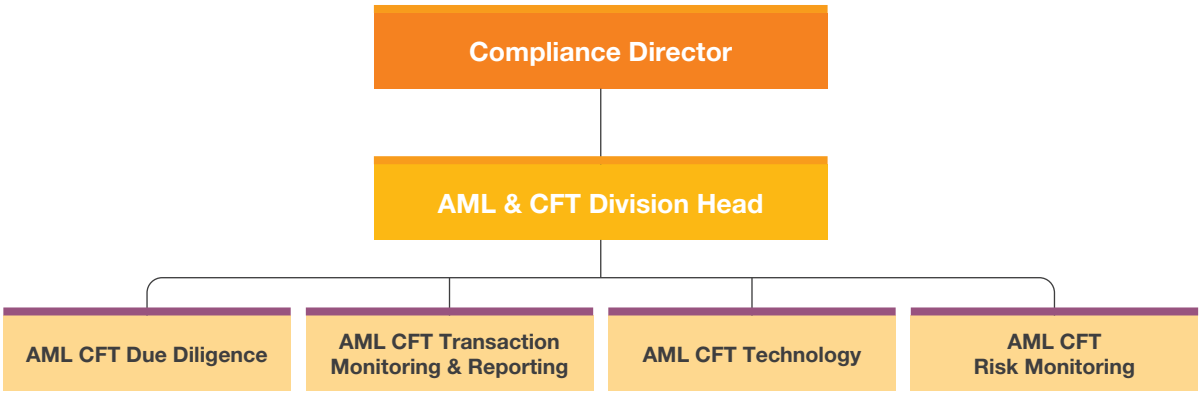

Sosialisasi Program APU, PPT, dan PPPSPM

Pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM memerlukan komitmen bersama dengan seluruh *stakeholder,* dari jenjang karyawan hingga jajaran manajerial. Karenanya, Bank BTPN terus melakukan sosialisasi program APU, PPT, dan PPPSPM secara berkala kepada semua karyawan, serta secara dinamis kepada unit kerja tertentu dalam bentuk materi spesifik yang relevan. Upaya tersebut akan terus dilakukan secara berkesinambungan di lingkungan Bank, untuk meningkatkan budaya kepatuhan di seluruh level organisasi Bank serta kesadaran akan dampak risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pendanaan Teroris (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) terhadap kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Tahun 2023

Produk dan layanan jasa keuangan yang dimiliki Bank semakin berkembang, antara lain ditandai dengan pengembangan dan penggunaan teknologi informasi pada produk dan jasa keuangan. Seiring dengan hal itu, Bank berhadapan dengan potensi tingginya risiko produk serta jasa keuangan Bank digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Bank mengimbangi peningkatan risiko tersebut melalui peningkatan kualitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara berkesinambungan. Upaya tersebut didasarkan pada pendekatan berbasis risiko dalam mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada semua produk dan jasa keuangan yang dimiliki Bank.

Bank turut berkontribusi aktif dalam program regulator di Indonesia untuk mendukung penguatan sektor jasa keuangan, antara lain melalui penilaian integritas lembaga keuangan (*Financial Integrity Rating on Money Laundering/Terrorism Financing* (FIR on ML/TF) yang dilaksanakan oleh PPATK setiap tahun.

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan mendukung integritas penerapan prinsip tata kelola perusahaan, Bank menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM Bank. Pelaksanaan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM diinformasikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat berkala Direksi dan Dewan Komisaris, maupun melalui laporan berkala/*ad hoc*.

2. Kebijakan dan Prosedur

Bank telah melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur yang ada untuk menyelaraskan dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 pada 14 Juni 2023, yang mengatur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada sektor jasa keuangan di Indonesia, serta amandemen atas SMBC AML Global Procedure dan SMBC AML Regional Policy di tahun 2023. Divisi AML, bersama dengan Divisi Compliance, telah melakukan sosialisasi atas Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 pada tanggal 12 Juli 2023. Bank juga telah melakukan reviu tahunan atas SOP Unit Kerja di Divisi AML untuk menyelaraskan dengan penyempurnaan kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM Bank.

3. Pengendalian Internal

Untuk memastikan adanya sistem pengendalian intern yang efektif, Bank menetapkan batasan wewenang dan tanggung jawab unit kerja terkait pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM serta melakukan pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program tersebut. Unit Bisnis dan kantor cabang bertindak sebagai garis terdepan/lini pertahanan pertama pelaksana aktivitas bisnis Bank dengan tetap mematuhi kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM Bank.

Pemeriksaan secara independen dilakukan oleh Tim *Quality Assurance* (Direktorat *Operations*) dan Divisi AML sebagai lini pertahanan kedua. Tim Quality Assurance memastikan mutu proses pada semua cabang termasuk proses APU, PPT, dan PPPSPM. Divisi AML melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM serta perkembangan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM. Divisi AML juga memberikan konsultasi dan kajian risiko APU, PPT, dan PPPSPM atas pengembangan produk, jasa, mekanisme distribusi, dan teknologi yang dimiliki Bank. Audit, sebagai lini pertahanan ketiga, melakukan pemeriksaan kualitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM Bank yang dilakukan oleh lini pertama dan lini kedua.

4. Sistem Informasi Manajemen

Bank memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung program APU, PPT, dan PPPSPM, meliputi sistem yang digunakan untuk proses identifikasi dan penyaringan nasabah, penilaian profil risiko nasabah, pemantauan dari pemutakhiran data nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta sistem pelaporan kepada semua pemangku kepentingan. Sistem pemantauan transaksi nasabah juga dipastikan dapat mendukung Bank dalam melakukan analisa atas *alert* pemantauan transaksi Nasabah serta mengidentifikasi transaksi yang harus ditindaklanjuti (pemblokiran, penundaan, penghentian, ataupun penolakan transaksi) dan laporan ke pihak otoritas sesuai ketentuan yang berlaku. Reviu skenario *alert* pemantauan transaksi dilakukan setiap tahun untuk memastikan efektifitas dan mempertimbangkan modus operandi TPPU, TPPT, dan PPSPM yang terus berkembang.

Bank secara berkala melakukan penyempurnaan dan pengembangan sistem pendukung APU, PPT, dan PPPSPM tersebut untuk memastikan sistem, teknologi informasi dan jaringan distribusi yang dimiliki Bank tidak dapat disalahgunakan sebagai sarana aktivitas pencucian uang, pendanaan teroris, maupun proliferasi. Pengujian berkala juga dijadwalkan untuk mengkaji keandalan dan efektivitas sistem pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM Bank.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap regulator, Bank telah mengimplentasikan laporan melalui GoAML kepada PPATK, menggunakan sistim APOLO untuk modul pelaporan APU PPT kepada OJK, maupun Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada PPATK.

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Divisi AML secara berkala memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan serta pengembangan materi pelatihan Program APU, PPT, dan PPPSPM bagi karyawan Bank. Pelatihan program APU, PPT, dan PPPSPM wajib diselesaikan oleh karyawan *existing* setiap tahun, serta pada tahap orientasi bagi karyawan baru.

Bekerjasama dengan Divisi Human Resources, Divisi AML memantau pemenuhan pelatihan berkesinambungan terkait yang wajib diikuti karyawan baru dan karyawan *existing*. Bank juga melakukan prosedur penyaringan karyawan baru (*pre-eployment screening*) dan pemantauan terhadap profil karyawan (*know your employee*), untuk memitigasi risiko TPPU TPPT dan PPSPM yang melibatkan pihak internal Bank.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank BTPN tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya dengan melaksanakan panggilan sosialnya, Bank BTPN dapat terus mempertahankan kinerja usahanya.

Terkait dengan hal itu, Bank menempatkan program tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dan integral dari kegiatan bisnis Bank. Penjelasan lebih rinci terkait hal tersebut terdapat di dalam buku Laporan Keberlanjutan.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank BTPN telah memenuhi kewajiban berkenaan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Mekanisme penyampaiannya dilakukan melalui beragam saluran komunikasi dari mengunggah melalui situs Bank BTPN, hingga disampaikan langsung kepada regulator dan pihak berkepentingan.

Selain itu, transparansi juga dilakukan melalui publikasi pada media nasional. Berikut ini, di antara rincian transparansi di bidang keuangan dan non keuangan:

Subjek Transparansi	Publikasi
Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator	Situs web
Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator	Media cetak, situs web dan saluran informasi lain
Laporan Tahunan kepada regulator, lembaga pemeringkat, pemegang saham, serta pihak berkepentingan lain	Situs web dan saluran informasi lain
Informasi Tata Kelola	Situs web
Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantor	Situs web
Pengumuman penyelenggaraan RUPS	Situs web dan saluran informasi lain
Informasi lainnya yang berkenaan dengan keterbukaan informasi	Situs web dan saluran informasi lain

Pembelian Kembali Saham atau Obligasi Subordinasi

Pembelian kembali saham dan obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan. Tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2023, Bank BTPN tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi (*share buy back* dan *buy back* obligasi).

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA DALAM JUMLAH BESAR

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Berikut adalah tabel penyediaan dana kepada pihak terkait dan eksposur besar per 31 Desember 2023.

Realisasi Penyedia Dana kepada Pihak Ketiga dan Eksposur Besar

Penyedia Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Rp Juta)
1. Kepada Pihak Terkait	13	5.865.287
2. Kepada Debitur Inti	25	77.106.340
Individu	2	2.000.000
Grup	23	75.106.340

AUDIT EKSTERNAL

KEBIJAKAN

Bank BTPN menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyusunan laporan keuangan yang diaudit setiap tahun. Untuk tahun buku 2023, yang ditunjuk adalah KAP Siddharta Widjaja & Rekan. Penunjukan tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada 13 April 2023 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi selama tahun 2023 adalah Rp15.900 juta sebelum OPE (*out of pocket expense*) dan PPN 11 %.

Akuntan Publik dan KAP tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

KAP Pelaksana Audit Laporan Keuangan Bank BTPN

Tahun Pemeriksaan	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Penanggung Jawab	Jasa yang Diberikan	Biaya (Rp Juta)
2023	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Novie, S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan Tahunan dan Interim	15.900
2022	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Novie S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	8.553
2021	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	8.351
2020	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	8.500
2019	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	7.300

AUDIT KEUANGAN INTERIM

Audit Laporan Keuangan Interim posisi 30 September 2023 telah dilakukan oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan dalam rangka Pernyataan Pendaftaran yang akan dilakukan oleh Bank BTPN, dibawah peraturan pendaftaran OJK yang berlaku, sehubungan dengan penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu di tahun 2023.

Audit mencakup BTPN dan Entitas Anak dengan total biaya untuk penugasan jasa ini sebesar Rp10.800 juta sebelum OPE (*out of pocket expense*) dan PPN 11%.

JASA LAIN NON AUDIT KEUANGAN

Jasa Lain Non-Audit Keuangan diberikan oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk jasa berkaitan dengan penerbitan surat komforta dari Akuntan Publik ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Pernyataan Pendaftaran yang akan dilakukan oleh Bank BTPN, dibawah peraturan pendaftaran OJK yang berlaku, sehubungan dengan penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu di tahun 2023.

Total biaya untuk penugasan jasa ini sebesar Rp1.350 juta sebelum OPE (*out of pocket expense*) dan PPN 11%.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki 2 (dua) fungsi.

Pertama adalah fungsi penjaminan (*assurance*). Terkait dengan fungsi ini, Internal Audit mengevaluasi proses tata kelola, pengelolaan risiko dan efektivitas pengendalian internal pada semua aspek kegiatan Bank melalui pendekatan berbasis risiko.

Kedua, fungsi konsultatif. Melalui fungsi ini, Internal Audit memberikan masukan atas pengendalian internal kepada direktorat lainnya, seperti pemberian rekomendasi atau saran perbaikan dalam berbagai pemeriksaan yang dilakukan, masukan atas draft kebijakan atau prosedur, masukan atas inisiatif utama Bank, dan lainnya.

PROFIL

Nurhajati Soerjo Hadi

Kepala Internal Audit

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	55 Tahun pada akhir tahun buku 2023
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 11 Agustus 1968
Dasar Penunjukan	Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sejak 1 Januari 2017, melalui Surat Keputusan Nomor PS/BOC/009/XII/2016 tentang Persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan Penggantian Internal Audit Head PT BANK BTPN Tbk.
Riwayat Pendidikan	*Bachelor of Art in Business Administration* dari Oregon State University, Corvallis – Oregon, USA (1991)
Riwayat Pekerjaan	• *Fraud Management Unit Head*, PT BANK BTPN Tbk (2015-2016) • *Quality Assurance and Corporate Client Execution Head,* PT ANZ Bank Indonesia (2015) • *Business Development Director* (*Business Manager*) *to International Banking*, The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta Branch (2009–2013) • *Business Development Director* (*Business Manager*) *to Executive Country*, ABN AMRO Bank N.V. / The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta Branch (2008–2013) • *Director*, PT RBS Finance Indonesia (2008–2012) • *Credit Portfolio Management Head*, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2005–2008) • *Deputy Head Financial Restructuring & Recovery* (FRR), ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2003–2005) • *Financial Restructuring & Recovery Officer*, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1999–2005) • *Relationship Manager for Corporate Banking*, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1996- 1998) • *Corporate Credit Account Officer* di PT IBJ Indonesia Bank, Jakarta (1991–1995)
Sertifikasi	• Manajemen Risiko (SMR) Level 5 • *Qualified Internal Auditor* (QIA) • *Indonesia Internal Auditor Practitioner* (IIAP)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

ORGANISASI DAN KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

Internal Audit merupakan direktorat independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Per 15 Oktober 2022, direktorat ini melakukan perubahan jumlah divisi audit dari semula 6 (enam) divisi menjadi 5 (lima) divisi sehubungan dengan penyelarasan dengan arahan manajemen mengenai visi, misi dan strategi Bank serta penerapan untuk peningkatan *span of control*.

Berikut adalah struktur organisasi yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Oktober 2022:

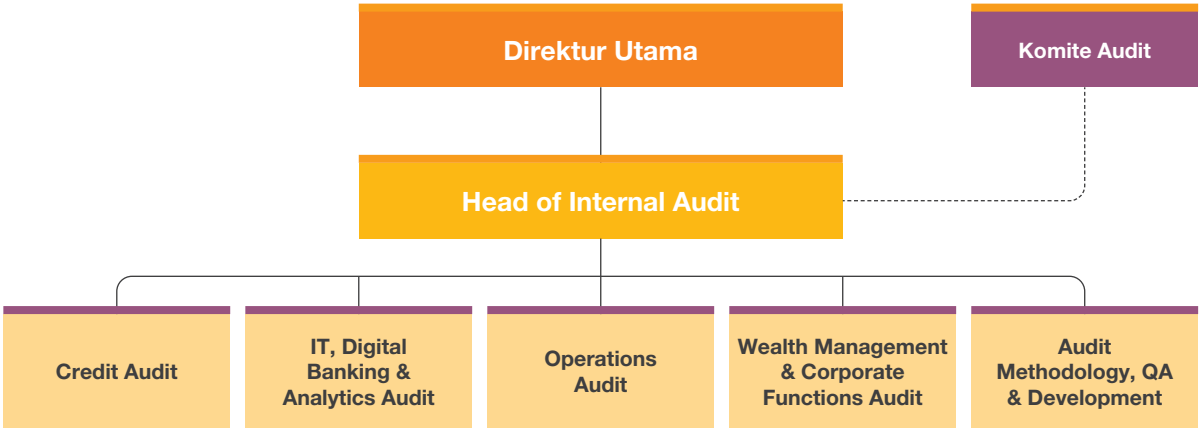

- **Divisi Credit Audit**
  Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas segala aktivitas kredit pada segmen bisnis Wholesale dan Commercial, termasuk layanan Cash Management dan Trade Finance, serta segmen bisnis Retail Lending, Bisnis Mikro, dan Business Banking.

- **Divisi IT, Digital Banking dan Analytics Audit**
  Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat Teknologi Informasi dan *Digital Banking* (Jenius), serta mendukung divisi audit lainnya dalam pemeriksaan terhadap direktorat-direktorat lain yang menggunakan dukungan teknologi. *Data Analytics* bertanggung jawab melaksanakan *continuous audit/off-site monitoring* dan mendukung penugasan audit lainnya melalui penyediaan data.

- **Divisi Operations Audit**
  Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat *Operations* baik di Kantor Pusat maupun di kantor cabang.

- **Divisi Wealth Management dan Corporate Functions Audit**
  Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap segmen bisnis Wealth Management serta fungsi-fungsi korporasi di Kantor Pusat (diluar direktorat Teknologi Informasi dan *Operations*), termasuk direktorat Treasury.

- **Divisi Audit Methodology, Quality Assurance dan Development**
  Bertanggung jawab untuk melakukan persiapan Rencana Audit Tahunan, pengembangan metodologi audit, kaji ulang atas kesesuaian aktivitas Internal Audit dengan standar yang berlaku, serta meningkatkan kompetensi staf Internal Audit melalui pemetaan pelatihan yang efektif.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Internal Audit melaporkan seluruh hasil pelaksanaan audit, termasuk rekomendasi untuk perbaikan kepada Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Secara

berkala, Internal Audit mempresentasikan hasil audit kepada Direksi dan Komite Audit, serta memberikan rangkuman atas hasil audit kepada Direktur Utama, Direksi, dan Komite Audit.

Setiap tahun Internal Audit juga menyusun Rencana Audit Tahunan berbasis risiko terkait aktivitas utama Bank. Rencana Audit didiskusikan juga bersama Direktur terkait dan Departemen Internal Asia Pasifik Audit Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC IADAP) dalam kaitannya dengan rencana kolaborasi audit agar selaras dengan arah pengembangan bisnis secara keseluruhan dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Internal Audit secara umum adalah sebagai berikut:
1. Membuat rencana audit tahunan berbasis risiko dan mendapatkan kajian serta persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
2. Mengkomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit jika terdapat keterbatasan sumber daya yang berdampak pada rencana audit tahunan.
3. Mengkaji ulang dan menyesuaikan rencana audit tahunan jika terdapat perubahan bisnis, risiko, operasional, program, sistem, dan kontrol yang signifikan. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan kembali dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan melakukan analisa dan evaluasi efektivitas Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC) guna mendukung tujuan dan sasaran Bank secara maksimal.
5. Melakukan audit konsultatif/kajian terhadap inisiatif/produk baru Bank apabila diperlukan baik oleh manajemen maupun Regulator.
6. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk perbaikan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Menyampaikan laporan audit secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi, jika relevan, yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
8. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan hasil tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.
9. Memastikan fungsi Internal Audit pada Bank berjalan dengan efektif, serta melakukan pengawasan terhadap fungsi Internal Audit pada anak perusahaan.
10. Bekerja sama dengan fungsi pengendalian intern lainnya, termasuk audit ekstern, untuk tercapainya hasil audit yang komprehensif.
11. Menyusun dan mengkaji piagam, kebijakan serta prosedur Internal Audit secara periodik.

PIAGAM INTERNAL AUDIT

Tugas dan tanggung jawab termasuk wewenang Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan serta kode etik setiap karyawan dituangkan dalam Piagam Internal Audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris. Secara berkala, Internal Audit telah melakukan kaji ulang dan penyelarasan piagam (*charter*), kebijakan serta prosedur Internal Audit dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dan Piagam Internal Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, *International Practices Professional Framework* (IPPF), Piagam Internal Audit, serta Rencana Audit Tahunan.

LANDASAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

BTPN telah memiliki standar dan metodologi dalam melakukan audit internal, yang dituangkan dalam Kebijakan Internal Audit 2023. Secara umum, kebijakan Internal Audit ini mencakup kebijakan umum, kebijakan pemeriksaan, kebijakan dokumentasi dan administrasi, serta kebijakan sumber daya. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik di lingkungan industri, di antaranya adalah:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern untuk Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) oleh Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
6. *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (IPPF).

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

SUMBER DAYA MANUSIA

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, jumlah sumber daya manusia Internal Audit sebanyak 59 orang.

Rincian Sebaran Sumber Daya Manusia

Direktorat/Divisi	Jumlah Sumber Daya Manusia
Head of Internal Audit	1
Credit Audit	11
IT, Digital Banking and Data Analytics Audit	15
Operations Audit	13
Wealth Management and Corporate Functions Audit	13
Audit Methodology, QA and Development	6
Total	**59**

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Standar Kualifikasi SDM Internal Audit

Posisi	Kualifikasi Minimum
Head of Internal Audit	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, Professional Certification related to Internal Audit
Audit Division Head	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 3, Professional Certification related to Internal Audit
Audit Lead	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 2
Senior Auditor/ Auditor	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 1

Kepemilikan Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Profesi	Jumlah Karyawan Pemilik Sertifikat
CIA (Certified Internal Auditor)	1
CISA (Certified Information Systems Auditor)	2
CISM (Certified Information Security Manager)	1
CSX (Cyber Security Nexus)	1
CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)	1
CGRCP (Certified GRC Professional & Audit)	1
IIAP (Indonesia Internal Auditor Practitioner)	1
ISC (International Cyber Security)	2
ISO 27001: 2013	1
QIA (Qualified Internal Auditor)	5
CBIA (Certified Bank Internal Audit)	18
SMR (Sertifikasi Manajemen Risiko)	57

Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi

Sertifikasi Profesi	Jumlah Karyawan
IIA (Institute of Internal Auditors)	6
ISACA (Information Systems Audit and Control Association)	5
IAIB (Ikatan Auditor Intern Bank)	Seluruh personel Internal Audit

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

Sampai dengan Desember 2023, Internal Audit telah melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan wajib sesuai regulasi seperti *Fund Transfer*, *Regulatory Reporting* (SCV dan SLIK) dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), segmen bisnis dan jaringan cabang seperti *Corporate & Wholesale Banking*, *Commercial Banking*, Retail Banking (*Wealth Management Business*), *Business Banking* (*Small Medium Enterprise* (SME) dan *Consumer Finance Business*), *Digital Banking* (termasuk penutupan bisnis BTPN Wow!), kantor cabang, serta fungsi-fungsi pendukung (*Support Functions*) termasuk Teknologi Informasi (*Information Technology*/IT), Operasional, *Risk Management*, *Financial Control*, *Corporate Communications*, *Customer Experience Management* dan *Environment, Social & Governance* (ESG). Untuk mendukung pemenuhan standar internasional terkait pengelolaan keamanan informasi (ISO 27001) pada Bank BTPN, Internal Audit juga telah melakukan pemeriksaan atas kecukupan sistem manajemen keamanan informasi, yang didukung dengan arahan dan bantuan dari pihak konsultan eksternal yang berpengalaman dalam penerapan ISO 27001.

Selain itu, hingga akhir tahun 2023, Internal Audit juga telah melakukan pemeriksaan kolaborasi (*joint audit*) bersama dengan Departemen Internal Audit Asia Pasifik Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC IADAP) atas aktivitas *Corporate and Wholesale Banking* (mencakup segmen bisnis *Corporate/Wholesale* dan

Commercial), *Risk Management* dan *Financial Control*. Pemeriksaan atas *Corporate and Wholesale Banking* dan *Risk Management* telah diselesaikan pada tahun 2023, sementara itu, pemeriksaan atas *Financial Control* telah dimulai sejak Kuartal 4 2023 dan diperkirakan akan selesai pada Kuartal 1 2024 atau mengikuti tahun fiskal SMBC IADAP, sesuai dengan Rencana Audit Tahunan 2023 yang telah disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris pada bulan November 2022.

Lebih lanjut, sebagai bentuk pengawasan perusahaan induk terhadap perusahaan anak, Internal Audit juga telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional anak perusahaan (PT Bank BTPN Syariah, Tbk.) yang dilakukan secara bersama-sama (*joint audit*) dengan Internal Audit PT Bank BTPN Syariah, Tbk. Sesuai dengan Rencana Audit Tahunan 2023 yang telah disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris pada bulan November 2022.

Tipe pemeriksaan audit yang telah selesai dilakukan adalah *mandatory audit* (3 penugasan), *general audit* (3 penugasan), *thematic audit* (12 penugasan), dan *branch audit* (4 penugasan), dengan tingkat penyelesaian sebesar 100% dari rencana audit yang telah disetujui. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, 1 pemeriksaan yang saat ini masih berjalan, yaitu *Financial Control* merupakan pemeriksaan kolaborasi (*joint audit*) dengan SMBC IADAP yang akan diselesaikan sesuai tahun fiskal SMBC IADAP, yaitu pada Kuartal 1 2024.

Atas kelemahan/temuan yang ada, unit bisnis/ unit kerja terkait telah melakukan/memiliki rencana tindak lanjut untuk perbaikan yang dipantau secara berkesinambungan oleh Internal Audit.

Selain menyelesaikan Rencana Audit Tahunan 2023, Internal Audit juga telah melakukan *consultative audit* (11 penugasan) atas kaji ulang pra dan pasca implementasi pengembangan layanan perbankan elektronik dan *digital* (Jenius, Akses Bisnis, TouchBiz), kaji ulang mutasi pembayaran pensiun, serta kaji ulang keamanan data *salary saver*. Sebagai tambahan, Internal Audit juga telah melakukan *continuous monitoring/audit* (13 penugasan) yang secara umum mencakup analisis atas kualitas data nasabah (akurasi dan kelengkapan), kewajaran transaksi nasabah dan kantor cabang, serta *continuous audit* terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Internal Audit memberikan pengkinian secara berkala atas pelaksanaan rencana audit, hasil audit, dan tindak lanjut unit bisnis/unit kerja atas temuan/ rekomendasi Internal Audit kepada Direksi, termasuk Direktur Utama (setiap 2 bulan) dan Komite Audit (setiap triwulan). Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang hasil audit selama suatu periode tertentu (semester/tahunan), setiap semester Internal Audit memberikan laporan *overview* kepada Direktur Utama, Direksi maupun Komite Audit atas potensi peluang untuk perbaikan yang ada, untuk dapat lebih memperkuat pengendalian internal atas suatu bisnis maupun fungsi pendukung lainnya.

Disamping itu, Internal Audit juga telah melakukan pertemuan dengan OJK paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 7 Desember 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No.1/POJK.03/2019. Dalam hal penerapan tata kelola terintegrasi bagi Kelompok Usaha Bank (KUB), Internal Audit secara berkala telah melakukan komunikasi antara Kepala Internal Audit BTPN dengan Kepala Internal Audit PT Bank BTPN Syariah, Tbk. (bulanan), melaksanakan pengawasan pada PT Bank BTPN Syariah, Tbk., serta mengadakan pertemuan tahunan antara Kepala Internal Audit BTPN, Kepala Internal Audit PT Bank BTPN Syariah, Tbk., dan Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah, Tbk., pada tanggal 12 Desember 2023, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam upaya menjaga dan menjamin kualitas penerapan fungsi Internal Audit, serta mengacu pada Peraturan OJK (POJK) No. 1/POJK.03/2019 mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, maka sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun Internal Audit berdasarkan rekomendasi Komite Audit menunjuk penilai independen untuk melakukan kaji ulang terhadap aktivitas Internal Audit. Pada tahun 2022, Internal Audit telah menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan sebagai pihak independen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kaji ulang dengan hasil akhir yang menyatakan bahwa aktivitas Internal Audit secara umum telah sesuai ("*Generally Conform*") dengan standar yang berlaku baik terhadap regulasi lokal (POJK) maupun internasional (IPPF). Hasil kaji ulang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Agustus 2022 dan kaji ulang berikutnya akan dilakukan pada tahun 2025 dengan tetap menunjuk akuntan publik yang independen, kompeten, dan berpengalaman.

RAPAT INTERNAL AUDIT

	Rapat dengan:		
	Direksi	Dewan Komisaris	Komite Audit
Jumlah Rapat	6	2	4

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Internal Audit sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah Peserta	Periode Pelatihan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
55	Januari-Desember 2023	*Mandatory E-Learning*	Internal
55	Januari-Desember 2023	*Online & Offline Class* (*training, workshop, sharing session*)	Internal & Eksternal

RENCANA STRATEGIS 2024

Untuk mendukung penguatan tim Internal Audit dalam menjalankan rencana audit dan pengembangan kompetensi karyawan, sejalan dengan pertumbuhan dan beberapa inisiatif utama Bank, terdapat beberapa hal yang telah direncanakan ataupun dijalankan dalam berbagai bidang sebagai berikut:

1. **Pengetahuan audit dan *soft skills*.**
   - Meneruskan pengadaan sesi pemahaman terkait proses/aktivitas Bank yang dilakukan melalui pelatihan, program sertifikasi intern maupun ekstern, penyelenggaraan *sharing* atas perkembangan strategi maupun prioritas bisnis serta pengkinian metodologi audit.
   - Melanjutkan pengadaan pelatihan terkait dengan *soft skills* yang menunjang pelaksanaan audit lapangan seperti *communication skills* dan lainnya.
   - Melakukan diskusi secara intern, baik dalam lingkup Internal Audit maupun melibatkan unit kerja lain yang relevan, mengenai perubahan ketentuan dan regulasi baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank.

2. **Meningkatkan efektivitas proses audit.**
   Internal Audit telah menggunakan *Audit Management System* (AMS) untuk membantu tim Internal Audit agar lebih efektif dalam mempersiapkan, melakukan dan menyelesaikan penugasan audit, serta memonitor tindak lanjut dari temuan audit. Saat ini Internal Audit sedang dalam proses penggantian *existing* AMS dikarenakan adanya penghentian layanan secara sepihak oleh penyedia AMS sebelumnya. Adapun AMS baru tersebut direncanakan dapat diimplementasikan pada Kuartal 1 2024. Penggantian AMS ini mencakup pengembangan atas sistem *monitoring* terkait pemenuhan tindak lanjut hasil audit ekstern serta sistem *reporting* yang dapat membantu kebutuhan pelaporan ke manajemen, regulator dan pihak ekstern terkait.

3. ***Continuous audit***
   Internal Audit kedepannya akan terus mengembangkan *continuous audit* yang dapat membantu Bank dalam menerapkan *continuous monitoring* yang tidak hanya berfokus pada lini bisnis tertentu melainkan untuk Bank secara menyeluruh.

4. **Meningkatkan kualitas *data analytics***
   Tim Internal Audit telah menggunakan perangkat lunak *Audit Command Language* (ACL) sebagai alat analisis data dan akan mengembangkan '*Internal Audit Dashboard*' untuk menghasilkan beberapa informasi seperti kinerja masing-masing lini bisnis, anomali data, *Macro Risk Assessment* (MRA), *early warning* dan informasi lainnya yang bersifat *near real-time* serta dapat dikinikan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk membantu tim Internal Audit dalam melakukan analisis data sehingga dapat meningkatkan pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit*) dengan lebih efektif dan memberikan masukan yang bernilai tambah bagi Bank.

5. **Perbaikan kualitas Internal Audit yang berkelanjutan**
   Internal Audit secara berkesinambungan akan menjalin kerjasama dengan institusi dan asosiasi terdepan di bidang perbankan dan internal *auditing* yang dapat memberikan wawasan, saran dan alat untuk mendorong peningkatan kualitas Internal Audit.

Rencana Audit Tahunan untuk tahun 2024 telah disusun dan disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris pada bulan November 2023.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

Bank BTPN menerapkan sistem pengendalian intern sebagai bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh manajemen Bank. Sistem tersebut ditujukan untuk menjamin semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, maupun kebijakan dan prosedur internal Bank.

Sistem pengendalian intern juga turut berperan dalam rangka tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Hal ini dilakukan dalam rangka:

1. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian;
3. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) dan kedisiplinan pada organisasi Bank secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini; dan
4. Menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain:

1. Dewan Komisaris
2. Komite Audit
3. Direksi
4. Satuan Kerja Kepatuhan
5. Satuan Kerja Manajemen Risiko
6. Satuan Kerja Keuangan
7. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
8. Pejabat dan Pegawai Bank
9. Pihak Eksternal

PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL

Bidang Keuangan

Penyediaan laporan keuangan Bank yang dapat dipercaya berpedoman pada sistem pengendalian intern yang efektif. Kecukupan kebijakan, prosedur dan standar akuntansi yang dapat mencerminkan kondisi aktual saat ini, termasuk pemisahan tugas, pencatatan dan pengadministrasian transaksi menjadi faktor-faktor pengendalian yang dapat mendukung terwujudnya laporan keuangan yang andal dan terpercaya.

Bidang Operasional

Direksi dan Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) dan disiplin pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Dengan demikian, dapat mendorong terciptanya pelaksanaan kegiatan operasional yang sehat dan aman.

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Selain menjadi pedoman dalam pengendalian di bidang keuangan dan operasional, pelaksanaan sistem pengendalian intern Bank juga bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

KESESUAIAN DENGAN COSO

Sistem pengendalian intern Bank terdiri dari 5 (lima) komponen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. **Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)**

   Pengawasan oleh manajemen merupakan landasan utama dari sistem pengendalian intern. Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan dan prosedur, serta struktur organisasi yang ditetapkan telah memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh Bank. Selain itu, secara berkala Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan dan kaji ulang terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

   Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh karyawan Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank.

2. **Identifikasi dan Penilaian Risiko (Risk Recognition and Assessment)**

   Identifikasi dan penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Risiko yang mempengaruhi pencapaian sasaran harus diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikelola secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pengendalian intern perlu segera dikaji ulang apabila terdapat risiko yang belum dikendalikan.

   Kaji ulang dilaksanakan antara lain melalui evaluasi secara berkesinambungan mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian sasaran atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan dan organisasi Bank.

3. **Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*)**

   Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan secara tepat guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten telah dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan pengendalian diterapkan pada seluruh tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank.

   Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang pada seluruh jenjang organisasi tidak memiliki peluang untuk melakukan dan/atau menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi yang dikenal sebagai "*Four-Eyes Principle*". Sistem pengendalian intern yang efektif mensyaratkan pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus diidentifikasi, dikelola dan dipantau oleh pihak independen, seperti akuntan publik.

4. **Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (Accountancy, Information, and Communication)**

   Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (Monitoring Activities and Correcting Defficiencies)

Bank harus melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama harus diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan Bank, termasuk evaluasi secara berkala. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern secara terus-menerus berkaitan dengan perubahan kondisi intern dan ekstern, serta meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut agar senantiasa terlaksana secara efektif.

Kelemahan dalam pengendalian intern harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kelima komponen utama tersebut sejalan dengan komponen pengendalian yang ditetapkan dalam *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO), yaitu *Control Environment* (CE); *Risk Assessment* (RA); *Control Activities* (CA); *Information and Communication* (IC); serta *Monitoring Activities* (MA).

TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank telah memiliki mekanisme *review* atas penerapan sistem pengendalian internal secara berkala. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Internal Audit yang membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara langsung dan tidak langsung. Internal Audit secara proaktif bersama-sama dengan Komite Audit berkomunikasi dan bekerja sama dengan Auditor Eksternal untuk menghasilkan analisis dan evaluasi yang komprehensif di bidang keuangan dan akuntansi. Secara umum, penerapan sistem pengendalian intern Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Berpegang pada pedoman tersebut, Bank menyempurnakan penilaian hasil audit yang mencakup evaluasi atas kecukupan dan efektivitas desain serta implementasi pengendalian intern berdasarkan pendekatan kerangka pengendalian intern.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dilakukan oleh Direksi, pejabat dan komite eksekutif, audit intern, serta seluruh karyawan. Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai dasar untuk mencapai tujuan dalam melindungi dan meningkatkan nilai Bank.

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian intern yang efektif agar Bank dapat mencapai tujuannya. Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Audit, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa pengendalian intern dilakukan secara luas, termasuk kebijakan terkait pengendalian intern yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Sistem pengendalian intern dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko secara efektif, bukan untuk menghilangkan risiko. Berikut unsur-unsur utama yang dapat mendukung pernyataan atas kecukupan sistem pengendalian intern:

1. Laporan keuangan yang andal dan akurat;
2. Kegiatan operasional yang dilakukan secara efektif dan efisien;
3. Kepatuhan terhadap perundangan dan ketentuan yang berlaku.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2023, Tidak terdapat perkara penting yang dapat mempengaruhi posisi keuangan atau likuiditas Bank BTPN.

SANKSI ADMINISTRASI

Rincian sanksi diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Penerima Sanksi	Otoritas	Sanksi/Denda
1	Perusahaan	1. OJK	78.550.000
		2. BI	4.900.000
		3. Kementerian Keuangan	40.775.691
2	Direksi	-	-
3	Dewan Komisaris	-	-

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank BTPN telah menyediakan akses dan kemudahan akses informasi terkait dengan Bank bagi para pemangku kepentingan melalui beragam media komunikasi. Di antaranya melalui:

Saluran Informasi	Alamat
Situs web (Bahasa Indonesia dan Inggris)	www.btpn.com
Call Center	1500300 (BTPN Care), +62 21 2450 5500 (International Call)
E-mail Sekretaris Perusahaan	corporate.secretary@btpn.com
E-mail Komunikasi Korporasi	corporate.communications@btpn.com
E-mail Pengaduan Nasabah	btpncare@btpn.com
Keterbukaan Informasi melalui website Bank dan Bursa Efek Indonesia	www.btpn.com dan www.idx.co.id
Siaran Pers	www.btpn.com dan distribusi melalui media
Media Sosial	Facebook : Bank BTPN Official Twitter : @sahabatBTPN Youtube : BTPN LinkedIn : PT Bank BTPN Tbk Instagram : @lifeatbtpn

KODE ETIK

Kode etik berfungsi sebagai pedoman dasar bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan seluruh karyawan dalam bersikap dan berperilaku. Bank selalu melakukan kajian secara terhadap kode etik agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, praktik terbaik di industri, serta kondisi eksternal yang relevan.

Prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam kode etik merupakan elemen utama dari budaya di Bank BTPN, yang antara lain memuat:

SPEAK YOUR MIND

Merupakan saluran pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya, sehingga karyawan dapat mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan/atau kejadian *fraud*.

KOMUNIKASI LINK & HELP

Dalam berkomunikasi, seluruh jajaran Bank BTPN diharapkan mengunakan prinsip LInK dan HELP. LInK yang merupakan singkatan dari Laporkan, Informasikan, dan Konsultasikan, serta HELP yang merupakan singkatan dari Hargai, Evaluasi, Lakukan dan Petunjuk, yang memiliki tujuan dan manfaat di dalam mempromosikan transparansi, pengkinian yang tepat waktu, tidak adanya kejadian yang mengejutkan yang tidak bisa ditangani bersama, menegakkan rasa saling percaya dan meningkatkan keandalan, memperoleh manfaat dari kebijaksanaan dan pengalaman di masa lalu.

POKOK-POKOK KODE ETIK

1. Kepatuhan & Manajemen Risiko
2. Benturan Kepentingan
3. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif
   - 3.1. Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan
   - 3.2. Anti Diskriminasi dan Pelecehan
   - 3.3. Keamanan di tempat kerja
   - 3.4. Penggunaan Fasilitas Perusahaan
   - 3.5. Aktivitas di luar Perusahaan
   - 3.6. Penggunaan Sosial Media
   - 3.7. Komunikasi dengan LInK dan HELP
   - 3.8. Penerapan KYE
4. Pengelolaan & Pengamanan Informasi
5. Hubungan dengan Para Pemangku Kepentingan
   - 5.1. Hubungan dengan Nasabah dan Masyarakat Pengguna Jasa Keuangan
   - 5.2. Hubungan dengan Rekanan atau Mitra Usaha
   - 5.3. Hubungan dengan Regulator
   - 5.4. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan
   - 5.5. Hubungan dengan Komunitas Sosial dan Lingkungan Hidup
   - 5.6. Anti Pencucian Uang
   - 5.7. Penyuapan dan Korupsi
   - 5.8. Pemberian dan Penerimaan Hiburan dan Hadiah
   - 5.9. Informasi Orang Dalam dan Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi
   - 5.10. Perlindungan Konsumen

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sekaligus membangun perilaku yang sesuai standar etika Bank, Bank BTPN telah melaksanakan Induction Program untuk eksekutif dan karyawan baru terkait kode etik. Selain itu, secara berkala, dilakukan sosialisi kode etik untuk memberikan pemahaman bagi karyawan serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik.

Pernyataan Kode Etik Berlaku pada Seluruh Level Organisasi

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen yang berada di bawah Dewan Komisaris, semua karyawan tanpa terkecuali wajib untuk membaca, mempelajari, dan memahami isi kode etik. Seluruh organisasi di internal Bank harus bersedia menaati dan melaksanakan kode etik dengan sebaik-baiknya.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran atas kode etik, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bank.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi kode etik dilakukan melalui *e-mail blast* dan penyegaran melalui sistem *e-learning.* Kegiatan ini berlaku bagi seluruh jenjang di Bank, baik yang baru bergabung maupun yang lama.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Beberapa jenis pelanggaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama adalah Kelalaian Pelanggaran *Indispliner*, Pelanggaran Gagal Kompetensi, Pelanggaran Berulang Gagal Kompetensi, Pelanggaran Ringan, Pelanggaran Berulang, Pelanggaran Berat Umum, Pelanggaran Berat Kategori *Fraud*.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Kategori Sanksi
Kelalaian	26	Surat Peringatan 1
	6	Surat Peringatan Pertama & Terakhir (SPPT)
	20	Surat Teguran
Pelanggaran Berat Kategori Fraud	2	Surat Peringatan 1
	6	Surat Peringatan Pertama & Terakhir (SPPT)
Pelanggaran Berat Kategori Umum	1	Surat Peringatan 1
	1	Surat Peringatan 2
	7	Surat Peringatan Pertama & Terakhir (SPPT)
	1	Surat Teguran
Pelanggaran Berulang	5	Surat Peringatan 1
	2	Surat Peringatan 2
	1	Surat Peringatan 3
	14	Surat Teguran
Pelanggaran Gagal Kompetensi	64	Surat Peringatan 1
	35	Surat Peringatan 2
	16	Surat Peringatan 3
	120	Surat Teguran
Pelanggaran Indisipliner	2	Surat Teguran
Pelanggaran Ringan	18	Surat Peringatan 1
	2	Surat Peringatan 2
	1	Surat Peringatan Pertama & Terakhir (SPPT)
	9	Surat Teguran
Pelanggaran Ulang Gagal Kompetensi	6	Surat Peringatan 1
	7	Surat Peringatan 2
	5	Surat Peringatan 3

PRICE SENSITIVE INFORMATION PERSONAL ACCOUNT DEALING

Bank BTPN memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan pengelolaan informasi yang mempunyai dampak material pada harga atau nilai dari suatu surat berharga yang tidak tersedia secara umum (rahasia/non publik), yang berlaku terhadap Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan.

Perlakuan ini tidak hanya mencakup pada surat berharga milik Bank, namun juga surat berharga induk perusahaan atau pemegang saham pengendali, juga perusahaan lain baik yang merupakan nasabah, mitra bisnis atau perusahaan lain dalam suatu aksi korporasi.

Tindakan yang harus diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dengan pendekatan berdasarkan obyek surat berharganya yaitu sebagai berikut:

Jenis Surat Berharga	Pendekatan yang diambil
Obyek Surat Berharga yang mengandung informasi non publik (PSI)	Tindakan yang diambil sehubungan dengan Investasi/Kepemilikan Pribadi (PAD)
• SMFG • SMBC	Dilarang melakukan jual beli surat berharga SMFG dan SMBC, kecuali karena suatu perintah perusahaan
• BTPN • BTPN Syariah	Memperhatikan kategori Pihak Tertentu yang memiliki akses pada informasi non publik (*Covered Person*) dan dalam periode tertentu (*Black Out Period*)
Perusahaan Lain	Menjalankan prosedur PSI antara lain melaporkan nama perusahaan serta karyawan yang memiliki akses, karenanya terikat PSI dalam masa tertentu sampai dengan PSI dicabut. Untuk perusahaan yang terkait dengan suatu proyek, meminta pihak yang terlibat menandatangani NDA.

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan barang dan/atau jasa pada Bank merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa.

PRINSIP PENGADAAN

Prinsip yang diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa adalah bersifat efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

MEKANISME PENGADAAN

Pengadaan barang dan/atau jasa korporasi disentralisasi di Kantor Pusat. Sedangkan untuk pengadaan barang dan/atau jasa umum dengan limit tertentu dapat dilakukan oleh Kantor Cabang atau Kantor Wilayah.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Bank BTPN berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Untuk tujuan tersebut, Bank telah memiliki sarana dan sistem penyampaian laporan apabila terjadi pelanggaran, yaitu *Whistleblowing System*. *Whistleblowing System* Bank BTPN merupakan media pelaporan untuk menyampaikan adanya dugaan atau kejadian yang berhubungan dengan tindakan kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum, peraturan perusahaan, kode etik dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak internal Bank. Laporan yang dilakukan berdasarkan itikad baik dan tidak bersifat keluhan pribadi (*personal grievance*) maupun fitnah sehingga dapat menciptakan sebuah lingkungan bisnis yang bersih dan transparan.

MEKANISME PELAPORAN

Bank memiliki 5 (lima) saluran w*histleblowing* yang dapat diakses pihak internal dan eksternal untuk menyampaikan laporan, yaitu melalui media percakapan WhatsApp*, e-mail*, saluran telepon *hotline*, surat (*mail*) dan tatap muka.

Mekanisme pelaporan *whistleblowing* secara umum mencakup:

1. Pelaporan oleh *Whistleblower* (penyampaian laporan/informasi dalam 1x24 jam sejak diketahuinya dugaan/tindakan *fraud*);
2. Tindak lanjut Laporan (identifikasi, analisa, investigasi);
3. Dokumentasi (Laporan indikasi *fraud*, Laporan Hasil Investigasi); dan
4. Menjaga kerahasiaan (semua pihak bertanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas pelapor).

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Dalam kondisi tertentu, Bank dapat memberikan perlindungan hukum kepada pelapor sebagai bentuk keamanan dan keselamatan terhadap segala bentuk tekanan, ancaman atau intimidasi (misalnya pemecatan, perlakuan yang tidak adil, dan lainnya) sehubungan dengan pelaporan yang disampaikannya melalui saluran w*histleblowing*. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada keluarga inti dari pelapor (suami/istri dan anak) dengan pertimbangan tertentu oleh Bank.

PENGELOLA PENGADUAN

Divisi OFRM merupakan Penanggung jawab di Bank yang mengelola pengaduan dari pelapor termasuk menindaklanjuti bersama dengan unit kerja terkait serta melakukan pengawasan atas tindak lanjutnya.

JENIS SANKSI BAGI PELANGGAR

Pelanggaran terhadap kerahasiaan dan perlindungan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan dan Tindaklanjut Tahun 2023

Jumlah Pengaduan	Status			
	Sudah ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak Ditindaklanjuti
42	41	1	-	-

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN PENYUAPAN

Sebagai pelaksanaan dari komitmen Anti Penyuapan dan Anti Korupsi, Bank telah menerbitkan edisi perdana Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi dengan nomor penerbitan K.003/DIR/CCMP/00/2023 yang telah disosialisasikan kepada seluruh unit dan dipublikasikan pada internal web Bank- portalkita.

Adapun tujuan penerbitan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi ini pada prinsipnya antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu bentuk pernyataan prinsip dan komitmen Bank dalam mendukung praktik anti Penyuapan dan anti Korupsi;
2. Menetapkan kebijakan, memberikan pedoman serta menumbuhkan kesadaran terhadap praktik-praktik anti Penyuapan dan anti Korupsi, sehingga dapat mencegah dan menghindari praktik-praktik Penyuapan dan Korupsi yang dimaksud yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan non-finansial yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank;
3. Memberikan informasi dan panduan kepada pihak-pihak yang bekerja untuk dan atas nama Bank sehingga dapat mengenali dan menyampaikan masalah Penyuapan dan Korupsi yang terkait dengan Bank.

Bank BTPN tidak mentolerir (*zero tolerance*) atas tindakan korupsi dan segala bentuk penyuapan (termasuk kepada atau dari nasabah, mitra usaha, pejabat pemerintah, karyawan). Tindak pelanggaran atas hal tersebut dapat diproses secara perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROGRAM DAN PROSEDUR MENGATASI PRAKTIK KORUPSI DAN PENYUAPAN

Bank telah memiliki Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi yang telah memuat komitmen Bank terhadap tindakan anti Korupsi dan anti Penyuapan. Selanjutnya, setiap unit kerja dapat menetapkan ketentuan khusus pada prosedurnya dalam upaya pencegahan tindakan Korupsi dan Penyuapan sesuai dengan masing-masing bidang kerjanya, antara lain:

1. Pencegahan *fraud* pada proses identifikasi kerawanan/*Fraud Risk Assessment*
2. Pengelolaan pemberian dan penerimaan Hiburan dan atau Hadiah
3. Penetapan klausul perjanjian dengan pihak ketiga/ pemberi jasa
4. Proses pengadaan barang dan jasa oleh vendor
5. Proses rekruitmen karyawan/*Know Your Employee*
6. Pelaksanaan uji tuntas terhadap Mitra Usaha
7. Dan lainnya

Bank telah minta pernyataan serta komitmen dari semua karyawan untuk tidak melakukan korupsi dan penyuapan serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan internal perusahaan. Begitu juga dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait anti korupsi dan anti penyuapan yang tercantum dalam Deklarasi Anti Fraud & Pakta Integritas dan Kode Etik serta Deklarasi Kepatuhan setiap tahunnya.

Terkait pencegahan anti penyuapan/gratifikasi, Bank telah memiliki sistem aplikasi *Entertainment* & *Gift* (E&G) yang dapat dipergunakan sebagai alat pemantauan dan pengawasan bidang aktivitas pemberian dan penerimaan hiburan atau hadiah berdasarkan input data atau deklarasi dari karyawan. Unit terkait dengan koordinasi Divisi Compliance mengadakan pemeriksaan atas aktivitas di dalam sistem aplikasi E&G sesuai jadwal yang ditetapkan.

Bank juga telah menyediakan saluran *Whistleblowing* yang dikelola oleh Divisi Operational Fraud & Risk Management untuk menerima pelaporan indikasi Fraud termasuk Korupsi dan Penyuapan dan mengkajinya sebagai langkah tindak lanjut

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTIKORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN KEPADA KARYAWAN

Bank telah melaksanakan *e-learning*, baik secara langsung atau tidak langsung berisi materi dalam rangka sosialisasi untuk menerapkan budaya anti korupsi dan anti penyuapan kepada seluruh karyawan, antara lain:

1. *e-Learning Compliance Awareness*
2. *e-Learning Entertainment & Gift*
3. *e-Learning Fraud Awareness*
4. *e-Learning Operational Risk Management*

Bank juga telah melaksanakan publikasi/kampanye anti korupsi dan anti penyuapan terkait *fraud* maupun pemberian dan/atau penerimaan hiburan/hadiah. Hal itu dilakukan melalui media elektronik (*e-mail*) kepada seluruh karyawan.

Bank juga telah menjalankan komunikasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap anti Penyuapan dan Korupsi kepada pihak eksternal Bank yaitu dengan menyampaikan surat pengingat Anti Penyuapan dan Korupsi yang ditandatangani oleh anggota Direksi kepada Pemasok dan Mitra Usaha yang telah terdaftar pada Divisi terkait di Bank yang juga berisikan informasi perihal saluran *Whistleblowing* Bank.

KETERBUKAAN DALAM PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

Pengungkapan	Penjelasan
Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan & Laporan tahunan	
Tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan	24 Februari 2023 Perusahaan menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan tepat waktu seperti ditetapkan oleh regulasi.
Tanggal penerbitan Laporan Tahunan	21 Maret 2023 Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan selalu tepat waktu seperti ditetapkan oleh regulasi.
Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan	Wajar Tanpa Modifikasian
Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi/ komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	**Tidak** Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris/Direksi, Manajemen maupun karyawan tidak pernah terlibat kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir?	**Tidak** Perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam transaksi dengan pihak berelasi.
Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan	**Tidak** Perusahaan belum pernah melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/ kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan
Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (material event)?	**Tidak** Perusahaan selalu menyampaikan informasi material kepada regulator.
Apakah perusahaan memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apa pun selama tiga tahun terakhir	**Tidak** Perusahaan tidak pernah mengalami sengketa atau permasalahan pajak apa pun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan?	**Tidak** Perusahaan telah mematuhi seluruh peraturan termasuk di luar aturan pengungkapan Laporan Tahunan.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PT BANK BTPN Tbk menyajikan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan pada buku terpisah. Laporan tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu mengacu Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Silakan merujuk pada Laporan Keberlanjutan 2023 BTPN untuk informasi lebih lengkap. Adapun yang disajikan pada halaman ini hanya “Ikhtisar Keberlanjutan”.

IKHTISAR KEBERLANJUTAN

EKONOMI

Pendapatan Operasional Bank*
(dalam triliun rupiah)

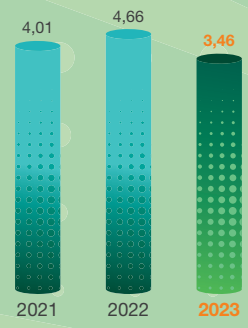

Laba Bersih*
(dalam triliun rupiah)

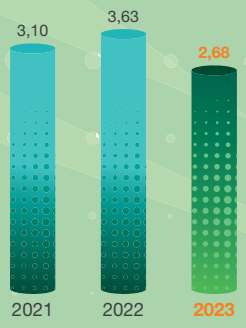

Aset*
(dalam triliun rupiah)

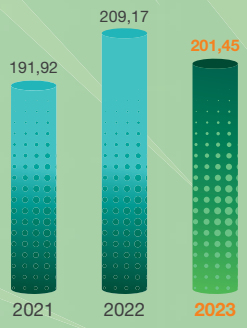

Nasabah*
(dalam Juta)

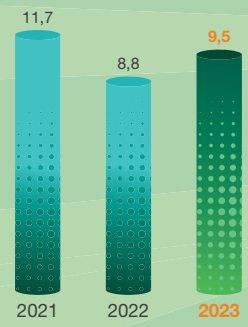

Jaringan Kantor
(Kantor)

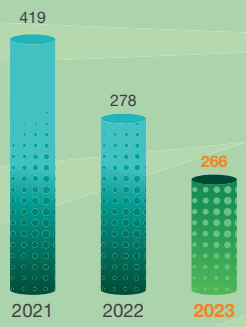

Akses
(Provinsi)

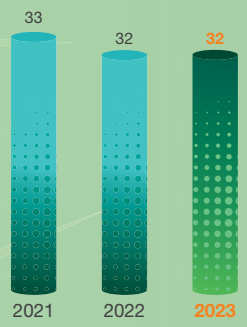

Kinerja Aspek Ekonomi Terkait Keberlanjutan

Nominal Portofolio Pembiayaan KKUB**
(dalam Juta rupiah)

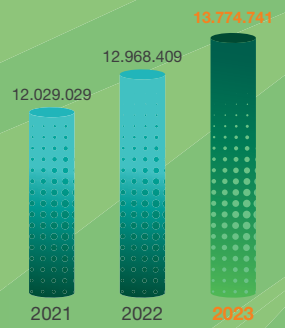

Penghimpunan Dana***
(%)

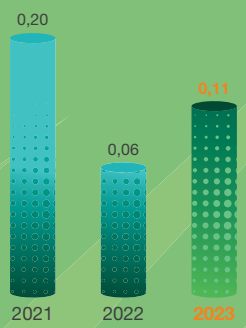

Penyaluran Dana****
(%)

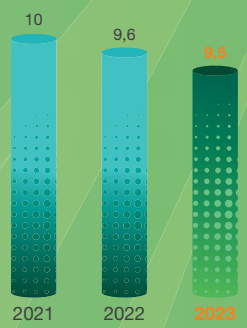

Catatan:
* Data keuangan konsolidasi Bank BTPN, yang termasuk dengan dua entitas anak usaha lainnya yaitu PT Bank BTPN Syariah Tbk (dengan kepemilikan saham sebesar 70%) dan PT Bank Syariah Ventura (dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Bank BTPN Syariah sebesar 69,3%).
** KKUB/ Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan.
*** Persentase total pendanaan untuk kegiatan usaha yang berkelanjutan terhadap total pendanaan bank secara keseluruhan.
**** Persentase total pembiayaan untuk kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio pembiayaan bank secara keseluruhan.

SOSIAL

Jumlah Karyawan
(Karyawan)

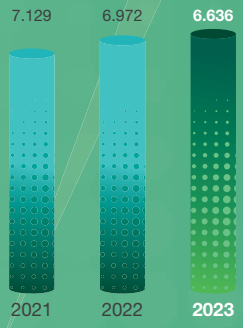

Persentasi Karyawan Perempuan
(%)

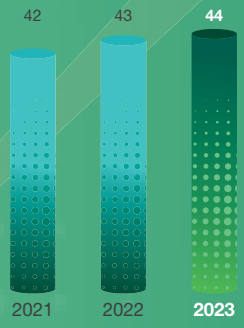

Perekrutan Karyawan
(Karyawan)

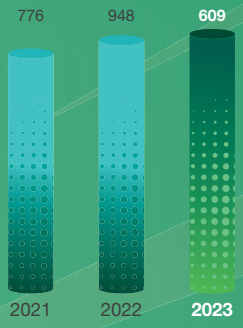

Tingkat Turnover
(%)

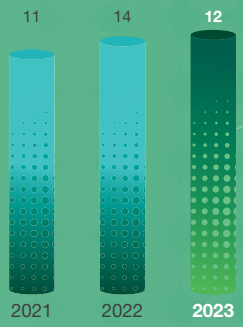

Skor Survei Employee Engagement

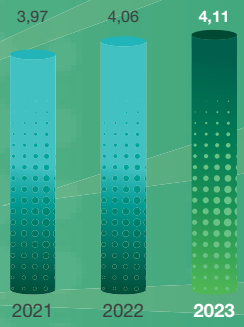

LINGKUNGAN

Penggunaan Energi
(GJ)

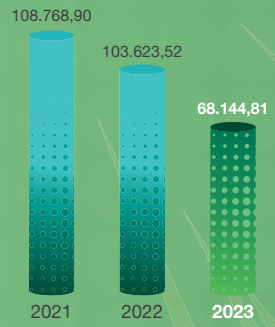

Intensitas Konsumsi Energi/Karyawan
(GJ/Orang)

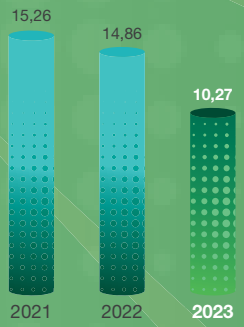

Emisi (Cakupan 1 & 2)
(Ton CO_2eq)

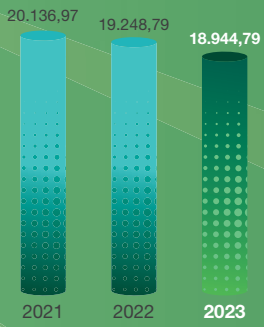

Intensitas Emisi GRK/ Karyawan
(Ton CO_2eq/Orang)

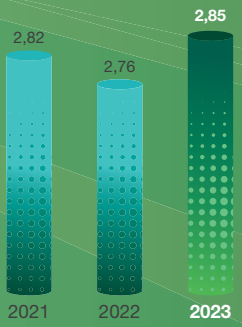

Pengurangan Emisi
(Ton CO_2eq)

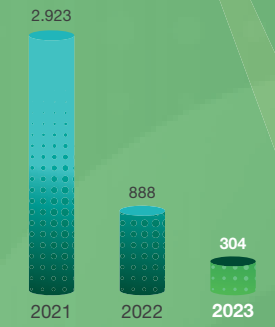

Penggunaan Kertas
(Rim)

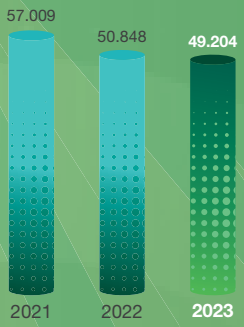

Pengurangan Penggunaan Kertas
(Rim)

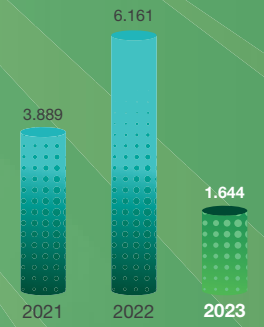

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Nama Bank : BTPN (Individu)
Laporan Tahun : 2023 /(telah diaudit)

1 Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional.

BTPN (selanjutnya disebut sebagai "Bank") dan BTPN Syariah (selanjutnya disebut sebagai "BTPNS") sebagai anak perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko operasional. Kebijakan dan prosedur tersebut dikaji ulang secara berkala dengan mempertimbangkan setiap perubahan di internal Bank dan BTPNS maupun faktor eksternal terutama terkait peraturan regulator. Seluruh unit kerja di Bank dan BTPNS wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur tersebut dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari-hari.

Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional antara lain mencakup:

- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
- Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha
- Kebijakan Manajemen Asuransi
- Kebijakan Manajemen Risiko Siber
- Kebijakan Strategi *Anti Fraud*
- Prosedur *Key Control Self-Assessment* (KCSA)
- Prosedur *Key Risk Indicator* (KRI)
- Prosedur Pencatatan Kejadian dan Pembukuan Risiko Operasional (RLED)
- Prosedur *Significant Incident Notification Protocol* (SINP)
- Prosedur Kajian Risiko Operasional & Fraud (KROF)
- Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Internal dan Risiko (ICR)
- *Prosedur Risk Grading Matrix* (RGM) dan *Process Risk Control* (PRC)
- Prosedur *Operational Risk Appetite* (ORA)
- Prosedur *Risk Acceptance* (RA)
- Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan dan Pengamanan Informasi
- Prosedur *Risk Control Meeting* (RCM)
- Prosedur *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Business Continuity Plan* (BCP)
- Prosedur Rencana Pengelolaan Insiden (IMP)
- Prosedur Manajemen Inisiatif
- Prosedur Peran dan tanggung jawab *2nd* LoD
- Prosedur Strategi *Anti Fraud*
- Prosedur Investigasi
- Prosedur *Whistleblowing*
- Prosedur *Fraud Reporting and Monitoring*

2 Penjelasan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.

Bank menggunakan model 3 lini pertahanan *(three line of defense)* untuk membagi peran dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang ada di dalam organisasi Bank untuk penerapan Manajemen Risiko Operasional.

Pada Lini pertahanan pertama, adalah seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab secara langsung untuk pelaksanaan manajemen risiko operasional. Dalam pelaksanaannya, setiap lini bisnis/pendukung telah memiliki fungsi ICR (*Internal Control & Risk*) yang berperan untuk membantu unit kerja terkait dalam pengelolaan risiko operasional sehari-hari.

Peran dan tanggung jawab dari unit kerja bisnis dan fungsi pendukung antara lain mencakup:

- Mengidentifikasi dan meregistrasi seluruh risiko operasional yang melekat pada setiap produk, layanan, proses dan inisiatif.
- Melakukan pencatatan kejadian dan pembukuan kerugian risiko operasional serta pemulihannya *(recovery).*
- Menyusun rencana tindak lanjut atas kejadian risiko operasional dan *fraud* beserta penyelesaiannya.
- Menjalankan seluruh program manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan oleh Divisi OFRM.

Peran dan tanggung jawab fungsi ICR *(Internal Control & Risk)* antara lain mencakup:

- Berperan sebagai koordinator di dalam pelaksanaan dan penyelesaian program pelaksanaan manajemen risiko operasional di areanya masing-masing.
- Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian risiko operasional.
- Membantu unit kerja di dalam penyelesaian permasalahan atau kejadian risiko operasional.
- Melakukan pemeriksaan dan melaporkan setiap temuan kepada pihak-pihak yang terkait.
- Memantau rencana tindak lanjut dan penyelesaian atas setiap temuan yang teridentifikasi

Pada Lini pertahanan kedua, adalah Divisi Operational & Fraud Risk Management (OFRM) yang memiliki garis pelaporan secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko, bertanggung jawab atas manajemen risiko operasional dan fraud.

Peran dan tanggung jawab dari Divisi OFRM antara lain mencakup:
- Membuat dan mengembangkan kebijakan, prosedur dan perangkat kerja manajemen risiko operasional dan *fraud*.
- Membuat program pelaksanaan manajemen risiko operasional dan *fraud*.
- Memberikan sosialisasi dan pelatihan atas manajemen risiko operasional dan *fraud* kepada unit kerja.
- Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian terhadap risiko operasional dan *fraud*.
- Membuat laporan-laporan terkait dengan risiko operasional dan fraud kepada manajemen dan regulator.
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko operasional dan *fraud* di Bank.
- Membuat dan mengembangkan ICRS *(Internal Risk & Control system)* sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan risiko operasional di Bank.

Pada Lini pertahanan ketiga, adalah Internal Audit yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata kelola dan penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan terhadap lapis pertahanan pertama dan juga lapis pertahanan kedua.

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala.

Peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris antara lain mencakup:
- Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan serta rencana strategis terhadap penerapan manajemen risiko operasional.
- Memonitor *Risk Appetite* yang terkait dengan risiko operasional.
- Memberikan arahan terhadap penerapan manajemen risiko operasional

Peran dan tanggung jawab dari Direksi antara lain mencakup:
- Memastikan kecukupan struktur organisasi dan SDM untuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko operasional di area masing-masing.
- Memastikan telah dilakukan pelaksanaan seluruh program manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan.
- Memonitor dan memastikan tindak lanjut penyelesaian terhadap setiap permasalahan atau kejadian risiko operasional.
- Mengembangkan budaya kesadaran terhadap risiko operasional.

3 Penjelasan sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional).

Bank melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional menggunakan pendekatan standar *(standardized Approach)* dimulai sejak tahun 2023 sesuai dengan ketentuan regulator. Bank memiliki RWA (*Risk Weighted Asset*) sistem untuk membantu di dalam perhitungan beban modal untuk risiko operasional. Berdasarkan sumber data yang ada, RWA sistem akan menghitung secara otomatis beban modal untuk risiko opersional berdasarkan formula yang telah ditentukan oleh regulator berdasarkan hasil perkalian komponen indikator bisnis dan data historis kerugian risiko operasional. Hasil perhitungan dari sistem juga dapat dilakukan penyesuaian secara manual bilamana diperlukan.

4 Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi Bank.

Bank telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan untuk *Board of Management* dan Direksi Bank dalam memonitor risiko operasional Baik secara tingkatan Bank maupun di Direktorat Masing-masing.

Pada tingkatan Bank, laporan-laporan terhadap risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif melalui Komite Manajemen Risiko dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pada tingkatan direktorat, laporan-laporan terhadap risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi dan pejabat eksekutif terkait melalui rapat RCM *(Risk Control Meeting)* yang dilakukan secara kuartal.

laporan-laporan risiko operasional yang disampaikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif antara lain:
- *Operational Risk Appetite (ORA)*
- Kejadian risiko operasional dan Fraud
- *Key Risk Indicators (KRI)*
- Hasil pelaksanaan *Key Control Self-Assessment (KCSA)*

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

5 Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.

Dalam hal mitigasi risiko dan transfer risiko terhadap manajemen untuk Risiko Operasional, Bank telah memiliki beberapa metode pengendalian risiko yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan setiap potensi risiko operational yang timbul dari aktivitas bisnis dan operasional telah dikelola secara tepat dan tidak melebihi batasan yang ditetapkan.

Beberapa metode mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan antara lain:

- Melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap proses dan risiko operasional yang melekat pada setiap unit kerja.
- Melakukan kajian risiko operasional terhadap produk, layanan, sistem dan aktivitas yang baru maupun pengembangan sebelum dipasarkan atau diimplementasikan untuk memastikan adanya kecukupan kontrol.
- Memastikan terdapat kebijakan dan prosedur untuk menjalankan setiap proses dan aktivitas yang dilakukan di seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung.
- Melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menilai efektifitas kecukupan pengendalian serta mencatat dan memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi.
- Melakukan analisa dalam hal transfer risiko untuk memindahkan potensi risiko operasional yang mungkin terjadi kepada pihak lain seperti melalui perlindungan asuransi.
- Memastikan kesiapan Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM) untuk seluruh unit kerja kritikal.

1 Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional.

BTPN (selanjutnya disebut sebagai "Bank") dan BTPN Syariah (selanjutnya disebut sebagai "BTPNS") sebagai anak perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko operasional. Kebijakan dan prosedur tersebut dikaji ulang secara berkala dengan mempertimbangkan setiap perubahan di internal Bank dan BTPNS maupun faktor eksternal terutama terkait peraturan regulator. Seluruh unit kerja di Bank dan BTPNS wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur tersebut dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari hari.

Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional di Bank antara lain mencakup:

- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
- Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha
- Kebijakan Manajemen Asuransi
- Kebijakan Manajemen Risiko Siber
- Kebijakan Strategi *Anti Fraud*
- Prosedur *Key Control Self-Assessment* (KCSA)
- Prosedur *Key Risk Indicator* (KRI)
- Prosedur Pencatatan Kejadian dan Pembukuan Risiko Operasional (RLED)
- Prosedur *Significant Incident Notification Protocol* (SINP)
- Prosedur Kajian Risiko Operasional & Fraud (KROF)
- Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Internal dan Risiko (ICR)
- Prosedur *Risk Grading Matrix* (RGM) dan *Process Risk Control* (PRC)
- Prosedur *Operational Risk Appetite* (ORA)
- Prosedur *Risk Acceptance* (RA)
- Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan dan Pengamanan Informasi
- Prosedur *Risk Control Meeting* (RCM)
- Prosedur *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Business Continuity Plan* (BCP)
- Prosedur Rencana Pengelolaan Insiden (IMP)
- Prosedur Manajemen Inisiatif
- Prosedur Peran dan tanggung jawab 2nd LoD
- Prosedur Strategi *Anti Fraud*
- Prosedur Investigasi
- Prosedur *Whistleblowing*
- Prosedur *Fraud Reporting and Monitoring*

Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional di BTPNS antara lain mencakup:

- Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional
- Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha / *Business Continuity Management*
- Kebijakan Strategi *Anti Fraud*
- Prosedur Pengelolaan Kelangsungan Usaha / *Business Continuity Management*
- Prosedur *Business Impact Analysis*
- Prosedur *Business Continuity Plan*
- Prosedur *Key Control Self-Assessment* (KCSA)
- Prosedur *Key Risk Indicator* (KRI)
- Prosedur Pengelolaan Kejadian Risiko Operasional
- Prosedur Kerangka Kerja *Quality Assurance* (QA)
- Prosedur Strategi *Anti Fraud*
- Prosedur Investigasi
- Prosedur Whistleblowing

2 Penjelasan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.

Bank menggunakan model 3 lini pertahanan *(three line of defense)* untuk membagi peran dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang ada di dalam organisasi Bank untuk penerapan Manajemen Risiko Operasional.

Pada Lini pertahanan pertama, adalah seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab secara langsung untuk pelaksanaan manajemen risiko operasional. Dalam pelaksanaannya, setiap lini bisnis/pendukung telah memiliki fungsi ICR *(Internal Control & Risk)* yang berperan untuk membantu unit kerja terkait dalam pengelolaan risiko operasional sehari-hari.

Peran dan tanggung jawab dari unit kerja bisnis dan fungsi pendukung antara lain mencakup:

- Mengidentifikasi dan meregistrasi seluruh risiko operasional yang melekat pada setiap produk, layanan, proses dan inisiatif.
- Melakukan pencatatan kejadian dan pembukuan kerugian risiko operasional serta pemulihannya *(recovery).*
- Menyusun rencana tindak lanjut atas kejadian risiko operasional dan fraud beserta penyelesaiannya.
- Menjalankan seluruh program manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan oleh Divisi OFRM.

Peran dan tanggung jawab fungsi ICR *(Internal Control & Risk)* antara lain mencakup:

- Berperan sebagai koordinator di dalam pelaksanaan dan penyelesaian program pelaksanaan manajemen risiko operasional di areanya masing-masing.
- Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian risiko operasional.
- Membantu unit kerja di dalam penyelesaian permasalahan atau kejadian risiko operasional.
- Melakukan pemeriksaan dan melaporkan setiap temuan kepada pihak-pihak yang terkait.
- Memantau rencana tindak lanjut dan penyelesaian atas setiap temuan yang teridentifikasi

Pada Lini pertahanan kedua, adalah Divisi Operational & Fraud Risk Management (OFRM) yang memiliki garis pelaporan secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko, bertanggung jawab atas manajemen risiko operasional dan fraud.

Peran dan tanggung jawab dari Divisi OFRM antara lain mencakup:
- Membuat dan mengembangkan kebijakan, prosedur dan perangkat kerja manajemen risiko operasional dan *fraud*.
- Membuat program pelaksanaan manajemen risiko operasional dan *fraud*.
- Memberikan sosialisasi dan pelatihan atas manajemen risiko operasional dan *fraud* kepada unit kerja.
- Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian terhadap risiko operasional dan *fraud*.
- Membuat laporan-laporan terkait dengan risiko operasional dan *fraud* kepada manajemen dan regulator.
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko operasional dan *fraud* di Bank.
- Membuat dan mengembangkan ICRS *(Internal Risk & Control system)* sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan risiko operasional di Bank.

Pada Lini pertahanan ketiga, adalah Internal Audit yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata Kelola dan penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan terhadap lapis pertahanan pertama dan juga lapis pertahanan kedua.

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala.

Peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris antara lain mencakup:
- Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan serta rencana strategis terhadap penerapan manajemen risiko operasional.
- Memonitor *Risk Appetite* yang terkait dengan risiko operasional.
- Memberikan arahan terhadap penerapan manajemen risiko operasional

Peran dan tanggung jawab dari Direksi antara lain mencakup:
- Memastikan kecukupan struktur organisasi dan SDM untuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko operasional di area masing-masing.
- Memastikan telah dilakukan pelaksanaan seluruh program manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan.
- Memonitor dan memastikan tindak lanjut penyelesaian terhadap setiap permasalahan atau kejadian risiko operasional.
- Mengembangkan budaya kesadaran terhadap risiko operasional.

Sama seperti Bank, kecukupan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional di BTPNS dilakukan dengan memisahkan peran dan tanggung jawab unit-unit kerja dengan penerapan model 3 lini pertahanan (3rd *line of defense*), yaitu : (Lini pertahanan pertama) unit kerja bisnis dan fungsi pendukung bersama dengan fungsi *Quality Assurance* (QA) memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank. (Lini pertahanan kedua), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melaksanakan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko operasional dan memastikan aktivitas BTPNS sesuai dengan ketentuan regulator termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. (Lini pertahanan ketiga), *Internal Audit* memastikan seluruh risiko yang tersisa (*residual risk*) dikelola dengan baik sesuai *risk appetite* & *risk tolerance*.

3 Penjelasan sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional).

Bank melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional menggunakan pendekatan standar *(standardized Approach)* dimulai sejak tahun 2023 sesuai dengan ketentuan regulator. Bank memiliki RWA (*Risk Weighted Asset*) sistem untuk membantu di dalam perhitungan beban modal untuk risiko operasional. Berdasarkan sumber data yang ada, RWA sistem akan menghitung secara otomatis beban modal untuk risiko opersional berdasarkan formula yang telah ditentukan oleh regulator berdasarkan hasil perkalian komponen indikator bisnis dan data historis kerugian risiko operasional. Hasil perhitungan dari sistem juga dapat dilakukan penyesuaian secara manual bilamana diperlukan.

BTPNS sebagai Bank Syariah, sesuai dengan ketentuan OJK sampai dengan saat ini masih melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan indikator dasar *(Basic Indicator Approach).* Dalam hal keperluan perhitungan beban modal secara konsolidasi, Bank akan memintakan data indikator bisnis dan data historis kerugian risiko operasional ke BTPNS.

4 Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi Bank.

Bank telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan untuk *Board of Management* dan Direksi Bank dalam memonitor risiko operasional Baik secara tingkatan Bank maupun di Direktorat masing-masing. Sumber data dalam pembuatan laporan-laporan tersebut sebagian besar telah didukung dengan adanya aplikasi ICRS (*Internal Control* & *Risk System*) yang dimiliki oleh Bank yang berfungsi sebagai *database* dan sekaligus digunakan untuk pengelolaan risiko operasional di seluruh unit kerja.

Pada tingkatan Bank, laporan-laporan terhadap risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif melalui Komite Manajemen Risiko dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pada tingkatan direktorat, laporan-laporan terhadap risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi dan pejabat eksekutif terkait melalui rapat RCM *(Risk Control Meeting)* yang dilakukan secara kuartal.

Laporan-laporan risiko operasional yang disampaikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif antara lain:

- *Operational Risk Appetite (ORA)*
- Kejadian risiko operasional dan Fraud
- *Key Risk Indicators (KRI)*
- Hasil pelaksanaan *Key Control Self-Assessment (KCSA)*

BTPNS juga telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan untuk pejabat eksekutif dan Direksi Bank dalam memonitor risiko operasional. Sumber data yang digunakan untuk pembuatan laporan telah didukung dengan adanya aplikasi ORMS (*Operational Risk Management System*) sebagai *database* untuk pencatatan Kejadian risiko operasional.

5 Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.

Dalam hal mitigasi risiko dan transfer risiko terhadap manajemen untuk Risiko Operasional, Bank dan BTPNS telah memiliki beberapa metode pengendalian risiko yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan setiap potensi risiko operational yang timbul dari aktivitas bisnis dan operasional telah dikelola secara tepat dan tidak melebihi batasan yang ditetapkan.

Beberapa metode mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan antara lain:

- Melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap proses dan risiko operasional yang melekat pada setiap unit kerja.
- Melakukan kajian risiko operasional terhadap produk, layanan, sistem dan aktivitas yang baru maupun pengembangan sebelum dipasarkan atau diimplementasikan untuk memastikan adanya kecukupan kontrol.
- Memastikan terdapat kebijakan dan prosedur untuk menjalankan setiap proses dan aktivitas yang dilakukan di seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung.
- Melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menilai efektifitas kecukupan pengendalian serta mencatat dan memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi.
- Melakukan analisa dalam hal transfer risiko untuk memindahkan potensi risiko operasional yang mungkin terjadi kepada pihak lain seperti melalui perlindungan asuransi.
- Memastikan kesiapan Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM) untuk seluruh unit kerja kritikal.

LAPORAN KEUANGAN 2023

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023/
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

ISI	**HAL/ *PAGE***	***CONTENTS***
PERNYATAAN DIREKSI		*DIRECTORS' STATEMENT*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023:		*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023:*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	1 - 4	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	5 - 6	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN	7 - 8	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY*
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	9 - 10	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS*
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	11 - 213	*NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN	214 - 222	*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*

bank btpn | SMBC A MEMBER OF SMBC Group

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 PT BANK BTPN TBK DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Henoch Munandar
   Alamat Kantor : Menara BTPN
   CBD Mega Kuningan
   Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
   Jakarta 12950
   Alamat Rumah : Puri Permai I Blok W 1 No. 7
   RT 009/RW 002
   Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
   Jakarta Barat
   Nomor Telepon : (021) 30026200
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Hanna Tantani
   Alamat Kantor : Menara BTPN
   CBD Mega Kuningan
   Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
   Jakarta 12950
   Alamat Rumah : Jl. Pegangsaan Indah Barat A1/40
   Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading
   Jakarta Utara
   Nomor Telepon : (021) 30026200
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 PT BANK BTPN TBK AND SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

1. *Name* : *Henoch Munandar*
   Office address : *Menara BTPN*
   CBD Mega Kuningan
   Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
   Jakarta 12950
   Residential address : *Puri Permai I Blok W 1 No. 7*
   RT 009/RW 002
   Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
   Jakarta Barat
   Telephone : *(021) 30026200*
   Title : *President Director*

2. *Name* : *Hanna Tantani*
   Office address : *Menara BTPN*
   CBD Mega Kuningan
   Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 - 5.6
   Jakarta 12950
   Residential address : *Jl. Pegangsaan Indah Barat A1/40*
   Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading
   Jakarta Utara
   Telephone : *(021) 30026200*
   Title : *Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries;*
2. *The consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner; and*
   b. The consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. *We are responsible for PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries' internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta,
22 Februari/*February* 2024

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Henoch Munandar
Direktur Utama/
President Director

Hanna Tantani
Direktur/
Director

PT Bank BTPN Tbk
Menara BTPN
CBD Mega Kuningan, Jakarta 12950

t. +6221 300 26 200
f. +6221 300 26 101
www.btpn.com

PT BANK BTPN Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December* 2023	2022	
ASET				***ASSETS***
Kas	2h, 4	1,428,683	1,747,461	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2h, 2j, 5	9,276,598	10,215,350	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain:				*Current accounts with other banks*
- Pihak ketiga		500,326	1,549,854	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g, 36	462,061	639,707	*Related parties -*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(158)	(415)	*Less: Allowance for impairment losses*
	2h, 2j, 6	962,229	2,189,146	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain		8,961,654	21,885,214	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima		2,624	2,851	*Accrued interest/margin income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	-	(171)	*Less: Allowance for impairment losses*
	2h, 2k, 7	8,964,278	21,887,894	
Efek-efek				*Securities*
- Pihak ketiga		17,038,501	18,650,367	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g, 36	-	185,510	*Related parties -*
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima		225,855	214,812	*Accrued interest/margin income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(799)	(999)	*Less: Allowance for impairment losses*
	2h, 2l, 8	17,263,557	19,049,690	
Tagihan derivatif				*Derivative receivables*
- Pihak ketiga		636,924	1,131,664	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g,36	496,225	615,160	*Related parties -*
	2h, 2m, 9	1,133,149	1,746,824	
Tagihan akseptasi		3,289,757	3,069,854	*Acceptance receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(8,637)	(4,495)	*Less: Allowance for impairment losses*
	2h, 2n, 10	3,281,120	3,065,359	
Pinjaman yang diberikan:				*Loans:*
- Pihak ketiga		141,400,072	132,208,660	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g, 36	3,773,364	2,387,393	*Related parties -*
Pembiayaan/piutang syariah:				*Sharia financing/receivables:*
- Pihak ketiga		11,387,861	11,527,463	*Third parties -*
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima		1,097,796	878,534	*Accrued interest/margin income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(4,618,047)	(3,579,119)	*Less: Allowance for impairment losses*
	2h, 2o, 11	153,041,046	143,422,931	
Penyertaan saham				*Investment in shares*
- Pihak ketiga		80,086	80,973	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g	22,500	22,500	*Related parties -*
	2h, 2p	102,586	103,473	
Beban dibayar dimuka	2q, 2ah, 12	1,184,067	1,465,142	*Prepayments*
Klaim pengembalian pajak	2ac, 13a	67,337	50,357	*Claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	2ac, 13f	715,152	545,029	*Deferred tax assets*
Aset tetap		5,040,250	5,109,182	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(2,992,438)	(2,990,677)	*Less: Accumulated depreciation*
	2r, 2ah, 14	2,047,812	2,118,505	
Dipindahkan		199,467,614	207,607,161	*Carry forward*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December* 2023	2022	
ASET (lanjutan)				***ASSETS** (continued)*
Pindahan		199,467,614	207,607,161	*Carried forward*
Aset takberwujud dan *goodwill*		3,541,155	3,237,937	*Intangible assets and goodwill*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(2,451,771)	(2,161,199)	*Less: Accumulated amortization*
	2s, 15	1,089,384	1,076,738	
Aset lain-lain		996,966	538,312	*Other assets*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	2i	(105,572)	(52,507)	*Less: Allowance for impairment losses*
	2h, 2t, 16	891,394	485,805	
JUMLAH ASET		**201,448,392**	**209,169,704**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	2h, 17	71,606	59,045	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	2z	21,951	18,996	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
- Pihak ketiga		97,793,480	103,942,403	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g, 36	484,276	1,080,884	*Related parties -*
Beban bunga yang masih harus dibayar		179,647	145,624	*Accrued interest expenses*
	2h, 2u, 18	98,457,403	105,168,911	
Simpanan dari bank-bank lain				*Deposits from other banks*
- Pihak ketiga		1,253,579	18,779	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g, 36	9,561,059	147,352	*Related parties -*
Beban bunga yang masih harus dibayar		7,483	-	*Accrued interest expenses*
	2h, 2u, 19	10,822,121	166,131	
Liabilitas derivatif				*Derivative payables*
- Pihak ketiga		1,014,819	1,323,645	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g, 36	57,285	124,091	*Related parties -*
	2h, 2m, 9	1,072,104	1,447,736	
Liabilitas akseptasi				*Acceptance payables*
- Pihak ketiga		2,160,250	2,157,596	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g, 36	163,383	199,232	*Related parties -*
	2h, 2n, 10	2,323,633	2,356,828	
Utang pajak:				*Taxes payables:*
- Pajak penghasilan badan		107,880	44,342	*Corporate income tax -*
- Pajak lain-lain		130,038	128,934	*Other taxes -*
	2ac, 13b	237,918	173,276	
Efek-efek yang diterbitkan:				*Securities issued:*
- Utang obligasi	20	200,569	200,134	*Bonds payable -*
Beban bunga yang masih harus dibayar		1,514	1,514	*Accrued interest expenses*
	1d, 2h, 2v	202,083	201,648	
Dipindahkan		113,208,819	109,592,571	*Carry forward*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December* 2023	2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY** (continued)*
LIABILITAS (lanjutan)				***LIABILITIES** (continued)*
Pindahan		113,208,819	109,592,571	*Carried forward*
Pinjaman yang diterima:				*Borrowings:*
- Pihak ketiga		12,682,950	7,663,850	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g, 36	18,569,798	37,257,744	*Related parties -*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi		(48,251)	(9,988)	*Unamortized transaction costs*
Beban bunga yang masih harus dibayar		151,020	155,802	*Accrued interest expenses*
	2h, 2w, 21	31,355,517	45,067,408	
Akrual	2h, 22	478,981	453,992	*Accruals*
Pinjaman subordinasi		3,079,400	3,113,500	*Subordinated loans*
Beban bunga yang masih harus dibayar		10,960	12,078	*Accrued interest expenses*
	2g, 2h, 2y, 24, 36	3,090,360	3,125,578	
Liabilitas imbalan kerja karyawan:				*Employee benefits liabilities:*
- Imbalan kerja jangka pendek		511,188	443,476	*Short-term employee benefits -*
- Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya		170,105	64,228	*Post-employment benefits and - other long-term employee benefits*
	2x, 23	681,293	507,704	
Liabilitas sewa	2ah	353,990	425,887	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	2h, 2i, 25	1,075,508	740,279	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**150,244,468**	**159,913,419**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank				***Non-bank***
Tabungan mudharabah				*Mudharabah saving deposits*
- Pihak ketiga		887,890	763,070	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g, 36	2,064	596	*Related parties -*
		889,954	763,666	
Deposito mudharabah				*Mudharabah time deposits*
- Pihak ketiga		8,997,932	9,043,060	*Third parties -*
- Pihak berelasi	2g, 36	32,934	36,535	*Related parties -*
		9,030,866	9,079,595	
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	2z, 26	**9,920,820**	**9,843,261**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December* 2023	2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY** (continued)*
EKUITAS				***SHAREHOLDERS' EQUITY***
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owners of the parent***
Modal saham: Modal dasar Rp 300.000 terdiri dari: 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.149.106.869 saham (31 Desember 2022: 8.149.106.869 saham)	2aa, 27	162,982	162,982	*Share capital:* *Authorized capital of Rp 300,000 consists of: 15,000,000,000 shares with par value of Rp 20 (full amount) per share* *Issued and fully paid-up capital of 8,149,106,869 shares (31 December 2022: 8,149,106,869 shares)*
Tambahan modal disetor	1b	11,162,238	11,160,647	*Additional paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset tetap	2r	954,224	874,452	*Reserve on revaluation of fixed assets*
Cadangan nilai wajar - bersih	2l	2,906	(7,704)	*Fair value reserve - net*
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	1f	(24,267)	(24,267)	*Transaction with non-controlling interest*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan		32,596	32,596	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan		26,369,641	24,702,316	*Unappropriated -*
		26,402,237	24,734,912	
Komponen ekuitas lainnya	2ab	260,801	260,801	*Other equity components*
Saham tresuri	1c, 2aa	(254,695)	(255,147)	*Treasury shares*
		38,666,426	36,906,676	
Kepentingan non-pengendali	2f	2,616,678	2,506,348	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**41,283,104**	**39,413,024**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		**201,448,392**	**209,169,704**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December* 2023	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan bunga		13,069,491	10,525,856	*Interest income*
Pendapatan syariah		5,746,182	5,373,790	*Sharia income*
	2g, 2ad, 29, 36	18,815,673	15,899,646	
Beban bunga		(6,285,177)	(3,876,891)	*Interest expenses*
Beban syariah		(486,433)	(344,440)	*Sharia expenses*
	2g, 2ad, 30, 36	(6,771,610)	(4,221,331)	
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH		12,044,063	11,678,315	***NET INTEREST AND SHARIA INCOME***
Pendapatan operasional lainnya:				***Other operating income:***
Pendapatan operasional lainnya	2ae, 31	1,423,949	1,228,130	*Other operating income*
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	2e, 2m	649,494	784,485	*Net gains on foreign exchange and derivative transactions*
		2,073,443	2,012,615	
Beban operasional lainnya:				***Other operating expenses:***
Beban kepegawaian	2g, 2x, 32, 36	(3,756,478)	(3,403,319)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	33	(3,273,766)	(3,272,015)	*General and administrative expenses*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2i, 34	(3,049,919)	(1,840,167)	*Provision for impairment losses*
Beban operasional lainnya	35	(576,308)	(517,753)	*Other operating expenses*
		(10,656,471)	(9,033,254)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH		3,461,035	4,657,676	***NET OPERATING INCOME***
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan non-operasional		10,053	10,020	*Non-operating income*
Beban non-operasional		(13,406)	(10,377)	*Non-operating expenses*
		(3,353)	(357)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		3,457,682	4,657,319	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2ac, 13c	(775,198)	(1,027,755)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA BERSIH		**2,682,484**	**3,629,564**	***NET INCOME***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December* 2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan revaluasi aset tetap	2r, 14	79,772	-	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2x, 23	(92,262)	(37,209)	*Remeasurements of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	13f	20,204	8,186	*Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss*
		7,714	(29,023)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2l	13,633	(160,999)	*Unrealized gains (losses) on fair value changes of securities measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2ac,13f	(2,999)	35,420	*Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss*
		10,634	(125,579)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		18,348	(154,602)	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK		2,700,832	3,474,962	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		2,358,334	3,095,701	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		324,150	533,863	*Non-controlling interest*
		2,682,484	3,629,564	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		2,376,847	2,939,728	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		323,985	535,234	*Non-controlling interest*
		2,700,832	3,474,962	
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)	2af, 39			***EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)***
Dasar		293	384	*Basic*
Dilusian		293	384	*Diluted*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owners of the parent*												
		Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Reserve on revaluation of fixed assets*	Cadangan nilai wajar - bersih/ *Fair value reserve - net*	Transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ *Transaction with non-controlling interest*	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2023		**162,982**	**11,160,647**	**874,452**	**(7,704)**	**(24,267)**	**32,596**	**24,702,316**	**260,801**	**(255,147)**	**36,906,676**	**2,506,348**	**39,413,024**	***Balance as of 1 January* 2023**
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	2,358,334	-	-	2,358,334	324,150	2,682,484	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya:														*Other comprehensive income:*
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2l	-	-	-	13,602	-	-	-	-	-	13,602	31	13,633	*Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Keuntungan revaluasi aset tetap		-	-	79,772	-	-	-	-	-	-	79,772		79,772	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2l	-	-	-	-	-	-	(92,055)	-	-	(92,055)	(207)	(92,262)	*Remeasurement of employee benefits liabilties*
Efek pajak terkait	2ac,13f	-	-	-	(2,992)	-	-	20,186	-	-	17,194	11	17,205	*Related tax effect*
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan		-	-	79,772	10,610	-	-	2,286,465	-	-	2,376,847	323,985	2,700,832	*Total comprehensive income during the year*
Pembayaran dividen	1f	-	-	-	-	-	-	(619,140)	-	-	(619,140)	(213,720)	(832,860)	*Dividend payment*
Penjualan saham tresuri ke publik		-	21	-	-	-	-	-	-	452	473	-	473	*Sales of treasury shares to public*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	1c,2aa													*Payments of compensation from treasury shares*
Entitas Anak		-	1,570	-	-	-	-	-	-	-	1,570	65	1,635	*Subsidiary*
Saldo tanggal 31 Desember 2023		**162,982**	**11,162,238**	**954,224**	**2,906**	**(24,267)**	**32,596**	**26,369,641**	**260,801**	**(254,695)**	**38,666,426**	**2,616,678**	**41,283,104**	***Balance as of 31 December 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owners of the parent*												
		Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Reserve on revaluation of fixed assets*	Cadangan nilai wajar - bersih/ *Fair value reserve - net*	Transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ *Transaction with non-controlling interest*	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2022		**162,982**	**11,158,962**	**874,452**	**117,867**	**(24,267)**	**81,596**	**21,588,017**	**260,801**	**(255,147)**	**33,965,263**	**2,113,664**	**36,078,927**	***Balance as of 1 January 2022***
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	3,095,701	-	-	3,095,701	533,863	3,629,564	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya:														*Other comprehensive income:*
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2l	-	-	-	(160,989)	-	-	-	-	-	(160,989)	(10)	(160,999)	*Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	2l	-	-	-	-	-	-	(38,977)	-	-	(38,977)	1,768	(37,209)	*Remeasurement of employee benefits liabilties*
Efek pajak terkait	2ac,13f	-	-	-	35,418	-	-	8,575	-	-	43,993	(387)	43,606	*Related tax effect*
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan		-	-	-	(125,571)	-	-	3,065,299	-	-	2,939,728	535,234	3,474,962	*Total comprehensive income during the year*
Reklasifikasi cadangan umum		-	-	-	-	-	(49,000)	49,000	-	-	-	-	-	*Reclassification of general appropriation*
Pembayaran dividen Entitas Anak	1f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(142,633)	(142,633)	*Payments of Subsidiary's dividend*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	1c,2aa													*Payments of compensation from treasury shares*
Entitas Anak		-	1,685	-	-	-	-	-	-	-	1,685	83	1,768	*Subsidiary*
Saldo tanggal 31 Desember 2022		**162,982**	**11,160,647**	**874,452**	**(7,704)**	**(24,267)**	**32,596**	**24,702,316**	**260,801**	**(255,147)**	**36,906,676**	**2,506,348**	**39,413,024**	***Balance as of 31 December 2022***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December* 2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga		12,876,098	10,253,185	*Receipt from interest*
Penerimaan dari pendapatan syariah		5,709,497	5,343,253	*Receipt from sharia income*
Pembayaran beban bunga		(7,016,441)	(3,782,757)	*Payments of interest expense*
Pembayaran hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer		(483,478)	(339,201)	*Payments of third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		1,713,128	2,024,702	*Receipt from other operating income*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan		429,855	363,903	*Recovery from written-off loans*
Pembayaran beban kepegawaian		(3,675,151)	(3,440,912)	*Payments of personnel expenses*
Pembayaran beban operasional lainnya		(2,541,605)	(2,695,092)	*Payments of other operating expenses*
Penerimaan lain-lain		6,649	10,185	*Other receipts*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(889,965)	(1,163,421)	*Payments of corporate income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer		**6,128,587**	**6,573,845**	***Cash flows before changes in operating assets, operating liabilities and temporary syirkah funds***
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi, dan dana syirkah temporer:				*Changes in operating assets, operating liabilities, and temporary syirkah funds:*
(Kenaikan) penurunan aset operasi:				*(Increase) decrease in operating assets:*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - jatuh tempo lebih dari 3 bulan		-	150,000	*Placements with Bank Indonesia and other banks - with maturity more than 3 months*
Tagihan derivatif		613,675	(1,178,125)	*Derivative receivables*
Tagihan akseptasi		(219,903)	(1,307,292)	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan		(11,142,017)	(10,762,631)	*Loans*
Pembiayaan/piutang syariah		(1,361,808)	(2,034,218)	*Sharia financing/receivables*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		12,561	25,790	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah		(6,745,531)	4,549,060	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain		10,648,507	(3,711,720)	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif		(375,632)	945,245	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi		(33,195)	1,396,620	*Acceptance payables*
Kenaikan dana syirkah temporer		77,559	937,358	*Increase in temporary syirkah funds*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		**(2,397,197)**	**(4,416,068)**	***Net cash flows used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian efek-efek		(10,501,020)	(9,444,754)	*Purchase of securities*
Penjualan efek-efek		11,544,675	13,232,763	*Proceeds from sale of securities*
Pembelian aset tetap		(215,390)	(194,386)	*Purchases of fixed assets*
Perolehan aset hak guna		(3,542)	(13,360)	*Acquisition of right-of-use assets*
Perolehan aset takberwujud	15	(436,590)	(433,840)	*Acquisition of intangible assets*
Hasil dari penjualan aset tetap	14	5,877	5,569	*Proceeds from sale of fixed assets*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi		**394,010**	**3,151,992**	***Net cash flows provided from investing activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December* 2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran efek-efek yang diterbitkan		-	(799,000)	*Payments of securities issued*
Penerimaan dari pinjaman yang diterima		27,232,047	16,145,873	*Proceeds from borrowings*
Pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima		(40,171,851)	(6,002,777)	*Installment payments and settlement of borrowings*
Penjualan saham tresuri ke publik		2,108	1,768	*Sales of treasury shares to public*
Pembayaran dividen		(832,860)	(142,633)	*Payments of dividend*
Pembayaran pokok liabilitas sewa		(116,558)	(146,455)	*Payments of lease liabilities principals*
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan		**(13,887,114)**	**9,056,776**	***Net cash flows (used in) provided from financing activities***
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(15,890,301)	7,792,700	***NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(14,462)	3,376	***EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		39,377,753	31,581,677	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR***
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		23,472,990	39,377,753	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	4	1,428,683	1,747,461	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	9,276,598	10,215,350	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	6	962,387	2,189,561	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	7a	8,961,654	21,885,214	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	8i	2,843,668	3,340,167	*Securities*
		23,472,990	39,377,753	
INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS				***SUPPLEMENTAL CASH FLOWS INFORMATION***
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				***ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS***
Pembelian aset tetap yang masih terutang		(1,248)	(790)	*Purchases of fixed assets which are still payable*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT BANK BTPN Tbk (secara individu disebut ”BTPN” atau “Bank”) yang berdomisili di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 16 Februari 1985 dari Notaris Komar Andasasmita, S.H. Akta ini telah diubah dengan akta notaris No. 12 tanggal 13 Juli 1985 dari Notaris Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1148 Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985.

Bank diberikan izin untuk melanjutkan usaha bank sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (”BAPEMIL”) yang telah beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Februari 1959. Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 dan surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan Unit Usaha Syariah melalui surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008 yang telah dipindahkan ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (anak perusahaan Bank) setelah pemisahan pada tanggal 14 Juli 2014.

Bank memperoleh izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 382/PB.12/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pemberian izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Bank mulai melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa pada tanggal 16 Februari 2016.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar secara lengkap dituangkan dalam Akta Nomor 22 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, di mana Bank resmi mengubah namanya menjadi PT BANK BTPN Tbk.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT BANK BTPN Tbk (individually referred to as ”BTPN” or the “Bank”) domiciled in South Jakarta formerly under the name of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional based on notarial deed No. 31 dated 16 February 1985 of Notary Komar Andasasmita, S.H. The deed was amended by notarial deed No. 12 dated 13 July 1985 of Notary Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. The Articles of Association was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-4583HT01.01TH.85 dated 25 July 1985 and published in Supplement No. 1148 to State Gazette No. 76 dated 20 September 1985.

The Bank was given permission to carry on the bank business as a continuity from Association of Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") which commenced its commercial operations on 16 February 1959. The Bank obtained its license to operate as a commercial bank based on the Decree of Ministry of Finance of the Republic Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 dated 22 March 1993 and the letter of Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd dated 22 April 1993. The Bank also obtained a license to operate its Sharia Business Unit by the letter of Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd dated 17 January 2008 which has been transferred to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (the Bank’s subsidiary) after a spin-off on 14 July 2014.

The Bank obtained its license to conduct foreign exchange activities based on the Decree of Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 382/PB.12/2015 dated 22 December 2015 regarding approval in conducting foreign exchange activities. The Bank started to operate as a foreign exchange bank on 16 February 2016.

The Bank’s Articles of Association have been amended several times. The complete amendment as specified into the Deed Number 22 dated 21 January 2019 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Letter Number AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 dated 22 January 2019, where the Bank formally changed its name to PT BANK BTPN Tbk.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar Bank dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0410879 tanggal 23 November 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk.

Perubahan Anggaran Dasar Bank dalam rangka Peningkatan Modal Disetor/ Ditempatkan Bank sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Bank ("Program ESOP") sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 21 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0133128 tanggal 1 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk.

Perubahan Anggaran Dasar Bank dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 45 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0031033.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 27 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BANK BTPN Tbk.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

Amendment of Articles of Association of the Bank was made in order to adjust with the OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 regarding the Amendments to the OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding the Capital Increase of Public Listed Companies by Granting Pre-emptive Rights, OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Conducting a General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies, and OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding Conducting General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies electronically, as specified in the Deed Number 31 dated 18 November 2020 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0410879 dated 23 November 2020 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association of PT BANK BTPN Tbk.

Articles of Association of the Bank in relation with the Increase of the Issued/Paid Up Capital regarding exercise of Employee Stock Option Program to the Employees of the Bank ("ESOP Program") as specified in the Deed Number 21 dated 26 February 2021 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human right of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0133128 dated 1 March 2021 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association of PT BANK BTPN Tbk.

The amendment of Articles of Association of the Bank was made in order to adjust the Company's Business Activities in accordance with Government Regulation Number 5 Year 2021 regarding the Implementation of Risk Based Business Licensing as specified in the Deed Number 45 dated 21 April 2022 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022 dated 27 April 2022 regarding Approval on Amendment of Articles of Association of the Limited Liability Company of PT BANK BTPN Tbk.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir dituangkan dalam Akta Nomor 28 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Yumna Shabrina, SH, MKn, selaku Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0086163 tanggal 3 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk.

Susunan Dewan Komisaris terakhir Bank sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Nomor 25 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0116937 tanggal 11 Mei 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BTPN Tbk.

Susunan Direksi terakhir Bank sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Nomor 58 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat oleh Yumna Shabrina, SH, MKn, selaku Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0145163 tanggal 27 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BTPN Tbk.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan serta kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan dalam jasa bank umum termasuk melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pemegang Saham Utama Bank adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"). SMBC didirikan pada bulan April 2001. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ("SMFG") didirikan pada bulan Desember 2002 dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG. SMFG merupakan pemegang saham pengendali dan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder*) dari BTPN.

SMBC berkantor pusat di Tokyo, Jepang dan saat ini merupakan salah satu bank terbesar di Jepang dengan jaringan usaha yang telah menyebar ke beberapa wilayah di dunia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The latest amendment of Articles of Association of the Bank as specified into the Deed Number 28 dated 22 June 2023 made by Yumna Shabrina, SH, MKn, as Subsitute Notary of Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human right of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0086163 dated 3 July 2023 regarding Acceptance of Notification of Amendment of Articles of Association of PT BANK BTPN Tbk.

The latest composition of the Board of Commissioners of the Bank as specified into the Deed Number 25 dated 10 May 2023 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.09-0116937 dated 11 May 2023 regarding Acceptance of Notification of the Company's Data Changes of PT BANK BTPN Tbk.

The latest composition of the Board of Directors of the Bank as specified into the Deed Number 58 dated 27 July 2023 made by Yumna Shabrina, SH, MKn, as Subsitute Notary of Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.09-0145163 dated 27 July 2023 regarding Acceptance of Notification of the Company's Data Changes of PT BANK BTPN Tbk.

In accordance with Article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services including capital investment in bank conducting business based on sharia principles, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

Majority Shareholder's of the Bank is Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"). SMBC was established in April 2001. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ("SMFG") was established in December 2002 and SMBC became a subsidiary fully owned by SMFG. SMFG is the controlling shareholder and ultimate shareholder of BTPN.

SMBC's Head Office is in Tokyo, Japan and currently one of the biggest banks in Japan with a business network vastly spread throughout the world.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berkantor Pusat di Tokyo, Jepang, SMFG bergerak dalam bidang manajemen anak perusahaan perbankan dan perusahaan lain yang dapat diperlakukan sebagai anak perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang. Selain itu, melakukan fungsi-fungsi terkait (ancillary functions), serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan holding perbankan di bawah ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha SMFG terutama bergerak di bidang perbankan komersial melalui layanan keuangan berikut: *leasing*, sekuritas, pembiayaan konsumen, keuangan, pemrosesan data pengembangan sistem, dan manajemen aset.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

Jaringan distribusi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

With the Head Office in Tokyo, SMFG operates in the management of banking subsidiaries and other companies that can be treated as subsidiaries based on the provisions of Japanese Banking Laws. In addition, SMFG carries out ancillary functions, as well as functions that can be executed by banking holding companies under the regulations of the Japanese Banking Laws.

Companies within the SMFG business group are mainly operating in commercial banking through such financial services as follows: leasing, securities, consumer financing, finance, system development data processing and asset management.

The Bank's head office is located at Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

The Bank's distribution network as of 31 December 2023 and 2022 (unaudited) was as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Kantor Cabang	73	73	*Branches*
Kantor Cabang Pembantu	215	234	*Sub-Branches*
ATM dan TCR	228	221	*ATM and TCR*
Kantor Fungsional	45	51	*Functional Branches*
	561	579	

Jumlah karyawan PT BANK BTPN Tbk dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut "Grup") pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah 20.933 dan 19.740 karyawan (tidak diaudit).

As of 31 December 2023 and 2022 PT BANK BTPN Tbk and its subsidiaries (together referred to as "the Group") had 20,933 and 19,740 employees, respectively (unaudited).

b. Penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 09 tertanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah disetujui Rencana Penggabungan Usaha PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") dengan Bank, dimana SMBCI bertindak sebagai bank yang menggabungkan diri dan Bank bertindak sebagai bank penerima penggabungan, yang berlaku sejak seluruh persetujuan yang disyaratkan diperoleh ("Tanggal Efektif Penggabungan").

b. Merger with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Based on the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 5 October 2018 as stipulated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 09 dated 5 October 2018 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, it has approved the Proposed Merger of PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") and the Bank whereby SMBCI acted as the Merging Bank and the Bank acted as the Merger-Recipient Bank or surviving bank, effective as of all the required approval being obtained ("Effective Merger Date").

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penggabungan usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (lanjutan)

Penggabungan menjadi efektif pada tanggal 1 Februari 2019, setelah diperolehnya persetujuan dari (i) OJK melalui surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 35/KDK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) SMBCI ke dalam Bank; (ii) Japan Financial Services Agency (JFSA) melalui surat Pengawas Perbankan No. 1788 dan No. 1789 tertanggal 18 Januari 2019 perihal Persetujuan *Subsidiarization*; dan (iii) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-0006169.AH.01.10. Tahun 2019 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BANK BTPN Tbk dan surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0044411 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BTPN Tbk serta surat tertanggal 22 Januari 2019 Nomor AHU-AH.01.10-0006176 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT BANK BTPN Tbk.

Sehubungan dengan penggabungan usaha antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“BTPN”) dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“SMBCI”), penggabungan usaha dilakukan melalui penerbitan instrumen ekuitas BTPN kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation (pemegang saham BTPN dan SMBCI) sebesar 2.296.846.112 lembar saham biasa disetor penuh dengan nilai nominal sebesar Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Nilai wajar saham BTPN pada tanggal 1 Februari 2019 adalah Rp 4.282 (nilai penuh) per lembar saham. Rasio konversi atas konversi saham SMBCI menjadi saham BTPN adalah sebesar 799,1971.

Penggabungan usaha antara BTPN dan SMBCI merupakan transaksi penggabungan usaha entitas sepengendali. Pada tanggal efektif merger, baik BTPN dan SMBCI merupakan entitas sepengendalian dan hubungan sepengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok yang sama dan bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi. Oleh karena itu, transaksi ini diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*).

Selisih nilai transfer entitas sepengendali di atas dicatat sebagai tambahan modal disetor. Atas transaksi ini, Bank mencatat tambahan modal disetor dan agio saham masing-masing sebesar Rp 45.937 dan Rp 9.708.197.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***b. Merger with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia** (continued)*

The Merger became effective on 1 February 2019, after obtaining the approval from (i) OJK through Decree of Board of Commissioners of OJK Number 35/KDK.03/2018 dated 20 December 2018 regarding the Merger Approval of SMBCI into the Bank; (ii) Japan Financial Services Agency (JFSA) through the Banking Supervisory letter No. 1788 and No. 1789 dated 18 January 2019 regarding the approval of Subsidiarization; and (iii) Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate of Administration of General Law by letter dated 22 January 2019 Number AHU-0006169.AH.01.10.Year 2019 regarding the Approval of Amendment of Articles of Association of Limited Liability Company PT BANK BTPN Tbk and letter dated 22 January 2019 Number AHU-AH.01.03-0044411 regarding the Acceptance of Notification of Company Data Submission of PT BANK BTPN Tbk as well as letter dated 22 January 2019 Number AHU-AH.01.10-0006176 regarding Acceptance on Notification of Merger of PT BANK BTPN Tbk.

In relation with merger between PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI"), the merger was conducted through the issuance of equity instrument of BTPN to Sumitomo Mitsui Banking Corporation (the shareholder of both BTPN and SMBCI) of 2,296,846,112 fully paid ordinary shares of BTPN with nominal value amounting to Rp 20 (full amount) per share.

The fair value of BTPN’s shares as of 1 February 2019 was Rp 4,282 (full amount) per share. Conversion ratio of the conversion of SMBCI’s share into BTPN’s share was 799.1971.

The merger between BTPN and SMBCI is a business combination under common control transaction. As at the effective date of merger, both BTPN and SMBCI are entites under common control and the common control relationship is not transitory. Business combination transaction between entites under common control is done in the event of reorganisation of entities under the same group which does not constitute change in ownership by economic substance. Therefore, the transaction is recognized at carrying amount under pooling of interest method.

Net transfer under common control entities above was recorded as additional paid-in capital. As a result of this transaction, the Bank recorded additional share capital and paid-in capital amounting to Rp 45,937 and Rp 9,708,197, respectively.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 8 Juni 2007, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia.

Bank melakukan penawaran umum perdana atas 267.960.220 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 2.850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Maret 2008.

Persetujuan atas Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Surat dari Bapepam No. S-1253/BL/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Pemberitahuan Efektifnya Penyataan Pendaftaran.

Penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 November 2010, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("HMETD I"), dengan cara mengeluarkan saham dari portepel Bank.

Pada tanggal 10 Desember 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 188.787.238 saham baru atas nama dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 943.936.190 saham menjadi sejumlah 1.132.723.428 saham.

Persetujuan atas Penerbitan HMETD I berdasarkan Surat dari Bapepam No.S-10615/BL/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Penyataan Pendaftaran.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 18.878 dan agio saham sebesar Rp 1.293.458.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

c. Changes in Capital Due to Corporate Actions

Initial Public Offering

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 8 June 2007, the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares at Indonesia Stock Exchange.

The Bank undertook an initial public offering of 267,960,220 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 2,850 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares were listed at Indonesia Stock Exchange on 12 March 2008.

Approval of the Initial Public Offering based on Letter from Bapepam No.S-1253/BL/2008 dated 29 February 2008 regarding Notification of the Effectiveness of the Registration Statement.

Increase of capital through Pre-Emptive Right ("HMETD")

Based on the EGMS dated 25 November 2010, the shareholders approved the Bank's plan to increase the Bank's share capital through the issuance of Pre-Emptive Right I ("HMETD I"), by issuing shares from the Bank's portfolio shares.

On 10 December 2010, the Bank's shares were listed at the Indonesia Stock Exchange with 188,787,238 new registered shares with value of Rp 100 (full amount) per share; accordingly, the number of shares issued and fully paid changed from 943,936,190 shares to 1,132,723,428 shares.

Approval of the Issuance of HMETD I based on Letter from Bapepam No.S-10615/BL/2010 dated 24 November 2010 regarding Notification of the Effectiveness of the Registration Statement.

The Bank obtained Rp 18,878 additional share capital and Rp 1,293,458 additional paid-in capital.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi (lanjutan)

Penawaran Umum Perdana Saham (lanjutan)

Pemecahan saham

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 Februari 2011, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 20 (nilai penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 1.132.723.428 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham akan menjadi sejumlah 5.663.617.140 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 28 Maret 2011, saham Bank dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 5.606.980.970 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Peningkatan modal melalui *Convertible Loan*

Pada tanggal 14 Maret 2012, Bank telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dengan mengeluarkan 176.670.117 saham baru dari portepel kepada International Finance Corporation ("IFC") sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement*. Setelah itu, saham tersebut telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Total modal disetor dan ditempatkan Bank setelah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjadi 5.840.287.257 saham.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 3.533 dan agio saham sebesar Rp 135.927.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***c. Changes in Capital Due to Corporate Actions** (continued)*

***Initial Public Offering** (continued)*

Stock split

Based on EGSM dated 25 February 2011, the shareholders approved the Bank's plan to split share from nominal value of Rp 100 (full amount) per share to Rp 20 (full amount) per share; accordingly, it changed the number of shares issued and fully paid from 1,132,723,428 shares with nominal value of Rp 100 (full amount) per share to 5,663,617,140 shares with nominal value of Rp 20 (full amount) per share.

On 28 March 2011, the Bank's shares were listed at the Indonesia Stock Exchange for 5,606,980,970 shares with nominal value of Rp 20 (full amount) per share.

Capital increase through Convertible Loan

On 14 March 2012, the Bank obtained an approval to increase issued and paid-up capital by issuing 176,670,117 shares from the Bank's unissued shares to International Finance Corporation ("IFC") in accordance with terms and condition in the Convertible Loan Agreement. Afterwards, those Bank's shares were listed at Indonesia Stock Exchange. Total issued and paid-up capital of the Bank after the Capital Increases without Pre-Emptive Rights was 5,840,287,257 shares.

The Bank obtained Rp 3,533 additional share capital and Rp 135,927 additional paid-in capital.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Perubahan Modal Karena Aksi Korporasi (lanjutan)

Pembelian kembali saham

Melalui surat OJK No. S-20/PB.31/2016 tanggal 18 Februari 2016, Bank telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham. Dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Bank, jumlah alokasi dana tidak melebihi Rp 535.500 untuk membeli sebanyak-banyaknya 150.000.000 saham atau 2,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Bank, yang akan dilakukan dalam periode dari tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 23 Mei 2016. Sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, Bank telah membeli kembali saham Bank sebanyak 95.198.900 lembar saham dengan total dana pembelian sebesar Rp 262.874.

Tujuan dari pembelian kembali saham adalah untuk memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien dan memungkinkan untuk menurunkan keseluruhan biaya modal, meningkatkan laba per saham (*EPS*), serta *Return on Equity (ROE)* secara berkelanjutan.

Pengalihan Saham Tresuri

Di dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 mengenai Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara signifikan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 April 2021 atas agenda keenam mengenai pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham tresuri untuk pemberian remunerasi yang bersifat *variable*, maka pada tanggal 31 Agustus 2021, Bank telah mengalihkan sebanyak 2.633.202 saham yang dicatat sebagai saham tresuri kepada para *Material Risk Takers*. Sementara itu, sebanyak 92.565.698 sisa saham yang dicatat sebagai saham tresuri akan dijual kembali ke pasar melalui Bursa Efek mulai tanggal 14 Oktober 2021.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Desember 2023 telah menyetujui penarikan 92.292.198 saham tresuri dan karenanya akan mengurangi modal Diterbitkan serta Modal Disetor Bank dan menambah Modal Dalam Portepel, apabila Kreditur tidak keberatan dengan rencana ini dalam batas jangka waktu tertentu sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***c. Changes in Capital Due to Corporate Actions** (continued)*

Shares buyback

The Bank was approved by OJK to conduct shares buyback by letter No. S-20/PB.31/2016 dated 18 February 2016. In the implementation of shares buyback by the Bank, the allocated fund up to Rp 535,500 to buy up to 150,000,000 shares or 2.57% of the Bank's issued and fully paid-up capital shall be done between 23 February 2016 and 23 May 2016. Up to 23 May 2016, the Bank had repurchased 95,198,900 shares using total purchasing fund amounting to Rp 262,874.

The objective of conducting shares buyback is to provide flexibility to achieve an efficient capital structure and enable the Bank to lower the overall cost of capital, increasing the Earnings per Share (EPS) and Return on Equity (ROE) on an on-going basis.

Transfer of Treasury Shares

In compliance with OJK Regulation No.02/POJK.04/2013 dated 26 August 2013 regarding the Buyback of Issued Shares by Issuers or Public Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions and the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated 22 April 2021 on the sixth agenda regarding the transfer of shares resulted from the buy back which are retained as treasury shares to be utilized for variable remuneration, hence on 31 August 2021, the Bank has transferred 2,633,202 shares registered under treasury shares to Material Risk Takers. While the remaining 92,565,698 shares registered under treasury shares will be sold back to the market through Stock Exchange starting 14 October 2021.

Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 7 December 2023 approved the withdrawal of 92,292,198 treasury shares and therefore will reduce the Issued as well as Paid-up Capital and increase the Portfolio Capital, subject to the Creditor's objection within particular time limit according to the Law of Republic of Indonesia on Limited Liability Company No.40 year 2007.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Efek-efek yang diterbitkan

Utang obligasi

Nama/*Name*	Pernyataan efektif/ *Effective registration*	Persetujuan/ *Approval*	Jumlah pokok/ *Nominal value*	Jangka waktu/ *Tenor*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga setahun/ *Interest rate per annum*
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I")/ *Bank BTPN Continuing Bonds IV Phase I Year 2019 with a fixed interest rate ("Continuing Bonds IV Phase I")*	27 November/ *November* 2019	Dinyatakan efektif oleh OJK, melalui suratnya No. S-168/D.04/2019 tanggal 15 November 2019/ *Became effective by OJK through its letter No. S-168/D.04/2019 dated 15 November 2019*	Seri/*Series* A: 799.000	Seri/*Series* A: 3 tahun/*years*	26 November/ *November* 2022	7.55%
			Seri/*Series* B: 201.000	Seri/*Series* B: 5 tahun/*years*	26 November/ *November* 2024	7.75%

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan Bank dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dananya dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Securities issued

Bonds payable

All bonds issued by the Bank were listed at the Indonesia Stock Exchange and the funds are used for business growth in form of credit expansion.

PT Bank Mega Tbk acts as the Trustee for Continuing Bonds IV Phase I.

e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit

As of 31 December 2023 and 2022, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors was as follows:

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Chow Ying Hoong	Chow Ying Hoong	*President Commissioner*
Komisaris	Takeshi Kimoto	Takeshi Kimoto	*Commissioner*
Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ninik Herlani Masli Ridhwan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Onny Widjanarko*)	Irwan Mahjudin Habsjah	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Edmund Tondobala	Edmund Tondobala	*Independent Commissioner*
Komisaris	Ongki Wanadjati Dana	Ongki Wanadjati Dana	*Commissioner*
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Henoch Munandar	Henoch Munandar	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Kaoru Furuya	Kaoru Furuya	*Deputy President Director*
Wakil Direktur Utama	Darmadi Sutanto	Darmadi Sutanto	*Deputy President Director*
Direktur Kepatuhan	Dini Herdini	Dini Herdini	*Compliance Director*
Direktur	Atsushi Hino**)	Kan Funakoshi	*Director*
Direktur	Keishi Kobata***)	Hiromichi Kubo	*Director*
Direktur	Merisa Darwis	Merisa Darwis	*Director*
Direktur	Hanna Tantani	Hanna Tantani	*Director*

*) Onny Widjanarko diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 8 Mei 2023.

**) Atsushi Hino diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2023.

***) Keishi Kobata diangkat sebagai Direktur pada RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Juli 2023.

**) Onny Widjanarko was appointed as Independent Commissioner at Annual GMS on 13 April 2023 and has been effective assume the office on 8 May 2023.*

***) Atsushi Hino was appointed as Director at Annual GMS on 13 April 2023 and has been effective assume the office on 15 May 2023.*

****) Keishi Kobata was appointed as Director at Extraordinary GMS on 22 June 2023 an has been effective assume the office on 25 July 2023.*

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

The composition of the Audit Committee as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Ketua	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ninik Herlani Masli Ridhwan	*Chairman*
Anggota	Edmund Tondobala	Edmund Tondobala	*Member*
Anggota	Aria Kanaka	Aria Kanaka	*Member*
Anggota	Ivan Purnama Sanoesi	Ivan Purnama Sanoesi	*Member*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Eneng Yulie Andriani.

Satuan Kerja Audit Internal

Kepala Satuan Kerja Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Nurhajati Soerjo Hadi.

f. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan pada entitas anak sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***e. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit** (continued)*

Corporate Secretary

The Corporate Secretary as of 31 December 2023 and 2022 was Eneng Yulie Andriani.

Internal Audit Unit

Head of Internal Audit as of 31 December 2023 and 2022 was Nurhajati Soerjo Hadi.

f. Subsidiaries

The Bank has ownership in the following subsidiaries:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Bidang usaha/ *Business activities*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun mulai operasi komersial/ *year of starting commercial operations*	Jumlah aset/ *Total assets*	
			30 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022		31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk	Jakarta	Perbankan/ *Banking*	70.0%	70.0%	2014	21,435,366	21,161,976
PT BTPN SYARIAH VENTURA*	Jakarta	Modal Ventura/ *Venture Capital*	70.3%	70.3%	2022	320,596	313,497

* Kepemilikan tidak langsung melalui PT BANK BTPN SYARIAH Tbk sebesar 69,3% dan kepemilikan langsung sebesar 1,0%.

* *Indirect ownership through PT BANK BTPN SYARIAH Tbk of 69.3% and direct ownership of 1.0%.*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk berkantor pusat di Menara BTPN, lantai 12, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia menyetujui rencana Bank untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") melalui suratnya No. 15/10/DPBI/PBI-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan Akta Notaris No. 26 dan No. 27 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, Bank telah melakukan akuisisi atas Entitas Anak dan menjadi pemegang saham mayoritas. Hal ini telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.10-04338 tertanggal 12 Februari 2014.

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk's head office is located at Menara BTPN 12th floor, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.

On 19 July 2013, Bank Indonesia approved the Bank's plan to acquire 70% shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") through its letter No. 15/10/DPBI/PBI-5/rahasia which is subject to the change of BSPD's business activites from a conventional bank into a commercial bank under sharia principles.

Based on Notarial Deed No. 26 and No. 27 dated 30 January 2014 before Hadijah S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Bank has acquired the Subsidiary and has become the majority shareholder. It was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.10-04338 dated 12 February 2014.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (lanjutan)

Pemisahan Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 4 Juli 2014 di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"). Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

Proses Konversi Izin Usaha

Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi BSPD berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. Izin tersebut mengubah kegiatan usaha Entitas Anak dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Entitas Anak memperoleh izin pemisahan dari OJK berdasarkan Surat No: S-17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan Entitas Anak memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

Perubahan Nama Entitas Anak

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., BSPD mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Subsidiaries** (continued)*

***PT BANK BTPN SYARIAH Tbk** (continued)*

Spin off of Sharia Business Unit

On 20 January 2014, the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders which was notarised by Notarial Deed No. 8 dated 4 July 2014 before Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta approved the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"). The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 which has been amended by PBI No. 15/14/PBI/2013 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, i.e. the approval of the conversion permit and spin-off permit.

Conversion of business license

On 22 May 2014, the Subsidiary received its permit from Bank Indonesia regarding conversion of BSPD based on the Decision Letter of Board of Commissioner of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. The permit changed the Subsidiary's business activities from conventional commercial bank to commercial bank which conducts business activities based on sharia principles.

On 23 June 2014, the Subsidiary received its spin-off permit from OJK based on the Letter No: S - 17/PB.1/2014. The spin-off of UUS BTN was made under Spin-off Deed No. 8 dated 4 July 2014 and was notarised by Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. Furthermore, the spin-off became effective on 14 July 2014 and the Subsidiary started its operational activity based on sharia principles, as reported to Bank Indonesia through its letter No. S.031/DIR/LG/VII/2014 dated 17 July 2014 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Sharia Commercial Bank Resulting from the Spin-Off.

Subsidiary's Change of Name

Pursuant to the Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 juncto Notarial Deed No. 30 dated 25 September 2013 before Hadijah, S.H., M.Kn., BSPD changed its name to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. The above change was approved by the Minister of Law and Human Rghts of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-50529.AH.01.02 Year 2013 dated 1 October 2013 and has been published in State Gazette No.94 year 2013, in supplement of the State Gazette No. 124084 dated 22 November 2013.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (lanjutan)

Perubahan Nama Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak mengubah kembali namanya menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk sebagaimana didasarkan pada Akta No. 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0034666.AH. 01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 Mei 2020, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020, dan telah mendapatkan persetujuan Perubahan Nama ini berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-66/PB.101/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha karena Perubahan Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juni 2020.

Anggaran Dasar

Setelah menjadi Bank Umum Syariah, Entitas Anak telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Entitas Anak sebagaimana tercantum dalam Akta No. 35 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0309443 tanggal 17 Mei 2021.

Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Susunan terkini Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Entitas anak sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk Nomor 46 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor No. AHU-AH.01.09-0112846 tanggal 27 April 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Subsidiaries** (continued)*

***PT BANK BTPN SYARIAH Tbk** (continued)*

***Subsidiary's Change of Name** (continued)*

The Subsidiary further changed its name to PT BANK BTPN SYARIAH Tbk pursuant to the Notarial Deed No. 26 dated 16 April 2020, before Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU- 0034666.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 8 May 2020 and the Letter of Acceptance of the amendment to the Articles of Association No. No. AHU-AH.01.03-0214020 dated 8 May 2020, The change of name of the BTPNS has been approved based on the letter from the Financial Services Authority ("OJK") number S-66/PB.101/2020 dated 4 June 2020 concerning the determination of the use of Business License on behalf PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk into PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and the Copy of Approval of Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Number KEP-99/PB.1/2020 dated 4 June 2020.

Articles of Association

The Subsidiary's Articles of Association have been amended several times, after becoming Sharia Commercial Bank. The latest amendment to the Articles of Association of the Subsidiary was stated in deed No. 35 dated 21 April 2021, which was notarised by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta adjustment to OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019, No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Letter of Acceptance of the amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0309443 dated 17 May 2021.

Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

The latest composition of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Subsidiary as specified in the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk Number 46 dated 27 April 2023 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in Administrative City of South Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0112846 dated 27 April 2023 regarding Receipt of Notification on the Change of Data of Company of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (lanjutan)

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Anak, maksud dan tujuan serta kegiatan Entitas Anak adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Entitas Anak yang dilakukan melalui surat edaran resolusi pemegang saham pada tanggal 16 November 2017, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 25 April 2018, Entitas Anak memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan surat No. S-36/D-04/2018 untuk penawaran umum saham perdana tersebut.

Entitas Anak melakukan penawaran umum perdana atas 770.370.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 975 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018. Dana yang diterima oleh Entitas Anak atas penawaran umum perdana adalah sebesar Rp 735.020 (setelah biaya emisi dan pajak).

Atas tambahan saham yang diterbitkan sehubungan dengan penawaran umum perdana Entitas Anak kepada publik, jumlah kepemilikan Bank atas Entitas Anak menurun dari 70% menjadi 63%.

Akuisisi dari kepentingan non-pengendali pada Entitas Anak

Pada tanggal 11 Mei 2018, Bank mengakuisisi 7% saham atas Entitas Anak dengan imbalan pembelian sebesar Rp 550.045. Kepentingan non-pengendali Entitas Anak pada tanggal akuisisi adalah Rp 525.778. Dengan demikian, kepemilikan Bank atas Entitas Anak kembali menjadi 70%. Dampak perubahan atas kepemilikan saham Entitas Anak adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Subsidiaries** (continued)*

***PT BANK BTPN SYARIAH Tbk** (continued)*

The Objectives and Scope of Activities

In accordance with article 3 of the Subsidiary's Articles of Association, the Subsidiary's objective and scope of activities is to engage in banking industry based on sharia principles.

Initial Public Offering

Pursuant to the Subsidiary's Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 16 November 2017, the shareholders approved the plan to conduct Initial Public Offering of Ordinary Shares to public through capital market and listing of the Subsidiary's shares at the Indonesia Stock Exchange. On 25 April 2018, the Subsidiary obtained the effective notification from OJK through letter No. S-36/D-04/2018 for this initial public offering.

The Subsidiary undertook an initial public offering of 770,370,000 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 975 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares were listed at the Indonesia Stock Exchange on 8 May 2018. The funds received by the Subsidiary from the initial public offering amounting to Rp 735,020 (net of issuance costs and tax).

In relation to the additional shares issued in connection with the initial public offering of the Subsidiary to the public, the Bank's ownership in the Subsidiary decreased from 70% to 63%.

Acquisition of non-controlling interest of Subsidiary

On 11 May 2018, the Bank acquired 7% shares of Subsidiary for a purchase consideration of Rp 550,045. The non-controlling interest in Subsidiary on the date of acquisition was Rp 525,778. Therefore, the Bank's ownership in the Subsidiary became 70%. The effect of changes in the ownership interest of Subsidiary was as follows:

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (lanjutan)

Akuisisi dari kepentingan non-pengendali pada Entitas Anak (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

f. Subsidiaries *(continued)*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk *(continued)*

Acquisition of non-controlling interest of Subsidiary *(continued)*

	2018	
Kepentingan non-pengendali yang diakuisisi	525,778	*Non-controlling interest acquired*
Imbalan yang dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali	(550,045)	*Consideration paid to non-controlling interest*
Selisih lebih imbalan uang dibayarkan yang diakui pada ekuitas Bank	(24,267)	*Excess of consideration paid as recorded in the Bank's equity*

Dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali pada ekuitas adalah sebagai berikut:

Effects of transactions with non-controlling interests on the equity was as follows:

	2018	
Perubahan pada ekuitas:		*Changes in equity:*
- Dampak atas penawaran umum Perdana	209,242	*Effect on initial public offering*
- Akuisisi saham tambahan pada Entitas Anak	(24,267)	*- Acquisition of additional interest in Subsidiary*
Dampak bersih pada ekuitas	184,975	*Net effect in equity*

Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak

Entitas Anak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2022 kepada para pemegang saham berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023. Adapun jumlah dividen tunai yang dibagikan sebesar Rp 712.535 atau Rp 92,50 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 12 Mei 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai kepada pemegang saham (pemilik warkat *scriptless*) sesuai daftar pemegang saham pada tanggal 2 Mei 2023.

Entitas Anak telah pula melaksanakan pembagian dividen tunai (warkat *non-scriptless*) kepada PT BANK BTPN Tbk selaku pemegang saham pengendali, atas kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Mei 2023.

Adapun *pay-out ratio* atas pembagian dividen tunai keempat adalah maksimal sebesar 40%.

Cash dividend distribution by Subsidiary

The Subsidiary distributed the third cash dividend to its shareholders based on the approval of its Annual General Meeting of Shareholders held on 12 April 2023. The amount of cash dividends distributed was Rp 712,535 or Rp 92.50 (full amount) per share.

On 12 May 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia distributed the Subsidiary's cash dividend to shareholders (scriptless Shareholders) according to list of shareholders as of 2 May 2023.

The Subsidiary had also carried out the distribution of cash dividend for non-scriptless shareholders to PT BANK BTPN Tbk as controlling shareholders, for 1% shares ownership that was not registered in the Indonesian Stock Exchange on 12 May 2023.

The pay-out ratio of the fourth distribution of cash dividend is the maximum of 40%.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (lanjutan)

Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak (lanjutan)

Entitas Anak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021 kepada para pemegang saham berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022. Adapun jumlah dividen tunai yang dibagikan sebesar Rp 475.625 juta atau Rp 61,75 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 20 Mei 2022, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai kepada pemegang saham (pemilik warkat *scriptless*) sesuai daftar pemegang saham pada tanggal 11 Mei 2022.

Entitas Anak telah pula melaksanakan pembagian dividen tunai (warkat *non-scriptless*) kepada PT BANK BTPN Tbk selaku pemegang saham pengendali, atas kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Mei 2022.

Adapun *pay-out ratio* atas pembagian dividen tunai ketiga adalah maksimal sebesar 32,5%.

PT BTPN SYARIAH VENTURA

PT BTPN SYARIAH VENTURA (BTPNS Ventura) berkantor di Jl. Radio Dalam No.100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0066702.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021, telah dibentuk entitas anak dari PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

Susunan Pemegang Saham terakhir BTPNS Ventura adalah sebagaimana dituangkan ke dalam Akta No. 10 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0158924 tanggal 10 Maret 2022.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Subsidiaries** (continued)*

***PT BANK BTPN SYARIAH Tbk** (continued)*

***Cash dividend distribution by Subsidiary** (continued)*

The Subsidiary distributed the third cash dividend to its shareholders based on the approval of its Annual General Meeting of Shareholders held on 21 April 2022. The amount of cash dividends distributed was Rp 475,625 or Rp 61.75 (full amount) per share.

On 20 May 2022, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia distributed the Subsidiary's cash dividend to shareholders (scriptless Shareholders) according to list of shareholders as of 11 May 2022.

The Subsidiary had also carried out the distribution of cash dividend for non-scriptless shareholders to PT BANK BTPN Tbk as controlling shareholders, for 1% shares ownership that was not registered in the Indonesian Stock Exchange on 20 May 2022.

The pay-out ratio of the third distribution of cash dividend is the maximum of 32.5%.

PT BTPN SYARIAH VENTURA

PT BTPN SYARIAH VENTURA (BTPNS Ventura)'s office is located at Jl. Radio Dalam No.100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

Based on the Deed of Establishment Number 36 dated 21 October 2021, drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., Mkn, Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0066702.AH.01.01.Year 2021 dated 22 October 2021, a subsidiary of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

The latest composition of the Shareholders of BTPNS Ventura is as specified in the Deed No. 10 dated 10 March 2022 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.03-0158924 dated 10 March 2022.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BTPN SYARIAH VENTURA (lanjutan)

Sedangkan Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BTPNS Ventura terakhir adalah sebagaimana dituangkan kedalam akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham nomor 40 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0181484 tanggal 3 November 2023.

BTPNS Ventura telah mendapatkan perijinan operasional dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Nomor KEP-23/D.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah kepada PT BTPN SYARIAH VENTURA dan efektif menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 30 Mei 2022.

Tujuan pendirian BTPNS Ventura adalah untuk menunjang kegiatan usaha dan aspirasi Entitas Anak dalam mewujudkan digital ekosistem bagi segmen yang dilayaninya.

BTPNS Ventura merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas terkait yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Subsidiaries** (continued)*

***PT BTPN SYARIAH VENTURA** (continued)*

Whereas the latest composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of BTPNS Ventura is as specified in the in the Deed of Circular Resolution of the General Meeting of Shareholders number 40 dated 30 October 2023, made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.09-0181484 dated 3 November 2023.

BTPNS Ventura has obtained operational permits from the Financial Services Authority by means of letter Number KEP-23/D.05/2022 dated 20 May 2022, regarding the Granting of Business Permit of Sharia Venture Capital Company to PT BTPN SYARIAH VENTURA and effectively carried out its operational activities on 30 May 2022.

The purpose of establishing BTPNS Ventura is to support the business activities and aspiration of the Subsidiary in realizing a digital ecosystem for the segment it served.

BTPNS Ventura is a company that carries out the sharia venture capital business activities, venture fund management, and other business activities upon approval from relevant authorities, all of which are carried out based on sharia principles.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang material, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut "Grup") pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The material accounting policies, applied in the preparation of the consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries (together referred to as the "Group") as of and for the years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK" yang fungsinya dialihkan kepada OJK sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No. KEP 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan konsolidasian ini yang merupakan konsolidasian dari laporan keuangan Grup telah disetujui untuk diterbitkan oleh direksi pada tanggal 22 Februari 2024.

Laporan keuangan konsolidasi ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dalam Bahasa Indonesia.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Kecuali dinyatakan secara khusus, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah terdekat.

Laporan keuangan konsolidasian disusun atas basis akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, dan efek-efek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Statement of Compliance *(continued)*

These consolidated financial statements have also been prepared and presented in accordance with Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK", whose function has been transferred to OJK starting 1 January 2013) rule No. VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

These consolidated financial statements which represent the consolidation of the financial statements of the Group, were authorized for issuance by the Board of Directors on 22 February 2024.

These consolidated financial statements are presented in Indonesian and English languages. Should there be any difference in interpretation due to translation, the Indonesian version shall prevail.

b. Basis for Preparation of Consolidated Financial Statements

Figures in these consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Group's functional currency. Unless otherwise stated, financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement.

The consolidated statements of cash flows present the changes in cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities. The statements of cash flows are prepared using the direct method. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and securities that mature within three months from the date of acquisition, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Penggunaan pertimbangan dan estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di Catatan 3.

d. Perubahan kebijakan akuntansi

Berikut ini adalah standar dan interpretasi standar yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023, memiliki pengaruh atas laporan keuangan konsolidasian Grup, dan mungkin akan membutuhkan penerapan secara retrospektif sebagaimana diatur dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan":

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait: Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang: Pajak Tangguhan: Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang: Reformasi Pajak Internasional - Model Pilar Dua"

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

c. Use of judgments and estimates

The preparation of consolidated financial statements in conformity with SAK requires management to make judgments and estimates that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the periods in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognized in the consolidated financial statements are described in Note 3.

d. Changes in accounting policies

The following standards and interpretation of standards became effective on 1 January 2023, have an effect on the Group's consolidated financial statements, and may require retrospective application under PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors":

- *Amendments to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies"*
- *Amendments to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors: Definition of Accounting Estimates"*
- *Amendments to PSAK 46 "Income Tax: Deferred Tax: Assets and Liabilities from Single Transaction"*
- *Amendments to PSAK 46 "Income Tax: International Tax Reform - Pillar Two Model Rules"*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Penerapan standar akuntansi yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Terkait Amandemen PSAK 46 "Pajak Tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal", Bank mengakui aset pajak tangguhan tersendiri sehubungan dengan liabilitas sewa dan kewajiban pajak tangguhan sehubungan dengan aset hak guna nya. Namun, tidak ada dampak pada laporan posisi keuangan konsolidasian karena saldo memenuhi syarat untuk saling hapus sesuai PSAK 46. Lihat catatan 13f untuk mengetahui dampak penerapan amandemen tersebut.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Changes in accounting policies** (continued)*

The implementation of the above-mentioned accounting standards did not have significant impacts to the consolidated financial statements.

With regards to Amendments to PSAK 46 "Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a single transaction", the Bank has recognised a separate deferred tax asset in relation to its lease liabilities and deferred tax liability in relation to its right-of-use assets. However, there was no impact on the consolidated statement of financial position because the balances qualify for offset under PSAK 46. See note 13f for the impact of adopting the amendments.

e. Penjabaran Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup, dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Saldo akhir tahun aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB.

Kurs valuta asing utama yang digunakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

e. Foreign Currency Transactions and Balances Translation

Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah, the Group's functional currency, at the exchange rates prevailing at the transaction date.

Year-end balances monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using exchange rate as of the reporting date (closing) as determined by Bank Indonesia, i.e. middle rates which are the average of buying rates and selling rates per Reuters at 16.00 WIB.

The major exchange rates used as of the reporting date were as follows (full amount):

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	15,397.00	15,567.50	*1 United States Dollar (USD)*
1 Dolar Australia (AUD)	10,520.77	10,557.88	*1 Australian Dollar (AUD)*
1 Dolar Singapura (SGD)	11,676.34	11,592.88	*1 Singapore Dollar (SGD)*
1 Dolar Hong Kong (HKD)	1,970.73	1,996.55	*1 Hong Kong Dollar (HKD)*
1 Poundsterling Inggris (GBP)	19,626.56	18,786.09	*1 British Poundsterling (GBP)*
1 Yen Jepang (JPY)	108.88	117.81	*1 Japanese Yen (JPY)*
1 Euro (EUR)	17,038.32	16,581.72	*1 Euro (EUR)*

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam valuta asing dan dari penjabaran aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing diakui pada laba rugi.

The exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of monetary assets and monetary liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Penjabaran Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing (lanjutan)

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

f. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Bank dan entitas anak.

Suatu pengendalian atas entitas anak dianggap ada bilamana Bank terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak. Bank akan menilai kembali apakah memiliki kendali jika ada perubahan atas satu atau lebih unsur pengendalian. Ini termasuk situasi dimana hak protektif yang dimiliki (seperti yang dihasilkan dari hubungan pinjaman) menjadi substantif dan mengakibatkan Bank memiliki kekuasaan atas entitas anak.

Laporan keuangan dari entitas anak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian berakhir.

Ketika Bank kehilangan kendali atas entitas anak, Bank menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, dan kepentingan non-pengendali terkait dan komponen ekuitas lainnya. Laba atau rugi yang timbul diakui dalam laba rugi. Kepentingan yang dipertahankan di entitas anak sebelumnya diukur sebesar nilai wajar ketika pengendalian hilang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Foreign Currency Transactions and Balances Translation *(continued)*

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

f. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Bank and its subsidiaries.

Control over a subsidiary is presumed to exist if the Bank is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiaries. The Bank reassesses whether it has control if there are changes to one or more of the elements of the control. This includes circumstances in which protective rights held (e.g. those resulting from a lending relationship) become substantive and lead to the Bank having power over a subsidiary.

The financial statements of the subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date on which control commences until the date when control ceases.

When the Bank loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value when the control is lost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo antar perusahaan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

Akuisisi entitas anak oleh Bank dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan akuisisi diukur pada nilai wajar aset yang diberikan, instrumen ekuitas yang diterbitkan, liabilitas yang terjadi atau diambil dan penyesuaian harga beli kontinjensi, jika ada, pada tanggal transaksi. *Goodwill* yang timbul dari akuisisi entitas anak diuji penurunan nilainya minimal secara tahunan. Keuntungan yang dihasilkan atas pembelian dengan diskon diakui langsung pada laba rugi. Biaya-biaya transaksi yang timbul dari akuisisi entitas anak dibebankan langsung pada laba rugi tahun berjalan.

Kepentingan non-pengendali diakui pada tanggal kombinasi bisnis dan selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan aset bersih teridentifikasi entitas anak.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Bank pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi antara pemegang ekuitas dan dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas entitas anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham non-pengendali pada entitas anak tersebut.

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***f. Basis of Consolidation** (continued)*

All inter-company transactions and balances are eliminated in the consolidated financial statements; accordingly, the consolidated financial statements include only transactions and balances with other parties.

The acquisition method is used to account for the acquisition of subsidiary by the Bank. The cost of acquisition is measured at the fair value of the assets given, equity instruments issued, liabilities incurred or assumed and contingent consideration, if any, at the transaction date. Goodwill arising from the acquisition of subsidiary is tested at least annually for impairment. Any gain on bargain purchase is recognized in profit or loss immediately. Transaction costs incurred in the acquisition of Subsidiary are directly expensed in the current year profit or loss.

Non-controlling interest is recognized at the date of initial business combination and subsequently adjusted by proportion of change in identifiable net assets of subsidiaries.

Changes in ownership interest in subsidiary that do not result in a loss of control are treated as transaction between equity holders and are accounted for as equity transactions.

Non-controlling interest is presented as part of equity in the consolidated statements of financial position and represents the non-controlling shareholders' proportionate share in the net income for the year and equity of the subsidiary based on the percentage of ownership of the non-controlling shareholders in the subsidiary.

g. Transactions with Related Parties

In these consolidated financial statements, the term related parties is used as defined in PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Grup terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, pinjaman yang diberikan, pembiayaan/piutang syariah, penyertaan saham dan tagihan lainnya (yang disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain).

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank-bank lain, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, akrual, liabilitas sewa, pinjaman subordinasi, dan liabilitas lain-lain.

h.1. Klasifikasi

Aset keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

i. Biaya perolehan diamortisasi;

ii. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (“FVOCI”);

iii. Nilai wajar melalui laba rugi (“FVTPL”)

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari kategori ini pada saat pengakuan awal berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki serta karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*hold to collect*); dan

- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

h. Financial Assets and Financial Liabilities

The Group’s financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, derivative receivables, acceptance receivables, loans, sharia financing/receivables, investment in shares and other receivables (presented as part of other assets).

The Group’s financial liabilities consist of obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, derivative payables, acceptance payables, securities issued, borrowings, accruals, lease liabilities, subordinated loans, and other liabilities.

h.1. Classification

Financial assets

The Bank classified its financial assets into the following categories on initial recognition:

i. At amortized cost;

ii. Fair value through other comprehensive income (“FVOCI”);

iii. Fair value through profit or loss (“FVTPL”)

Financial asset is classified into one of these categories on initial recognition based on the business model within which it is held, and its contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (hold to collect); and*

- *Its contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada FVOCI hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*hold to collect and sell*); dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset keuangan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal, kecuali dalam periode setelah Bank mengubah model bisnis yang mengelola aset keuangan.

Penilaian model bisnis

Model bisnis Bank ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Model bisnis Bank tidak bergantung pada intensi manajemen untuk instrumen individu. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini bukan merupakan pendekatan instrumen-per-instrumen untuk klasifikasi dan ditentukan pada level agregasi yang lebih tinggi yaitu pada level portfolio.

Model bisnis Bank mengacu pada pengelolaan aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Penilaian ini tidak dilakukan atas dasar skenario bahwa Bank tidak mengharapkan terjadinya skenario "kondisi terburuk" atau skenario "kondisi stres". Dalam kondisi Bank menjual portofolio aset keuangan tertentu dalam skenario kondisi terburuk, skenario itu tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap model bisnis untuk aset tersebut jika Bank secara wajar mengharapkan bahwa skenario seperti itu tidak akan terjadi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Financial Assets and Financial Liabilities** (continued)*

***h.1. Classification** (continued)*

***Financial assets** (continued)*

A financial asset is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (hold to collect and sell); and*
- *Its contractual terms of financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after the Bank changes its business model for managing financial assets.

Business model assessment

The Bank's business model is defined at a level that reflects how group of financial assets are managed together to achieve certain business objectives. The Bank's model does not depend on management's intention for individual instruments. Accordingly, this condition is not an instrument-by-instrument approach to classification and is determined at a higher level of aggregation, which is at portfolio level.

The Bank's business model refers to managing financial assets to generate cash flows. Cash flows will result from obtaining contractual cash flows, selling financial assets or both. This assessment is not made based on a scenario where the Bank does not expect a "worst condition" scenario or a "stress condition" scenario to occur. In a situation where the Bank sells certain portfolios of financial assets in a worst-case scenario, that scenario will not affect the assessment of the business model for that asset if the Bank reasonably expects that such a scenario will not occur.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Akan tetapi, ketika Bank menilai model bisnis untuk aset keuangan yang baru diterbitkan atau baru dibeli, Bank harus mempertimbangkan informasi tentang bagaimana arus kas direalisasikan di masa lalu, bersama dengan semua informasi yang relevan lainnya.

Model bisnis untuk mengelola aset keuangan adalah kenyataan dan bukan hanya sebuah asersi. Hal ini biasanya diobservasi melalui aktivitas yang dilakukan Bank untuk mencapai tujuan dari model bisnis. Bank mempertimbangkan semua bukti yang relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Bukti yang relevan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- kebijakan dan tujuan yang dinyatakan untuk portofolio dan pengoperasian kebijakan tersebut dalam praktiknya. Secara khusus, apakah strategi manajemen berfokus pada menghasilkan pendapatan bunga kontraktual, mempertahankan profil suku bunga tertentu, mencocokkan durasi aset keuangan dengan durasi liabilitas yang mendanai aset tersebut atau mewujudkan arus kas melalui penjualan aset;

- bagaimana kinerja portofolio dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank;

- risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan strategi mengenai bagaimana risiko tersebut dikelola; dan

- bagaimana manajer bisnis dikompensasi (sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Financial Assets and Financial Liabilities** (continued)*

***h.1. Classification** (continued)*

***Financial assets** (continued)*

Business model assessment (continued)

However, when the Bank assesses the business model for newly issued or recently purchased financial assets, it must consider information about how cash flows were realized in the past, along with all other relevant information.

The business model for managing financial assets is a reality and not just an assertion. This is usually observed through the activities the entity carries out to achieve the objectives of the business model. The Bank considers all relevant evidence available at the valuation date. The relevant evidence includes, but is not limited to:

- *the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. In particular, whether management's strategy focusses on earning contractual interest income, maintaining a particular interest rate profile, matching the duration of the financial assets to the duration of the liabilities that are funding those assets or realising cash flows through sale of the assets;*

- *how the performance of the portfolio is evaluated and reported to key management personnel of the Bank;*

- *the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and its strategy for how those risks are managed; and*

- *how the business manager is compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of assets under management or the contractual cash flows obtained).*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI)

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Ketentuan percepatan pelunasan dan perpanjangan;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Financial Assets and Financial Liabilities** (continued)*

***h.1. Classification** (continued)*

***Financial assets** (continued)*

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI)

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Financial liabilities

Financial liabilities are classified into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:

i. Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities classified as held for trading;

ii. Financial liabilities measured at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

h.1. Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit-taking*) yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai instrumen diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari liabilitas keuangan non-derivatif yang tidak dimiliki Bank untuk diperdagangkan dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi.

h.2. Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Financial Assets and Financial Liabilities** (continued)*

***h.1. Classification** (continued)*

***Financial liabilities** (continued)*

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivatives are also categorised as held for trading instrument unless they are designated and effective as hedging instruments.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities are recognized in current year profit or loss.

Financial liabilities measured at amortized cost consist of non-derivative financial liabilities that are not held for trading purpose and not designated at fair value through profit or loss.

h.2. Recognition

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

h.2. Pengakuan (lanjutan)

Grup pada awalnya mengakui pinjaman/pembiayaan yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

h.3. Biaya perolehan diamortisasi dan nilai tercatat bruto

'Biaya perolehan diamortisasi' aset keuangan atau liabilitas keuangan merupakan suatu nilai dimana aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan cadangan kerugian penurunan nilai. 'Nilai tercatat bruto aset keuangan' merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

h.4. Penghentian pengakuan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Grup mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Grup secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Financial Assets and Financial Liabilities** (continued)*

***h.2. Recognition** (continued)*

The Group initially recognizes loans/financing and deposits on the date of origination.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Group commits to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

h.3. Amortized cost and gross carrying amount

The 'amortized cost' of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or financial liability is measured on initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest methof of any difference between that initial amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any allowance for impairment losses. The 'gross carrying amount of financial asset' is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any allowance for impairment losses.

h.4. Derecognition

The Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Group transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Group is recognized as a separate asset or liability.

The Group derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

h.4. Penghentian pengakuan (lanjutan)

Dalam transaksi dimana Grup secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Grup menghentikan pengakuan aset tersebut jika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Grup dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Grup menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Grup menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

h.5. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Financial Assets and Financial Liabilities** (continued)*

***h.4. Derecognition** (continued)*

In transactions in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Group derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Group continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Group writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Group determines that the financial asset is uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the credit exposure.

h.5. Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Dalam mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, Bank telah menerapkan PSAK 71 sejak tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian ("KKE") 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (KKE *lifetime*). KKE *lifetime* adalah kerugian ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan KKE 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang diperkirakan akan diterima entitas. Karena kerugian kredit ekspektasian mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian kredit tetap timbul meskipun entitas mengharapkan untuk dibayar penuh namun setelah jatuh tempo kontraktual.

KKE diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect* atau *hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. KKE tidak diakui untuk instrumen keuangan yang detetapkan sebagai FVTPL dan instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Sesuai dengan ISAK 102, khusus untuk transaksi berbasis syariah, pengukuran penurunan nilai dari aset keuangan tidak mengadopsi PSAK 71.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

i. Allowance for impairment losses of financial assets

i.1. Financial assets carried at amortized cost

To estimate impairment loss allowance on financial assets, the Bank has implemented PSAK 71 since 1 January 2020. PSAK 71 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-month Expected Credit Losses ("ECL") or lifetime ECL. Lifetime ECL is the ECL that results from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECL is the portion of ECL that results from default events that are possible within the 12-month after reporting date.

Expected credit losses are a probability-weighted estimate of credit losses (i.e the present value of all cash shortfalls) over the expected life of the financial instrument. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and the cash flows that the entity expects to receive. Because expected credit losses consider the amount and timing of payments, a credit loss arises even if the entity expects to be paid in full but later than when contractually due.

ECL are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect or hold to collect and sell and have SPPI cash flows. ECL is not recognized for financial instruments designated as FVTPL and equity instruments designated as FVOCI.

In accordance to ISAK 102, particularly for sharia-based transactions, the allowance for impairment losses of financial assets does not adopt PSAK 71.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sebesar kerugian kredit sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian yang akan diakui sebesar KKE 12 bulan:

- instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah; dan
- instrumen keuangan dengan risiko kredit yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan membutuhkan penggunaan model, dikarenakan eksposur yang bervariasi terkait dengan perubahan kondisi pasar, arus kas yang diharapkan dan berjalannya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, dari rasio kerugian yang terkait dan korelasi gagal bayar antar pihak. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD), *Loss Given Default* (LGD) dan variabel makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian (KKE), komponen-komponen tersebut akan diperhitungkan bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif. Dasar input, asumsi dan teknik estimasi diungkapkan di Catatan 3.

Untuk portofolio korporasi, risiko kredit diukur berdasarkan pada pengelompokkan tingkat peringkat internal.

Untuk portofolio tresuri, risiko kredit diukur berdasarkan pada pengelompokkan tingkat peringkat internal. Apabila tidak terdapat informasi peringkat internal untuk pihak lawan, pengelompokkan didasarkan pada peringkat kredit dari pihak lawan. Untuk perhitungan PD, Bank menggunakan struktur jangka waktu (*term structure*) PD yang dikeluarkan oleh peringkat eksternal.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Allowance for impairment losses of financial assets** (continued)*

***i.1. Financial assets carried at amortized cost** (continued)*

At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, except in the following condition, for which the amount recognized will be 12-month ECL:

- *financial instruments with low credit risk; and*
- *financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The estimation of credit exposure for risk management purpose is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank measures credit risk using Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD), Loss Given Default (LGD) and macroeconomic variables for forward looking perspective.

To determine the expected credit loss (ECL), these components are multiplied together and discounted to the reporting date using the effective interest rate. The basis of inputs, assumptions and the estimation technique are disclosed in Note 3.

For corporate portfolio, credit risk is measured based on grouping grade of internal grading.

For the treasury portfolio, credit risk is measured based on grouping grade of internal grading. If there is no information of internal grading for counterparty, the categorizing is based on credit rating from counterparty issuer. For PD calculation, the Bank uses PD term structure issued by external rating.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Untuk kategori portofolio ritel, risiko kredit diukur berdasarkan pada kelompok hari tunggakan untuk membentuk *term structure* PD yang akan digunakan untuk menghitung perhitungan KKE dengan pendekatan model statistik.

Bank menganggap efek-efek investasi yang diterbitkan oleh pemerintah (seperti obligasi pemerintah) dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga efek-efek pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah atas instrumen keuangan lainnya.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Sesuai PSAK 71, Bank menerapkan model "Tiga-Tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti dirangkum di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai kredit sejak pengakuan awal diklasifikasikan dalam "Tahap 1".

- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit ("SICR") sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum dianggap mengalami penurunan nilai kredit.

- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai kredit/memburuk, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3"

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Allowance for impairment losses of financial assets** (continued)*

***i.1. Financial assets carried at amortized cost** (continued)*

For retail portfolio category, the credit risk is measured based on days past due buckets to create PD term structure used to compute ECL calculation by statistical model approach.

The Bank considers a Rupiah denominated government investment securities (such as government bonds) and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government investment securities are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

Expected credit loss measurement

In accordance with PSAK 71, the Bank applied "Three-Stage" model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- *A financial instrument that is not credit-impaired since initial recognition is classified in "Stage 1".*

- *If a significant increase in credit risk ("SICR") since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to "Stage 2" but is not yet deemed to be credit-impaired.*

- *If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to "Stage 3".*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Instrumen keuangan - Tahap 1

Kerugian kredit ekspektasian instrumen keuangan Tahap 1 diakui sebesar kekurangan kas yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa depan dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit dimana kerugian kredit ekspektasian akan dihitung berdasarkan basis *lifetime*. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis 12 bulan.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR) - Tahap 2

Bank menganggap instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika kriteria di bawah ini telah dipenuhi:

- Untuk segmen korporasi menggunakan parameter daftar pantauan (*watchlist*) dan perubahan nilai PD 12 bulan sebesar 100% sebagai akibat perpindahan peringkat internal sejak pengakuan awal.
- Untuk instrumen keuangan di tresuri menggunakan pergerakan 3 titik (*notch*) dari peringkat pada saat pengakuan awal.
- Untuk segmen ritel menggunakan informasi jumlah hari tunggakan dalam sebulan dalam kelompok tunggakan. SICR terjadi ketika jumlah hari tunggakan mencapai lebih dari 30 hari.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit/memburuk (gagal bayar) - Tahap 3

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Allowance for impairment losses of financial assets** (continued)*

***i.1. Financial assets carried at amortized cost** (continued)*

***Expected credit loss measurement** (continued)*

Financial instruments - Stage 1

Stage 1 expected credit losses are recognized at the amount of cash shortfalls arising from possible default events up to 12 months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired where the expected credit losses will be determined based on lifetime. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a 12-month basis.

Significant increase in credit risk (SICR) - Stage 2

The Bank considers a financial instrument to have experienced a significant increase in credit risk when the below criteria have been met:

- *For corporate segments use watchlist parameters and 12-month PD change by 100% resulted from internal grading movement from its initial recognition.*
- *For treasury financial instruments use 3 notch movements from origination rating at its initial recognition.*
- *For retail segment use days past due information in month in arrears grouping. SICR incurred if the days past due reached more than 30 days.*

Credit-impaired (or defaulted) exposures - Stage 3

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit/memburuk (gagal bayar) - Tahap 3 (lanjutan)

Pinjaman korporasi

Pinjaman korporasi yang dikategorikan mengalami penurunan nilai adalah pinjaman dari debitur dengan peringkat internal 7R atau lebih rendah.

Pinjaman non-korporasi

Pinjaman non-korporasi yang dikategorikan mengalami penurunan nilai adalah pinjaman yang memenuhi setidaknya satu dari kriteria berikut:
a. Hari tunggakan lebih dari 90 hari
b. Kolektibilitas OJK 3, 4 dan 5

Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario dengan probabilitas tertimbang, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Pengukuran KKE di seluruh tahapan aset diperlukan untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi menggunakan informasi yang wajar dan terdukung dengan peristiwa masa lampau, kondisi saat ini, dan proyeksi terkait dengan kondisi ekonomi di masa depan.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur KKE adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan, Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk portfolio *revolving* tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit, bukan sepanjang periode kontrak.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Allowance for impairment losses of financial assets** (continued)*

***i.1. Financial assets carried at amortized cost** (continued)*

***Expected credit loss measurement** (continued)*

Credit-impaired (or defaulted) exposures - Stage 3 (continued)

Corporate loans

Corporate loans that are categorised as impaired are loans from debtors with internal grading at 7R or lower.

Non-corporate loans

Non-corporate loans that are categorised as impaired are loans that satisfy at least one of the following criteria:

a. Days past due over 90 days
b. OJK Grading 3, 4 and 5

Loss provisions against credit-impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios with weighted probabilities, including the realisation of any collateral held where appropriate. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

The measurement of ECL across all stages is required to reflect an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of reasonably possible outcomes using reasonable and supportable information about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The period considered when measuring ECL is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk, not the contractual term of contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

i.1. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit/memburuk (gagal bayar) - Tahap 3 (lanjutan)

KKE atas komitmen pinjaman dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika intrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi KKE pada komponen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik, Bank menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai liabilitas lain-lain.

Penyajian kerugian kredit ekspektasian

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di laporan posisi keuangan konsolidasian mencerminkan nilai tercatat bruto dikurangi KKE. Perubahan atas kerugian kredit ekspektasian diakui pada laba rugi tahun berjalan.

i.2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pengukuran KKE untuk aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) menggunakan pendekatan dan model perhitungan yang sama dengan pengukuran KKE untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Untuk aset keuangan instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di laporan posisi keuangan konsolidasian mencerminkan nilai wajar instrumen, dengan KKE dibukukan terpisah sebagai cadangan pada penghasilan komprehensif lain. Perubahan atas kerugian kredit ekspektasian diakui pada laba rugi tahun berjalan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Allowance for impairment losses of financial assets** (continued)*

***i.1. Financial assets carried at amortized cost** (continued)*

***Expected credit loss measurement** (continued)*

Credit-impaired (or defaulted) exposures - Stage 3 (continued)

ECL on loan commitments and financial guarantees is recognized as other liabilities. Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component, the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as other liabilities.

Presentation of expected credit losses

For financial assets measured at amortized cost, the balance at consolidated statement of financial position reflects the gross carrying amount less ECL. Changes in expected credit losses are recognized in the current year profit or loss.

i.2. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

The ECL measurement for debt instrument financial assets measured at fair value through other comprehensive income uses the same approach and calculation model in measuring ECL for financial assets carried at amortized cost. For debt instrument financial assets in FVOCI category, the balance in consolidated statement of financial position reflects the instrument's fair value, with the ECL held as a separate reserve within other comprehensive income. Changes in expected credit losses are recognized in the current year profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

i.3. Piutang murabahah

Entitas Anak melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif karena seluruh piutang murabahah memiliki nilai tidak signifikan secara individu.

Untuk penurunan nilai secara kolektif ini, Bank mengelompokkan portofolio piutang berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu antara nasabah yang diberikan restrukturisasi dan nasabah yang tidak direstrukturisasi, dimana metode yang digunakan mengikuti *incurred loss* atau *regulatory reporting*.

Entitas Anak menggunakan model analissa statistik dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, yaitu metode *migration analysis* dan metode *vintage analysis*.

Metode *migration analysis* digunakan untuk menentukan kerugian penurunan nilai dari nasabah yang tidak direstrukturisasi dan nasabah yang direstrukturisasi karena usaha menurun (non-Covid). Pada metode *migration analysis*, Entitas Anak menentukan tingkat kerugian dari portofolio selama periode antara terjadinya peristiwa gagal bayar dengan saat kerugian teridentifikasi untuk setiap portofolio yang teridentifikasi dalam jangka waktu 12 bulan. Kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah diukur sebesar selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang.

Metode *vintage analysis* digunakan untuk menentukan kerugian penurunan nilai dari nasabah yang telah direstrukturisasi COVID-19. Pada metode *vintage analysis*, Entitas Anak menentukan tingkat kerugian berdasarkan pengalaman Entitas Anak atas kondisi nasabah yang diretrukturisasi sebelumnya dari tanggal restrukturisasi sampai dengan piutang pembiayaan tersebut lunas atau dihapusbukukan dan mempertimbangkan tren pembayaran nasabah di periode restrukturisasi juga.

Ketika pembiayaan yang diberikan tidak tertagih, pembiayaan tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah terpenuhi dan jumlah kerugian telah ditentukan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Allowance for impairment losses of financial assets** (continued)*

i.3. Murabahah receivables

The Subsidiary performs impairment evaluation collectively as all murabahah receivables have individually insignificant value.

For this collective impairment, the Bank classifies the receivables portfolio based on the similarity of credit risk characteristics, that is between customers who were given restructuring and customers who were not restructured, where the method used follows the incurred losses or reporting regulations.

The Subsidiary uses statistical analysis models in determining the collective impairment loss allowance, that is the migration analysis method and the vintage analysis method.

The migration analysis method is used for determining the impairment loss for non-restructuring customers and customers who were restructured due to declining business (non-Covid). In the migration analysis method, the Subsidiary determines the loss rate of the portfolio from the period between the occurrence of an default event and the identification of a loss for each identified portfolio witthin 12 months. Impairment losses on murabahah receivables are measured at the difference between the carrying amount of the murabahah receivables and present value of estimated future cash flows.

The vintage analysis method is used to determine the impairment loss of COVID-19 restructured customers. In the vintage analysis method, the Subsidiary uses the loss rate based on the Subsidiary's experience of the condition of previous restructured customers from the restructuring date until the financing receivables were paid-off or written-off. And consider customer payment trends in the restructuring period as well.

When a financing is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses. Such financing is written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

i.3. Piutang murabahah (lanjutan)

Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

j. Giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain

Setelah pengakuan awal, giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Giro pada Bank Indonesia termasuk giro wadiah Entitas Anak yang disajikan sebesar biaya perolehan. Giro pada bank-bank lain termasuk giro pada bank-bank lain Entitas Anak yang dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

k. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain

Setelah pengakuan awal, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Penempatan pada Bank Indonesia termasuk penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI"), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS"), Deposito Berjangka Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS") dan *call money*. FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan akad masing-masing adalah wadiah dan jualah. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain dari Entitas Anak disajikan sebesar biaya perolehan.

l. Efek-efek

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank ("SIMA"), Sukuk Bank Indonesia, sukuk korporasi, Surat Berharga Syariah Negara, reksa dana syariah, obligasi pemerintah yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal, dan wesel ekspor.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Allowance for impairment losses of financial assets** (continued)*

***i.3. Murabahah receivables** (continued)*

Subsequent recoveries of financing written off in the current year are credited to the provision for allowance for impairment losses account. Subsequent recoveries of financing written off in previous year are recognized as other operating income.

j. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Subsequent to initial recognition, current accounts with Bank Indonesia and other banks are measured at amortized cost using the effective interest method.

Current accounts with Bank Indonesia include the Subsidiary's wadiah current accounts which are stated at acquisition cost. Current accounts with other banks include the Subsidiary's current accounts with other banks which are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

k. Placements with Bank Indonesia and other banks

Subsequent to initial recognition, placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method.

Placements with Bank Indonesia include placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Deposit Facilities ("FASBI"), Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS"), Bank Indonesia Term Deposit, Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS") and call money. FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short-term fund deposits under wadiah and jualah agreements, respectively. Placements with Bank Indonesia and other banks of the Subsidiary are stated at acquisition cost.

l. Securities

Securities consist of Certificate of Interbank Mudharabah Investment ("SIMA"), Bank Indonesia Sukuk, corporate sukuk, Sovereign Sharia Securities, sharia mutual funds, government bonds traded in the money market and capital market, and export bills.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

I. Efek-efek (lanjutan)

Efek-efek (selain sukuk, SIMA, reksa dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah) pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar ditambah dengan (untuk efek-efek yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan pengukuran selanjutnya tergantung pada klasifikasinya. Lihat Catatan 2h.3 untuk kebijakan akuntansi aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Untuk efek-efek yang diukur dengan FVOCI, keuntungan dan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk beberapa hal di bawah ini yang diakui dalam laba rugi sama seperti aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan amortisasi:

- pendapatan bunga menggunakan metode suku bunga efektif;
- kerugian kredit ekspektasian dan pemulihan; dan
- keuntungan dan kerugian selisih kurs.

Ketika efek-efek yang diukur pada FVOCI dihentikan pengakuannya, keuntungan dan kerugian yang terakumulasi yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain di reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi.

Efek-efek yang diukur dengan FVTPL saat pengakuan awal dan setelah pengakuan awal diakui dan diukur pada nilai wajar di laporan posisi keuangan, dengan biaya transaksi yang terjadi diakui langsung pada laba rugi.

Seluruh perubahan nilai wajar diakui sebagai bagian dari pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi pada saat penjualan atau penyelesaian efek-efek yang diukur dengan FVTPL diakui pada laba rugi.

Premi dan/atau diskonto diamortisasi dan dilaporkan sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk), SIMA, reksa dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***I. Securities** (continued)*

Securities (other than sukuk, SIMA, sharia mutual funds and other securities based on sharia principles) are initially measured at fair value plus (for securities not subsequently measured at fair value through profit or loss) directly attributable transaction costs and subsequent measurement will depend on their classification. Refer to Note 2h.3 for the accounting policy of financial assets measured at amortized cost.

For securities measured at FVOCI, gains and losses are recognized in other comprehensive income, except for the following, which are recognized in profit or loss in the same manner as for financial asset measured at amortized costs:

- *interest amount using effective interest rate method;*
- *expected credit losses and reversal; and*
- *foreign exchange gain and losses.*

When securities measured at FVOCI are derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss.

Securities measured at FVTPL are initially recognized and subsequently measured at fair value in the statement of financial position, with transaction costs recognized directly in profit or loss.

All changes in fair value are recognized as part of other operational income in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains or losses which are realized when the securities measured at FVTPL are sold or settled are recognized in profit or loss.

Premium and/or discount is amortized and reported as interest income using the effective interest method.

Sharia securities are proof of investments based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk), SIMA, sharia mutual funds and other securities based on sharia principles.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

I. Efek-efek (lanjutan)

Grup menentukan klasifikasi investasi pada sukuk dan efek lain berprinsip syariah yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk, sesuai dengan PSAK No. 110 (Revisi 2015) dan penyesuaian tahun 2020 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.

2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

   Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memper investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dipindahkan ke laba rugi.

3) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi. Biaya transaksi langsung diakui pada laba rugi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi tahun berjalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

I. Securities *(continued)*

The Group determines the classification of investments in sukuk and other securities under sharia principles which have similar characteristic with sukuk, in accordance with PSAK No. 110 (2015 Revision) and its amendments in 2020 regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

1) Measured at acquisition cost. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to collect contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the margin. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at acquisition cost, plus unamortized portion of transaction costs that are amortized using straight-line method, minus allowance for impairment losses, if any.

2) Measured at fair value through other comprehensive income. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and/or the results.

At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

3) Measured at fair value through profit or loss. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value excluding transaction costs. Transaction costs are directly recognized in profit or loss. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognized in the current year profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

l. Efek-efek (lanjutan)

Investasi dalam unit reksa dana syariah dinyatakan sebesar nilai wajar yang ditentukan berdasarkan nilai aset bersih dari reksa dana pada tanggal pelaporan. Seluruh perubahan nilai aset bersih diakui pada penghasilan komprehensif lain. Investasi dalam unit reksa dana syariah terproteksi dinyatakan sebesar biaya perolehan.

m. Tagihan dan liabilitas derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti *swap* mata uang asing*, cross currency swap,* dan *swap* suku bunga*.*

Instrumen keuangan derivatif diakui pada nilai wajar, dengan biaya transaksi yang terjadi diakui langsung pada laba rugi. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Liabilitas akseptasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi mengenai biaya perolehan diamortisasi.

o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Pembiayaan bersama dicatat sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank, dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2h untuk kebijakan akuntansi mengenai biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Securities *(continued)*

Investment in sharia mutual funds are presented at fair value which is measured based on net asset value of mutual funds at reporting date. All changes in net asset value are recognized in other comprehensive income. Investment in protected sharia mutual funds are presented at acquisition cost.

m. Derivative receivables and payables

In the normal course of business, the Bank enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency swap, cross currency swap, and interest rate swap.

Derivative financial instruments are recognized at their fair value, with transaction costs recognized directly in profit or loss. Derivative are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.

Gains or losses as a result of fair value changes are recognized as current year profit or loss.

n. Acceptance receivables and payables

Acceptance receivables are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses, where appropriate.

Acceptance payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Acceptance receivables are classified as amortized cost. Refer to Note 2h for the accounting policy of amortized cost.

o. Loans and sharia financing/receivables

Loans represent disbursement of cash or cash equivalent based on agreements with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period.

Joint financing is recorded according to the proportion of risks borne by the Bank and stated at amortized cost.

Loans are classified as amortized cost. Refer to Note 2h for the accounting policy of amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (lanjutan)

Termasuk dalam pinjaman yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang terdiri dari piutang murabahah, pembiayaan musyarakah dan pinjaman qardh.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Entitas Anak, dimana Entitas Anak membiayai kebutuhan barang untuk konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah, yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan marjin yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh piutang murabahah tersebut. Setelah pengakuan awal, piutang murabahah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode imbal hasil efektif dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Entitas Anak menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Pinjaman qardh adalah penyaluran dana dengan akad qardh.

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Entitas Anak yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***o. Loans and sharia financing/receivables** (continued)*

Included in the loans are sharia financing/ receivables which consist of murabahah receivables, musyarakah financing and funds of qardh.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Subsidiary, whereby the Subsidiary finances the goods for consumption, investment and working capital needs of the customer, sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus directly attributable transaction costs and additional costs to obtain the respective murabahah receivables. Subsequent to the initial recognition, they are measured at amortized cost using the effective rate of return method less deferred margin income and allowance for impairment losses.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds with the terms that profits are shared according to the agreement, while losses are borne by each party proportionate to the amount of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Subsidiary provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh agreement.

Funds of qardh represent funds provided or similar claims based on an agreement or contract between the borrower and the Subsidiary, wherein the borrower should repay the loan after a specified period of time.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (lanjutan)

Pinjaman qardh diakui sebesar total dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Entitas Anak dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Imbalan tersebut diakui pada saat diterima.

Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Modifikasi pinjaman yang diberikan

Skema modifikasi pinjaman yang diberikan dapat berupa penyesuaian pada suku bunga, pokok bunga dan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu jatuh tempo, penjadwalan kembali pembayaran angsuran serta modifikasi persyaratan kredit lainnya.

Jika persyaratan perjanjian suatu pinjaman dimodifikasi, maka Bank mengevaluasi apakah arus kas kontraktual dari pinjaman yang termodifikasi berbeda secara signifikan.

Jika arus kas berbeda secara signifikan, maka hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan yang original sebenarnya telah kadaluarsa. Dalam hal ini, aset keuangan yang original dihentikan pengakuannya dan aset keuangan yang baru diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang memenuhi syarat. Imbalan yang diterima sebagai bagian dari modifikasi diperhitungkan sebagai berikut:

- imbalan yang dipertimbangkan sewaktu menentukan nilai wajar dari aset baru dan imbalan yang merupakan pembayaran kembali (*reimbursement*) dari biaya transaksi yang memenuhi syarat akan dimasukkan sebagai pengakuan awal aset; dan
- imbalan lainnya dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***o. Loans and sharia financing/receivables** (continued)*

A funds of qardh is recognized in the amount lent at the transaction date. The Subsidiary may receive a fee, however, this should not be stated in the agreement. The fee is recognized upon receipt.

Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for impairment losses.

Modification of loans

Modification schemes for loans can be in the form of adjustment on interest rate, loan principal and past due interest, extension of repayment period, rescheduling of installments and other modification of the terms of the loans.

If the terms of a loan are modified, then the Bank evaluates whether the contractual cash flows of the modified asset are substantially different.

If the cash flows are substantially different, then the contractual rights to cash flows from the original financial asset are deemed to have expired. In this case the original financial asset is derecognized and a new financial asset is recognized at fair value plus any eligible transaction costs. Any fees received as part of the modification are accounted for as follows:

- *fees that are considered in determining that fair value of the new asset and fees represent reimbursement of eligible transaction costs are included in the initial measurement of the asset; and*
- *other fees are included in profit or loss as part of the gain or loss derecognition.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

o. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (lanjutan)

Modifikasi pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Jika modifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan, maka Bank terlebih dahulu menghitung kembali nilai tercatat bruto aset keuangan menggunakan suku bunga efektif awal aset tersebut dan mengakui selisih penyesuaian sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi di dalam laba rugi. Biaya atau imbalan yang terjadi dan imbalan modifikasi yang diterima disesuaikan ke nilai tercatat bruto dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan yang dimodifikasi.

Jika modifikasi dilakukan karena alasan risiko kredit, maka keuntungan atau kerugian disajikan sebagai kerugian penurunan nilai. Selain karena alasan ini, keuntungan atau kerugian disajikan sebagai pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif.

Dalam keadaan yang tidak biasa, setelah perubahan atau modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal, mungkin terdapat bukti bahwa aset modifikasian memburuk pada pengakuan awal. Dengan demikian, aset keuangan tersebut diakui sebagai aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal.

Perubahan atau modifikasi yang dilakukan karena resiko kredit, dapat dipertimbangkan sebagai indikasi aset keuangan yang berasal dari aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal. Sedangkan perubahan atau modifikasi yang dilakukan dengan dasar pertimbangan bisnis, mungkin tidak diakui sebagai aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal. Namun, penilaian ini perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan apakah pengakuan awal aset keuangan telah memburuk pada saat pengakuan awal.

p. Penyertaan saham

Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Dividen kas yang diterima dari penyertaan saham diakui sebagai pendapatan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***o. Loans and sharia financing/receivables** (continued)*

***Modification of loans** (continued)*

If the modification of a financial asset measured at amortized cost does not result in derecognition of the financial asset, then the Bank first recalculates the gross carrying amount of the financial asset using the original effective interest rate of the asset and recognizes the resulting adjustment as modification gain or loss in profit or loss. Any costs or fees incurred and modification fees received are adjusted to the gross carrying amount of the modified financial asset and are amortized over the remaining term of the modified financial asset.

If a modification is carried out because of credit-risk reason, then the gain or loss is presented together with impairment losses. In other cases, it is presented as interest income calculated using the effective interest method.

In some unusual circumstances, after changes or modifications that result in de-recognition of the original financial asset, there may be evidence that the modified asset is credit-impaired at initial recognition. Accordingly, the financial asset should be recognized as an originated credit-impaired financial asset.

Changes or modifications that were made on the basis of credit risk reason can be considered as an indication of originated credit-impaired financial assets. Meanwhile changes or modifications that were made on the basis of business' considerations, may not be recognized as originated credit-impaired financial assets. However, comprehensive valuation should be performed to determine whether initial recognition of financial assets has deteriorated at initial recognition.

p. Investment in shares

Investment in shares with an ownership interest below 20% and have no significant influence is initially recognized at fair value and subsequently measured at fair value through profit or loss.

Cash dividend received from investment in shares is recognized as income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Beban dibayar dimuka akan diakui sebagai beban pada laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

r. Aset tetap

Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala dan apabila terdapat perubahan nilai wajar yang signifikan untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada "cadangan revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset tetap yang sama dibebankan terhadap "cadangan revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Tanah tidak disusutkan. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap selain tanah diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

q. Prepayments

Prepayments are expenses which have been paid but not yet recognized as an expense in the related period. Prepayments are recognized as expenses in the profit or loss when it is amortized in accordance with the expected period of benefit.

r. Fixed assets

Land is presented at fair value based on valuations performed by certified external independent valuers which are registered with OJK. Valuations are performed on a regular basis and if there is significant change in fair value to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

The increases in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to the "reserve on revaluation of fixed assets" as part of other comprehensive income. The decreases that offset the previous increases are debited against "reserve on revaluation of fixed assets" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to the current year profit or loss.

Land is not depreciated. When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Fixed assets other than land are recognized at cost less accumulated depreciation.

Acquisition cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the assets.

Fixed assets, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at cost less accumulated depreciation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Fixed assets *(continued)*

The expected useful lives of fixed assets are as follows:

	Tahun/*Years*	
Gedung	20	*Buildings*
Golongan I:		*Class I:*
Kendaraan bermotor	4	*Vehicles*
Perlengkapan kantor	4 & 8	*Office equipment*
Golongan II:		*Class II:*
Kendaraan bermotor	3	*Vehicles*
Perlengkapan kantor	5 & 8	*Office equipment*
Leasehold improvement	sesuai masa sewa/*according to lease period*	*Leasehold improvement*

Kendaraan bermotor yang termasuk dalam golongan I adalah sepeda motor sedangkan kendaraan operasional dan kendaraan dinas untuk direktur atau komisaris termasuk dalam golongan II.

Motor vehicles classified in class I are motorcycles whilst operational vehicles and office vehicles for directors or commissioners are classified in class II.

Perlengkapan kantor yang termasuk dalam golongan I adalah mebel dan peralatan dari kayu dan rotan, mesin kantor seperti mesin tik, mesin fotokopi, komputer, laptop, alat komunikasi, alat dapur dan perlengkapan lain seperti CCTV. Sedangkan yang termasuk dalam golongan II adalah mebel dan peralatan dari logam seperti brankas, pendingin ruangan, dan generator listrik.

Office equipment classified as class I are furniture and office equipment made from wood, office machine such as typing machine, photocopy machine, computer, laptop, communication tools, kitchen set and other equipment such as CCTV. Whilst office equipment classified as class II are furniture and office equipment made from metal such as safes, air conditioning and electrical generator.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi tahun berjalan.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. Repairs and maintenance costs are charged to the current year profit or loss.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

When fixed assets are no longer in use or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are written off in the consolidated financial statements. Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognized in the current year profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap (lanjutan)

Akumulasi biaya konstruksi bangunan serta pemasangan peralatan kantor, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Nilai tercatat aset segera diturunkan menjadi sebesar jumlah yang dapat dipulihkan ketika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

s. Aset takberwujud dan *goodwill*

Goodwill

Goodwill dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Peninjauan atas penurunan nilai pada *goodwill* dilakukan setahun sekali atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai.

Piranti lunak

Piranti lunak memiliki masa manfaat yang terbatas dan diakui sebesar harga perolehan, selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai.

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi piranti lunak dan mempersiapkan piranti lunak tersebut siap untuk digunakan dikapitalisasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***r. Fixed assets** (continued)*

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of office equipment are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets accounts when the construction or installation is completed. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

The asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount when the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

s. Intangible assets and goodwill

Goodwill

Goodwill is carried at cost less accumulated impairment losses. Goodwill impairment reviews are undertaken annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment.

Software

Software have a finite useful life and recognized at acquisition cost, subsequently carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

The costs incurred to acquire software license and bring that software to use are capitalized.

Costs associated with maintaining software programs are recognized as expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group is recognized as intangible assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

s. Aset takberwujud dan *goodwill* (lanjutan)

Piranti lunak (lanjutan)

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Pengeluaran pengembangan lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat piranti lunak tersebut, sejak tanggal piranti tersebut siap untuk dipakai. Estimasi masa manfaat dari piranti lunak adalah 4-8 tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya atau dilepas ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

t. Aset lain-lain

Aset lain-lain sebagian besar terdiri dari jaminan kontrak, uang muka, transaksi ATM dan transfer, tagihan kredit lainnya, agunan yang diambil alih, persediaan keperluan kantor, properti terbengkalai dan tagihan kepada asuransi.

Grup mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi pada saat terjadinya.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***s. Intangible assets and goodwill** (continued)*

***Software** (continued)*

Directly attributable costs that are capitalized as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognized as expense when incurred. Development costs previously recognized as expense are not recognized as asset in a subsequent period.

Amortization is recognized in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful life of the software, from the date it is ready for use. The estimated useful life of software is 4-8 years.

Intangible assets shall be derecognized or disposed when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

t. Other assets

Other assets mainly consists of security deposits, advance payment, ATM transaction and transfer, other credit receivables, foreclosed collateral, office supplies, abandoned property and receivables from insurance company.

The Group recognizes impairment losses of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At each reporting date, the Group evaluates the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. Reversal of impairment losses is recognized as gain in the profit or loss when incurred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Grup berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk didalamnya adalah giro, tabungan, deposito berjangka, deposito *on call* dan simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari giro dan tabungan wadiah. Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh-dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Entitas Anak. Giro wadiah dicatat sebesar saldo titipan pemegang giro wadiah. Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('Athaya') sukarela dari Entitas Anak.

Simpanan dari bank-bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, dalam bentuk *call money*, giro, *bank acceptance finance*, dan tabungan.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain.

Simpanan dari bank-bank lain disajikan sebesar jumlah liabilitas terhadap bank-bank lain.

v. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan terdiri dari utang obligasi.

Utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan utang obligasi, diakui sebagai beban yang ditangguhkan dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu utang obligasi tersebut dengan menggunakan metode bunga efektif.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

u. Deposits from customers and deposits from other banks

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Group based on fund deposits agreements. Included in these accounts are current accounts, saving deposits, time deposits, deposits on call and sharia deposits from customers.

Sharia deposits consist of wadiah demand deposits and saving deposits. Wadiah demand deposits are wadiah yadh-dhamanah demand deposits in which the funds owner will get a bonus based on the Subsidiary's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors. Wadiah saving deposits represent third party funds which can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of voluntary bonus ('Athaya') on the part of the Subsidiary.

Deposits from other banks represent liabilities to other domestic banks, in the form of call money, current accounts, bank acceptance finance, and saving deposits.

Deposits from customers and deposits from other banks are classified as financial liabilities measured at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of deposits from customers and deposits from other banks.

Deposits from other banks are stated at the amounts due to other banks.

v. Securities issued

Securities issued consist of bonds payable.

Bonds payable are stated at nominal value net of unamortized bond issuance cost. Costs incurred in connection with the bonds payable, are recognized as a deferred expense and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortized over the period of the bonds payable using the effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

w. Pinjaman yang diterima

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman yang diterima diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

x. Imbalan kerja karyawan

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari taksiran jumlah imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan tersebut pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected-unit-credit.*

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan pasti neto diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika manfaat suatu program diubah atau terjadi kurtailmen, perubahan manfaat yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, liabilitas imbalan pasca-kerja untuk karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Entitas Anak dihitung secara internal dengan metode *historical stay rate.*

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

w. Borrowings

Borrowings are initially recognized at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

x. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they are payable to the employees.

Post-employment benefits

The post-employment benefits liabilities are calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

Gains or losses arising from actuarial remeasurements of the net defined benefit liability are recognized immediately in other comprehensive income. When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognized immediately in profit or loss.

As of 31 December 2023 and 2022, Specific Time Employment Agreements (PKWT) employee post-employment benefit obligations of the Subsidiary are calculated internally using the historical stay rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

x. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya berupa cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

y. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

z. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh Entitas Anak.

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/ Entitas Anak) dalam pengelolaan investasinya sesuai prinsip syariah dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Entitas Anak.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Entitas Anak. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Entitas Anak.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Entitas Anak tidak berkewajiban untuk menjamin pengembalian jumlah dana awal dari pemilik dana bila Entitas Anak merugi kecuali kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***x. Employee benefits** (continued)*

Other long-term benefits

Other long-term benefits such as long service leave are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumption are recognized to the current year profit or loss.

y. Subordinated loans

Subordinated loans are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

z. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by Subsidiary.

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Subsidiary) in the management of their investments according to sharia principle with profit distributed based on the agreement. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving accounts and mudharabah time deposits.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving deposits are stated based on the customer's savings deposit balance at the Subsidiary.

Mudharabah time deposits represent investment which can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Subsidiary. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Subsidiary.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability, because the Subsidiary does not have any obligation to return the initial funds to the owners if the Subsidiary experiences losses, except for losses caused by the Subsidiary's management negligence or default. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

z. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

aa. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham biasa atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang, sebesar jumlah yang diterima bersih setelah dikurangi pajak.

Saham tresuri

Ketika Bank membeli modal saham ekuitas (saham tresuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan kepada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank.

ab. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang dibayar, atau terutang atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak kini juga termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***z. Temporary syirkah funds** (continued)*

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

aa. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

Incremental costs directly attributable to the issuance of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Treasury shares

When the Bank purchases the equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Bank's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Bank's equity holders.

ab. Taxation

Income tax expense consists of current and deferred tax. Income tax expenses are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax expense is the amount of tax paid, or payable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date. Current tax also includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assesments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ab. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk ditetapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak, seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi, yang timbul dari periode berjalan yang diharapkan akan direalisasi pada masa mendatang, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset pajak tangguhan merupakan saldo bersih atas manfaat pajak tangguhan yang timbul dan dipergunakan sampai dengan tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tangal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan yang tidak dapat terealisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan realisasi melalui laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

Grup telah menentukan bahwa bunga dan penalti sehubungan dengan pajak penghasilan, termasuk yang mungkin diterima dalam kaitannya dengan posisi pajak yang mengandung ketidakpastian, tidak memenuhi definisi pajak penghasilan, dan dengan demikian diperlakukan sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan atau banding itu diterima.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***ab. Taxation** (continued)*

Current tax expense is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carryforwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Deferred tax assets represent the net remaining balance of deferred tax benefits that have been originated and utilized through the reporting date. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised; such reductions are reversed when the probability of their realisation through future taxable profits improves.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will be available against which they can be used.

The Group has determined that interest and penalties related to income taxes, including those that may materialize in connection with uncertain tax positions, do not meet the definition of income taxes, and therefore are accounted for in accordance with PSAK 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Amendments to tax obligations are recognized when an assessment is received, or if objection and or appeal is applied, when the results of the objection or the appeal are received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ac. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

(i). Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi, dan beban bunga atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan sepanjang umur yang diperkirakan atas instrumen keuangan, pada nilai tercatat bruto dari aset keuangan atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Saat menghitung suku bunga efektif intrumen keuangan selain aset yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, Bank melakukan estimasi arus kas masa depan dengan mempertimbangkan seluruh perjanjian kontraktual atas instrumen keuangan tapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan estimasi arus kas masa depan termasuk kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan suku bunga efektif termasuk biaya transaksi dan imbalan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

ac. Interest income and expense and sharia income and third parties' shares on return of temporary syirkah funds

(i). Interest income and expense

Interest income on financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortized cost, and interest expense on financial liabilities held at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest method.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or liability and of allocating the interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument, to the gross carrying amount of the financial asset or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate for financial instruments other than purchased or originated credit-impaired assets, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not expected credit losses. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including expected credit losses. The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ac. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (lanjutan)

(i). Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Suku bunga efektif aset atau liabilitas keuangan dihitung pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas keuangan tersebut. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, suku bunga efektif diterapkan atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau atas biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan. Suku bunga efektif direvisi sebagai hasil dari perhitungan ulang estimasi arus kas dari instrumen dengan suku bunga mengambang secara berkala untuk merefleksikan perubahan suku bunga pasar. Untuk aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi mengalami penurunan nilai, maka perhitungan pendapatan bunga kembali menggunakan nilai tercatat bruto.

(ii). Pendapatan syariah

Pendapatan pengelolaan dana oleh Entitas Anak sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual beli-margin murabahah, pendapatan bagi hasil-pembiayaan musyarakah, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***ac. Interest income and expense and sharia income and third parties' shares on return of temporary syirkah funds** (continued)*

(i). Interest income and expense (continued)

The effective interest rate of a financial asset or financial liability is calculated on initial recognition of a financial asset or financial liability. In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. The effective interest rate is revised as a result of periodic re-estimation of cash flows of floating-rate instruments to reflect movements in market rates of interest. For financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the calculation of interest income reverts to the gross carrying amount.

(ii). Sharia income

Income from fund management by Subsidiary as mudharib consist of income from sales and purchases-murabahah margin, income from profit sharing-musyarakah financing and other main operating income.

The revenue recognition of murabahah receivables, which do not have significant risk in relation with the ownership of inventory, are recognized in profit or loss using the effective rate of return method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ac. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (lanjutan)

(ii). Pendapatan syariah (lanjutan)

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh nilai tercatat piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Entitas Anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Untuk pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang telah direstrukturisasi dengan *payment holiday* atau skema penundaan pembayaran cicilan, Bank hanya mengakui pendapatan marjin apabila Bank cukup yakin bahwa pembayaran angsuran akan diterima sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah.

Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

(iii). Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Entitas Anak. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***ac. Interest income and expense and sharia income and third parties' shares on return of temporary syirkah funds** (continued)*

(ii). Sharia income (continued)

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate which exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivables to obtain the carrying amount of murabahah receivables. When calculating the effective rate of return, the Subsidiary estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivables, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provisions and other forms received by the parties in a contract which are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.

For the recognition of income on restructured murabahah receivables with payment holidays or scheme to postpone installment payments, the Bank will only recognise margin income if the Bank has a reasonable certainty that an installment payment will be received in accordance with the agreement with the customers.

Income from profit sharing - musyarakah financing is recognized during the period of profit sharing in accordance with the pre-determined ratio.

(iii). Third parties' shares on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Subsidiary's income derived from the management of their funds by the Subsidiary under mudharabah principles. Distributable income will be distributed from the cash received (cash basis).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ac. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (lanjutan)

(iii). Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer (lanjutan)

Pendapatan marjin atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya (penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga) akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana dan Entitas Anak sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin yang tersedia tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah pemilik dana sebagai shahibul maal dan Entitas Anak sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan marjin dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Entitas Anak, seluruhnya menjadi milik Entitas Anak, termasuk pendapatan dari transaksi Entitas Anak berbasis imbalan.

ad. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aktivitas peminjaman diakui sebagai pengurang biaya pinjaman dan nilai tercatat atas pinjaman tersebut akan diamortisasi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode bunga efektif.

Pada umumnya pendapatan provisi dan komisi diakui menggunakan basis akrual pada saat jasa telah diberikan. Pendapatan provisi atas komitmen memberikan pinjaman yang kemungkinan besar akan dicairkan (bersama-sama dengan biaya transaksi lain yang terkait langsung) diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional lainnya.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***ac. Interest income and expense and sharia income and third parties' shares on return of temporary syirkah funds** (continued)*

(iii). Third parties' shares on return of temporary syirkah funds (continued)

Margin income on financing facilities and other earning assets (placements with Bank Indonesia, placements with other banks and investments in securities) are distributed to fund owners and the Subsidiary based on proportion of funds used in the financing and other earning assets. Likewise, the available margin income is then distributed to fund owners as shahibul maal and the Subsidiary as mudharib based on a pre-determined ratio (nisbah).

Margin income from financing facilities and other earning assets using the Subsidiary's funds, are entirely shared for the Subsidiary, including income from the Subsidiary's fee-based transactions.

ad. Fee and commission income

Fees and commissions income directly attributable to lending activity are recognized as a deduction of lending cost and will be recognized as interest income by amortizing the carrying value of loan using effective interest method.

Fees and commissions income are generally recognized on an accrual basis when the service has been provided. Loan commitment fees for loans that are likely to be drawn down are (together with related direct costs) recognized as an adjustment to the effective interest rate on the loan.

Fees and commissions income which are not related to lending activities are recognized as revenue on the transaction date and classified under other operating income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ae. Laba per saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Bank, yaitu opsi saham.

Ketika opsi dieksekusi, Bank menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham treasurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan agio saham.

af. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Grup yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Grup, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen, dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar.

ag. Transaksi sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

ae. Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing net profit with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing the weighted average number of ordinary shares outstanding plus the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by Bank, which is stock option.

When the options are exercised, the Bank issues new shares or reissues its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share capital (nominal value) and share premium.

af. Operating segment

An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Group's other components, whose operating results are reviewed regularly by the operating decision makers to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the operating decision makers include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

ag. Lease transaction

The Group as a lessee

At inception of a contract, the Group determines if a contract is, or contains, a lease by considering whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for a consideration.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ag. Transaksi sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian jika semua kondisi di bawah dipenuhi:

- kontrak tersebut melibatkan penggunaan secara substansial seluruh kapasitas dari aset identifikasian yang secara fisik berbeda (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap dapat diidentifikasi;

- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan

- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset: yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan.

Pada saat insepsi atau penilaian kembali sebuah kontrak yang berisi komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak tersebut kepada setiap komponen sewa atas dasar harga relatif yang berdiri sendiri.

Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***ag. Lease transaction** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

A contract conveys the right to control the use of an identified asset if all of the following conditions are met:

- *the contract involves the use of substantially all of the capacity of an identified asset that is physically distinct (as specified explicitly or implicitly in the contract). If the supplier has a substantive substitution right, then the asset cannot be considered as identifiable;*

- *the Group have the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and*

- *the Group have the right to direct the use of the asset: i.e. they have decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.*

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ag. Transaksi sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Setelah tanggal permulaan, aset hak guna diukur dengan model biaya. Aset hak guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi, dikurangi insentif sewa yang belum diterima;
- pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Grup cukup pasti untuk melaksanakan opsi perpanjangan, dan denda untuk penghentian sewa lebih awal kecuali Grup yakin tidak menghentikan lebih awal.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Bank mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***ag. Lease transaction** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the Group's incremental borrowing rate. Generally, the Group uses their incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability consist of:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments, less lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise, lease payments in an option renewal period if the Group is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Bank changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension, or termination option.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ag. Transaksi sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

Grup menyajikan aset hak guna dalam aset tetap.

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Nilai tercatat aset hak guna segera diturunkan menjadi sebesar jumlah yang dapat dipulihkan ketika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;

- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***ag. Lease transaction** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group presents right-of-use assets in fixed assets.

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term. The right-of-use asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount when the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:
- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*

- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*

- *determines the lease term of the modified lease;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ag. Transaksi sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian pada tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau seluruh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau seluruh sewa tersebut dalam laba rugi; dan

- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

ah. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Grup menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***ag. Lease transaction** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

Lease modification (continued)

- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*

- *decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognizes any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease in profit or loss; and*

- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

ah. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ah. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Grup menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Grup mengukur aset dan liabilitas berdasarkan harga tengahnya.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Grup berdasarkan eksposur netonya, baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam kelompok.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ah. Fair value measurement *(continued)*

The best evidence of the fair value at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Group determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Group measures assets and liabilities at its mid price.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Group on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities based on the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan-catatan di bawah ini:

- Catatan 23 – pengukuran liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya: asumsi-asumsi aktuarial.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Key sources of estimation uncertainty

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following notes:

- *Note 23 – measurement of post-employment benefits liabilities and other long-term benefits: actuarial assumptions.*

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Bank

Grup melakukan peninjauan kembali atas aset keuangan pada setiap tanggal pelaporan untuk melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat. Pertimbangan manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

Sesuai dengan PSAK 71, Bank mengestimasi kerugian kredit ekspektasian ("KKE") atas pinjaman yang diberikan. Estimasi KKE melibatkan penggunaan model dan asumsi yang merupakan sumber utama ketidakpastian dalam estimasi.

Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, dari rasio kerugian yang terkait dan korelasi gagal bayar antarpihak. Bank menggunakan model yang kompleks yaitu menggunakan matriks *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD), dan variabel makroekonomi untuk estimasi yang bersifat perkiraan masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- PD merupakan kemungkinan pada suatu waktu *(point in time)* dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal pelaporan (Tahap 1) atau sepanjang umur aset (Tahap 2) dan memperhitungkan dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki dampak terhadap risiko kredit. PD diestimasikan pada suatu waktu yang berarti PD akan berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

***Key sources of estimation uncertainty** (continued)*

- *Allowance for impairment losses of financial assets*

Bank

The Group reviews their financial assets at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgement is applied in determining the level of allowance required.

In accordance with PSAK 71, the Bank estimated the expected credit losses ("ECL") on loans. The ECL estimation involves use of models and assumptions which are the key sources of estimation uncertainty.

The assessment of credit risk of an asset portfolio entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank primarily uses sophisticated models that utilize the Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD), and macroeconomic variables for forward looking perspective, which are discounted using the effective interest rate, as described as follows:

- *PD represents the probability at a point in time that debtor will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the asset (Stage 2) and incorporating the impact of forward looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.*

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Bank (lanjutan)

- LGD merupakan kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang gagal bayar dengan memperhitungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan, yaitu perbedaan antara arus kas kontraktual yang seharusnya diterima dengan arus kas yang diharapkan Bank untuk diterima. Bank mengestimasikan LGD berdasarkan data historis tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari pinjaman yang diberikan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan yang relevan.

- EAD merupakan perkiraan nilai eksposur pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan perubahan eksposur yang diharapkan selama masa eksposur. EAD memperhitungkan dampak penarikan fasilitas kredit (*committed*) yang dilakukan, pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dimuka, serta dampak dari asumsi ekonomi di masa depan yang relevan, yang dipilih berdasarkan pengumpulan data makroekonomi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti, namun tidak terbatas pada, regulator, pemerintah serta organisasi penelitian independen.

Variabel makroekonomi yang digunakan terdiri dari tingkat pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB), tingkat inflasi, nilai valuta asing, tingkat bunga antarbank, dan tingkat pengangguran. Untuk perhitungan KKE pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank menggunakan variabel makroekonomi sebagai berikut:

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

***Key sources of estimation uncertainty** (continued)*

- *Allowance for impairment losses of financial assets (continued)*

***Bank** (continued)*

- *LGD represents the loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of forward looking economic assumptions where relevant, which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the history of recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the loans, taking into account forward looking economic assumptions where relevant.*

- *EAD represents the expected exposure at the time of default, taking into account the expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principals and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant, which are chosen based on the collation of macroeconomics data obtained from various sources such as, but not limited to, regulators, government as well as independent research organisation.*

The macroeconomic variables used, among others, consisted of gross domestic product (GDP) growth rate, inflation rate, foreign exchange rates, interbank rate, and unemployment rate. In the calculation of ECL as of 31 December 2023 and 2022, the Bank used macroeconomic variables as follows:

	31 Desember/*December* 2023				
Skenario/ *Scenario*	**Tingkat pertumbuhan PDB per tahun/ *GDP growth rate per annum***	**Tingkat inflasi per tahun/ *Inflation rate per annum***	**Tingkat bunga antarbank per tahun/ *Interbank rate per annum***	**Nilai tukar Rupiah per 1 USD/ *Exchange rate of Rupiah per 1 USD***	**Tingkat pengangguran/ *Unemployment rate***
Terbaik/*Best*	5.5%	3.1%	4.5%	15,344	4.9%
Dasar/*Base*	5.2%	3.3%	4.8%	16,152	5.2%
Terburuk/*Worst*	4.9%	3.5%	5.0%	16,960	5.5%

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Bank (lanjutan)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

Key sources of estimation uncertainty *(continued)*

- *Allowance for impairment losses of financial assets (continued)*

Bank *(continued)*

	31 Desember/*December* 2022				
Skenario/ *Scenario*	**Tingkat pertumbuhan PDB per tahun/ *GDP growth rate per annum***	**Tingkat inflasi per tahun/ *Inflation rate per annum***	**Tingkat bunga antarbank per tahun/ *Interbank rate per annum***	**Nilai tukar Rupiah per 1 USD/ *Exchange rate of Rupiah per 1 USD***	**Tingkat pengangguran/ *Unemployment rate***
Terbaik/*Best*	6.3%	2.9%	4.0%	14,986	5.3%
Dasar/*Base*	6.0%	3.0%	4.3%	15,775	5.6%
Terburuk/*Worst*	5.7%	3.2%	4.5%	16,564	5.9%

Dalam menentukan probabilitas tertimbang dari skenario yang akan terjadi di masa depan, Bank telah melakukan analisis berdasarkan informasi historis PDB yang meliputi insiden besar yang terjadi pada rentang waktu 42 tahun terakhir.

In determining the probability weighted of each scenario that will occur in the future, the Bank has conducted an analysis based on historical GDP information which includes the major incident that happened in the last 42 years.

Bank menerapkan tiga skenario makroekonomi berikut untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi dalam mengestimasi KKE:

The Bank applied the following three macroeconomic scenarios to reflect an unbiased probability-weighted range of possible future outcomes in estimating ECL:

- Skenario Dasar: Skenario ini mencerminkan bahwa kondisi makroekonomi saat ini terus berlanjut; dan
- Skenario Terbaik dan Terburuk: Skenario ini ditetapkan relatif terhadap skenario dasar; mencerminkan kondisi makroekonomi terbaik dan terburuk berdasarkan kombinasi pendekatan statistik dan penilaian dari *subject matter expert* berdasarkan kondisi ekonomi saat ini.

- *Base scenario: This scenario reflects that current macroeconomic condition continues to prevail; and*
- *Best and Worst scenarios: These scenarios are set relative to the base scenario; reflecting best and worst case macroeconomic conditions based on combination of statistical approach and subject matter expert's assessment from current economic conditions.*

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Bank (lanjutan)

Pemodelan dilakukan dengan mengelompokkan portofolio kredit ke dalam 8 kategori untuk pinjaman ritel dan 1 kategori untuk pinjaman korporasi.

Asumsi yang mendasari pemodelan akan dipantau dan ditinjau setiap tahun. Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi yang dibuat selama periode pelaporan.

Khusus untuk pinjaman korporasi dan mitra bisnis tertentu yang material, ketika pinjaman yang diberikan mengalami penurunan nilai, cadangan kerugian kredit dihitung secara individu. Dalam penilaian individu, kondisi spesifik debitur dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Evaluasi penilaian individu atas arus kas yang diharapkan akan diterima ditentukan berdasarkan probabilitas tertimbang beberapa skenario.

Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan mengenai situasi keuangan debitur dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan yang ada. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan keadaan dan strategi penyelesaian masing-masing. Estimasi arus kas ekspektasian dari skenario-skenario estimasi disetujui secara independen oleh *Business Risk* masing-masing segmen bisnis.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

***Key sources of estimation uncertainty** (continued)*

- *Allowance for impairment losses of financial assets (continued)*

***Bank** (continued)*

Modelling is done by segmenting the credit portfolio into 8 categories for retail loans and 1 category for corporate loans.

The assumptions underlying modelling is monitored and reviewed on an annual basis. There have been no significant changes on estimation techniques made during the reporting period.

Specifically for corporate and certain material business banking loans, when the loans have been impaired, the allowance for credit losses is calculated individually. In individual assessment, the specific debtors' conditions are evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. Evaluation over the individual assessment is determined based on probability weighted of multiple scenarios.

Probability-weighted estimation is performed by taking into account weighting for each scenario and uses minimum of 2 (two) scenarios to reflect at least normal scenario and worst scenario. In estimating these cash flows, management makes judgments about the debtors' financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits and the workout strategy. The estimated expected cash flows from estimation scenarios are independently approved by the Business Risk from each business segment.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

- Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Entitas Anak

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah Entitas Anak. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan penurunan nilai kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas pembiayaan, karakteristik produk dan apakah pembiayaan tersebut telah direstrukturisasi.

Dalam mengestimasi cadangan yang diperlukan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan yang dihitung ini tergantung pada seberapa tepat estimasi dan asumsi pada model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Basis evaluasi atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan piutang murabahah dijelaskan pada Catatan 2i.

- Penentuan nilai wajar

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Grup harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 2ai. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang obyektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga, dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tersebut.

Kebijakan akuntansi pengukuran nilai wajar Grup dibahas pada Catatan 2ai.

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup

- Nilai wajar atas instrumen keuangan

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengukuran nilai wajar dibahas di Catatan 2ai.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

Key sources of estimation uncertainty *(continued)*

- *Allowance for impairment losses of financial assets (continued)*

Subsidiary

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of the Subsidiary's murabahah receivables. In assessing the need for collective impairment allowances, management considers factors such as financing quality, characteristic of products and whether the financing has been restructured.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the calculated allowances depends on how well the estimates and assumptions on the model and parameters used in determining collective allowances.

Basis of evaluation of impairment for financial assets and murabahah receivables is described in Note 2i.

- *Determining fair values*

The determination of fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Group has to use valuation techniques as described in Note 2ai. For financial instruments that trade infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and therefore, it requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

The Group's accounting policy on fair value measurement is discussed in Note 2ai.

Critical accounting judgments in applying the Group's accounting policies

- *Fair value of financial instruments*

The Group's accounting policy on fair value measurements is discussed in Note 2ai.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup (lanjutan)

- Nilai wajar atas instrumen keuangan (lanjutan)

  Informasi mengenai penentuan nilai wajar dari instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 41.

- Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan serta efek-efek syariah

  Kebijakan akuntansi Grup memberikan pilihan untuk mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan ke dalam berbagai kategori pada saat pengakuan awal berdasarkan kondisi tertentu yang membutuhkan pertimbangan manajemen.

  Dalam menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan, Bank telah menetapkan bahwa aset dan liabilitas keuangan telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2h.

  Dalam mengklasifikasikan investasi pada efek-efek syariah sebagai ”diukur pada biaya perolehan” dan ”diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain”, Entitas Anak telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2l.

- Sewa

  Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

  Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto.

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

***Critical accounting judgments in applying the Group's accounting policies** (continued)*

- *Fair value of financial instruments (continued)*

  Information about the determination of fair value of financial instruments is disclosed in Note 41.

- *Financial assets and liabilities as well as sharia securities classification*

  The Group's accounting policies provides choices to classify financial assets and liabilities into different categories at initial recognition based on certain circumstances requiring management's judgement.

  In determining the classification of financial assets and liabilities, the Bank has determined that financial assets and liabilities have already met the requirements of such classification as set out in Note 2h.

  In classifying investment in sharia securities as "measured at acquisition cost" and "measured at fair value through other comprehensive income", the Subsidiary has determined that the investment in sharia securities have already met the requirements of such classification as set out in Note 2l.

- *Leases*

  Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

  Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup (lanjutan)

- Sewa (lanjutan)

  Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

  Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama sebagai berikut; risiko kredit Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

  Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya dimasukkan dalam jangka waktu sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

***3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

***Critical accounting judgments in applying the Group's accounting policies** (continued)*

- *Leases (continued)*

  There are several factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

  In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors; the Group's credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered, and the currency in which the lease payments are denominated.

  In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

4. KAS / ***4. CASH***

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Rupiah	1,369,417	1,707,213	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	54,843	37,029	*United States Dollar*
Yen Jepang	3,821	3,219	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	602	-	*Singapore Dollar*
	1,428,683	1,747,461	

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 62.968 dan Rp 74.196.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) as of 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 62,968 and Rp 74,196, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kas telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga (disajikan sebesar nilai pertanggungan):

As of 31 December 2023 and 2022, cash has been insured by the third-party insurance companies (presented at sum insured):

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
PT Asuransi MSIG Indonesia	386,750	743,555	*PT Asuransi MSIG Indonesia*
PT Zurich General Takaful Indonesia	76,250	76,250	*PT Zurich General Takaful Indonesia*
Jumlah	463,000	819,805	*Total*

4. KAS (lanjutan)

Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tersebut.

***4. CASH** (continued)*

The Group believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the assets.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember/December		
	2023	**2022**	
Rupiah	6,963,876	7,710,064	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	2,312,722	2,505,286	*United States Dollar*
	9,276,598	10,215,350	

Termasuk dalam saldo giro pada Bank Indonesia adalah giro berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah masing-masing sebesar Rp 663.443 dan Rp 694.427 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Included in the balance of current accounts with Bank Indonesia are current accounts based on sharia principles under wadiah contract amounting to Rp 663,443 and Rp 694,427 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2023 and 2022, the statutory reserves were as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Bank			*Bank*
Rupiah			*Rupiah*
- GWM (Bank Konvensional)	8.30%	8.20%	*Statutory Reserves (Conventional Bank) -*
- GWM Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM")	9.49%	10.91%	*Statutory Reserve Macroprudential - Liquidity Buffer ("PLM")*
- GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM")*	-	-	*Statutory Reserve Macroprudential - Intermediation Ratio ("RIM")**
Mata uang asing			*Foreign currencies*
- GWM mata uang asing	4.02%	4.02%	*Foreign currencies reserve -*
Entitas Anak			*Subsidiary*
Rupiah			*Rupiah*
- GWM Total (Bank Syariah)	5.54%	5.77%	*Total Statutory Reserves (Sharia Bank) -*

*) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio RIM Bank berada di atas batas yang ditentukan. Walaupun demikian, Bank tidak dikenakan GWM RIM dikarenakan rasio KPMM Bank berada di atas 14%.

**) As of 31 December 2023 and 2022, the Bank's RIM ratio is above the specified limit. Nevertheless the Bank is not subject to the Statutory Reserves RIM as the Bank's CAR is above 14%.*

Grup memenuhi ketentuan BI yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Group fulfilled BI's regulations regarding Statutory Reserve Requirements as of 31 December 2023 and 2022.

6. GIRO PADA BANK-BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	31 Desember/*December*		
	2023	2022	
Rupiah	117,727	92,222	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	446,607	1,453,587	*United States Dollar*
Yen Jepang	153,105	390,933	*Japanese Yen*
Euro Eropa	62,471	89,866	*European Euro*
Dolar Australia	54,675	38,734	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	52,601	2,234	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	42,308	35,593	*British Poundsterling*
Baht Thailand	18,448	84,304	*Thailand Baht*
Mata uang asing lainnya	14,445	2,088	*Other foreign currencies*
	844,660	2,097,339	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(158)	(415)	*Allowance for impairment losses*
	962,229	2,189,146	

b. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan / *b. By relationship with counterparties*

	31 Desember/*December*		
	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	117,727	92,222	*Rupiah*
Mata uang asing	382,599	1,457,632	*Foreign currencies*
	500,326	1,549,854	
Pihak berelasi			***Related party***
Mata uang asing	462,061	639,707	*Foreign currencies*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(158)	(415)	*Allowance for impairment losses*
	962,229	2,189,146	

c. Berdasarkan pihak lawan / *c. By counterparties*

	31 Desember/*December*		
	2023	2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Wells Fargo Bank N.A., New York	277,571	1,333,299	*Wells Fargo Bank N.A., New York*
PT Bank Central Asia Tbk	119,367	96,905	*PT Bank Central Asia Tbk*
National Australia Bank, Singapura	54,675	38,734	*National Australia Bank, Singapore*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24,109	34,899	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13,395	5,645	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Citibank N.A., New York	8,091	37,953	*Citibank N.A., New York*
Lain-lain	3,118	2,419	*Others*
	500,326	1,549,854	
Pihak berelasi			***Related party***
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	462,061	639,707	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(158)	(415)	*Allowance for impairment losses*
	962,229	2,189,146	

6. GIRO PADA BANK-BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. Berdasarkan pihak lawan (lanjutan)

c. By counterparties (continued)

Giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas OJK. Tidak terdapat saldo giro pada bank-bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

As of 31 December 2023 and 2022, current accounts with other banks were classified as current based on OJK collectibility. There were no current accounts with other banks which were blocked or used as collateral as of those dates.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas giro pada bank-bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average interest rates per annum of current accounts with other banks for year ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Rupiah	0.63%	1.78%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.53%	0.12%	*Foreign currencies*

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses was as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	(415)	(460)	*Beginning balance*
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	256	44	*Reversal during the year (Note 34)*
Lainnya	1	1	*Others*
Saldo akhir	(158)	(415)	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai atas giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that the allowance for impairment losses was adequate to cover impairment losses for current accounts with other banks as of 31 December 2023 and 2022.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain ditempatkan pada pihak ketiga.

As of 31 December 2023 and 2022, all placements with Bank Indonesia and other banks were placed at third parties.

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Rupiah	3,064,603	11,307,098	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	5,897,051	10,578,116	*United States Dollar*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,624	2,851	*Accrued interest income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	*Allowance for impairment losses*
	8,964,278	21,887,894	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang digolongkan sebagai setara kas adalah masing-masing sebesar Rp 8.961.654 dan Rp 21.885.214.

As of 31 December 2023 and 2022, total placements with Bank Indonesia and other banks that were classified as cash equivalents amounted to Rp 8,961,654 and Rp 21,885,214, respectively.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS *(continued)*

b. Berdasarkan jenis

b. By type

	31 Desember/*December* 2023	31 Desember/*December* 2022	
Deposito berjangka	6,135,051	21,111,655	*Time deposits*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI"), bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	2,826,603	298,965	*Bank Indonesia's Deposit Facilities ("FASBI"), net of unamortized discount*
Call money	-	474,594	*Call money*
	8,961,654	21,885,214	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,624	2,851	*Accrued interest income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	*Allowance for impairment losses*
	8,964,278	21,887,894	

c. Berdasarkan pihak lawan

c. By counterparties

	31 Desember/*December* 2023	31 Desember/*December* 2022	
Deposito berjangka:			***Time deposits:***
Bank Indonesia	5,897,051	20,881,155	*Bank Indonesia*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	180,500	186,000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Aceh Syariah	50,000	-	*PT Bank Aceh Syariah*
PT Bank Mega Syariah	7,500	44,500	*PT Bank Mega Syariah*
	6,135,051	21,111,655	
Penempatan lain:			***Other placements:***
Bank Indonesia - bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	2,826,603	298,965	*Bank Indonesia - net of unamortized discount*
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	250,000	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Mega Tbk	-	155,675	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	-	38,919	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	30,000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
	8,961,654	21,885,214	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,624	2,851	*Accrued interest income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	*Allowance for impairment losses*
	8,964,278	21,887,894	

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK-BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS *(continued)*

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Hingga 1 bulan	8,723,654	21,795,214	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	238,000	90,000	*More than 1 - 3 months*
	8,961,654	21,885,214	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,624	2,851	*Accrued interest income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	*Allowance for impairment losses*
	8,964,278	21,887,894	

e. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

e. By remaining period to maturity date

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

f. Tingkat suku bunga

f. Interest rate

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average interest rates per annum of placements with Bank Indonesia and other banks for the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Rupiah	5.35%	3.20%	*Rupiah*
Mata uang asing	4.87%	2.53%	*Foreign currencies*

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

g. Allowance for impairment losses

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses was as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	(171)	(206)	*Beginning balance*
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	167	42	*Reversal during the year (Note 34)*
Lainnya	4	(7)	*Others*
Saldo akhir	-	(171)	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2022.

Management believes that no allowance for impairment losses was needed as of 31 December 2023 and allowance for impairment losses was adequate to cover impairment losses for placement with Bank Indonesia and other banks as of 31 December 2022.

8. EFEK-EFEK / *8. SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis mata uang dan penerbit / *a. By currency and issuer*

	31 Desember/ *December* 2023			
	Nilai nominal/ ***Nominal value***	**Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/** ***Unrealized gains (losses)***	**Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/** ***Unamortized premium (discount)***	**Nilai tercatat/** ***Carrying amount***
Rupiah				
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Measured at fair value through profit or loss*				
Obligasi pemerintah/*Government bonds*	121,755	1,181	-	122,936
	121,755	1,181	-	122,936
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Measured at fair value through other comprehensive income*				
Obligasi pemerintah/*Government bonds*	7,292,834	3,595	33,663	7,330,092
Reksa dana syariah/*Sharia mutual funds*	205,000	183	-	205,183
	7,497,834	3,778	33,663	7,535,275
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*				
Wesel ekspor/*Export bills*	137,352	-	(1,991)	135,361
	137,352	-	(1,991)	135,361
Diukur pada biaya perolehan/ *Measured at acquisition cost*				
Sukuk Bank Indonesia/*Bank Indonesia sukuk*	3,550,643	-	-	3,550,643
Surat Berharga Syariah Negara/*Sovereign Sharia Securities*	3,905,633	-	1,551	3,907,184
Reksa dana syariah/*Sharia mutual funds*	250,000	-	-	250,000
Sukuk korporasi/*Corporate sukuk*	28,000	-	170	28,170
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)/*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*	550,000	-	-	550,000
	8,284,276	-	1,721	8,285,997
	16,041,217	4,959	33,393	16,079,569
Mata uang asing/*Foreign currency*				
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Measured at fair value through profit or loss*				
Obligasi pemerintah/*Government bonds*	8,345	104	-	8,449
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*				
Wesel ekspor/*Export bills*	957,722	-	(7,239)	950,483
	966,067	104	(7,239)	958,932
Jumlah/*Total*				17,038,501
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima/*Accrued interest/margin income*				225,855
Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*				(799)
Jumlah/*Total*				17,263,557

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan penerbit (lanjutan)

***8. SECURITIES** (continued)*

***a. By currency and issuer** (continued)*

	31 Desember/*December* 2022			
	Nilai nominal/ *Nominal value*	**Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ *Unrealized gains (losses)***	**Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ *Unamortized premium (discount)***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***
Rupiah				
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Measured at fair value through profit or loss*				
Obligasi pemerintah/*Government bonds*	40,367	228	(483)	40,112
	40,367	228	(483)	40,112
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Measured at fair value through other comprehensive income*				
Obligasi pemerintah/*Government bonds*	9,070,522	(9,936)	126,792	9,187,378
Reksa dana syariah/*Sharia mutual funds*	205,000	81	-	205,081
	9,275,522	(9,855)	126,792	9,392,459
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*				
Wesel ekspor/*Export bills*	849,454	-	(232)	849,222
	849,454	-	(232)	849,222
Diukur pada biaya perolehan/ *Measured at acquisition cost*				
Surat Berharga Syariah Negara/*Sovereign Sharia Securities*	3,413,975	-	27,353	3,441,328
Sukuk Bank Indonesia/*Bank Indonesia sukuk*	3,306,884	-	-	3,306,884
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)/*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*	323,000	-	-	323,000
Reksa dana syariah/*Sharia mutual funds*	150,000	-	-	150,000
Sukuk korporasi/*Corporate sukuk*	107,000	-	1,545	108,545
	7,300,859	-	28,898	7,329,757
	17,466,202	(9,627)	154,975	17,611,550
Mata uang asing/*Foreign currency*				
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortized cost*				
Wesel ekspor/*Export bills*	1,232,035	-	(7,708)	1,224,327
	1,232,035	-	(7,708)	1,224,327
Jumlah/*Total*				18,835,877
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima/*Accrued interest/margin income*				214,812
Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*				(999)
Jumlah/*Total*				19,049,690

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis mata uang dan penerbit (lanjutan) / *a. By currency and issuer (continued)*

Perubahan atas keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movement of unrealized gains from changes in fair value of securities measured at fair value through other comprehensive income during the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Saldo awal, sebelum pajak penghasilan	(9,855)	151,144	*Beginning balance, before income tax*
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi selama tahun berjalan - bersih	13,633	(160,999)	*Unrealized (losses) gains during the year - net*
Jumlah sebelum pajak penghasilan	3,778	(9,855)	*Total before income tax*
Efek pajak penghasilan (Catatan 13f)	(830)	2,169	*Income tax effect (Note 13f)*
	2,948	(7,686)	
Kepentingan non-pengendali	(42)	(18)	*Non-controlling interest*
Saldo akhir, bersih	**2,906**	**(7,704)**	***Ending balance, net***

b. Berdasarkan akad / *b. By contract*

Termasuk di dalam efek-efek adalah efek-efek dengan akad syariah:

Included in securities are securities under sharia contracts:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Ijarah	3,907,184	3,441,328	*Ijarah*
Musyarakah muntahiyah bittamlik	3,550,643	3,306,884	*Musyarakah muntahiyah bittamlik*
Mudharabah	578,169	431,545	*Mudharabah*
Wakalah	455,184	355,081	*Wakalah*
	8,491,180	7,534,838	
Pendapatan yang masih akan diterima	75,512	64,941	*Accrued income*
	8,566,692	**7,599,779**	

c. Berdasarkan hubungan lawan / *c. By relationship*

	31 Desember/*December*		
	2023	***2022***	
Pihak ketiga	17,038,501	18,650,367	*Third parties*
Pihak berelasi	-	185,510	*Related parties*
	17,038,501	18,835,877	
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima	225,855	214,812	*Accrued interest/margin income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(799)	(999)	*Allowance for impairment losses*
	17,263,557	**19,049,690**	

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

***8. SECURITIES** (continued)*

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember/*December*		
	2023	***2022***	
Sampai dengan 1 bulan	2,550,000	3,056,827	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	293,770	283,340	*More than 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	1,400,295	2,568,347	*More than 3 - 6 months*
Lebih dari 6 - 9 bulan	532,591	-	*More than 6 - 9 months*
Lebih dari 9 - 12 bulan	474,881	-	*More than 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	11,786,964	12,927,363	*More than 12 months*
	17,038,501	18,835,877	
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima	225,855	214,812	*Accrued interest/margin income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(799)	(999)	*Allowance for impairment losses*
	17,263,557	**19,049,690**	

e. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

e. By remaining period of maturity date

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

f. Tingkat suku bunga/marjin rata-rata per tahun

f. Average interest rate/margin per annum

	31 Desember/*December*		
	2023	***2022***	
Obligasi pemerintah	5.34%	4.51%	*Government bonds*
Surat Berharga Syariah Negara	5.53%	5.14%	*Sovereign Sharia Securities*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	6.07%	4.03%	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Reksa dana syariah	5.44%	5.22%	*Sharia mutual funds*
Sukuk korporasi	7.22%	6.83%	*Corporate sukuk*
Sukuk Bank Indonesia	6.05%	3.77%	*Bank Indonesia sukuk*

g. Berdasarkan peringkat

g. By rating

Peringkat penerbit sukuk korporasi adalah sebagai berikut:

Rating of issuers of corporate sukuk was as follows:

	31 Desember/*December* 2023		
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***
PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Usaha Syariah	Pefindo	id AAA	18,169
PT BPD Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah	Fitch	A idn	10,000

	31 Desember/*December* 2022		
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo	id AA	80,428
PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Usaha Syariah	Pefindo	id AAA	18,117
PT BPD Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah	Fitch	A idn	10,000

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat atas seluruh efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah BBB berdasarkan pemeringkat *Fitch Ratings* Indonesia.

As of 31 December 2023 and 2022, the rating of all securities issued by Republic of Indonesia was BBB based on Fitch Ratings Indonesia agency.

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

h. Cadangan kerugian penurunan nilai

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai atas efek-efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

***8. SECURITIES** (continued)*

h. Allowance for impairment losses

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses for securities as of 31 December 2023 and 2022.

The movement of the allowance for impairment losses for securities was as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	(999)	(483)	*Beginning balance*
Pemulihan/(Penyisihan) selama tahun berjalan (Catatan 34)	365	(481)	*Recovery/(Provision) during the year (Note 34)*
Lainnya	(165)	(35)	*Others*
Saldo akhir	(799)	(999)	*Ending balance*

i. Informasi penting lainnya sehubungan dengan efek-efek

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank tidak melakukan penjualan atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, sehingga tidak ada pemindahan keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah efek-efek yang digolongkan sebagai setara kas adalah masing-masing sebesar Rp 2.843.668 dan Rp 3.340.167.

i. Other significant information relating to securities

During the year ended 31 December 2023 and 2022, the Bank did not sell securities measured at fair value through other comprehensive income, so there were no gains or losses transferred from equity to profit or loss.

As of 31 December 2023 and 2022, total securities that were classified as cash equivalents amounted to Rp 2,843,668 and Rp 3,340,167, respectively.

9. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

a. Berdasarkan jenis dan hubungan

9. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES

a. By type and relationship

	31 Desember/*December* 2023				
		Nilai wajar/*Fair value*			
		Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*		Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*	
Instrumen/*Instruments*	**Nilai kontrak/nosional/ *Contract/notional amount***	**Pihak berelasi/ *Related parties***	**Pihak ketiga/ *Third parties***	**Pihak berelasi/ *Related parties***	**Pihak ketiga/ *Third parties***
Kontrak tunai mata uang asing/*Foreign currency spot*	2,249,277	94	1,574	78	3,157
Kontrak berjangka mata uang asing/*Foreign currency forward*	2,941,835	17,783	24,926	169	5,892
Swap mata uang asing/ *Foreign currency swap*	23,756,959	6,691	100,966	28,361	137,311
Cross currency swap	29,796,948	54,603	509,458	28,677	464,447
Swap suku bunga/*Interest rate swap*	9,741,599	417,054	-	-	404,012
	68,486,618	496,225	636,924	57,285	1,014,819

9. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan) / *9. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan hubungan (lanjutan) / *a. By type and relationship (continued)*

Instrumen/*Instruments*	Nilai kontrak/nosional/ *Contract/notional amount*	31 Desember/*December* 2022 — Nilai wajar/*Fair value* — Tagihan derivatif/ *Derivative receivables* — Pihak berelasi/ *Related parties*	Tagihan derivatif/ *Derivative receivables* — Pihak ketiga/ *Third parties*	Liabilitas derivatif/ *Derivative payables* — Pihak berelasi/ *Related parties*	Liabilitas derivatif/ *Derivative payables* — Pihak ketiga/ *Third parties*
Kontrak tunai mata uang asing/*Foreign currency spot*	1,728,020	522	1,171	-	4,500
Kontrak berjangka mata uang asing/*Foreign currency forward*	1,982,247	778	19,821	22,594	11,169
Swap mata uang asing/ *Foreign currency swap*	7,947,185	26,897	84,077	1,103	15,791
Cross currency swap	25,881,208	25,776	984,782	100,394	746,883
Swap suku bunga/*Interest rate swap*	13,837,808	561,187	41,813	-	545,302
	51,376,468	615,160	1,131,664	124,091	1,323,645

Bank menyediakan produk derivatif untuk nasabahnya seperti kontrak pembelian atau penjualan berjangka mata uang asing, perjanjian swap mata uang asing dan perjanjian *swap/cap* tingkat suku bunga yang memungkinkan nasabahnya untuk memindahkan, memodifikasi atau mengurangi risiko atas kurs nilai tukar dan/atau risiko tingkat suku bunga. Sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, Bank melindungi sebagian besar transaksi derivatif dengan nasabahnya dengan membuat transaksi derivatif timbal balik dengan jumlah dan waktu jatuh tempo yang sama dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan bank lain. Bank juga menggunakan instrumen derivatif sebagai sarana sehubungan dengan kegiatan manajemen risiko. Derivatif digunakan oleh Bank terutama untuk mengatasi risiko kurs nilai tukar atas aset dan liabilitas dalam mata uang asing, dan untuk mengatasi risiko tingkat suku bunga yang berhubungan dengan aset dan liabilitas tertentu di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Bank provides derivative products to its customers such as forward exchange contracts, cross-currency swap agreements and interest rate swap/cap agreements to enable its customers to transfer, modify or reduce their foreign exchange and/or interest rate risks. As part of its risk management policy, the Bank covers most of these derivative contracts with customers with back-to-back derivative contracts with the same notional amount and maturity with its foreign affiliates and other banks. Also, the Bank uses derivative instruments as an end-user in connection with its risk management activities. Derivatives are used by the Bank mainly to manage foreign exchange risk on its foreign currency denominated assets and liabilities and to manage interest rate risk relating to specific groups of assets and liabilities in the consolidated statement of financial position.

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectibility*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Lancar	1,130,701	1,740,508	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	2,448	6,316	*Special Mention*
	1,133,149	1,746,824	

9. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

9. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

c. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo

c. By remaining period to maturity date

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

10. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES

Tagihan akseptasi

Acceptance receivables

Semua tagihan akseptasi adalah transaksi dengan pihak ketiga.

All acceptance receivables transactions were with third parties.

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Rupiah	1,783,724	1,898,383	*Rupiah*
Mata uang asing	1,506,033	1,171,471	*Foreign currencies*
	3,289,757	3,069,854	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8,637)	(4,495)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3,281,120	3,065,359	

b. Berdasarkan jangka waktu

b. By time period

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Rupiah			***Rupiah***
Hingga 1 bulan	1,707	6,619	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	27,150	24,509	*More than 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	1,754,867	1,843,668	*More than 3 - 6 months*
Lebih dari 6 bulan	-	23,587	*More than 6 months*
	1,783,724	1,898,383	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Hingga 1 bulan	-	3,411	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	82,388	131,357	*More than 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	685,208	907,601	*More than 3 - 6 months*
Lebih dari 6 bulan	738,437	129,102	*More than 6 months*
	1,506,033	1,171,471	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8,637)	(4,495)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3,281,120	3,065,359	

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

10. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

c. Berdasarkan kolektabilitas

c. By collectability

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Lancar	3,289,757	3,069,854	*Current*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8,637)	(4,495)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3,281,120	3,065,359	

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

d. Allowance for impairment losses

The movement of the allowance for impairment losses for acceptance receivables was as follows:

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Saldo awal	(4,495)	(5,633)	*Beginning balance*
(Penyisihan)/Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	(4,217)	1,576	*(Provision)/Recovery during the year (Note 34)*
Lainnya	75	(438)	*Others*
Saldo akhir	(8,637)	(4,495)	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses on acceptance receivables as of 31 December 2023 and 2022.

Liabilitas akseptasi

Acceptance payables

a. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan dan mata uang

a. By relationship with counterparties and currency

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
- Pihak ketiga	1,783,724	1,873,299	*Third parties -*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
- Pihak ketiga	376,526	284,297	*Third parties -*
- Pihak berelasi	163,383	199,232	*Related parties -*
	539,909	483,529	
	2,323,633	2,356,828	

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan) / *10. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)*

Liabilitas akseptasi (lanjutan) / ***Acceptance payables** (continued)*

b. Berdasarkan jangka waktu / ***b. By time period***

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Hingga 1 bulan	1,707	6,619	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	27,150	24,509	*More than 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	1,754,867	1,842,171	*More than 3 - 6 months*
	1,783,724	1,873,299	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Hingga 1 bulan	-	3,411	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	82,388	131,357	*More than 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	271,587	293,413	*More than 3 - 6 months*
Lebih dari 6 bulan	185,934	55,348	*More than 6 months*
	539,909	483,529	
	2,323,633	2,356,828	

c. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo / ***c. By remaining period to maturity date***

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH / *11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Pinjaman yang diberikan:			*Loans:*
Pihak ketiga			*Third parties*
- Rupiah	98,345,547	88,421,976	*Rupiah -*
- Dolar Amerika Serikat	42,369,192	42,837,338	*United States Dollar -*
- Yen Jepang	606,229	782,342	*Japanese Yen -*
- Euro Eropa	79,104	167,004	*European Euro -*
Pihak berelasi			*Related parties*
- Rupiah	79,043	856,218	*Rupiah -*
- Dolar Amerika Serikat	3,694,321	1,531,175	*United States Dollar -*
Pembiayaan/piutang syariah:			*Sharia financing/receivables:*
Pihak ketiga			*Third parties*
- Rupiah	11,387,861	11,527,463	*Rupiah -*
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima			*Accrued interest/margin income*
- Rupiah	775,589	658,255	*Rupiah -*
- Dolar Amerika Serikat	320,372	218,351	*United States Dollar -*
- Yen Jepang	680	266	*Japanese Yen -*
- Euro Eropa	1,155	1,662	*European Euro -*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,618,047)	(3,579,119)	*Less: Allowance for impairment losses*
	153,041,046	143,422,931	

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) / *LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)*

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas OJK / *Based on type, currency and OJK grading*

	31 Desember/*December* 2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Korporasi	50,815,025	4,782,889	-	-	507,652	56,105,566	*Corporates*
Pensiunan	21,691,457	363,678	30,979	36,467	94,541	22,217,122	*Pensioners*
Usaha Kecil Menengah	13,651,641	170,977	35,734	25,775	827,908	14,712,035	*Small Medium Enterprises*
Usaha Mikro Kecil	1,098,101	25,702	4,324	4,570	12,126	1,144,823	*Micro business*
Pembiayaan/piutang syariah	10,593,668	459,676	272,637	17,559	44,321	11,387,861	*Sharia financing/ Receivables*
Pegawai instansi lain	168,964	8,678	1,862	2,049	4,337	185,890	*Other institutions' Employees*
Keperluan rumah tangga	705,280	34,456	4,762	2,048	368	746,914	*Household goods*
Karyawan	116,249	74	48	138	204	116,713	*Employee loans*
Umum	2,687,078	82,107	18,353	27,954	9,010	2,824,502	*General purpose*
Kredit kepemilikan mobil	328,134	39,827	1,200	1,609	255	371,025	*Car loans*
	101,855,597	5,968,064	369,899	118,169	1,500,722	109,812,451	
Mata uang asing							***Foreign Currencies***
Korporasi	45,758,641	882,426	107,779	-	-	46,748,846	*Corporates*
	147,614,238	6,850,490	477,678	118,169	1,500,722	156,561,297	
Pendapatan bunga/ marjin yang masih akan diterima	838,560	259,236	-	-	-	1,097,796	*Accrued interest/ margin income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,373,376)	(1,764,839)	(295,641)	(70,563)	(1,113,628)	(4,618,047)	*Less: Allowance for impairment losses*
	147,079,422	5,344,887	182,037	47,606	387,094	153,041,046	

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Korporasi	48,133,482	1,342,381	-	-	515,461	49,991,324	*Corporates*
Pensiunan	23,137,597	483,528	37,161	42,812	71,202	23,772,300	*Pensioners*
Usaha Kecil Menengah	11,312,771	120,626	215,051	30,083	531,973	12,210,504	*Small Medium Enterprises*
Usaha Mikro Kecil	604,486	18,449	1,195	1,538	1,929	627,597	*Micro business*
Pembiayaan/piutang syariah	10,949,316	272,820	187,571	24,707	93,049	11,527,463	*Sharia financing/ receivables*
Pegawai instansi lain	201,016	9,995	2,126	2,135	2,101	217,373	*Other institutions' employees*
Keperluan rumah tangga	77,333	3,505	632	1,185	525	83,180	*Household goods*
Karyawan	123,040	135	-	54	-	123,229	*Employee loans*
Umum	1,950,614	43,003	7,395	13,688	174,822	2,189,522	*General purpose*
Kredit kepemilikan mobil	61,136	1,771	66	168	24	63,165	*Car loans*
	96,550,791	2,296,213	451,197	116,370	1,391,086	100,805,657	
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Korporasi	42,063,947	3,137,156	116,756	-	-	45,317,859	*Corporates*
	138,614,738	5,433,369	567,953	116,370	1,391,086	146,123,516	
Pendapatan bunga/ marjin yang masih akan diterima	817,968	60,566	-	-	-	878,534	*Accrued interest/ margin income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,733,503)	(411,626)	(340,947)	(79,938)	(1,013,105)	(3,579,119)	*Less: Allowance for impairment losses*
	137,699,203	5,082,309	227,006	36,432	377,981	143,422,931	

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas OJK (lanjutan)

Pembiayaan/piutang syariah terdiri atas piutang murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pinjaman qardh masing-masing sebesar Rp 11.367.662, Rp 19.669, dan Rp 530 pada tanggal 31 Desember 2023 dan masing-masing sebesar Rp 11.463.672, Rp 60.275, dan Rp 3.516 pada tanggal 31 Desember 2022.

Rasio pinjaman yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM") terhadap jumlah pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 11,21% dan 11,94%. Rasio tersebut dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

a. Based on type, currency and OJK grading (continued)

Sharia financing/receivables consists of murabahah receivables, musyarakah financing, and funds of qardh amounted to Rp 11,367,662, Rp 19,669, and Rp 530, respectively, as of 31 December 2023 and Rp 11,463,672, Rp 60,275, and Rp 3,516, respectively, as of 31 December 2022.

Ratios of loans extended to Micro, Small and Medium Enterprises ("UMKM") to total loans as of 31 December 2023 and 2022 were 11.21% and 11.94%, respectively. These ratios were calculated based on the prevailing Bank Indonesia regulations.

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sector*

	31 Desember/*December* 2023						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Rupiah							***Rupiah***
Rumah tangga	25,035,594	518,206	56,882	70,159	108,663	25,789,504	*Household*
Perdagangan	22,547,759	448,241	225,416	31,769	834,646	24,087,831	*Trading*
Perindustrian	22,463,627	593,988	38,863	4,648	185,261	23,286,387	*Manufacturing*
Jasa lainnya	16,188,859	556,813	395	2,448	258,121	17,006,636	*Other services*
Pertanian	4,565,125	59,412	31,936	1,299	12,691	4,670,463	*Agriculture*
Jasa akomodasi	158,156	72	142	-	26,016	184,386	*Accomodation services*
Konstruksi	1,695,078	3,760,473	-	4,058	64,484	5,524,093	*Construction*
Transportasi & komunikasi	7,446,509	8,890	83	2,776	6,928	7,465,186	*Transportation & communication*
Pertambangan	926,328	-	3,563	-	1,097	930,988	*Mining*
Lainnya	828,562	21,969	12,619	1,012	2,815	866,977	*Others*
	101,855,597	5,968,064	369,899	118,169	1,500,722	109,812,451	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollar***
Perdagangan	2,456,267	-	-	-	-	2,456,267	*Trading*
Perindustrian	9,182,867	871,469	107,779	-	-	10,162,115	*Manufacturing*
Jasa lainnya	16,489,869	5,646	-	-	-	16,495,515	*Other services*
Pertanian	1,404,117	-	-	-	-	1,404,117	*Agriculture*
Konstruksi	320,628	-	-	-	-	320,628	*Construction*
Transportasi & komunikasi	5,460,203	-	-	-	-	5,460,203	*Transportation & communication*
Pertambangan	5,097,663	-	-	-	-	5,097,663	*Mining*
Lainnya	4,667,005	-	-	-	-	4,667,005	*Others*
	45,078,619	877,115	107,779	-	-	46,063,513	
Yen Jepang							***Japanese Yen***
Perdagangan	5,444	-	-	-	-	5,444	*Trading*
Perindustrian	360,643	2,722	-	-	-	363,365	*Manufacturing*
Jasa lainnya	-	2,589	-	-	-	2,589	*Other services*
Lainnya	234,831	-	-	-	-	234,831	*Others*
	600,918	5,311	-	-	-	606,229	
Euro Eropa							***European Euro***
Perdagangan	79,104	-	-	-	-	79,104	*Trading*
	147,614,238	6,850,490	477,678	118,169	1,500,722	156,561,297	
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima	838,560	259,236	-	-	-	1,097,796	*Accrued interest/ margin income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,373,376)	(1,764,839)	(295,641)	(70,563)	(1,113,628)	(4,618,047)	*Less: Allowance for impairment losses*
	147,079,422	5,344,887	182,037	47,606	387,094	153,041,046	

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) / *11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan) / *b. By economic sector (continued)*

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Rumah tangga	24,518,478	541,542	47,330	59,980	77,499	25,244,829	*Household*
Perdagangan	23,158,792	447,912	382,947	40,933	602,863	24,633,447	*Trading*
Perindustrian	20,220,675	671,592	5,522	8,735	167,556	21,074,080	*Manufacturing*
Jasa lainnya	14,060,442	593,476	1,186	218	451,273	15,106,595	*Other services*
Pertanian	3,625,257	10,326	3,074	1,056	20,389	3,660,102	*Agriculture*
Jasa akomodasi	97,763	1,457	73	-	28,318	127,611	*Accomodation services*
Konstruksi	5,493,870	15,623	-	4,355	37,231	5,551,079	*Construction*
Transportasi & komunikasi	4,377,026	341	1,942	-	739	4,380,048	*Transportation & communication*
Pertambangan	200,892	1	1	-	6	200,900	*Mining*
Lainnya	797,596	13,943	9,122	1,093	5,212	826,966	*Others*
	96,550,791	2,296,213	451,197	116,370	1,391,086	100,805,657	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollar***
Perdagangan	2,864,387	-	-	-	-	2,864,387	*Trading*
Perindustrian	10,777,022	2,843,714	116,756	-	-	13,737,492	*Manufacturing*
Jasa lainnya	12,379,459	11,935	-	-	-	12,391,394	*Other services*
Pertanian	2,652,480	-	-	-	-	2,652,480	*Agriculture*
Konstruksi	382,345	-	-	-	-	382,345	*Construction*
Transportasi & komunikasi	3,092,831	-	-	-	-	3,092,831	*Transportation & communication*
Pertambangan	5,259,690	-	-	-	-	5,259,690	*Mining*
Lainnya	3,987,894	-	-	-	-	3,987,894	*Others*
	41,396,108	2,855,649	116,756	-	-	44,368,513	
Yen Jepang							***Japanese Yen***
Perindustrian	165,346	275,650	-	-	-	440,996	*Manufacturing*
Perdagangan	14,726	-	-	-	-	14,726	*Trading*
Jasa lainnya	2,676	5,857	-	-	-	8,533	*Other services*
Lainnya	318,087	-	-	-	-	318,087	*Others*
	500,835	281,507	-	-	-	782,342	
Euro Eropa							***European Euro***
Perdagangan	167,004	-	-	-	-	167,004	*Trading*
	138,614,738	5,433,369	567,953	116,370	1,391,086	146,123,516	
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima	817,968	60,566	-	-	-	878,534	*Accrued interest/ margin income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,733,503)	(411,626)	(340,947)	(79,938)	(1,013,105)	(3,579,119)	*Less: Allowance for impairment losses*
	137,699,203	5,082,309	227,006	36,432	377,981	143,422,931	

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By time period*

	31 Desember/*December*		
	2023	2022	
Hingga 1 tahun	67,842,273	61,644,137	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 - 2 tahun	15,290,577	14,844,877	*More than 1 - 2 years*
Lebih dari 2 - 3 tahun	12,145,179	11,394,722	*More than 2 - 3 years*
Lebih dari 3 - 4 tahun	8,986,657	7,596,787	*More than 3 - 4 years*
Lebih dari 4 - 5 tahun	17,732,394	17,631,424	*More than 4 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	34,564,217	33,011,569	*More than 5 years*
	156,561,297	146,123,516	
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima	1,097,796	878,534	*Accrued interest/margin income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,618,047)	(3,579,119)	*Less: Allowance for impairment losses*
	153,041,046	143,422,931	

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan) / *11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)*

d. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity date*

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

e. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan/debitur / *e. By relationship with counterparties/debtors*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga	152,787,933	143,736,123	*Third parties*
Pihak berelasi	3,773,364	2,387,393	*Related parties*
	156,561,297	146,123,516	
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima	1,097,796	878,534	*Accrued interest/margin income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,618,047)	(3,579,119)	*Allowance for impairment losses*
	153,041,046	143,422,931	

f. Tingkat suku bunga/marjin rata-rata per tahun / *f. Average interest/margin rate per annum*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:			*Average interest rate per annum:*
Rupiah	9.43%	9.04%	*Rupiah*
Mata uang asing	6.13%	2.81%	*Foreign currencies*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Tingkat marjin rata-rata per tahun:			*Average margin rate per annum:*
Piutang murabahah	25%-30%	25%-30%	*Murabahah receivables*
Tingkat imbal hasil per tahun:			*Rate of return per annum:*
Pembiayaan musyarakah	8.75%-11.00%	8.75%-10.50%	*Musyarakah financing*

g. Cadangan kerugian penurunan nilai / *g. Allowance for impairment losses*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses for loans and sharia financing/receivables was as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	(3,579,119)	(3,953,699)	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	(3,029,571)	(1,754,676)	*Provision during the year (Note 34)*
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	(88,291)	(120,194)	*Recoveries from loans written-off*
Penghapusbukuan	2,066,044	1,871,710	*Write-off*
Kerugian modifikasi	-	308,911	*Modification loss*
Penjualan pinjaman yang diberikan	-	91,486	*Sale of loan*
Lain-lain	12,890	(22,657)	*Others*
Saldo akhir	(4,618,047)	(3,579,119)	*Ending balance*

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan Bank berdasarkan Tahap (*Stage*) adalah sebagai berikut:

***11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES** (continued)*

***g. Allowance for impairment losses** (continued)*

The movement of the Bank's allowance for impairment losses for loans based on Stages was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	**(698,596)**	**(272,613)**	**(1,838,985)**	**(2,810,194)**	***Beginning balance***
Transfer (ke)/dari Tahap 1	(113,376)	91,804	21,572	-	*Transfer (to)/from Stage 1*
Transfer (ke)/dari Tahap 2	227,654	(281,368)	53,714	-	*Transfer (to)/from Stage 2*
Transfer (ke)/dari Tahap 3	1,336	559,675	(561,011)	-	*Transfer (to)/from Stage 3*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	379,086	(334,157)	(800,109)	(755,180)	*Net change in exposures and remeasurements*
Pinjaman yang baru diperoleh	(889,467)	(201,976)	(329,629)	(1,421,072)	*New originated loans*
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	-	-	(40,007)	(40,007)	*Recoveries from loans written-off*
Penghapusbukuan selama periode berjalan	-	-	564,634	564,634	*Write-off during the period*
Pinjaman yang telah dilunasi	251,294	256,083	291,299	798,676	*Loans which have been repaid*
Perubahan parameter model	210,587	13,605	21,930	246,122	*Changes in model parameter*
Lain-lain	-	-	12,890	12,890	*Others*
Saldo akhir - kerugian kredit ekspektasian Bank	**(631,482)**	**(168,947)**	**(2,603,702)**	**(3,404,131)**	***Ending balance – expected credit losses Bank***
Cadangan kerugian penurunan nilai – pembiayaan/piutang syariah				(1,213,916)	*Allowance for impairment losses – sharia financing/receivables*
Saldo akhir				**(4,618,047)**	***Ending balance***

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/ *Year ended 31 December 2022*				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	**(533,068)**	**(350,053)**	**(2,371,313)**	**(3,254,434)**	***Beginning balance***
Transfer (ke)/dari Tahap 1	(274,449)	86,368	188,081	-	*Transfer (to)/from Stage 1*
Transfer (ke)/dari Tahap 2	185,002	(218,461)	33,459	-	*Transfer (to)/from Stage 2*
Transfer (ke)/dari Tahap 3	166,582	445,053	(611,635)	-	*Transfer (to)/from Stage 3*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	55,989	(267,101)	(553,730)	(764,842)	*Net change in exposures and remeasurements*
Pinjaman yang baru diperoleh	(413,024)	(155,684)	(228,370)	(797,078)	*New originated loans*
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	-	-	(45,362)	(45,362)	*Recoveries from loans written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	921,486	921,486	*Write-off during the year*
Penjualan pinjaman	-	-	91,486	91,486	*Sale of loan*
Pinjaman yang telah dilunasi	218,775	207,342	464,058	890,175	*Loans which have been repaid*
Perubahan parameter model	(104,403)	(20,077)	(13,399)	(137,879)	*Changes in model parameter*
Kerugian modifikasi	-	-	308,911	308,911	*Modification loss*
Lain-lain	-	-	(22,657)	(22,657)	*Others*
Saldo akhir - kerugian kredit ekspektasian Bank	**(698,596)**	**(272,613)**	**(1,838,985)**	**(2,810,194)**	***Ending balance – expected credit losses Bank***
Cadangan kerugian penurunan nilai – pembiayaan/piutang syariah				(768,925)	*Allowance for impairment losses – sharia financing/receivables*
Saldo akhir				**(3,579,119)**	***Ending balance***

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Pergerakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Bank dari Rp 2.810.194 posisi 31 Desember 2022 menjadi Rp 3.404.131 posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai dampak dari beberapa kejadian berikut ini:

- Penambahan CKPN yang dibentuk pada segmen korporasi sebesar Rp 728.964.
- Nilai CKPN yang dibentuk sebagai bagian prinsip kehati-hatian bank terhadap debitur-debitur restruktur Covid-19 yang dinilai dapat bertahan dan tidak dapat bertahan dengan portfolio yang cenderung menurun baik untuk debitur KDK 34 ataupun debitur Non KDK 34 dengan realisasi sebesar Rp 117.729, yang tetap mempertimbangkan cakupan CKPN yang tetap stabil.
- Terdapat *reversal* sebesar Rp 246.122 dari proses review tahunan atas model CKPN.
- Realisasi atas nilai CKPN yang dibentuk sehingga menyebabkan penurunan nilai CKPN bersih di segmen retail sebesar Rp 17.309.

Pergerakan cadangan kerugian penurunan nilai Entitas Anak dari Rp 768.259 posisi 31 Desember 2022 menjadi Rp 1.213.542 posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai bagian prinsip kehati-hatian Entitas Anak terhadap tantangan yang dihadapi oleh segmen nasabah yang dilayaninya dalam periode pasca pandemi Covid-19, termasuk didalamnya nasabah-nasabah restruktur Covid-19.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

h. Pembiayaan bersama

Bank mengadakan perjanjian pembiayaan bersama, antara lain dengan PT KB Finansia Multi Finance (FMF), PT Home Credit Indonesia (HCI) dan PT Mandiri Utama Finance (MUF) (Catatan 40).

i. Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK")

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Grup yang disampaikan kepada OJK, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan BMPK kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan OJK.

***11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES** (continued)*

***g. Allowance for impairment losses** (continued)*

Movement in the Bank's allowance for impairment losses (CKPN) from Rp 2,810,194 as of 31 December 2022 to Rp 3,404,131 as of 31 December 2023 was due to the impact of following events:

- *Additional of CKPN booked for corporate segment amounted to Rp 728,964.*
- *CKPN booked as part of the implementation of prudential principle towards Covid-19 restructured debtors which are considered to be able to survive and not be able to survive with a declining trend portfolio for both for KDK 34 debtors and non-KDK 34 debtors with realization amounting Rp 117,729 which have taken into account CKPN coverage to remain stable.*
- *There was reversal amounting to Rp 246,122 due to the annual review process of CKPN model.*
- *Realization of CKPN booked which caused decrement in net value of CKPN at retail segment amounted to Rp 17,309.*

The movement of the Subsidiary's allowance for impairment losses from Rp 768,259 as of 31 December 2022 to Rp 1,213,542 as of 31 December 2023 is part of the Subsidiary's prudential principle as challenges faced by the customer segment served in the post Covid-19 pandemic period, including Covid-19 restructuring customers.

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses on loans and sharia financing/ receivables as of 31 December 2023 and 2022.

h. Joint financing

The bank has entered into joint financing agreements, among others with PT KB Finansia Multi Finance (FMF), PT Home Credit Indonesia (HCI), and PT Mandiri Utama Finance (MUF) (Note 40).

i. Legal Lending Limit ("LLL")

Based on the Group's Legal Lending Limit (LLL) report to OJK, as of 31 December 2023 and 2022 there was no violation or excess of LLL to both third parties and related parties in compliance with OJK's regulation.

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

j. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah bermasalah

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, rasio bruto pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah setinggi-tingginya adalah 5% dari jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah. Rasio kredit bermasalah bruto dan bersih Grup adalah sebagai berikut:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

j. Non-performing loans and sharia financing/receivables

Based on prevailing OJK regulations, the maximum gross non-performing loans and sharia financing/receivables ratio for a bank is 5% from total loans and sharia financing/receivables given. The gross and net non-performing loan ratios of the Group was as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Kurang lancar	477,678	567,953	*Substandard*
Diragukan	118,169	116,370	*Doubtful*
Macet	1,500,722	1,391,086	*Loss*
Jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - kotor	2,096,569	2,075,409	*Total non-performing loans and sharia financing/receivables - gross*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,479,832)	(1,433,990)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - bersih	616,737	641,419	*Total non-performing loans and sharia financing/receivables - net*
Jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan	156,561,297	146,123,516	*Total loans and sharia financing/ receivables*
Jumlah pinjaman kepada Bank lain	(2,183,624)	(638,152)	*Total loans to other banks*
	154,377,673	145,485,364	
Rasio pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - kotor	1.36%	1.43%	*Non-performing loans and sharia financing/receivables ratio - gross*
Rasio pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah - bersih	0.40%	0.44%	*Non-performing loans and sharia financing/receivables ratio - net*

Rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Grup (persentase cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Bank Indonesia) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 134,49% dan 114,08%.

The Group's ratio of allowance for impairment losses on financial assets (percentage of allowance for impairment losses on financial assets recorded to the minimum allowance for impairment losses on financial assets as required by Bank Indonesia) as of 31 December 2023 and 2022 were 134.49% and 114.08%, respectively.

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lainnya.

Loans are generally collateralised by registered mortgages, mortgages or powers of attorney to sell and other guarantees.

Pada tanggal 31 Desember 2023, pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan jaminan uang tunai adalah Rp 28.587.601 (31 Desember 2022: Rp 28.186.840).

As of 31 December 2023, loans secured by cash collateral were Rp 28,587,601 (31 December 2022: Rp 28,186,840).

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES *(continued)*

k. Kredit penerusan

Bank juga menyalurkan fasilitas kredit yang dananya bersumber dari Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia melalui kredit penerusan (*channeling loan*) dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM).

Saldo dari kredit penerusan tidak diakui pada laporan keuangan konsolidasian. Rincian saldo kredit penerusan adalah sebagai berikut:

k. Channeling loans

The Bank also provides loan facilities funded by the Government of Indonesia or Bank Indonesia through channeling loans in the form of Kredit Usaha Tani (KUT) and Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM).

These chanelling loans are not recognized in the consolidated financial statements. The balances were as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Kredit Penerusan KUT	24,687	24,687	*KUT Channeling Loans*
Kredit Penerusan KPKM	16,061	9,830	*KPKM Channeling Loans*
	40,748	34,517	

l. Kredit sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain dan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Dalam kredit sindikasi, Bank dapat bertindak sebagai anggota dan/atau *arranger* dan/atau Agen Fasilitas dan/atau Agen Jaminan. Sindikasi dilakukan dengan bank-bank di Indonesia dan/atau luar negeri.

Keikutsertaan Bank sebagai anggota dan/atau *arranger* dalam kredit sindikasi berkisar antara 1,77% sampai dengan 80% dari fasilitas kredit sindikasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1,77% sampai dengan 80% dari fasilitas kredit sindikasi pada pada tanggal 31 Desember 2022.

l. Syndicated loans

Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks and are generally used to support the working capital needs and investment. In syndicated loans, the Bank may act as a member and/or arranger and/or Facility Agent and/or Security Agent. Syndication is done with several banks in Indonesia and/or offshore.

Total participation of the Bank in syndicated loans, in which the Bank acted as a member and/or arranger, ranged from 1.77% up to 80% of syndicated loan facility as of 31 December 2023 and ranged from 1.77% up to 80% of syndicated loan facility as of 31 December 2022.

m. Perjanjian dengan perusahaan asuransi

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Pada tanggal 26 November 2008, Bank melakukan perjanjian ("PKS") dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan dan mikro dengan asuransi jiwa. Perjanjian Kerjasama ini mencakup 3 bagian (asuransi untuk debitur Kredit Pensiun sebelum tanggal 1 Desember 2008, asuransi untuk debitur Kredit Pensiun sejak tanggal 1 Desember 2008, dan asuransi untuk debitur kredit mikro) dan berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian, dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 5 (lima) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

m. Agreements with insurance companies

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

On 26 November 2008, the Bank entered into an agreement ("PKS") with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension and micro loans with life insurance. The insurance agreement consists of 3 sections (insurance for pension loan debtors before 1 December 2008, insurance for pension loan debtors since 1 December 2008 onwards, and insurance for micro loan debtors) and is effective for 5 (five) years since the date of the agreement, and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of 5 (five) years or as mutually agreed by both parties.

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

m. Perjanjian dengan perusahaan asuransi (lanjutan)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 1 April 2013 dilakukan perubahan atas PKS yang dibuat dalam bentuk PKS Induk (Perjanjian *Bancassurance* untuk Kegiatan Referensi) dan PKS turunan yang dibuat untuk masing-masing produk Kredit Pensiun dan Kredit Pegawai.

Sesuai Perjanjian Kerja Sama No.020/RLBPM/V/2022 pada tanggal 20 Juni 2022 Bank dan Allianz mulai memberlakukan skema produk asuransi yang baru untuk Kredit Pensiun.

Dengan mulai berlakunya produk asuransi Kredit Pensiun ini pemberian referensi produk asuransi Kredit Pensiun yang lama sudah tidak dilakukan lagi sejak tanggal 1 Juli 2022, namun masih digunakan untuk perlindungan debitur yang sudah ada sebelum 1 Juli 2022.

PT Avrist Assurance

Pada tanggal 23 Juni 2011 Bank melakukan perjanjian dengan PT Avrist Assurance ("Avrist"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 17 September 2015, Bank dan Avrist sepakat untuk memperluas kerja sama untuk Kredit Pegawai Aktif dan kerja sama tersebut ditegaskan terakhir pada 17 September 2019.

Sesuai Perjanjian Kerja Sama No.017/RLBPM/III/2023 dan No.018/RLBPM/III/2023 pada tanggal 1 Februari 2023 Bank dan Avrist mulai memberlakukan skema produk Asuransi yang baru untuk Kredit Pensiun.

Dengan mulai berlakunya produk asuransi Kredit Pensiun ini pemberian referensi produk asuransi Kredit Pensiun yang lama sudah tidak dilakukan lagi sejak tanggal 1 Februari 2023, namun masih digunakan untuk perlindungan debitur yang sudah ada sebelum 1 Februari 2023.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES *(continued)*

m. Agreements with insurance companies *(continued)*

PT Asuransi Allianz Life Indonesia *(continued)*

On 1 April 2013, the PKS has been amended in the form of Master Agreement (Bancassurance Agreement for Referral Activities) and Sub PKS which were provided for each product of Pension Loan and Employee Loan.

As per Agreement No.020/RLBPM/V/2022 dated 20 June 2022 Bank and Allianz started new scheme insurance product for Pension Loan.

With the implementation of this Pension Loan insurance product, referencing existing Pension Loan insurance product will be discontinued starting from 1 July 2022. Existing Pension Loan insurance still cover the debtors existed before 1 July 2022.

PT Avrist Assurance

On 23 June 2011, the Bank entered an agreement with PT Avrist Assurance ("Avrist"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.

On 17 September 2015, Bank and Avrist agreed to expand the agreement for Active Employee Loan and this agreement was last emphasized on 17 September 2019.

As per Agreement No.017/RLBPM/III/2023 and No.018/RLBPM/III/2023 dated 1 February 2023 Bank and Avrist started new scheme insurance product for Pension Loan..

With the implementation of this Pension Loan insurance product, referencing existing Pension Loan insurance product will be discontinued starting from 1 February 2023. Existing Pension Loan insurance still cover the debtors existed before 1 February 2023.

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

m. Perjanjian dengan perusahaan asuransi (lanjutan)

PT Heksa Solution Insurance

Pada tanggal 22 Juni 2023, Bank melakukan perjanjian dengan PT Heksa Solution Insurance ("Heksa") sesuai Perjanjian Kerja Sama No.037/RLBSA/VI/2023, pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan dan kredit pegawai. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai salah satu pihak menghendaki sebaliknya atau dikehendaki sesuai ketentuan yang belaku.

PT Asuransi Jiwa Generali

Pada tanggal 22 Juni 2011, Bank melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 9 Oktober 2015, Bank juga melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kredit dari pinjaman pegawai aktif.

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima tahun dan kemudian secara otomatis akan diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya atau dapat dihentikan lebih awal sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama ini diperpanjang secara otomatis pada tanggal 9 Oktober 2021 untuk 5 tahun berikutnya sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025.

PT Proteksi Antar Nusa

Pada tanggal 1 Maret 2017, Bank melakukan perjanjian dengan PT Proteksi Antar Nusa ("PAN"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan. Perjanjian Kerjasama ini telah diperpanjang pada tanggal 17 Mei 2021 selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES *(continued)*

m. Agreements with insurance companies *(continued)*

PT Heksa Solution Insurance

On 22 June 2023, the Bank entered an agreement with PT Heksa Solution Insurance ("Heksa") as per agreement No.037/RLBSA/VI/2023, a non-related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension loan and employee loan. The agreement is effective untill either party wishes otherwise or required by the regulation.

PT Asuransi Jiwa Generali

On 22 June 2011, the Bank entered into an agreement with PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension loans. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.

On 9 October 2015, the Bank also entered into an agreement with PT Asuransi Jiwa Generali ("Generali"), a third party, to cover the Bank from the credit risk of active employee loans.

The agreement is effective for five years and will be automatically extended for the next five years or may be terminated earlier as agreed by both parties. The agreement was automatically extended on 9 October 2021 for the next 5 years until 9 October 2025.

PT Proteksi Antar Nusa

On 1 March 2017, the Bank entered an agreement with PT Proteksi Antar Nusa ("PAN"), a third party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan. The agreement has been extended on 17 May 2021 for another three years and can be extended as mutually agreed by both parties.

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

m. Perjanjian dengan perusahaan asuransi (lanjutan)

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

Pada tanggal 12 Januari 2022, Bank melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk ("Sinarmas MSIG"), pihak ketiga, untuk melindungi Bank dari risiko kredit dari Kredit Pemilikan Rumah. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh masing-masing pihak. Perjanjian kerja sama ini mulai diimplementasikan pada tanggal 24 Maret 2022.

n. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas OJK adalah sebagai berikut:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES *(continued)*

m. Agreements with insurance companies *(continued)*

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

On 12 January 2022, the Bank entered an agreement with PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk ("Sinarmas MSIG"), a non-related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible mortgage loan. The agreement is effective for three years and can be reviewed whenever necessary by both parties. The agreement was launched at 24 March 2022.

n. Restructured loans and sharia financing/receivables

As of 31 December 2023 and 2022, total restructured loans and sharia financing/ receivables based on OJK grading was as follows:

	31 Desember/*December* 2023						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan /*Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Korporasi	167,867	2,526,064	-	-	507,652	3,201,583	*Corporates*
Pensiunan	236	-	-	-	-	236	*Pensioners*
Kredit keperluan rumah tangga	-	2	2	3	7	14	*Household goods*
Kredit kepemilikan mobil	14	126	-	-	-	140	*Car loans*
Umum	265	54	41	-	1	361	*General purpose*
Usaha kecil menengah	924,482	62,403	16,081	12,210	611,426	1,626,602	*Small medium enterprises*
Usaha mikro kecil	28,747	2,962	737	1,311	855	34,612	*Micro business*
Pembiayaan/ piutang syariah	610,501	39,794	15,809	5,674	18,005	689,783	*Sharia financing/ receivables*
	1,732,112	2,631,405	32,670	19,198	1,137,946	5,553,331	

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

n. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas OJK adalah sebagai berikut: (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES *(continued)*

n. Restructured loans and sharia financing/receivables *(continued)*

As of 31 December 2023 and 2022, total restructured loans and sharia financing/ receivables based on OJK grading was as follows: (continued)

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Korporasi	3,853,177	648,050	-	-	515,461	5,016,688	*Corporates*
Pensiunan	257	-	-	-	-	257	*Pensioners*
Kredit keperluan rumah tangga	290	44	42	40	9	425	*Household goods*
Kredit kepemilikan mobil	723	138	15	78	-	954	*Car loans*
Umum	23,103	36	8	18	171,188	194,353	*General purpose*
Usaha kecil menengah	1,372,194	36,798	205,380	28,184	469,658	2,112,214	*Small medium enterprises*
Usaha mikro kecil	77,307	10,076	625	771	670	89,449	*Micro business*
Pembiayaan/ piutang syariah	1,049,108	190,762	116,849	11,960	76,427	1,445,106	*Sharia financing/ receivables*
	6,376,159	885,904	322,919	41,051	1,233,413	8,859,446	

Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020, sejumlah pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah telah direstrukturisasi berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/ 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020, yang dilanjutkan di periode pasca-pandemi sesuai dengan POJK No. 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana yang berlaku serta KDK No. 34/KDK 03/2022 mengenai Penetapan Daerah dan/atau Sektor Ekonomi yang Terdampak Bencana yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank (sektor ekonomi dan daerah tersebut adalah sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau daerah Provinsi Bali).

As the impacts of the COVID-19 pandemic which has been spread to Indonesia since March 2020, certain amount of loans and sharia financing/receivables have been restructured based on OJK Regulation No. 11/POJK.03/ 2020 dated 16 March 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impacts of the Spread of Coronavirus Disease 2019 and OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 dated 1 December 2020 concerning Amendments to OJK Regulation No.11/POJK.03/2020 and OJK Regulation No. 17/POJK.03/2021 concerning the Second Amendment to OJK Regulation No.11/POJK.03/2020, continued to the post-pandemic period in accordance to OJK Regulation No. 19/2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Specific Regions and Sectors in Indonesia Impacted by a Disaster and OJK Board of Commissioners Decree No. 34/KDK 03/2022 concerning Stipulation of Region and/or Sector Which Require Special Treatment regarding Bank Financing (the sectors and/or regions include accommodation and food and drink provision sector, the textile and textile products and footwear sectors, the micro, small and medium enterprises Segment, and/or Bali Province).

12. BEBAN DIBAYAR DIMUKA / *12. PREPAYMENTS*

	31 Desember/ *December* 2023	2022	
Asuransi kredit	959,005	1,247,475	*Loans insurance*
Pemeliharaan dan pembaharuan TI	107,022	119,918	*IT maintenance and renewal*
Promosi	43,279	37,341	*Promotion*
Beban lisensi dibayar dimuka	30,923	35,880	*Prepaid license fee*
Sewa bangunan	11,531	12,003	*Building rental*
Tunjangan perumahan	7,333	5,856	*Housing allowance*
Lainnya	24,974	6,669	*Others*
	1,184,067	1,465,142	

Beban dibayar dimuka lainnya termasuk beban dibayar dimuka untuk asuransi jiwa, asuransi uang tunai dan asuransi gedung.

Other prepayments primarily includes prepayments for life insurance, cash insurance and building insurance.

13. PERPAJAKAN / *13. TAXATION*

a. Klaim pengembalian pajak / *a. Claims for tax refund*

	31 Desember/ *December* 2023	2022	
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan - 2022	31,804	31,804	*Corporate income tax overpayment - 2022*
Pengembalian pajak - 2002	16,972	-	*Refundable tax - 2002*
Klaim pengembalian pajak - 2016	10,358	10,358	*Claim for tax refund - 2016*
Klaim pengembalian pajak - 2017	8,008	8,008	*Claim for tax refund - 2017*
Pajak lainnya	195	187	*Other taxes*
	67,337	50,357	

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember/ *December* 2023	2022	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Bank			*Bank*
- Pasal 25	13,861	-	*Article 25 -*
- Pasal 29	59,168	-	*Article 29 -*
Entitas anak			*Subsidiary*
- Pasal 25	29,385	34,044	*Article 25 -*
- Pasal 29	5,466	10,298	*Article 29 -*
	107,880	44,342	
Pajak lainnya:			*Other taxes:*
Bank			*Bank*
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	83,080	72,976	*Article 23, 26 and 4(2) -*
- Pasal 21	27,421	35,679	*Article 21 -*
- Pajak pertambahan nilai	3,487	5,328	*Value added tax -*
Entitas anak			*Subsidiary*
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	9,183	7,061	*Article 23, 26 and 4(2) -*
- Pasal 21	6,832	7,761	*Article 21 -*
- Pajak pertambahan nilai	35	129	*Value added tax -*
	130,038	128,934	
	237,918	173,276	

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expense*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
- Kini			*Current -*
Bank	515,697	503,801	*Bank*
Entitas anak	411,468	510,165	*Subsidiary*
- Penyesuaian terhadap beban pajak tahun-tahun sebelumnya			*Adjustment to prior years' tax - expense*
Bank	18,304	634	*Bank*
- Tangguhan – Pembentukan perbedaan temporer			*Deferred – Origination of temporary - differences*
Bank	(58,109)	20,506	*Bank*
Entitas anak	(112,162)	(7,351)	*Subsidiary*
Jumlah beban pajak penghasilan	775,198	1,027,755	*Total income tax expenses*

Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan dikali tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated accounting profit before income tax multiplied by the prevailing tax rate and consolidated income tax expense was:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	3,457,682	4,657,319	*Consolidated accounting profit before income tax*
Ditambah:			*Add:*
Pendapatan dividen dari Entitas Anak	498,815	332,992	*Dividend income from Subsidiary*
	3,956,497	4,990,311	
Tarif pajak	22%	22%	*Tax rate*
Pajak dihitung dengan tarif pajak	870,430	1,097,868	*Tax calculated at tax rate*
Perbedaan permanen dengan tarif pajak			*Permanent differences at tax rate:*
- Bank	(109,265)	(71,434)	*Bank -*
- Entitas anak	(4,271)	687	*Subsidiary -*
Penyesuaian terhadap beban pajak tahun-tahun sebelumnya	18,304	634	*Adjustments to prior year's tax expense*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	775,198	1,027,755	*Consolidated income tax expense*

Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan penghasilan kena pajak Bank adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated accounting profit before income tax and taxable income of the Bank was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Laba akuntansi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	3,457,682	4,657,319	*Consolidated accounting profit before income tax*
Ditambah (dikurangi):			*Add (less):*
Pendapatan dividen dari Entitas Anak	498,815	332,992	*Dividend income from Subsidiary*
Laba Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	(1,379,894)	(2,282,394)	*Subsidiary's profit before income tax*
Laba akuntansi sebelum pajak penghasilan (Bank saja)	2,576,603	2,707,917	*Accounting profit before income tax (Bank only)*
Perbedaan temporer:			***Temporary differences:***
Penyisihan kerugian aset produktif - pinjaman yang diberikan	382,098	(419,667)	*Allowance for impairment losses on earning assets - loans*
Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan	(14,003)	308,911	*Modification of loans contractual cash flows*
Beban penyusutan	(110,481)	47,640	*Depreciation expenses*
Bonus direksi	6,426	(9,307)	*Bonus for directors*
Beban atas imbalan pascakerja	(10,404)	(40,592)	*Post-employment benefit expenses*
Akrual, bonus, tantiem dan imbalan jangka panjang lainnya	10,496	19,804	*Accruals, bonus, tantiem and other long-term - employee benefits*
Jumlah perbedaan temporer	264,132	(93,211)	*Total temporary differences*
Perbedaan permanen:			***Permanent differences:***
Beban/(penghasilan) yang tidak dapat dikurangkan/dikenakan - pajak - bersih	(496,659)	(324,700)	*Non-deductible/(non-taxable) expenses/incomes - net*
Penghasilan kena pajak Bank	2,344,076	2,290,006	*Taxable income of the Bank*

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perhitungan beban pajak kini dan kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

***13. TAXATION** (continued)*

d. The computation of current tax expense and corporate income tax underpayment was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Penghasilan kena pajak:			*Taxable income:*
Bank	2,344,076	2,290,006	*Bank*
Entitas Anak	1,870,310	2,318,931	*Subsidiary*
	4,214,386	4,608,937	
Beban pajak kini:			*Current tax expense:*
Bank	515,697	503,801	*Bank*
Entitas Anak	411,468	510,165	*Subsidiary*
	927,165	1,013,966	
Dikurangi:			*Less:*
Pajak dibayar dimuka pasal 25:			*Prepaid taxes article 25:*
Bank	(456,529)	(535,605)	*Bank*
Entitas Anak	(406,002)	(499,867)	*Subsidiary*
	(862,531)	(1,035,472)	
(Kelebihan) kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan pasal (28) 29:			*Corporate income tax (over) under payment article (28) 29:*
Bank	59,168	(31,804)	*Bank*
Entitas anak	5,466	10,298	*Subsidiary*
	64,634	(21,506)	

e. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Grup menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah (pelaporan pajak penghasilan konsolidasian tidak diperbolehkan) berdasarkan sistem *self-assessment.* Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

***e.** Under the taxation laws of Indonesia, the Group calculates and submits individual company tax returns (submission of consolidated income tax computation is not allowed) on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.*

Manajemen mempertahankan posisi perpajakan Grup yang diyakini berdasarkan pada teknik dasar yang kuat, sesuai dengan peraturan perpajakan dan upaya manajemen dalam mengantisipasi kemungkinan risiko timbulnya pajak di masa depan.

Management vigorously defends the Group's tax positions which are believed to be grounded on sound technical basis, in compliance with the tax regulations and management's efforts to anticipate possible future tax exposure.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi.

The above calculation of income tax for the period ended 31 December 2023 was a preliminary estimate made for accounting purposes.

Laba kena pajak yang diperoleh dari laba sebelum pajak secara komersial setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku akan menjadi dasar dalam perhitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Bank dan Entitas Anak.

Taxable income which was obtained from commercial profit before tax after fiscal correction in accordance with applicable tax regulation will be the basis for calculating and preparing the Bank's and Subsidiaries' Annual Corporate Income Tax Returns (SPT).

Bank masih menunggu peraturan implementasi pajak mengenai penghitungan pajak terkait biaya cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini dibuat belum dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Perubahan signifikan atas penghitungan pajak penghasilan badan mungkin akan terjadi jika peraturan implementasi baru mengatur lain dibandingkan dengan peraturan yang saat ini berlaku.

The Bank is still awaiting for the tax implementing regulation regarding allowance for impairment losses of loans that has not yet been issued by the Indonesian Government until the date of the issuance of this consolidated financial statements. Significant changes may affect the corporate income tax calculation if the new implementing regulation regulates differently as compared with the prevailing tax regulation.

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perhitungan perpajakan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sesuai dengan SPT tahunan Bank.

Pada bulan Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengubah pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, sehingga tarif pajak 22% berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

Bank

***13. TAXATION** (continued)*

***e.** Tax calculation for the year ended 31 December 2022 is in accordance with Bank's annual tax return (SPT).*

In October 2021, Law No. 7 of 2021 amended the provision of Law No. 2 of 2020, in that the statutory tax rate of 22% applies for fiscal year 2022 and onwards.

f. Deferred tax assets (liabilities)

Details of deferred tax assets (liabilities) of the Group was as follows:

Bank

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (Charged) to profit or loss***	**Dikreditkan (Dibebankan) ke ekuitas/ *Credited (Charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan	183,836	84,062	-	267,898	*Allowance for impairment losses on loans*
Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan	67,960	(3,080)	-	64,880	*Modification of loans contractual cash flows*
Imbalan kerja jangka pendek	62,480	8,567	-	71,047	*Short-term employee benefits*
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang	9,522	(1,490)	20,146	28,178	*Post-employment benefits and other long-term employee benefits*
(Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,187	-	(2,977)	(790)	*Unrealized (gains) losses on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Aset tetap (termasuk aset hak guna) [(a)]	(30,265)	(29,683)	-	(59,948)	*Fixed assets (including right-of-use assets) [(a)]*
Liabilitas sewa [(a)]	78,791	(12,748)	-	66,043	*Lease liabilities [(a)]*
Lain-lain	9,896	(5,644)	-	4,252	*Others*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan – bersih	384,407	39,984	17,169	441,560	*Deferred tax assets (liabilities)- net*

(a): Bank menetapkan pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal (Amandemen PSAK 46) mulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan menyajikan kembali komparasi 31 Desember 2022. Setelah amandemen tersebut, Bank mengakui aset pajak tangguhan tersendiri sehubungan dengan liabilitas sewa dan kewajiban pajak tangguhan sehubungan dengan aset hak guna nya.

(a): The Bank applied deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction (Amendments to PSAK 46) starting from 1 January 2023 and restate the comparative as of 31 December 2022. Following the amendment, the Bank has recognized a separate deferred tax asset in relation to its lease liabilities and a deferred tax liability in relation to its right-of-use assets.

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATION (continued)*

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan) / *f. Deferred tax assets (liabilities) (continued)*

Bank (lanjutan) / ***Bank** (continued)*

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/ *Year ended 31 December 2022*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (Charged) to profit or loss***	**Dikreditkan (Dibebankan) ke ekuitas/ *Credited (Charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan	276,162	(92,326)	-	183,836	*Allowance for impairment losses on loans*
Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan	-	67,960	-	67,960	*Modification of loans contractual cash flows*
Imbalan kerja jangka pendek	63,208	(728)	-	62,480	*Short-term employee benefits*
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang	9,033	(8,993)	9,482	9,522	*Post-employment benefits and other long-term employee benefits*
(Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(33,226)	-	35,413	2,187	*Unrealized (gains) losses on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Aset tetap (termasuk aset hak guna) [(a)]	(59,414)	29,149	-	(30,265)	*Fixed assets (including right-of-use assets) [(a)]*
Liabilitas sewa [(a)]	92,464	(13,673)	-	78,791	*Lease liabilities [(a)]*
Lain-lain	11,791	(1,895)	-	9,896	*Others*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan – bersih	360,018	(20,506)	44,895	384,407	*Deferred tax assets (liabilities)- net*

(a): Bank menetapkan pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari satu transaksi (Amandemen PSAK 46) mulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan menyajikan kembali komparasi 31 Desember 2022. Setelah amandemen tersebut, Bank mengakui aset pajak tangguhan tersendiri sehubungan dengan liabilitas sewa dan kewajiban pajak tangguhan sehubungan dengan aset hak guna nya.

(a): The Bank applied deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction (Amendments to PSAK 46) starting from 1 January 2023 and restate the comparative as of 31 December 2022. Following the amendment, the Bank has recognized a separate deferred tax asset in relation to its lease liabilities and a deferred tax liability in relation to its right-of-use assets.

Entitas Anak / ***Subsidiary***

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (Charged) to profit or loss***	**Dikreditkan (Dibebankan) ke ekuitas/ *Credited (Charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Imbalan kerja jangka pendek	35,579	4,955	-	40,534	*Short-term employee benefits*
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	2,057	7,007	58	9,122	*Post-employment benefits and other long-term employee benefits*
Aset tetap	(586)	(2,430)	-	(3,016)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	112,696	105,324	-	218,020	*Allowance for impairment losses on murabahah receivables*
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek-efek	(18)	-	(22)	(40)	*Unrealized gains from securities*
Keuntungan yang belum direalisasi dari investasi pada efek ekuitas	(842)	196	-	(646)	*Unrealized gain from investment in equity securities*
Lainnya	11,736	(2,118)	-	9,618	*Others*
Aset pajak tangguhan - bersih	160,622	112,934	36	273,592	*Deferred tax assets - net*

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

***13. TAXATION** (continued)*

***f. Deferred tax assets (liabilities)** (continued)*

***Subsidiary** (continued)*

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/ *Year ended 31 December 2022*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (Charged) to profit or loss***	**Dikreditkan (Dibebankan) ke ekuitas/ *Credited (Charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Imbalan kerja jangka pendek	30,098	5,481	-	35,579	*Short-term employee benefits*
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	7,738	(4,385)	(1,296)	2,057	*Post-employment benefits and other long-term employee benefits*
Aset tetap	2,590	(3,176)	-	(586)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	98,386	14,310	-	112,696	*Allowance for impairment losses on murabahah receivables*
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek-efek	(25)	-	7	(18)	*Unrealized gains from securities*
Keuntungan yang belum direalisasi dari investasi pada efek ekuitas	-	(842)	-	(842)	*Unrealized gain from investment in equity securities*
Lainnya	15,773	(4,037)		11,736	*Others*
Aset pajak tangguhan - bersih	154,560	7,351	(1,289)	160,622	*Deferred tax assets - net*

g. Surat ketetapan pajak

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), SMBCI memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut:

Tahun pajak 2002

Pada bulan Februari 2011, SMBCI mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Pajak untuk memperoleh kompensasi bunga terkait pemeriksaan pajak tahun 2002 yang dimenangkan oleh SMBCI. Pada tanggal 22 September 2011, SMBCI memenangkan gugatan ke Pengadilan Pajak tersebut.

Pada bulan Januari 2012, DJP mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan dari Pengadilan Pajak atas imbalan bunga tersebut.

Sehubungan dengan proses tersebut, pada tanggal 31 Mei 2023 Majelis Mahkamah Agung mengumumkan keputusan menolak Peninjauan Kembali dari DJP. Pada tanggal 12 Juli 2023, Bank telah menerima putusan formal Mahkamah Agung tersebut. Atas putusan ini, pada tanggal 13 November 2023, Bank mengajukan surat permohonan pengembalian imbalan bunga ke kantor pajak.

g. Tax assessment letters

Before the merger (Note 1.b), SMBCI had the following tax assessments:

Fiscal year 2002

In February 2011, SMBCI filed an appeal to the Tax Court to get interest compensation related with 2002 tax assessment which was won by SMBCI. On 22 September 2011, SMBCI won its appeal to the Tax Court.

In January 2012, DGT filed a judicial review to the Supreme Court to revoke the decision of the Tax Court for interest compensation.

In relation to this process, on 31 May 2023, the Assembly of the Supreme Court has announced the decision to reject the DGT Judicial Review. On 12 July 2023, the Bank has received the written formal Supreme Court decision letter. Upon the issuance of the decision, on 13 November 2023, the Bank submitted request letter for interest compensation to tax office.

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), SMBCI memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut: (lanjutan)

Tahun pajak 2002 (lanjutan)

Pada tanggal 11 Desember 2023, Bank menerima surat dari kantor pajak tentang pemberian imbalan bunga sebesar Rp 16.972 yang telah diakui dalam klaim pengembalian pajak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Bank belum menerima imbalan bunga tersebut dari kantor pajak.

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 4 Februari 2021, Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2017. Pada tanggal 9 Agustus 2022, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk seluruh jenis pajak dengan jumlah sebesar Rp 8.074, dan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp 1,5. Atas SKPKB tersebut Bank telah melakukan pembayaran seluruhnya pada tanggal 7 September 2022. Bank telah mengajukan permohonan surat keberatan pajak pada tanggal 7 November 2022 dengan jumlah Rp 8.008.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, DJP telah mengeluarkan surat keputusan penolakan keberatan. Pada tanggal 29 November 2023 Bank mengajukan surat banding atas keputusan keberatan tersebut ke pengadilan pajak. Sampai saat ini proses banding tersebut masih berlangsung.

Tahun pajak 2018

Pada tanggal 5 Oktober 2022, Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2018.

Pada tanggal 28 Juli 2023, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk seluruh jenis pajak meliputi PPh Badan, Pajak pemotongan dan PPN sebesar Rp 365. Bank tidak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut.

Dengan di SKPKB tersebut, maka proses pemeriksaan pajak telah selesai.

***13. TAXATION** (continued)*

***g. Tax assessment letters** (continued)*

***Before the merger (Note 1.b), SMBCI had the following tax assessments:** (continued)*

Fiscal year 2002 (continued)

On 11 December 2023, the Bank received letter from tax office concerning the interest compensation provision amounting to Rp 16,972 which has been recognised in claims for tax refund. As of 31 December 2023, the Bank has not received the interest compensation from tax office.

Fiscal year 2017

On 4 February 2021, the Bank received tax audit notice for fiscal year 2017. On 9 August 2022, the Directorate General of Taxes issued Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) amounting to Rp 8,074 along with Tax Collection Letter (STP) amounting to Rp 1.5. The Bank has paid the amount on 7 September 2022. The Bank has submitted tax objection letter on 7 November 2022 amounting to Rp 8,008.

On 31 August 2023, DJP has issued objection decision letter which rejected Bank's objection. On 29 November 2023, the Bank has submitted appeal letter against such decsion letter to the tax court. Until now the appeal process is still on going.

Fiscal year 2018

On 5 October 2022, the Bank received tax audit notice for fiscal year 2018.

On 28 July 2023, the Bank received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for all taxes which include corporate income tax, withholding tax and value added tax amounting to Rp 365. Bank will not go for the objections againts the SKPKB.

With the issuance of the SKPKB, the tax audit has been completed.

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Sebelum penggabungan usaha (Catatan 1.b), BTPN memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut:

Tahun pajak 2016

Pada tanggal 28 Januari 2021, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 13.155. Pada tanggal 26 April 2021, Bank mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut kepada DJP.

Pada tanggal 10 Maret 2022, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan 2 (dua) putusan sehubungan dengan keberatan atas SKPKB yang diajukan sebelumnya, adapun hasil keputusan mengabulkan sebagian keberatan sehingga pajak yang terhutang yang sebelumnya Rp 13.155 menjadi Rp 10.358, atas keputusan ini, Bank mengajukan proses banding pada pengadilan pajak yang telah disampaikan pada tanggal 8 Juni 2022. Sampai saat ini, Bank belum menerima putusan dari pengadilan pajak.

Tahun pajak 2017

Pada tanggal 29 April 2019, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp 48.017 dari total lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp 53.308. Atas selisih sebesar Rp 5.237, Bank mengajukan keberatan dengan surat pengajuan tertanggal 23 Juli 2019.

Pada bulan Juni 2020, Bank menerima surat keputusan keberatan dari DJP yang menerima sebagian permintaan keberatan Bank. Pada tanggal 11 September 2020, Bank telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak untuk PPh Badan dan pajak lainnya masing-masing sebesar Rp 5.017 dan Rp 5.822.

Pada tanggal 25 Agustus 2022, Bank menerima putusan dari Pengadilan Pajak dengan total putusan yang dikabulkan sebesar Rp 4.554 untuk PPh Badan dan Rp 419 untuk PPN. Atas putusan tersebut, Bank sudah menerima pengembalian atas sebagian besar pajak yang disetujui pada tanggal 25 September 2022. Atas jumlah yang telah ditolak sebesar Rp 5.874, Bank telah membebankan dalam biaya tahun 2022. Baik Bank atau DJP tidak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, kasus pajak untuk Tahun Pajak 2017 telah selesai.

***13. TAXATION** (continued)*

***g. Tax assessments letters** (continued)*

Before the merger (Note 1.b), BTPN had the following tax assessments:

Fiscal year 2016

On 28 January 2021, DGT issued an underpayment tax assessment (SKPKB) amounting to Rp 13,155. On 26 April 2021, the Bank submited an objection letter on the SKPKB to the DGT.

On 10 March 2022, the Directorate General of Taxes has issued 2 (two) decision regarding tax objection of tax assessment letter (SKPKB) which the Bank has applied, the result of the decision grants part of the objection therefore the amount of tax payable is reduced from Rp 13,155 to Rp 10,358, with regards to the objection decision, the Bank has applied for appeal process in tax court on 8 June 2022. Until now, the Bank has not yet received the decision from tax court.

Fiscal year 2017

On 29 April 2019, the Bank received Tax Overpayment Letter ("SKPLB") amounting to Rp 48,017 from the total overpayment in annual tax return amounting to Rp 53,308. The Bank filed an objection letter on 23 July 2019 for the difference of Rp 5,237.

In June 2020, the Bank received an objection decision letter from DGT which partially accepted the Bank's objection request. On 11 September 2020, the Bank submitted a request to the tax court for appeal of income tax and other taxes amounting to Rp 5,017 and Rp 5,822, respectively.

On 25 August 2022, the Bank has received Tax Court Decision with total amoutn granted of Rp 4,554 for corporate income tax and Rp 419 for VAT. The Bank has received most of the agreed refund amount on 25 September 2022. For the rejected amount of Rp 5,874, Bank has booked as expense in 2022. Both of Bank and DGT did not submit further appeal to Supreme Court. Therefore, the tax litigation for Fiscal Year 2017 are considered completed.

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Setelah penggabungan usaha (Catatan 1.b), BTPN memiliki surat ketetapan pajak sebagai berikut:

Tahun pajak 2019

Pada tanggal 14 April 2021, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp 178.984 dari total lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 sebesar Rp 197.290. Pada tanggal 2 Juni 2021, Bank telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 178.019 setelah dikurangi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diperhitungkan sebesar Rp 965.

Pada tanggal 12 Juli 2021, Bank menyampaikan surat keberatan kepada DJP atas sebagian jumlah dalam Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 9.345. Jumlah pajak yang tidak diajukan keberatan sebesar Rp 9.926, dibebankan ke dalam laba-rugi Bank. Pada tanggal 30 Juni 2022, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan, adapun hasilnya adalah DJP menerima Keberatan Bank senilai Rp 9.345, atas nilai tersebut Bank sudah mengajukan pengembalian kelebihan bayar kepada DJP. Bank telah menerima pengembalian kelebihan bayar dari DJP, maka per 31 Desember 2022 kasus pajak untuk tahun pajak 2019 telah selesai.

Tahun Pajak 2022

Pada tanggal 18 Juli 2023, Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2022. Sampai saat ini, pemeriksaan masih sedang berlangsung.

***13. TAXATION** (continued)*

***g. Tax assessments letters** (continued)*

After the merger (Note 1.b), BTPN had the following tax assessments:

Fiscal year 2019

On 14 April 2021, the Bank received Tax Overpayment Letter ("SKPLB") amounting to Rp 178,984 from the total overpayment in annual tax return amounting to Rp 197,290. On 2 June 2021, the Bank received the tax overpayment amounting to Rp 178,019 after being deducted with the underpayment tax assessment (SKPKB) amounting to Rp 965.

On 12 July 2021, the Bank submitted an Objection Letter partial to the amount of the Tax Assessment Letter to DGT amounting to Rp 9,345. The remaining tax which was not objected amounting to Rp 9,926 was charged to the Bank's profit or loss. On 30 June 2022, DGT has issued Objection Decision in favour of the Bank with an amount of Rp 9,345, the Bank has requested a refund for the amount mentioned to DGT. The Bank has received the overpayment refund from the DGT, then as of 31 December 2022 the tax case for fiscal year 2019 has been completed.

Fiscal Year 2022

On 18 July 2023, the Bank received tax audit notification letter for fiscal year 2022. Until now, the tax audit process is still on going.

14. ASET TETAP / *14. FIXED ASSETS*

Aset tetap terdiri dari: / *Fixed assets consist of the following:*

Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Model revaluasi							***Revaluation model***
Kepemilikan langsung							***Direct ownership***
Tanah	981,703	-	(20,278)	-	79,772	1,041,197	*Land*
Model biaya							***Cost model***
Kepemilikan langsung							***Direct ownership***
Gedung	425,296	526	(10,599)	3,678	-	418,901	*Buildings*
Kendaraan bermotor	216,400	58,421	(20,515)	-	-	254,306	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	1,489,714	45,350	(143,278)	84,562	-	1,476,348	*Office equipments*
Leasehold improvement	646,603	20,582	(86,560)	9,289	-	589,914	*Leasehold improvement*
Aset dalam pembangunan	56,150	90,969	(8,536)	(94,708)	-	43,875	*Construction in progress*
	2,834,163	215,848	(269,488)	2,821	-	2,783,344	
Aset hak guna	1,293,316	157,827	(235,434)	-	-	1,215,709	*Right-of-use assets*
	5,109,182	373,675	(525,200)	2,821	79,772	5,040,250	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Gedung	(276,916)	(19,095)	8,696	-	-	(287,315)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(148,497)	(38,180)	19,368	-	-	(167,309)	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	(1,220,918)	(140,535)	142,376	2,591	-	(1,216,486)	*Office equipments*
Leasehold improvement	(579,699)	(40,441)	77,071	-	-	(543,069)	*Leasehold improvement*
	(2,226,030)	(238,251)	247,511	2,591	-	(2,214,179)	
Aset hak guna	(764,647)	(211,586)	197,974	-	-	(778,259)	*Right-of-use assets*
	(2,990,677)	(449,837)	445,485	2,591	-	(2,992,438)	
Nilai buku bersih	2,118,505					2,047,812	*Net book value*

Tahun berakhir 31 Desember 2022/ *Year ended 31 December 2022*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Model revaluasi						***Revaluation model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	981,703	-	-	-	981,703	*Land*
Model biaya						***Cost model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Gedung	423,329	732	-	1,235	425,296	*Buildings*
Kendaraan bermotor	209,980	32,867	(26,551)	104	216,400	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	1,432,828	30,850	(73,123)	99,159	1,489,714	*Office equipments*
Leasehold improvement	814,732	9,916	(187,329)	9,284	646,603	*Leasehold improvement*
Aset dalam pembangunan	42,527	119,329	(4,294)	(101,412)	56,150	*Construction in progress*
	2,923,396	193,694	(291,297)	8,370	2,834,163	
Aset hak guna	1,247,902	164,257	(118,843)	-	1,293,316	*Right-of-use assets*
	5,153,001	357,951	(410,140)	8,370	5,109,182	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Gedung	(250,502)	(26,414)	-	-	(276,916)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(133,825)	(39,564)	24,892	-	(148,497)	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	(1,145,047)	(147,033)	71,162	-	(1,220,918)	*Office equipments*
Leasehold improvement	(722,065)	(44,946)	187,312	-	(579,699)	*Leasehold improvement*
	(2,251,439)	(257,957)	283,366	-	(2,226,030)	
Aset hak guna	(657,772)	(225,718)	118,843	-	(764,647)	*Right-of-use assets*
	(2,909,211)	(483,675)	402,209	-	(2,990,677)	
Nilai buku bersih	2,243,790				2,118,505	*Net book value*

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS (continued)*

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Detail of the gain on sale of fixed assets was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Hasil atas penjualan aset tetap	5,877	5,569	*Proceeds from sale of fixed assets*
Nilai buku bersih	(1,233)	(1,959)	*Net book value*
Keuntungan penjualan aset tetap	4,644	3,610	*Gains on sale of fixed assets*

Aset hak-guna meliputi transaksi sewa yang dilakukan Bank dimana Bank menyewa bangunan untuk ruang kantor. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk periode 3 - 10 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa dengan tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir. Bank juga menyewa kendaraan dan peralatan dengan periode kontrak 2 - 5 tahun, apartemen dan rumah dinas dengan periode kontrak 2 tahun, dan peralatan IT dan mesin dengan periode kontrak 3 - 5 tahun.

The right-of-use assets include the Bank's lease transactions whereby the Bank leases buildings for its office. The leases of office space typically run for a period of 3 - 10 years. Some leases include an option to renew the lease for an additional period of the same duration after the end of the contract term. The Bank also leases vehicles and equipment with contract terms of 2 - 5 years, apartments, and employee residences with contract terms of 2 years and IT equipment and machinery with contract terms of 3 - 5 years.

Aset hak-guna juga meliputi transaksi sewa yang dilakukan Entitas Anak dimana Entitas Anak menyewa bangunan untuk ruang kantor. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk periode 3 - 10 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa dengan tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir. Entitas Anak juga menyewa kendaraan dan peralatan dengan periode kontrak 3 - 5 tahun dan peralatan IT dan mesin dengan periode kontrak 3 - 5 tahun.

The right-of-use assets also include the Subsidiary's lease transactions whereby the Subsidiary leases buildings for its office. The leases of office space typically run for a period of 3 - 10 years. Some leases include an option to renew the lease for an additional period of the same duration after the end of the contract term. The Subsidiary also leases vehicles and equipment with contract terms of 3 - 5 years and IT equipment and machinery with contract terms of 3 - 5 years.

Aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 43.875 dan Rp 56.150 merupakan gedung yang disewa dari pihak ketiga dan masih dalam tahap renovasi dan perlengkapan kantor yang masih dalam tahap konstruksi. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2023 dengan persentase penyelesaian adalah antara 45% - 55% pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: 4% - 96%).

Assets under construction as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 43,875 and Rp 56,150, respectively, related to buildings that were rented from third parties but was still in the renovation progress and office equipments that were still under construction. Those constructions are estimated to be completed in 2023 with current percentages of completion between 45% - 55% as of 31 December 2023 (31 December 2022: 4% - 96%).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga (disajikan sebesar nilai pertanggungan):

As of 31 December 2023 and 2022, fixed assets, except for land, have been insured by the third party insurance companies (presented at sum insured):

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
PT Asuransi MSIG Indonesia	1,091,423	1,067,112	*PT Asuransi MSIG Indonesia*
PT Zurich General Takaful Indonesia (sebelumnya PT Asuransi Adira Dinamika Syariah)	178,786	153,391	*PT Zurich General Takaful Indonesia (before PT Asuransi Adira Dinamika Syariah)*
Jumlah	1,270,209	1,220,503	*Total*

Nilai buku untuk aset yang diasuransikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 767.559 dan Rp 933.949.

The book value of the assets insured as of 31 December 2023 and 2022 is Rp 767,559 and Rp 933,949.

Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

The Group believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the fixed assets.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak diperlukan perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

Penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 238.251 dan Rp 257.957 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 33).

Penyusutan aset hak guna untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 211.586 dan Rp 225.718 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 33).

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Grup adalah sebesar Rp 1.414.538 (31 Desember 2022: Rp 1.248.960).

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan dan semua aset tetap tidak dibatasi kepemilikannya.

Revaluasi tanah

Penilaian atas tanah terakhir dilakukan untuk periode berakhir 30 September 2023 oleh KJPP Susan Widjojo dan Rekan, penilai properti independen eksternal yang telah terdaftar di OJK, yang memenuhi kualifikasi profesional dan berpengalaman di lokasi dan kategori aset yang dinilai, dengan nomor laporan 00341/2.0068-00/PI/07/0525/1/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023.

Penilaian dilakukan berdasarkan POJKRI No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, serta Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII tahun 2018 (KEPI & SPI Edisi VII-2018). Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) Jenis dan hak yang melekat pada properti
b) Karakteristik tanah
c) Kondisi pasar
d) Kondisi ekonomi
e) Letak dan waktu

***14. FIXED ASSETS** (continued)*

As of 31 December 2023 and 2022, the Group performed a review on useful life, depreciation method and residual value of fixed assets and concluded that no change in these method and assumptions was necessary.

The depreciation of fixed assets for the years ended 31 December 2023 and 20221 amounting to Rp 238,251 and Rp 257,957, was charged to general and administrative expenses (Note 33).

The depreciation of right-of-use asset for the years ended 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 211,586 and Rp 225,718, respectively, was charged to general and administrative expenses (Note 33).

As of 31 December 2023, fixed assets that have been fully depreciated but were still in use to support the Group's operational activities amounted to Rp 1,414,538 (31 December 2022: Rp 1,248,960).

The Group's management believes that there was no indication of impairment in the value of fixed assets as of 31 December 2023 and 2022.

As of 31 December 2023 and 2022, there was no fixed asset pledged as collateral and no limitation on the ownership of fixed assets.

Revaluation of land

The valuations of land were last perfomed for period ended 30 September 2023 by KJPP Susan Widjojo dan Rekan, an external independent property appraiser which are registered with OJK, who fulfills the professional qualifications and experience in the location and category of the assets being valued, with report number 00341/2.0068-00/PI/07/0525/1/XII/2023 dated 7 December 2023.

Valuations were performed based on POJKRI No. 28/POJK.04/2021 about Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market, as well as the Indonesian Appraisal Code of Ethics and Indonesian Valuation Standards VII Edition 2018 (KEPI & SPI VII Edition-2018). The valuation method used was market value approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets, among others were as follows:

a) Types and rights attached to the property
b) Land characteristics
c) Market condition
d) Economy condition
e) Location and time

14. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi tanah (lanjutan)

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset non-keuangan:
- *Level* 1: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik.
- *Level* 2: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- *Level* 3: Input yang tidak dapat diobservasi.

Pengukuran nilai wajar diatas dikategorikan sebagai nilai wajar *Level* 2 berdasarkan input-input dalam teknik penilaian yang digunakan.

Selisih penilaian kembali tanah pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat sebagai keuntungan revaluasi aset tetap dan disajikan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 79.772 (31 Desember 2022: nihil).

Jumlah harga perolehan tanah Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 80.254 dan Rp 81.352.

14. FIXED ASSETS (continued)

***Revaluation of land** (continued)*

Fair values are determined using the following hierarchy of input used in the valuation techniques for non-financial assets:
- Level 1: Inputs that are derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets.

- Level 2: Inputs other than quoted market price included in level 1 that are observable either directly or indirectly.
- Level 3: Inputs that are unobservable

The above fair value measurement has been categorized as Level 2 fair value based on the inputs to the valuation technique used.

The differences arising on land of revaluation as of 31 December 2023 were recorded as gain on revaluation of fixed assets and presented in other comprehensive income amounting to Rp 79,772 (31 December 2022: nil).

The acquisition cost of the Group's land as of 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 80,254 and Rp 81,352, respectively.

15. ASET TAKBERWUJUD DAN *GOODWILL*

15. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL

Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan						***Cost***
Piranti lunak	2,799,890	63,154	(31,036)	400,006	3,232,014	*Software*
Pengembangan piranti lunak	376,931	273,921	-	(402,827)	248,025	*Software development*
Goodwill	61,116	-	-	-	61,116	*Goodwill*
	3,237,937	337,075	(31,036)	(2,821)	3,541,155	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	(2,161,199)	(316,310)	28,329	(2,591)	(2,451,771)	*Software*
Nilai buku bersih	1,076,738				1,089,384	*Net book value*

Tahun berakhir 31 Desember 2022/ *Year ended 31 December 2022*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan						***Cost***
Piranti lunak	2,439,241	33,680	-	326,969	2,799,890	*Software*
Pengembangan piranti lunak	346,409	400,160	(34,299)	(335,339)	376,931	*Software development*
Goodwill	61,116	-	-	-	61,116	*Goodwill*
	2,846,766	433,840	(34,299)	(8,370)	3,237,937	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	(1,810,085)	(351,114)	-	-	(2,161,199)	*Software*
Nilai buku bersih	1,036,681				1,076,738	*Net book value*

15. ASET TAKBERWUJUD DAN *GOODWILL* (lanjutan)

Sisa periode amortisasi untuk piranti lunak adalah 1 sampai dengan 8 tahun.

Goodwill merupakan selisih antara nilai perolehan dengan nilai wajar dari aset Entitas Anak yang diakuisisi pada tahun 2014 dimana Bank mengakuisisi 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang PT BANK BTPN SYARIAH Tbk).

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset takberwujud dan *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Amortisasi aset takberwujud untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 316.310 dan Rp 351.114 dan dibebankan sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 33).

15. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL (continued)

The remaining amortization period of software is 1 to 8 years.

Goodwill represents the difference between the cost of acquisition and the fair value of Subsidiary's assets acquired in 2014 where the Bank acquired 70% of PT Bank Sahabat Purba Danarta's shares (now PT BANK BTPN SYARIAH Tbk).

The Group's management believes that there was no impairment in the value of intangible assets and goodwill as of 31 December 2023 and 2022.

The amortization of intangible assets for the years ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 316,310 and Rp 351,114, respectively, and was charged to general and administrative expenses (Note 33).

16. ASET LAIN-LAIN – BERSIH / *16. OTHER ASSETS – NET*

	31 Desember/*December* 2023	31 Desember/*December* 2022	
Term Deposit DHE	250,201	-	*DHE Term Deposit*
Jaminan kontrak	244,939	198,481	*Security deposits*
Transaksi ATM dan transfer	105,978	102,013	*ATM transaction and transfer*
Tagihan kredit lainnya	97,385	68,099	*Other credit receivables*
Agunan yang diambil alih	91,459	11,031	*Foreclosed collaterals*
Wesel ekspor lainnya	35,578	-	*Other export bills*
Tagihan penyelesaian surat berharga	33,286	6,471	*Receivables from sales of securities*
Properti terbengkalai	21,099	-	*Abandoned property*
Uang muka	14,834	114,943	*Advance payment*
Persediaan keperluan kantor	7,176	10,882	*Office supplies*
Tagihan kepada asuransi	7,145	10,134	*Receivables from insurance company*
Lain-lain	87,886	16,258	*Others*
	996,966	538,312	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105,572)	(52,507)	*Less: Allowance for impairment losses*
	891,394	485,805	

Term Deposit DHE adalah instrumen untuk memfasilitasi penempatan Dana Hasil Ekspor (DHE) oleh eksportir di Bank Indonesia, dengan mekanisme *pass on* transaksi bank dengan nasabah (eksportir) kepada Bank Indonesia. Bank mencatat *Term Deposit* DHE tersebut pada akun aset lain-lain dan kewajiban kepada nasabah (eksportir) pada akun liabilitas lain-lain dengan nilai yang sama.

DHE Term Deposit is an instrument to facilitate the placement of Dana Hasil Ekspor *(DHE) by exporters at Bank Indonesia, with a pass-on mechanism for bank transactions with customers (exporters) to Bank Indonesia. The Bank records DHE Term Deposit in the other assets account and liabilities to customers (exporters) in the other liabilities account with same amount.*

Jaminan kontrak merupakan pembayaran atas uang jaminan sewa gedung, sewa IT dan setoran jaminan lembaga *switching* untuk transaksi *real time transfer*.

Security deposits represent security deposits payment on building rent, IT rent and switching agent pre-fund deposits for real time transfer transactions.

Transaksi ATM dan transfer terdiri dari piutang atas transaksi ATM dan transfer antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya.

ATM transaction and transfer consists of receivables from ATM transaction and transfer from other banks that will be settled on the following working day.

Tagihan kredit lainnya terdiri dari tagihan bunga yang masih tertunggak dari debitur sebelum restrukturisasi dan penalti keterlambatan bayar untuk pinjaman yang diberikan.

Other credit receivables consist of overdue interest receivables from debtors prior to restructuring and penalty for late payments of loans.

16. ASET LAIN-LAIN – BERSIH (lanjutan)

Wesel ekspor lainnya adalah tagihan yang timbul dari negosiasi dokumen wesel ekspor dalam transaksi *usance L/C* yang belum diakseptasi.

Tagihan penyelesaian surat berharga merupakan tagihan yang akan diterima dari pihak ketiga atas penjualan surat berharga yang belum diselesaikan pada akhir hari.

Uang muka merupakan uang muka pembelian inventaris, beban perjalanan dinas dan uang muka operasional lainnya.

Persediaan keperluan kantor merupakan persediaan atas formulir aplikasi, materai, kartu ATM dan cek.

Tagihan kepada asuransi adalah klaim kepada pihak asuransi atas uang pesangon karyawan dan klaim pengembalian premi nasabah kredit pensiun.

Lain-lain terdiri dari berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dibentuk sebagian besar untuk tagihan kredit lainnya. Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain adalah sebagai berikut:

***16. OTHER ASSETS – NET** (continued)*

Other export bills are receivables from negotiation of export bills in usance L/C transactions which have not been accepted.

Receivables from sales of securities represent receivables from third parties for sales of securities which have not been settled at the end of the day.

Advance payment consists of advances for purchace on office supplies, business trip allowances and other operational advances.

Office supplies represent supply of application forms, stamps, ATM cards and cheques.

Receivables from insurance companies are the claim to the insurance companies on employees' severance pay and premium refund claim for pension loan's debtors.

Others mainly consist of various receivables from transactions with third parties.

Allowance for impairment losses for other assets as of 31 December 2023 and 2022 was made mainly made for other credit receivables. The movement of the allowance for impairment losses for other assets was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	(52,507)	(722)	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	(53,065)	(52,313)	*Provision during the year (Note 34)*
Lain-lain	-	528	*Others*
Saldo akhir	(105,572)	(52,507)	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that the allowance for losses was adequate to cover impairment losses on other assets as of 31 December 2023 and 2022.

17. LIABILITAS SEGERA / *17. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

Seluruh liabilitas segera dengan pihak ketiga. / *All obligations due immediately were to third parties.*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Rupiah:			***Rupiah:***
Titipan transaksi surat berharga	19,844	2,672	*Unsettled securities transaction*
Hutang kepada pihak ketiga	16,336	31,153	*Payables to third parties*
Kewajiban penutupan tabungan	14,253	-	*Saving deposit closing obligation*
Titipan bagi hasil deposito	3,943	2,887	*Unsettled profit-sharing of time deposits*
Titipan uang notaris	1,296	1,898	*Unsettled notary transactions*
Kiriman uang yang belum diselesaikan	580	8,908	*Unsettled remittance transactions*
Titipan uang pensiun	905	797	*Unsettled pension funds*
Lain-lain	9,878	4,696	*Others*
	67,035	53,011	
Mata uang asing:			***Other currencies:***
Titipan transaksi surat berharga	4,565	-	*Unsettled securities transaction*
Kewajiban penutupan tabungan	6	-	*Saving deposit closing obligation*
Kiriman uang yang belum diselesaikan	-	6,034	*Unsettled remittance transactions*
	71,606	59,045	

Titipan transaksi surat berharga merupakan tampungan atas uang penjualan surat berharga yang belum diselesaikan.

Unsettled securities transaction represent the payment of securities that have not been settled.

Titipan uang pensiun merupakan tampungan uang pembayaran pensiun nasabah yang akan dibayarkan ke rekening nasabah.

Unsettled pension funds represent the customer's retirement payments that will be paid to the customer's bank account.

18. SIMPANAN NASABAH / *18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga:			*Third parties:*
- Giro	26,578,680	23,708,094	*Current accounts -*
- Tabungan	16,580,693	15,572,990	*Savings deposits -*
- Deposito berjangka	40,975,031	64,560,849	*Time deposit -*
- Deposito *on call*	13,659,076	100,470	*Deposits on call -*
	97,793,480	103,942,403	
Pihak berelasi:			*Related parties:*
- Giro	50,003	57,708	*Current accounts -*
- Tabungan	88,170	59,543	*Savings deposits -*
- Deposito berjangka	106,953	963,633	*Time deposits -*
- Deposito *on call*	239,150	-	*Deposits on call -*
	484,276	1,080,884	
	98,277,756	105,023,287	
Beban bunga yang masih harus dibayar	179,647	145,624	*Accrued interest expenses*
	98,457,403	105,168,911	

Berdasarkan mata uang: / *By currency:*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Simpanan nasabah:			*Deposits from customers:*
Rupiah	75,476,253	82,507,890	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	19,815,371	20,798,083	*United States Dollar*
Yen Jepang	2,564,810	1,353,262	*Japanese Yen*
Mata uang asing lainnya	421,322	364,052	*Other foreign currencies*
	98,277,756	105,023,287	
Beban bunga yang masih harus dibayar	179,647	145,624	*Accrued interest expenses*
	98,457,403	105,168,911	

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

a. Giro / *a. Current accounts*

Berdasarkan mata uang: / *By currency:*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Rupiah	15,846,676	12,273,465	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	8,735,833	10,174,982	*United States Dollar*
Yen Jepang	1,928,682	1,144,277	*Japanese Yen*
Mata uang asing lainnya	117,492	173,078	*Other foreign currencies*
	26,628,683	23,765,802	
Beban bunga yang masih harus dibayar	5,960	1,489	*Accrued interest expenses*
	26,634,643	23,767,291	

Giro Wadiah yang dikelola oleh Entitas Anak masing-masing sebesar Rp 24.009 dan Rp 27.645 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Wadiah current account managed by Subsidiary amounted to Rp 24,009 and Rp 27,645 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun: / *The average interest rate per annum for current accounts:*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December* 2023	2022	
Rupiah	1.64%	1.64%	*Rupiah*
Mata uang asing	1.85%	0.40%	*Foreign currencies*

Saldo giro yang diblokir masing-masing sebesar Rp 329.041 dan Rp 129.432 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pemblokiran giro sebagian besar dikarenakan giro tersebut diperuntukkan sebagai akun tampungan untuk cicilan pinjaman yang diberikan dan sebagai agunan pinjaman yang diberikan.

Total current accounts which were blocked amounted to Rp 329,041 and Rp 129,432 as of 31 December 2023 and 2022, respectively. The blocking of current accounts is mainly because the current accounts are designated as escrow accounts for loan installments and as collaterals for loans.

b. Tabungan / *b. Saving deposits*

Berdasarkan jenis: / *By type:*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Tabungan "Jenius"	11,414,116	9,750,254	*"Jenius" Savings*
Tabungan "Citra Pensiun"	2,155,288	2,174,755	*"Citra Pensiun" Savings*
Tabungan "Tepat Tabungan Kelompok Syariah"	2,140,799	2,109,497	*"Tepat Tabungan Kelompok Syariah" Savings*
Tabungan "Se To"	738,244	1,274,056	*"Se To" Savings*
Tabungan "Pasti"	154,263	197,149	*"Pasti" Savings*
Tabungan "Tepat Tabungan"	57,010	50,451	*"Tepat Tabungan" Savings*
Tabungan "Wadiah WOW iB"	-	17,540	*"Wadiah WOW iB" Savings*
Lain-lain	9,143	58,831	*Others*
	16,668,863	15,632,533	
Beban bunga yang masih harus dibayar	1,499	1,659	*Accrued interest expenses*
	16,670,362	15,634,192	

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

b. Tabungan (lanjutan) / *b. Saving deposits (continued)*

Berdasarkan mata uang: / *By currency:*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
Rupiah	15,660,285	14,946,057	*Rupiah*
Dolar Amerikat Serikat	543,438	344,625	*United States Dollar*
Yen Jepang	215,605	150,877	*Japanese Yen*
Mata uang asing lainnya	249,535	190,974	*Other foreign currencies*
	16,668,863	15,632,533	
Beban bunga yang masih harus dibayar	1,499	1,659	*Accrued interest expenses*
	16,670,362	15,634,192	

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun: / *Average interest rate per annum for saving deposits:*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Rupiah	1.86%	1.60%	*Rupiah*
Mata uang asing	1.34%	0.17%	*Foreign currencies*

Saldo tabungan yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 4.384.408 dan Rp 3.989.159. Pemblokiran tabungan sebagian besar dikarenakan tabungan tersebut diperuntukkan sebagai dana nasabah yang tidak dapat ditarik hingga tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Total saving deposits which were blocked as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 4,384,408 and Rp 3,989,159, respectively. The blocking of saving accounts is mainly because the saving accounts are designated as customer funds that cannot be withdrawn until the specified maturity date.

c. Deposito berjangka / *c. Time deposits*

Berdasarkan mata uang: / *By currency:*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Deposito berjangka			*Time Deposits*
Rupiah	35,300,062	55,187,898	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	5,673,926	10,278,476	*United States Dollar*
Dolar Singapura	54,295	-	*Singapore dollar*
Yen Jepang	53,701	58,108	*Japanese Yen*
	41,081,984	65,524,482	
Beban bunga yang masih harus dibayar	143,663	142,423	*Accrued interest expenses*
	41,225,647	65,666,905	

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

c. Deposito berjangka (lanjutan) / *c. Time deposits (continued)*

Berdasarkan jangka waktu: / *By time period:*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Hingga 1 bulan	24,720,307	50,280,859	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	11,175,601	11,510,339	*More than 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	2,601,838	2,153,881	*More than 3 - 6 months*
Lebih dari 6 - 12 bulan	2,570,983	1,557,581	*More than 6 - 12 months*
Lebih dari 1 tahun	13,255	21,822	*More than 1 year*
	41,081,984	65,524,482	
Beban bunga yang masih harus dibayar	143,663	142,423	*Accrued interest expenses*
	41,225,647	65,666,905	

Berdasarkan tingkat suku bunga: / *By interest rate:*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Hingga 3%	679,070	5,874,336	*Up to 3%*
Lebih dari 3 - 5%	25,049,460	53,118,373	*More than 3 - 5%*
Lebih dari 5 - 7%	15,353,454	6,531,773	*More than 5 - 7%*
	41,081,984	65,524,482	
Beban bunga yang masih harus dibayar	143,663	142,423	*Accrued interest expenses*
	41,225,647	65,666,905	

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito: / *Average interest rate per annum for time deposits:*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Rupiah	4.78%	3.31%	*Rupiah*
Mata uang asing	4.03%	1.73%	*Foreign currencies*

Saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp 265.002 dan Rp 377.514. Pemblokiran deposito berjangka sebagian besar dikarenakan deposito berjangka tersebut diperuntukkan sebagai agunan pinjaman yang diberikan dan sebagai akun tampungan untuk cicilan pinjaman yang diberikan.

Total time deposits blocked or pledged for collaterals of loans as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 265,002 and Rp 377,514, respectively. The blocking of time deposits is mainly because the time deposits are designated as collateral for loans and escrow accounts for loan installments.

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

d. Deposito *on call* / *d. Deposits on call*

Berdasarkan mata uang: / *By currency:*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Deposito *on call*			*Deposits on call*
Rupiah	8,669,230	100,470	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	4,862,174	-	*United States Dollar*
Yen Jepang	366,822	-	*Japanese Yen*
	13,898,226	100,470	
Beban bunga yang masih harus dibayar	28,525	53	*Accrued interest expenses*
	13,926,751	100,523	

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito *on call*: / *Average interest rate per annum for deposits on call:*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December* 2023	2022	
Rupiah	4.59%	2.06%	*Rupiah*
Mata uang asing	4.33%	-	*Foreign currencies*

19. SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN / *19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Pihak ketiga	1,253,579	18,779	*Third parties*
Pihak berelasi	9,561,059	147,352	*Related parties*
	10,814,638	166,131	
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,483	-	*Accrued interest expenses*
	10,822,121	166,131	

a. Berdasarkan jenis: / *a. By type:*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Call money	10,463,200	-	*Call money*
Giro	349,438	164,131	*Current accounts*
Deposito berjangka	2,000	2,000	*Time deposits*
	10,814,638	166,131	
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,483	-	*Accrued interest expenses*
	10,822,121	166,131	

Tidak ada saldo simpanan dari bank-bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

There were no deposits from other banks which were blocked or pledged as of 31 December 2023 and 2022.

19. SIMPANAN DARI BANK-BANK LAIN (lanjutan) / *19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

b. Berdasarkan mata uang: / *b. By currency:*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Rupiah	1,576,438	166,131	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	9,238,200	-	*United States Dollar*
	10,814,638	166,131	
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,483	-	*Accrued interest expenses*
	10,822,121	166,131	

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun: / *c. Average interest rate per annum:*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Rupiah			***Rupiah***
Call money	6.17%	4.35%	*Call money*
Deposito berjangka	2.44%	1.90%	*Time deposits*
Giro	0.00%	0.06%	*Current accounts*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Call money	6.03%	1.20%	*Call money*

d. Jangka waktu: / *d. Time period:*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Sesuai permintaan	349,438	164,131	*On demand*
Hingga 1 bulan	8,592,545	-	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	1,872,655	2,000	*More than 1 - 3 months*
	10,814,638	166,131	
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,483	-	*Accrued interest expenses*
	10,822,121	166,131	

Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 41.

Information regarding remaining period to maturity date was disclosed in Note 41.

20. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN / *20. SECURITIES ISSUED*

Utang obligasi / *Bonds payable*

	Peringkat/ *Rating*)*	31 Desember/*December* 2023	31 Desember/*December* 2022	
Nilai nominal:				*Nominal value:*
- Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	AAA(idn)	201,000	201,000	*Continuing Bonds IV - Phase I*
Dikurangi:				*Less:*
Biaya emisi yang belum diamortisasi		(431)	(866)	*Unamortized bonds issuance costs*
		200,569	200,134	
Ditambah:				*Add:*
Beban bunga yang masih harus dibayar		1,514	1,514	*Accrued interest expenses*
		202,083	201,648	
Utang obligasi sesuai dengan jangka waktunya:				*Bonds payable based on time period:*
Lebih dari 3 tahun		201,000	201,000	*More than 3 years*
		201,000	201,000	

*) Berdasarkan peringkat dari PT Fitch Ratings Indonesia

**) Based on rating by PT Fitch Ratings Indonesia*

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Other information relating to bonds payable as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

Seri/ *Series*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Tanggal penerbitan/ *Date of issuance*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok obligasi/ *Bonds principal installment*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I/*Continuing Bonds IV Phase I:*					
Seri/ *Series* A	799,000	7.55%	27 November/ *November* 2019	26 November/ *November* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri/ *Series* B	201,000	7.75%	27 November/ *November* 2019	26 November/ *November* 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 bulan dan pembayaran pokok dilakukan pada saat jatuh tempo. Bank telah melakukan pembayaran pokok dan bunga obligasi sesuai dengan jadwal.

Bonds interests are paid every 3 months and bonds principals are paid on the maturity date. The Bank has paid the bonds principal and interest based on the schedule.

Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank, antara lain tidak menerbitkan obligasi lain atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I serta yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman dan fasilitas dari pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit.

The trustee agreements provide several negative covenants to the Bank, among others, not issuing another bonds or other similar debt instrument with higher collecting right as compared to Continuing Bonds IV Phase I and collateralized with asset, except loans and facilities from bilateral interbank loan and bilateral facilities from Bank Indonesia which are secured with assets in the amount of 20% from assets which are calculated from the last audited financial statements.

Bank berkewajiban menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% dari total obligasi yang diterbitkan termasuk pokok obligasi. Bank telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

The Bank should keep the total assets that have not been specifically pledged at the minimum 125% from total issued bonds including bonds principal. The Bank has complied with the covenants on the trustee agreement.

Beban bunga atas utang obligasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 16.013 dan Rp 73.082 (Catatan 30).

The interest expenses of bonds payable for for the years ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 16,013 and Rp 73,082, respectively (Note 30).

21. PINJAMAN YANG DITERIMA / *21. BORROWINGS*

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman bukan bank yang dilakukan dengan pihak berelasi dan pihak ketiga.

Borrowings consists of bank borrowings and non-bank borrowings with related parties and third parties.

	31 Desember/ *December*		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga			***Third parties:***
Pinjaman bank:			*Bank borrowings:*
PT Bank Central Asia Tbk	6,000,000	4,500,000	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	-	1,000,000	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	100,000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
	6,000,000	5,600,000	
Pinjaman bukan bank:			*Non-bank borrowings:*
International Finance Corporation	6,682,950	2,063,850	*International Finance Corporation*
	12,682,950	7,663,850	
Pihak berelasi			***Related party:***
Pinjaman bank:			*Bank borrowings:*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	18,569,798	37,257,744	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
	31,252,748	44,921,594	
Dikurangi:			*Less:*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(48,251)	(9,988)	*Unamortized transaction costs*
Ditambah:			*Add:*
Beban bunga yang masih harus dibayar	151,020	155,802	*Accrued interest expenses*
	31,355,517	45,067,408	

a. Pinjaman bank / *a. Bank borrowings*

Jumlah pokok pinjaman berdasarkan jangka waktu:

Borrowing principals amount based on time period:

	31 Desember/ *December*		
	2023	**2022**	
Hingga 1 tahun	-	1,000,000	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 - 2 tahun	16,392,975	4,600,000	*More than 1 - 2 years*
Lebih dari 2 – 3 tahun	170,383	8,017,262	*More than 2 - 3 years*
Lebih dari 3 tahun	8,006,440	29,240,482	*More than 3 years*
	24,569,798	42,857,744	
Ditambah:			*Add:*
Beban bunga yang masih harus dibayar	52,745	107,801	*Accrued interest expenses*
	24,622,543	42,965,545	

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk / ***Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk***

Bank memiliki 5 fasilitas Pinjaman Bilateral dari PT Bank Central Asia Tbk yang ditandatangani pada rentang waktu tahun 2009 hingga 2022, dengan total fasilitas sebesar Rp 6.000.000, dengan detil sebagai berikut:

The Bank had 5 Bilateral Borrowing facilities from PT Bank Central Asia Tbk which were signed during 2009 to 2022, with total facilities amounted to Rp 6,000,000, with details as follows:

a) Perjanjian pinjaman *revolving Term Loan* I sebesar Rp 500.000 yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2009 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2022.

a) The facility agreement of revolving Term Loan I amounting to Rp 500,000 was signed on 15 May 2009 and had been extended several times with the latest extension was signed on 12 May 2022.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

a) Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Fasilitas harus ditarik dalam 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,40% berlaku terhitung sejak tanggal 13 Mei 2022 hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

Pada tanggal 28 Desember 2023, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 500.000, dengan jatuh tempo pada 13 Mei 2025.

b) Perjanjian pinjaman Revolving Term Loan III sebesar Rp 1.000.000 yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 27 September 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,40% terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

Pada tanggal 25 April 2022, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 29 September 2023.

Pada tanggal 22 Desember 2023, Bank melakukan penarikan kembali atas fasilitas ini sebesar Rp 1.000.000, dengan jatuh tempo pada 1 April 2025.

21. *BORROWINGS* (continued)

a. Bank borrowings *(continued)*

Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk *(continued)*

a) Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 18 (eighteen) months from the date of agreement.

The facility should be fully drawndown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.40% shall be calculated from 13 May 2022 until the final maturity date.

On 28 December 2023, the Bank made a withdrawal of Rp 500,000, with a maturity date on 13 May 2025.

b) The facility agreement of Revolving Term Loan III amounting to Rp 1,000,000 was signed on 1 April 2015 and had been extended several times with the latest extension was signed on 27 September 2023.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 6 (six) month of the date of agreement.

The facility should be fully drawndown within 18 (eighteen) months from the date of agreement. The interest period is 3 (three) months based on JIBOR interest rate and the interest will be paid of every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.40% and calculated from 1 October 2023 until the Final Maturity Date.

On 25 April 2022, The Bank made a withdrawal of Rp 1,000,000. The loan has been repaid on 29 September 2023.

On 22 December 2023, the Bank made an another withdrawal amounted Rp 1,000,000, with a maturity date on 1 April 2025.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

c) Perjanjian pinjaman *Non-revolving Term Loan IV* sebesar Rp 1.000.000 ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas terakhir, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian kredit. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,4%.

Pada tanggal 28 Desember 2023, Bank melakukan penarikan kembali atas fasilitas ini sebesar Rp 1.000.000, dengan jatuh tempo pada 24 November 2024.

d) Perjanjian pinjaman *Non-revolving Term Loan* II sebesar Rp 2.500.000 ditandatangani pada tanggal 29 April 2020 dan telah diperpanjang dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,4%.

Pada tanggal 4 Mei 2022, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 2.500.000, dengan jatuh tempo pada 4 November 2024.

e) Perjanjian pinjaman *Revolving Term* Loan VI sebesar Rp 1.000.000 ditandatangani pada tanggal 29 November 2022.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

***21. BORROWINGS** (continued)*

***a. Bank borrowings** (continued)*

***Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk** (continued)*

c) The facility agreement of Non-revolving Term Loan IV amounting Rp 1,000,000 was signed on 10 June 2015 and had been extended several times with the latest extension was signed on 24 May 2023.

Based on the latest facility agreement, the availability period will be ended within 1 (one) month from the date of agreement. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.4%.

On 28 December 2023, the Bank made an another withdrawal on this facility amounted Rp 1,000,000, with a maturity date on 24 November 2024.

d) The facility agreement of Non-revolving Term Loan II amounting Rp 2,500,000 was signed on 29 April 2020 and had been amended with the latest amendment signed on 4 May 2023.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 6 (six) months from the date of agreement.

The interest period is 3 (three) months and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.4%.

On 4 May 2022, the Bank made a withdrawal of Rp 2,500,000, with a maturity date on 4 November 2024.

e) The facility agreement of Revolving Term Loan VI amounting Rp 1,000,000 was signed on 29 November 2022.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended within 6 (six) months from the date of agreement.

The facility should be fully drawndown within 18 (eighteen) months from the date of agreement.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman bank (lanjutan)

Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

e) Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,4%.

Pada tanggal 29 Mei 2023, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000, dengan jatuh tempo pada 29 Mei 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank telah menggunakan seluruh fasilitas yang ada. Pada tanggal 31 Desember 2022, total fasilitas PT Bank Central Asia Tbk yang belum digunakan adalah sebesar Rp 1.500.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang dipersyaratkan.

Pinjaman Bilateral PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 2021, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit - *committed term loan* sebesar Rp 1.000.000 dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai kreditur. Tujuan pinjaman adalah untuk modal kerja Bank.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Fasilitas kredit harus ditarik sepenuhnya dalam batas waktu penarikan dengan ketentuan jumlah minimum penarikan adalah Rp 500.000 atau sebesar jumlah fasilitas kredit yang belum ditarik.

Pinjaman harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian pinjaman. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga acuan 3 bulan + 0,25%, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo.

***21. BORROWINGS** (continued)*

***b. Bank borrowings** (continued)*

***Bilateral Borrowing with PT Bank Central Asia Tbk** (continued)*

e) The interest period is 3 (three) months and the interest will be paid every due date. The interest rate for this facility is JIBOR + 0.4%.

On 29 May 2023, the Bank made a withdrawal of Rp 1,000,000, with a maturity date on 29 May 2024.

As of 31 December 2023, the Bank has utilized all borrowing facility. As of 31 December 2022, total unused facility from PT Bank Central Asia Tbk amounted to Rp 1,500,000.

As of 31 December 2023 and 2022, based on the agreement there was no certain covenant which was required to be maintained.

Bilateral Borrowing with PT Bank UOB Indonesia

On 18 August 2021, the Bank signed Committed term loan facility agreement amounting to Rp 1,000,000 with PT Bank UOB Indonesia as the creditor. The purpose of the borrowing is for the Bank's working capital.

Based on the facility agreement, the availability period will be ended on the 6 (sixth) month from the date of agreement.

The facility should be fully drawndown within the availability period with minimum drawdown amount is Rp 500,000 or any remaining undrawn amount.

The borrowing should be repaid within 12 (twelve) months after the date of borrowings agreement. Interest period is 3 (three) months based on the benchmark interest rate of 3 months + 0.25%, with interest payments are made at each maturity date.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

Pinjaman Bilateral PT Bank UOB Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 25 Februari 2022, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000. Perjanjian ini telah berakhir dan dilunasi pada tanggal 25 Agustus 2022.

Pada tanggal 23 September 2022, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit – committed term loan sebesar Rp 1.000.000 dengan PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan perjanjian fasilitas, jangka waktu fasilitas 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal fasilitas. Tanggal fasilitas adalah tanggal dimana dilakukan penarikan untuk pertama kali atau 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal perjanjian Kredit, yang mana yang lebih dahulu terjadi.

Batas waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal fasilitas. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga acuan 3 bulan + 0,3%, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 12 Oktober 2022, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.000.000. Perjanjian ini telah berakhir dan dilunasi pada tanggal 29 September 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman yang ada.

Pinjaman PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 13 Desember 2021, Entitas Anak mendapatkan fasilitas pinjaman dengan akad mudharabah yang diberikan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp 100.000. Fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Tujuan pinjaman adalah untuk menunjang bisnis Entitas Anak.

Penarikan pinjaman dilakukan pada tanggal 9 Maret 2022 sebesar Rp 100.000 dengan indikasi bagi hasil setara 5%. Entitas Anak telah melunasi pinjaman pada tanggal 9 Maret 2023.

***21. BORROWINGS** (continued)*

***a. Bank borrowings** (continued)*

***Bilateral Borrowing with PT Bank UOB Indonesia** (continued)*

On 25 February 2022, the Bank drawndown this loan at amount of Rp 1,000,000. The facility has been expired and repaid on 25 August 2022.

On 23 September 2022, the Bank signed Committed term loan facility agreement amounting to Rp 1,000,000 with PT Bank UOB Indonesia.

Based on the facility agreement, The facility should be fully drawndown within 12 (twelve) months from the date of facility. The facility date is the date on which a withdrawal is made for the first time or 5 (five) Business Days after the date of the Agreement, whichever occurs first.

The availability period will be ended on the 6 (sixth) month from the date of facility. Interest period is 3 (three) months based on the JIBOR interest rate of 3 months + 0.3%, with interest payments are made at each maturity date.

On 12 October 2022, the Bank made a withdrawal of Rp 1,000,000. The facility has been expired and repaid on 29 September 2023.

As of 31 December 2023, the Bank has paid off all borrowing facility.

Borrowing PT Bank Maybank Indonesia Tbk

On 13 December 2021, the Subsidiary obtained a borrowing facility on the basis of mudharabah provided by PT Bank Maybank Indonesia Tbk in the amount of Rp 100,000. The facility is valid until 13 December 2022. The purpose of the borrowing is to support the Subsidiary's business.

Withdrawal of borrowing was carried out on 9 March 2022 in the amount of Rp 100,000 with an indication of profit sharing equivalent to 5%. The Subsidiary has fully paid the borrowing on 9 March 2023.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

Pinjaman Bilateral Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura

Bank mendapatkan *revolving long-term borrowings* dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura, dengan total fasilitas setara dengan USD 3.625.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS atau jumlah yang setara dari jumlah tersebut dalam mata uang selain dari Dolar AS dan Dolar Singapura.

Total pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 1.195.000.000 (nilai penuh) dan EUR 10.000.000 (nilai penuh) (31 Desember 2022: USD 2.372.000.000 (nilai penuh) dan EUR 20.000.000 (nilai penuh)).

Pinjaman ini akan jatuh tempo berkisar antara tanggal 30 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025.

Tingkat suku bunga kontraktual setahun atas pinjaman jangka panjang ini adalah *cost of fund* ditambah margin tertentu. Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2023, marjin yang diterapkan adalah 0,50% (untuk total pinjaman USD 1.195.000.000 (nilai penuh) dan EUR 10.000.000 (nilai penuh)). Untuk posisi 31 Desember 2022, marjin yang diterapkan adalah 0,66% (untuk total pinjaman USD 355.000.000 (nilai penuh)) dan 0,50% (untuk total pinjaman USD 2.017.000.000 (nilai penuh) dan EUR 20.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang disyaratkan dalam pinjaman jangka panjang ini.

***21. BORROWINGS** (continued)*

***a. Bank borrowings** (continued)*

Bilateral Borrowing with Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch

The Bank entered into revolving long-term borrowings with Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch, with total facility amounting to equivalent of USD 3,625,000,000 (full amount). The facility can be drawn in US Dollars or the amount equivalent thereof in any other currencies other than US Dollars and Singapore Dollars.

Total outstanding amount drawn from this facility as of 31 December 2023 amounted to USD 1,195,000,000 (full amount) and EUR 10,000,000 (full amount) (31 December 2022: USD 2,372,000,000 (full amount) and EUR 20,000,000 (full amount)).

This borrowing will mature ranging from 30 January 2025 until 30 June 2025.

Contractual interest rate per annum on long-term borrowings is cost of fund plus certain margin. For position as of 31 December 2023, the applied margin was 0.50% (for total outstanding amount of USD 1,195,000,000 (full amount) and EUR 10,000,000 (full amount)). For position as of 31 December 2022, the applied margin was 0.66% (for total outstanding amount of USD 355,000,000 (full amount)) and 0,50% (for total outstanding amount of USD 2,017,000,000 (full amount) and EUR 20,000,000 (full amount).

As of 31 December 2023 and 2022, there was no certain covenant which was required to be maintainted in this long-term borrowing.

b. Pinjaman bukan bank

Jumlah pokok pinjaman berdasarkan jangka waktu:

b. Non-bank borrowings

Borrowing principals amount based on time period:

	31 Desember/ *December*		
	2023	**2022**	
Lebih dari 3 tahun	6,682,950	2,063,850	*More than 3 years*
Dikurangi:			*Less:*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(48,251)	(9,988)	*Unamortized transaction costs*
Ditambah:			*Add:*
Beban bunga yang masih harus dibayar	98,275	48,001	*Accrued interest expenses*
	6,732,974	2,101,863	

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

Pembayaran bunga pinjaman telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Pinjaman bukan bank adalah fasilitas pinjaman dengan International Finance Corporation (IFC), bukan pihak berelasi yang terdiri dari beberapa perjanjian sebagai berikut:

(i) Perjanjian Pinjaman 2019

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro, usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan, *green loans*, pinjaman *Supply Chain Finance* (SCF). Bank akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa jumlah agregat dari pencairan yang diberikan untuk setiap pinjaman setidaknya sama dengan 25% dari jumlah maksimum pinjaman.

Pada tanggal 30 Desember 2019, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 699.250, ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,75% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2024. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 30 Juni 2021 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2024.

Pada tanggal 28 Januari 2020, Bank melakukan penarikan sebesar Rp 1.364.600, ekuivalen USD 100.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,30% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2025. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 28 Juli 2021 dan akan berakhir pada tanggal 28 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Bank telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman yang ada.

***21. BORROWINGS** (continued)*

***b. Non-bank borrowings** (continued)*

Payments of interest on borrowings had been paid by the Bank in accordance with the schedule.

Non-bank borrowings are borrowing facilities from International Finance Corporation (IFC), non-related party, consist of some agreements as follows:

(i) Borrowing Agreement 2019

The purpose of borrowing was to finance the Women-Owned Micro, Small Medium Enterprise (MSME) loans, Green loans and Supply Chain Finance (SCF) loans. The Bank will use its best efforts to ensure that the aggregated amount of the disbursements made to each loans was at least equal to 25% of the maximum loan amount.

On 30 December 2019, the Bank drawndown this loan at amount of Rp 699,250, equivalent to USD 50,000,000 (full amount) with interest rate 7.75% per annum and maturity date on 3 December 2024. Interest payment will be paid every 6 (six) months, which is started on 30 June 2021 and will be ended on 30 December 2024.

On 28 January 2020, the Bank drawndown this at amount of Rp 1,364,600, equivalent to USD 100,000,000 (full amount) with interest rate 7.30% per annum and maturity date on 28 January 2025. Interest payment will be paid every 6 (six) months, which is started on 28 July 2021 and will be ended on 28 January 2025.

As of 31 December 2023 and 31 December 2022, the Bank has utilized all borrowing facility.

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

(i) Perjanjian Pinjaman 2019 (lanjutan)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman;
- tidak melakukan penggabungan usaha, demerger, restrukturisasi korporasi, yang dapat memberikan dampak merugikan yang material;
- tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah SMBC menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia;

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Bank telah memenuhi seluruh pembatasan yang dipersyaratkan.

(ii) Perjanjian Pinjaman 2023

Pada tanggal 20 Juni 2023, Bank telah menandatangani perjanjian Fasilitas pinjaman sebesar USD 500.000.000 (nilai penuh). Bentuk pinjaman ini adalah *Privately Placed Senior Sustainability Bond*. Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk pembiayaan usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan, pembangunan bangunan ramah lingkungan, dan *Social Bond.*

Pada tanggal 25 Agustus 2023, Bank melakukan penarikan sebesar USD 300.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga berdasarkan suku bunga acuan 3 bulan + 0,846%. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, yang dimulai pada tanggal 27 November 2023 dan akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2028.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas yang belum digunakan adalah sebesar USD 200.000.000 (nilai penuh).

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Menyatakan atau membayarkan dividen apa pun atau melakukan pembagian apa pun atas modal sahamnya (selain dividen atau pembagian yang harus dibayar dalam saham Emiten), kecuali pembayaran atau pembagian yang diusulkan diambil dari penghasilan bersih dari Tahun Buku yang relevan.

***21. BORROWINGS** (continued)*

***b. Non-bank borrowings** (continued)*

***(i) Borrowing Agreement 2019** (continued)*

The borrowing agreements provide several covenants required from the Bank, such as:

- *no substantial change is made to the general nature of its business without prior written consent of the lender;*
- *not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect;*
- *not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that action would make the SMBC to become a non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations;*

As of 31 December 2023 and 31 December 2022, the Bank had fulfilled all the required covenants.

(ii) Borrowing Agreement 2023

On 20 June 2023, the Bank has signed a loan facility agreement of USD 500,000,000 (full amount). The form of this loan is a Privately Placed Senior Sustainability Bond. The purpose of these loans is to finance small and medium enterprises owned by women, construction of environmentally friendly buildings, and Social Bonds.

On 25 August 2023, the Bank made a withdrawal of USD 300,000,000 (full amount) with interest rates based on the 3-month benchmark interest rate + 0.846%. Interest payments are made every 3 (three) months, starting on 27 November 2023 and ending on 25 August 2028.

As of 31 December 2023, total unused facility amounted to USD 200,000,000 (full amount).

The borrowing agreements provide several covenants required from the Bank, such as:

- *Declare or pay any dividend or make any distributions on its share capital (other than dividends or distributions payable in shares of the Issuer), unless the proposed payment or distribution is out of net income of the relevant Financial Year.*

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

(ii) Perjanjian Pinjaman 2023 (lanjutan)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain: (lanjutan)

- Membuat atau memungkinkan utang apa pun yang dijamin atau berperingkat di atas atau senior terhadap Obligasi, kecuali untuk transaksi sewa guna usaha (*leasing*) atau transaksi lain yang didukung aset dalam operasional bisnis perbankan pada umumnya.
- Membentuk atau memiliki Anak Perusahaan Utama apa pun (selain PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan PT BTPN SYARIAH VENTURA).
- Tidak melakukan perubahan mendasar atas Anggaran Dasar dengan cara apa pun yang dapat tidak sesuai dengan ketentuan pada perjanjian.
- Tidak melakukan atau mengizinkan penggabungan, pemekaran, peleburan atau reorganisasi apa pun; atau menjual, memindahkan, menyewakan atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau suatu bagian substansial dari aset-asetnya selain aset-aset yang diambil alih dalam mengeksekusi jaminan yang dibuat untuk kepentingan Emiten dalam usaha perbankannya.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank telah memenuhi persyaratan terkait penarikan pertama fasilitas IFC.

***21. BORROWINGS** (continued)*

***b. Non-bank borrowings** (continued)*

***(ii) Borrowing Agreement 2023** (continued)*

The borrowing agreements provide several covenants required from the Bank, such as: (continued)

- *Create or allow any indebtedness that is secured or ranks prior or senior to the Bonds, except for the leasing transactions or other asset-backed transactions in the ordinary course of banking business.*
- *Form or have any Material Subsidiary (other than PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and PT BTPN SYARIAH VENTURA).*
- *No substantial change of its Charter in any manner which would be inconsistent with the provisions of this Agreement.*
- *Not undertake Merger, Consolidation or Reorganization. Undertake or permit any merger, spin-off, consolidation or reorganization; or sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or a substantial part of its assets, other than assets acquired in the enforcement of security created in Favor of the Issuer in the ordinary course of its banking business, whether in a single transaction or in a series of transactions, related or otherwise.*

As of 31 December 2023, the Bank managed to fulfill the requirement related with first disbursement of IFC facility.

22. AKRUAL / ***22. ACCRUALS***

	31 Desember/ *December*		
	2023	**2022**	
Akrual beban operasional	328,468	304,544	*Accrued operational expenses*
Akrual beban promosi	101,610	75,206	*Accrued promotion expenses*
Akrual jasa profesional	48,903	54,949	*Accrued professional fees*
Akrual beban kepegawaian	-	19,293	*Accrued personnel expenses*
	478,981	453,992	

Akrual jasa profesional merupakan akrual untuk biaya konsultan yang bekerjasama dengan Bank untuk menyelesaikan proyek tertentu, termasuk akrual untuk biaya konsultan hukum, konsultan bisnis, akuntan publik dan lainnya.

Accrued professional fees are accrual for the costs of consultants who collaborate with the Bank to complete certain projects, including accrual for the costs of legal consultant, business consultant, public accountant and others.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN / *23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari: / *Employee benefits liabilities consist of:*

	31 Desember/ *December*		
	2023	**2022**	
Imbalan kerja jangka pendek			*Short-term employee benefits*
Akrual bonus karyawan, THR, tantiem, dan liabilitas jangka pendek lainnya			*Accrual of employee bonus, THR, tantiem, and other short-term liabilities*
- Bank	323,918	278,730	*Bank* -
- Entitas Anak	187,270	164,746	*Subsidiary* -
	511,188	443,476	
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya			*Post-employment benefits and other long-term employee benefits*
- Bank	128,085	43,281	*Bank* -
- Entitas Anak	42,020	20,947	*Subsidiary* -
	170,105	64,228	
	681,293	507,704	

Grup menerapkan kebijakan program manfaat imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ("UUCK") No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerjasama yang berlaku di Grup. Dasar perhitungan manfaat ini menggunakan gaji pokok terkini. Program pensiun manfaat pasti ini dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

The Group implements post-employment benefits policy based on Job Creation Law ("UUCK") No. 11 Year 2020, Government Regulation No. 35 Year 2021 and Collective Labor Agreement applied by the Group. The calculation basis of benefits is based on current basic salary. The Bank's defined benefits pension plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendanaan program pensiun ini dilakukan oleh Grup dengan membayar iuran tahunan yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The program calls for benefits to be paid to eligible employees at retirement or when the employees resign according to the prevailing regulations. The funding of the pension plan is conducted by the Group through payments of annual contributions which are sufficient to meet the minimum requirements set forth in applicable laws.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang Bank dan Entitas Anak menggunakan hasil perhitungan Aktuari periode 31 Desember 2023 dengan informasi komparatif 31 Desember 2022.

The calculation of the long-term employee benefits of the Bank and Subsidiary use the results of the calculation of the Actuarial period 31 December 2023 with comparative information 31 December 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah karyawan Bank yang memiliki hak atas manfaat ini adalah 6.237 karyawan (31 Desember 2022: 6.271 karyawan) (tidak diaudit).

As of 31 December 2023, the total number of the Bank's employees eligible for this benefit was 6,237 employees (31 December 2022: 6,271 employees) (unaudited).

Pada tanggal 31 December 2023, jumlah karyawan Entitas Anak yang memiliki hak atas imbalan ini adalah sebanyak 3.628 karyawan (31 Desember 2022: 3.924 karyawan) (tidak diaudit).

As of 31 December 2023, the total number of the Subisidiary's employees eligible for this benefit was 3,628 employees (31 December 2022: 3,924 employees) (unaudited).

Selain memberikan manfaat yang disebutkan di atas, Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

In addition to the benefits mentioned above, the Bank also provides its employees with long leave benefits.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

23. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Bank

Bank

Perhitungan aktuaria atas liabilitas imbalan kerja karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" berdasarkan laporannya tertanggal 31 Januari 2024 (31 Desember 2022: tanggal 8 Februari 2023).

The actuarial calculation for the Bank's employee benefits liabilities as of 31 December 2023 and 2022 was performed by Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, an independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method based on its reports dated 31 January 2024 (31 December 2022: dated 8 February 2023).

Perhitungan aktuaria tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial valuations were carried out using the following assumptions:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun	6.37% - 7.10%	5.52% - 7.43%	*Interest discount rate per annum*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7%	7%	*Salary increment rate per annum*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	55	55	*Normal pension age*
Tingkat kematian	Tabel mortalitas/ *Mortality table* Indonesia 2019 (TMI 2019)	Tabel mortalitas/ *Mortality table* Indonesia 2019 (TMI 2019)	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% TMI 2019	10% TMI 2019	*Disability rate*

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan laporan aktuaria adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2023 and 2022 based on the actuarial reports was as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	732,177	674,325	*Present value of defined benefits liabilities*
Nilai wajar aset program	(634,515)	(657,834)	*Fair value of plan assets*
Kekurangan pendanaan	97,662	16,491	*Funding deficit*

Perubahan liabilitas imbalan manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefits liabilities during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			***Movement in present value of defined benefits liabilities:***
Nilai kini kewajiban imbalan manfaat pasti, awal tahun	674,325	671,934	*Present value of defined benefits liabilities, beginning of the year*
Termasuk dalam laba rugi			***Included in profit or loss***
Beban jasa kini	86,161	85,663	*Current service cost*
Beban bunga	45,241	40,220	*Interest expense*
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(48,052)	*Adjustment due to change in benefit attribution method*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			***Included in other comprehensive income***
Kerugian/keuntungan aktuaria yang timbul dari:			*Actuarial losses/gains arising from:*
- Asumsi keuangan	21,597	(12,386)	*Financial assumption -*
- Penyesuaian pengalaman	37,862	21,242	*Experiences adjustment -*
Lain-lain			***Others***
Imbalan yang dibayarkan oleh aset program selama tahun berjalan	(133,009)	(84,296)	*Benefits paid by the plan assets during the year*
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	**732,177**	**674,325**	***Present value of net defined benefits liabilities, end of year***

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Bank (lanjutan)

***Bank** (continued)*

Perubahan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of fair value of plan assets during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Perubahan nilai wajar aset program:			***Movement in the fair value of plan assets:***
Nilai wajar aset program, awal tahun	657,834	657,951	*Fair value of plan assets, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			***Included in profit or loss***
Pendapatan bunga atas aset program	46,304	43,720	*Interest income on plan assets*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			***Included in other comprehensive income***
Imbal hasil atas aset program di luar pendapatan bunga	(32,115)	(34,244)	*Return on plan assets excluding interest income*
Lain-lain			***Others***
Kontribusi yang dibayarkan kepada program	95,501	74,703	*Contributions paid into the plan*
Imbalan yang dibayarkan oleh program	(133,009)	(84,296)	*Benefits paid by the plan*
Nilai wajar aset program, akhir tahun	**634,515**	**657,834**	***Fair value of plan assets, end of year***

Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada kas di Bank Kustodian dan deposito berjangka di Bank.

All of the pension plan assets are placed on cash with the Custodian Bank and time deposits with the Bank.

Bank terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Bank is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Asset volatility

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, then this will create a deficit.

Perubahan imbal hasil obligasi

Changes in bond yields

Kenaikan pada liabilitas program disebabkan oleh penurunan imbal hasil obligasi pemerintah, walaupun hal ini akan saling hapus dengan pilihan jenis investasi Bank.

An increase in plan liabilities is caused by the decrease in government bond yields, although this will be partially offset by the Bank's investment choices.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Bank (lanjutan)

***Bank** (continued)*

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Present value of post-employment benefits liabilities, fair value of plan assets, deficit/surplus of program and adjustment on plan liabilities and plan assets for the last 5 years were as follows:

	31 Desember/*December*					
	2023	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	732,177	674,325	671,934	640,803	540,349	*Present value of defined benefits liabilities*
Nilai wajar aset program	(634,515)	(657,834)	(657,951)	(545,350)	(595,828)	*Fair value of plan assets*
Dampak batas atas aset	-	-	-	-	-	*The effect of the asset ceiling*
Defisit (surplus)	97,662	16,491	13,983	95,453	(55,479)	*Deficit (surplus)*
Penyesuaian pada liabilitas program	59,459	8,856	(2,829)	56,208	25,883	*Adjustments on plan liabilities*
Penyesuaian pada aset program	32,115	34,244	22,272	19,473	17,085	*Adjustments on plan assets*

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memenuhi persyaratan minimum UUCK.

Management believes that the estimated post-employment benefit liabilities as of 31 December 2023 and 2022 have fulfilled the minimum requirements of UUCK.

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 11,61 tahun dan 10,78 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as of 31 December 2023 and 2022 was 11.61 years and 10.78 years, respectively.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

	31 Desember/ *December*		
	2023	**2022**	
Hingga 1 tahun	84,573	65,092	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 - 2 tahun	71,839	83,406	*More than 1 - 2 years*
Lebih dari 2 - 5 tahun	284,254	259,653	*More than 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	3,528,404	2,891,964	*More than 5 years*

Sensitivitas liabilitas imbalan pascakerja untuk perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the post-employment benefits liabilities to changes in the key actuarial assumptions was as follows:

	2023			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1%	(48,514)	(6,750)	*Discount rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	54,581	7,712	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1%	52,384	7,489	*Salary increase rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	(47,377)	(6,669)	

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

23. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES* *(continued)*

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Bank (lanjutan)

Bank *(continued)*

		2022		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1%	(40,837)	(6,528)	
	Penurunan/*Decrease* 1%	45,789	7,128	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1%	47,478	7,355	
	Penurunan/*Decrease* 1%	(42,947)	(6,548)	*Salary increase rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan pascakerja.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the post-employment benefits liabilities.

Entitas Anak

Subsidiary

Perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 9 Januari 2024 (31 Desember 2022: tanggal 6 Januari 2023) dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculation as of 31 December 2023 and 2022 was performed by Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated 9 January 2024 (31 December 2022: 6 January 2023) with the following assumptions:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Tingkat diskonto per tahun	6.45% - 7.14%	5.77% - 7.30%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9%	9%	*Annual salary increase rate*
Tabel mortalita	Tabel mortalitas/ *Mortality table* Indonesia 2019	Tabel mortalitas/ *Mortality table* Indonesia 2019	*Mortality table*
Usia pensiun normal	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Normal pension age*

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan laporan aktuaria adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2023 and 2022 based on the actuarial reports was as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	229,374	195,106	*Present value of defined benefits liabilities*
Nilai wajar aset program	(204,563)	(202,188)	*Fair value of plan assets*
(Kelebihan) kekurangan pendanaan	24,811	(7,082)	*Funding (gain) deficit*
Dampak batas atas aset	-	7,082	*The effect of the asset ceiling*
Liabilitas/(aset) imbalan bersih neto	24,811	-	*Net defined liability/(asset)*

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

23. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

***Subsidiary** (continued)*

Perubahan liabilitas imbalan manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of defined benefits liabilities during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			***Movement in present value of defined benefits liabilities:***
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, awal tahun	195,106	240,583	*Present value of defined benefits liabilities, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			***Included in profit or loss***
Beban jasa kini	34,487	32,371	*Current service cost*
Beban bunga	13,647	15,243	*Interest expense*
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(53,029)	*Adjustment due to change in benefit attribution method*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			***Included in other comprehensive income***
Kerugian/keuntungan aktuaria yang timbul dari:			*Actuarial losses/gains arising from:*
- Asumsi keuangan	6,593	(4,554)	*Financial assumption -*
- Penyesuaian pengalaman	(11,247)	(19,388)	*Experience adjustment -*
Lain-lain			***Others***
Imbalan yang dibayar	(9,212)	(16,120)	*Benefits paid*
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	**229,374**	**195,106**	***Present value of defined benefits liabilities, end of year***

Perubahan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of fair value of plan assets during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Perubahan nilai wajar aset program:			***Movement in the fair value of plan assets:***
Saldo, awal tahun	202,188	219,728	*Balance, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			***Included in profit or loss***
Hasil yang diharapkan dari aset program	14,521	15,024	*Expected return on plan assets*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			***Included in other comprehensive income***
Imbal hasil atas aset program di luar pendapatan bunga	(12,934)	(10,969)	*Return on plan assets excluding interest income*
Lain-lain			***Others***
Kontribusi pemberi kerja	10,000	-	*Employer's contribution*
Mutasi aset	-	(5,475)	*Asset mutation*
Imbalan yang dibayar	(9,212)	(16,120)	*Benefits paid*
Saldo, akhir tahun	**204,563**	**202,188**	***Balance, end of year***

Seluruh aset program pensiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditempatkan pada Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz dengan deposito berjangka sebagai aset yang mendasari.

All of the pension plan assets as of 31 December 2023 and 2022 were placed on Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz with time deposits as underlying assets.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

23. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

***Subsidiary** (continued)*

Entitas Anak terekspos dengan risiko volatilitas aset melalui program imbalan pasti. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Subsidiary is exposed to asset volatility risks through its defined benefit pension plans. The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, then this will create a deficit.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetao didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date.

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Dampak batas atas aset pada awal program:	7,082	-	***Effect of asset ceiling at beginning of period:***
Termasuk dalam laba rugi			***Included in profit or loss***
Bunga atas dampak batas aset	510	-	*Interest on the effect of asset ceiling*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			***Included in other comprehensive income***
Setiap perubahan yang berdampak pada batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	(7,592)	7,082	*Any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset)*
Dampak batas atas aset pada akhir periode	**-**	7,082	***Effect of asset ceiling at the end of period***

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Present value of post-employment benefits liabilities, fair value of plan assets, deficit/surplus of program and adjustment on plan liabilities and plan assets for the last 5 years were as follows:

	31 Desember/*December*					
	2023	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti	229,374	195,106	240,583	217,467	175,160	*Present value of defined benefits liabilities*
Nilai wajar aset program	(204,563)	(202,188)	(219,728)	(193,363)	(188,883)	*Fair value of plan assets*
Defisit (surplus)	24,811	(7,082)	20,855	24,104	(13,723)	*Deficit (surplus)*
Dampak batas atas aset	-	7,082	-	-	-	*The effect of the asset ceiling*
Liabilitas (aset) imbalan bersih neto	24,811	-	20,855	24,104	(13,723)	*Net defined benefit liability (asset)*
Penyesuaian pada liabilitas program	4,654	23,942	13,603	7,606	(16,253)	*Adjustments on plan liabilities*
Penyesuaian pengalaman yang timbul pada aset program	12,934	10,969	8,153	5,969	4,052	*Experience adjustment on plan assets*

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

23. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES* *(continued)*

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

Subsidiary *(continued)*

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits was as follow:

	31 Desember/ *December*		
	2023	**2022**	
Hingga 1 tahun	11,709	8,428	*Up to 1 years*
Lebih dari 1 - 2 tahun	14,013	7,675	*More than 1 - 2 years*
Lebih dari 2 - 5 tahun	100,282	79,774	*More than 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	2,158,255	1,516,997	*More than 5 years*

Sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja untuk perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the post-employment benefit obligation to change in the key actuarial assumption was as follow:

	2023			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1%	(18,539)	(3,195)	*Discount rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	21,207	3,733	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1%	20,208	3,605	*Salary increase rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	(18,048)	(3,152)	

	2022			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1%	(15,143)	(2,918)	*Discount rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	17,252	3,393	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1%	17,420	3,425	*Salary increase rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	(15,566)	(2,999)	

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuaria dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan pascakerja atas asumsi aktuaria utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan pascakerja.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefits liabilities to key actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the post-employment benefits liabilities.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Entitas Anak (lanjutan)

***Subsidiary** (continued)*

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, imbalan pascakerja untuk karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Entitas Anak dihitung secara internal dengan metode *historical stay rate* masing-masing sebesar Rp 3,494 dan Rp 7.955.

As of 31 December 2023 and 2022, post-employment benefits for the Subsidiary's employees with Fixed Time Employment Agreements (PKWT) are calculated internally using the historical stay rate method amounted to Rp 3,494 and Rp 7,955, respectively.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long term employee benefits

Bank

Bank

Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

The Bank also provides its employees with long leave benefit.

Perubahan liabilitas yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The movement in the Bank's liabilities arising from other long-term employee benefits was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			***Movement in present value of defined benefits liabilities:***
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, awal tahun	26,790	27,075	*Present value of defined liabilities, beginning of the year*
Termasuk dalam laba rugi			***Included in profit or loss***
Beban jasa kini	5,307	4,871	*Current service cost*
Beban bunga	1,746	1,426	*Interest expense*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Penyesuaian asumsi demografi		-	*Changes in demography assumptions -*
- Penyesuaian asumsi keuangan	396	(714)	*Changes in financial assumptions -*
- Penyesuaian pengalaman	(386)	(100)	*Experience adjustment -*
Lain-lain			***Others***
Imbalan yang dibayarkan dari pemberi kerja selama tahun berjalan	(3,430)	(5,768)	*Benefits paid by the employer during year*
Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti, akhir tahun	**30,423**	**26,790**	***Present value of net defined benefits liabilities, end of year***

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long-term employee benefits was as follows:

	31 Desember/ *December*		
	2023	**2022**	
Hingga 1 tahun	3,877	2,807	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 - 2 tahun	7,951	3,330	*More than 1 - 2 years*
Lebih dari 2 - 5 tahun	20,644	21,494	*More than 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	63,783	60,402	*More than 5 years*

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

23. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long term employee benefits (continued)

Bank (lanjutan)

***Bank** (continued)*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

	2023			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/*Decrease 1*%	(1,335) 1,462	(240) 264	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/*Decrease 1*%	1,284 (1,196)	233 (217)	*Salary increase rate*

	2022			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/*Decrease 1*%	(1,117) 1,221	(211) 230	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/*Decrease 1*%	1,209 (1,127)	227 (211)	*Salary increase rate*

Entitas Anak

Subsidiary

Perubahan liabilitas yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the liabilities arising from other long-term employee benefits during the year was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Year ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Perubahan nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti:			***Movement in present value of defined benefits liabilities:***
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, awal tahun	12,992	12,483	*Present value of the defined benefits liabilities, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			***Included in profit or loss***
Beban jasa kini	1,794	1,881	*Current service cost*
Beban bunga	878	692	*Interest expense*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Penyesuaian asumsi demografi			*Changes in demographic -*
- Penyesuaian asumsi keuangan	246	(362)	*Changes in financial assumptions -*
- Penyesuaian pengalaman	(818)	(544)	*Experience adjustment -*
Lain-lain			***Others***
Imbalan yang dibayar	(1,376)	(1,158)	*Benefits paid*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, akhir tahun	**13,716**	**12,992**	***Present value of defined benefits liabilities, end of year***

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long-term employee benefits was as follow:

	31 Desember/ *December*		
	2023	**2022**	
Hingga 1 tahun	1,999	1,396	*Up to 1 year*
Lebih dari 1-2 tahun	2,076	2,078	*More than 1-2 years*
Lebih dari 2-5 tahun	6,411	6,658	*More than 2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	39,701	40,089	*More than 5 years*

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Other long term employee benefits (continued)

***Subsidiary** (continued)*

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

	2023			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/*Decrease 1*%	(790) 886	(103) 115	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease 1*%	789 (719)	103 (94)	*Salary increase rate*

	2022			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *increase (decrease) in present value of benefit obligation***	**Kenaikan (penurunan) beban jasa kini/ *Increase (decrease) in current service cost***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/*Decrease 1*%	(699) 784	(102) 112	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease 1*%	763 (694)	109 (100)	*Salary increase rate*

Dampak pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pada penghasilan komprehensif konsolidasian adalah masing-masing sebesar Rp 92.262, dan Rp 37.209 untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Effect of remeasurements of employee benefits liabilities on consolidated other comprehensive income was Rp 92,262 and Rp 37,209 for the years ended 31 December 2023 and 2022, respectively.

24. PINJAMAN SUBORDINASI

Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman dari SMBC Cabang Singapura sejumlah USD 200.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp 3.079.400 pada tanggal 31 Desember 2023 dan sejumlah USD 200.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp 3.113.500 pada tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman subordinasi sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh) dan USD 100.000.000 (nilai penuh) masing-masing diperoleh pada tanggal 26 September 2018 dan 23 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2028 dan 21 November 2028.

24. SUBORDINATED LOANS

The outstanding subordinated loans represent loans obtained from SMBC Singapore Branch amounted to USD 200,000,000 (full amount), equivalent to Rp 3,079,400 as of 31 December 2023 and amounted to USD 200,000,000 (full amount), equivalent to Rp 3,113,500 as of 31 December 2022.

Subordinated loans of USD 100,000,000 (full amount) and USD 100,000,000 (full amount) were obtained on 26 September 2018 and 23 November 2018 respectively and will mature on 26 September 2028 and 21 November 2028, respectively.

24. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Untuk fasilitas USD 100.000.000 (nilai penuh) yang diperoleh pada tanggal 26 September 2018, telah terdapat Perjanjian Tambahan yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2021, sehingga tanggal jatuh tempo berubah dari tanggal 26 September 2025 menjadi tanggal 26 September 2028.

Pinjaman subordinasi memiliki opsi pembayaran lebih awal dengan pemberitahuan 20 hari sebelumnya dan dengan persetujuan dari kreditur.

Kisaran tingkat suku bunga pinjaman subordinasi adalah 6,90% - 6,93% per tahun.

Pinjaman subordinasi digunakan untuk memperkuat struktur modal Bank sebagai Modal Pelengkap (*Tier* 2).

Sesuai Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, Kreditur dan Debitur memahami bahwa terdapat kondisi yang menyebabkan (trigger *events*) pinjaman yang diberikan sesuai dengan Perjanjian ini harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down,* yaitu dalam hal kelangsungan usaha debitur berpotensi terganggu (*point of non viability*) sehingga mempengaruhi kewajiban debitur kepada kreditur, yaitu dapat berupa:

(i) rasio Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan Entitas Anak; dan/atau

(ii) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Debitur yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan

(iii) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *write-down.*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman subordinasi.

***24. SUBORDINATED LOANS** (continued)*

For the USD 100,000,000 (full amount) facility obtained on 26 September 2018, a Supplemental Agreement has been signed on 27 September 2021, so that the maturity date has changed from previously 26 September 2025 to 26 September 2028.

These subordinated loans have early repayment option by 20 days notification in advance with lender's approval.

Range of interest rate for subordinated loans per year was 6.90% - 6.93%.

Subordinated loans are used to strengthen the Bank's capital structure as Supplementary Capital (Tier 2).

In accordance with the Regulation of OJK Number 11/POJK.03/2016 and Circular Letter of OJK Number 20/SEOJK.03/2016 regarding Feature of Conversion to Common Stock or Write Down The Instruments of Additional Tier 1 and Tier 2, Lender and Borrower acknowledge the trigger events that will cause the loan provided under this Agreement to be converted to common stock or written down, particulary in the event when the business continuity of the debtor is potentially disrupted (point of non viability) and therefore affecting the liabilities of borrower to the lender, in the term of:

(i) Common Equity Tier 1 (CET 1) is lower than or equal to 5.125% of Risk-Weighted Assets (RWA), both individually and consolidated with its Subsidiaries; and/or

(ii) there is a plan of the competent authority to make capital injection to the Borrower which continuity of its business is evaluated to have the potential to be disrupted; and

(iii) There is an order from OJK to convert into common stock and/or write-down.

As of 31 December 2023 and 2022, the Bank complied with all the requirements mentioned in the subordinated loan agreements.

25. LIABILITAS LAIN-LAIN / *25. OTHER LIABILITIES*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Transaksi ATM, transfer dan tagihan *merchant*	253,284	104,390	*ATM transaction, transfer and merchant bills*
Term Deposit DHE	250,201	-	*DHE Term Deposit*
Pendapatan ditangguhkan	102,106	70,866	*Unearned income*
Beban *Standby Letter of Credit* yang masih harus dibayarkan	81,244	99,880	*Accrued Standby Letter of Credit fee*
Utang premi asuransi kredit	53,828	30,995	*Loan insurance premium payable*
Cadangan kerugian penurunan nilai - komitmen	52,990	89,448	*Allowance for impairment losses - commitment*
Utang kepada pihak ketiga	37,685	140,044	*Payable to third parties*
Komisi asuransi diterima dimuka	11,667	31,667	*Up-front insurance commission*
Utang premi asuransi lainnya	11,184	17,035	*Other insurance premium payable*
Klaim asuransi	4,009	10,880	*Insurance claim*
Lainnya	217,310	145,074	*Others*
	1,075,508	740,279	

Transaksi ATM, transfer dan tagihan *merchant* merupakan hutang atas transaksi ATM dan transfer antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya, serta transaksi dengan *merchant* melalui gerbang pembayaran.

ATM transaction, transfer and merchant bills consist of payables from Bank ATM transaction and transfer to other banks that will be settled on the next working day and transactions with merchants via payment gateway.

Term Deposit DHE adalah instrumen untuk memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia, dengan mekanisme *pass on* transaksi bank dengan nasabah (eksportir) kepada Bank Indonesia. Bank mencatat *Term Deposit* DHE tersebut pada akun aset lain-lain dan kewajiban kepada nasabah (eksportir) pada akun liabilitas lain-lain dengan nilai yang sama.

DHE Term Deposit is an instrument to facilitate the placement of DHE by exporters at Bank Indonesia, with a pass-on mechanism for bank transactions with customers (exporters) to Bank Indonesia. The Bank records DHE Term Deposit in the other assets account and liabilities to customers (exporters) in the other liabilities account with same amount.

Pendapatan ditangguhkan terdiri atas pendapatan dari pembelian wesel ekspor yang ditangguhkan.

Unearned income consists of deferred income from export bills purchase.

Beban *standby letter of credit* yang masih harus dibayarkan merupakan beban yang masih harus dibayar atas *standby letter of credit* terkait dengan pinjaman yang diberikan.

Accrued standby letter of credit fees are expense for standby letter of credit related to loans that has not been paid.

Utang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Loan insurance premium payable consists of insurance premium payment from debtors but not yet paid to the insurance companies.

25. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Utang kepada pihak ketiga sebagian besar merupakan utang kepada mitra bisnis Entitas Anak, utang terkait informasi dan teknologi dan informasi (TI) dan utang kepada ASABRI.

Komisi asuransi diterima dimuka merupakan komisi yang diterima dari Allianz atas penjualan produk-produk asuransi kepada nasabah Bank melalui seluruh saluran distribusi Bank.

Utang premi asuransi lainnya merupakan premi terutang atas asuransi karyawan Grup.

Klaim asuransi terdiri dari dana yang diterima dari hasil klaim asuransi atas nasabah kredit pensiun yang meninggal dunia dan pencatatan sementara penerimaan kembali premi asuransi Bank. Dana yang diterima akan berada dalam akun ini sampai Bank dapat mengidentifikasi kontrak terkait.

Lainnya terutama terdiri dari akun tampungan sementara atas penerimaan pembayaran dimuka dari debitur, yang akan didebitkan pada waktu penyelesaian kewajiban kontrak dengan debitur di masa mendatang.

25. OTHER LIABILITIES (continued)

Payables to third parties mainly represent payable to Subsidiary's business partner, payable related to information and technology (IT) and payable to ASABRI.

Up-front insurance commission represents commission received from Allianz for the sales of insurance products to the Bank's customers through all Bank's distribution channels.

Other insurance premium payables are employees insurance premium payables of the Group.

Insurance claim represents funds received from insurance claim on pensioner debtors who passed away and a temporary record of refund of Bank's insurance premium. The received fund would be in this account until the Bank can identify the specific contract.

Others mainly consist of temporary account for upfront funds received from debtors, which will be debited upon future contract settlement period.

26. DANA SYIRKAH TEMPORER

Grup menyajikan dana syirkah temporer sehubungan dengan kepemilikan Bank atas Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan syariah.

26. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

The Group presented temporary syirkah funds in relation to the Bank's ownership in the Subsidiary which engages in sharia banking industry.

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Simpanan nasabah:			*Deposits from customer:*
Tabungan mudharabah	889,954	763,666	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	9,030,866	9,079,595	*Mudharabah time deposits*
	9,920,820	9,843,261	

a. Tabungan mudharabah

a. Mudharabah savings deposits

Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan:

By relationship with counterparties:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Pihak ketiga	887,890	763,070	*Third parties*
Pihak berelasi	2,064	596	*Related parties*
	889,954	763,666	

26. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan) / *26. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)*

a. Tabungan mudharabah (lanjutan) / *a. Mudharabah savings deposits (continued)*

Berdasarkan jenis produk: / *By product type:*

	31 Desember/*December* 2023	31 Desember/*December* 2022	
Tepat Tabungan Platinum Bisnis	482,900	508,799	*Tepat Tabungan Platinum Bisnis*
Tepat Tabungan Platinum	404,721	254,867	*Tepat Tabungan Platinum*
Tepat Tabungan *Payroll*	1,798	-	*Tepat Tabungan Payroll*
Tepat Tabungan Rencana	535	-	*Tepat Tabungan Rencana*
	889,954	763,666	

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan mudharabah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average of pre-determined ratio and profit sharing rate for mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/*December* 2023		
	Nisbah (%)/ *Pre-determined ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	
Tabungan mudharabah	2.52%	2.99%	*Mudharabah savings deposits*

	31 Desember/*December* 2022		
	Nisbah (%)/ *Pre-determined ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	
Tabungan mudharabah	2.68%	3.10%	*Mudharabah savings deposits*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada saldo tabungan mudharabah yang diblokir atau dijadikan jaminan pembiayaan.

As of 31 December 2023 and 2022, there were no mudharabah saving deposits which were blocked or pledged for financing.

b. Deposito mudharabah / *b. Mudharabah time deposits*

	31 Desember/*December* 2023	31 Desember/*December* 2022	
Pihak ketiga	8,997,932	9,043,060	*Third parties*
Pihak berelasi	32,934	36,535	*Related parties*
	9,030,866	9,079,595	

Berdasarkan jangka waktu / ***By time period***

	31 Desember/*December* 2023	31 Desember/*December* 2022	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Lebih dari 1 - 3 bulan	8,721,511	8,786,784	*More than 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	299,222	280,994	*More than 3 - 6 months*
Lebih dari 6 - 9 bulan	-	2,000	*More than 6 - 9 months*
Lebih dari 9 - 12 bulan	10,111	9,795	*More than 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	22	22	*More than 12 months*
	9,030,866	9,079,595	

26. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan) / *TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)*

b. Deposito mudharabah (lanjutan) / *Mudharabah time deposits (continued)*

Berdasarkan sisa umur sampai jatuh tempo / ***By remaining period to maturity date***

	31 Desember/December		
	2023	2022	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Hingga 1 bulan	7,329,602	7,513,812	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 - 3 bulan	1,467,881	1,378,351	*More than 1 - 3 months*
Lebih dari 3 - 6 bulan	227,896	180,550	*More than 3 - 6 months*
Lebih dari 6 - 9 bulan	1,193	3,385	*More than 6 - 9 months*
Lebih dari 9 - 12 bulan	4,294	3,475	*More than 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	-	22	*More than 12 months*
	9,030,866	9,079,595	

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo deposito mudharabah yang diblokir atau dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan sebesar Rp 8.000 (31 Desember 2022: tidak ada deposito yang diblokir).

As of 31 December 2023, mudharabah time deposits which were blocked or pledged for financing amounted to Rp 8,000 (31 December 2022: no deposits were blocked).

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah selama tahun-tahun berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The average of pre-determined ratio (nisbah) and profit sharing rate for mudharabah time deposits during the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/*December* 2023		
	Nisbah (%)/ *Pre-determined Ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	
1 bulan	9.00%	4.88%	*1 month*
3 bulan	8.93%	4.97%	*3 months*
6 bulan	8.76%	4.80%	*6 months*
12 bulan	8.13%	4.79%	*12 months*

	31 Desember/*December 2022*		
	Nisbah (%)/ *Pre-determined Ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	
1 bulan	7.71%	3.82%	*1 month*
3 bulan	7.77%	3.81%	*3 months*
6 bulan	7.89%	3.82%	*6 months*
12 bulan	8.24%	4.23%	*12 months*

27. MODAL SAHAM / *27. SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Based on the share registrant record from Biro Administrasi Efek, the composition of the Bank's shareholders composition as of 31 December 2023 and 2022 was as follows:

Pemegang saham	31 Desember/*December* 2023 Lembar saham/ *Number of shares*	Persentase/ *Percentage*	Jumlah/*Total*	*Shareholder*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7,332,311,297	89.977%	146,646	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
PT Bank Central Asia Tbk	83,052,408	1.019%	1,661	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,007,137	0.147%	240	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Direksi				*The Board of Directors*
Merisa Darwis	222,358	0.003%	4	*Merisa Darwis*
Henoch Munandar	173.756	0.002%	3	*Henoch Munandar*
Hanna Tantani	148,154	0.002%	3	*Hanna Tantani*
Dini Herdini	118,572	0.001%	2	*Dini Herdini*
Darmadi Sutanto	89,120	0.001%	2	*Darmadi Sutanto*
Kaoru Furuya	3,000	0.000%	0	*Kaoru Furuya*
Dewan Komisaris				*The Board of Commissioners*
Ongki Wanadjati Dana	860,804	0.011%	17	*Ongki Wanadjati Dana*
Publik	627,828,065	7.704%	12,558	*Public*
	8,056,814,671	98.867%	161,136	
Saham tresuri	92,292,198	1.133%	1,846	*Treasury shares*
	8,149,106,869	100.000%	162,982	

Pemegang saham	31 Desember/*December* 2022 Lembar saham/ *Number of shares*	Persentase/ *Percentage*	Jumlah/*Total*	*Shareholder*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7,532,311,297	92.431%	150,647	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
PT Bank Central Asia Tbk	83,052,408	1.019%	1,661	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12,007,137	0.147%	240	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Direksi				*The Board of Directors*
Darmadi Sutanto	311,120	0.004%	6	*Darmadi Sutanto*
Merisa Darwis	220,858	0.003%	4	*Merisa Darwis*
Henoch Munandar	172,256	0.002%	3	*Henoch Munandar*
Hanna Tantani	146,654	0.002%	3	*Hanna Tantani*
Dini Herdini	117,072	0.001%	2	*Dini Herdini*
Hiromichi Kubo	64,164	0.001%	1	*Hiromichi Kubo*
Kaoru Furuya	1,500	0.000%	0	*Kaoru Furuya*
Kan Funakoshi	1,500	0.000%	0	*Kan Funakoshi*
Dewan Komisaris				*The Board of Commissioners*
Ongki Wanadjati Dana	860,804	0.011%	17	*Ongki Wanadjati Dana*
Publik	427,377,301	5.244%	8,549	*Public*
	8,056,644,071	98.865%	161,133	
Saham tresuri	92,462,798	1.135%	1,849	*Treasury shares*
	8,149,106,869	100.000%	162,982	

Pemegang saham publik terdiri dari pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% jumlah saham beredar. Seluruh saham yang beredar adalah saham biasa.

Public shareholders consist of shareholders whose ownership are less than 5% of outstanding shares. All the outstanding shares are ordinary shares.

27. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan komposisi kepemilikan saham

Sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama adalah minimum sebesar 7,5% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh Bank (Saham *Free Float*). Oleh karenanya, SMBC telah menjual 200 juta lembar sahamnya pada tanggal 12 Desember 2023 dengan harga jual Rp 2.600 (nilai penuh) per saham. Pemenuhan ketentuan Saham *Free Float* ini telah menyebabkan kepemilikan SMBC berubah dari 92,43% ke 89,98%.

27. SHARE CAPITAL (continued)

Changes in share ownership composition

In accordance with the Indonesia Stock Exchange Regulation, the number of shares owned by non controlling shareholders and non majority shareholders is at the minimum of 7.5% of total issued shares of the Bank (Free Float Shares). Therefore, SMBC sold 200 million of its shares on 12 December 2023 with the selling price of Rp 2,600 (full amount) per share. The compliance with Free Float Shares requirement has changed the SMBC's ownership from 92.43% to 89.98%.

28. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 13 April 2023 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn sebagai berikut: (1) Bank akan membagikan dividen kepada para pemegang saham sejumlah 20% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp 619.140 atau kurang lebih sebesar Rp 76,8 per lembar saham (nilai penuh); (2) Bank tidak menyisikan cadangan wajib Bank, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi; dan (3) Sisa dari total laba bersih yang diperoleh Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 setelah dikurangi penyisihan Dividen dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Pada tanggal 12 Mei 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai Bank kepada pemegang saham sesuai Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Mei 2023 (tanggal pencatatan).

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan akta notaris No. 44 tanggal 21 April 2022 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn sebagai berikut: (1) Bank membukukan saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp 700.000 (nilai penuh) dan (2) sisa dari total laba bersih yang diperoleh Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

28. APPROPRIATION OF NET INCOME

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2022 based on notarial deed No. 31 dated 13 April 2023 of Notary Ashoya Ratam, S.H., Mkn as follows: (1) the Bank shall distribute dividend to the shareholders for 20% (twenty percent) of Net Profit or more or less Rp 619,140 or estimated at Rp 76,8 per share (full amount); (2) the Bank not allocate any reserve of the Bank, in regards to the minimum statutory reserve as stipulated in the Article 70 of the Limited Liability Company Law, i.e. minimum 20% of the Issued and Fully Paid-Up Capital of the Company has been complied; and (3) the remaining balance of the net income earned by the Bank in financial year ended on 31 December 2022 after being deducted with the allocation for Dividend shall be declared as unappropriated retained earnings.

On 12 May 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia has distributed Bank's cash dividends to Shareholders based on Shareholders List on 3 May 2023 (recording date).

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2021 based on notarial deed No. 44 dated 21 April 2022 of Notary Ashoya Ratam, S.H., Mkn as follows: (1) the Bank booked appropriated retained earnings amounting to Rp 700,000 (full amount) and (2) the remaining balance of the net income earned by the Bank in financial year ended on 31 December 2021 shall be declared as unappropriated retained earnings.

29. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH / *29. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	2022	
Pendapatan bunga			***Interest income***
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Pinjaman yang diberikan	11,575,894	9,454,373	*Loans*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	668,093	450,674	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Efek-efek	587,357	576,758	*Securities*
Giro dan penempatan pada bank-bank lain	27,519	9,764	*Current accounts and placements with other banks*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	436	-	*Reverse repo*
	12,859,299	10,491,569	
Pihak berelasi:			***Related parties:***
Pinjaman yang diberikan	210,192	30,516	*Loans*
Efek-efek	-	3,767	*Securities*
Penempatan pada bank-bank lain	-	4	*Placements with other banks*
	210,192	34,287	
	13,069,491	10,525,856	
Pendapatan syariah			***Sharia income***
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	5,299,422	5,048,219	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya - Qardh	182	120	*Income from other receivables - Qardh*
Pendapatan dari bagi hasil - pembiayaan musyarakah	4,727	3,289	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	441,851	322,162	*Other main operating income*
	5,746,182	5,373,790	
	18,815,673	15,899,646	

Pendapatan usaha utama lainnya dari pendapatan syariah merupakan pendapatan dari investasi pada surat berharga, SBIS, FASBIS, SIMA dan penempatan pada deposito.

Other main operating income from sharia income are income from investment in marketable securities, SBIS, FASBIS, SIMA and placement in deposits .

30. BEBAN BUNGA DAN HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER / *30. INTEREST EXPENSE AND THIRD PARTIES' SHARES ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	2022	
Beban bunga			***Interest expenses***
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Simpanan nasabah			*Customer deposits*
Deposito berjangka	2,287,754	1,818,984	*Time deposits*
Deposito *on call*	656,555	1,534	*Deposits on call*
Giro	447,275	327,628	*Current accounts*
Tabungan	200,387	142,012	*Saving deposits*
	3,591,971	2,290,158	
Pinjaman yang diterima	814,930	390,695	*Borrowings*
Simpanan dari bank-bank lain	72,452	60,648	*Deposits from other banks*
Utang obligasi (Catatan 20)	16,013	73,082	*Bonds payables (Note 20)*
Liabilitas sewa	18,162	26,480	*Lease liabilities*
Dipindahkan	4,513,528	2,841,063	*Carry forward*

30. BEBAN BUNGA DAN HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

30. INTEREST EXPENSE AND THIRD PARTIES' SHARES ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Pindahan	4,513,528	2,841,063	*Carried forward*
Beban bunga			***Interest expenses***
Pihak berelasi:			***Related parties:***
Simpanan nasabah			*Customer deposits*
Deposito *on call*	13,535	-	*Deposits on call*
Deposito berjangka	6,205	46,654	*Time deposits*
Tabungan	365	2,816	*Saving deposits*
Giro	11	99	*Current accounts*
	20,116	49,569	
Pinjaman yang diterima	1,526,140	880,225	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	203,739	105,471	*Subordinated loans*
Simpanan dari bank-bank lain	21,654	563	*Deposits from other banks*
	1,771,649	1,035,828	
Beban syariah			***Sharia expenses***
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer			*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Pihak ketiga	483,643	338,403	*Third parties*
Pihak berelasi	1,970	1,787	*Related parties*
Pinjaman yang diterima	820	4,250	*Borrowings*
	486,433	344,440	
	6,771,610	4,221,331	

31. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

31. OTHER OPERATING INCOME

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Pendapatan dari penerimaan kembali kredit yang dihapusbukukan	341,564	243,709	*Income from recovery of written-off loans*
Pendapatan administrasi dana pihak ketiga	317,635	315,821	*Third party fund administration income*
Pendapatan komisi atas pinjaman yang diberikan	278,551	193,369	*Loan commission income*
Pendapatan dari penjualan produk investasi	96,677	119,833	*Income from sale of investment products*
Denda pelunasan dipercepat dan keterlambatan	92,658	84,026	*Early termination penalty and late penalty income*
Pendapatan transaksi perdagangan efek-efek - bersih	66,704	38,619	*Securities trading income - net*
Pendapatan dari komisi asuransi	54,570	25,183	*Insurance commission income*
Jasa penerbitan garansi	31,946	30,069	*Guarantee fees*
Pendapatan komisi lainnya	21,766	77,379	*Others commission income*
Penerimaan kembali dari kerugian operasional	10,560	3,459	*Operational loss recovery*
Jasa kliring dan transfer	1,893	17,802	*Clearing and transfer fees*
Lain-lain	109,425	78,861	*Others*
	1,423,949	1,228,130	

Pendapatan komisi atas pinjaman yang diberikan adalah pendapatan administrasi yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan oleh bank.

Loan commission income are administration income received from bank's loans.

Pendapatan dari penjualan produk investasi adalah pendapatan komisi dari pihak ketiga atas produk investasi yang dijual melalui Bank.

Income from sale of investment products are commission income received from third party related with invesment product that are sold through the Bank.

31. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA (lanjutan)

Pendapatan dari komisi asuransi adalah pendapatan atas komisi yang diterima oleh Bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan perusahaan asuransi: Allianz, Avrist, (Catatan 11n) dan asuransi jaminan.

Lain-lain termasuk jasa *cash handling*, jasa *payment point* dan pendapatan dividen.

31. OTHER OPERATING INCOME (continued)

Insurance commission income are income from commission received by the Bank based on agreements with insurance companies: Allianz, Avrist, (Note 11n) and insurance of collateral.

Others consist of cash handling services, payment point service and dividend income.

32. BEBAN KEPEGAWAIAN / *32. PERSONNEL EXPENSES*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	2022	
Gaji, upah, bonus dan tantiem	2,173,303	1,992,365	*Salaries, wages, bonus and tantiem*
Imbalan pascakerja	128,404	51,675	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	9,163	7,150	*Other long term employee benefits*
Tunjangan hari raya	445,952	468,729	*Holiday allowances*
Tunjangan pajak	227,232	208,955	*Tax allowances*
Tunjangan kesehatan	198,821	164,366	*Medical benefits*
Tunjangan representasi	156,136	115,813	*Representation allowance*
Jamsostek	100,042	91,772	*Jamsostek*
Pendidikan dan latihan	93,275	75,110	*Training and education*
Tunjangan program kepemilikan kendaraan	60,398	57,957	*Car ownership program allowance*
Tunjangan telepon	41,140	38,530	*Telephone allowance*
Tunjangan perumahan	21,543	21,265	*Housing allowance*
Lain-lain	101,069	109,632	*Others*
	3,756,478	3,403,319	

Termasuk dalam beban kepegawaian adalah gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Lain-lain terdiri dari tunjangan *marketing,* akomodasi karyawan dan lainnya.

Included under personnel expenses are salaries and other compensations paid to the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.

Others consist of marketing allowances, employees accomodation and others.

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	2022	
Jasa dari pihak ketiga dan perlengkapan kantor	838,500	862,218	*Services from third parties and office supplies*
Sewa	603,837	533,802	*Rent*
Beban asuransi	478,693	470,738	*Insurance expense*
Amortisasi piranti lunak (Catatan 15)	316,310	351,114	*Amortization of software (Note 15)*
Promosi dan iklan	282,754	260,947	*Promotion and advertising*
Penyusutan aset tetap (Catatan 14)	238,251	257,957	*Depreciation of fixed assets (Note 14)*
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	211,586	225,718	*Depreciation of right-of-use assets (Note 14)*
Jasa profesional	177,600	164,660	*Professional fees*
Pemeliharaan dan perbaikan	103,330	84,290	*Repairs and maintenance*
Lain-lain	22,905	60,571	*Others*
	3,273,766	3,272,015	

Jasa dari pihak ketiga dan perlengkapan kantor terdiri dari beban honorarium, perjalanan dinas, tagihan kantor pos, beban listrik, air dan telepon, komunikasi data, peralatan kantor dan jasa pengiriman.

Lain-lain termasuk pajak reklame, pajak kendaraan, pajak daftar perusahaan, dan beban lain-lain Entitas Anak.

Services from third parties and office supplies consist of expenses from honorarium, business travelling, post office billing, uitilities, data communication, office supplies, and delivery services.

Others consist of advertisement tax, vehicle tax, company registration tax and Subsidiary's miscellaneous expenses.

34. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *34. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	2022	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11g)	3,029,571	1,754,676	*Loans and sharia financing/ receivables (Note 11g)*
Komitmen pinjaman yang diberikan	(36,146)	34,359	*Loan commitments issued*
Efek-efek (Catatan 8h)	(365)	481	*Securities (Note 8h)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain (Catatan 7g)	(167)	(42)	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7g)*
Giro pada bank-bank lain (Catatan 6)	(256)	(44)	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Tagihan akseptasi (Catatan 10d)	4,217	(1,576)	*Acceptance receivables (Note 10d)*
Aset lain-lain (Catatan 16)	53,065	52,313	*Other assets (Note 16)*
Penyisihan selama tahun berjalan	3,049,919	1,840,167	*Provision during the year*

35. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA / *35. OTHER OPERATING EXPENSES*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	2022	
Beban komisi dan administrasi	384,297	311,269	*Commissions and administrative fees*
Iuran tahunan OJK	96,333	94,861	*OJK annual fee*
Kerugian terkait risiko operasional	19,193	7,620	*Loss from operational risk*
Beban rumah tangga	13,330	13,485	*Household expenses*
Beban pengembangan komunitas	7,263	40,544	*Community development expenses*
Rekrutmen	4,176	3,837	*Recruitment*
Beban pengurusan klaim asuransi	2,985	3,466	*Insurance claim expenses*
Beban retribusi	2,834	2,717	*Retribution expenses*
Lain-lain	45,897	39,954	*Others*
	576,308	517,753	

Lain-lain termasuk beban jamuan, beban keanggotaan dan beban penyelesaian kredit.

Others consist of entertainment expenses, membership fees and credit settlement charges.

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI / *36. RELATED PARTY INFORMATION*

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

In the normal course of business, the Group engages in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

Di bawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Grup, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following is a summary of related parties who have transactions with the Group, including the nature of the relationships and transactions:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationships*	Sifat transaksi/ *Nature of transactions*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	Pemegang saham pengendali/ *Controlling shareholders*	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif; liabilitas akseptasi/ *Current accounts with other banks; deposits from other banks; derivative transactions; acceptance payables*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura/*Singapore*	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; liabilitas akseptasi; pinjaman yang diterima; pinjaman subordinasi; transaksi derivatif/ *Current accounts with other banks; deposits from other banks; acceptance payables; borrowings; subordinated loans; derivative transactions*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Hong Kong/*Hong Kong Branch*	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif/ *Current accounts with other banks; deposits from other banks; derivative transactions*

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationships*	Sifat transaksi/ *Nature of transactions*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank International plc, London	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Dusseldorf/*Dusseldorf Branch*	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Giro pada bank lain; simpanan dari bank lain; transaksi derivatif/ *Current accounts with other banks; deposits from other banks; derivative transactions*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Seoul	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Efek-efek/ *Securities*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New York	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New Delhi	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*
PT SMFL Leasing Indonesia	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ *Deposits from customers; loans; derivative transactions*
PT Oto Multiartha	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ *Deposits from customers; loans; derivative transactions*
PT Summit Oto Finance	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Simpanan nasabah; pinjaman yang diberikan; transaksi derivatif/ *Deposits from customers; loans; derivative transactions*
PT INA Sekuritas Indonesia (dahulu bernama PT Nikko Sekuritas Indonesia)	Perusahaan afiliasi/*affiliated company*	Simpanan nasabah/ *Deposits from customers*
PT SBCS Indonesia	Perusahaan afiliasi/affiliated company	Simpanan nasabah/ *Deposits from customers*
Personil manajemen kunci/ *Key Management Personnel*	Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif/*Directors, Commissioners and executive employees*	Pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah, pembayaran kompensasi dan remunerasi, imbalan pascakerja/ *Loans, deposits from customers, payments of compensation and remuneration, post-employment benefits*

Transaksi dengan pihak berelasi

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with related parties

The outstanding balances and detail transactions with related parties were as follows:

(a) Giro pada bank-bank lain

(a) Current accounts with other banks

	31 Desember/*December*		
	2023	2022	
Giro pada bank-bank lain			*Current accounts with other banks*
Pihak berelasi	462,061	639,707	*Related party*
Persentase terhadap jumlah aset	0.23%	0.31%	*Percentage to total assets*

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan) / *36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)*

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) / ***Transactions with related parties** (continued)*

(a) Giro pada bank-bank lain / *(a) Current accounts with other banks*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Pendapatan bunga	-	-	*Interest income*
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	-	-	*Percentage to total interest income*

(b) Efek-efek / *(b) Securities*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Efek-efek			*Securities*
Pihak berelasi	-	185,510	*Related party*
	-	185,510	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	2,075	*Accrued interest income*
	-	187,585	
Persentase terhadap jumlah aset	-	0.09%	*Percentage to total assets*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Pendapatan bunga	-	3,767	*Interest income*
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	-	0.04%	*Percentage to total interest income*

(c) Tagihan derivatif / *(c) Derivative receivables*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Tagihan derivatif			*Derivative receivables*
Pihak berelasi	496,225	615,160	*Related party*
Persentase terhadap jumlah aset	0.25%	0.29%	*Percentage to total assets*

(d) Pinjaman yang diberikan / *(d) Loans*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Pinjaman yang diberikan			*Loans*
Personil manajemen kunci	17,944	16,504	*Key management personnel*
Pihak berelasi	3,755,420	2,370,889	*Related parties*
	3,773,364	2,387,393	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	45,016	19,863	*Accrued interest income*
	3,818,380	2,407,256	
Persentase terhadap jumlah aset	1.89%	1.15%	*Percentage to total assets*

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

36. RELATED PARTY INFORMATION *(continued)*

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties *(continued)*

(d) Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

(d) Loans (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Pendapatan bunga:			*Interest income:*
Personil manajemen kunci	584	454	*Key management personnel*
Pihak berelasi	209,608	30,062	*Related parties*
	210,192	30,516	
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	1.61%	0.29%	*Percentage to total interest income*

Suku bunga atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebesar 5% - 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman antara 1 - 20 tahun. Pinjaman tersebut diberikan tanpa adanya jaminan tertentu.

Interest rate charged on loan to key management personnel amounting 5% - 8% per annum with term between 1 - 20 years. Such loan is given without any specific collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

There was no impairment on the loan to key management personnel as of 31 December 2023 and 2022.

(e) Simpanan nasabah

(e) Deposits from customers

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Dana pihak ketiga			*Third party funds*
Personil manajemen kunci:			*Key management personnel:*
Giro	-	-	*Current accounts*
Tabungan	88,170	59,543	*Savings deposits*
Deposito berjangka dan deposito *on call*	106,928	141,457	*Time deposits and deposits on call*
	195,098	201,000	
Pihak berelasi:			*Related parties:*
Giro	50,003	57,708	*Current accounts*
Deposito *on call*	239,150	-	*Deposits on call*
Deposito berjangka	25	822,176	*Time deposits*
	289,178	879,884	
	484,276	1,080,884	
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	728	1,522	*Accrued interest expense*
	485,004	1,082,406	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.32%	0.68%	*Percentage to total liabilities*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	**2022**	
Beban bunga	20,116	49,570	*Interest expense*
Persentase terhadap jumlah beban bunga	0.32%	1.28%	*Percentage to total interest expenses*

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan) / *36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)*

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) / ***Transactions with related parties** (continued)*

(e) Simpanan nasabah (lanjutan) / *(e) Deposits from customers (continued)*

Dana pihak ketiga ditempatkan dalam giro, tabungan maupun deposito berjangka. Tingkat suku bunga yang diberikan oleh Bank adalah sebesar 0,01% - 6,00%. Untuk deposito berjangka tergantung tenor dan jumlah pokok deposito.

Third party funds are placed on current account, saving accounts and time deposits. Interest rate given by the Bank for the placement amounting to 0.01% - 6.00%. For time deposit depends on tenor and principal amount.

(f) Simpanan dari bank-bank lain / *(f) Deposits from other banks*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Simpanan dari bank-bank lain	9,561,059	147,352	*Deposits from other banks*
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	6,697	-	*Accrued interest expenses*
	9,567,756	147,352	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	6.37%	0.09%	*Percentage to total liabilities*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December* 2023	2022	
Beban bunga	21,654	563	*Interest expense*
Persentase terhadap jumlah beban bunga	0.34%	0.01%	*Percentage to total interest expenses*

(g) Liabilitas derivatif / *(g) Derivative liabilities*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Liabilitas derivatif			*Derivative liabilities*
Pihak berelasi	57,285	124,091	*Related party*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.04%	0.08%	*Percentage to total liabilities*

(h) Liabilitas akseptasi / *(h) Acceptance payables*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Liabilitas akseptasi			*Acceptance payables*
Pihak berelasi	163,383	199,232	*Related party*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.11%	0.12%	*Percentage to total liabilities*

(i) Pinjaman yang diterima / *(i) Borrowings*

	31 Desember/*December* 2023	2022	
Pinjaman yang diterima	18,569,798	37,257,744	*Borrowings*
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	13,110	52,808	*Accrued interest expenses*
	18,582,908	37,310,552	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	12.37%	23.33%	*Percentage to total liabilities*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December* 2023	2022	
Beban bunga			*Interest expense*
Pihak berelasi	1,526,140	880,225	*Related party*
Persentase terhadap jumlah beban bunga	24.28%	22.70%	*Percentage to total interest expenses*

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan) / *36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)*

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) / ***Transactions with related parties** (continued)*

(j) Pinjaman subordinasi / *(j) Subordinated loans*

	31 Desember/*December* 2023	31 Desember/*December* 2022	
Pinjaman subordinasi	3,079,400	3,113,500	*Subordinated loans*
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	10,960	12,078	*Accrued interest expenses*
	3,090,360	3,125,578	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	2.06%	1.95%	*Percentage to total liabilities*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December* 2023	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December* 2022	
Beban bunga:			*Interest expense:*
Pihak berelasi	203,739	105,471	*Related party*
Persentase terhadap jumlah beban bunga	3.24%	2.72%	*Percentage to total interest expenses*

(k) Dana syirkah temporer / *(k) Temporary syirkah funds*

	31 Desember/*December* 2023	31 Desember/*December* 2022	
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
Personil manajemen kunci:			*Key management personnel:*
Tabungan mudharabah	2,064	596	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	32,934	36,535	*Mudharabah time deposits*
	34,998	37,131	
Persentase terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil syirkah temporer	0.35%	0.38%	*Percentage to total third parties' shares on return of temporary syirkah funds*

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December* 2023	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December* 2022	
Hak atas bagi hasil dana syirkah temporer	1,970	1,787	*Shares on return of temporary syirkah funds*
Persentase terhadap beban bagi hasil	0.40%	0.52%	*Percentage to total profit-sharing*

(l) Kompensasi dan remunerasi personil manajemen kunci / *(l) Compensation and remuneration of key management personnel*

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut: / *The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:*

	31 Desember/*December* 2023						
	Direksi/*Board of Directors*		Dewan Komisaris/*Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/*Other key management personnel*		
	%*	Rp	%*	Rp	%*	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	4.67%	175,252	1.43%	53,564	9.81%	368,423	*Salaries and other short-term employee benefits*
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	0.42%	15,815	*Post-employment benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.02%	619	*Other long-term benefits*
Jumlah	4.67%	175,252	1.43%	53,564	10.25%	384,857	*Total*

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan) / *36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)*

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) / ***Transactions with related parties** (continued)*

(l) Kompensasi dan remunerasi personil Manajemen kunci (lanjutan) / *(l) Compensation and remuneration of key management personnel (continued)*

	31 Desember/*December* 2022						
	Direksi/*Board of Directors*		Dewan Komisaris/*Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/*Other key management personnel*		
	%*	Rp	%*	Rp	%*	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	5.52%	187,940	0.68%	23,076	10.75%	365,811	*Salaries and other short-term employee benefits*
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	0.20%	6,970	*Post-employment benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.01%	455	*Other long-term benefits*
Jumlah	5.52%	187,940	0.68%	23,076	10.96%	373,236	*Total*

*) terhadap jumlah beban kepegawaian / **) % to total personnel expenses*

(m) Komitmen dan kontinjensi / *(m) Commitments and contingencies*

	31 Desember/*December*		
	2023	2022	
Aset komitmen			***Committed assets***
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	37,247,514	19,161,055	*Unused borrowing facilities*
Liabilitas komitmen			***Committed liabilities***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	4,301,821	3,385,393	*Unused credit facilities to customers*
Liabilitas kontinjensi			***Contingent liabilities***
Garansi yang diberikan	30,000	-	*Guarantees provided*

37. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *37. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	31 Desember/*December*		
	2023	2022	
Aset komitmen			***Committed assets***
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik			*Unused borrowing facilities*
- Pihak ketiga	3,079,400	1,500,000	*Third parties -*
- Pihak berelasi	37,247,514	19,161,055	*Related parties -*
	40,326,914	20,661,055	
Aset kontinjensi - Pihak ketiga			***Contingent assets - Third parties***
Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan yang bermasalah	275,731	173,116	*Interest receivable on non-performing loans*
Garansi yang diterima	30,270,312	31,249,359	*Guarantees received*
	30,546,043	31,422,475	
Liabilitas komitmen			***Committed liabilities***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - *committed*			*Unused credit facilities to customers - committed*
- Pihak ketiga	10,870,217	13,315,311	*Third parties -*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - *uncommitted*			*Unused credit facilities to customers - uncommitted*
- Pihak ketiga	100,533,280	94,784,040	*Third parties -*
- Pihak berelasi	4,301,821	3,385,393	*Related parties -*
Dipindahkan	115,705,318	111,484,744	*Carry forward*

37. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *37. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis (lanjutan) / *a. By type (continued)*

	31 Desember/*December*		
	2023	2022	
Liabilitas komitmen (lanjutan)			***Committed liabilities** (continued)*
Pindahan	115,705,318	111,484,744	*Carried forward*
Fasilitas kredit kepada bank yang belum digunakan - *uncommitted* - Pihak ketiga	74,196	26,748	*Unused credit facilities to banks - uncommitted - Third parties*
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan - Pihak ketiga	721,016	961,523	*Irrevocable letters of credit - Third parties*
	116,500,530	112,473,015	
Liabilitas kontinjensi - Pihak ketiga			***Contingent liabilities - Third parties***
Garansi yang diberikan			*Guarantees provided*
- Pihak ketiga	5,425,734	5,608,120	*Third parties -*
- Pihak berelasi	30,000	-	*Related parties -*
	5,455,734	5,608,120	

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectability*

	31 Desember/*December*		
	2023	2022	
Lancar	120,577,548	116,218,404	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	1,378,716	1,812,731	*Special Mention*
Kurang Lancar	-	50,000	*Substandard*
Diragukan	-	-	*Doubtful*
Macet	-	-	*Loss*
	121,956,264	118,081,135	

c. Kasus hukum / *c. Litigation cases*

Bank menghadapi beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi dan klaim yang belum terselesaikan, yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Adalah tidak mungkin untuk memastikan apakah Bank akan memenangkan atau tidak menang atas masalah atau tuntutan hukum tersebut. Namun demikian, manajemen Bank yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan atau likuiditas Bank.

The Bank is a party to various unresolved legal actions, administrative proceedings, and claims in the ordinary course of its business. It is not possible to predict with certainty whether or not the Bank will ultimately be successful or not successful in any of these legal matters. However, the Bank's management does not expect that the results in any of these proceedings will have a material adverse effect on the Bank's results of operations, financial position or liquidity.

38. SEGMEN OPERASI / *38. OPERATING SEGMENT*

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk Direksi, yang bertindak sebagai pengambil keputusan operasi, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Grup telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan PSAK 5, "Segmen Operasi".

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the Directors, as the chief operating decision maker, who are responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. All operating segments used by the Group meet the definition of a reportable segment under PSAK 5, "Operating Segment".

Grup memiliki 5 (lima) pelaporan segmen, berdasarkan produk usaha, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

The Group has 5 (five) reportable segments, in accordance with the business product, as set out in the table below.

38. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Ritel

Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah pensiunan dan nasabah individual lainnya.

Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM)

Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Penghimpunan dana dan tresuri

Terdiri dari aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga dan bank lain, serta aktivitas tresuri termasuk pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan.

Korporasi

Terdiri dari pinjaman dan layanan yang diberikan dari nasabah korporasi yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Syariah

Merupakan lini segmen operasi atas Entitas Anak yang dimulai dari tanggal efektif beroperasi sebagai bank umum syariah.

Terdiri dari pembiayaan syariah dan dana pihak ketiga dari nasabah syariah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Dalam mengalokasikan beban operasional, manajemen mengatribusikan beberapa pos beban operasional sesuai dengan kebijakan pelaporan internal Grup.

Informasi pelaporan segmen adalah sebagai berikut:

***38. OPERATING SEGMENT** (continued)*

Retail

Consists of loans to pensioners and other individual customers.

Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

Consists of loans to micro, small & medium enterprise customers for commercial purpose.

Funding and treasury

Consists of funding business activity in raising funds from third party and other banks, and centralised treasury operations including borrowings and securities issued.

Corporate

Consists of loans and services from corporate customers which related to commercial purpose.

Sharia

Represents a line of operating segments of Subsidiary which started from the effective date to operate as a sharia commercial bank.

Consists of sharia financing and third party funds from sharia customers which related to commercial purpose.

In allocating operating expenses, management attributed some of its expenses based on Group's internal reporting policy.

The reportable segment information was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*							
	Ritel/ *Retail*	**UMKM/ *MSME***	**Penghimpunan dana dan tresuri/ *Funding and Treasury***	**Korporasi/ *Corporate***	**Syariah/ *Sharia***	**Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Pendapatan dan beban operasional								***Operating income and expenses***
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	3,842,949	1,208,448	1,153,880	6,864,214	5,746,182	-	18,815,673	*External interest and sharia income*
Pendapatan bunga antar segmen	(1,966,935)	(694,991)	7,979,661	(5,317,735)	-	-	-	*Inter-segment interest income*
Beban bunga antar segmen	99,394	36,584	(3,550,414)	3,414,436	-	-	-	*Inter-segment interest expense*
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(9,473)	(11,227)	(4,077,996)	(2,186,482)	(486,432)	-	(6,771,610)	*Interest expense and sharia profit sharing*
Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan-bersih	1,965,935	538,814	1,505,131	2,774,433	5,259,750	-	12,044,063	***Net reportable segment interest and sharia income***

38. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *38. OPERATING SEGMENT (continued)*

Informasi pelaporan segmen adalah sebagai berikut: / *The reportable segment information was as follows:*

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*							
	Ritel/ *Retail*	**UMKM/ *MSME***	**Penghimpunan dana dan tresuri/ *Funding and Treasury***	**Korporasi/ *Corporate***	**Syariah/ *Sharia***	**Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Pendapatan operasional lainnya:								***Other operating income:***
Pendapatan operasional lainnya	194,157	334,504	1,075,173	257,981	60,949	(498,815)	1,423,949	*Other operating income*
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	287	93,261	556,838	(892)	-	649,494	*Net gain on foreign exchange and derivative transactions*
Pendapatan operasional lainnya	194,157	334,791	1,168,434	814,819	60,057	(498,815)	2,073,443	***Other operating income***
Beban operasional lainnya								***Other operating expenses***
Beban operasional lainnya	(1,650,923)	(717,917)	(2,023,436)	(1,171,656)	(2,042,620)	-	(7,606,552)	*Other operating expenses*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(296,016)	(120,903)	(278)	(734,605)	(1,898,117)	-	(3,049,919)	*Allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(1,946,939)	(838,820)	(2,023,714)	(1,906,261)	(3,940,737)	-	(10,656,471)	***Other operating expenses***
Pendapatan operasional lainnya - bersih	(1,752,782)	(504,029)	(855,280)	(1,091,442)	(3,880,680)	(498,815)	(8,583,028)	***Net reportable operational segment income***
Pendapatan (beban) non-operasional	845	1,742	(6,745)	(20)	825	-	(3,353)	*Non-operating income (expenses)*
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	213,998	36,527	643,106	1,682,971	1,379,895	(498,815)	3,457,682	*Segment income (loss) before income tax*
Beban pajak penghasilan	(39,525)	(6,747)	(118,780)	(310,840)	(299,306)	-	(775,198)	*Income tax expense*
Laba (rugi) bersih	**174,473**	**29,780**	**524,326**	**1,372,131**	**1,080,589**	**(498,815)**	**2,682,484**	***Net income (loss)***

	31 Desember/*December* 2023							
	Ritel/ *Retail*	**UMKM/ *MSME***	**Penghimpunan dana dan tresuri/ *Funding and Treasury***	**Korporasi/ *Corporate***	**Syariah/ *Sharia***	**Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Aset								***Assets***
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan-bersih	25,318,456	13,669,400	-	102,781,449	10,173,945	-	151,943,250	*Net loans/financing*
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima dari pinjaman/ pembiayaan yang diberikan	223,575	43,394	-	665,937	164,890	-	1,097,796	*Accrued interest/ margin income from loans/ financing*
Aset lain-lain	-	-	27,673,435	-	10,076,959	(83,528)	37,666,866	*Other assets*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	152,967	-	75,512	-	228,479	*Accrued interest income*
Jumlah aset yang dialokasikan	25,542,031	13,712,794	27,826,402	103,447,386	20,491,306	(83,528)	190,936,391	*Total allocated assets*
Aset yang tidak dialokasikan*							10,512,001	*Unallocated assets**
Jumlah aset							**201,448,392**	***Total assets***

*) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset takberwujud, liabilitas lainnya dan akrual.

**) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accruals.*

38. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *38. OPERATING SEGMENT (continued)*

	31 Desember/*December* 2023							
	Ritel/ *Retail*	**UMKM/ *MSME***	**Penghimpunan dana dan tresuri/ *Funding and Treasury***	**Korporasi/ *Corporate***	**Syariah/ *Sharia***	**Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Liabilitas								***Liabilities***
Simpanan nasabah	2,155,288	844,577	35,639,500	57,416,394	2,221,997	-	98,277,756	*Customer deposits*
Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	-	-	179,647	-	21,951	-	201,598	*Undistributed revenue sharing*
Liabilitas lain-lain	-	-	45,302,910	-	-	(3,806)	45,299,104	*Other liabilities*
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	170,977	-	-	-	170,977	*Accrued interest expenses*
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	2,155,288	844,577	81,293,034	57,416,394	2,243,948	(3,806)	143,949,435	*Total allocated liabilities*
Liabilitas yang tidak dialokasikan*							6,295,033	*Unallocated liabilities**
Jumlah liabilitas							**150,244,468**	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,920,820**	**-**	**9,920,820**	***Temporary syirkah fund***

*) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset takberwujud, liabilitas lainnya dan akrual.

**) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accruals.*

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/ *Year ended 31 December 2022*							
	Ritel/ *Retail*	**UMKM/ *MSME***	**Penghimpunan dana dan tresuri/ *Funding and Treasury***	**Korporasi/ *Corporate***	**Syariah/ *Sharia***	**Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Pendapatan dan beban operasional								***Operating income and expenses***
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	4,265,547	981,674	960,274	4,318,361	5,373,790	-	15,899,646	*External interest and sharia income*
Pendapatan bunga antar segmen	(2,259,272)	(351,222)	5,192,551	(2,582,057)	-	-	-	*Inter-segment interest income*
Beban bunga antar segmen	91,090	20,948	(2,320,670)	2,208,632	-	-	-	*Inter-segment interest expense*
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(21,769)	(4,349)	(2,577,615)	(1,273,158)	(344,440)	-	(4,221,331)	*Interest expense and sharia profit sharing*
Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan-bersih	2,075,596	647,051	1,254,540	2,671,778	5,029,350	-	11,678,315	***Net reportable segment interest and sharia income***
Pendapatan operasional lainnya:								***Other operating income:***
Pendapatan operasional lainnya	160,206	218,666	840,897	279,535	61,818	(332,992)	1,228,130	*Other operating income*
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	286	189,913	590,458	3,828	-	784,485	*Net gain on foreign exchange and derivative transactions*
Pendapatan operasional lainnya	160,206	218,952	1,030,810	869,993	65,646	(332,992)	2,012,615	***Other operating income***
Beban operasional lainnya								***Other operating expenses***
Beban operasional lainnya	(1,587,330)	(881,123)	(1,904,827)	(950,315)	(1,869,492)	-	(7,193,087)	*Other operating expenses*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(234,311)	(269,769)	482	(391,517)	(945,052)	-	(1,840,167)	*Allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(1,821,641)	(1,150,892)	(1,904,345)	(1,341,832)	(2,814,544)	-	(9,033,254)	***Other operating expenses***
Pendapatan operasional lainnya - bersih	(1,661,435)	(931,940)	(873,535)	(471,839)	(2,748,898)	(332,992)	(7,020,639)	***Net reportable operational segment income***
Pendapatan (beban) non-operasional	1,516	698	(4,502)	(11)	1,942	-	(357)	*Non-operating income (expenses)*
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	415,677	(284,191)	376,503	2,199,928	2,282,394	(332,992)	4,657,319	*Segment income (loss) before income tax*
Beban pajak penghasilan	(80,581)	55,092	(72,987)	(426,465)	(502,814)	-	(1,027,755)	*Income tax expense*
Laba (rugi) bersih	335,096	(229,099)	303,516	1,773,463	1,779,580	(332,992)	3,629,564	***Net income (loss)***

38. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *38. OPERATING SEGMENT (continued)*

	31 Desember 2022/*31 December 2022*							
	Ritel/ *Retail*	UMKM/ *MSME*	Penghimpunan dana dan tresuri/ *Funding and Treasury*	Korporasi/ *Corporate*	Syariah/ *Sharia*	Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
Aset								***Assets***
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan-bersih	25,854,020	10,722,188	-	95,209,651	10,758,538	-	142,544,397	*Net loans/financing*
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima dari pinjaman/ pembiayaan yang diberikan	221,321	32,274	-	486,163	138,776	-	878,534	*Accrued interest/ margin income from loans/ financing*
Aset lain-lain	-	-	45,642,915	-	9,237,945	(8,982)	54,871,878	*Other assets*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	152,722	-	64,941	-	217,663	*Accrued interest income*
Jumlah aset yang dialokasikan	26,075,341	10,754,462	45,795,637	95,695,814	20,200,200	(8,982)	198,512,472	*Total allocated assets*
Aset yang tidak dialokasikan*							10,657,232	*Unallocated assets**
Jumlah aset							**209,169,704**	***Total assets***
Liabilitas								***Liabilities***
Simpanan nasabah	2,174,755	602,187	34,994,775	65,046,302	2,205,268	-	105,023,287	*Customer deposits*
Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	-	-	145,624	-	18,996	-	164,620	*Undistributed revenue sharing*
Liabilitas lain-lain	-	-	48,301,467	-	100,000	(10,096)	48,391,371	*Other liabilities*
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	169,394	-	-	-	169,394	*Accrued interest expenses*
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	2,174,755	602,187	83,611,260	65,046,302	2,324,264	(10,096)	153,748,672	*Total allocated liabilities*
Liabilitas yang tidak dialokasikan*							6,164,747	*Unallocated liabilities**
Jumlah liabilitas							**159,913,419**	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,843,261**	**-**	**9,843,261**	***Temporary syirkah fund***

*) Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan, aset dan liabilitas derivatif, aset tetap, aset takberwujud, liabilitas lainnya dan akrual.

**) Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, derivative assets and liabilities, fixed assets, intangible assets, other liabilities and accruals.*

Berdasarkan informasi geografis / *Geographical information*

Pada tanggal 31 Desember 2023, segmen berdasarkan geografis terdiri dari 73 cabang (tidak diaudit) yang terbagi menjadi 4 area yaitu Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, serta, Kalimantan dan Sulawesi (31 Desember 2022: 73 cabang) (tidak diaudit).

As of 31 December 2023, geographical segment consists of 73 branches (unaudited) that are located into 4 areas, which are Java, Sumatera, Bali and Nusa Tenggara, also Kalimantan and Sulawesi (31 December 2022: 73 branches) (unaudited).

Segmen informasi berdasarkan geografis adalah sebagai berikut:

Information concerning geographical segments is as follows:

	Jawa/ *Java*	Sumatera	Bali dan/*and* Nusa Tenggara	Kalimantan dan/*and* Sulawesi	Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination*	Konsolidasian/ *Consolidated*	
31 Desember 2023							***31 December 2023***
Pendapatan bunga	14,762,054	2,321,058	487,220	1,245,341	-	18,815,673	*Interest income*
Jumlah aset	181,546,539	10,678,290	2,410,816	8,041,057	(1,228,310)	201,448,392	*Total assets*
31 Desember 2022							***31 December 2022***
Pendapatan bunga	11,863,972	2,261,709	491,252	1,282,713	-	15,899,646	*Interest income*
Jumlah aset	190,311,295	9,822,302	2,460,961	7,808,973	(1,233,827)	209,169,704	*Total assets*

39. LABA BERSIH PER SAHAM / *39. EARNINGS PER SHARE*

a. Laba per saham dasar / *a. Basic earnings per share*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Jumlah laba per saham dasar yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank	293	384	*Total basic earnings per share attributable to the ordinary equity holders of the Bank*

b. Laba per saham dilusian / *b. Diluted earnings per share*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Jumlah laba per saham dilusian yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank	293	384	*Total diluted earnings per share attributable to the ordinary equity holders of the Bank*

c. Laba yang digunakan dalam perhitungan laba per saham / *c. Earnings used in calculating earnings per share*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Laba per saham dasar			*Basic earnings per share*
Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar	2,358,334	3,095,701	*Profit attributable to the ordinary equity holders of the Bank used in calculating basic earnings per share*
Laba per saham dilusian			*Diluted earnings per share*
Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian	2,358,334	3,095,701	*Profit attributable to the ordinary equity holders of the Bank used in calculating diluted earnings per share*

d. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut / *d. Weighted average number of shares used as the denominator*

	31 Desember/December		
	2023	**2022**	
Jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar	8,056,720,684	8,056,644,071	*Weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating basic earnings per share*
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dilusian	8,056,720,684	8,056,644,071	*Weighted average number of shares used as the denominator in calculation diluted earnings per share*

40. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN

a. PT Taspen (Persero)

Sejak tahun 2007, Bank telah bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) dimana Bank menjadi salah satu mitra untuk penanganan pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah.

b. PT Pos Indonesia (Persero)

Sejak bulan Maret 2012 Bank telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dimana PT Pos Indonesia (Persero) membantu Bank dalam melakukan pemotongan uang pensiun para pegawai Pemerintah untuk angsuran kredit pensiun dan memasarkan produk kredit pensiunan Bank.

Perjanjian kerjasama Bank dengan PT Pos Indonesia (Persero) diperbaharui secara berkala dan berdasarkan perjanjian terakhir kerjasama ini akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 25 Juli 2024. Untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2023 terkait dengan kerjasama ini, Bank membayarkan komisi kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp 73.185 (31 Desember 2022: Rp 74.764).

c. Perjanjian pembiayaan bersama

PT KB Finansia Multi Finance

Pada bulan Oktober 2022, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT KB Finansia Multi Finance ("FMF"). Dalam kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak FMF. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 300.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2022 hingga 28 Oktober 2025. Berdasarkan perubahan pada Agustus 2023, fasilitas maksimum diubah menjadi Rp 600.000.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND COMMITMENTS

a. PT Taspen (Persero)

Since 2007, the Bank has been cooperating with PT Taspen (Persero) in which the Bank become one of the partners for handling the payments of pension to retired government employees.

b. PT Pos Indonesia (Persero)

Since March 2012 the Bank has been cooperating with PT Pos Indonesia (Persero) in which PT Pos Indonesia (Persero) assists the Bank in deducting the pension benefits of retired government employees for pension loan installments and marketing the Bank's pension loan products.

The Bank's cooperation agreement with PT Pos Indonesia (Persero) is renewed regularly and based on the latest agreement, the cooperation will be continuing until 25 July 2024. For the year ended 31 December 2023 in relation to this cooperation, the Bank paid commissions to PT Pos Indonesia (Persero) amounting to Rp 73,185 (31 December 2022: Rp 74,764).

c. Joint financing agreement

PT KB Finansia Multi Finance

In October 2022, the Bank entered into a joint financing arrangement (without recourse) with PT KB Finansia Multi Finance ("FMF"). Based on the agreement, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and minimum of 10% from FMF. The maximum joint financing facility is amounted to Rp 300,000. The term of the agreement is for 3 (three) years, from 28 October 2022 to 28 October 2025. Based on addendum on August 2023, maximum joint financing facility has been changed to Rp 600,000.

40. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Perjanjian pembiayaan bersama (lanjutan)

PT Home Credit Indonesia

Pada tanggal 23 Juni 2014 melalui Perjanjian Kerjasama No PKS.087/DIR/TFI/VI/2014, Bank melakukan Perjanjian Kerjasama pembiayaan bersama without recourse dengan PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Dalam Perjanjian Kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk debitur adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak HCI.

Pada tanggal 8 Maret 2023 melalui Perjanjian Kerjasama No PKS.015/RLBJF/III/2023 fasilitas pembiayaan bersama ditingkatkan menjadi Rp 4.200.000 dan jangka waktu perjanjian telah diperpanjang hingga 8 Maret 2026.

PT Mandiri Utama Finance

Pada bulan Agustus 2023, Bank melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT Mandiri Utama Finance ("MUF"). Dalam kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah maksimum 99% dari Bank dan minimum 1% dari pihak MUF. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 500.000. Jangka waktu perjanjian adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 hingga 21 Agustus 2026.

d. Perjanjian Kerjasama Jasa Pemasaran dan Administrasi Produk BTPN

PT Mitrausaha Indonesia Group (Modalku)

Pada bulan Juni 2023, Bank melakukan kerjasama penyaluran pendanaan dengan PT Mitrausaha Indonesia Grup ("MIG"). Fasilitas maksimum penyaluran pendanaan adalah sebesar Rp 100.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023 hingga 14 Juni 2024 dan setelahnya dapat diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND COMMITMENTS *(continued)*

c. Joint financing agreement *(continued)*

PT Home Credit Indonesia

On 23 June 2014, through Cooperation Agreement No. PKS.087/DIR/TFI/VI/2014, the Bank entered a joint financing without recourse arrangement with PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Based on the agreement, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and a minimum of 10% from HCI.

On 8 March 2023, through Cooperation Agreement No. PKS.015/RLBJF/III/2023 joint financing facilities has been increased to Rp 4,200,000 and the agreement has been extended to 8 March 2026.

PT Mandiri Utama Finance

In August 2023, the Bank entered into a joint financing arrangement (without recourse) with PT Mandiri Utama Finance ("MUF"). Based on the agreement, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 99% from the Bank and minimum of 1% from MUF. The maximum joint financing facility is amounted to Rp 500,000. The term of the agreement is for 3 (three) years, from 21 August 2023 to 21 August 2026.

d. Marketing and Administration Services for BTPN Product agreement

PT Mitrausaha Indonesia Group (Modalku)

In June 2023, the Bank entered into channeling cooperation with PT Mitrausaha Indonesia Grup ("MIG"). The maximum channeling facility is amounted to Rp 100,000. The term of the agreement is for 1 (one) year, from 14 June 2023 to 14 June 2024 and extended automatically every year for a period of 2 (two) years.

40. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Perjanjian Kerjasama *Bancassurance*

Pada bulan Agustus 2014, Bank melakukan kerjasama *bancassurance* dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). Bank akan mendistribusikan produk-produk asuransi jiwa dari Allianz kepada nasabah Bank melalui seluruh jalur distribusi Bank. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun.

f. Komitmen signifikan lainnya

Bank menyewa kantor dengan perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan. Masa sewa antara 5 – 11 tahun dengan mayoritas perjanjian jasa dapat diperbarui pada akhir periode dengan harga pasar. Bank diharuskan memberitahukan enam bulan lebih awal apabila berniat mengakhiri perjanjian sewa. Beban terkait transaksi sewa yang dibebankan pada laba rugi selama tahun berjalan diungkapkan dalam Catatan 30 dan 33.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Bank:

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND COMMITMENTS (continued)

e. Bancassurance Agreement

In August 2014, the Bank entered into a bancassurance agreement with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). The Bank will distribute life insurance products of Allianz to its customers through the Bank's distribution channels. The agreement is effective for 10 years.

f. Other significant commitment

The Bank leases offices under non-cancellable lease agreements. The lease terms are between 5 – 11 years, and the majority of lease agreements are renewable at the end of the lease period at the market rate. The Bank is required to give a six-month notice for the termination of these agreements. The expenses related with lease transactions charged to the profit or loss during the year was disclosed in Note 30 and 33.

The following are counterparties of the Bank's lease commitments:

Pihak dalam perjanjian/ ***Counterparties***	**Item yang disewa/** ***Leased items***	**Periode perjanjian/** ***Period of agreement***
PT Bumi Serpong Damai	Ruang Kantor/*Office Space*	1 Februari/*February* 2023 – 1 September/*September* 2026
PT Bahana Semesta Citra Nusantara	Ruang Kantor/*Office Space*	5 Oktober/*October* 2015 – 14 Maret/*March* 2027

Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable leases were as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Hingga 1 tahun	-	4,484	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 - 5 tahun	97,355	410,185	*More than 1 - 5 years*
	97,355	414,669	

41. MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko

Grup mengutamakan penerapan manajemen risiko baik pada Bank dan Entitas Anak. Bank memiliki segmen yang lengkap mulai dari segmen pinjaman dengan plafon kecil di BTPN Syariah (Entitas Anak), Digital, Pensiun, MUR (mikro), SME, Komersial sampai dengan Korporasi. Dalam hal konsentrasi portofolio, segmen Korporasi menjadi portofolio terbesar yaitu di kisaran 66% pada posisi 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: 65%), diikuti oleh segmen Pensiunan di kisaran 14% pada posisi 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: 16%).

Pengembangan manajemen risiko keuangan di Grup berpedoman pada peraturan OJK yang mengatur penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Kerangka manajemen risiko Grup diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Grup melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan perkembangan organisasi, strategi dan manajemen sistem informasi.

Penerapan manajemen risiko mencakup:
- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Pengendalian internal yang menyeluruh

Organisasi manajemen risiko Grup melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Grup telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris dan Komite Manajemen Risiko di tingkat direksi yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, sebagai unit kontrol yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Grup.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya ini, Komite Audit dibantu oleh satuan kerja internal audit.

Risiko yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit dan pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

41. RISK MANAGEMENT

Risk management framework

The Group focuses on the risk management implementation for the Bank and Subsidiary. The Bank has complete segments starting from loans with small limit at BTPN Syariah (Subsidiary), Digital, Pension, MUR (micro), SME, Commercial up to Corporate segment. In term of portfolio concentration, Corporate segment is the largest portfolio at around 66% as of 31 December 2023 (31 December 2022: 65%), followed by Pensioners segment at around 14% as of 31 December 2023 (31 December 2022: 16%).

Financial risk management development in the Group is guided by OJK regulations which govern risk management implementation by commercial banks operating in Indonesia.

The Group's risk management framework is implemented through policies, procedures, transactions and authorisation limits, risk tolerance as well as risk management tools. The Group carries out continuous risk management development in line with the increasing business complexity and the development organisation, strategies and management information systems.

The implementation of risk management covers:
- *Active supervision from Board of Commissioners and Board of Directors*
- *Sufficient policies, procedures and limit sets*
- *Sufficient process of identification, measurement, risk oversight and control and risk management information*
- *Overall internal control system*

The risk management organization of the Group involves the oversight from the Board of Commissioners and Board of Directors. The Group has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level and Risk Management Committee at the director level, which constitutes a crucial element in risk control, as a control unit to monitor all of the risks in the Group's operating activities.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with risk management policies and procedures and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. In performing the role, the Audit Committee is assisted by internal audit working unit.

The risks arising from the Group's financial instruments are financial risks, which include credit and financing risk, liquidity risk, market risk and operational risk.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Entitas Anak telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada Entitas Anak. Manajemen risiko pada Entitas Anak secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada struktur organisasi Entitas Anak juga dibentuk Komite Audit yang memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara berkala, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Entitas Anak.

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada Entitas Anak secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap pengendalian internal melalui laporan-laporan untuk digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan mengembangkan kebijakan yang tepat pada Entitas Anak.

Bank selaku Entitas Induk telah menerapkan manajemen risiko konsolidasian sesuai ketentuan OJK. Penerapan manajemen risiko konsolidasian antara lain mencakup laporan perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) konsolidasian, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) konsolidasian, laporan Profil Risiko konsolidasian, Tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating*) konsolidasian dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) konsolidasian.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Grup. Risiko kredit terutama berasal dari pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

Grup juga terekspos risiko kredit yang muncul dari investasi pada efek-efek utang.

***41. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Risk management framework** (continued)*

Subsidiary has implemented risk management, among others by establishing a risk unit in Subsidiary. Risk management in Subsidiary is operating separately from the business unit and conducting its function independently. To support the implementation of risk management, the Subsidiary has established Audit Committee in its organizational structure, which has responsibility to monitor the compliance of risk management policies and procedures on a regular basis, and to analyse the adequacy of risk management framework which related to the risks faced by the Subsidiary.

In addition, the Subsidiary's Board of Commissioners and Board of Directors actively monitor and evaluate the internal controls, through the reports, as a basis in formulating and developing appropriate policies for the Subsidiary.

As the Parent Entity, the Bank has implemented consolidated risk management in accordance with OJK regulation. The Implementation of consolidated risk management among others include report of consolidated minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), Legal Lending Limit (LLL), risk profile, Risk-Based Bank Rating and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss, should any of the customers, clients or counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Group. Credit risk arises mainly from loans and sharia financing/receivables.

The Group is also exposed to credit risks arising from investment in debt securities.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Grup melakukan kaji ulang atas kebijakan kredit secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Batas pemberian kredit ditetapkan dan ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Penelaahan kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan kredit dilakukan melalui komite kredit dan kewenangan kredit sebagaimana ditetapkan.

(i) Manajemen risiko kredit

Grup mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pinjaman yang diberikan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit dan pembiayaan secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan akan terus dikembangkan serta telah mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan yang tepat waktu untuk mengatasi kemungkinan penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Manajemen risiko kredit atas pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 berdampak pada kemampuan membayar kembali oleh debitur, yang masih berlanjut hingga periode pasca-pandemi. Dampak keuangan langsung dari wabah tersebut bagi industri perbankan adalah peningkatan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE), yang disebabkan oleh peningkatan risiko kredit dan penurunan kualitas pinjaman.

***41. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

The Group reviews the credit policies periodically, especially if there are any changes in market conditions, changes in regulations and/or business approach.

Lending limits are set and reviewed in the light of changing market and economic conditions. Periodic credit reviews and assessments of probability of default are also conducted. Credit approval is processed by credit committee and credit authority as determined.

(i) Credit risk management

The Group actively manages and monitors the loan portfolio quality by improving credit and financing risk management policies effectively, improving procedures and systems development.

Management Information Systems (MIS) are in place and continously developed and have covered sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing timely measurement to be taken to counteract any possible deterioration in credit quality or to minimise credit losses.

Credit risk management in COVID-19 pandemic

Covid-19 pandemic impacted debtors' repayment capabilities, which continued until this post-pandemic period. Direct financial impact of the pandemic to the banking industry showed an increase in Expected Credit Loss caused by increased credit risk and the decline of credit quality.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(i) Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Manajemen risiko kredit atas pandemi COVID-19 (lanjutan)

Bank telah melakukan upaya penanganan dalam menjaga stabilitas dan mitigasi dampak dari pandemi tersebut antara lain:

1. Berdasarkan POJK No 11/POJK.03/2020, POJK No.48/POJK.03/2020, dan POJK 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan kedua atas Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Bank melakukan proses *monitoring* dan pengawasan atas kualitas dan kecukupan CKPN debitur-debitur yang direstrukturisasi hingga Maret 2023. Proses ini dilanjutkan di periode pasca-pandemi dengan mengacu pada POJK No. 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana serta KDK No. 34/KDK 03/ 2022 mengenai Penetapan Daerah dan/atau Sektor Ekonomi yang Terdampak Bencana yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank (sektor ekonomi dan daerah tersebut adalah sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki; segmen usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau daerah Provinsi Bali, yang berlaku sampai dengan Maret 2024). Panduan atas penerapan POJK dan KDK tersebut telah dibuat oleh Bank. (catatan 11.o)

2. Bank melakukan penilaian apakah debitur yang direstruktur kreditnya memiliki kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi dampak COVID-19 sesuai panduan penerapan KDK No. 34/KDK 03/2022.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

***Credit risk** (continued)*

(i) Credit risk management (continued)

Credit risk management in COVID-19 pandemic (continued)

The Bank has made an effort to handle this issue in order to maintain stability and to mitigate the impact of pandemic as follows:

1. Referring to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020, OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020, and OJK Regulation No. 17/POJK.03/2021 concerning Second Amendment of National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Coronavirus Disease 2019, the Bank has conducted monitoring and supervision process of the quality and adequacy of allowance of impairment losses for restructured debtors up to March 2023. This process has been continued to the post-pandemic period in accordance to OJK Regulation No. 19/2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Specific Regions and Sectors in Indonesia Impacted by a Disaster and OJK Board of Commissioners Decree No. 34/KDK 03/2022 concerning Stipulation of Region and/or Sector Which Require Special Treatment regarding Bank Financing (the sectors and/or regions include accommodation and food and drink provision sector, the textile and textile products and footwear sectors, the micro, small and medium enterprises segment, and/or Bali Province, up to March 2024). The guideline for the implementation of the aforementioned OJK Regulation and OJK Board of Commissioners Decree has been set by the bank. (Notes 11.o)

2. The Bank conducts assessment on whether restructured debtors have the capability to withstand the impact of COVID-19 in accordance to the OJK Board of Commissioners Decree No. 34/KDK 03/2022 implementation guidelines.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(i) Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Manajemen risiko kredit atas pandemi COVID-19 (lanjutan)

Bank telah melakukan upaya penanganan dalam menjaga stabilitas dan mitigasi dampak dari pandemi tersebut antara lain: (lanjutan)

3. Bank telah melakukan pengkinian kebijakan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dirilis oleh Pemerintah melalui program penjaminan kredit dan subsidi bunga kepada debitur usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah. Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Jumlah saldo pinjaman yang telah disalurkan Bank pada posisi tanggal 31 Desember 2023 dalam rangka program PEN adalah sebesar Rp 3.068 (31 Desember 2022: Rp 16.123).

Demikian halnya dengan Entitas Anak, dalam masa pandemi, Entitas Anak membantu nasabah yang usahanya terdampak pandemi COVID-19, melalui program relaksasi sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 dan perubahan-perubahannya (POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021). Entitas Anak turut melanjutkan dukungannya pada periode pasca-pandemi ini dengan penerapan perlakuan khusus berdasarkan KDK No. 34/KDK 03/2022.

Entitas Anak juga berpartisipasi dalam program PEN sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk membantu segmen usaha mikro yang terdampak. Dalam rangka implementasi program PEN sesuai peraturan yang berlaku, Entitas Anak telah berpartisipasi dengan menjadi peserta penjaminan. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, piutang murabahah sebesar Rp 248.791 dan Rp 2.777.938 telah dijamin oleh Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

***Credit risk** (continued)*

(i) Credit risk management (continued)

Credit risk management in COVID-19 pandemic (continued)

The Bank has made an effort to handle this issue in order to maintain stability and to mitigate the impact of pandemic as follows: (continued)

3. The Bank has updated policies to support the National Economic Recovery program released by the Government through a credit guarantee program and interest subsidies for micro, small and medium enterprise (MSME) borrowers according to the criteria set by the government.The Bank has signed a Collective Agreement with PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). The total disbursed credit by Bank as of 31 December 2023 in relation with PEN program amounted to Rp 3,068 (31 December 2022: Rp 16,123).

As well as with the Subsidiary, during the pandemic period, the Subsidiary supports customers whose business impacted by the COVID-19 pandemic with relaxation program, in accordance to POJK No. 11/POJK.03/2020 and its amendments (POJK No. 48/POJK.03/2020 and POJK No. 17/POJK.03/2021). The Subsidiary continued the support until this post-pandemic period with the implementation of special treatment under OJK Board of Commissioners Decree No. 34/KDK 03/2022.

The Subsidiary also participates in PEN program as imposed by the government to support micro business segment impacted by the pandemic. In conjunction with the implementation of PEN Program in accordance with the prevailing regulation, the Subsidiary has participated as guarantee participant. As of 31 December 2023 and 2022, murabahah receivables amounting to Rp 248,791 and Rp 2,777,938 were guaranteed by the designated Guarantee Company which are PT Penjaminan Jamkrindo Syariah and PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(i) Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Agunan

Bank menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit, Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas pinjaman yang diberikan antara lain adalah:

- Kas/deposito
- Tanah dan/atau Bangunan
- SBLC
- Kendaraan
- Peralatan (termasuk mesin dan alat berat)
- Persediaan
- Piutang

Untuk kredit korporasi, Bank mendapatkan jaminan dalam bentuk *standby letters of credit* dari bank afiliasi untuk membatasi risiko kredit bank. Bank juga menyediakan bank garansi kepada nasabahnya yang mengharuskan Bank melakukan pembayaran untuk kepentingan mereka. Hal ini menyebabkan Bank menghadapi risiko yang sama dengan kredit yang diberikan dan risiko tersebut juga dimitigasi dengan prosedur dan kebijakan yang sama.

Selain agunan yang disebutkan di atas, agunan yang diterima untuk kredit korporasi terutama terdiri dari jaminan yang diterima dari perusahaan induk debitur, penjaminan kredit korporasi dan entitas publik lainnya, lembaga keuangan dan perusahaan lain serta jaminan berupa efek-efek.

Porsi kredit yang diberikan yang mendapatkan manfaat dari agunan, baik sebagian maupun penuh, sebagai mitigasi dari risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 33,79% dan 34,06% dari jumlah kredit yang diberikan.

(ii) Eksposur maksimum risiko kredit (tanpa memperhitungkan agunan dan perlindungan kredit lainnya)

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi dan *irrevocable L/C* yang diterbitkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai yang harus dibayarkan oleh Bank jika kewajiban atas bank garansi dan *irrevocable L/C* yang diterbitkan terjadi. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah komitmen fasilitas kredit (*committed*) yang belum digunakan oleh nasabah.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

***Credit risk** (continued)*

(i) Credit risk management (continued)

Collaterals

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral to mitigate credit risk. The collateral types for loans are as follows:

- *Cash/Time deposits*
- *Lands and/or Buildings*
- *SBLC*
- *Vehicles*
- *Equipment (including machines and heavy equipment)*
- *Inventories*
- *Accounts receivable*

For corporate loans, the Bank received collateral in the form of standby letters of credit from controlling banks to restrict the Bank's credit risk. The Bank also provides bank guarantee to its customers which require the Bank to make payments for their interests. This causes the Bank to face the same risks as the loans granted and these risks are also mitigated by the same procedures and policies.

In addition to the collateral mentioned above, collaterals for corporate loans mainly consists of guarantees received from the parent company of the debtor, corporate credit guarantees and other public entities, financial institutions and other companies as well as collateral in the form of securities.

The portion of loans that benefits from such partial or full collateralization as credit risk mitigation as of 31 December 2023 and 2022 were 33.79% and 34.06% of total outstanding loans, respectively.

(ii) Maximum exposure to credit risk (without taking into account collateral held or other credit enhancements)

For financial assets recognized in the consolidated statement of financial position, the maximum exposure to credit risk is equal to its carrying value. For bank guarantees and irrevocable L/C issued, maximum exposure to credit risk is the value that must be paid by the Bank if the liabilities on the bank guarantee and irrevocable L/C issued has been occurred. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is equal to the amount of committed credit facilities that have not been used by customers.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

***Credit risk** (continued)*

(ii) Eksposur maksimum risiko kredit (tanpa memperhitungkan agunan dan perlindungan kredit lainnya) (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administratif, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

(ii) Maximum exposure to credit risk (without taking into account collateral held or other credit enhancements) (continued)

The following table presents the Group's maximum exposure to credit risk of financial instruments in the consolidated statement of financial position and off-balance sheet accounts, without taking into account any collateral held or other credit enhancements:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
Giro pada Bank Indonesia	9,276,598	10,215,350	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	962,229	2,189,146	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,964,278	21,887,894	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	17,263,557	19,049,690	*Securities*
Tagihan derivatif	1,133,149	1,746,824	*Derivative receivables*
Tagihan akseptasi	3,281,120	3,065,359	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih			*Loans and sharia financing/ receivables - net*
- Korporasi	102,781,448	95,209,651	*Corporates -*
- Pensiunan	22,190,683	23,733,930	*Pensioners -*
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM")	13,669,400	10,722,188	*Micro Small and Medium Enterprises ("MSME") -*
- Pembiayaan/piutang syariah	10,173,945	10,758,538	*Sharia financing/receivables -*
- Lainnya	3,127,774	2,120,090	*Others -*
- Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima	1,097,796	878,534	*Accrued interest/margin income -*
Penyertaan saham	102,586	103,473	*Investment in shares*
Aset lain-lain	423,113	228,822	*Other assets*
	194,447,676	201,909,489	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:			*Commitments and contingencies with credit risk:*
Garansi yang diberikan	5,455,734	5,608,120	*Guarantees provided*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - *committed*	10,870,217	13,315,311	*Unused credit facilities to customers - committed*
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	721,016	961,523	*Irrevocable letters of credit*

(iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Grup mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi - secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis.

Grup menentukan tingkat risiko kredit dan pembiayaan yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau kelompok debitur.

(iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

The Group manages and controls concentrations of credit risk wherever they are identified - in particular, to individual and group counterparties, and to industries and geographical sectors.

The Group structures the levels of credit and financing risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one or group borrowers.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *41. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko kredit (lanjutan) / ***Credit risk*** *(continued)*

(iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan) / *(iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)*

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor geografis adalah sebagai berikut: / *Credit risk concentration by geographical sectors was as follows:*

	31 Desember/*December* 2023					
	Jawa/*Java**	**Sumatera**	**Bali dan/*and* Nusa Tenggara**	**Kalimantan dan/*and* Sulawesi**	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia	9,276,598	-	-	-	9,276,598	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	961,885	121	95	128	962,229	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,964,278	-	-	-	8,964,278	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	17,263,557	-	-	-	17,263,557	*Securities*
Tagihan derivatif	1,133,149	-	-	-	1,133,149	*Derivative receivables*
Tagihan akseptasi	3,281,120	-	-	-	3,281,120	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – bersih	132,873,008	10,130,220	2,321,948	7,715,870	153,041,046	*Loans and sharia financing/ receivables - net*
Penyertaan saham	102,564	8	-	14	102,586	*Investment in shares*
Aset lain-lain	421,775	591	194	553	423,113	*Other assets*
	174,277,934	10,130,940	2,322,237	7,716,565	194,447,676	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:						*Commitments and contingencies with credit risk:*
Garansi yang diterbitkan	5,455,734	-	-	-	5,455,734	*Guarantees issued*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - *committed*	10,490,341	-	-	379,876	10,870,217	*Unused credit facilities to customers - committed*
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	721,016	-	-	-	721,016	*Irrevocable letters of credit*

*) Termasuk Kantor Pusat / *) *Including Head Office*

	31 Desember/*December* 2022					
	Jawa/*Java**	**Sumatera**	**Bali dan/*and* Nusa Tenggara**	**Kalimantan dan/*and* Sulawesi**	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia	10,215,350	-	-	-	10,215,350	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	2,188,627	210	151	158	2,189,146	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	21,887,894	-	-	-	21,887,894	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	19,049,690	-	-	-	19,049,690	*Securities*
Tagihan derivatif	1,746,824	-	-	-	1,746,824	*Derivative receivables*
Tagihan akseptasi	3,065,359	-	-	-	3,065,359	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – bersih	124,387,704	9,194,397	2,355,909	7,484,921	143,422,931	*Loans and sharia financing/ receivables - net*
Penyertaan saham	103,451	8	-	14	103,473	*Investment in shares*
Aset lain-lain	227,243	695	13	871	228,822	*Other assets*
	182,872,142	9,195,310	2,356,073	7,485,964	201,909,489	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:						*Commitments and contingencies with credit risk:*
Garansi yang diterbitkan	5,608,120	-	-	-	5,608,120	*Guarantees issued*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan – *committed*	13,315,311	-	-	-	13,315,311	*Unused credit facilities to customers - committed*
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	961,523	-	-	-	961,523	*Irrevocable letters of credit*

*) Termasuk Kantor Pusat / *) *Including Head Office*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

***Credit risk** (continued)*

(iii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

(iii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri adalah sebagai berikut:

Credit risk concentration by industry sectors was as follows:

	31 Desember / *December* 2023							
	Pemerintah/ *Government*	**Lembaga keuangan/ *Financial institution***	**Perdagangan/ *Trading***	**Jasa/ *Business services***	**Perindustrian/ *Manufacturing***	**Lain-lain/ *Others***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia	9,276,598	-	-	-	-	-	9,276,598	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	962,229	-	-	-	-	962,229	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,728,278	236,000	-	-	-	-	8,964,278	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	15,144,339	1,859,875	-	-	259,343	-	17,263,557	*Securities*
Tagihan derivatif	-	1,098,893	8,526	102	25,628	-	1,133,149	*Derivative receivables*
Tagihan akseptasi	-	-	3,281,120	-	-	-	3,281,120	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	-	26,101,603	24,945,918	25,207,114	33,388,526	43,397,885	153,041,046	*Loans and sharia financing/receivables - net*
Penyertaan saham	-	102,586	-	-	-	-	102,586	*Investment in shares*
Aset lain-lain	593	269,950	-	-	-	152,570	423,113	*Other assets*
	33,149,808	30,631,136	28,235,564	25,207,216	33,673,497	43,550,455	194,447,676	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:								*Commitments and contingencies with credit risk:*
Garansi yang diterbitkan	-	-	5,455,734	-	-	-	5,455,734	*Guarantees issued*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - *committed*	-	1,022,645	798,933	2,769,881	2,458,078	3,820,680	10,870,217	*Unused credit facilities to customers – committed*
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	-	-	721,016	-	-	-	721,016	*Irrevocable letters of credit*

	31 Desember/*December* 2022							
	Pemerintah/ *Government*	**Lembaga keuangan/ *Financial institution***	**Perdagangan/ *Trading***	**Jasa/ *Business services***	**Perindustrian/ *Manufacturing***	**Lain-lain/ *Others***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia	10,215,350	-	-	-	-	-	10,215,350	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	2,189,146	-	-	-	-	2,189,146	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	21,482,219	405,675	-	-	-	-	21,887,894	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	16,186,675	2,636,584	-	-	226,431	-	19,049,690	*Securities*
Tagihan derivatif	-	1,722,869	2,137	432	21,386	-	1,746,824	*Derivative receivables*
Tagihan akseptasi	-	-	3,065,359	-	-	-	3,065,359	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	-	21,801,214	26,261,478	18,460,579	34,927,012	41,972,648	143,422,931	*Loans and sharia financing/receivables - net*
Penyertaan saham	-	103,473	-	-	-	-	103,473	*Investment in shares*
Aset lain-lain	556	25,262	-	-	-	203,004	228,822	*Other assets*
	47,884,800	28,884,223	29,328,974	18,461,011	35,174,829	42,175,652	201,909,489	
Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit:								*Commitments and contingencies with credit risk:*
Garansi yang diterbitkan	-	-	5,608,120	-	-	-	5,608,120	*Guarantees issued*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - *committed*	-	1,565,602	740,926	4,857,149	1,869,785	4,281,849	13,315,311	*Unused credit facilities to customers - committed*
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan	-	-	961,523	-	-	-	961,523	*Irrevocable letters of credit*

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan jenis kredit atau pembiayaan, mata uang, sektor ekonomi dan hubungan dengan debitur diungkapkan pada Catatan 11.

The credit risk concentration by type of credit or financing, currency, economic sector and relationship with debtors is disclosed in Note 11.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan

Proses penentuan kualitas kredit Bank mengacu pada kolektibilitas sesuai peraturan OJK.

Segmen korporasi

Untuk segmen korporasi, kualitas kredit dikelola oleh Bank dengan menggunakan peringkat kredit internal. Bank menentukan peringkat suatu debitur dengan terlebih dahulu menetapkan peringkat keuangan (*financial grade*) dengan menggunakan model peringkat dari aspek keuangan dan data yang diperoleh dari laporan keuangan debitur, termasuk kekayaan bersih dan arus kas. Peringkat keuangan ini kemudian disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi dari posisi keuangan debitur dan faktor kualitatif untuk menentukan peringkat debitur.

Faktor kualitatif terutama mencakup arus kas masa depan yang diharapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti informasi kerugian historis, kesesuaian rencana bisnis debitur atau rencana perbaikan operasional, status perkembangan rencana bisnis dan dukungan menyeluruh dari lembaga keuangan.

Selain prosedur peringkat di atas, dalam hal debitur dianggap sebagai anak perusahaan yang dikonsolidasi oleh induk perusahaan di luar negeri, peringkat debitur bisa ditentukan dengan mengadopsi peringkat obligor berdasarkan kualitas kredit induk perusahaan atau peringkat kredit yang diberikan induk perusahaan Bank terhadap induk perusahaan tersebut. Peringkat debitur dan peringkat fasilitas ditelaah paling sedikit setahun sekali, atau bila diperlukan, ketika ada perubahan kredit.

Peringkat internal untuk segmen korporasi digolongkan sebagai berikut:

- Debitur *Grading* 1-3 memiliki kemampuan membayar kewajiban yang tinggi.
- Debitur *Grading* 4-6 tidak mengalami kesulitan pembayaran kewajiban, namun terdapat faktor bisnis atau ekonomi yang dapat menyebabkan masalah dalam pembayaran kewajiban.
- Debitur *Grading* 7A dan 7B memerlukan pemantauan khusus karena bisnis yang lesu/tidak stabil, atau masalah keuangan.
- Debitur *Grading* 7R atau lebih rendah merupakan debitur yang telah mengalami penurunan nilai (*default)*.

***41. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(iv) Credit quality of financial assets

Process of determining the Bank's credit quality refers to collectibility in accordance with the OJK regulations.

Corporate segment

For corporate segment, the quality of credit is managed by the Bank using internal credit ratings. The Bank determines the rating of a debtor by first determining the financial grade using a rating model from financial aspects and data obtained from the debtor's financial statements, including net worth and cash flows. This financial grade is then adjusted by considering the conditions of the debtor's financial position and qualitative factors to determine the grade of the debtor.

Qualitative factors mainly cover expected future cash flows with considering some factors such as historical loss information, conformity of the debtor's business plan or operational improvement plan, status of developments in the business plan and overall support from financial institutions.

In addition of grading procedure above, in the event that the debtor is considered as a subsidiary that is consolidated by a parent company abroad, the debtor's grading can be determined by adopting an obligor grading based on the quality of the parent loan or credit grading provided by the Bank's parent company. Debtor grading and facility grading are reviewed at least once a year, or if needed, when there are changes in credit.

Internal grading for corporate segment is categorized as follows:

- *Grading 1-3 debtors have very strong ability to pay their obligations.*
- *Grading 4-6 debtors do not experience difficulties to pay their obligations; however, there are business or economy factors that may cause difficulties to pay the obligations.*
- *Grading 7A and 7B debtors need special observation as they experience sluggish/unstable business, or financial issues.*
- *Grading 7R or lower debtors represent debtors which are credit-impaired (default).*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

***Credit risk** (continued)*

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2023 and 2022, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows:

	31 Desember / *December* 2023					
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia						*Current accounts with Bank Indonesia*
Grade 1-3	8,613,155	-	-	663,443	9,276,598	*Grade 1-3*
Giro pada bank-bank lain						*Current accounts with other banks*
Grade 1-3	496,671	-	-	-	496,671	*Grade 1-3*
Tanpa peringkat	462,061	-	-	3,655	465,716	*Non-graded*
	958,732	-	-	3,655	962,387	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain						*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Grade 1-3	8,626,278	-	-	-	8,626,278	*Grade 1-3*
Tanpa peringkat	-	-	-	338,000	338,000	*Non-graded*
	8,626,278	-	-	338,000	8,964,278	
Efek-efek						*Securities*
Grade 1-3	8,694,708	-	-	-	8,694,708	*Grade 1-3*
Grade 4-6	-	2,956	-	-	2,956	*Grade 4-6*
Tanpa peringkat	-	-	-	8,566,692	8,566,692	*Non-graded*
	8,694,708	2,956	-	8,566,692	17,264,356	
Tagihan derivatif						*Derivative receivables*
Belum jatuh tempo	1,133,149	-	-	-	1,133,149	*Not yet overdue*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah:						*Loans and sharia financing/ receivables:*
Korporasi						***Corporates***
Grade 1-3	85,561,286	240,109	-	-	85,801,395	*Grade 1-3*
Grade 4-6	5,567,387	6,197,539	-	-	11,764,926	*Grade 4-6*
Grade 7A-7B	-	224,543	-	-	224,543	*Grade 7A-7B*
Default	-	-	5,063,549	-	5,063,549	*Default*
	91,128,673	6,662,191	5,063,549	-	102,854,413	
Non-korporasi						***Non-corporates***
Belum jatuh tempo	39,955,284	331,736	116,635	-	40,403,655	*Not yet overdue*
Telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	394,080	331,415	48,876	-	774,371	*Past due up to 90 days*
Telah jatuh tempo 91-120 hari	-	-	91,773	-	91,773	*Past due for 91-120 days*
Telah jatuh tempo 121-180 hari	-	-	100,524	-	100,524	*Past due for 121-180 days*
Telah jatuh tempo lebih dari 180 hari	-	-	948,700	-	948,700	*Past due more than 180 days*
	40,349,364	663,151	1,306,508	-	42,319,023	
Dipindahkan	131,478,037	7,325,342	6,370,057	-	145,173,436	*Carry forward*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

***Credit risk** (continued)*

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut (lanjutan):

As of 31 December 2023 and 2022, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows (continued):

	31 Desember/*December* 2023					
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan):						*Loans and sharia financing/receivables (continued):*
Pindahan	131,478,037	7,325,342	6,370,057	-	145,173,436	*Carried forward*
Syariah						***Sharia***
Belum jatuh tempo	-	-	-	10,593,668	10,593,668	*Not yet overdue*
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 1-30 hari	-	-	-	143,281	143,281	*Past due but not impaired for 1-30 days*
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 31-60 hari	-	-	-	143,129	143,129	*Past due but not impaired for 31-60 days*
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 61-90 hari	-	-	-	173,266	173,266	*Past due but not impaired for 61-90 days*
Mengalami penurunan nilai	-	-	-	334,517	334,517	*Impaired*
	-	-	-	11,387,861	11,387,861	
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima	640,617	80,697	211,592	164,890	1,097,796	*Accrued interest/ margin income*
	132,118,654	7,406,039	6,581,649	11,552,751	157,659,093	
Tagihan akseptasi						*Acceptance receivables*
Grade 1-3	3,073,305	-	-	-	3,073,305	*Grade 1-3*
Grade 4-6	30,792	184,499	-	-	215,291	*Grade 4-6*
Tanpa peringkat	1,161	-	-	-	1,161	*Non-graded*
	3,105,258	184,499	-	-	3,289,757	
Penyertaan saham						*Investment in shares*
Tanpa peringkat	22,522	-	-	80,064	102,586	*Non-graded*
Aset lain-lain						*Other assets*
Tanpa peringkat	405,850	-	-	17,263	423,113	*Non-graded*
	163,678,306	7,593,494	6,581,649	21,221,868	199,075,317	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(634,415)	(175,608)	(2,603,702)	(1,213,916)	(4,627,641)	*Allowance for impairment losses*
	163,043,891	7,417,886	3,977,947	20,007,952	194,447,676	

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut (lanjutan):

41. RISK MANAGEMENT (continued)

***Credit risk** (continued)*

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows (continued):

	31 Desember/*December* 2022					
	Tahap 1/ *Stage 1**	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia						*Current accounts with Bank Indonesia*
Tanpa peringkat	10,215,350	-	-	-	10,215,350	*Non-graded*
Giro pada bank-bank lain						*Current accounts with other banks*
Grade 1-3	558,824				558,824	*Grade 1-3*
Tanpa peringkat	1,630,737	-	-	-	1,630,737	*Non-graded*
	2,189,561	-	-	-	2,189,561	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain						*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Grade 1-3	1,457,631	-	-	-	1,457,631	*Grade 1-3*
Tanpa peringkat	20,430,434	-	-	-	20,430,434	*Non-graded*
	21,888,065	-	-	-	21,888,065	
Efek-efek						*Securities*
Grade 1-3	1,739,297	-	-	-	1,739,297	*Grade 1-3*
Grade 4-6	-	1,478	-	-	1,478	*Grade 4-6*
Tanpa peringkat	17,309,914	-	-	-	17,309,914	*Non-graded*
	19,049,211	1,478	-	-	19,050,689	
Tagihan derivatif						*Derivative receivables*
Belum jatuh tempo	1,746,824	-	-	-	1,746,824	*Not yet overdue*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah:						*Loans and sharia financing/ receivables:*
Korporasi						***Corporates***
Grade 1-3	77,651,301	315,611	-	-	77,966,912	*Grade 1-3*
Grade 4-6	6,421,326	7,689,124	-	-	14,110,450	*Grade 4-6*
Grade 7A-7B	-	101,189	-	-	101,189	*Grade 7A-7B*
Default	-	-	3,130,632	-	3,130,632	*Default*
	84,072,627	8,105,924	3,130,632	-	95,309,183	
Non-korporasi						***Non-corporates***
Belum jatuh tempo	36,929,086	299,053	117,374	-	37,345,513	*Not yet overdue*
Telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	383,823	323,590	264,942	-	972,355	*Past due up to 90 days*
Telah jatuh tempo 91-120 hari	-	-	67,708	-	67,708	*Past due for 91-120 days*
Telah jatuh tempo 121-180 hari	-	-	91,663	-	91,663	*Past due for 121-180 days*
Telah jatuh tempo lebih dari 180 hari	-	-	809,631	-	809,631	*Past due more than 180 days*
	37,312,909	622,643	1,351,318	-	39,286,870	
Dipindahkan	121,385,536	8,728,567	4,481,950	-	134,596,053	*Carry forward*

*) Termasuk aset keuangan syariah dengan kualitas kredit lancar

*Include sharia financial assets with current credit quality *)*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut (lanjutan):

41. RISK MANAGEMENT (continued)

***Credit risk** (continued)*

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows (continued):

	31 Desember/*December* 2022					
	Tahap 1/ *Stage 1**	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan):						*Loans and sharia financing/receivables (continued):*
Pindahan	121,385,536	8,728,567	4,481,950	-	134,596,053	*Carried forward*
Syariah						***Sharia***
Belum jatuh tempo	-	-	-	10,949,316	10,949,316	*Not yet overdue*
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 1-30 hari	-	-	-	99,466	99,466	*Past due but not impaired for 1-30 days*
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 31-60 hari	-	-	-	86,523	86,523	*Past due but not impaired for 31-60 days*
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 61-90 hari	-	-	-	86,831	86,831	*Past due but not impaired for 61-90 days*
Mengalami penurunan nilai	-	-	-	305,327	305,327	*Impaired*
	-	-	-	11,527,463	11,527,463	
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima	664,507	65,410	9,841	138,776	878,534	*Accrued interest/ margin income*
	122,050,043	8,793,977	4,491,791	11,666,239	147,002,050	
Tagihan akseptasi						*Acceptance receivables*
Grade 1-3	2,668,983	-	-	-	2,668,983	*Grade 1-3*
Grade 4 -6	367,776	33,095	-	-	400,871	*Grade 4-6*
	3,036,759	33,095	-	-	3,069,854	
Penyertaan saham						*Investment in shares*
Tanpa peringkat	103,473	-	-	-	103,473	*Non-graded*
Aset lain-lain						*Other assets*
Tanpa peringkat	218,552	-	-	10,270	228,822	*Non-graded*
	180,497,838	8,828,550	4,491,791	11,676,509	205,494,688	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(703,354)	(273,934)	(1,838,986)	(768,925)	(3,585,199)	*Allowance for impairment losses*
	179,794,484	8,554,616	2,652,805	10,907,584	201,909,489	

*) Termasuk aset keuangan syariah dengan kualitas kredit lancar

*Include sharia financial assets with current credit quality *)*

Penjelasan mengenai Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3 dapat dilihat pada Catatan 2i.

The explanation of Stage 1, Stage 2 and Stage 3 can be referred to Note 2i.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

***Credit risk** (continued)*

(iv) Kualitas kredit aset keuangan (lanjutan)

(iv) Credit quality of financial assets (continued)

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan jenis portofolio kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut:

Movement of the allowance for impairment losses by credit/financing portfolio types was as follows:

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*						
	Pensiunan/ *Pension**	**UMKM/ *MSME***	**Korporasi/ *Corporate***	**Syariah/ *Sharia***	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	255,742	974,353	1,356,573	768,925	223,526	3,579,119	*Beginning balance*
Penambahan	87,986	179,215	779,226	1,898,117	85,027	3,029,571	*Addition*
Penerimaan kembali	16,022	15,216	-	48,284	8,769	88,291	*Recovery*
Penghapusbukuan	(147,421)	(276,955)	-	(1,501,410)	(140,258)	(2,066,044)	*Write-off*
Lainnya	-	-	(12,890)	-	-	(12,890)	*Others*
Saldo akhir	212,329	891,829	2,122,909	1,213,916	177,064	4,618,047	*Ending balance*

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/ *Year ended 31 December 2022*						
	Pensiunan/ *Pension**	**UMKM/ *MSME***	**Korporasi/ *Corporate***	**Syariah/ *Sharia***	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	276,449	1,080,904	1,707,880	699,265	189,201	3,953,699	*Beginning balance*
Penambahan	138,319	260,577	314,575	945,052	96,153	1,754,676	*Addition*
Penerimaan kembali	15,907	23,167	-	74,832	6,288	120,194	*Recovery*
Penghapusbukuan	(174,933)	(390,295)	(288,142)	(950,224)	(68,116)	(1,871,710)	*Write-off*
Kerugian modifikasi	-	-	(308,911)	-	-	(308,911)	*Modification loss*
Penjualan pinjaman	-	-	(91,486)	-	-	(91,486)	*Sale of loan*
Lainnya	-	-	22,657	-	-	22,657	*Others*
Saldo akhir	255,742	974,353	1,356,573	768,925	223,526	3,579,119	*Ending balance*

*) Termasuk Kredit Pegawai Aktif

Include Active Employee Loan)*

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi jika Grup tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah. Salah satu parameter yang digunakan adalah dengan menganalisa profil jatuh tempo dari sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan sebagian besar aset yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan jangka waktu yang pada umumnya berjangka panjang. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan dapat meningkatkan risiko likuiditas.

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet their payment obligations as they fall due, including withdrawal of customer deposits. One of the parameters used is by analysing the maturity profile from the funding sources, which are usually short term, while most of the assets which were distributed in the form of loans, are usually long-term. A relatively wide gap can increase liquidity risk.

Dalam mengantisipasi potensi tekanan likuiditas yang mungkin terjadi, Grup telah mempersiapkan strategi pendanaan dan cadangan likuiditas yang memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan profil likuiditas agar selalu memenuhi regulasi terkait.

In anticipating potential liquidity pressures that may occur, the Group has prepared the funding strategy and adequate liquidity reserves which are adjusted to the operational needs and the liquidity profile in order to always comply with the relevant regulations.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Profil jatuh tempo diproyeksikan atas jangka waktu yang tersisa berdasarkan tanggal kontraktual aset dan liabilitas tertentu. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo yang dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan tingkat kepercayaan terhadap Grup. Untuk mengelola risiko likuiditas atas kondisi tersebut, maka Grup menetapkan strategi yang sesuai dan jumlah kas dan aset likuid yang perlu dimiliki, yang dapat dicairkan atau dijadikan jaminan jika ada kebutuhan likuiditas yang mendesak.

Tabel berikut ini menyajikan rincian sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo aset keuangan (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

***Liquidity risk** (continued)*

This maturity profile is projected based on the remaining period to the contractual maturity date of assets and liabilities. Historically, a significant portion of deposits are rolled-over on the maturity date which is affected by customer behaviour and confidence level to the Group. To manage the liquidity risk of this condition, the Group establishes appropriate strategies and sufficient amount of cash and liquid assets that can be liquidated or used as collateral should there be an urgent need for liquidity.

The following tables provide detail of remaining period to maturity date of financial assets (before allowance for impairment losses) and financial liabilities.

	31 Desember/*December* 2023							
	Jumlah/ *Total*	**Sesuai permintaan/ *On demand***	**≤ 1 bulan/ *≤ 1 month***	**> 1-3 bulan/ *> 1-3 months***	**> 3-6 bulan/ > *3-6 months***	**> 6-12 bulan/ *> 6-12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***	
Aset								***Assets***
Kas	1,428,683	1,428,683	-	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	9,276,598	9,276,598	-	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	962,387	962,387	-	-	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,964,278	-	8,855,778	108,500	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	17,264,356	-	3,838,099	5,192,894	1,098,198	1,477,625	5,657,540	*Securities*
Tagihan derivatif	1,133,149	-	68,940	91,953	76,993	142,831	752,432	*Derivative receivables*
Tagihan akseptasi	3,289,757	-	193,484	1,624,722	1,471,551	-	-	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	157,659,093	-	28,897,593	19,849,556	10,182,760	19,332,839	79,396,345	*Loans and sharia financing/ receivables*
Penyertaan saham	102,586	102,586	-	-	-	-	-	*Investment in shares*
Aset lain-lain	423,113	7,458	407,093	-	25	187	8,350	*Other assets*
Jumlah aset	200,504,000	11,777,712	42,260,987	26,867,625	12,829,527	20,953,482	85,814,667	*Total assets*
Liabilitas								***Liabilities***
Liabilitas segera	(71,606)	-	(49,140)	(22,466)	-	-	-	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	(21,951)	-	(21,951)	-	-	-	-	*Undistributed revenue sharing*
Giro	(26,634,643)	(26,628,683)	(5,960)	-	-	-	-	*Current accounts*
Tabungan	(16,670,362)	(16,668,863)	(1,499)	-	-	-	-	*Saving deposits*
Deposito berjangka dan deposito *on call*	(55,152,398)	-	(41,962,192)	(9,139,063)	(2,185,498)	(1,760,395)	(105,250)	*Time deposits and deposits on call*
Simpanan dari bank-bank lain	(10,822,121)	(351,438)	(8,600,028)	(1,870,655)	-	-	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	(1,072,104)	-	(84,869)	(102,060)	(76,309)	(131,318)	(677,548)	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	(2,323,633)	-	(72,891)	(1,248,426)	(1,002,316)	-	-	*Acceptance payables*
Surat berharga yang diterbitkan	(202,083)	-	(1,514)	-	-	(200,569)	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	(31,355,517)	-	(151,020)	-	(1,000,000)	(4,197,515)	(26,006,982)	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	(3,090,360)	-	(10,960)	-	-	-	(3,079,400)	*Subordinated loans*
Liabilitas sewa	(353,990)	-	(1,866)	(82)	(831)	(5,279)	(345,932)	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	(505,982)	(29,781)	(471,241)	(4,288)	(629)	(43)	-	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	(148,276,750)	(43,678,765)	(51,435,131)	(12,387,040)	(4,265,583)	(6,295,119)	(30,215,112)	*Total liabilities*
Aset (liabilitas) bersih	52,227,250	(31,901,053)	(9,174,144)	14,480,585	8,563,944	14,658,363	55,599,555	*Net assets (liabilities)*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

***Liquidity risk** (continued)*

Tabel berikut ini menyajikan rincian sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo aset keuangan (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) dan liabilitas keuangan (lanjutan).

The following tables provide detail of remaining period to maturity date of financial assets (before allowance for impairment losses) and financial liabilities (continued).

	31 Desember/*December* 2022							
	Jumlah/ *Total*	**Sesuai permintaan/ *On demand***	**≤ 1 bulan/ *≤ 1 month***	**> 1-3 bulan/ *> 1-3 months***	**> 3-6 bulan/ > *3-6 months***	**> 6-12 bulan/ *> 6-12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***	
Aset								***Assets***
Kas	1,747,461	1,747,461	-	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	10,215,350	10,215,350	-	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	2,189,561	2,189,561	-	-	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	21,888,065	-	21,798,065	90,000	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	19,050,689	-	3,963,945	2,191,661	4,815,590	1,454,969	6,624,524	*Securities*
Tagihan derivatif	1,746,824	-	97,184	81,870	42,664	239,221	1,285,885	*Derivative receivables*
Tagihan akseptasi	3,069,854	-	273,136	1,479,902	1,316,816	-	-	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	147,002,050	-	25,645,867	18,367,645	10,186,775	21,900,681	70,901,082	*Loans and sharia financing/receivabls*
Penyertaan saham	103,473	103,473	-	-	-	-	-	*Investment in shares*
Aset lain-lain	242,826	15,062	219,039	40	20	579	8,086	*Other assets*
Jumlah aset	207,256,153	14,270,907	51,997,236	22,211,118	16,361,865	23,595,450	78,819,577	*Total assets*
Liabilitas								***Liabilities***
Liabilitas segera	(59,045)	-	(23,592)	(35,453)	-	-	-	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	(18,996)	-	(18,996)	-	-	-	-	*Undistributed revenue sharing*
Giro	(23,767,291)	(23,765,802)	(1,489)	-	-	-	-	*Current accounts*
Tabungan	(15,634,192)	(15,632,533)	(1,659)	-	-	-	-	*Saving deposits*
Deposito berjangka dan deposito *on call*	(65,767,428)	-	(54,446,288)	(8,940,417)	(1,438,514)	(929,691)	(12,518)	*Time deposits and deposits on call*
Simpanan dari bank-bank lain	(166,131)	(166,131)	-	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	(1,447,736)	-	(82,402)	(52,316)	(26,381)	(211,283)	(1,075,354)	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	(2,356,828)	-	(155,693)	(1,207,933)	(993,202)	-	-	*Acceptance payables*
Surat berharga yang diterbitkan	(201,648)	-	(1,514)	-	-	-	(200,134)	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	(45,067,408)	-	(155,802)	-	(3,500,000)	(2,100,000)	(39,311,606)	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	(3,125,578)	-	(12,078)	-	-	-	(3,113,500)	*Subordinated loans*
Liabilitas sewa	(425,887)	-	(14,590)	-	(2,203)	(5,639)	(403,455)	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	(330,316)	(29,756)	(296,638)	(3,396)	(513)	(13)	-	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	(158,368,484)	(39,594,222)	(55,210,741)	(10,239,515)	(5,960,813)	(3,246,626)	(44,116,567)	*Total liabilities*
Aset (liabilitas) bersih	48,887,669	(25,323,315)	(3,213,505)	11,971,603	10,401,052	20,348,824	34,703,010	*Net assets (liabilities)*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

***Liquidity risk** (continued)*

Tabel berikut ini menunjukkan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto dari liabilitas keuangan dan rekening administratif Grup berdasarkan periode tersisa sampai dengan jatuh tempo kontraktual:

The following table shows the contractual undiscounted cash flows of the Group's financial liabilities and administrative accounts based on the remaining period to contractual maturity:

	31 Desember/*December* 2023							
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/*Gross nominal inflow (outflow)*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	>1 - 3 bulan/ *months*	>3 - 12 bulan/ *months*	>1 - 2 tahun/ *years*	>2 tahun/ *years*	
Liabilitas non-derivatif								*Non-derivative liabilities*
Liabilitas segera	(71,606)	(71,606)	(71,606)	-	-	-	-	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	(21,951)	(21,951)	(21,951)	-	-	-	-	*Undistributed revenue sharing*
Giro	(26,634,643)	(26,683,135)	(26,683,135)	-	-	-	-	*Current accounts*
Tabungan	(16,670,362)	(16,678,067)	(16,666,200)	(3,718)	(6,685)	(1,464)	-	*Saving deposits*
Deposito berjangka dan deposito *on call*	(55,152,398)	(55,260,504)	(42,005,549)	(9,236,499)	(4,014,576)	(3,880)	-	*Time deposits and deposits on call*
Simpanan dari bank-bank lain	(10,822,121)	(10,825,968)	(8,954,247)	(1,871,721)	-	-	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	(2,323,633)	(2,323,633)	(72,891)	(1,248,426)	(1,002,316)	-	-	*Acceptance payables*
Surat berharga yang diterbitkan	(202,083)	(266,275)	(50,000)	(3,926)	(212,349)	-	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	(31,355,517)	(35,035,603)	(151,260)	(403,641)	(6,693,882)	(22,411,003)	(5,375,817)	*Borrowing*
Pinjaman subordinasi	(3,090,360)	(4,129,079)	-	(53,827)	(161,480)	(215,307)	(3,698,465)	*Subordinated loans*
Liabilitas sewa	(353,990)	(365,048)	(28,813)	(4,930)	(101,466)	(123,378)	(106,461)	*Lease liability*
Liabilitas lain-lain	(505,982)	(505,982)	(505,982)	-	-	-	-	*Other liabilities*
	(147,204,646)	(152,166,851)	(95,211,634)	(12,826,688)	(12,192,754)	(22,755,032)	(9,180,743)	
Liabilitas derivatif	(1,072,104)							*Derivative payables*
Arus kas masuk	-	30,558,152	10,534,268	4,792,544	6,654,894	4,302,673	4,273,773	*Cash inflow*
Arus kas keluar	-	(31,791,298)	(10,638,886)	(4,949,849)	(7,047,313)	(4,584,282)	(4,570,968)	*Cash outflow*
	(1,072,104)	(1,233,146)	(104,618)	(157,305)	(392,419)	(281,609)	(297,195)	
L/C yang tidak dapat dibatalkan	-	(721,017)	(273,495)	(247,757)	(199,765)	-	-	*Irrevocable L/C*
Fasilitas kredit yang belum digunakan - *committed*	-	(10,870,217)	-	-	(2,574,317)	(865,241)	(7,430,659)	*Unused credit facilities - committed*
Garansi yang diterbitkan	-	(5,455,734)	(430,838)	(753,099)	(2,348,957)	(812,067)	(1,110,773)	*Guarantees issued*
	-	(17,046,968)	(704,333)	(1,000,856)	(5,123,039)	(1,677,308)	(8,541,432)	
Jumlah	(148,276,750)	(170,446,965)	(96,020,585)	(13,984,849)	(17,708,212)	(24,713,949)	(18,019,370)	*Total*

	31 Desember/*December* 2022							
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/*Gross nominal inflow (outflow)*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	>1 - 3 bulan/ *months*	>3 - 12 bulan/ *months*	>1 - 2 tahun/ *years*	>2 tahun/ *years*	
Liabilitas non-derivatif								*Non-derivative liabilities*
Liabilitas segera	(59,045)	(59,045)	(59,045)	-	-	-	-	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	(18,996)	(18,996)	(18,996)	-	-	-	-	*Undistributed revenue sharing*
Giro	(23,767,291)	(23,793,972)	(23,793,972)	-	-	-	-	*Current accounts*
Tabungan	(15,634,192)	(15,641,692)	(15,632,030)	(2,077)	(6,637)	(948)	-	*Saving deposits*
Deposito berjangka dan deposito *on call*	(65,767,428)	(66,041,088)	(54,613,246)	(9,009,990)	(2,404,884)	(12,968)	-	*Time deposits and deposits on call*
Simpanan dari bank-bank lain	(166,131)	(176,247)	(176,247)	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	(2,356,828)	(2,356,828)	(156,346)	(1,207,280)	(993,202)	-	-	*Acceptance payables*
Surat berharga yang diterbitkan	(201,648)	(231,545)	-	(3,926)	(11,779)	(215,840)	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	(45,067,408)	(48,556,032)	(199,919)	(384,208)	(7,273,145)	(39,290,872)	(1,407,888)	*Borrowing*
Pinjaman subordinasi	(3,125,578)	(4,255,954)	-	(48,599)	(145,797)	(194,397)	(3,867,161)	*Subordinated loans*
Liabilitas sewa	(425,887)	(514,752)	(41,400)	(6,554)	(103,587)	(134,340)	(228,871)	*Lease liability*
Liabilitas lain-lain	(330,316)	(330,316)	(330,316)	-	-	-	-	*Other liabilities*
	(156,920,748)	(161,976,467)	(95,021,517)	(10,662,634)	(10,939,031)	(39,849,365)	(5,503,920)	
Liabilitas derivatif	(1,447,736)							*Derivative payables*
Arus kas masuk	-	17,408,697	3,970,439	1,694,152	3,878,369	3,855,642	4,010,095	*Cash inflow*
Arus kas keluar	-	(19,064,558)	(4,057,995)	(1,801,098)	(4,336,680)	(4,264,952)	(4,603,833)	*Cash outflow*
	(1,447,736)	(1,655,861)	(87,556)	(106,946)	(458,311)	(409,310)	(593,738)	
L/C yang tidak dapat dibatalkan	-	(961,523)	(428,005)	(335,780)	(197,738)	-	-	*Irrevocable L/C*
Fasilitas kredit yang belum digunakan - *committed*	-	(13,315,311)	-	(1,464,656)	(3,500,806)	(435,416)	(7,914,433)	*Unused credit facilities - committed*
Garansi yang diterbitkan	-	(5,608,120)	(697,906)	(680,026)	(2,600,755)	(1,629,433)	-	*Guarantees issued*
	-	(19,884,954)	(1,125,911)	(2,480,462)	(6,299,299)	(2,064,849)	(7,914,433)	
Jumlah	(158,368,484)	(183,517,282)	(96,234,984)	(13,250,042)	(17,696,641)	(42,323,524)	(14,012,091)	*Total*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel sebelumnya menyajikan arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan periode jatuh tempo kontraktual yang paling dekat. Arus kas yang diharapkan atas instrumen keuangan Grup mungkin berbeda dengan analisis ini. Sebagai contoh, simpanan diharapkan memiliki saldo yang stabil atau meningkat atau fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (*committed*) tidak seluruhnya diharapkan untuk segera digunakan.

Nilai nominal arus kas masuk/(keluar) yang diungkapkan pada tabel di atas menyajikan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan nilai pokok dan bunga dari liabilitas keuangan. Pengungkapan instrumen derivatif menunjukkan nilai bersih derivatif yang dapat diselesaikan secara neto, juga nilai bruto arus kas masuk dan keluar untuk derivatif yang diselesaikan secara bruto. Arus kas liabilitas derivatif seperti yang ditunjukkan di tabel di atas merupakan arus kas berdasarkan jatuh tempo kontraktual yang menurut Grup adalah penting untuk memahami jadwal dari arus kas.

Kebijakan yang dijalankan Grup dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah:

- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Grup.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai dan cukup mudah ditelusuri.
- Menjaga cadangan likuiditas agar sesuai dengan rekomendasi ALCO.
- Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor secara bulanan oleh ALCO dan *Risk Management Committee* (RMC).
- Fungsi pengawasan yang independen dari satuan kerja manajemen risiko.

Untuk menjaga ketahanan likuiditas, Bank melakukan pemantauan terhadap rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*/LCR) dan rasio pendanaan stabil bersih (*Net Stable Funding Ratio*/NSFR). Selain sebagai bagian dari ketentuan yang wajib dipatuhi, secara internal Bank juga menetapkan rasio-rasio tersebut ditetapkan sebagai bagian dari indikator peringatan dini (*early warning indicators*) dan indikator rencana pemulihan (*recovery plan*) yang dimonitor secara harian.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk *(continued)*

The previous table shows the undiscounted cash flows on the Group's financial liabilities on the basis of their earliest possible contractual maturity. The Group expected cash flows on these instruments may vary from this analysis. For example, deposits are expected to maintain a stable or increasing balance or unused credit facilities to customer-committed are not all expected to be drawn down immediately.

The nominal inflow/(outflow) disclosed in the above tables represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liabilities. The disclosure for derivatives shows the net amount of derivatives that are net settled, and a gross inflow and outflow amount for derivatives that have simultaneous gross settlement. The cash flows of derivatives liabilities in the table represent the cash flows based on contractual maturities which the Group believes is essential for an understanding of the timing of the cash flows.

Policies adopted by the Group in managing its liquidity risk include:

- *Application of a liquidity risk control policy that is suited to the mission, business strategy, capital adequacy, human resources and appetite for risk of the Group.*
- *Application of a liquidity risk limit policies and procedures that are written, complete, adequate and easy to follow.*
- *Maintain liquidity reserves to match the ALCO's recommendation.*
- *Managing it's funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. It is monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC).*
- *The independent monitoring function of the risk management working unit.*

To maintain its liquidity resilience, the Bank monitor the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and a Net Stable Funding Ratio (NSFR). Apart of being the requirements that must be complied with, internally Bank also set those ratios as part of the early warning indicator and the recovery plan indicators which are monitored on a daily basis.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

LCR dikelola dengan memelihara asset likuid yang berkualitas tinggi (*High Quality Liquid Assets*/HQLA) untuk dapat memenuhi potensi dana keluar bersih dalam 30 hari kedepan sesuai dengan skenario yang ditetapkan berdasarkan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan NSFR bertujuan untuk memelihara profil pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan transaksi rekening administratif Bank sesuai dengan peraturan dari OJK.

Laporan LCR dan NSFR disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau fluktuasi arus kas di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

Bank secara internal berupaya memastikan eksposur, transaksi dan ekspansi dalam valuta asing dan berdasarkan suku bunga yang dilakukan bisnis telah sesuai dengan limit dan *risk appetite* Bank.

Secara keseluruhan, risiko pasar dibagi menjadi dua risiko sebagai berikut:

(i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing timbul dari adanya posisi neraca dan komitmen dan kontinjensi *(off-balance sheet)* baik di sisi aset maupun liabilitas yang timbul melalui transaksi mata uang asing.

Bank mengukur risiko nilai tukar untuk melihat dampak perubahan nilai tukar pada pendapatan dan modal Bank. Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, pembatasan posisi secara internal ditetapkan jauh di bawah limit posisi devisa neto yang ditetapkan regulator. Bank juga memonitor *stop loss limit* untuk menjaga tingkat kerugian yang disebabkan oleh pergerakan pada nilai pasar tidak melebihi kisaran yang telah ditetapkan.

Entitas Anak tidak memiliki aset maupun liabilitas keuangan dalam mata uang asing, maupun posisi untuk diperdagangkan, sehingga Entitas Anak tidak memiliki risiko mata uang asing.

***41. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Liquidity risk** (continued)*

LCR is managed by maintaining high quality liquid assets (HQLA) which enables Bank to cover the potential net outflows within the next 30 days in accordance with the scenario determined based on regulations from Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meanwhile, the NSFR aims to maintain a stable funding profile that is adjusted to the composition of assets and administrative account transactions of the Bank in accordance with regulations from OJK.

LCR and NSFR reports are submitted periodically to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and published in accordance with applicable regulations.

Market risk

Market risk is the potential loss in book value or future cash flows fluctuation due to changes in interest rates or exchange rates.

Bank internally seeks to ensure exposures, as well as foreign exchange and interest rates based transactions and expansion undertaken by the business is in accordance with the Bank's limits and risk appetite.

In overall, market risk is divided into two following risks:

(i) Foreign currency risk

Foreign exchange risk arises from on and off-balance sheet positions both on the asset and liability sides through transactions in foreign currencies.

The Bank measures the foreign exchange risk to understand the impact of the exchange rate movement on the Bank's revenue and capital. In order to manage and mitigate the foreign exchange risk, predefined internal limits are set below net open position limit that is defined by regulator. The Bank also monitors stop loss limit to maintain the loss rate caused by movement in market value do not not exceed the specified range.

The Subsidiary does not have any assets or liabilities which are denominated in foreign currencies, or held for trading, thus the Subsidiary does not have foreign currency risk.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko mata uang asing (lanjutan)

Posisi Devisa Neto

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Neto yang berlaku, maksimum Posisi Devisa Neto adalah 20% dari modal.

Posisi Devisa Neto adalah jumlah dari nilai absolut selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut adalah Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dalam mata uang (ekuivalen Rupiah). Nilai ini adalah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan harian.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk *(continued)*

(i) Foreign currency risk (continued)

Net Open Position

Based on the prevailing Bank Indonesia Regulation relating with Net Open Position, the maximum Net Open Position is at 20% of capital.

Net Open Position is the sum of the absolute values of the net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency and the net difference of receivables and commitments and contingent liabilities in the administrative accounts for each foreign currency, which are all stated in Rupiah.

Below is the Net Open Position of Bank as of 31 December 2023 and 2022 in currency (Rupiah equivalent). These amounts are reported to Bank Indonesia on the statement of financial position's date as part of daily reporting.

	31 Desember/*December* 2023			
Mata Uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	***Currencies***
Laporan posisi keuangan dan rekening administratif				***Statement of financial position and off-balance sheet***
Dolar Amerika Serikat	95,526,416	95,662,487	136,071	*United States Dollar*
Yen Jepang	3,329,464	3,325,257	4,207	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	207,782	196,172	11,610	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	377,550	363,445	14,105	*European Euro*
Baht Thailand	18,493	18,487	6	*Thailand Baht*
Poundsterling Inggris	42,748	35,283	7,465	*British Poundsterling*
Dolar Australia	54,763	48,348	6,415	*Australian Dollar*
Yuan China	11,227	12,538	1,311	*China Yuan*
Dolar Hong Kong	3,912	8,080	4,168	*Hong Kong Dollar*
Franc Swiss	491	-	491	*Swiss Franc*
Rupee India	74	-	74	*Indian Rupee*
Ringgit Malaysia	1	-	1	*Malaysia Ringgit*
Jumlah			185,924	***Total***
Jumlah Modal Tier I dan II			35,452,414	***Total Tier I and II Capital***
Rasio PDN			0.52%	*NOP Ratio*

	31 Desember/*December* 2022			
Mata Uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	***Currencies***
Laporan posisi keuangan dan rekening administratif				***Statement of financial position and off-balance sheet***
Dolar Amerika Serikat	91,937,455	92,027,248	89,793	*United States Dollar*
Yen Jepang	2,782,946	2,784,000	1,054	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	153,753	151,179	2,574	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	549,811	548,073	1,738	*European Euro*
Baht Thailand	84,304	89,911	5,607	*Thailand Baht*
Poundsterling Inggris	35,593	36,100	507	*British Poundsterling*
Dolar Australia	38,727	31,458	7,269	*Australian Dollar*
Yuan China	5,390	4,802	588	*China Yuan*
Dolar Hong Kong	452	1,151	699	*Hong Kong Dollar*
Franc Swiss	226	-	226	*Swiss Franc*
Rupee India	30	-	30	*Indian Rupee*
Jumlah			110,085	***Total***
Jumlah Modal Tier I dan II			33,705,339	***Total Tier I and II Capital***
Rasio PDN			0.33%	*NOP Ratio*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas Bank terhadap mata uang asing diperhitungkan dengan menggunakan informasi selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Bank (linier) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 atas perubahan nilai tukar mata uang asing yaitu:

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk *(continued)*

(i) Foreign currency risk (continued)

The Bank's sensitivity to foreign currency is calculated using net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency and the net difference of receivables and commitments and contingent liabilities in the off-balance sheet accounts for each foreign currency information.

The table below shows the sensitivity of the Bank's net income (linear) to movement of foreign exchange rates as of 31 December 2023 and 2022:

	Menambah (mengurangi) laba bersih/ *Increase (decrease) net income*		
	2023	**2022**	
IDR melemah 1%	(972)	(852)	*IDR weakening by 1%*
IDR menguat 1%	972	852	*IDR strengthening by 1%*

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa perubahan nilai tukar mata uang asing bergerak pada jumlah yang sama sehingga tidak mencerminkan perubahan potensial kepada laba atas perubahan beberapa nilai tukar mata uang asing sementara lainnya tidak berubah. Proyeksi juga mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan dan berdasarkan tanggal pelaporan yang konstan serta seluruh posisi berjalan hingga jatuh tempo.

The above projection assumes that foreign exchange rates move by the same amount and, therefore, do not reflect the potential impact on profit of some rates changing while others remain unchanged. The projections also assume that all other variables are held constant and are based on a constant reporting date position and that all positions run to maturity.

(ii) Risiko suku bunga

Pendapatan Bank yang berasal dari kegiatan konvensional merupakan selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aset dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan Bank.

Risiko suku bunga berdampak pada fluktuasi arus kas di masa mendatang baik pada aset maupun liabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank maupun nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki Bank.

Bisnis utama Entitas Anak adalah memberikan pembiayaan dengan akad murabahah. Pendapatan marjin murabahah dipengaruhi oleh harga pembiayaan atau suku bunga di pasar konvensional.

(ii) Interest rate risk

The Bank's income from conventional activities are derived from the difference between the interest generated on the asset side and the interest paid to third party funds. If not anticipated, changes in interest rates can result in a decrease in the Bank's income.

Interest rate risk has an effect to future cash flows fluctuation of both assets and liabilities. It can affect the Bank's interest income and fair value of the financial instruments.

The Subsidiary's main business is to provide financing with murabahah contracts. The murabahah margin income is affected by the financing price or interest rate in the conventional market.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Manajemen risiko suku bunga

Kebijakan yang dijalankan Grup dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga mencakup:

- Memantau limit risiko suku bunga.
- Mengelola risiko suku bunga sesuai regulasi terkait dan kebijakan internal Bank.
- Melakukan simulasi perhitungan pendapatan marjin bersih terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga di pasar.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur instrumen keuangan Grup terhadap risiko tingkat suku bunga.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

***Market risk** (continued)*

(ii) Interest rate risk (continued)

Interest rate risk management

Policies adopted by the Group in managing its interest rate risk include:

- *Monitoring of interest rate risk limit.*
- *Managing interest rate risk in accordance with relevant regulations and Bank's internal policies.*
- *Conduct simulation of net margin income calculation toward all possible market interest rate changes.*

The tables below summarise the exposures of financial instruments of the Group to interest rate risks.

	31 Desember/*December* 2023										
	Suku bunga mengambang/*Floating rate*			Bunga tetap/*Fixed rate*					Tidak dikenakan bunga/ *Non-interest bearing*	Jumlah/ *Total*	
	≤ 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ *months*	> 3 - 6 bulan/ *months*	≤ 1 bulan/ *month*	1 - 3 bulan/ *months*	> 3 - 6 bulan/ *months*	> 6 - 12 bulan/ *months*	> 12 bulan/ *months*			
Aset											***Assets***
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428,683	1,428,683	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	9,276,598	-	-	-	-	-	9,276,598	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	-	-	962,387	-	-	-	-	-	962,387	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	-	-	-	8,853,154	108,500	-	-	-	2,624	8,964,278	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	-	-	-	3,687,758	5,192,893	1,098,198	1,557,689	5,577,475	150,343	17,264,356	*Securities*
Tagihan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133,149	1,133,149	*Derivative receivables*
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	3,289,757	3,289,757	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	48,638,687	27,012,683	5,437,501	18,518,832	4,973,021	6,602,727	13,944,202	28,833,876	3,697,564	157,659,093	*Loans and sharia financing/ receivables*
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-	-	102,586	102,586	*Investment in shares*
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	423,113	423,113	*Other assets*
Jumlah aset keuangan, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	48,638,687	27,012,683	5,437,501	41,298,729	10,274,414	7,700,925	15,501,891	34,411,351	10,227,819	200,504,000	*Total financial assets before allowance for impairment losses*
Liabilitas											***Liabilities***
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	-	-	(71,606)	(71,606)	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah	-	-	-	(85,087,550)	(9,139,063)	(2,185,498)	(1,760,395)	(105,250)	(179,647)	(98,457,403)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	-	-	-	(8,943,983)	(1,870,655)	-	-	-	(7,483)	(10,822,121)	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,072,104)	(1,072,104)	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,323,633)	(2,323,633)	*Acceptance payables*
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	(200,569)	-	(1,514)	(202,083)	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	(13,642,758)	(15,503,211)	-	-	-	-	(697,515)	(1,361,013)	(151,020)	(31,355,517)	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	-	(3,079,400)	-	-	-	-	-	-	(10,960)	(3,090,360)	*Subordinated loans*
Liabilitas sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	(353,990)	(353,990)	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	(505,982)	(505,982)	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	(13,642,758)	(18,582,611)	-	(94,031,533)	(11,009,718)	(2,185,498)	(2,658,479)	(1,466,263)	(4,677,939)	(148,254,799)	*Total financial liabilities*
Jumlah *gap repricing* suku bunga	34,995,929	8,430,072	5,437,501	(52,732,804)	(735,304)	5,515,427	12,843,412	32,945,088	5,549,880	52,249,201	*Total interest repricing gap*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *41. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko pasar (lanjutan) / ***Market risk** (continued)*

(ii) Risiko tingkat bunga (lanjutan) / *(ii) Interest rate risk (continued)*

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan) / *Interest rate risk management (continued)*

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur instrumen keuangan Grup terhadap risiko tingkat suku bunga (lanjutan).

The tables below summarise the exposures of financial instruments of the Group to interest rate risks (continued).

	31 Desember/*December* 2022										
	Suku bunga mengambang/*Floating rate*			Bunga tetap/*Fixed rate*							
	≤ 1 bulan/ month	1 - 3 bulan/ *months*	> 3 - 6 bulan/ *months*	≤ 1 bulan/ *month*	1 - 3 bulan/ *months*	> 3 - 6 bulan/ *months*	> 6 - 12 bulan/ *months*	> 12 bulan/ *months*	Tidak dikenakan bunga/ *Non-interest bearing*	Jumlah/ *Total*	
Aset											***Assets***
Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,747,461	1,747,461	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	10,215,350	-	-	-	-	-	10,215,350	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	-	-	2,189,561	-	-	-	-	-	2,189,561	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	-	-	-	21,795,214	90,000	-	-	-	2,851	21,888,065	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	-	-	-	3,814,073	2,191,661	4,815,591	1,535,920	6,543,573	149,871	19,050,689	*Securities*
Tagihan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	1,746,824	1,746,824	*Derivative receivables*
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	3,069,854	3,069,854	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	30,903,104	22,519,915	2,264,603	25,713,180	9,544,255	7,904,430	16,018,677	30,240,862	1,893,024	147,002,050	*Loans and sharia financing/ receivables*
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-	-	103,473	103,473	*Investment in shares*
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	228,822	228,822	*Other assets*
Jumlah aset keuangan, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	30,903,104	22,519,915	2,264,603	63,727,378	11,825,916	12,720,021	17,554,597	36,784,435	8,942,180	207,242,149	*Total financial assets before allowance for impairment losses*
Liabilitas											***Liabilities***
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	-	-	(59,045)	(59,045)	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah	-	-	-	(93,702,148)	(8,940,417)	(1,438,514)	(929,691)	(12,518)	(145,623)	(105,168,911)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	-	-	-	(166,131)	-	-	-	-	-	(166,131)	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,447,736)	(1,447,736)	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,356,828)	(2,356,828)	*Acceptance payables*
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	(200,134)	(1,514)	(201,648)	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	(26,725,906)	(12,918,338)	(3,113,500)	-	-	-	(100,000)	(2,053,862)	(155,802)	(45,067,408)	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	-	(3,113,500)	-	-	-	-	-	-	(12,078)	(3,125,578)	*Subordinated loans*
Liabilitas sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	(425,887)	(425,887)	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	(330,316)	(330,316)	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	(26,725,906)	(16,031,838)	(3,113,500)	(93,868,279)	(8,940,417)	(1,438,514)	(1,029,691)	(2,266,514)	(4,934,829)	(158,349,488)	*Total financial liabilities*
Jumlah *gap repricing* suku bunga	4,177,198	6,488,077	(848,897)	(30,140,901)	2,885,499	11,281,507	16,524,906	34,517,921	4,007,351	48,892,661	*Total interest repricing gap*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Grup selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 atas kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar, dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan asimetris di kurva imbal hasil:

***41. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Market risk** (continued)*

(ii) Interest rate risk (continued)

Interest rate risk management (continued)

The table below shows the sensitivity of the Group's net profit during the year ended 31 December 2023 and 2022 due to an increase or decrease in market interest rates, assuming no assymetrical movement in yield curves:

	(Penurunan) peningkatan laba bersih/ *(Decrease) increase net profit*		
	2023	**2022**	
Peningkatan 100 bps	22,945	3,903	*Increased by 100 bps*
Penurunan 100 bps	(32,651)	(14,083)	*Decreased by 100 bps*

Manajemen Risiko Permodalan

Modal regulasi

Tujuan manajemen permodalan Grup adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Grup mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA),* Bank wajib melakukan perhitungan KPMM minimum berdasarkan profil risiko dan melakukan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).* Peraturan ini juga mengatur tentang pemenuhan rasio modal inti (*Tier 1*) paling rendah sebesar 6% dan rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5%, efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

Grup telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

Capital Risk Management

Regulatory capital

The Group capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investors, depositors, customers and market confidence. In managing its capital, the Group considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

According to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 dated 12 December 2013 regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) for Commercial Bank and SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 regarding Capital Adequacy Ratio based on Risk Profile and Fullfillment of Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA), the Bank is required to calculate minimum CAR in accordance to its risk profile and to perform Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). This regulation also stipulates minimum Tier 1 ratio at the minimum of 6% and common equity Tier 1 ratio at the minimum of 4.5%, effective on 1 January 2014.

The Group has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *41. RISK MANAGEMENT (continued)*

Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan) / ***Capital Risk Management** (continued)*

Modal regulasi (lanjutan) / ***Regulatory capital** (continued)*

Posisi permodalan Grup berdasarkan peraturan OJK yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The Group's regulatory capital position under the prevailing OJK regulation as of 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
KONSOLIDASI			***CONSOLIDATED***
Aset tertimbang menurut risiko			***Risk weighted assets***
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	125,294,554	121,057,375	*With credit risk charge* -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	135,795,396	144,374,143	*With credit, operational risk charge* -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	137,651,897	145,091,415	*With credit, operational and market risk charge* -
Modal			***Capital***
- Modal inti	36,613,893	34,966,039	*Core capital* -
- Modal pelengkap	4,543,487	4,626,967	*Supplementary capital* -
	41,157,380	39,593,006	
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum			***Capital adequacy ratio***
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	32.85%	32.71%	*With credit risk charge* -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	30.31%	27.42%	*With credit, operational risk charge* -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	29.90%	27.29%	*With credit, operational and market risk charge* -
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% sampai dengan kurang dari 10%/*9% to less than 10%*	9% sampai dengan kurang dari 10%/*9% to less than 10%*	*Minimum capital adequacy ratio required*
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	29.90%	27.29%	*Capital Adequacy Ratio* -
- Rasio CET 1	26.60%	24.10%	*CET 1 ratio* -
- Rasio tier 1	26.60%	24.10%	*Tier 1 ratio* -
- Rasio tier 2	3.30%	3.19%	*Tier 2 ratio* -
BANK			***BANK***
Aset tertimbang menurut risiko			***Risk weighted assets***
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	116,728,894	113,060,445	*With credit risk charge* -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	126,954,327	129,231,779	*With credit, operational risk charge* -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	128,810,828	129,949,051	*With credit, operational and market risk charge* -
Modal			***Capital***
- Modal inti	31,015,970	29,178,186	*Core capital* -
- Modal pelengkap	4,436,444	4,527,153	*Supplementary capital* -
	35,452,414	33,705,339	
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum			***Capital adequacy ratio***
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	30.37%	29.81%	*With credit risk charge* -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	27.93%	26.08%	*With credit, operational risk charge* -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	27.52%	25.94%	*With credit, operational and market risk charge* -
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% sampai dengan kurang dari 10%/*9% to less than 10%*	9% sampai dengan kurang dari 10%/*9% to less than 10%*	*Minimum capital adequacy ratio required*
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	27.52%	25.94%	*Capital Adequacy Ratio* -
- Rasio CET 1	24.08%	22.45%	*CET 1 ratio* -
- Rasio tier 1	24.08%	22.45%	*Tier 1 ratio* -
- Rasio tier 2	3.44%	3.48%	*Tier 2 ratio* -

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *41. RISK MANAGEMENT (continued)*

Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan) / ***Capital Risk Management** (continued)*

Modal regulasi (lanjutan) / ***Regulatory capital** (continued)*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
ENTITAS ANAK			***SUBSIDIARY***
Modal inti	8,235,764	8,019,187	***Core capital***
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	107,043	99,814	***Supplementary capital (maximum at 100% from core capital)***
Jumlah modal	8,342,807	8,119,001	***Total capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			*Risk Weighted Assets (RWA)*
Risiko Kredit	8,072,300	7,750,299	*Credit Risk*
Risiko Operasional	8,095,128	7,380,362	*Operational Risk*
Rasio total	51.60%	53.66%	***Total ratio***
Rasio KPMM yang diwajibkan	9% - 10%	9% - 10%	***Minimum CAR***

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. Bank Indonesia's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement to available capital resources.

Reformasi acuan suku bunga / ***Interest rate benchmark reform***

Reformasi mendasar dari acuan suku bunga utama sedang dilakukan secara global, termasuk penggantian beberapa suku bunga yang ditawarkan antar bank ("IBOR") dengan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko ("Reformasi IBOR").

A fundamental reform of major interest rate benchmarks is being undertaken globally, including the replacement of some interbank offered rates ("IBORs") with alternative nearly risk-free rates ("IBOR Reform")

Bank memiliki eksposur terhadap IBOR atas instrumen keuangan yang akan direformasi sebagai bagian dari inisiatif pasar global.

The Bank has exposures to IBORs on its financial instruments that will be reformed as part of this market-wide initiative.

Pada tanggal 27 Juli 2017, *Financial Conduct Authority* (FCA) mengumumkan bahwa setelah tanggal 31 Desember 2021, bank yang menjadi kontributor LIBOR tidak lagi diwajibkan untuk memberikan kuotasi LIBOR. Menindaklanjuti pengumuman dari FCA tersebut, lima otoritas dari masing-masing negara mata uang LIBOR mencari dan memilih suku bunga referensi alternatif (*Alternative Reference Rate - ARR)* untuk menggantikan LIBOR.

On 27 July 2017, Financial Conduct Authority (FCA) announced that after 31 December 2021, banks contributing to LIBOR will be no longer required to provide LIBOR quotation. In response to the announcement from FCA, five authorities from each LIBOR currency country moved to find and select an alternative reference rate (ARR) to replace LIBOR.

Seluruh otoritas pada negara mata uang LIBOR memilih ARR berupa bunga rata-rata tertimbang dari transaksi *repurchase agreement* (*secured*) atau transaksi pasar uang antar bank (*unsecured*) dengan jangka waktu *overnight*. Pemilihan transaksi dengan tenor *overnight* dilakukan karena transaksi pada tenor tersebut paling likuid dan merefleksikan suku bunga pasar antarbank.

All authorities in the LIBOR currency country choose ARR in the form of a weighted average of repurchase agreement transactions (secured) or interbank money market transactions (unsecured) with overnight tenor. The selection of transactions with overnight tenor is made because transactions in this tenor is the most liquid and reflecting interbank market interest rates.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Reformasi acuan suku bunga (lanjutan)

Risiko utama yang dihadapi Bank sebagai akibat dari reformasi IBOR adalah risiko operasional. Sebagai contoh, renegosiasi kontrak perjanjian pinjaman secara bilateral dengan nasabah, pembaruan persyaratan kontrak, pembaruan sistem yang masih menggunakan IBOR dan perubahan kontrol operasional terkait reformasi IBOR. Risiko keuangan sebagian besar terbatas pada risiko suku bunga.

Bank membentuk Komite IBOR lintas fungsi untuk mengelola transisi ke ARR. Tujuan Komite IBOR termasuk mengevaluasi sejauh mana pinjaman yang diberikan, komitmen kredit, dan transaksi *trade finance* perlu diubah sebagai dampak dari reformasi IBOR dan bagaimana mengelola komunikasi tentang reformasi IBOR dengan pihak lawan.

Bank mengelola transisi IBOR ke ARR sebagai berikut:

1. Menggunakan ARR pada kontrak keuangan baru sesuai anjuran otoritas masing-masing negara mata uang LIBOR dengan mempertimbangkan beberapa opsi ARR yang sesuai.
2. Membentuk tim transisi IBOR untuk memastikan kelancaran proses transisi, baik dari sisi tata kelola, manajemen risiko, prosedur, sistem informasi, legal dan akuntansi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan negosiasi kontrak-kontrak yang ada dengan debitur atau pihak lawan untuk menyepakati klausul *fallback*, antara lain mengenai *trigger event*, suku bunga referensi pengganti dan *notice of payment*.
4. Menggunakan bahasa untuk klausul *fallback* dari standard pasar yang berlaku secara global, misalnya ISDA *Fallback Protocol* atau *Asia Pacific Loan Market Association* (APLMA).
5. Mengikuti terus perkembangan proses transisi IBOR.

Terkait reformasi IBOR, Bank menetapkan tenggat waktu penghentian internal untuk transaksi berbasis LIBOR mulai tanggal 30 Juni 2021, dengan *exceptional handling* untuk produk USD LIBOR untuk menunjang kebutuhan pelanggan.

Suku bunga alternatif yang digunakan Bank dalam transisi dari LIBOR adalah sebagai berikut:

41. RISK MANAGEMENT (continued)

***Interest rate benchmark reform** (continued)*

The main risks to which the Bank is exposed as a result of IBOR reform are operational risks. For example, billateral renegotiation of loan contracts with customers, amendments of contractual terms, updating systems that use IBOR curves and changes of operational controls related to the IBOR reform. Financial risk is predominantly limited to interest rate risk.

The Bank established a cross-functional IBOR Committee to manage its transition to ARR. The objectives of the IBOR Committee include evaluating the extent of amendments required for loans, loan commitments and trade finance transactions as the impacts of IBOR reform and how to manage the communication about IBOR reform with counterparties.

The Bank manages the transition of LIBOR to ARR as follows:

1. *Using the ARR on new financial contracts as recommended by the authorities of each LIBOR currency by considering several appropriate ARR options.*
2. *Establishing a IBOR transition team to ensure a smooth transition process, both in terms of governance, risk management, procedures, information system, legal and accounting, with due observance of applicable regulations.*
3. *Negotiating outstanding contracts with debtors or counterparties to agree on fallback clauses, including on trigger events, alternative reference interest rates and notice of payments.*
4. *Using fallback clause language from market standards that apply globally, for example ISDA Fallback Protocol or Asia Pacific Loan Market Association (APLMA).*
5. *Continuing follow-ups on the development of the IBOR transition process.*

In response to the IBOR reform, the Bank has set an internal cessation deadlines for new LIBOR-based transactions since 30 June 2021, with certain exceptional handling for USD LIBOR products to support customer's needs.

Alternative interest rates that are used by the Bank in the transition from LIBOR are as follows:

Mata Uang/ ***Currency***	**Mata Uang IBOR/** ***Currency IBOR***	**Suku bunga referensi alternatif/** ***Alternative Reference Rate* (ARR)**
USD	USD LIBOR	*Cost of Fund, Fixed Rate, Compounded Secured Overnight Financing Rate (SOFR), Term Risk Free Rate (RFR)*
JPY	JPY LIBOR	*Cost of Fund, Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR), Compounded Tokyo Overnight Average Rate (TONAR), Tokyo Term Risk Free Rate (TORF)*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Reformasi acuan suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan acuan sebelum reformasi dari produk Bank yang terdampak (pinjaman yang diberikan dan derivatif), acuan baru dan status transisi.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Interest rate benchmark reform *(continued)*

The table below sets out the benchmark before reform from the impacted products (loans and derivatives), new benchmark and status of the transition.

Mata Uang/ *Currency*	Acuan sebelum reformasi/ *Benchmark before reform*	Acuan setelah reformasi/ *Benchmark after reform*	Status transisi pada tanggal 31 Desember 2023/ *Status of transition as of 31 December 2023*
USD	USD LIBOR	USD SOFR	Dalam proses/*In progress**
JPY	JPY LIBOR	JPY TONA	Selesai/*Completed*
JPY	JPY LIBOR	JPY TORF	Selesai/*Completed*

Tabel berikut adalah jumlah eksposur pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk instrumen keuangan non-derivatif (pinjaman yang diberikan) dan derivatif serta komitmen pinjaman yang terdampak terhadap reformasi IBOR. Eksposur pinjaman yang diberikan disajikan pada jumlah plafon fasilitasnya, sementara eksposur derivatif disajikan pada jumlah nosionalnya pada ekuivalen jutaan Rupiah, dijabarkan dengan nilai tukar mata uang tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The following table shows the total exposure as of 31 December 2023 and 2022 for non-derivative (loans) and derivative financial instruments as well as loan commitments which are affected by the IBOR reform. The exposure of loans are presented at their facility limit amount, while derivatives are presented at their notional amount in equivalent millions of Rupiah, translated using foreign exchange rate as of, 31 December 2023 and 2022.

31 Desember/*December* 2023

	Acuan JPY LIBOR/ *JPY LIBOR Benchmark*		**Acuan USD LIBOR/ *USD LIBOR Benchmark***		
	Eksposur yang belum direformasi/ *Unreformed exposures*	**Eksposur dengan klausul *fallback* yang sesuai/ *Amount with appropriate fallback clause***	**Eksposur yang belum direformasi/ *Unreformed exposures***	**Eksposur dengan klausul *fallback* yang sesuai/ *Amount with appropriate fallback clause***	
Pinjaman yang diberikan*					***Loans****
Committed	-	-	-	-	*Committed*
Uncommitted	-	-	-	-	*Uncommitted*
	-	-	-	-	
Derivatif					***Derivatives***
Antarbank	-	-	-	-	*Interbank*
Nasabah	-	-	-	-	*Customer*
	-	-	-	-	

*) Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank sudah tidak memiliki eksposur LIBOR pada setiap posisi mata uang asing. Beberapa perjanjian sindikasi yang semulanya memiliki eksposur USD LIBOR masih dalam proses penyelesaian dan persetujuan dari semua pihak-pihak sindikasi, namun telah mendapat persetujuan sementara untuk menggunakan USD SOFR sehingga Bank tidak lagi memiliki eksposur terhadap LIBOR pada tanggal 31 Desember 2023.

**) As of 31 December 2023, the Bank no longer has outstanding LIBOR exposures with respect to each currency position. A couple of syndicated facilities agreements which initially had exposures to USD LIBOR were still in progress of finalization and agreement from all related syndication parties, however have obtained temporary approval to use USD SOFR such that the Bank no longer has exposure to LIBOR as of 31 December 2023.*

31 Desember/*December* 2022

	Acuan JPY LIBOR/ *JPY LIBOR Benchmark*		**Acuan USD LIBOR/ *USD LIBOR Benchmark***		
	Eksposur yang belum direformasi/ *Unreformed exposures*	**Eksposur dengan klausul *fallback* yang sesuai/ *Amount with appropriate fallback clause***	**Eksposur yang belum direformasi/ *Unreformed exposures***	**Eksposur dengan klausul *fallback* yang sesuai/ *Amount with appropriate fallback clause***	
Pinjaman yang diberikan					***Loans***
Committed	-	-	10,606,829	5,373,159	*Committed*
Uncommitted	-	-	8,444,025	2,335,125	*Uncommitted*
	-	**-**	**19,050,854**	**7,708,284**	
Derivatif					***Derivatives***
Antarbank	-	-	-	18,271,151	*Interbank*
Nasabah	-	-	7,137,849	6,784,374	*Customer*
	-	**-**	**7,137,849**	**25,055,525**	

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, berikut ini adalah hirarki nilai wajar:

a. Level 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

b. Level 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan harga); dan

c. Level 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation of financial instruments

For financial assets and liabilities measured at fair value, the following is the hierarchy of the fair values:

a. Level 1

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

b. Level 2

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is as prices) or indirectly (that is derived from prices); and

c. Level 3

Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The tables below show the Group's financial assets and liabilities that were measured at fair value as of 31 December 2023 and 2022:

	31 Desember/*December* 2023					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Level 1	Level 2	Level 3	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset						***Assets***
Efek-efek	7,817,003	205,183	7,611,820	-	7,817,003	*Securities*
Tagihan derivatif	1,133,149	-	1,133,149	-	1,133,149	*Derivative receivables*
Penyertaan saham	102,586	-	80,064	22,522	102,586	*Investment in shares*
	9,052,738	205,183	8,825,033	22,522	9,052,738	
Liabilitas						***Liabilities***
Liabilitas derivatif	1,072,104	-	1,072,104	-	1,072,104	*Derivative payables*

	31 Desember/*December* 2022					
	Nilai tercatat/ *Carrying Value*	Level 1	Level 2	Level 3	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset						***Assets***
Efek-efek	9,578,603	-	9,578,603	-	9,578,603	*Securities*
Tagihan derivatif	1,746,824	-	1,746,824	-	1,746,824	*Derivative receivables*
Penyertaan saham	103,473	-	80,951	22,522	103,473	*Investment in shares*
	11,428,900	-	11,406,378	22,522	11,428,900	
Liabilitas						***Liabilities***
Liabilitas derivatif	1,447,736	-	1,447,736	-	1,447,736	*Derivative payables*

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya:

The table below summarizes the carrying amounts and fair values of those financial instruments not stated at their fair values:

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset					***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	9,276,598	9,276,598	10,215,350	10,215,350	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	962,229	962,229	2,189,146	2,189,146	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,964,278	8,964,278	21,887,894	21,887,894	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	9,446,554	9,461,043	9,471,087	9,757,119	*Securities*
Tagihan akseptasi	3,281,120	3,281,120	3,065,359	3,065,359	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	153,041,046	157,244,639	143,422,931	146,384,580	*Loans and sharia financing/ receivables*
Aset lain-lain	423,113	423,113	228,822	228,822	*Other assets*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Fair value estimation of financial instruments *(continued)*

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya: (lanjutan)

The table below summarizes the carrying amounts and fair values of those financial instruments not stated at their fair values: (continued)

	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Liabilitas					***Liabilities***
Liabilitas segera	71,606	71,606	59,045	59,045	*Obligation due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	21,951	21,951	18,996	18,996	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah	98,457,403	98,457,403	105,168,911	105,168,911	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	10,822,121	10,822,121	166,131	166,131	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	2,323,633	2,323,633	2,356,828	2,356,828	*Acceptance payables*
Efek-efek yang diterbitkan	202,083	204,635	201,648	204,077	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	31,355,517	31,388,521	45,067,408	45,106,240	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain	505,982	505,982	330,316	330,316	*Other liabilities*

Nilai wajar dari efek-efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value for securities, which maturity date is more than 1 year, are estimated using the last quoted market price (level 2 - fair value hierarchy).

Estimasi nilai wajar dari pinjaman yang diberikan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar (level 3 - hirarki nilai wajar).

The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current market rates to determine fair value (level 3 - fair value hierarchy).

Nilai tercatat dari pembiayaan syariah merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar dikarenakan pinjaman tersebut memiliki tenor jangka pendek.

Carrying value of sharia financing approximates the estimates fair value since sharia financing have short-term tenure.

Nilai wajar surat utang jangka menengah dihitung menggunakan teknik penilaian berdasarkan model internal Bank yaitu model penilaian diskonto arus kas. Input dalam teknik penilaian termasuk arus kas yang akan diterima di masa datang dan suku bunga pasar (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value of medium term notes was calculated using valuation technique based on the Bank's internal model which is discounted cash flow valuation model. Inputs into the valuation technique include expected future cash flows and interest rates (level 2 - fair value hierarchy).

Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value of bonds payable is estimated by using the last quoted market price (level 2 - fair value hierarchy).

Nilai wajar dari pinjaman yang diterima dinilai dengan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pinjaman terakhir yang digunakan (level 2 - hirarki nilai wajar).

The fair value of borrowings is estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lender for the last utilization of borrowings (level 2 - fair value hierarchy).

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya mendekati nilai wajarnya karena instrumen keuangan bersifat jangka pendek atau yang ditinjau ulang menggunakan harga pasar secara berkala.

Perhitungan nilai wajar dilakukan hanya untuk kepentingan pengungkapan dan tidak berdampak pada pelaporan posisi atau kinerja keuangan Grup. Nilai wajar yang dihitung oleh Grup mungkin berbeda dengan jumlah aktual yang akan diterima/dibayar pada saat penyelesaian atau jatuh tempo instrumen keuangan. Mengingat kategori tertentu instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan, maka terdapat pertimbangan manajemen dalam perhitungan nilai wajar.

Risiko operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional Bank.

Tata Kelola Pengelolaan Risiko Operasional

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif terhadap Manajemen Risiko Operasional melalui berbagai komite seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala sesuai *terms of reference* masing-masing untuk membahas risiko operasional.

Satuan Kerja *Operational & Fraud Risk Management* (OFRM) memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko, atas manajemen risiko operasional dan *fraud*. Bank telah merumuskan dan menetapkan profil dan tingkat risiko operasional secara memadai agar sejalan dengan sasaran dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. Pemantauan profil dan tingkat risiko operasional dilakukan melalui perangkat manajemen risiko operasional yaitu *operational risk appetite* dan *key risk indicator* yang menjadi bagian dalam kerangka kerja manajemen risiko operasional.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation of financial instruments
(continued)

The carrying amount of remaining financial assets and financial liabilities are reasonable approximation of fair value because they are short term in nature or re-price to current market rates frequently.

The fair values calculated are for disclosure purposes only and do not have any impact on the Group's reported financial performance or position. The fair values calculated by the Group may be different from the actual amount that will be received/paid on the settlement or maturity of the financial instruments. As certain categories of financial instruments are not traded, there is management's judgment involved in calculating the fair values.

Operational risk

Operational risk is defined as the risks of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, systems failure or external events that impacted to the Bank's operational activities.

Operational Risk Management Governance

The Board of Commissioners and the Board of Directors actively supervise operational risk management through various committees, such as the Risk Monitoring Committee and the Risk Management Committee that conducted periodically in accordance with terms of reference to discuss operational risks.

The Operational & Fraud Risk Management (OFRM) Unit has direct responsibility to the Head of Risk Management, for operational and fraud risk management. Bank had formulated and determined the profile and level of operational risk sufficiently to be in line with overall business goals and strategies of the Bank. Monitoring the operational risk profile and level is carried out through operational risk management tools, such as operational risk appetite and key risk indicators which are part of the operational risk management framework.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Satuan kerja OFRM bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengembangan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional, BCM (*Business Continuity Management*), Fungsi ICR (*Internal Control & Risk*) dan *fraud* yang kemudian akan dikaji ulang secara berkala, dengan mempertimbangkan setiap perubahan signifikan, baik secara internal maupun eksternal.

Setiap unit kerja wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari-hari. Bank juga telah memiliki sistem dan penetapan limit atau ambang batas untuk mendukung pengendalian umum dan khusus, seperti pemisahan tugas, cuti wajib tahunan, rekonsiliasi dan lainnya.

Kecukupan Proses Manajemen Risiko Operasional

Proses manajemen risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan secara terstruktur dan konsisten. Proses Manajemen Risiko Operasional di Bank diterapkan berdasarkan praktik terbaik yang efektif.

Tahapan proses manajemen risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional adalah sebagai berikut:

1. Risiko operasional dilakukan atas seluruh proses, produk, layanan, sistem, inisiatif dan struktur organisasi baru ataupun perubahannya. Identifikasi risiko operasional juga dilakukan melalui perangkat manajemen risiko operasional di antaranya *Risk Grading Matrix (*RGM*), Process Risk Control (*PRC*), Key Risk Indicator (*KRI*) dan Risk Acceptance (*RA*).*

2. Proses pengukuran risiko operasional meliputi kegiatan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara berkala melalui *Key Control Self Assessment (*KCSA*)*, analisa kejadian dan kerugian risiko operasional, pelaksanaan aktivitas pemeriksaan oleh Fungsi *Internal Control & Risk (*ICR*)*, pengukuran KRI dan *Operational Risk Appetite (*ORA*)* yang dilaporkan secara berkala dalam rapat Komite Manajemen Risiko (KMR).

41. RISK MANAGEMENT (continued)

***Operational risk** (continued)*

Adequacy of Policies, Procedures, and Determination of Limits

The OFRM is responsible for the formulation and development of operational risk management policies and procedures, BCM (Business Continuity Management), ICR (Internal Control & Risk) and fraud functions which will then be reviewed periodically, taking into account any significant changes, both internally and externally.

Each work unit must adhere to operational risk management policies and procedures in carrying out daily operational activities. Bank also has system and determination of limits to support common and specific controls, such as segregation of duties, annual mandatory block leave reconciliation and others.

Adequacy of Operational Risk Management Process

The process of operational risk management including identification, measurement, monitoring and risk control runs in a structured and consistent manner. The Operational Risk Management process in Bank implemented based on effective best practices.

The operational risk management process which include identification, measurement, monitoring and control of operational risk are describe as follows:

1. *Operational risk identification is carried out on process, product, services, system, initiative and organization for new and changes. The operational risk identification is also perform through operational risk management tools such as Risk Grading Matrix (RGM), Process Risk Control (PRC), Key Risk Indicator (KRI) and Risk Acceptance (RA).*

2. *Risk measurement process includes periodic self-assessment activities through Key Control Self Assessment (KCSA), analysis of operational risk events and losses, inspection activities by Internal Control & Risk (ICR) Function, KRI measurement and Operational Risk Appetite (ORA) which is reported regulary in meetings of Risk Management Committee (RMC).*

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Kecukupan Proses Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

Tahapan proses Manajemen Risiko Operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional adalah sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pemantauan risiko operasional dilakukan melalui pelaporan kepada manajemen senior dan regulator, baik secara rutin ataupun *ad-hoc*, termasuk pelaporan kejadian dengan kategori signifikan melalui SINP (*Significant Incident Notification Protocol*). Hal ini diterapkan agar setiap permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti.

4. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan menerapkan mekanisme kontrol pencegahan, deteksi dan koreksi yang efektif dan/atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan dampak kerugian operasional bagi Bank. Sebagai salah satu tindakan pengendalian, Bank telah memiliki pedoman bagi Manajemen Kelangsungan Bisnis (BCM) yang komprehensif.

Penyediaan aplikasi *Internal Control & Risk System (*ICRS) adalah sebagai *database* di dalam penerapan manajemen risiko operasional dan *fraud* dan sekaligus diharapkan agar dapat menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk risiko operasional yang dilakukan oleh Bank menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*) dan sesuai dengan ketentuan regulator.

Bank dan Entitas Anak telah memiliki pedoman pengelolaan kelangsungan usaha yang komprehensif dan mengacu kepada standar industri ISO 22301, dengan tujuan untuk mengantisipasi potensi risiko operasional yang dapat terjadi dari situasi ekstrem/kritikal baik yang disebabkan oleh faktor bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus maupun faktor lainnya seperti demonstrasi, kebakaran, gangguan sistem pasokan listrik, pandemi serta situasi bisnis yang kurang menguntungkan. Hal ini untuk memastikan keberlangsungan layanan kepada nasabah.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk *(continued)*

Adequacy of Operational Risk Management Process *(continued)*

The operational risk management process which include identification, measurement, monitoring and control of operational risk are describe as follows: (continued)

3. Operational risk monitoring is carried out through reporting to senior management and regulators, either on a regular basis or on an ad-hoc basis, including reporting events with significant incident through SINP (Significant Incident Notification Protocol). This is implemented so that any problems that occur can be immediately followed up.

4. Operational risk control is also carried out by implementing effective prevention, detection and correction control mechanisms and/or providing adequate insurance to minimize the impacts of operational losses on Bank. As one of the control measures, Bank has guidelines for comprehensive Business Continuity Management (BCM).

The existence of the Internal Control & Risk System (ICRS) application serves as database in the implementation of operational and fraud risk management and at the same time is expected to be able to present information needs in an accurate, timely and up-to-date manner to facilitate analysis and decision making.

The calculation of the Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) for operational risk carried out by the Bank has used standardized approach and comply with regulatory requirements.

The Bank and its Subsidiaries already have comprehensive business continuity management guidelines which refer to the ISO 22301 industry standard, with the aim of anticipating operational risks that may occur from extreme/critical situations either caused by natural disasters such as floods, earthquakes and volcaic eruptions or other factors such as demonstration, fires, disruptions to the power supply system, pandemic and unfavorable business situations. This is to ensure continuity of service to customers.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Operasional

Sistem pengendalian internal atas risiko operasional dilakukan melalui penerapan model 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*). Pada lini pertahanan pertama, *Risk Taking Unit* (RTU) dibantu oleh *Business Risk/ICR* dalam pengelolaan risiko operasional sehari hari. Pada lini pertahanan kedua, satuan kerja OFRM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pada lini pertahanan ketiga, Internal Audit secara independen melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata kelola dan efektivitas manajemen risiko operasional.

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak bertanggung jawab atas praktik pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui ICR MSA (*Maturity Self-Assessment*) yang terstandardisasi dan forum-forum yang diselenggarakan oleh satuan kerja OFRM untuk memfasilitasi Fungsi *Internal Control & Risk.*

Manajemen Risiko *Fraud*

Bank menerapkan *zero tolerance* terhadap setiap kejadian *fraud*. Bank senantiasa menindaklanjuti setiap kejadian *fraud* termasuk memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan maupun yang terlibat dalam kejadian *fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib (bila diperlukan).

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur strategi *anti fraud* yang memadai dan senantiasa disempurnakan secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko *fraud* dilakukan secara sistematis melalui sejumlah proses dan strategi.

Terkait dengan proses pencegahan risiko *fraud,* Bank telah menjalankan program *anti fraud awareness* untuk seluruh karyawan dan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan setiap pegawai bank. Penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan strategi *anti fraud* dilakukan secara berkala sehingga tetap sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu dilakukan kajian risiko *fraud* atas setiap produk, proses, sistem dan inisiatif baik baru maupun pengembangannya.

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk *(continued)*

Internal Control System for Operational Risk

Internal control system for operational risk is carried out through the implementation of three lines of defense models. In the first line of defense, the Risk Taking Unit (RTU) assisted by Business Risk/ICR in carried out day-to-day operational risk management. In the second line of defense, the OFRM work unit is overseeing the implementation of risk management process in accordance with stipulated policy.

In the third line of defence, Internal Audit independently examines and evaluates the governance and effectiveness of operational risk management.

Alignment process between the parties responsible for Bank's internal control practices is carried out on an ongoing basis through a standardized ICR MSA (Maturity Self-Assessment) matrix and forums organized by the OFRM work unit to facilitate the Internal Control & Risk Function.

Fraud Risk Management

The Bank has no tolerance to any fraud incident. Bank always follows up on every fraud incident including providing sanctions to employees who commit or are involved in fraud incidents as per prevailing regulations including reporting to the authorities (if necessary).

Bank has adequate policies and procedures of anti fraud strategies which are continuously improvised. Fraud risk management is systematically handled through a series of process and strategy.

In relation to fraud risk prevention process, the Bank has implemented anti fraud awareness program for all employees and the signing of integrity pact by the Board of Directors, Board of Commissioners, and every Bank employee. Adjustments to policies and procedures for managing anti fraud strategies are carried out regularly to be in line with current conditions. In addition, both new and development products, processes, systems and initiatives are assessed for potential fraud risk.

41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Manajemen Risiko *Fraud* *(lanjutan)*

Sosialisasi *anti fraud awareness* dilakukan melalui beberapa media, yaitu melalui *e-newsletter broadcast, email broadcast, wallpaper desktop* PC/laptop, *standing acrylics*, BTPN Info, penayangan video animasi *anti fraud, mandatory anti-fraud e-learning*, pelaksanaan *anti-fraud awareness* yang disampaikan secara *in-class training* maupun pelatihan secara *virtual* kepada karyawan. Selain itu, ada layanan *whistleblowing* di Bank yang dapat digunakan untuk melaporkan kejadian berindikasi *fraud*.

Bank juga memberikan berbagai berbagai sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran *fraud* kepada pihak ketiga baik nasabah maupun vendor termasuk melakukan pelatihan secara *virtual* perihal *anti fraud* maupun *Entertainment & Gift* kepada vendor secara berkala untuk turut serta membantu Bank dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Sejalan dengan strategi *anti fraud* yang berlaku, Bank juga secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi pelaporan *fraud* melalui *whistleblowing channel* sebagai salah satu media pendeteksian kejadian *fraud*, yang secara berkala dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media internal Bank. Karyawan dapat mengungkap dan melaporkan setiap Tindakan pelanggaran (*misconduct*) melalui saluran *e-mail* (Ayo Lapor), Whatsapps, telepon, surat maupun pertemuan tatap muka.

Bank telah memiliki kebijakan yang memadai terkait proses investigasi dan pelaporan kejadian *fraud*. Untuk setiap kasus *fraud* yang terbukti, proses pemberian sanksi diputuskan oleh Komite *Fraud* dan melibatkan unit kerja terkait, *Business Risk/ICR* terkait, satuan kerja Sumber Daya Manusia dan OFRM. Implementasi keputusan Komite *Fraud* dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menentukan upaya perbaikan di masa yang akan datang.

41. RISK MANAGEMENT *(continued)*

Operational risk *(continued)*

Fraud Risk Management *(continued)*

Anti fraud socialization and awareness was carried out through several media, namely e-newsletters, email broadcasts, desktop PC/laptop wallpapers, standing acrylics, BTPN Info, anti fraud animation videos, anti fraud mandatory e-learning, in-class or virtual anti fraud awareness training to employees. In addition, there is whistleblowing channel provided by Bank for reporting indication of fraud.

Bank also provides various socialization programs to raise awareness of fraud to third parties, both customers and vendors, including conducting virtual training on anti fraud and Entertainment & Gifts for vendors on regular basis in supporting the Bank to maintaining good corporate governance.

In line with the applicable anti fraud strategy, Bank also continuously socialized the fraud reporting through whistleblowing channel for detecting fraud incident, which is regularly communicated to all employees through various internal Bank media. Employees can disclose and report any violations (misconduct) through e-mail channels (Ayo Lapor), Whatsapps, telephone, letters or face-to-face meetings.

The Bank has adequate policies regarding investigation process and reporting of fraud. For each proven fraud case, the process of imposing sanctions is decided by Fraud Committee involving the relevant work units, related Business Risk/ICR, Human Resources and OFRM unit. The implementation of Fraud Committee's decisions is monitored and evaluated periodically to determine future improvement efforts.

42. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

42. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

The balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows:

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
ASET			***ASSETS***
Kas			*Cash*
Dolar Amerika Serikat	54,843	37,029	*United States Dollar*
Yen Jepang	3,821	3,219	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	602	-	*Singapore Dollar*
	59,266	40,248	
Giro pada Bank Indonesia			*Current accounts with Bank Indonesia*
Dolar Amerika Serikat	2,312,722	2,505,286	*United States Dollar*
Giro pada bank-bank lain			*Current accounts with other banks*
Dolar Amerika Serikat	446,607	1,453,587	*United States Dollar*
Yen Jepang	153,105	390,933	*Japanese Yen*
Euro Eropa	62,471	89,866	*European Euro*
Dolar Australia	54,675	38,734	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	52,601	2,234	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	42,308	35,593	*British Poundsterling*
Baht Thailand	18,448	84,304	*Thailand Baht*
Lain-lain	14,445	2,088	*Others*
	844,660	2,097,339	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain			*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Dolar Amerika Serikat	5,897,051	10,578,116	*United States Dollar*
Efek-efek			*Securities*
Dolar Amerika Serikat	958,932	1,224,327	*United States Dollar*
Tagihan akseptasi			*Acceptance receivables*
Dolar Amerika Serikat	1,504,872	1,171,471	*United States Dollar*
Yuan China	1,161	-	*China Yuan*
	1,506,033	1,171,471	
Pinjaman yang diberikan			*Loans*
Dolar Amerika Serikat	46,063,513	44,368,513	*United States Dollar*
Yen Jepang	606,229	782,342	*Japanese Yen*
Euro Eropa	79,104	167,004	*European Euro*
	46,748,846	45,317,859	
Penyertaan saham			*Investment in shares*
Dolar Amerika Serikat	80,064	80,951	*United States Dollar*
Aset lain-lain			*Other assets*
Dolar Amerika Serikat	298,151	852	*United States Dollar*
Euro Eropa	230	213	*European Euro*
Yen Jepang	161	-	*Japanese Yen*
	298,542	1,065	
Jumlah aset	**58,706,116**	**63,016,662**	***Total assets***

42. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: (lanjutan)

42. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

The balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows: (continued)

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas segera			*Liabilities due immediately*
Dolar Amerika Serikat	4,571	-	*United States Dollar*
Giro			*Current accounts*
Dolar Amerika Serikat	8,735,833	10,174,982	*United States Dollar*
Yen Jepang	1,928,682	1,144,277	*Japanese Yen*
Baht Thailand	10,797	87,556	*Thailand Baht*
Euro Eropa	98,942	75,158	*European Euro*
Lain-lain	7,753	10,364	*Others*
	10,782,007	11,492,337	
Tabungan			*Savings deposits*
Dolar Amerika Serikat	543,438	344,625	*United States Dollar*
Yen Jepang	215,605	150,877	*Japanese Yen*
Euro Eropa	74,536	74,828	*European Euro*
Dolar Singapura	72,622	47,876	*Singapore Dollar*
Lain-lain	102,377	68,270	*Others*
	1,008,578	686,476	
Deposito berjangka dan deposito *on call*			*Time deposits and deposits on call*
Dolar Amerika Serikat	10,536,100	10,278,476	*United States Dollar*
Yen Jepang	420,523	58,108	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	54,295	-	*Singapore Dollar*
	11,010,918	10,336,584	
Simpanan dari bank-bank lain			*Deposits from other banks*
Dolar Amerika Serikat	9,238,200	-	*United States Dollar*
Liabilitas akseptasi			*Acceptance payables*
Dolar Amerika Serikat	538,748	483,529	*United States Dollar*
Yuan China	1,161	-	*China Yuan*
	539,909	483,529	
Pinjaman yang diterima			*Borrowings*
Dolar Amerika Serikat	23,018,515	36,926,110	*United States Dollar*
Euro Eropa	170,383	331,634	*European Euro*
	23,188,898	37,257,744	
Pinjaman subordinasi			*Subordinated loans*
Dolar Amerika Serikat	3,079,400	3,113,500	*United States Dollar*
Liabilitas lain-lain			*Other liabilities*
Dolar Amerika Serikat	422,215	157,999	*United States Dollar*
Yuan China	823	-	*China Yuan*
Yen Jepang	723	333	*Japanese yen*
Lain-lain	430	10	*Others*
	424,191	158,342	
Jumlah liabilitas	**59,276,672**	**63,528,512**	***Total liabilities***
(Liabilitas) aset bersih	**(570,556)**	**(511,850)**	***Net (liabilities) assets***

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), maka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank.

Berdasarkan Siaran Pers yang terakhir diterbitkan di tahun 2023 yaitu Siaran Pers No. PRESS-43/SEKL/2023 tanggal 25 September 2023, tingkat bunga penjaminan LPS menjadi sebesar 4,25% untuk simpanan dalam Rupiah dan 2,25% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Grup adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Premi yang telah dibayarkan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp 233.280 dan Rp 213.414.

43. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation as Substitution of Law No. 7 Year 2009 dated 13 January 2009 regarding with the Determination of Government Regulation as Substitution of Law No. 3 Year 2008, Deposit Insurance Agency ("LPS") was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criterias.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS), the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp 2,000 per depositor per bank as of 31 December 2023 and 2022.

Based on the latest issued Press Release in 2023 which is Press Release No. PRESS-43/SEKL/2023 dated 25 September 2023, the guaranteed interest rate by LPS is 4.25% for deposits denominated in Rupiah and 2.25% for deposits denominated in foreign currency.

The Group both are participants of the guarantee program. Premium paid for the year ended 31 December 2023 and 2022 were Rp 233,280 and Rp 213,414, respectively.

44. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Dengan lewatnya jangka waktu penyampaian keberatan dari Kreditur atas perubahan modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perubahan anggaran dasar sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 07 tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0082757.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 7 Februari 2024.

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau *Rights Issue* yang diputuskan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 7 Desember 2023, Bank telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-29/D.04/2024 tanggal 19 Februari 2024.

44. SUBSEQUENT EVENTS AFTER REPORTING DATE

By the lapsing of the time period on Creditor's objection filing in regards to the capital changes as meant by the Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company, the changes in the articles of association have been stipulated in the Deed No. 7 dated 7 December 2023 which was made by Notary Ashoya Ratam SH, MKn, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0082757.AH.01.02. Year 2023 dated 7 February 2024.

In regards to the plan of Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights (PMHMETD) or Rights Issue which has been decided in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 7 December 2023, Bank has obtained the effective statement from Financial Service Authority with letter Number S-29/D.04/2024 dated 19 February 2024.

44. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Bank telah mengungkapkan rencana penggunaan dana *Rights Issue* tersebut adalah untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha melalui pengambilalihan perusahaan-perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha pembiayaan yaitu PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance, dari SMBC dan PT Summit Auto Group (yang saat ini merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Corporation).

***44. SUBSEQUENT EVENTS AFTER REPORTING DATE** (continued)*

The Bank has disclosed its plan to use the proceed from the Rights Issue fund to expand and invest through the acquisition of financing business companies namely PT Oto Multiartha and PT Summit Oto Finance, from SMBC and PT Summit Auto Group (which is currently a subsidiary of Sumitomo Corporation).

45. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) relevan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024:
- Amandemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”
- Amandemen PSAK 2 “Laporan Arus Kas”
- Amandemen PSAK 60 “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
- Amandemen PSAK 73 “Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik”

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025:
- Amandemen PSAK 10 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

45. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

The relevant Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards (DSAK) but not yet effective for the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023 are as follows:

PSAK that will become effective on 1 January 2024:
- *Amendments to PSAK 1 “Presentation of Financial Statements: Disclosure of Long Term Liabilities under the Covenant”*
- *Amendments to PSAK 2 “Cash Flow Statement”*
- *Amandements PSAK 60 “Financial Intruments: Disclosure”*
- *Amendments to PSAK 73 “Lease: Lease Liabilities on Sale and Leaseback Transactions”*

PSAK that will become effective on 1 January 2025:
- *Amendments to PSAK 10 “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates”*

As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the new standard to the consolidated financial statements.

46. REKONSILIASI UTANG BERSIH / *46. NET DEBT RECONCILIATION*

	Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	Utang obligasi/ *Bonds payable*	Pinjaman subordinasi/ *Subordinated loans*	Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	Jumlah/ *Total*	
Utang bersih tanggal 1 Januari 2022	34,843,870	1,003,468	2,852,954	500,902	39,201,194	*Net debt as of 1 January 2022*
Arus kas	10,143,096	(799,000)	-	(146,455)	9,197,641	*Cash flows*
Perubahan lain*)	80,442	(2,820)	272,624	71,440	421,686	*Other changes *)*
Utang bersih tanggal 31 Desember 2022	45,067,408	201,648	3,125,578	425,887	48,820,521	*Net debt as of 31 December 2022*
Arus kas	(15,277,847)	(15,578)	(205,135)	(116,558)	(15,615,129)	*Cash flows*
Perubahan lain*)	1,565,956	16,013	169,917	44,661	1,796,547	*Other changes *)*
Utang bersih tanggal 31 Desember 2023	31,355,517	202,083	3,090,360	353,990	35,001,950	*Net debt as of 31 December 2023*

*) Perubahan lain termasuk pergerakan non-kas yang merupakan dampak perubahan selisih kurs, amortisasi biaya transaksi, dan akrual beban bunga

**) Other changes include non-cash movements which are effect of exchange rate, amortization of transaction cost, and accrued interest expenses*

47. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN / *47. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Bank menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan PT BANK BTPN Tbk (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT BANK BTPN Tbk (Entitas Induk) (halaman 214-222) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk dan Entitas Anak.

The Bank issued the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of PT BANK BTPN Tbk (Parent Entity) which account for investments in Subsidiaries using the cost method, have been prepared in order that the parent entity's results of operations can be analysed. The following supplementary financial information of PT BANK BTPN Tbk (Parent Entity) (pages 214-222) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk and Subsidiaries.

LAMPIRAN 1.1 | ***APPENDIX 1.1***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/*December* 2023	2022	
ASET			***ASSETS***
Kas	931,530	1,017,618	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	8,613,155	9,520,923	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain:			*Current accounts with other banks*
- Pihak ketiga	496,671	1,547,499	*Third parties -*
- Pihak berelasi	462,061	639,707	*Related parties -*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(158)	(415)	*Less: Allowance for impairment losses*
	958,574	2,186,791	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,623,654	21,617,714	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2,624	2,851	*Accrued interest income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,626,278	21,620,394	
Efek-efek			*Securities*
- Pihak ketiga	8,547,321	11,115,529	*Third parties -*
- Pihak berelasi	-	185,510	*Related parties -*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	150,343	149,871	*Accrued interest income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(799)	(999)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,696,865	11,449,911	
Tagihan derivatif			*Derivative receivables*
- Pihak ketiga	636,924	1,131,664	*Third parties -*
- Pihak berelasi	496,225	615,160	*Related parties -*
	1,133,149	1,746,824	
Tagihan akseptasi	3,289,757	3,069,854	*Acceptance receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8,637)	(4,495)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3,281,120	3,065,359	
Pinjaman yang diberikan:			*Loans:*
- Pihak ketiga	141,400,072	132,208,660	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3,773,364	2,387,393	*Related parties -*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	932,906	739,758	*Accrued interest income*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,404,131)	(2,810,194)	*Less: Allowance for impairment losses*
	142,702,211	132,525,617	
Penyertaan saham			*Investment in shares*
- Pihak ketiga	22	22	*Third parties -*
- Pihak berelasi	1,308,462	1,308,462	*Related parties -*
	1,308,484	1,308,484	
Beban dibayar dimuka	1,136,055	1,412,001	*Prepayments*
Klaim pengembalian pajak	67,337	50,357	*Claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	441,560	384,407	*Deferred tax assets*
Aset tetap	3,958,107	4,017,129	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(2,286,537)	(2,277,391)	*Less: Accumulated depreciation*
	1,671,570	1,739,738	
Aset takberwujud	3,096,432	2,880,272	*Intangible assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(2,278,908)	(2,035,262)	*Less: Accumulated amortization*
	817,524	845,010	
Aset lain-lain	961,327	420,460	*Other assets*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105,403)	(52,338)	*Less: Allowance for impairment losses*
	855,924	368,122	
JUMLAH ASET	**181,241,336**	**189,241,556**	***TOTAL ASSETS***

LAMPIRAN 1.2 | ***APPENDIX 1.2***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/*December* 2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
Liabilitas segera	42,261	20,617	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
- Pihak ketiga	95,571,983	101,737,505	*Third parties -*
- Pihak berelasi	483,776	1,080,514	*Related parties -*
Beban bunga yang masih harus dibayar	179,647	145,624	*Accrued interest expenses*
	96,235,406	102,963,643	
Simpanan dari bank-bank lain			*Deposits from other banks*
- Pihak ketiga	1,257,385	28,875	*Third parties -*
- Pihak berelasi	9,561,059	147,352	*Related parties -*
Beban bunga yang masih harus dibayar	7,483	-	*Accrued interest expenses*
	10,825,927	176,227	
Liabilitas derivatif			*Derivative payables*
- Pihak ketiga	1,014,819	1,323,645	*Third parties -*
- Pihak berelasi	57,285	124,091	*Related parties -*
	1,072,104	1,447,736	
Liabilitas akseptasi			*Acceptance payables*
- Pihak ketiga	2,160,250	2,157,596	*Third parties -*
- Pihak berelasi	163,383	199,232	*Related parties -*
	2,323,633	2,356,828	
Utang pajak:			*Taxes payable:*
- Pajak penghasilan	73,029	-	*Income taxes -*
- Pajak lain-lain	113,988	113,983	*Other taxes -*
	187,017	113,983	
Efek-efek yang diterbitkan:			*Securities issued:*
- Utang obligasi	200,569	200,134	*Bonds payable -*
Beban bunga yang masih harus dibayar	1,514	1,514	*Accrued interest expenses*
	202,083	201,648	
Pinjaman yang diterima			*Borrowings*
- Pihak ketiga	12,682,950	7,563,850	*Third parties -*
- Pihak berelasi	18,569,798	37,257,744	*Related parties -*
Beban transaksi yang belum diamortisasi	(48,251)	(9,988)	*Unamortized transaction costs*
Beban bunga yang masih harus dibayar	151,020	155,802	*Accrued interest expenses*
	31,355,517	44,967,408	
Akrual	411,413	363,201	*Accruals*
Pinjaman subordinasi	3,079,400	3,113,500	*Subordinated loans*
Beban bunga yang masih harus dibayar	10,960	12,078	*Accrued interest expenses*
	3,090,360	3,125,578	
Liabilitas imbalan kerja karyawan:			*Employee benefits liabilities:*
- Imbalan kerja jangka pendek	323,918	278,730	*Short-term employee benefits -*
- Imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya	128,085	43,281	*Post-employment and other long-term employees benefits -*
	452,003	322,011	
Liabilitas sewa	300,198	358,141	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	1,012,594	594,657	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**147,510,516**	**157,011,678**	***TOTAL LIABILITIES***

LAMPIRAN 1.3 ***APPENDIX 1.3***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN ***STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 ***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) *(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	31 Desember/*December*		
	2023	**2022**	
EKUITAS			***SHAREHOLDERS' EQUITY***
Modal saham			*Share capital*
Modal dasar Rp 300.000 terdiri dari: 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham			*Authorised capital of Rp 300,000 consists of: 15,000,000,000 shares with par value of Rp 20 (full amount) per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.149.106.869 saham (31 Desember 2022: 8.149.106.869 saham)	162,982	162,982	*Issued and fully paid-up capital is 8,149,106,869 shares (31 December 2022: 8,149,106,869 shares)*
Tambahan modal disetor	11,167,715	11,167,694	*Additional paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset tetap	950,557	870,785	*Reserve on revaluation of fixed assets*
Cadangan nilai wajar - bersih	2,804	(7,750)	*Fair value reserve – net*
Saldo laba			*Retained earnings*
- Dicadangkan	32,596	32,596	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan	21,408,060	19,997,917	*Unappropriated -*
	21,440,656	20,030,513	
Komponen ekuitas lainnya	260,801	260,801	*Other equity components*
Saham tresuri	(254,695)	(255,147)	*Treasury shares*
JUMLAH EKUITAS	**33,730,820**	**32,229,878**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**181,241,336**	**189,241,556**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

LAMPIRAN 2.1 ***APPENDIX 2.1***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	**2022**	
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA			***INTEREST INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan bunga	13,069,491	10,525,856	*Interest income*
Beban bunga	(6,285,177)	(3,876,891)	*Interest expense*
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	6,784,314	6,648,965	***NET INTEREST INCOME***
Pendapatan operasional lainnya:			***Other operating income:***
Pendapatan operational lainnya	1,861,815	1,499,304	*Other operating income*
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	650,386	780,657	*Net gains on foreign exchange and derivative transactions*
	2,512,201	2,279,961	
Beban operasional lainnya:			***Other operating expenses:***
Beban kepegawaian	(2,394,073)	(2,210,178)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	(2,635,162)	(2,661,322)	*General and administrative expenses*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,151,802)	(895,115)	*Provision for impairment losses*
Beban operasional lain-lain	(534,697)	(452,095)	*Other operating expenses*
	(6,715,734)	(6,218,710)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	2,580,781	2,710,216	***NET OPERATING INCOME***
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan non-operasional	7,154	5,863	*Non-operating income*
Beban non-operasional	(11,332)	(8,162)	*Non-operating expenses*
	(4,178)	(2,299)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2,576,603	2,707,917	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(475,892)	(524,941)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA BERSIH	**2,100,711**	**2,182,976**	***NET INCOME***

LAMPIRAN 2.2 | ***APPENDIX 2.2***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	**2022**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan revaluasi aset tetap	79,772	-	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(91,574)	(43,100)	*Remeasurement from employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	20,146	9,482	*Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss*
	8,344	(33,618)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will be reclassified to profit or loss***
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	13,531	(160,967)	*Unrealized gains on fair value changes of securities measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	(2,977)	35,413	*Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss*
	10,554	(125,554)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	18,898	(159,172)	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	2,119,609	2,023,804	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)			***EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)***
Dasar	261	271	*Basic*
Dilusian	261	271	*Diluted*

LAMPIRAN 3.1 ***APPENDIX 3.1***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	Cadangan revaluasi asset tetap/ *Reserve on revaluation of fixed assets*	Cadangan nilai wajar - bersih/ *Fair value reserve – net*	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya/ *Unappropriated retained earnings*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2023	**162,982**	**11,167,694**	**870,785**	**(7,750)**	**32,596**	**19,997,917**	**260,801**	**(255,147)**	**32,229,878**	***Balance as of 1 January 2023***
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	2,100,711	-	-	2,100,711	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya:										*Other comprehensive income:*
Cadangan revaluasi aset tetap	-	-	79,772	-	-	-	-	-	79,772	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	(91,574)	-	-	(91,574)	*Remeasurement of employee benefit liabilities*
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	13,531	-	-	-	-	13,531	*Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Efek pajak terkait	-	-	-	(2,977)	-	20,146	-	-	17,169	*Related tax effect*
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	79,772	10,554	-	2,029,283	-	-	2,119,609	*Total comprehensive income during the year*
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-	(619,140)	-	-	(619,140)	*Dividend payment*
Penjualan saham treasuri ke publik	-	21	-	-	-	-	-	452	473	*Sales of treasury shares to public*
Saldo tanggal 31 Desember 2023	**162,982**	**11,167,715**	**950,557**	**2,804**	**32,596**	**21,408,060**	**260,801**	**(254,695)**	**33,730,820**	***Balance as of 31 December 2023***

LAMPIRAN 3.2 ***APPENDIX 3.2***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	Cadangan revaluasi 220sset tetap/ *Reserve on revaluation of fixed assets*	Cadangan nilai wajar - bersih/ *Fair value reserve - net*	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya/ *Unappropriated retained earnings*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2022	**162,982**	**11,167,694**	**870,785**	**117,804**	**32,596**	**17,848,559**	**260,801**	**(255,147)**	**30,206,074**	***Balance as of 1 January 2022***
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	2,182,976	-	-	2,182,976	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya:										*Other comprehensive income:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	(43,100)	-	-	(43,100)	*Remeasurement of employee benefits liabilties*
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(160,967)	-	-	-	-	(160,967)	*Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Efek pajak terkait	-	-	-	35,413	-	9,482	-	-	44,895	*Related tax effect*
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	-	(125,554)	-	2,149,358	-	-	2,023,804	*Total comprehensive income during the year*
Saldo tanggal 31 Desember 2022	**162,982**	**11,167,694**	**870,785**	**(7,750)**	**32,596**	**19,997,917**	**260,801**	**(255,147)**	**32,229,878**	***Balance as of 31 December 2022***

LAMPIRAN 4.1 | ***APPENDIX 4.1***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan bunga	12,876,098	10,260,840	*Receipts from interest*
Pembayaran beban bunga	(7,016,441)	(3,782,757)	*Payments of interest expense*
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	1,708,143	2,347,234	*Receipts from other operating income*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	325,612	237,713	*Recovery from written-off loans*
Pembayaran beban kepegawaian	(2,355,655)	(2,266,186)	*Payments of personnel expenses*
Pembayaran beban operasional lainnya	(2,022,598)	(2,069,813)	*Payments of other operating expenses*
Penerimaan lain-lain	7,417	11,564	*Other receipts*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(474,472)	(653,120)	*Payments of corporate income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	3,048,104	4,085,475	***Cash flows before changes in operating assets and liabilities***
(Kenaikan) penurunan aset operasi:			*(Increase) decrease in operating assets:*
Pinjaman yang diberikan	(11,142,017)	(10,762,631)	*Loans*
Tagihan akseptasi	(219,903)	(1,307,292)	*Acceptance receivables*
Tagihan derivatif	613,675	(1,178,125)	*Derivative receivables*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	21,644	10,585	*Obligation due immediately*
Simpanan nasabah	(6,762,260)	4,411,350	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	10,642,217	(3,707,614)	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	(375,632)	945,245	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	(33,195)	1,396,620	*Acceptance payables*
Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi	**(4,207,367)**	**(6,106,387)**	***Net cash flows used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian efek-efek	(3,407,262)	(2,304,354)	*Purchase of securities*
Penjualan efek-efek	5,120,218	6,644,183	*Proceeds from sale of securities*
Perolehan aset tetap	(105,322)	(98,751)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset hak guna	(3,542)	(13,360)	*Acquisition of right-of-use assets*
Perolehan aset takberwujud	(336,537)	(351,395)	*Acquisition of intangible assets*
Hasil dari penjualan aset tetap	3,483	2,223	*Proceeds from sale of fixed assets*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	**1,271,038**	**3,878,546**	***Net cash flows provided from investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran utang obligasi	-	(799,000)	*Payments of securities issued*
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	27,232,047	16,045,873	*Proceeds from borrowings*
Pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima	(40,071,851)	(6,002,777)	*Installment payments and settlement of borrowings*
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(116,558)	(146,455)	*Payments of lease liabilities principals*
Penerimaan dividen	498,815	-	*Dividend received*
Pembayaran dividen	(619,140)	-	*Dividend paid*
Penjualan saham tresuri ke publik	473	-	*Sales of treasury shares to public*
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(13,076,214)**	**9,097,641**	***Net cash flows (used in) provided from financing activities***

LAMPIRAN 4.2 ***APPENDIX 4.2***

PT BANK BTPN Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*		
	2023	**2022**	
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(16,012,543)	6,869,800	***NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(14,462)	3,376	***EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	35,242,663	28,369,487	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR***
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	19,215,658	35,242,663	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			*Cash and cash equivalents at end of the year consists of:*
Kas	931,530	1,017,618	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	8,613,155	9,520,923	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	958,732	2,187,206	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	8,623,654	21,617,714	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	88,587	899,202	*Securities*
	19,215,658	35,242,663	
INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS:			***SUPPLEMENTAL CASH FLOWS INFORMATION:***
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS			***ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS***
Pembelian aset tetap yang masih terhutang	(1,248)	(790)	*Acquisition of fixed assets still unpaid*

Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants
33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00037/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/II/2024

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK BTPN Tbk:

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN Tbk (secara individu disebut "Bank") dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta catatan, yang terdiri dari informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No : 00037/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/II/2024

The Shareholders,
Board of Commissioners and Board of Directors
PT BANK BTPN Tbk:

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT BANK BTPN Tbk (individually referred to as "the Bank") and its subsidiaries (together referred to as "the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2023, the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the consolidated statement of changes in equity, and the consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2023, and notes, comprising material accounting policies information and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year ended 31 December 2023 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Siddharta Widjaja & Rekan - Registered Public Accountants, an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee

License No. 96-6/KM.1/2014

KPMG

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

1. ***Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan (Kerugian Kredit Ekspektasian "KKE") Bank***

   Lihat Catatan 2i.1 (Ikhtisar kebijakan akuntansi yang material – Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan – Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi), Catatan 3 (Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting – Sumber utama ketidakpastian estimasi – Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan – Bank), Catatan 11 (Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – Pinjaman yang diberikan), Catatan 34 (Cadangan kerugian penurunan nilai), dan Catatan 41 (Manajemen risiko – Risiko kredit).

   Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup melaporkan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp 4.618.047 juta. Termasuk pada saldo tersebut sebagian besar berasal dari portofolio pinjaman yang diberikan Bank sebagai entitas bank umum konvensional, yaitu sebesar Rp 3.404.131 juta, mewakili 74% dari total cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

   Kami mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan Bank sebagai hal audit utama karena penentuan atas KKE memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi. Dalam menentukan KKE, Bank mengadopsi model yang kompleks, menggunakan sejumlah asumsi, dan mengandalkan input data internal dan eksternal.

   Pengukuran KKE melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan, termasuk antara lain:

   - Pemilihan model, data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan KKE;
   - Penentuan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atau gagal bayar di dalam klasifikasi pinjaman yang diberikan ke dalam tahap KKE;
   - Pengklasifikasian debitur menjadi kategori risiko kredit (peringkat kredit internal) yang tepat dengan melakukan penilaian kualitatif;
   - Penentuan skenario makroekonomi untuk perkiraan masa depan, penerapan skenario ekonomi dan pembobotan probabilitas tertimbang setiap skenario;

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

1. ***The Bank's allowance for impairment losses of loans (Expected Credit Losses "ECL")***

   Refer to Note 2i.1 (Summary of material accounting policies – Allowance for impairment losses of financial assets – Financial assets carried at amortized cost), Note 3 (Critical accounting estimates and judgments – Key sources of estimation uncertainty – Allowance for impairment losses of financial assets – Bank), Note 11 (Loans and sharia financing receivables – Loans), Note 34 (Provision for impairment losses), and Note 41 (Risk management – Credit risk).

   As of 31 December 2023, the Group reported allowance for impairment losses of loans and sharia financing/receivables of Rp 4,618,047 million. Included in such balances were mainly from loans portfolio of the Bank as a commercial conventional banking entity, amounted to Rp 3,404,131 million, representing 74% of the total allowance for impairment losses of loans and sharia financing/receivables.

   We identified the Bank's allowance for impairment losses of loans as a key audit matter because the determination of ECL requires significant management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty. In determining the ECL, the Bank adopted complex models, using various assumptions, and relied on internal and external data inputs.

   The measurement of ECL involves significant management judgement, including, among others:

   - *Selection of models, data and assumptions used in the ECL calculation;*
   - *Determination of whether or not there was a significant increase in credit risk or a default in the classification of loans into ECL stages;*
   - *Classification of borrowers into appropriate credit risk categories (internal risk ratings) through performing a qualitative assessment;*
   - *Determination of macroeconomic variables for forward-looking measurement, application of economic scenarios and its probability weightings;*

- Proyeksi atas skenario arus kas masa depan ekspektasian sebagai input untuk metode arus kas diskonto ("DCF") untuk pinjaman yang memburuk yang secara individual dianggap signifikan.

- *Projection of expected future cash flow scenarios as an input to the discounted cash flow ("DCF") method for credit-impaired loans which are considered individually significant.*

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan *financial risk modelling specialist* kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam menerapkan beberapa prosedur audit.

Kami memeroleh pemahaman mengenai pengendalian utama dan pendekatan manajemen dalam menghitung KKE untuk pinjaman yang diberikan dan menilai risiko inheren dari salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan tingkat risiko inheren lainnya. Sebagai bagian dari penilaian risiko, kami juga mengevaluasi uji retrospektif (analisis *back-testing*) yang dilakukan manajemen untuk menilai kecukupan KKE.

Kami mengevaluasi dan menguji desain dan implementasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pengukuran KKE untuk pinjaman yang diberikan, termasuk antara lain:

- Penilaian dan persetujuan informasi variabel makroekonomi yang digunakan dalam model KKE;
- Penilaian dan persetujuan penentuan klasifikasi risiko kredit debitur;
- Pengendalian teknologi informasi ("TI") yang bersifat otomatis atas perpindahan data penting dari sistem-sistem sumber ke dalam sistem perhitungan KKE, dan pengendalian TI umum yang relevan untuk merespon risiko TI yang teridentifikasi dan diperlukan untuk mendukung konsistensi operasi dari pengendalian otomatis tersebut;
- Rekonsiliasi dan analisis atas kelengkapan perhitungan KKE terhadap seluruh pinjaman yang diberikan;
- Penilaian dan persetujuan hasil KKE;
- Penilaian dan persetujuan KKE dengan metode DCF untuk pinjaman yang memburuk yang secara individual dianggap signifikan.

Kami melakukan pengujian substantif, yang terutama terdiri dari:

- Mengevaluasi model, asumsi (termasuk variabel makroekonomi) dan input yang digunakan untuk menghitung KKE apakah telah memadai, dan melakukan perhitungan ulang KKE atas sampel yang dipilih,

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our financial risk modelling specialist, who are an integral part of our core audit team in performing several audit procedures.

We obtained understanding of management's key controls and approach in the ECL calculation for loans to assess the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and level of other inherent risks. As part of our risk assessment, we also evaluate retrospective review (back-testing analysis) prepared by the management to assess the sufficiency of ECL.

We evaluated and tested the design and implementation of the internal controls relating to ECL measurement for loans, including, among others:

- *Assessment and approval of macroeconomic variables information used in ECL models;*
- *Assessment and approval of borrower credit risk classification determination;*
- *Information technology ("IT") automated controls over transfer of critical data from source systems to ECL calculation system, and relevant general IT controls that address identified IT risks and are necessary to support the consistent operations of these automated controls;*
- *Reconciliation and analysis on completeness of ECL calculation over all loans;*
- *Assessment and approval of the ECL results;*
- *Assessment and approval of DCF method ECL for credit-impaired loans which are considered individually significant.*

We performed substantive testing, which primarily consisted of:

- *Evaluate models, assumptions (including macroeconomic variables) and input used in ECL calculation as to whether they are appropriate, and reperform the ECL calculation on selected samples;*

- Membandingkan variabel makroekonomi dan asumsi lainnya yang digunakan dengan sumber informasi eksternal maupun internal, dan mengidentifikasi apakah ada indikator yang bertawanan;

- Pengujian atas relevansi dan keandalan (kelengkapan dan akurasi berbasis sampel) dari data yang digunakan dalam perhitungan KKE ke sistem sumber;

- Pengujian ketepatan pengelompokan pinjaman berdasarkan peringkat risiko kredit. Kami melakukan pengecekan akurasi perhitungan jumlah hari tunggakan dan untuk pinjaman yang diberikan dengan sampel berbasis risiko, kami mencelah penilaian manajemen dengan melakukan evaluasi independen untuk menentukan ketepatan penentuan peringkat risiko internal dan tahap KKE;

- Mengevaluasi kewajaran KKE yang menggunakan metode DCF untuk pinjaman yang memburuk yang secara individual dianggap signifikan dengan mempertimbangkan kemungkinan keterjadian arus kas ekspektasian dengan memperhitungkan kondisi lingkungan ekonomi terkini dan prospek kondisi ekonomi masa depan, serta kemampuan bayar debitur;

- Melakukan *stand-back assessment* atas jumlah KKE untuk menentukan apakah KKE memadai dengan mempertimbangkan kualitas pinjaman yang diberikan secara keseluruhan, profil risiko, restrukturisasi piutang yang diberikan kepada peminjam, kondisi makroekonomi dan faktor lainnya;

- Melakukan pengujian sensitivitas dari asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan KKE;

- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. *Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan/piutang syariah – piutang murabahah*

Lihat Catatan 2i.3 (Ikhtisar kebijakan akuntansi yang material – Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan – Piutang murabahah), Catatan 3 (Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting – Sumber utama ketidakpastian estimasi – Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan – Entitas Anak). Catatan 11 (Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – Pembiayaan/piutang syariah), Catatan 34 (Cadangan kerugian penurunan nilai), Catatan 41 (Manajemen risiko – Risiko kredit).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup melaporkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebesar Rp 1.213.542 juta yang dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan/piutang syariah atas portofolio salah satu entitas anaknya, PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Entitas Anak").

- *Compare the macroeconomic variables and other assumptions used with external and internal information source, and identify contradictory indicators;*

- *Test the relevance and reliability (completeness and accuracy on a sample basis) of data used in calculating ECL to the source systems;*

- *Test the appropriateness of loans classification based on stage of credit risks. We check the accuracy of days past due and for a risk-based selection of loans, we reviewed management's assessment by performing independent evaluation to determine appropriateness of internal risk rating and ECL staging determination;*

- *Evaluate the reasonableness of ECL that applies DCF method for credit-impaired loans which are considered individually significant taking into account the feasibility of expected future cash flows considering the recent economic environment and the prospect of future economic conditions, as well as borrower's repayment ability;*

- *Perform stand-back assessment of the ECL amount to determine if the ECL was reasonable by considering the overall loans quality, risk profile, impact of loan restructurings given to debtors, macroeconomic condition and other factors;*

- *Perform sensitivity testing of key assumptions used in the ECL calculation;*

- *Evaluate the adequacy of disclosures in accordance with the prevailing accounting standards.*

2. *Allowance for impairment losses of sharia financing/receivables – murabahah receivables*

Refer to Note 2i.3 (Summary of material accounting policies – Allowance for impairment losses of financial assets – Murabahah receivables), Note 3 (Critical accounting estimates and judgments – Key sources of estimation uncertainty – Allowance for impairment losses of financial assets – Subsidiary), Note 11 (Loans and sharia financing/receivables – Sharia financing/receivables), Note 34 (Provision for impairment losses), Note 41 (Risk management – Credit risk).

As of 31 December 2023, the Group reported allowance for impairment losses of murabahah receivables of Rp 1,213,542 million reported under allowance for impairment losses of sharia financing/receivables account from one of its subsidiaries, PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("the Subsidiary")'s portfolio.

Kami mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebagai hal audit utama karena penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi. Lebih lanjut, dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, manajemen menggunakan sejumlah asumsi dan input data internal.

We identified allowance for impairment losses of murabahah receivables as a key audit matter because the determination of allowance for impairment losses requires significant management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty. In addition, in determining the allowance for impairment losses, the management use various assumptions, and relied on internal data input.

Pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah melibatkan pertimbangan manajemen Entitas Anak yang signifikan, termasuk antara lain:

The measurement of allowance for impairment losses of murabahah receivables involves significant Subsidiary's management judgement, including among others:

- Pemilihan model, data dan asumsi;
- *Selection of models, data and assumptions;*
- Pengklasifikasian debitur ke kategori risiko kredit yang tepat berdasarkan kelompok hari tunggakan;
- *Classification of borrowers into appropriate credit risk categories based on days past due buckets;*
- Penentuan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini, termasuk dampak atas COVID-19.
- *Determination of input parameters, based on historical experience and current economic condition including the impact of COVID-19.*

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

How our audit addressed the Key Audit Matter

Kami bekerja sama dengan *financial risk modelling specialist* kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam menerapkan beberapa prosedur audit.

We work with our financial risk modelling specialist, who are an integral part of our core audit team in performing several audit procedures.

Kami memperoleh pemahaman mengenai pengendalian utama dan pendekatan manajemen Entitas Anak dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah dan menilai risiko inheren dari salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan tingkat risiko inheren lainnya. Sebagai bagian dari penilaian risiko, kami juga mengevaluasi uji retrospektif (analisis *back-testing*) yang dilakukan manajemen untuk menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai.

We obtained an understanding of Subsidiary's management's key controls and approach in the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables to assess the inherent risk of material misstatements by considering the degree of estimation uncertainty and level of other inherent risks. As part of our risk assessment, we also evaluate retrospective review (back-testing analysis) performed by the management to assess the sufficiency of allowance for impairment losses.

Kami mengevaluasi dan menguji desain dan implementasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah, termasuk antara lain:

We evaluated and tested the design and implementation of the internal controls relating to allowance for impairment losses of murabahah receivables, including, among others:

- Penelaahan dan persetujuan model, data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan;
- *Assessment and approval of model, data and assumptions used in allowance calculation;*
- Pengendalian atas kelengkapan dan akurasi parameter input;
- *Controls over completeness and accuracy of the input parameters;*
- Penelaahan atas penentuan klasifikasi risiko kredit debitur;
- *Assessment of borrower credit risk categories determination;*
- Penelaahan dan persetujuan hasil perhitungan cadangan penurunan nilai.
- *Assessment and approval of the calculation of allowance for impairment losses.*

Kami melakukan pengujian substantif yang terutama terdiri dari:

- Mengevaluasi apakah model, asumsi dan input yang digunakan untuk menghitung cadangan penurunan nilai telah memadai;
- Mengevaluasi apakah definisi gagal bayar yang digunakan dalam model sudah konsisten dengan kebijakan akuntansi dan praktik industri;
- Mengevaluasi apakah asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan penurunan nilai telah konsisten dengan titik data, seperti peraturan dan pengalaman historis atau kini;
- Mengevaluasi kewajaran estimasi manajemen atas *management overlay*, termasuk dampaknya terhadap perhitungan cadangan penurunan nilai;
- Pengujian atas relevansi dan keandalan (kelengkapan dan akurasi) dari data yang digunakan dalam perhitungan cadangan kerugian ke sistem sumber;
- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

We performed substantive testing which primarily consisted of:

- *Evaluate models, assumptions and input used in allowance for impairment losses calculation as to whether they are appropriate;*
- *Evaluate whether the definition of default used in the model is consistent with accounting policy and industry practice;*
- *Evaluate whether the assumption used in allowance for impairment losses calculation is consistent with other data points, such regulatory and historical or recent experience;*
- *Evaluate the reasonableness of management's estimate of the management overlay, including its impact on allowance for impairment losses calculation,*
- *Testing the relevance and reliability (completeness and accuracy) of data used in calculating allowance for impairment losses to the source systems;*
- *Evaluate the adequacy of disclosures in accordance with the prevailing accounting standards.*

3. ***Pengendalian dan sistem Teknologi Informasi ("TI")***

Sebagai entitas perbankan, Bank dan salah satu entitas anaknya, PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Entitas Anak"), menggunakan beberapa sistem TI yang saling bergantung satu sama lain dalam kegiatan operasionalnya untuk melakukan pemrosesan dan pencatatan volume transaksi yang tinggi. Pengendalian atas akses dan perubahan pada sistem TI sangat penting untuk pencatatan informasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian secara akurat.

Pengendalian dan sistem TI, karena berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, merupakan hal audit utama karena pendekatan audit kami dapat berbeda secara signifikan tergantung pada efektivitas operasi dari pengendalian TI Bank dan Entitas Anak.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan tim audit TI kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam mengevaluasi risiko terkait lingkungan TI Bank dan Entitas Anak. Tim audit TI kami melakukan pengujian lingkungan atas pengendalian umum TI untuk aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami. Prosedur audit yang dilakukan oleh tim audit TI kami mencakup:

- Menilai tata kelola dan pengendalian level entitas di lingkungan TI Bank dan Entitas Anak, termasuk yang terkait dengan desain, tinjauan, dan kesadaran atas kebijakan TI, dan praktik manajemen risiko TI;

3. ***Information Technology ("IT") systems and controls***

As a banking entity, the Bank and one of its subsidiaries, PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("the Subsidiary"), utilize multiple interdependent IT systems in their operational activities to process and record a high volume of transactions. Controls over access and changes to IT systems are critical for accurately recording financial information and preparing consolidated financial statements.

The IT systems and controls, as they pertain to the recording and reporting of financial transactions, is a key audit matter as our audit approach could significantly differ depending on the effective operation of the Bank and the Subsidiary's IT controls.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our IT audit team who are an integral part of our core audit team, to assess the risks associated with the IT environment of the Bank and the Subsidiary. Our IT audit team performed tests over the general IT controls for IT applications within the scope of our audit. The audit procedures performed by our IT audit team included:

- *Assessing the governance and entity-level controls across the Bank and the Subsidiary's IT environment, including those related to IT policy design, review, and awareness, and IT risk management practices;*

- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada akses ke program dan data, termasuk manajemen kata sandi, manajemen atas akses istimewa, dan pengendalian pemantauan atas aktivitas akun istimewa untuk semua aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;

- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada manajemen perubahan, termasuk permintaan perubahan dan persetujuan pengujian sebelum penerapan perubahan ke lingkungan produksi. Kami juga menguji pemisahan lingkungan TI dan pemisahan tugas antara pengembang dan pelaksana implementasi atas perubahan untuk semua aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;

- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada operasi komputer, termasuk proses perpindahan data secara berkelompok dan pemantauan proses membuat data cadangan untuk semua aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;

- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada pengendalian TI yang bersifat otomatis untuk aplikasi-aplikasi TI tertentu yang termasuk dalam cakupan audit kami.

- *Testing the design and operating effectiveness of controls over access to programs and data, including password management, privileged access management, and monitoring controls for privileged accounts' activities for all IT applications within the scope of our audit;*

- *Testing the design and operating effectiveness of controls over change management, including change request approval and testing approval prior to deployment to the production environment. We also tested the segregation of the IT environments and the segregation of duties between developers and deployers of changes for all IT applications within the scope of our audit;*

- *Testing the design and operating effectiveness of controls over computer operations, including batch process and data backup monitoring, for all IT applications within the scope of our audit;*

- *Testing the design and operating effectiveness of the IT automated controls for certain IT applications within the scope of our audit.*

Hal Lain

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan yang termasuk dalam Lampiran 1 hingga 4, yang terdiri dari laporan posisi keuangan PT BANK BTPN Tbk (entitas induk saja) tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diwajibkan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian dan, menurut opini kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sehubungan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Other Matters

Our audit was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary information included in Appendix 1 to 4, which comprises the statement of financial position of PT BANK BTPN Tbk (parent entity only) as of 31 December 2023, and the related statement of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in equity, and the statement of cash flows for the year then ended, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements and in our opinion is fairly stated, in all material respects, in relation to the consolidated financial statements taken as a whole.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan 2023, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan 2023 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in 2023 annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The 2023 annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan 2023, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

When we read the 2023 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditur yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsuogan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau kelika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and aiming of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Siddharta Widjaja & Rekan

Novie, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 1212

22 Februari 2024

22 February 2024

LAPORAN
TAHUNAN

2023

IMPACTING MILLIONS OF LIVES

bank btpn

SMBC A MEMBER OF SMBC Group

PT BANK BTPN Tbk

Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6
Jakarta 12950

Tel. : +62 21 300 26 200
Faks. : +62 21 300 26 309

btpn.com